BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);

i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 7 Sei A);

I.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Mikro

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi danBangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan(PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

a. Memantapkan atau menata kembali Kelembagaan dan Sistem Operasional yang berkenaan dengan pendapatan daerah.

b. Melakukan peninjauan kembali terhadap perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah, guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

c. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta *cost effectiveness*.

d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.

e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

f. Pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upayameningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

g. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, terutama optimalisasi retribusi

h. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

j. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

k. Meningkatkan koordinasi dengan pusat sebagai upaya untuk menambah dana perimbangan keuangan daerah (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan dan dana yang dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih baru dimekarkan.

l. Mencari alternatif pendanaan atau pinjaman luar Negeri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta efektivitasnya dalam pembiayaan proyek-proyek yang produktif.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerahmenjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga Tahun 2020, prioritas kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan melalui:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melakukan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan kajian penerapan insentif pajak yang tepat untuk mendorong pengusaha untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis daerah.
4. Menjalankan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan sumber penerimaan lain, melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi dan kepastian berusaha di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.

c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal.

d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.

e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Strategi belanja daerah diarahkan untuk mendukung:

a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA);

b. *Dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui keseimbangan pembangunan desa–kota dan SATAM EMAS;

c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Untuk itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2012-2019 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

    1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung dedicated program Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2019.

    2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

    3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung senilai 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;

f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **"PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025"**, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM**.** Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang menjadi perhatian utama dalam mengembangkan nilai tambah produk unggulan daerah ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-

produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Kemudian, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai ”pemain/subjek” dan bukan ”penonton/objek” dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk mengelola data mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh senilai 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 71,05 (di tahun 2016 masih senilai 69,55). Guna mencapai target dari sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

a. Dalam meningkatkan perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:

    1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
    2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
    3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
    4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
    5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
    6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
    7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
    8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
    9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundangundangan kelautan dan perikanan;

10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan.
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanianberkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk sertapeningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

b. Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan akses pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju,

yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. Sejatera menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. Efisien dan Cepat dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Teknologi dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologiuntuk mendorong percepataan pencapaian visi dan misi.

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah;

   Pernyataan misi ini mengandung makna:

   a. Pembangunaan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhaan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.

   b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhaan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor

pertaniaan, perikanaan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutaan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas; Pernyataan misi ini mengandung makna:

   a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangaan potensi daerah serta peningkatan pelayanaan publik yang berkualitas.

   b. Konektifitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauaan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

   Pernyataan misi ini mengandung makna :

   a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung.

   b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;

   Pernyataan misi ini mengandung makna : Kesehataan Masyarakat adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

   Pernyataan misi ini mengandung makna :

   a. Tata Kelola Pemerintahaan yang baik adalah tata kelolapenyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

   b. Pembangunaan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkanpengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

   Pernyataan misi ini mengandung makna :

   a. Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

   b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya

dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka kewenangan daerah juga bertambah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu pendanaan yang mencukupi. Salah satu indikator kemandirian daerah otonom adalah kemampuan untuk membiayai sendiri.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU dalam jangka panjang tidak dapat dilakukan karena penentuannya sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengupayakan penerimaan APBD yang berasal dari PAD dan dengan kewenangan yang milikinya dapat melakukan upaya memaksimalkan pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2021, banyak sekali dana perimbangan yang bisa dioptimalkan daerah melalui DAU, Tugas Pembantuan dan DAK. Untuk itu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dana Perimbangan agar tahun yang akan datang nanti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa memperoleh dana perimbangan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 . Langkah kebijakan belanja daerah ditempuh adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan serta mengupayakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) dari pada belanja tidak langsung.

Dalam membelanjakan anggaran, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya yang sangat penting, yaitu :

1. Pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja didasarkan pada urutan skala prioritas , yaitu pada bidang-bidang
2. yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih cepat. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi perencanaan anggaran. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan efetifitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat pembangunan yang berasaskan manfaat langsung kepada masyarakat .

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaran urusan pilihan terkait kekhasan dan potensi unggulan daerah yang secara nyata ada seperti pertambangan, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Selain itu, pelaksanaan belanja langsung melalui SKPD terus diupayakan supaya dapat memberikan manfaat yang optimal. Kebijakan belanja langsung melalui SKPD diarahkan untuk :

1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
2. Melakukan pemilahan kegiatan antara tugas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, untuk menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah secara keseluruhan.
3. Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kepastian masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai dengan startegi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam Kebijakan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, baik untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan atau untuk menampung kelebihan dana (surplus) dan dikelola berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dari tahun ke tahun kebutuhan anggaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat. Hal tersebut akan memungkinkan mengalami defisit anggaran. Dalam mengelola defisit anggaran, langkah antisipasi yang ditempuh adalah melalui :

1. Membatasi maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan;

2. Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
3. Percairan dari dana cadangan daerah;
4. Penjualan aset daerah dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk mengelola surplus anggaran, kebijakan pembiayaan yang diambil adalah dengan memanfaatkan SiLPA untuk menutupi defisit belanja; membentuk dana cadangan serta penyertaan modal (investasi) daerah pada perusahaan milik daerah atau penyertaan modal lainnya. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian usaha serta mewujudkan anggaran berimbang dalam pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disusun, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 telah dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, mempedomani kebijakan perintah di bidang pelaksanaan otonomi dan keuangan daerah serta menampung aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  Strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perumusan strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Standar Analisa Belanja (SAB)

  Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan.

  SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Usulan anggaran belanja

yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

❖ Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

❖ Standar Biaya

Standar Biaya merupakan komponen lainnya harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, selain SAB dan tolok ukur kinerja. Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja mencakup dua hal, yaitu penyusunan rancangan setiap unit kerja dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Unit Kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang merupakan dokumen penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang antara lain memuat visi dan misi unit kerja, deskripsi tugas pokok dan fungsi unit kerja, rencana program dan kegiatan unit kerja berikut tolok ukur dan target kinerjanya. Kemudian dalam rangka perhitungan Standar Analisa Belanja (SAB), anggaran unit kerja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Sejak kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 sampai saat ini dampaknya mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan sosial ekonomi dan bernegara. Begitu juga bagi Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 masih diprioritaskan untuk memenuhi pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu,perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Beberapa kebijakan nasional terkait penanganan pandemi COVID-19, yang masih berlaku sampai tahun anggaran 2021 , diantaranya :

a. UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;

b. Perpres Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

c. Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

d. Keppres Nomor 9/2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

e. Keppres Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan

f. Inpres Nomor 4/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Pada tingkat pemerintah daerah, beberapa regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI sebagai panduan dalam penanganan dampak pandemi CORONA-19, diantaranya :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada tanggal 14 Maret 2020;

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada tanggal 2 April 2020;

c. SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada tanggal 9 April 2020;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39/2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD, pada tanggal 27 Mei 2020;

e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5/2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 11 Agustus 2020.

Langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang difokuskan untuk kegiatan :

a. penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.

Penyesuaian alokasi anggaran, meliputi perubahan alokasi anggaran pada kelompok; jenis; obyek; dan/atau rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang diprioritaskan untuk :

a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *COVID-19*;

b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah

c. Penyediaan jaring pengamanan sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, meliputi:

a. Pendapatan asli daerah memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro;

b. Pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah, juga meliputi:

a. Penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19; dan

b. Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari transfer dan penggunaanya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara

PENDANAAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI APBD

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga

Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:

a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
c. Belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
d. Belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
e. Belanja modal yang kurang prioritas;
f. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
g. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Hibah Dalam Bentuk Barang

a. Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah yang didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD.
b. Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.
c. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah Dalam bentuk Uang

a. Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman *sosial/social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial.

b. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.

c. Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

PENDANAAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI HIBAH TERMASUK SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA/SEJENIS.

Pemda dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang yang bersumber dari dalam negeri yang digunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan; dan/atau

b. Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah.

Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19 dengan berpedoman pada Pasal 327 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta IPSAP 02 Interpretasi 03, dan Buletin Teknis Nomor 13 Akuntansi Hibah

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19.

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal, pada awalnya telah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Proses penganggaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 tertanggal 30 Desember 2020. Dalam proses pelaksanaan penatausahaan keuangan pada awal tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkendala dalam proses penerbitan SPM Uang Persediaan dan SPM Gaji & Tunjangan Pegawai karena adanya distorsi data dalam tahapan penatausahaan yang hal ini bukan hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja namun juga terjadi pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia yang saat ini menggunakan SIPD.

Distorsi data dalam tahapan penatausahaan pada SIPD terjadi karena:

1. Adanya pemutakhiran referensi atas program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening secara menyeluruh pada tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. perubahan jadwal penganggaran setelah masuk jadwal penatausahaan, sehingga proses pengaliran data dari tahapan penganggaran ke tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.
3. Belum sesuainya profil SKPD pada pengaturan awal SIPD terkait Unit dan Sub Unit Organisasi dalam SIPD, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Validasi DPA, hal ini juga terjadi pada tahapan penatausahaan yang terkait dengan kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) termasuk pada kewenangan penerbitan SPM.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 903/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021 Hal Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ Tanggal 12 Januari 2021 bagi Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan proses penatausahaan diluar SIPD, yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 903/0054/BAKUDA tanggal 5 Februari 2021 Hal Penatausahaan Keuangan Tahun 2021 di Luar SIPD menginstruksikan kepada Kepala OPD untuk menginput Data APBD Tahun Anggaran 2021 pada aplikasi SIMDA. Penginputan Data APBD Tahun Anggaran 2021 ke aplikasi SIMDA juga terkendala karena data Standar Harga Satuan yang ada tercantum di SIPD sebenarnya bukan angka

yang bulat (rupiah) namun ada beberapa yang memiliki sampai dengan satuan beberapa digit dibelakang rupiah (sen) yang apabila langsung diterapkan pada Simda, hasil perkalian antara volume dan harga tidak menghasilkan hasil yang sama (terdapat selisih perkalian antara data di SIPD dan data di SIMDA). Solusi yang diambil adalah dengan menerapkan satuan 1 tahun atau 1 paket untuk menyamakan angka pada DPA yang diinput pada aplikasi SIMDA.

Adapun rincian target penerimaan pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD TA 2021 dan PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2021 senilai Rp2.568.266.259.038,00, sedangkan dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua senilai Rp2.556.700.637.538,00, mengalami penurunan senilai Rp 11.565.621.500,00 atau 0,45%.

Rincian target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA 2021, adalah sebagai berikut :

a). Pada APBD TA 2021 Pendapatan Asli Daerah awalnya senilai Rp749.455.044.038,00, dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua senilai Rp767.219.366.538,00 mengalami kenaikan senilai Rp17.764.322.500,00 atau 2%.

b). Pada APBD TA 2021 Pendapatan Transfer awalnya ditargetkan senilai Rp1.724.311.215.000,00, dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan senilai Rp1.694.981.271.000,00, mengalami penurunan senilai Rp29.329.944.000,00 atau 1,73%.

c). Pada APBD TA 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula ditargetkan senilai Rp94.500.000.000,00, dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan sama senilai Rp94.500.00.000,00.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD TA 2021 dianggarkan senilai Rp3.108.627.167.849,00, sedangkan dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan senilai Rp2.848.626.619.540,00, mengalami penurunan senilai Rp260.000.548.309,00 atau 9,13%.

dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Pada APBD TA 2021 dianggarkan senilai Rp870.356.489.672,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan senilai Rp842.240.282.304,00, turun senilai Rp28.116.207.368,00 atau 3,34%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD TA 2021 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp795.483.568.015,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp718.210.767.861,00, turun senilai Rp77.272.800.154,00 atau 10,76%

3) Belanja Subsidi

Pada APBD TA 2021 dan PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua belanja Subsidi tidak dianggarkan.

4) Belanja Hibah

Pada APBD TA 2021 Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp392.833.845.987,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua senilai Rp303.769.127.465,00, turun Rp89.064.818.522,00 atau 10,76%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Pada APBD TA 2021 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan senilai Rp1.676.701.920,00. pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua senilai Rp2.416.412.360,00, naik Rp739.710.440,00 atau 30,61%

b. Belanja Modal

Pada APBD TA 2021 Belanja Modal dianggarkan senilai Rp641.639.965.233,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp574.963103.965,00, mengalami penurunan senilai Rp66.676.861.268,00 atau 11,60%.

c. Belanja Tak Terduga

Pada APBD TA 2021 Belanja Tak Terduga dianggarkan senilai Rp32.065.928.776,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp20.303.624.601,00, mengalami penurunan senilai Rp11.762.304.175,00 atau 57,93%.

d. Belanja Transfer

1) Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah

Pada APBD TA 2021 dianggarkan senilai Rp335.400.268.246,00. pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan senilai Rp346.986.350.984,00, mengalami kenaikan senilai Rp11.586.082.738,00 atau 3,34%.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Pada APBD TA 2021 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp39.170.400.000,00, pada PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan Kedua dianggarkan senilai Rp39.736.950.000,00, naik senilai Rp566.550.000,00 atau 1,43% .

Sepanjang tahun anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melalui 6 (enam) kali Perubahan APBD 2021, dengan dasar hukum sebagai berikut:

1) APBD TA 2021 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 Desember 2020; Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 Desember 2020

2) Perubahan Pertama APBD TA 2021; Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Mei 2021 Perihal Perubahan Anggaran Karena Penggabungan Perangkat Daerah;

3) Perubahan Kedua APBD TA 2021; Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perihal Mengakomodir Anggaran untuk Kegiatan DAK;

4) Perubahan Ketiga APBD TA 2021; Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perihal Mengakomodir Anggaran Akibat Penggabungan Perangkat Daerah;

5) Perubahan Keempat APBD TA 2021; Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2021 Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perihal Pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan ;

6) Perubahan APBD TA 2021; Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;

7) Perubahan atas Perubahan APBD TA 2021; Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Adapun ringkasan pergeseran dan perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

POSTUR APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		APBD 20201	PERUBAHAN PERTAMA	PERUBAHAN KE 2	PERUBAHAN KE 3	PERUBAHAN KE 4	P-APBD 2021	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN
1	2	3	4					
4	**PENDAPATAN DAERAH**							
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**749.455.044.038.00**	**749.455.044.038.00**	**749.455.044.038.00**	**749.455.044.038.00**	**749.455.044.038.00**	**767.219.366.538.00**	**767.219.366.538.00**
4.1.01	Pajak Daerah	634.727.812.959.00	634.727.812.959.00	634.727.812.959.00	634.727.812.959.00	634.727.812.959.00	649.853.405.459.00	649.853.405.459.00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.094.191.546.00	20.094.191.546.00	20.094.191.546.00	20.094.191.546.00	20.094.191.546.00	20.214.191.546.00	20.214.191.546.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00	5.500.000.000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	89.133.039.533.00	89.133.039.533.00	89.133.039.533.00	89.133.039.533.00	89.133.039.533.00	91.651.769.533.00	91.651.769.533.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.724.311.215.000.00**	**1.724.311.215.000.00**	**1.723.603.407.800.00**	**1.692.509.807.000.00**	**1.692.509.807.000.00**	**1.692.509.807.000.00**	**1.694.981.271.000.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.724.311.215.000.00	1.724.311.215.000.00	1.723.603.407.800.00	1.692.509.807.000.00	1.692.509.807.000.00	1.692.509.807.000.00	1.694.981.271.000.00
	Dana Bagi Hasil	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00	152.890.551.000.00
	Dana Alokasi Umum	970.636.972.000.00	970.636.972.000.00	970.636.972.000.00	939.550.039.000.00	939.550.039.000.00	939.550.039.000.00	939.550.039.000.00
	DAK Fisik	153.661.573.000.00	153.661.573.000.00	152.953.765.800.00	152.947.098.000.00	152.947.098.000.00	152.947.098.000.00	152.947.098.000.00
	DAK Non Fisik	390.683.122.000.00	390.683.122.000.00	390.683.122.000.00	390.683.122.000.00	390.683.122.000.00	390.683.122.000.00	393.154.586.000.00
	DID	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00	56.438.997.000.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**94.500.000.000.00**	**94.500.000.000.00**	**94.500.000.000.00**	**74.858.800.000.00**	**74.858.800.000.00**	**94.500.000.000.00**	**94.500.000.000.00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	94.500.000.000.00	94.500.000.000.00	94.500.000.000.00	74.858.800.000.00	74.858.800.000.00	94.500.000.000.00	94.500.000.000.00
	Jumlah Pendapatan	**2.568.266.259.038.00**	**2.568.266.259.038.00**	**2.567.558.451.838.00**	**2.516.823.651.038.00**	**2.516.823.651.038.00**	**2.554.229.173.538.00**	**2.556.700.637.538.00**
5	**BELANJA**							
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.060.350.605.594.00**	**2.060.350.605.594.00**	**2.033.771.981.237.00**	**1.995.605.750.490.00**	**1.995.748.260.490.00**	**1.864.165.124.990.00**	**1.866.636.589.990.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	870.356.489.672.00	870.356.489.672.00	878.335.929.172.00	855.422.953.062.00	855.422.953.062.00	839.768.817.304.00	842.240.282.304.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.483.568.015.00	795.483.568.015.00	834.891.444.158.00	830.073.007.528.00	830.215.517.528.00	718.210.767.861.00	718.210.767.861.00
5.1.05	Belanja Hibah	392.833.845.987.00	392.833.845.987.00	318.867.905.987.00	308.433.087.980.00	308.433.087.980.00	303.769.127.465.00	303.769.127.465.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.676.701.920.00	1.676.701.920.00	1.676.701.920.00	1.676.701.920.00	1.676.701.920.00	2.416.412.360.00	2.416.412.360.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**641.639.965.233.00**	**641.639.965.233.00**	**667.510.782.390.00**	**654.942.212.337.00**	**654.939.262.337.00**	**574.963.103.965.00**	**574.963.103.965.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.680.475.000.00	1.680.475.000.00	1.680.475.000.00	80.475.000.00	80.475.000.00	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.385.877.749.00	141.385.877.749.00	160.405.400.361.00	155.905.291.651.00	155.902.341.651.00	150.875.356.857.00	150.875.356.857.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.262.648.517.00	136.262.648.517.00	130.466.212.362.00	124.803.039.056.00	124.803.039.056.00	108.005.921.278.00	108.005.921.278.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	346.093.787.567.00	346.093.787.567.00	346.093.787.567.00	345.607.010.684.00	345.607.010.684.00	293.395.316.586.00	293.395.316.586.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.217.176.400.00	16.217.176.400.00	28.864.907.100.00	28.546.395.946.00	28.546.395.946.00	22.686.509.244.00	22.686.509.244.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32.065.928.776.00**	**32.065.928.776.00**	**32.065.928.776.00**	**32.065.928.776.00**	**31.472.571.176.00**	**20.303.624.601.00**	**20.303.624.601.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.065.928.776.00	32.065.928.776.00	32.065.928.776.00	32.065.928.776.00	31.472.571.176.00	20.303.624.601.00	20.303.624.601.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**374.570.668.246.00**	**374.570.668.246.00**	**374.570.668.246.00**	**374.570.668.246.00**	**374.570.668.246.00**	**386.723.300.984.00**	**386.723.300.984.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	335.400.268.246.00	335.400.268.246.00	335.400.268.246.00	335.400.268.246.00	335.400.268.246.00	346.986.350.984.00	346.986.350.984.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.170.400.000.00	39.170.400.000.00	39.170.400.000.00	39.170.400.000.00	39.170.400.000.00	39.736.950.000.00	39.736.950.000.00
	Jumlah Belanja	**3.108.627.167.849.00**	**3.108.627.167.849.00**	**3.107.919.360.649.00**	**3.057.184.559.849.00**	**3.056.730.762.249.00**	**2.846.155.154.540.00**	**2.848.626.619.540.00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(540.360.908.811.00)**	**(540.360.908.811.00)**	**(540.360.908.811.00)**	**(540.360.908.811.00)**	**(539.907.111.211.00)**	**(291.925.981.002.00)**	**(291.925.982.002.00)**
6	**PEMBIAYAAN**							
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**294.832.738.603.00**	**294.832.738.603.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	295.064.908.811.00	295.064.908.811.00	295.064.908.811.00	295.064.908.811.00	295.064.908.811.00	49.536.738.603.00	49.536.738.603.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00	245.296.000.000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**294.832.738.603.00**	**294.832.738.603.00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	-	**453.797.600.00**	**2.906.757.600.00**	**2.906.757.600.00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					453.797.600.00	2.906.757.600.00	2.906.757.600.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	**453.797.600.00**	**2.906.757.600.00**	**2.906.757.600.00**
	Pembiayaan Netto	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**540.360.908.811.00**	**539.907.111.211.00**	**291.925.981.003.00**	**291.925.981.003.00**
	SilPA	-	-	-	-	-	**1.00**	**(999.00)**

Untuk mendukung pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, sepanjang tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan anggaran untuk penangan pandemi COVID-19 yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2021 senilai Rp153.231.377.182,32, terdiri dari:

a. Bidang Kesehatan senilai Rp40.872.401.596,00;

b. Bidang Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi senilai Rp34.760.882.302,00

c. Bidang Bantuan *Social Safety Net*/ Jaring Pengamanan Sosial senilai Rp1.559.216.000,00

I.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan satuan kerjanya masing-masing yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasi oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, entitas pelaporan juga

menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sehingga ketujuh jenis laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat SKPD dan konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Pada awal tahun 2021 jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkurang dari 32 SKPD menjadi 27 SKPD. Dasar pembentukan organisasi dan tata kerja SKPD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
10.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Badan Penghubung Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.4 Kebijakan Akuntansi

BASIS AKUNTANSI, PENGUKURAN, DAN PENGAKUAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar (Kas dan setara kas, Piutang, dan Persediaan), Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Dana Cadangan.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.

2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.

4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah melalui OPD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)

	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

c. Pengukuran

Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

1) merupakan hak pemerintah,

2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan

3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian kas dan setara kas

2) Kebijakan manajemen setara kas

3) Informasi lainnya yang dianggap penting

f. Saldo Normal

Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurang kas dan setara kas dicatat disebelah kredit.

2. PERSEDIAAN

a. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, dst.

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

c. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

   a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

   b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan
   Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan ATK cetakan di Dinas Pendapatan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya pembelian ATK untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan metode pendekatan beban yaitu setiap transaksi atas rekening berikut akan dicatat langsung sebagai beban persediaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan melakukan penyesuaian Beban Persediaan Terpakai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan tersisa. Pada awal periode terhadap saldo Persediaan di Neraca dilakukan jurnal Balik dengan membalik persedian tersebut dengan Beban Persediaan Terpakai.

Setiap transaksi atas rekening Belanja pada rekening yang berkode 5.2.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 9.1.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

d. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO (*first in first out*)/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)/Metode Rata-Rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

e. Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metode periodik dan perpetual.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memperbarui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/Puskesmas, Persediaan asphal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persediaan Cetakan Blangko di Badan Keuangan Daerah. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat OPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode periodik dalam metode pencatatan persediaannya.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
2. Penjelasan rincian persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. INVESTASI

a. Pengertian

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek
   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
   Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.
   Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
2) Investasi Jangka Panjang
   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu
   a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
      Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
   b) Investasi Jangka Panjang Permanen.
      Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI

	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir/KUPEM
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN
	kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memungkinkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang

1) Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi non permanen:

a). Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.

b). Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c). Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d). Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value).*

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang *(aging schedule)* berdasarkan jatuh tempo angsuran.

a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan

prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).

b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).

c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).

d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan e*xecuting agency* atau *chanelling agency*. Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah senilai Nilai Investasi awal dan bukan senilai Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan OPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun ke penerima

dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuatkan daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e. Penilaian

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.

4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.

5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.

6) Perubahan pos investasi

4. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

a) Umum

1) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;

2) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;

3) Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;

4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;

5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;

6) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;

7) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

b) Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

c) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

1) Kriteria kualitas dana bergulir;
2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
3) Pencatatan akuntansi;
4) Pelaporan;
5) Penghapusan dana bergulir; dan
6) Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

d) Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

1) Kriteria kualitas dana bergulir dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
   1) Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
   2) Upaya penagihan.

b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
   1) Kualitas Lancar;
   2) Kualitas Kurang Lancar;
   3) Kualitas Diragukan; dan
   4) Kualitas Macet.

c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
   1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
      a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
         i. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
         ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
         iii. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
         iv. Penerima dana kooperatif.
      b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
         (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
         (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana mengalami kesulitan/bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

2) Dana bergulir dengan *executing agency:*

1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

i. Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura; dan Lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau,

ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

2. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

i. LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

ii. LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

iii. LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan/atau

iv. LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*:

a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

i. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

i. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

ii. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

i. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

ii. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

i. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

ii. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

iii. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

iv. Penerima dana mengalami bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

v. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*). Tata cara penagihan dana bergulir diatur seusai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

2) Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir.

Besaran penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a) Kualitas Lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;

b) Kualitas Kurang Lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar.

c) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas Macet, senilai 100% (serratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3) Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-OPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxxxx	9.xx.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih *)	xxx	
		Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		xxx

*) Beban penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

**) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun Dana.

4) Berikut disajikan ilustrasi pelaporan Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional (LO), Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Neraca:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PPKD ….. Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx	
URAIAN	**20XX**
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	**xxx**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**xxx**
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-Lain PAD yang Sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	**xxx**
BEBAN	**xxx**
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Barang Jasa	xxx

Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	**xxx**
SURPLUS (DEFISIT) LO	**xxx**

5) Penghapusan

a) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

1) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir; dan

2) Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

b) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1) Dana Bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau

2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau

3) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau

4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari penjabat berwenang; dan/atau

5) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari penjabat berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau

6) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

7) Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:

a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang; dan/atau

b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang; dan/atau

8) Dokumen-dokumen sebagi dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang; dan atau

9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

c) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir dan penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

e) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara extrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.

2) Penghapustagihan sebagi suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas dalam menghadapi tugas di masa depan.

3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, dijamin lelang.

6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain.

7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

g) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penghapus tagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup extrakomptabel dan tidak melakukan

penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. ASET TETAP

a) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, alat olahraga, rambu-rambu dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai..

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	**Rp 0,00**
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas:**	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	**Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:**	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**Rp 0,00**

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis. Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

1. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
2. Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
3. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual. Berikut adalah jenis B ukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

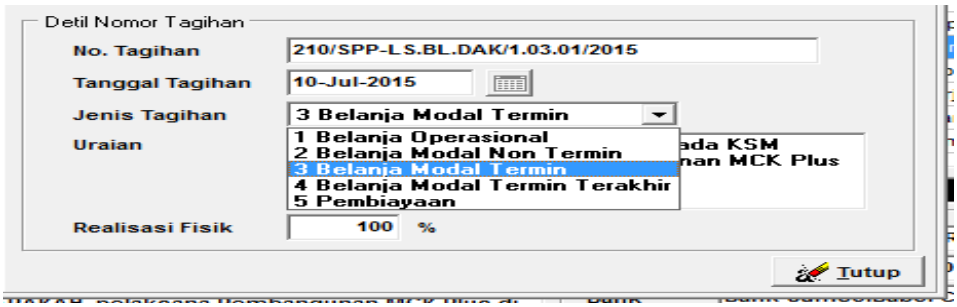

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31 bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai perolehan atas aset tersebut.

Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2017.

d) Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	**Rp 0,00**
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas:**	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	**Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:**	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**Rp 0,00**

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

a) Biaya Perencanaan

b) Biaya Lelang

c) Biaya Persiapan Tempat

d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang

e) Biaya Pemasangan

f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi senilai Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan Gedung B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi senilai rata-rata pada masing-masing aset tersebut senilai Rp50.000.000 (Rp100.000.000/2 aset) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A senilai Rp2.050.000.000 (Rp2.000.000.000 +Rp50.000.000) dan Aset B menjadi senilai Rp3.050.000 (Rp3.000.000.000+Rp50.000.000)

2) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah senilai Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A (Rp2.000.000.000/Rp5.000.000.000) x Rp100.000.000= Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.040.000.000

Sedangkan Aset B (Rp3.000.000.000/Rp5.000.000.000) x Rp100.000.000= Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

11) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

12) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

13) Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA OVERHAUL DAN RENOVASI

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi **tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan** untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012 dengan nilai perolehan senilai Rp100.000.000 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan	:	Tahun 2012
Umur Manfaat	:	50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016	:	46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur	:	5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun	:	51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama **4 Tahun**.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecetan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

14) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

e) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	**3**	**2**	**01**		**Alat Besar**	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	**3**	**2**	**02**		**Alat Angkutan**	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	**3**	**2**	**03**		**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	**3**	**2**	**04**		**Alat Pertanian**	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	**3**	**2**	**05**		**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	**3**	**2**	**06**		**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	**3**	**2**	**07**		**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	**3**	**2**	**08**		**Alat Laboratorium**	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory*	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Isntrumentasi	8
1	**3**	**2**	**09**		**Alat Persenjataan**	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	**3**	**2**	**10**		**Komputer**	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	**3**	**2**	**11**		**Alat Eksplorasi**	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	3
1	**3**	**2**	**12**		**Alat Pengeboran**	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	39	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	**3**	**2**	**13**		**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	42	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	**3**	**2**	**14**		**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	**3**	**2**	**15**		**Alat Keselamatan Kerja**	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	2
1	**3**	**2**	**16**		**Alat Peraga**	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	**3**	**2**	**17**		**Peralatan Proses/Produksi**	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7
1	**3**	**2**	**18**		**Rambu-Rambu**	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	**3**	**2**	**19**		**Peralatan Olahraga**	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	**3**	**3**	**01**		**Bangunan Gedung**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**		**Monumen**	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**		**Bangunan Menara**	
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	**3**	**3**	**04**		**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	**3**	**4**	**01**		**Jalan dan Jembatan**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	02	02	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**		**Bangunan Air**	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	**3**	**4**	**03**		**Instalasi**	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**4**	**04**		**Jaringan**	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang diigunakan adalah metode garis lurus *(straight line)* tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester.

Untuk menghitung penyusutan maka harus dilakukan Mapping Kode Rekening Aset Tetap antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan seperti pada gambar berikut:

Nama Aset di SIMDA BMD		LEVEL 3 SIMDA BMD		LEVEL 4 SIMDA KEU – BELANJA MODAL	
Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.
1.1.11.4.1	Gedung Kantor	1.1.11	Tanah Untuk Bangunan	5.2.3.11	BM Tanah Untuk Bangunan Gedung
2.3.1.1.1	Sedan	2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.2.3.17	BM Pengadaan Alat Angkutan Bermotor
2.6.2.1.6	Kursi kayu	2.6.2	Alat Rumah Tangga	5.2.3.28	BM Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.13.1.3.1	Jalan Kabupaten Kelas III	4.13.1	Jalan	5.2.3.29	BM Pengadaan Jalan

Penyelarasan kode rekening aset tetap antara Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan melalui mekanisme *mapping* dokumen rekening. *Mapping* kode rekening, nama rekening dan nilai harus dilakukan sebelum dilakukan proses *export* data penyusutan dari Aplikasi SIMDA BMD ke Aplikasi SIMDA Keuangan.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

a. Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah:

1) Kode kepemilikan,

2) Kode rekening aset,

3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset,

4) Nilai pembelian/perolehan,

5) Asal usul pembelian,

6) Kondisi, dan

7) Masa manfaat

b. Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,

2) Nomor Dokumen kapitalisasi,

3) Nilai Kapitalisasi,

4) Masa Manfaat tambahan,

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

c. Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,

2) Nomor Dokumen kapitalisasi,

3) Nilai koreksi,

4) Masa Manfaat koreksi,

Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d. Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

e. Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungan nya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
UPB : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2016	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000,00			650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000,00	43	7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	**6.000.000.000**
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	**650.000.000**
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	**770.000.000**
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	

		5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	**523 Bulan**
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya senilai Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing senilai Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

Bidang : Setwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2017	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6,100,000,000.00			770,000,000.00	56,557,659.00	54,836,489.00	881,394,148.00	5,218,605,852.00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6,100,000,000.00	47	7	770,000,000.00	56,557,659.00	54,836,489.00	881,394,148.00	5,218,605,852.00

A	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	**6.000.000.000**
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan

	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	**650.000.000**
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	**770.000.000**
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	**5.230.000.000**
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	**523 Bulan**
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan
B	**GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)**	
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitaisasi **(A1+B1)**	6.100.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) **A8 + B1-Rp20.000.000**	**5.310.000.000**
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=**A3**)	**581**
	- Masa 31 Desember 2016 **sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN**	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi **(B4)**	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (**B5/B6**)	9.139.415
8	Penyusutan Tahun 2017	**11.394.148**
	- Semester I	56.557.659
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp20.000.000	
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x **B 7 (6 Bulan x Rp9.139.415)**	54.836.489
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 **(A7 + B8)**	**881.394.148**
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	**5.218.605.852**
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 **(A9+B4-12**	571

	Bulan)	
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi Rp9.139.415.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

f. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah),
2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan),
3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya,
4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable*.

g. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

1. Laporan *Intracomptable* = Laporan AT + Laporan Aset lainnya
2. Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yg tidak disusutkan (AE)

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak

atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan.

Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2007	300.000	Extra
600.000	2009	500.000	Intra

Khusus *ekstrakomptable* penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh SKPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang *dapat* disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

i. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

f) Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah senilai nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

g) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a) Penambahan;
   b) Pelepasan;
   c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d) Mutasi aset tetap lainnya.
3) Informasi penyusutan, meliputi:
   1) Nilai penyusutan;
   2) Metode penyusutan yang digunakan;
   3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

a) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

b) Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c) Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
4) Pembayaran atas aset tersebut belum 100% dan jenis bukti tagihan yang dibuat saat pembuatan SPP LS oleh PPTK dan Bendahara masih dengan kategori Belanja Modal Termin.

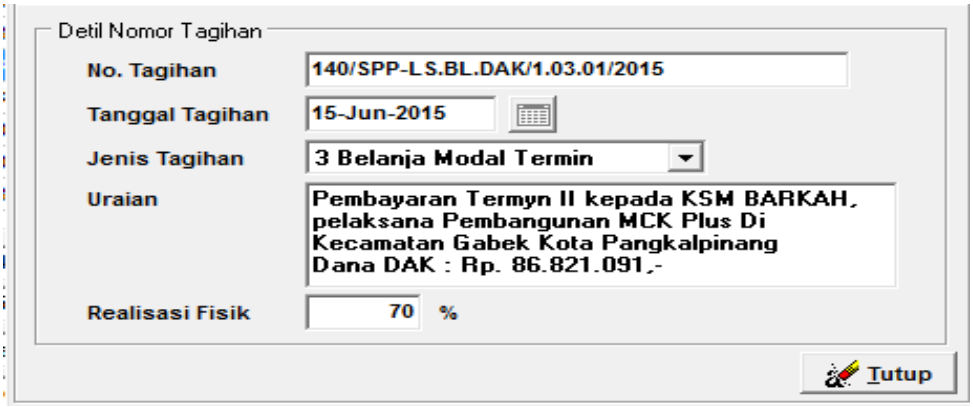

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. dan

b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

c. Pilihan jenis tagihan sudah memilih Belanja Modal Termin Terakhir atau Belanja Modal Non Termin.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan, irigasi, dan jaringan. aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (*DED= Detail Engineering Design)* yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas *DED* tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.

d) Pengukuran

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan

   c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

   Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.

   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.

   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.

   d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.

   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

   Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

   a. asuransi;

   b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

   c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metodealokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

   a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

   b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

   c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

   d) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

   e) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

   f) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

   g) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

   h) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

   i) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

   j) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama

pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

k) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

l) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e) Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d. Uang muka kerja yang diberikan;

e. Retensi.

7. ASET LAINNYA

a) Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b) Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	*Goodwill*
	Lisensi dan *Frenchise*
	Hak Cipta
Paten	
Aset Tidak Berwujud Lainnya	

c) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang
   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
2) Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada

pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

3) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *Software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangkapanjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

(1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas. dan

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i). Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d) Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

(c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *Software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

f) Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx
Kontruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	Xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		xx
Jumlah Dana Cadangan		xxx
ASET LAINNYA		

Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	xx
Tuntutan Perbendaharaan	Xxx	xx
Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	xx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	xx
Aset Tak Berwujud	Xxx	xx
Aset Lain-lain	Xxx	xx
Jumlah Aset Lainnya	Xxx	xxx

g) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Besaran dan rincian aset lainnya.
2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO).
4) Informasi lainnya yang penting.

8. DANA CADANGAN

a) Pengertian

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
d. sumber dana cadangan. dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b) Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

a. Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
b. Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olah raga
c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c) Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d) Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah senilai Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

1) merupakan hak pemerintah,

2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan

3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

e) Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan.
2) Tujuan pembentukan dana cadangan.
3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
5) Sumber dana cadangan. dan
6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

9. KEWAJIBAN

a) Definisi

Kewajiban atau Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai:

1) Kewajiban Jangka Pendek
2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban di klasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; atau

1) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau
2) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntansi;

Semua kewajiban selain itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :

1) Utang Bunga;
2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

3) Utang Beban; dan
4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek di OPD terdiri atas :

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
2) Pendapatan diterima dimuka;
3) Utang Beban ; dan
4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri dari atas :

1) Utang Dalam Negeri;
2) Utang Luar Negeri; dan
3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Lancar antara lain terdiri dari: bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, dan utang kepada pihak ketiga.

1) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan kecuali jika:
   a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
2) Utang belanja adalah kewajiban membayar kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya.
3) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
4) Kewajiban kontinjensi adalah:
   a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
   b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
      1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
      2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
5) Kewajiban Jangka Panjang antara lain terdiri dari: Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pemerintah Pusat,

Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan.

b) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya atau ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
Dalam kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
Merupakan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Bagian lancar utang jangka

panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan senilai bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek diakui saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

a) Belanja operasional untuk belanja pegawai dan barang jasa dengan kode 5.1.1.xxx, 5.1.2xxx, 5,2,1xxx dan 5.2.2xxx. Apabila dipilih maka saat itu

juga akan ada pengakuan Utang seperti Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa dan lain-lain

b) Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.

c) Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

d) Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang tersebut akan berkurang tereliminasi. Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

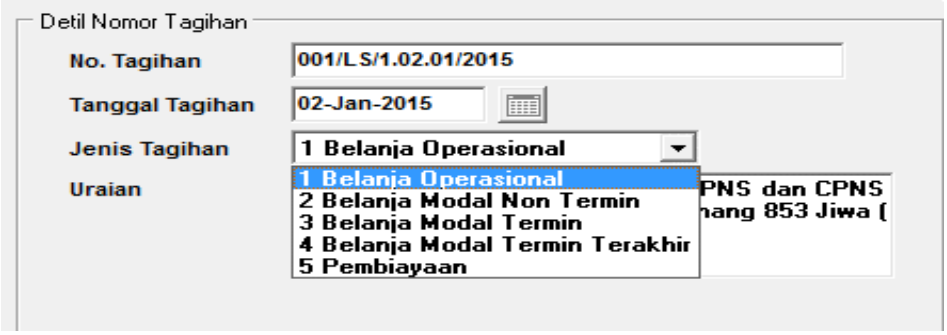

c) Pengukuran

a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

b. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

c. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

d. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

1. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

e. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

g. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

h. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

i. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

j. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face*

value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa senilai nilai pari, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Utang Pemerintah Provinsi berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

d) Pengungkapan

Kewjiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    a. Pengurangan pinjaman;
    b. Modifikasi persyaratan utang;
    c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
    a. Perlakuan biaya pinjaman;

b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

e) Saldo Normal

Saldo normal rekening Kewajiban adalah di sebelah Kredit, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

10. PIUTANG

a) Pengertian

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b) Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan
   Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

   a) Piutang Pajak Daerah

   b) Piutang Retribusi.

   c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

a) Pemberian Pinjaman.

b) Penjualan.

c) Kemitraan.

d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

a) Piutang Dana Bagi Hasil.

b) Piutang Dana Alokasi Umum.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus.

d) Piutang Transfer Lainnya.

e) Piutang Transfer Antar Daerah.

f) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Seiring dengan adanya SKTM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan-LO.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Lainnya	Piutang Pendapatan Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

c). Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:

a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau

b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b) Jumlah piutang dapat diukur;

c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi transfer dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Kementerian Keuangan belum melakukan pembayaran/transfer. Jumlah piutang yang diakui adalah senilai jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan.
Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya,

sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.

b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d). Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding;
c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
d) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah senilai nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan
   Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.
c) Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang *dipersyaratkan* dalam naskah perjanjian kemitraan.
d) Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
b) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU.
c) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Akun piutang merupakan salah satu akun yang akan dilakukan perhitungan kembali sebagai dasar penyusunan *restatement* Laporan Keuangan. Khusus untuk penyusunan restatement Laporan Keuangan Tahun 2015 nilai piutang dan akumulasi penyisihan piutang yang digunakan dalam penyusunan Neraca Tahun 2014 didasarkan atas saldo piutang per 31 Desember 2014 yang telah diperhitungkan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang (penyisihan piutang tak tertagih).

Pemberhentian Pengakuan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e). Penilaian

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar.

b) Kualitas Piutang Kurang Lancar.

c) Kualitas Piutang Diragukan.

d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*). dan

b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak likuid; dan/atau

4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeur*e).

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.

2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.

3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.

4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

b) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

11. PIUTANG TAK TERTAGIH

a) Definisi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
	Lancar	0.5 %
	Kurang Lancar	10 %
	Diragukan	50 %
	Macet	100 %

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:

1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:

1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan

4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

b) Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan minsalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12.PENDAPATAN

a) Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b) Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b) Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

c) Pengakuan dan Pencatatan

a) Pendapatan LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
   2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

   Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

   Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

   1) **Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas**; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan–LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assestment.*

   2) **Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**; dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan **daerah** tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assestment*.
   3) **Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan.

b) Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

   a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b) Diterima oleh OPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

b) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

c) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

d) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

e) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

f) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

d) Pengukuran

a) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.

b) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

c) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja. Misalnya Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat senilai kotornya sedangkan biaya pajak penghasilan dan administrasi bank harus dianggarkan dalam rekening belanja jasa transaksi keuangan.

d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

e) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

f) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

g) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e) Penyajian

a) Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

b) Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

f) Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Catatan Atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

a) Rincian pendapatan menurut jenis Pendapatan;
b) Persentase Kelompok/Jenis Pendapatan terhadap Anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
c) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend Pendapatan.
d) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
e) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

f) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
g) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. PEMBIAYAAN

1) Definisi

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
b) Pencairan dana cadangan;
c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d) Penerimaan pinjaman daerah;
e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f) Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk:

a) Pembentukan dana cadangan;

b) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;

c) Pembayaran pokok utang; dan

d) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu dan atau selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2) Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain:
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
2) Pencairan Dana Cadangan;
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4) Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

6) Penerimaan Kembali Piutang
7) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
c. Pembayaran Pokok Utang; dan
d. Pemberian Pinjaman Daerah.
e. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

3) Pengakuan

a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

4) Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5) Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6) Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran.

b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7) Saldo Normal

Saldo normal rekening Anggaran Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan adalah di sebelah Kredit untuk Penerimaan Pembiayaan dan sebelah Debit untuk Pengeluaran Pembiayaan, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

14. BEBAN DAN BELANJA

Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5
d	Rekening Beban di Laporan LO berdasarkan Mapping Akrual dari Akun Kode 5 di Mapping ke kode 9	Untuk menghasilkan LRA tidak diperlukan mapping karena kode anggaran dan LRA sama kode 5
e.	Diakui saat Bukti Tagihan/Bukti Pengeluaran dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saat pembuatan SPP LS atau SPJ GU	Diakui saat SP2D dikeluarkan

Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pengelompokkan Belanja

Klasifikasi ekonomi untuk pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c) Klasifikasi Beban Dan Belanja

Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/ kota/ kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	OPD
Beban Barang dan Jasa	OPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&OPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	OPD
Beban Penyisihan Piutang	OPD
Beban Lain-Lain	OPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

1) BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi

a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.
d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang (sesuai dengan Permendagri Nomor 32 dan 39)
i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas

2) BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

3) BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

4) BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	PPKD
Belanja bantuan social	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja barang dan jasa	OPD
Belanja modal	OPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	

Belanja Pegawai	OPD
Belanja Barang	OPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/OPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/OPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	OPD
Belanja Peralatan dan Mesin	OPD
Belanja Gedung dan Bangunan	OPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	OPD
Belanja Aset tetap lainnya	OPD
Belanja Aset Lainnya	OPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) *Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan OPD.*

Pengakuan

a) Beban

Kebijakan Pengakuan Beban adalah sebagai berikut:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

b) Belanja

Kebijakan pengakuan belanja sebagai berikut:

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Contohnya adalah SP2D LS
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Contohnya adalah SP2D GU dan GU NIHIL.
3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment)* yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah

pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Pengakuan Beban Operasi

a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuatkan bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban

e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional

a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

Pengakuan Beban Luar Biasa

a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

PENCATATAN

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu:

a) Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

PENGUKURAN

a) Beban

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai:

1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat senilai nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

b) Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat senilai nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

PENILAIAN

a) Beban

Beban dinilai senilai akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

b) Belanja

Belanja dinilai senilai nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

PENGUNGKAPAN

a) Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

1) Rincian beban per OPD.
2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) Rincian belanja per OPD.
2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15. BEBAN DAN BELANJA

a) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
b) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

b) Klarifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain:

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
c) Transfer Pemerintah Provinsi.
d) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan Pemerintah Provinsi sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara

c) Pengakuan

a) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.

b) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

d) Pengukuran

a) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

e) Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

a) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukurdan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

b) Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f) Pengungkapan

a) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;

4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

1) Transfer keluar harus dirinci;

2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

1) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;

3) informasi lainnya yang diangggap perlu.

16.NERACA

a). Definisi

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

a) Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*)

Terdapat ketidakpastian dalam kegiatan pemerintahan, mengakibatkan beberapa akun dalam akuntansi tidak dapat diukur dengan tepat tetapi dapat diestimasi, seperti dalam piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar aset tetap dan umur manfaat dari aset tetap.

b) Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Kesalahan dalam laporan keuangan dapat bersifat material yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan kesalahan non material. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut sebaiknya dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan.

c) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*)

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dan menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas dalam laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka alasan utama yang mendasari perlunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan kembali laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor perubahan kebijakan akuntansi dimana terjadi perubahan basis akuntansi yang sangat mendasar dari basis cash menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual (*accrual basis*) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

a) Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;

b) Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka.

c) Akun persediaan, perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;

d) Investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

e) Aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

f) Aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

g) Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

h) Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;

i) Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

a) Melakukan Identifikasi Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Perlakuan Akuntansi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai contoh Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap dan Kebijakan akuntansi *cost method* atau *equity method* untuk penyertaan modal.
b) Melakukan perhitungan ulang atas nilai akun akibat perbedaan kebijakan dan tetapkan estimasi yang digunakan masing masing akun yang berbeda kebijakan dan perlakuan akuntansinya.
c) Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi.
d) Menyiapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.
e) Buat perbandingan antara Laporan Keuangan audited dengan Laporan Keuangan hasil *restatement*. Laporan keuangan *audited* dengan laporan keuangan hasil *restatement* disajikan berdampingan agar terlihat perbandingannya dan dijelaskan pada CALK perbandingan tersebut.
f) Buat pengungkapan terkait dengan *restatement*. Catatan atas laporan keuangan hasil *restatement* perlu dibuat sebagai dasar penyampaian ke BPK.

17. KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

a) Definisi

a. Kesalahan mendasar (*fundamental error*).

Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.

b. Koreksi

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diuangkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ada beberapa penyebab bisa terjadi kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

c. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

b) Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c) Pengakuan

a) Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda,yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b) Koreksi – Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

c) Koreksi – Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/PerGub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

d) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

d) Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya :

a) Perubahan Standar Akuntansi

Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

b) Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

c) Perubahan Entitas Akuntansi

Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya.

BAB II
PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

II.1 PENJELASAN UMUM LRA

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Transfer;
d) Surplus/Defisit-LRA
e) Pembiayaan;
f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

II.2 PENJELASAN PER POS-POS LRA

II.2.1. PENDAPATAN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

II.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi PAD pada tahun 2021 senilai Rp895.763.128.991,25 atau 116,75% dari yang dianggarkan senilai Rp767.219.366.538,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp683.432.674.809,81, terjadi kenaikan senilai Rp212.330.454.181,44 atau 31,07%.

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	649,853,405,459.00	813,809,911,776.58	125.23%	613,615,822,923.72
Pendapatan Retribusi Daerah	20,214,191,546.00	5,945,620,845.00	29.41%	6,513,383,818.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,500,000,000.00	5,714,380,624.89	103.90%	5,471,185,541.79
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91,651,769,533.00	70,293,215,744.78	76.70%	57,832,282,526.30
Jumlah	**767,219,366,538.00**	**895,763,128,991.25**	**116.75%**	**683,432,674,809.81**

II.2.1.1.1 PAJAK DAERAH

Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021(Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
PAJAK DAERAH				
Pajak Kendaraan Bermotor (R2/R4)	218,580,403,900.00	260,143,737,557.00	119.02%	226,373,483,345.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106,313,383,000.00	190,251,637,100.00	178.95%	92,523,064,703.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	213,809,780,072.00	250,412,440,060.00	117.12%	180,409,757,151.00
Pajak Air Permukaan	13,496,247,900.00	15,819,853,246.58	117.22%	13,925,472,980.72
Pajak Rokok	97,653,590,587.00	97,182,243,813.00	99.52%	100,384,044,744.00
Jumlah	**649,853,405,459.00**	**813,809,911,776.58**	**125.23%**	**613,615,822,923.72**

Secara keseluruhan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2021 mencapai 125,23% atau Rp813.809.911.776,58 dari target yang dianggarkan senilai Rp649.853.405.459,00, dengan rincian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp260.143.737.557,00 atau 119,02%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp190.251.637.100,00 atau 178,95%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) senilai Rp250.412.440.060,00 atau 117,12%, Pajak Air Permukaan (PAP) yang realisasinya senilai Rp15.819.853.246,58 atau 117,22%, dan Pajak Rokok senilai Rp97.182.243.813,00 atau 99,52%. Dibandingkan realisasi Pajak Daerah tahun 2020 senilai Rp613.615.822.923,72 terjadi kenaikan senilai Rp 200.194.088.852,86 atau 32,62%.

Untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui transaksi Non Tunai menetapkan rekening penampung mengakomodir transaksi dimaksud ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 sementara penetapan rekening penampung untuk Tahun Anggaran 2021 ditetapkan melalui putusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, untuk meningkatkan realisasi pajak daerah, badan keuangan daerah melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) SAMSAT mengintensifkan frekuensi kegiatan Samsat Setempoh. Samsat Setempoh ini merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak (WP) yang kesulitan membayar pajak karena terkendala jam kerja yang hanya sampai dengan pukul 16.00 dan kondisi jarak yang jauh dari rumah wajib pajak ke kantor Samsat. Samsat Setempoh ini kadang-kadang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu (hari libur) untuk memudahkan WP dalam mengakses pembayaran pajak. dan adanya program pemutihan atas Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

II.2.1.1.2. RETRIBUSI DAERAH

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
RETRIBUSI DAERAH				
Retribusi Jasa Umum	**3.197.402.000.00**	**344.625.000.00**	**10.78%**	**2.317.235.000.00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		306.860.000.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	300.000.000.00	95.150.000.00	31.72%	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Desdm)	1.691.522.000.00	229.000.000.00	13.54%	1.590.000.000.00
Retribusi Pelayanan Pendidikan (Badiklat)	1.205.880.000.00	20.475.000.00	1.70%	420.375.000.00
Retribusi Jasa Usaha	**16.483.779.400.00**	**5.254.468.845.00**	**31.88%**	**3.774.221.518.00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU, Disnakertrans, DLH, Dinas Kesehatan, BAKUDA, RSJ, Setda, Kantor Perwakilan, Badiklat, Dinas Perindag)	9.240.358.000.00	3.740.925.800.00	40.48%	2.923.461.106.00
Retribusi Terminal	600.900.000.00			
Retribusi Tempat Penginapan/Villa (Setda)	559.500.000.00	15.170.000.00	2.71%	13.140.000.00
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	3.451.591.400.00	594.610.908.00	17.23%	364.751.292.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dispora)	84.730.000.00	18.000.000.00	21.24%	9.000.000.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Kelautan)	2.546.700.000.00	885.762.137.00	34.78%	463.869.120.00
Retribusi Perizinan Tertentu	**533.010.146.00**	**346.527.000.00**	**65.01%**	**421.927.300.00**
Retribusi Izin Trayek (BP2TPM)	98.500.000.00	33.500.000.00	34.01%	73.250.000.00
Retribusi Izin Usaha Perikanan (BP2TPM)	34.510.146.00	149.397.000.00	432.91%	128.128.700.00
Retribusi Perpanjangan IMTA (Disnakertrans)	400.000.000.00	163.630.000.00	40.91%	220.548.600.00
Jumlah	**20.214.191.546.00**	**5.945.620.845.00**	**29.41%**	**6.513.383.818.00**

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah selama tahun 2021, secara keseluruhan mencapai Rp5.945.620.845,00 dari target yang dianggarkan Rp20.214.191.546,00 atau 29,41%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp6.513.383.818,00, mengalami penurunan senilai Rp 567.762.973,00 atau 8,72%. Turunnya pendapatan retribusi pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya pendemi covid-19 yang masih melanda negara Indonesia khususnya provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menyebabkan menurunnya daya ekonomi masyarakat.

Pada tabel di atas dapat kita jelaskan bahwa hampir semua obyek retribusi pada TA 2021 mengalami penurunan realisasi yang sangat signifikan. Pada obyek retribusi jasa umum hanya terealisasi sebesar 10,78% dan obyek retribusi jasa usaha hanya teralisasi 31,88% . Hal ini disebabkan pandemic covid-19 yang masih berlangsung yang mengakibatkan masih lemahnya daya ekonomi masyarakat adanya larangan berkumpul pada acara tertentu baik pada masyarakat maupun para ASN dilingkungan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada obyek retribusi perizinan tertentu terealisasi 65,01%. Retribusi Izin Usaha Perikanan (BP2TPM) mengalami over target dimana anggaran sebesar Rp34.510.146,00 terealisasi Rp149.397.000,00 atau 432,91%. Hal ini disebabkan oleh adanya permohonan izin baru yang masuk ke BP2TPM, banyaknya nelayan yang melakukan perluasan usaha sehingga menambah jumlah kapal baru, mulai tumbuhnya antusias dan kesadaran nelayan dalam mengurus izin kapal, dan koordinasi yang baik antar instansi terkait seperti syahbandar ke pelabuhan.

Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari kontribusi 17 (tujuh belas) OPD, yaitu : Disnakertrans, Dinas Kesehatan (termasuk RSUP dan RSJ), Dinas Energi & SDM Retribusi Cetak Peta, Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Diskominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dispora, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dan Bapelitbangda. Adapun rincian

Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran I Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

II.2.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN-LRA

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	5,500,000,000.00	5,714,380,624.89	103.90%	5,471,185,541.79
Jumlah	**5,500,000,000.00**	**5,714,380,624.89**	**103.90%**	**5,471,185,541.79**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp5.714.380.624,89 dari yang dianggarkan senilai Rp5.500.000.000,00 atau 103,90%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp5.471.185.541,79 terjadi kenaikan senilai Rp243,195,083.1 atau 4,45%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 berasal dari Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada PEMDA (Dividen) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 5.714.380.624,89 yang berasal dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp 5.714.380.624,89. Hal ini dikarenakan kebijakan dari PT. Bank Sumsel Babel yang tidak membagikan seluruh hasil usaha mereka kepada para pemegang saham. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah BUMN berupa dividen berasal dari :

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	BANK SUMSEL BABEL	5,714,380,624.89
-	-	**5,714,380,624.89**

II.2.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH-LRA

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2,000,000,000.00	-	0.00%	668,561,504.00
Jasa Giro	7,861,413,722.00	6,548,412,646.00	83.30%	3,177,496,252.31
Pendapatan Bunga	11,747,219,912.00	-	0.00%	9,770,710,870.36
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	593,534,403.00	332,481,152.92	56.02%	23,221,249.21
Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	507,468,684.00	917,213,816.35	180.74%	324,965,837.00
Pendapatan Denda Pajak	12,164,131,313.00	8,723,278,572.46	71.71%	7,038,378,223.00
Pendapatan dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran	-	-		2,512,115,591.24
Lain-Lain Penerimaan	1,107,459,258.00	3,171,186,388.05	286.35%	2,104,560,142.78
Pendapatan dari BLUD	37,638,730,000.00	48,253,471,354.00	128.20%	32,212,272,856.40
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12,553,317,942.00	92,477,908.00	0.74%	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5,478,494,299.00	2,254,693,907.00	41.16%	
Jumlah	**91,651,769,533.00**	**70,293,215,744.78**	**76.70%**	**57,832,282,526.30**

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp70.293.215.744,78 dari yang dianggarkan senilai Rp91.651.769.533,00 atau 76,70%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp57.832.282.526,30 terjadi kenaikan senilai Rp12.460.933.218,48 atau 21,54%. Obyek hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak terealisasi karena pada TA 2021 tidak ada lelang barang milik daerah di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar 56,02% karena kegiatan-kegiatan pada pekerjaaan konstruksi terlaksana cukup efektif sesuai dengan jadawal pelaksanaan kegiatannya. Realisasi pendapatan denda pajak sebesar 71,71% karena adanya program relaksasi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2021 yang membebaskan denda keterlambatan pajak dan BBN serta sanksi administrasi yang berlaku dari tanggal 1 Oktober s.d 31 Desember 2021. Realisasi pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 0,74% karena semakin efektifnya administrasi pembayaran gaji dan tunjangan pada OPD. Realisasi pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar 41,16% karena semakin efektifnya administrasi pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jasa Giro adalah akun untuk menampung penerimaan dari bunga jasa giro 3 (tiga) rekening giro milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bank Sumsel Babel selama tahun 2021 senilai Rp5.879.083.803,00, yang terdiri dari; rekening giro Nomor 144-3000005 dan realisasinya nihil, rekening giro Nomor 144-3000011 dengan realisasi senilai Rp4.789.583.914,00, rekening giro Nomor 144-3000099 dengan realisasi senilai Rp1.089.499.889,00 dan rekening-rekening pada Bendahara Pengeluaran OPD dengan realisasi senilai Rp669.328.843,00.

Rekening Deposito pada Bank adalah penerimaan yang berasal hasil penempatan deposito senilai milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank BRI Cabang Pangkalpinang, Bank Mandiri Syariah dan Bank Sumsel Babel. Pada tahun 2021 tidak terealisasi dari yang dianggarkan senilai Rp11.747.219.912,00.

Kerugian Uang Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari setoran Bendahara Pengeluaran, Pegawai Non Bendahara serta Pihak Lain/Swasta yang terkena Tuntutan Ganti Rugi akibat temuan yang dilakukan aparat pemeriksa atas perbuatan yang merugikan keuangan daerah. Realisasi Penerimaan Kerugian daerah selama Tahun Anggaran 2021 senilai Rp917.213.816,35 atau 180,74% dari yang dianggarkan senilai Rp507.468.684,00.

Denda Bidang Pekerjaan Umum merupakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kontrak pekerjaan yang telah disepakati. Realisasi Penerimaan Denda Bidang pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021 senilai Rp332.481.152,92 atau 56,02% dari yang dianggarkan senilai Rp593.534.403,00.

Pendapatan Denda Pajak merupakan penerimaan dari denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan. Realisasi Penerimaan Denda Pajak tahun 2021 senilai Rp8.723.278.572,46 atau 69,48% dari yang dianggarkan senilai Rp12.553.317.942,00, terdiri dari penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp8.018.572.196,00 atau 70,96% dari yang dianggarkan senilai Rp11.299.745.313,00. Penerimaan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai adm Rp645.267.400,00 atau 74,65% dari yang dianggarkan senilai Rp864.386.000,00, dan Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp59.438.976,46.

Lain-Lain Penerimaan adalah akun untuk menampung penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun penerimaan di atas. Pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp3.171.186.388,05 atau 286,35% dari yang dianggarkan senilai Rp1.107.459.258,00, yang terdiri dari:

a). Penerimaan Setoran Potongan Hutang PT. Taspen merupakan akun untuk menampung penerimaan dari pengembalian gaji pensiun PNS yang SKPP-nya terlambat diterbitkan dan realisasinya senilai Rp127.196.034,00 atau 139,77% dari yang dianggarkan senilai Rp91.000.208,00.

b). Setoran PT. Jasa Raharja adalah setoran yang di terima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja. Adapun realisasinya senilai Rp998.000.000,00 atau 100,20% dari yang dianggarkan senilai Rp996.000.000,00.

c). Penerimaan dari Fasilitas Sosial/KUPEM merupakan akun untuk menampung cicilan KUPEM (Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Realisasi penerimaan KUPEM pada Tahun 2021 senilai Rp1.744.167,00 atau 8,52% dari yang dianggarkan senilai Rp20.459.050,00. Rendahnya pengembalian hutang pokok dan bunga oleh para nasabah KUPEM disebabkan banyaknya nasabah yang telah berpindah alamat dan meninggal dunia sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan penagihan.

d). Lain Penerimaan merupakan penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun lain penerimaan yang tersedia. Pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp2.044.246.187,05 dari yang tidak dianggarkan. Adapun rincian lain penerimaan tersebut dapat dilihat pada Lampian XXXI Catatan atas Laporan Keuangan 2021

Pendapatan dari BLUD merupakan penerimaan dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Balabkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang langsung masuk ke Rekening Kas BLUD. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan dari BLUD senilai Rp48.253.471.354,00 atau 128,20% dari yang dianggarkan senilai Rp37.638.730.000,00 yang terdiri dari RSJD yang dianggarkan Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi Rp7.480.941.467,00, RSUD dianggarkan Rp 27.000.000.000,00 dengan realisasi Rp33.232.252.525,00 dan Balabkesda yang dianggarkan Rp2.638.730.000,00 dengan realisasi Rp7.540.277.362.

II.2.1.2. Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Realisasi pendapatan transfer tahun 2021 Rp1.750.322.876.331,00 atau 103,27% dari yang dianggarkan senilai Rp1.694.981.271.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp1.657.633.841.610,00, terjadi kenaikan senilai Rp92.689.034.721,00 atau 5,59%. Adapun rincian pendapatan transfer tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
- Dana Bagi Hasil	152,890,551,000.00	237,440,870,998.00	155.30%	117,160,284,746.00
- Dana Alokasi Umum	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00	100.00%	942,308,451,000.00
- Dana Alokasi Khusus-Fisik	152,947,098,000.00	140,752,173,670.00	92.03%	545,345,060,864.00
- Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	393,154,586,000.00	376,140,795,663.00	95.67%	
Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	**1,638,542,274,000.00**	**1,693,883,879,331.00**	**103.38%**	**1,604,813,796,610.00**
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-		-
- Dana Insentif Daerah	56,438,997,000.00	56,438,997,000.00	100.00%	52,820,045,000.00
Jumlah Pendapatan Transfer-Lainnya	**56,438,997,000.00**	**56,438,997,000.00**	**100.00%**	**52,820,045,000.00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1,694,981,271,000.00**	**1,750,322,876,331.00**	**103.27%**	**1,657,633,841,610.00**

II.2.1.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan uang yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam tahun berjalan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Realisasi dana bagi hasil pajak pada tahun 2021 Rp.88.238.000.236,00 atau 218,68% dari yang dianggarkan senilai Rp40.349.669.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp32.807.368.096,00 terjadi kenaikan senilai Rp55.430.632.140,00 atau 168,95%. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) pada tahun 2021 Rp.149.202.870.762,00 atau 132,58% dari yang dianggarkan senilai Rp125.540.882.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp84.352.916.650,00 terjadi kenaikan senilai Rp64.849.954.112,00 atau 76,87%.

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak PPh Orang Pribadi (termasuk PPh pasal 21/25/29). Realisasi DBH PBB tahun 2021 senilai Rp49.052.029.189,00 atau 457,37% dari yang dianggarkan senilai Rp10.724.885.000,00, merupakan penerimaan dana bagi hasil PBB bagian daerah provinsi dan biaya pemungutan PBB bagian daerah yang disalurkan setiap triwulan. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak PPh Orang Pribadi tahun 2021(termasuk PPh pasal 21/25/29) senilai Rp39.185.971.047,00 atau 132,27% dari yang dianggarkan senilai Rp29.624.784.000,00, merupakan penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 bagian provinsi senilai 8%.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) terdiri DBH dari Provisi Sumber Daya Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Realisasi DBH SDA dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun 2021 sebesar Rp626.909.488,00 atau 126,86% dari yang dianggarkan Rp494.157.000,00. Sedangkan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp2.374.396.791,00 atau 201,56% dari yang dianggarkan senilai Rp1.178.008.000,00 dan realisasi DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Landrent Tahun Anggaran 2021 senilai Rp146.201.561.032,00 atau 131,87% dari yang dianggarkan senilai Rp110.868.717.000,00.

	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
DANA BAGI HASIL				
Dana Bagi Hasil Pajak	**40,349,669,000.00**	**88,238,000,236.00**	**218.68%**	**32,807,368,096.00**
- Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10,724,885,000.00	49,052,029,189.00	457.37%	6,664,805,361.00
- Dana Bagi Hasil dari PPh (Ps 25, Ps 29 dan Ps 21)	29,624,784,000.00	39,185,971,047.00	132.27%	26,142,562,735.00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)	**112,540,882,000.00**	**149,202,870,762.00**	**132.58%**	**84,352,916,650.00**
- DBH SDA dari Provisi Sumber Daya Hutan	494,157,000.00	626,909,488.00	126.86%	39,371,100.00
- DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	-	-		17,584,006,200.00
- DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalry	110,868,717,000.00	146,201,561,032.00	131.87%	64,977,406,050.00
- DBH SDA Minyak Bumi	1,178,008,000.00	2,374,396,791.00	201.56%	1,752,097,200.00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	3,451.00		36,100.00
Jumlah	**152,890,551,000.00**	**237,440,870,998.00**	**155.30%**	**117,160,284,746.00**

II.2.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan formula penghitungan untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten kota diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2021 Rp.939.550.039.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp939.550.039.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp942.308.451.000,00 terjadi penurunan senilai Rp2.758.412.000,00 atau 0,29%.

	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
Dana Alokasi Umum	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00	100.00%	942,308,451,000.00
Jumlah	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00	100.00%	942,308,451,000.00

Adapun rincian penerimaan DAU untuk Provinsi Kepualuan Bangka Belitung tahun 2021 tiap bulan adalah sebagai berikut :

NO.	BULAN	TANGGAL PENERIMAAN	NILAI (Rp)
1.	Januari	05 Januari 2021	80,886,411,000.00
2.	Februari	11 Februari 2021	80,886,411,000.00
		26 Februari 2021	80,886,411,000.00
3.	Maret		-
4.	April	06 April 2021	77,432,311,000.00
		30 April 2021	77,432,311,000.00
5.	Mei	31 Mei 2021	77,432,311,000.00
6.	Juni	30 Juni 2021	77,432,311,000.00
7.	Juli	30 Juli 2021	77,432,311,000.00
8.	Agustus	31 Agustus 2021	77,432,311,000.00
9.	September	29 September 2021	77,432,311,000.00
10.	Oktober	29 Oktober 2021	77,432,311,000.00
11.	November	30 November 2021	77,432,318,000.00
12.	Desember		-
		Jumlah	**939,550,039,000.00**

II.2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional. Pada tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus dan dianggarkan dalam APBD TA 2021 senilai Rp546,101,684,000,00 yang terealisasi sebesar Rp516.892.969.333,00 atau 94,65%. Termasuk di dalamnya penyaluran Dana BOS SMA/SMK/SLB Negeri senilai Rp74.551.103.000,00 dan juga Hibah BOS SD/SMP Negeri serta SD/SMP/SMA/SMK/SLB Swasta ke Kabupaten/Kota senilai Rp233.247.438.000,00 langsung dari RKUN ke kas bendahara satuan Pendidikan/sekolah (non RKUD).

Adapun Rincian Penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat dan realisasi penggunaannya di OPD dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

II.2.1.2.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan akun untuk menampung penerimaan dana dari Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan, pelayanan umum dan kriteria tertentu lainnya yang dianggarkan yaitu senilai Rp56.438.997.000,00 dan terealisasi senilai Rp56.438.997.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp52.820.045.000,00, terjadi kenaikan senilai Rp3.618.952.000,00 atau 6,41%.

Adapun rincian Dana Insentif Daerah dari Pemerintah yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
DANA INSENTIF DAERAH				
Dana Insentif Daerah	**56,438,997,000.00**	**56,438,997,000.00**	**100.00%**	**52,820,045,000.00**
- Dana Insentif Daerah	56,438,997,000.00	56,438,997,000.00	100.00%	52,820,045,000.00
Jumlah	**56,438,997,000.00**	**56,438,997,000.00**	**100.00%**	**52,820,045,000.00**

Berdasarkan tanggal masuk DID ke kas daerah, berikut ini rincian DID yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2021 :

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI REALISASI (Rp)
15-Apr-21	45/STS/DID/II/2021	Dana Insentif Daerah (DID) tahap 1 tahun 2021	28,219,498,000.00
23-Nov-21	262/STS/per/11/2021	Dana Insentif Daerah (DID) tahap 2 tahun 2022	28,219,499,000.00
Jumlah			**56,438,997,000.00**

II.2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan. Dalam akun penerimaan ini terdiri dari Pendapatan Hibah. Pada tahun 2021 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan yaitu senilai Rp94.500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp62.862.667.726,00 atau 66,52%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp64.193.790.678,00 mengalami penurunan senilai Rp1.331.122.952,00 atau 2,07%.

Adapun rincian penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	27-Juli-2021	Belanja Hibah Jalan Daerah, Tahap I Belanja Kepada Pemerintah Daerah	11,228,820,000.00
2	28-Agt-2021	Belanja Hibah Jalan Daerah, Tahap ke-2 TA. 2021 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	20,998,109,377.00
3	16-Des-2021	Belanja Hibah Jalan Daerah, Tahap ke-3 TA. 2021	30,635,738,349.00
			62,862,667,726.00

Pada tabel dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 senilai Rp62.862.667.726,00 yang terdiri dari Belanja Hibah Daerah Tahap I senilai Rp11.228.820.000,00, Belanja Hibah Jalan Daerah Tahap II senilai Rp20.998.109.377,00 dan Belanja Hibah Jalan Daerah Tahap III senilai Rp30.635.738.349,00.

II.2.2 BELANJA

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021(Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
1) BELANJA OPERASI	**1,866,636,589,990.00**	**1,682,056,492,509.43**	90.11%	**1,741,021,626,249.62**
Belanja Pegawai	842,240,282,304.00	798,499,351,410.01	94.81%	943,695,426,476.30
Belanja Barang	718,210,767,861.00	591,600,928,732.42	82.37%	478,541,675,862.32
Belanja Bunga	-	-		-
Belanja Subsidi	-	-		-
Belanja Hibah	303,769,127,465.00	290,268,684,767.00	95.56%	318,197,523,911.00
Belanja Bantuan Sosial	2,416,412,360.00	1,687,527,600.00	69.84%	587,000,000.00
2) BELANJA MODAL	**574,963,103,965.00**	**428,654,245,651.53**	**74.55%**	**436,502,107,450.47**
Belanja Tanah	-	-	0.00%	14,933,500.00
Belanja Peralatan dan Mesin	150,875,356,857.00	69,363,185,129.20	45.97%	105,556,804,293.20
Belanja Gedung dan Bangunan	108,005,921,278.00	66,752,851,728.39	61.80%	85,735,352,027.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	293,395,316,586.00	268,708,378,073.94	91.59%	233,356,140,924.36
Belanja Aset Tetap Lainnya	22,686,509,244.00	23,694,090,720.00	104.44%	11,838,876,705.91
Belanja Aset Lainnya		135,740,000.00		
3) BELANJA TAK TERDUGA	**20,303,624,601.00**	**5,182,540,454.00**	**25.53%**	**26,104,864,180.00**
Belanja Tak Terduga	20,303,624,601.00	5,182,540,454.00	25.53%	26,104,864,180.00
4) BELANJA TRANSFER	**386,723,300,984.00**	**349,920,091,503.66**	**90.48%**	**371,541,838,479.21**
Belanja Bagi Hasil	346,986,350,984.00	314,048,588,503.66	90.51%	330,883,067,997.21
Belanja Bantuan Keuangan	39,736,950,000.00	35,871,503,000.00	90.27%	40,658,770,482.00
				-
JUMLAH BELANJA	**2,848,626,619,540.00**	**2,465,813,370,118.62**	**86.56%**	**2,575,170,436,359.30**

Belanja dikelompokkan menjadi 4 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja di atas merupakan nilai realisasi bersih, artinya realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D setelah dikurangi dengan pengembalian belanja LS (contra pos) dan sisa UP/GU/TU sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun Rekapitulasi Realisasi Belanja berdasarkan SPJ Fungsional per SKPD tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021, sedangkan jumlah pengembalian belanja Bendahara Pengeluaran selama tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 diketahui mencapai Rp2.465.813.370.118,62 atau 86,56% dari yang dianggarkan Rp2.848.626.619.540,00. Berdasarkan jenis belanja, secara prosentase realisasi tertinggi pada belanja transfer yaitu senilai Rp349.920.091.503,66 atau 90,48%, dari yang dianggarkan senilai Rp387.723.300.984,00 dan realisasi yang terendah pada belanja tak terduga sebesar Rp5.182.540.454,00 atau 25,53% dari yang dianggarkan senilai Rp20.303.624.601,00. Rendahnya realisasi belanja tak terduga pada tahun 2021 dikarenakan menurunnya usulan pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) dari OPD yang secara fungsional terkait dengan pandemic covid-19 akibat dari menurunnya kasus terkonfirmasi positif covid-19 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah OPD pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum adanya penggabungan sebanyak 39 OPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 27 OPD yang terdiri atas 18 dinas, 6 badan, 2 sekretariat dan 1 inspektorat. Dari data realisasi per OPD sebelum penggabungan, realisasi belanja tertinggi pada 2 OPD yaitu Dinas Pangan dan Dinas Pertanian senilai 100%. Adapun realisasi belanja terendah terdapat pada OPD RSUP senilai Rp134.202.031.468,00 atau 58,35% dari yang dianggarkan senilai Rp230.007.891.279,00. Adapun rincian realisasi belanja tahun anggaran 2021 secara keseluruhan per OPD adalah sebagai berikut :

NO.	OPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020(Rp)
1	Dinas Pendidikan	833,357,489,765.00	783,863,499,101.00	94.06%	540,153,277,928.00
2	Dinas Kesehatan	87,025,521,323.00	72,463,054,929.08	83.27%	142,604,377,695.00
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	230,007,891,279.00	134,202,031,468.00	58.35%	130,497,133,676.00
4	Rumah Sakit Jiwa	58,919,450,664.00	54,930,277,051.74	93.23%	22,994,552,018.54
5	Dinas Pekerjaan Umum	60,608,210,476.00	60,585,425,175.00	99.96%	281,477,582,386.38
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	318,387,256,566.00	268,698,839,750.52	84.39%	-
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,052,267,784.00	3,035,583,709.00	99.45%	15,620,668,026.00
8	Bappelitbangda	17,502,590,800.00	15,160,323,393.00	86.62%	15,006,431,382.00
9	Dinas Perhubungan	24,470,182,392.00	21,070,495,236.20	86.11%	19,280,222,289.25
10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	4,981,166,458.00	4,979,666,458.00	99.97%	11,520,653,522.00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28,933,278,621.00	23,486,165,320.00	81.17%	-
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	11,235,588,354.00	9,656,607,970.00	85.95%	9,839,467,105.00
13	Dinas Sosial	7,974,908,275.00	7,919,735,631.00	99.31%	19,041,203,191.00
14	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22,760,090,121.00	18,267,317,728.00	80.26%	-
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,755,832,971.00	14,427,478,545.87	86.10%	27,644,238,179.02
16	Dinas Tenaga Kerja	19,139,115,647.00	18,264,161,793.00	95.43%	20,013,293,142.00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,637,576,058.00	16,207,723,844.00	91.89%	18,623,702,407.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,792,323,207.00	9,573,060,891.00	88.70%	10,335,534,623.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,472,201,206.00	5,346,974,015.00	97.71%	12,445,595,528.10
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4,649,193,931.00	4,534,188,203.00	97.53%	13,615,967,741.00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,997,797,934.00	12,278,652,839.00	94.47%	8,096,365,804.00
22	Satuan Polisi pamong Praja	20,482,400,804.00	18,856,288,420.00	92.06%	21,220,924,269.00
23	Sekretariat Daerah	119,873,243,467.00	111,200,035,562.00	92.76%	91,772,872,369.00
24	Sekretariat DPRD	127,724,448,149.00	97,487,237,567.00	76.33%	108,297,852,368.00
25	Badan Keuangan Daerah	478,034,849,977.00	418,947,987,964.96	87.64%	783,691,979,314.33
26	Inspektorat Daerah	19,853,257,854.00	18,774,894,879.00	94.57%	19,385,395,012.00
27	Badan Penghubung Provinsi	10,432,424,211.00	8,360,023,856.00	80.14%	10,121,156,259.00
28	BKPSDMD	22,311,505,009.00	21,852,354,039.00	97.94%	24,218,817,380.00
29	Dinas Pangan	491,116,842.00	491,116,842.00	100.00%	8,103,758,242.00
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	52,553,778,732.00	41,159,096,767.00	78.32%	-
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,884,319,460.00	3,877,909,461.00	99.83%	12,321,281,731.00
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,433,457,142.00	23,709,161,119.00	93.22%	20,802,376,074.00
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12,622,307,324.00	12,360,205,952.00	97.92%	11,167,893,702.00
34	Dinas Pertanian	1,356,188,241.00	1,356,188,241.00	100.00%	46,975,523,934.00
35	Dinas Kehutanan	13,431,620,403.00	13,384,850,673.00	99.65%	32,055,578,445.68
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21,037,246,154.00	19,121,560,430.00	90.89%	19,738,217,833.00
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	74,002,731,362.00	53,098,777,474.20	71.75%	25,885,534,587.00
38	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	30,597,926,002.00	26,071,126,719.05	85.21%	-
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17,843,864,575.00	16,753,291,101.00	93.89%	20,601,008,196.00
	Jumlah	**2,848,626,619,540.00**	**2,465,813,370,118.62**	**86.56%**	**2,575,170,436,359.30**

II.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp1.866.636.589.990,00 dengan realisasi senilai Rp1.682.056.492.509,43 atau 90,11%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi selama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

II.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penganggaran beberapa kode rekening belanja pegawai pada tahun 2021 sedikit berbeda dibandingkan tahun 2020. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, belanja honorarium, belanja jasa pengelolaan BMD, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, dan belanja tambahan penghasilan (TPP) guru PNSD pada tahun 2021 dianggarkan pada belanja tambahan penghasilan (TPP) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sedangkan pada tahun 2020 belanja tersebut dianggarkan pada belanja gaji dan tunjangan. Belanja pegawai pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp798.499.351.410,01 atau 94,81% dari yang dianggarkan senilai Rp842.240.282.304,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 belanja pegawai terealisasi senilai Rp943.695.426.476,30 terjadi penurunan senilai Rp145.196.075.066,29 atau 15,38%.

Dalam obyek belanja pegawai terdapat realisasi belanja yang rendah yaitu realisasi belanja pegawai BLUD yaitu senilai Rp8.163.214.161 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.426.407.112 atau 86,60%.

Selain itu obyek belanja pegawai BOS yang terealisasi paling besar yaitu senilai Rp159.770.000 atau 99,91% dari yang dianggarkan senilai Rp159.910.000.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Gaji dan Tunjangan	378.122.492.224.00	364.227.945.131.00	96.33%	422.053.762.661.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	311.574.085.793.00	294.986.696.076.00	94.68%	301.375.976.866.18
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	99.786.998.052.00	91.797.582.277.09	91.99%	12.143.083.165.57
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	43.170.389.123.00	39.164.143.764.92	90.72%	9.064.800.000.00
Biaya Pemungutan PBB				
Insentif Pemungutan Pajak Daerah		-	0.00%	2.672.709.823.32
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			0.00%	114.133.234.24
Honorarium PNS			0.00%	21.376.759.242.00
Honorarium Non PNS			0.00%	170.429.222.284.00
Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				
Honorarium Pengelolaan Dana BOS				
Belanja Pegawai BOS	159.910.000.00	159.770.000.00	99.91%	4.464.979.200.00
Belanja Pegawai BLUD	9.426.407.112.00	8.163.214.161.00	86.60%	-
Jumlah	**842.240.282.304.00**	**798.499.351.410.01**	**94.81%**	**943.695.426.476.31**

II.2.2.1.2. Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penganggaran beberapa kode rekening belanja barang pada tahun 2021 sedikit berbeda dibandingkan tahun 2020. Pada TA 2021 belanja barang pakai habis, belanja bahan/material, belanja cetak, dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang pakai habis sedangkan pada TA 2020 belanja tersebut dianggarkan secara terpisah sesuai kode rekeningnya masing-masing. Pada TA 2021 belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator, belanja jasa tenaga tukang/teknisi/operator/asistensi, belanja uang saku, belanja jasa pegawai tidak tetap, belanja uang makan, belanja insentif tenaga kesehatan dan pendukung pelayanan, belanja jasa kantor, termasuk gaji pegawai honorer/PHL dianggarkan pada belanja jasa kantor sedangkan pada TA 2020 belanja tersebut dianggarkan secara terpisah sesuai kode rekenignya masing-masing. Pada TA 2021 belanja perawatan kendaraan bermotor dianggarkan pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Belanja barang pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp591.600.928.732,42 atau 82,37% dari yang dianggarkan senilai Rp718.210.767.851,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp478.541.675.862,32, terjadi kenaikan sebesar Rp113.059.252.870,10 atau 23,62%.

Presentase Realisasi Belanja Barang tertinggi dalam kelompok Belanja barang berasal dari belanja sewa tanah dan belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah yang terealisasi 100%. Sedangkan realisasi yang terendah berasal dari Belanja Pemeliharaan tanah senilai 34,31%.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA BARANG				
Belanja Bahan Pakai Habis	129.509.055.764.00	94.353.985.338.15	72.86	34.137.589.712.00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	20.696.233.00	19.275.000.00	93.13	-
Belanja Bahan/Material	-	-		32.077.212.169.00
Belanja Jasa Kantor	252.844.666.667.00	231.184.818.666.30	91.43	69.138.869.105.00
Belanja Premi Asuransi	34.839.847.200.00	33.648.715.600.00	96.58	284.938.500.00
Belanja Sewa Tanah	25.000.000.00	25.000.000.00	100.00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.773.653.036.00	3.613.671.435.00	62.59	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-		10.647.176.218.00
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-		9.114.388.933.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.606.760.500.00	2.989.018.637.00	64.88	5.519.504.259.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.022.718.000.00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.000.000.00	99.000.000.00	55.00	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.650.000.00	17.500.000.00	68.23	-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-		249.472.000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-		5.087.542.850.00
Belanja Makanan dan Minuman	-	-		23.246.515.441.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-		485.925.000.00
Belanja Pakaian Kerja	-	-		499.904.975.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-		987.562.600.00
Belanja Perjalanan Dinas	-	-		
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-		
Belanja Pemeliharaan	-	-		-
Belanja Jasa Konsultansi	-	-		-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.669.815.841.00	13.408.496.642.00	85.57	4.348.802.540.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	927.959.873.00	415.546.960.00	44.78	581.468.500.00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	185.000.000.00	183.937.000.00	99.43	-
Belanja Barang Dana BOS				-
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-		29.795.429.610.00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.099.407.978.00	2.686.869.333.00	86.69	3.601.499.213.00
Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS				1.050.142.400.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.077.563.200.00	1.191.157.680.00	57.33	834.878.005.00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.756.271.452.00	1.756.271.452.15	100.00	-
Belanja Pemeliharaan Tanah	300.000.000.00	102.918.200.00	34.31	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.129.950.438.00	13.933.103.642.00	69.22	6.387.476.783.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.726.340.741.00	13.669.451.608.14	81.72	13.914.715.820.78
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.402.321.324.00	18.903.253.256.68	60.20	2.075.430.282.00
Belanja Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	23.500.000.00	18.885.000.00	80.36	228.526.250.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.805.194.936.00	72.572.096.438.00	68.59	40.186.552.687.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar negeri	200.000.000.00	165.684.000.00	82.84	63.291.579.689.00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara	-	-		56.633.916.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	-	-		7.952.673.838.00
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	-	-		23.054.788.800.00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.376.037.000.00	13.697.446.345.00	89.08	15.320.346.000.00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.633.272.965.00	2.778.799.600.00	76.48	-
Belanja Uang Saku	-	-		1.826.744.000.00
Belanja Paket Meeting	-	-		108.595.000.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.181.539.819.00	18.358.512.739.00	100.97	26.547.182.579.54
Belanja Barang dan Jasa BOS	54.891.262.894.00	51.807.514.160.00	94.38	39.251.165.431.00
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	-	-		1.379.450.000.00
Belanja Uang Makan	-	-		519.270.000.00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan dan pendukur	-	-		3.729.004.756.00
Jumlah	**718.210.767.861.00**	**591.600.928.732.42**	82.37	**478.541.675.862.32**

Dari data diatas, dapat dilihat realisasi belanja barang dan jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp.18.181.539.819,00 dengan realisasi Rp.18.358.512.739,00 atau 100,97%. Realisasi yang melebihi pagu anggaran ini disebabkan adanya realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan adanya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan RSJD pada bulan November 2021 dimana belanja pengadaan tersebut masih dibawah ambang batas sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) RSJD.

II.2.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp303.769.127.465,00 dan terealisasi senilai Rp290.268.684.767,00 atau 95,56 %. Pada tahun 2020 belanja hibah terealisasi senilai Rp318.197.523.911,00,00 terjadi penurunan senilai Rp27.928.839.144,00 atau 8,77 %.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA HIBAH				
Belanja Hibah Kepada Lembaga non Departemen	3.105.910.100,00	1.956.872.100,00	63,00	17.217.159.419,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	51.782.247.365,00	51.352.084.667,00	99,17	9.665.236.167,00
Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan	-	-	-	12.952.724.400,00
Belanja Hibah kepada masyarakat dan ormas	-	-	-	41.337.703.925,00
Belanja Hibah Dana Bos	245.168.680.000,00	233.247.438.000,00	95,14	237.024.700.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	-
Jumlah	**303.769.127.465,00**	**290.268.684.767,00**	95,56	**318.197.523.911,00**

Pada tahun 2021, realisasi belanja hibah terbesar yaitu belanja hibah Bantuan keuangan Kepada Partai politik yang terealisasi 100% sedangkan realisasi belanja hibah terendah yaitu belanja hibah kepada Lembaga non Departemen. Berikut rincian realisasi belanja hibah dana BOS tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana BOS disalurkan secara langsung oleh menteri yang menangani urusan dibidang keuangan melalui kantor perbendaharaan negara ke rekening satuan pendidikan (satdik) penerima Dana BOS berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan. Penyaluran Dana BOS diinformasikan oleh menteri yang menangani urusan dibidang keuangan melalui kantor perbendaharaan Negara kepada PPKD selaku BUD masing-masing provinsi berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak. Notifikasi ini berisi informasi mengenai penyaluan Dana BOS ke masing-masing rekening satdik. Berdasarkan notifikasi tersebut, PPKD selaku BUD provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) untuk mengakui realisasi pendapatan Dana BOS. PPKD selaku BUD provinsi berdasarkan notifikasi diatas tersebut juga menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS untuk mengakui belanja hibah Dana BOS. Dalam hal ini, PPKD selaku BUD provinsi memilah-milah Dana BOS yang disalurkan kepada satdikdas (SD/SMP baik negeri maupun swasta) dan satdikmen/sus (SMA/SMK/SLB swasta) sebagai dokumen sumber untuk menerbitkan SPB Hibah Dana BOS.

Dana BOS yang diterima oleh satdikmen/sus negeri yang kewenangannya berada dibawah provinsi dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi. Dinas pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD provinsi dengan melampirkan laporan rekapitulasi pendapatan dan belanja Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masing-masing satdikmen/sus negeri. Berdasarkan SP2B tersebut, PPKD selaku BUD provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) untuk mengakui realisasi belanja Dana BOS.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
BELANJA HIBAH DANA BOS			
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri	207,122,940,000.00	195,427,454,000.00	94.35%
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta	21,646,220,000.00	21,757,454,000.00	100.51%
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta	15,755,520,000.00	15,401,730,000.00	97.75%
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta	644,000,000.00	660,800,000.00	102.61%
Jumlah	**245,168,680,000.00**	**233,247,438,000.00**	95.14%

Dari tabel diatas, realisasi belanja hibah dana BOS sebesar Rp233.247.438.000,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp245.168.680.000,00 dapat

1. Realisasi belanja hibah dana BOS kepada satdikdas negeri sebesar Rp195.427.454.000,00 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp207.122.940,00;
2. Realisasi belanja hibah dana BOS kepada satdiknas swasta sebesar Rp21.757.454.000,00 atau 100,51% dari anggaran sebesar Rp21.646.220.000,00:
3. Realisasi belanja hibah dana BOS kepada satdikmen swasta sebesar Rp15.401.730.000,00 atau 97,75% dari anggaran sebesar Rp15.755.520,00:
4. Realisasi belanja hibah dana BOS kepada satdikdus swasta sebesar Rp660.800.000,00 atau 102,61% dari anggaran sebesar Rp644.000.000,00;

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja hibah dana BOS kepada Satdikdas swasta lebih besar dari anggarannya yaitu 100,51% dan dan satdiksus swasta lebih besar dari anggarannya yaitu 102,61%. Hal ini disebabkan adanya kekurangan dalam penganggarannya pada TA 2021.

Adapun rincian realisasi belanja hibah Dana BOS berdasarkan SPB Hibah yang diterbitkan oleh BUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JENIS BOS	TAHAPAN	TANGGAL SPB HIBAH	NOMOR SPB HIBAH (BUD)	NOMOR BUKTI (DISDIK)	JUMLAH (Rp)
1	SDN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	001.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	001/SDN 11/DISDIK/2021	34,141,437,000
2	SDS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	001.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	002/SDS 11/DISDIK/2021	2,749,167,000
3	SMPN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	002.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	003/SMPN 11/DISDIK/2021	14,327,301,000
4	SMPS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	002.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	004/SMPS 11/DISDIK/2021	1,996,971,000
5	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	003/SPB HIBAH/BUD/I/2021	005/SMAS 11/DISDIK/2021	1,823,748,000
6	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	004/SPB HIBAH/BUD/I/2021	006/SMKS 11/DISDIK/2021	2,348,298,000
7	SLBS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	005/SPB HIBAH/BUD/I/2021	007/SLBS 11/DISDIK/2021	193,200,000
8	SDN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	006.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	008/SDN 12/DISDIK/2021	6,770,211,000
9	SDS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	006.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	009/SDS 12/DISDIK/2021	1,051,446,000
10	SMPN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	007.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	010/SMPN 12/DISDIK/2021	3,143,853,000
11	SMPS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	007.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	011/SMPS 12/DISDIK/2021	693,417,000
12	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	008/SPB HIBAH/BUD/I/2021	012/SMAS 12/DISDIK/2021	22,050,000
13	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	009/SPB HIBAH/BUD/I/2021	013/MKS 12/DISDIK/2021	523,200,000
14	SDN	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	010/SPB HIBAH/BUD/I/2021	014/SDN 21/DISDIK/2021	51,037,112,000
15	SDS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	011/SPB HIBAH/BUD/I/2021	015/SDS 21/DISDIK/2021	4,343,380,000
16	SMPN	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	012/SPB HIBAH/BUD/I/2021	016/SMPN 21/DISDIK/2021	22,135,712,000
17	SMPS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	013/SPB HIBAH/BUD/I/2021	017/SMPS 21/DISDIK/2021	3,226,004,000
18	SMAS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	014/SPB HIBAH/BUD/I/2021	018/SMAS 21/DISDIK/2021	1,905,992,000
19	SMKS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	015/SPB HIBAH/BUD/I/2021	019/SMKS 21/DISDIK/2021	3,297,104,000
20	SLBS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	016/SPB HIBAH/BUD/I/2021	020/SLBS 21/DISDIK/2021	257,600,000
21	SDN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	017/SPB HIBAH/BUD/I/2021	021/SDN 22/DISDIK/2021	3,554,952,000
22	SDS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	018/SPB HIBAH/BUD/I/2021	022/SDS 22/DISDIK/2021	709,704,000
23	SMPN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	019/SPB HIBAH/BUD/I/2021	023/SMPN 22/DISDIK/2021	1,164,440,000
24	SMPS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	020/SPB HIBAH/BUD/I/2021	024/SMPS 22/DISDIK/2021	362,940,000
25	SMAS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	021/SPB HIBAH/BUD/I/2021	025/SMAS 22/DISDIK/2021	559,872,000
26	SMKS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	022/SPB HIBAH/BUD/I/2021	026/SDMKS 22/DISDIK/2021	539,240,000
27	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	023/SPB HIBAH/BUD/II/2021	027/SDN 31/DISDIK/2021	37,137,909,000
28	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	024/SPB HIBAH/BUD/II/2021	028/SDS 31/DISDIK/2021	3,035,424,000
29	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	025/SPB HIBAH/BUD/II/2021	029/SMPN 31/DISDIK/2021	16,673,304,000
30	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	026/SPB HIBAH/BUD/II/2021	030/SMPS 31/DISDIK/2021	2,587,164,000
31	SMAS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	027/SPB HIBAH/BUD/II/2021	031/SMAS 31/DISDIK/2021	1,710,801,000
32	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	028/SPB HIBAH/BUD/II/2021	032/SMKS 31/DISDIK/2021	2,088,492,000
33	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	029/SPB HIBAH/BUD/II/2021	033/SLBS 31/DISDIK/2021	85,050,000
34	SDN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	030/SPB HIBAH/BUD/II/2021	034/SDN KINERJA/DISDIK/2021	650,000,000
35	SDS	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	031/SPB HIBAH/BUD/II/2021	035/SDS KINERJA/DISDIK/2021	200,000,000
36	SMPN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	032/SPB HIBAH/BUD/II/2021	036/SMPN KINERJA/DISDIK/2021	480,000,000
37	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	033/SPB HIBAH/BUD/II/2022	037/SDN 32/DISDIK/2021	2,456,388,000
38	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	034/SPB HIBAH/BUD/II/2021	038/SDS 32/DISDIK/2021	359,340,000
39	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	035/SPB HIBAH/BUD/II/2021	039/SMPN 32/DISDIK/2021	509,556,000
40	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	036/SPB HIBAH/BUD/II/2021	040/SMPS 32/DISDIK/2021	84,177,000
41	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	037/SPB HIBAH/BUD/II/2021	041/SMKS 32/DISDIK/2021	419,733,000
42	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	038/SPB HIBAH/BUD/II/2021	042/SLBS 32/DISDIK/2021	124,950,000
43	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	039/SPB HIBAH/BUD/II/2021	043/SDN 33/DISDIK/2021	622,701,000
44	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	040/SPB HIBAH/BUD/II/2021	044/SDS 33/DISDIK/2021	294,300,000
45	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	041/SPB HIBAH/BUD/II/2021	045/SMPN 33/DISDIK/2021	622,578,000
46	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	042/SPB HIBAH/BUD/II/2021	046/SMPS 33/DISDIK/2021	64,020,000
47	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	043/SPB HIBAH/BUD/II/2021	047/SMKS 33/DISDIK/2021	163,200,000
TOTAL							**233,247,438,000**

II.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp2.416.412.360,00 dan terealisasi senilai Rp1.687.527.600,00 atau 69,84%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp587.000.000,00, terjadi kenaikan senilai Rp1.100.527.600,00 atau 187,48%. Rendahnya realisasi bansos sebesar 69,84% karena seiring menurunnya kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021 sehingga masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial dari imbas covid-19 pun menurun.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA BANSOS				
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	756,614,000.00	541,769,000.00	71.60%	-
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	1,454,090,400.00	950,577,600.00	65.37%	-
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	200,207,960.00	195,181,000.00	97.49%	587,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga Non Pemerintah (bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)	5,500,000.00	-	0.00%	-
Jumlah	**2,416,412,360.00**	**1,687,527,600.00**	**69.84%**	**587,000,000.00**

Adapun rincian dana bantuan sosial *by name by address* pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

II.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp574.963.103.965,00 dengan realisasi senilai Rp428.654.245.651,53 atau 74,55%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya realisasi belanja modal senilai Rp436.502.107.450,47 terjadi penurunan senilai Rp7.847.861.798,94 atau 1,80%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terealisasi hanya 45,97% dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan terealisasi 61,8%. Rendahnya realisasi kedua belanja modal ini disumbang terbesar pada rendahnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan pada RSUP yang dananya bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dimana rencana pengadaan gedung radioterapi dengan anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00 dan pengadaan alat kesehatan radioterapi dengan anggaran Rp61.800.000.000,00 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dokumen pelaksanaan anggaran yang baru terbit di bulan November 2021 sehingga RSUP tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
Belanja Tanah	-	-	0,00%	14.933.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	150.875.356.857,00	69.363.185.129,20	45,97%	105.556.804.293,20
Belanja Gedung dan Bangunan	108.005.921.278,00	66.752.851.728,39	61,80%	85.735.352.027,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	293.395.316.586,00	268.708.378.073,94	91,59%	233.356.140.924,36
Belanja Aset Tetap Lainnya	22.686.509.244,00	23.829.830.720,00	105,04%	11.838.876.705,91
Belanja Aset Lainnya				
Jumlah	**574.963.103.965,00**	**428.654.245.651,53**	**74,55%**	**436.502.107.450,47**

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja modal per objek selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA MODAL TANAH	**-**	**-**		**14,933,500.00**
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-		14,933,500.00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**150,875,356,857.00**	**69,363,185,129.20**	**45.97%**	**105,556,804,293.20**
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	5,253,250,697.00	2,543,280,000.00	48.41%	5,149,758,620.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	-	-	0.00%	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2,451,000,000.00	2,298,674,800.00	93.79%	4,659,744,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	0.00%	5,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	1,355,500,500.00	1,325,885,000.00	97.82%	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	75,515,000.00	74,745,000.00	98.98%	1,924,819,800.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	1,246,154,193.00	172,295,000.00	13.83%	65,346,700.00
Belanja Modal Alat Kantor	1,238,170,239.00	766,255,405.00	61.89%	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5,875,193,556.00	2,918,791,457.00	49.68%	-
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabatl	1,784,630,167.00	595,817,697.00	33.39%	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-	0.00%	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	0.00%	1,503,172,700.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00%	1,282,197,539.60
Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,397,204,281.00	3,298,059,979.00	61.11%	4,916,429,889.60
Belanja Modal Pengadaan mebeulair	-	-	0.00%	1,508,086,400.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	0.00%	73,201,500.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	-	0.00%	299,593,950.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,821,844,663.00	1,066,987,957.00	58.57%	1,487,133,754.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	213,820,000.00	13,400,000.00	6.27%	626,019,450.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	72,600,000.00	20,800,000.00	28.65%	114,819,650.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	78,470,447,267.00	15,601,095,675.00	19.88%	40,208,718,249.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	1,693,219,811.00	1,106,992,650.00	65.38%	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7,388,951,428.00	5,370,160,732.00	72.68%	5,512,624,227.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7,989,574,600.00	7,205,817,630.00	90.19%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	199,500,000.00	195,690,000.00	98.09%	-
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	79,415,000.00	654,210,159.00	823.79%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	833,599,100.00	100,100,000.00	12.01%	-
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	33,000,000.00	31,442,400.00	95.28%	-
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	113,000,000.00	105,300,000.00	93.19%	-
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1,400,000,000.00	-	0.00%	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4,450,218,000.00	3,897,611,679.20	87.58%	-
Belanja Modal Peralatan olahraga	77,000,000.00	-	0.00%	-
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	-	-	0.00%	20,492,450.00
Belanja Modal Alat-alat Perikanan	-	-	0.00%	229,790,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20,524,048,355.00	19,999,771,909.00	97.45%	30,117,831,530.00
Belanja Modal Alat Bantu Disabilitas	-	-	0.00%	-
Belanja Moda Peralatan dan Mesinl BLUD	838,500,000.00	-	0.00%	5,851,523,884.00
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	**293,395,316,586.00**	**268,708,378,073.94**	**91.59%**	**233,356,140,924.36**
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	248,215,089,844.00	239,176,590,465.00	96.36%	214,636,934,090.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	11,201,355,500.00	3,895,238,552.00	34.77%	4,175,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	33,378,871,242.00	25,441,840,143.42	76.22%	16,787,771,434.03
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	-	0.00%	1,818,351,975.33
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	200,000,000.00	194,708,913.52	97.35%	108,908,425.00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan irigasi BLUD	400,000,000.00	-	0.00%	-
Belanja Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-	0.00%	-
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	**108,005,921,278.00**	**66,752,851,728.39**	**61.80%**	**85,735,352,027.00**
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	108,005,921,278.00	66,752,851,728.39	61.80%	85,658,335,027.00
Belanja Modal Dana BOS			#DIV/0!	77,017,000.00
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	**22,686,509,244.00**	**23,829,830,720.00**	**105.04%**	**11,838,876,705.91**
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	0.00%	478,500.00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	408,500,000.00	399,183,500.00	97.72%	10,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	-	-	0.00%	-
Belanja Modal Aset Tetap Dalam renovasi	14,229,298,000.00	15,882,614,100.00	111.62%	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	137,300,000.00	135,740,000.00	0.00%	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan			0.00%	-
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk			0.00%	3,190,202,933.91
Belanja Modal BLUD				-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7,911,411,244.00	7,412,293,120.00	0.00%	8,638,195,272.00
Jumlah	**574,963,103,965.00**	**428,654,245,651.53**	**74.55%**	**436,502,107,450.47**

II.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Belanja modal tanah tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil dan belanja modal lapangan. Pada tahun 2021 tidak ada realisasi belanja modal tanah sedangkan realisasi belanja modal tanah pada tahun 2020 senilai Rp. 14.933.500.

II.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp.69.363.185.129,20 dari yang dianggarkan senilai Rp.150.875.356.857 atau 45,97%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp105.556.804.293,20 terjadi penurunan senilai Rp36.193.619.164 atau 34,28%.

II.2.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas tersebut siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp.268.708.378.073,94 dari yang dianggarkan senilai Rp.293.395.316.586 atau 91,59%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp233.356.140.924,36 terjadi kenaikan senilai Rp35.352.237.149,58 atau 15,14%.

II.2.2.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik control/pasti. Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp.66.752.851.728,39 dari yang dianggarkan senilai Rp.108.005.921.278 atau 61,80%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp85.735.352.027 terjadi penurunan senilai Rp.18.982.500.298,61 atau 22,14%.

II.2.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal music, belanaj modal music, belanja modal karya grafika, belanja modal *three dimensional artefacs and realita* serta belanja modal *tarscalt*. Belanja modal aset tetap lainnnya pada tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp.23.829.830.720 dari yang dianggarkan senilai Rp.22.686.509.244 atau 105,04%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp11.838.876.705,91 terjadi kenaikan senilai Rp.18.982.500.298,61 atau 101,28%.

II.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. BTT dianggarakan pada DPA SKPKD. Pada TA 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan BTT sebesar Rp20.303.624.601,00 dan terealisasi senilai Rp5.182.540.454,00 atau 25,53%. Pencairan kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19 dari anggaran BTT mengikuti jumlah kasus yang terkonfirmasi posistif covid-19. Semakin tinggi kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 maka semakin besar kebutuhan anggaran untuk mendanai kebutuhan dalam rangka penanganan pasien terkonfirmasi covid-19. Adapun rincian realisasi BTT pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI 2021
1	RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 (Labkesda Dinkes)	2,437,017,290.00
2	RKB operasional wisma karantina (Dinkes)	1,978,923,899.00
3	RKB operasional petugas pengawal vaksin covid-19 (Dinkes)	141,752,200.00
4	RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 di balai labkes dinkes kebutuhan juni 2021 (Dinkes)	131,135,000.00
5	BTT untuk penyaluran bansos pangan bagi keluarga pasien isolasi terpadu dampak covid-19 (Dinsos)	118,712,065.00
6	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1162/II tgl 22-09-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 tahun 2021 tgl 30-06-2021	139,500,000.00
7	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov. Kep. Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1364/II tgl 08-10-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	155,000,000.00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1660/II tgl 25-11-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 tahun 2021 tgl 30-06-2021	80,500,000.00
TOTAL		**5,182,540,454.00**

Dari tabel diatas, rincian realisasi BTT dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas kesehatan.
   a. RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Daerah (Labkesda) dinas kesehatan terealisasi senilai Rp2.437.017.290,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,750,000.00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2,800,000.00
3	Belanja Bahan Praktek	1,736,897,290.00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675,000.00
5	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00
6	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Laboratorium PCR	147,015,000.00
7	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan	545,380,000.00
	JUMLAH	2,437,017,290.00

b. RKB operasional wisma karantina covid-19 pada dinas kesehatan terealisasi senilai Rp1.978.923.899,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	18,770,000.00
3	Belanja Bahan Kebersihan dan Bahan Lainnya	102,346,991.00
4	Alat Tulis Kantor Kegiatan Wisma Karantina	4,124,500.00
5	Belanja Cetak (Spanduk)	263,208.00
6	Fotocopy (Wisma Karantina)	3,499,800.00
7	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	270,000.00
8	Belanja Obat - Obatan	18,978,200.00
9	Air Minum Galon	500,000.00
10	Air Mineral Botol (Dus)	17,100,000.00
11	Makan Minum Pasien	640,350,000.00
12	Makan Minum Petugas	297,720,000.00
13	Jasa Tenaga Kesehatan	346,460,000.00
14	Jasa Tenaga Administrasi dan Logistik	96,525,000.00
15	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Cleaning Servis)	134,640,000.00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51,480,000.00
17	Belanja Jasa Tenaga Sopir	13,860,000.00
18	Pemeliharaan Wisma Karantina	24,987,000.00
19	Pulsa (Operasional Petugas)	4,073,000.00
20	Loundry (Wisma Karantina)	160,059,000.00
21	Listrik Asrama Haji	20,278,700.00
22	Air PDAM Asrama Haji	22,638,500.00
		-
	TOTAL	**1,978,923,899.00**

c. RKB operasional petugas pengawal vaksin covid-19 pada dinas kesehatan terealisasi senilai Rp141.752.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Uang transportasi	95,400,000.00
2	Uang makan	42,930,000.00
3	Belanja perjalanan dinas	3,422,200.00
	TOTAL	**141,752,200.00**

d. RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 pada UPTD Labkesda dinas kesehatan terealisasi senilai Rp131.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000.00
2	Belanja Makanan dan Minuman	33,570,000.00
3	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan	94,565,000.00
	TOTAL	**131,135,000.00**

2. Dinas sosial.

   a. BTT untuk penyaluran bantuan sosial pangan bagi keluarga pasien isolasi terpadu yang terdampak covid-19 terealisasi senilai Rp118.712.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium KPA/PPTK/Tim Pelaksana Kegiatan/Petugas Lapangan	40,500,000.00
2	Belanja Alat tulis kantor	800,000.00
3	Belanja dokumentasi	520,000.00
4	Belanja goody bag	4,735,500.00
5	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,785,000.00
6	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	51,371,565.00
	TOTAL	**118,712,065.00**

Bansos pangan ini didistribusikan kepada keluarga pasien isolasi terpadu yang terdampak covid-19 sebanyak 210 paket sembako senilai Rp300.000,00 yang terdiri atas :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	Beras	1 Karung (isi 10 kg)
2	Gula pasir	1 Kg
3	Minyak goreng	2 Liter
4	Mie instan	10 Bungkus
5	Tepung tapioka	1 Kg
6	Kecap manis	1 Botol
7	Ikan sarden	1 Kaleng
8	Susu cair	1 Kotak
9	Kantong kain	1 Buah

3. Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) pada Sekretariat Daerah.

   a. BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan bagi perorangan/masyarakat yang digunakan untuk berobat (biaya pengobatan) senilai Rp375.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

   - Surat No. 980/1346/II Tgl. 8/10/2021 senilai Rp155.000.000,00
   - Surat No. 980/1162/II Tgl. 22/9/2021 senilai Rp139.500.000,00
   - Surat No. 980/1660/II Tgl. 25/11/2021 senilai Rp80.500.000,00

II.2.3 TRANSFER

Transfer merupakan akun Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp386.723.300.984,00 dan terealisasi senilai Rp349.920.091.503,66 atau 90,48%. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya senilai Rp371.541.838.479,21 terjadi penurunan senilai Rp21.621.746.975,55. atau 5,82%.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	346,986,350,984.00	314,048,588,503.66	90.51%	330,883,067,997.21
Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	39,736,950,000.00	35,871,503,000.00	90.27%	35,557,625,000.00
Bagi Hasil Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	0.00%	4,042,200,000.00
Bantuan Keuangan kepada partai Politik	-	-	0.00%	1,058,945,482.00
Jumlah	**386,723,300,984.00**	**349,920,091,503.66**	**90.48%**	**371,541,838,479.21**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota tahun 2021 senilai Rp314.048.588.503,66 atau 90,51% dari anggaran Rp346.986.350.984,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 senilai Rp330.883.067.997,21 terjadi penurunan senilai Rp16.834..479.493,55 atau 5,09%.

b. Realisasi Bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota tahun 2021 senilai Rp35.871.503.000,00 atau 90,72% dari anggaran Rp39.736.950.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 senilai Rp35.557.625.000,00 terjadi kenaikan senilai Rp313.878.000 atau 0,88%.

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Bagi Hasil Pajak kepada Kota Pangkalpinang	65,447,181,636.00	65,346,181,635.06	99.85%	79,346,167,709.19
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka	60,757,086,120.00	53,948,104,011.07	88.79%	59,568,265,950.94
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Tengah	46,964,809,748.00	41,089,489,406.37	87.49%	40,461,734,619.42
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Barat	43,720,823,406.00	37,901,443,662.20	86.69%	36,879,667,371.37
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Selatan	40,311,583,473.00	35,622,579,596.60	88.37%	33,880,929,539.74
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung	50,937,367,697.00	46,131,074,816.47	90.56%	45,273,388,864.65
Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung Timur	38,847,498,904.00	34,009,715,375.89	87.55%	35,472,913,941.90
	346,986,350,984.00	**314,048,588,503.66**	**90.51%**	**330,883,067,997.21**

Pada tahun 2021 belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota terealisasi senilai Rp314.048.588.503,66 atau 90,51% dari yang dianggarkan senilai Rp346.986.350.984,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 yang lalu senilai Rp330.883.067.997,21 terjadi penurunan senilai Rp16.834.479.493,55 atau 5,09%. Penurunan belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, disebabkan daya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkurang, dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat menurun saat pandemi Covid-19.

Adapun rincian bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota beserta Nomor Bukti SP2D dan Nomor SK Gubernur tentang Pembagian Bagi Hasil Pajak per kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran III Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pangkalpinang	3.580.700.000,00	3.059.000.000,00	85,43%	3.668.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka	4.779.200.000,00	4.513.800.000,00	94,45%	4.843.925.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung	3.966.150.000,00	3.673.103.000,00	92,61%	3.115.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Selatan	4.192.750.000,00	3.826.200.000,00	91,26%	2.964.100.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Tengah	4.098.800.000,00	3.562.200.000,00	86,91%	3.412.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Barat	16.121.250.000,00	14.474.800.000,00	89,79%	15.359.800.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung Timur	2.998.100.000,00	2.762.400.000,00	92,14%	2.194.800.000,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	0,00%	4.042.200.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	0,00%	1.058.945.482,00
Bantuan Keuangan ke Nusa Tenggara Barat	-	-		-
Jumlah	**39.736.950.000,00**	**35.871.503.000,00**	**90,27%**	**40.658.770.482,00**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pada tahun 2021 tidak dianggarkan. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp35.871.508.000 atau 90,27% dari anggaran sebesar Rp39.736.950.000,00 realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa tidak dianggarkan dan realisasi bantuan keuangan kepada partai politik tidak dianggarkan.

II.2.4 SURPLUS/DEFISIT

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
SURPLUS/DEFISIT	(291,925,982,002.00)	243,135,302,720.00	(83.29)	(169,910,129,261.49)
Jumlah	**(291,925,982,002.00)**	**243,135,302,720.00**	**-83.29%**	**(169,910,129,261.49)**

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya menganggarkan defisit senilai Rp291.925.982.002.00 namun dalam realisasinya mengalami surplus senilai Rp243.135.302.720 atau -83,29%. Dibandingkan dengan realisasi Surplus/Defisit tahun lalu, di mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit senilai Rp169.910.129.261,49 terjadi kenaikan senilai Rp413.045.431.981.49 atau 243,09%.

II.2.5. PEMBIAYAAN

Anggaran dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
SURPLUS/DEFISIT	**(291,925,982,002.00)**	**243,135,302,929.63**		**(169,910,129,261.49)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	49,536,738,603.00	49,536,738,602.62	100.00%	219,446,867,864.11
Pencairan Dana Cadangan	-	-		-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-
Penerimaan Pinjaman Daerah	245,296,000,000.00	152,885,862,772.00	62.33%	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**294,832,738,603.00**	**202,422,601,374.62**	**68.66%**	**219,446,867,864.11**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-		-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2,906,757,600.00	1,938,878,785.44	66.70%	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2,906,757,600.00**	**1,938,878,785.44**		**-**
PEMBIAYAAN NETO	**291,925,981,003.00**	**200,483,722,589.18**	**68.68%**	**219,446,867,864.11**
SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN (SiLPA)	**(999.00)**	**443,619,025,518.81**	**-**	**49,536,738,602.62**

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp294.832.738.603,00 terealisasi senilai Rp202.422.601.374,62 atau 68,66%. Realisasi penerimaan pembiayaan terdiri atas penggunaan SiLPA senilai Rp.49.536.738.603,00 dan penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.152.885.862.772 dengan rincian sebagai berikut:

4. Senilai Rp4.363.270.000,00 diperuntukkan bagi RSUP provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, pembangunan gedung radioterapi dan pembangunan geudng jenazah;
5. Senilai Rp32.999.489.772,00 diperuntukkan bagi dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) muara sungai Baturusa; dan
6. Senilai Rp115.523.103.000,00 diperuntukkan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan infrastruktur jalan.

SiLPA akhir pada LRA Rp443.619.025.518,81 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca dan di LAK Rp445.246.463.452,43, yaitu senilai Rp1.627.437.933,60. Penjelasan perbedaan saldo akhir kas di SiLPA dengan saldo akhir kas di Neraca dan di LAK tersebut sebagai berikut:

a. Terdapat penerimaan yang masuk ke SiLPA senilai Rp91.229.102,00 (Rp415.463.704.268,44-Rp415.372.475.166,45) yang terdiri dari penerimaan kelebihan bayar pendapatan IMTA sebesar Rp64.519.500,00 dan penerimaan yang tidak diketahui asal usulnya sebesar Rp26.700.000,00 dan kelebihan pembayaran TGR sebesar Rp9.602,00 serta selisih dibelakang koma RK bank senilai Rp0.01;
b. Adanya selisih yang berasal dari kas lainnya senilai minus Rp3.023.501.479,98,00 (Rp385.270.482,00-Rp3.408.771.961,98) yang berasal dari saldo kas IPP senilai Rp1.931.289.275,18, dan saldo kas BANPER senilai Rp735.542.340,80 adanya koreksi double entry pihak bank senilai Rp1.667.928,00 dan adanya jumlah PFK tahun senilai Rp12.781.454,00 serta terdapat SP2D yang tidak cair tahun lalu senilai Rp330.000,00 yang masuk ke SiLPA, dan dikurangi dengan penerimaan kelebihan bayar pendapatan IMTA senilai Rp64.519.500,00 dan penerimaan yang tidak diketahui asal usulnya senilai Rp26.700.000,00 dan kelebihan pembayaran TGR senilai Rp9.602,00 yang tidak masuk kas lainnya, adanya kelebihan setor penerimaan

retribusi DLHD senilai Rp900,00, adanya pengembalian gaji dari SMAN I Pangkalpinang senilai Rp5.600.000,00, dan kelebihan pengembalian UP senilai Rp1.000,00, Adanya PFK dinas Pendidikan senilai Rp169.045,00, serta adanya sisa kas yang berasal dari rekening Satgas BPBD senilai Rp285.001.199,00;

c. Terdapat perbedaan di kas bendahara pengeluaran di SiLPA dengan yang di LAK senilai Rp2.159.396.429,37 (Rp2.209.106.875,99-Rp49.710.446,62) yang berasal dari sisa UP tahun lalu senilai Rp111.287.481,37, sisa pertanggungjawaban belanja dinas Pendidikan tahun 2021 senilai Rp758.230.430,00 dan kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang di reklas ke aset lain-lain senilai Rp1.289.992.800,00;
d. Adanya perbedaan antara saldo kas di bendahara BOS yang ada di LAK dengan di SiLPA senilai minus Rp854.561.985,00 (Rp3.701.379.460,00-Rp4.555.941.445,00) disebabkan adanya selisih saldo awal bos di SiLPA dan LAK tahun lalu senilai Rp209.564.764,00, adanya saldo bos dan bunga yang dikembalikan ke sekolah senilai Rp211.093.066,00, adanya sisa belanja bos kurang salur tahun 2019 senilai Rp 271.899.192,00, dan adanya pengembalian kas bos ke sekolah senilai Rp18.406.300,00, serta adanya pengembalian kas bos ke kas daerah senilai Rp27.920.131,00, serta adanya mutasi penerimaan BOS di neraca dan di SiLPA senilai Rp171.518.794,00.

IV. PENJELASAN TAMBAHAN TERKAIT REALISASI ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19.

Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, selain dianggarkan dalam BTT pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menganggarkan penanganan pandemi covid-19 dalam program/kegiatan OPD yang terdiri atas 3 (tiga) prioritas yaitu bidang kesehatan, bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Penanganan Dampak Ekonomi. Adapun rincian realisasi penanganan pandemi covid-19 dalam 3 (tiga) prioritas tersebut dapat dilihat pada lampiran XXIX Catatan Atas Lapoan Keuangan Tahun 2021. Dari lampiran tersebut terlihat bahwa prioritas untuk bidang kesehatan yang terealisasi senilai Rp81.782.097.502 dari anggaran sebesar Rp116.461.400.583 atau 70,22%, realisasi bidang JPS sebesar Rp1.483.897.000 dari anggaran senilai Rp1.559.216.000 atau 95,17% dan realisasi bidang penanganan dampak ekonomi sebesar Rp34.760.882.302 dari anggaran senilai Rp27.127.190.941 atau 78,04%.

Realisasi secara keseluruhan 3 (tiga) prioritas belanja dalam rangka penanganan pandemic covid-19 tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran XXIX Catatan atas laporan Keuangan. Dari lampiran tersebut dapat dilihat bahwa total anggaran penanganan pandemic covid-19 TA 2021 senilai Rp152.781.498.885 terealisasi senilai Rp110.393.185.443 atau 72,26% yang terdiri atas 3 (tiga) prioritas yaitu :

I. Prioritas Bidang Kesehatan.

Realisasi bidang kesehatan dengan anggaran senilai Rp116.461.400.583 terealisasi senilai Rp81.782.097.502 atau 70,22%. Adapun rincian realisasi per OPD sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan dengan anggaran senilai Rp62.482.701.218,00 terealisasi senilai Rp41.495.002.375,00 atau 66,41%;

b. RSUP dengan anggaran senilai Rp43.063.206.502,00 terealisasi senilai Rp31.823.973.102,00 atau 73,90%;

c. RSJD dengan anggaran senilai Rp9.638.137.863,00 terealisasi senilai Rp7.969.409.960,00 atau 82,69%;

d. Dinas Sosial dengan anggaran senilai Rp902.355.000,00 terealisasi senilai Rp118.712.065,00 atau 13,16%;

e. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan anggaran senilai Rp375.000.000,00 terealisasi senilai Rp375.000.000 atau 100%;

II. Prioritas Bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS).

a. Dinas Sosial dengan anggaran senilai Rp572.216.000,00 terealisasi senilai Rp498.897.000,00 atau 86,84%;

b. Dinas Pendidikan dengan anggaran senilai Rp987.000.000,00 terealisasi senilai Rp987.000.000,00 atau 100%;

III. Prioritas Penanganan Dampak Ekonomi.

a. Dinas Pendidikan dengan anggaran senilai Rp23.933.005.624,00 terealisasi senilai Rp20.593.383.741,00 atau 86,05%;

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran senilai Rp1.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp957.838.200,00 atau 95,78%;

c. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggaran senilai Rp105.000.000,00 terealisasi senilai Rp35.000.000,00 atau 11,48%;

d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggaran senilai Rp337.556.019,00 terealisasi senilai Rp272.142.250,00 atau 80,62%;

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran senilai Rp103.000.000,00 terealisasi senilai Rp62.000.000,00 atau 60,19%;

f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran senilai Rp9.082.320.659,00 terealisasi senilai Rp5.206.826.750,00 atau 57,33%;

BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

III.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 12 aset dan kewajiban pemerintah.

III.2 PENJELASAN PER POS NERACA

III.2.1 ASET

III.2.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya, dan Persediaan.

III.2.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2020 senilai Rp 27.769.606.716,02. Sedangkan Saldo Kas di Kas Daerah adalah sisa kas pada rekening giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 senilai Rp415.463.704.268,44.

Posisi Kas di Kas Daerah berdasarkan saldo bank yang telah dikonfirmasikan oleh bank lewat rincian transaksi yang ada di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Bank Rakyat Indonesia senilai Rp415.463.704.268,44 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang		
Rekening 144-3000005	834.060.730,00	239.597.904,00
Rekening 144-3000011	414.629.643.538,44	27.621.237.914,01
Jumlah	**415.463.704.268,44**	**27.860.835.818,01**

Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca jika dibandingkan dengan saldo rekening koran terdapat perbedaan senilai Rp91.229.102,00. Nilai tersebut berasal dari Kas Lainnya yang terdiri dari:

1) kelebihan bayar pendapatan IMTA pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp64.519.500,00;
2) yang tidak diketahui asal usulnya yang diakui sebagai penerimaan lainnya senilai Rp26.700.000,00;
3) kelebihan pembayaran TGR senilai Rp9.602,00.

III.2.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang kas di Bendahara Penerimaan pada satuan kerja yang mengelola pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2021. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

III.2.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah (selisih dari SP2D yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

Pada tahun 2021 jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah senilai Rp49.596.164,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Rp49.446.032,62
2. Badan Penghubung (Rp2.900,00)
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp153.032,00

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran (non PFK)	49.596.164,62	67.640.740,00
Jumlah	**49.596.164,62**	**67.640.740,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021.

Terdapat Rekening Penampung untuk transaksi non tunai untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada unit kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:900/47/BAKUDA tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Penampung Untuk Transaksi Non Tunai pada Unit Kerja Di Lingkungan Badan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nomor dan nama rekening penampung tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	UNIT KERJA	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	UPT BAKUDA WILAYAH KOTA PANGKALPINANG	GIRO PKB DINAS I	1443010349
2.	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BANGKA	GIRO PKB DINAS II	1453010498
3.	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	GIRO PKB DINAS III	16131000075
4.	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	GIRO PKB DINAS IV	1553011050
5.	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT	GIRO PKB DINAS V	1623010084
6.	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BELITUNG	GIRO PKB DINAS VI	1463010375
7	UPT BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	GIRO PKB DINAS VII	1633010117

III.2.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Rekening Kas di Bendahara BLUD merupakan rekening untuk menampung seluruh penerimaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dan untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD yang bersumber dari penerimaan BLUD. Dana yang terdapat pada Kas BLUD dapat langsung digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD per 31 Desember 2021 senilai Rp21.859.564.432,38 merupakan kas dalam pengelolaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp975.060.021,95, RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp15.665.606.872,43 dan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp5.218.897.538,00 .

Kas dan setara kas BLUD ditempatkan pada Bank Sumsel Babel terdiri dari rekening 145.30.10464 senilai Rp975.060.021,95, rekening 144-301-0157 senilai Rp14.815.107.631,21, rekening 144-301-2135 senilai Rp5.218.897.538,00 dan Bank Mandiri Syariah yaitu rekening 712-777-6827 senilai Rp850.499.241,22.

Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Dinas Kesehatan		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.12135	5.218.897.538,00	-
a) Rumah Sakit Jiwa Prov.Kep. Bangka Belitung		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10464	975.060.021,95	3.251.734.315,81
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10233	-	-
b) RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.10157	14.815.107.631,21	4.917.887.691,30
- Bank Mandiri Syariah No. Rek.712,777,6827	850.499.241,22	3.722.209.700,13
Jumlah	**21.859.564.432,38**	**11.891.831.707,24**

Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/603/RSJD/2014, tanggal 23 September 2014.

Penetapan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1a/RSUDP/2017 tanggal 3 Januari 2017.

Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/23/DINKES/2021 tanggal 18 Januari 2021.

III.2.1.1.5 Kas Lainnya

Akun Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung uang yang berasal dari pajak (PFK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021. Pada tahun 2020 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp2.029.869.027,98, sedangkan pada tahun 2021 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp3.408.771.961,98 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (PFK) senilai Rp169.045,00 merupakan pajak pada Dinas Pendidikan yang belum disetor.
2) Kas Lainnya di Bendahara Sekolah yaitu sisa kas di bendahara sekolah atas perolehan Banper senilai Rp735.542.340,80 dan Bendahara IPP senilai Rp1.931.289.275,18.
3) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya;
   Kas yang dibatasi penggunaannya senilai Rp456.770.102,00 berasal dari:
   - Pengembalian barang bukti berupa kas yang disita pengadilan untuk kasus pembelian tanah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp365.541.000,00. Penitipan kas yang disita pengadilan di rekening Pengadilan Negeri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 0063-01-001686-30-0;
   - Kelebihan bayar pendapatan IMTA pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp64.519.500,00;
   - yang tidak diketahui asal usulnya yang diakui sebagai penerimaan lainnya senilai Rp26.700.000,00;
   - Kelebihan pembayaran TGR senilai Rp9.602,00.
4) Kas yang berasal dari sumbangan masyarakat yang penggunaannya khusus untuk penanganan covid senilai Rp Rp285.001.199,00 yang merupakan saldo kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kas Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Lainnya - di Bendahara Sekolah		
Bendahara Banper	735.542.340,80	153.248.225,80
Bendahara IPP	1.931.289.275,18	940.911.007,18
Kas Lainnya - di Bendahara Pengeluaran (PFK)	169.045,00	8.750.000,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	456.770.102,00	456.770.102,00
Kas yang berasal dari sumbangan masyarakat (covid)	285.001.199,00	470.189.693,00
Jumlah	**3.408.771.961,98**	**2.029.869.027,98**

III.2.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS merupakan rekening kas yang berfungsi untuk mencatat dana yang bersumber dari APBN dan diterima SMA dan SMK, baik yang ditransfer langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum maupun yang melewati APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS dalam neraca per 31 Desember tahun 2021 adalah Rp4.555.941.445,00.

Rincian Saldo Dana BOS SMA/SMK dari dana APBN per 31 Desember 2021, dapat dilihat pada Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021.

Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Bendahara Dana BOS	4.555.941.445,00	9.212.668.840,00
Jumlah	**4.555.941.445,00**	**9.212.668.840,00**

III.2.1.1.7 Piutang Pendapatan

Akun ini merupakan piutang atas Piutang Pendapatan, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Saldo Piutang Pendapatan dalam neraca *anaudited* Tahun Anggaran 2021 senilai Rp10.792.628.512,00 berasal dari Piutang Retribusi senilai Rp35.187.750,00, Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Piutang BLUD RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO) senilai Rp10.763.315.403, (Piutang RSJD) senilai Rp 174.125.359,00,. Daftar Piutang Pendapatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran VI Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 senilai Rp10.792.628.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Piutang Retribusi	**35.187.750,00**	**2.766.000,00**
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.187.750,00	2.316.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	450.000,00
b. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	**10.937.440.762,00**	**749.133.282,53**
- Piutang BLUD (RSUP)	10.763.315.403,00	12.149.657,53
- Piutang BLUD (RSJD)	174.125.359,00	736.983.625,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**-**	**6.300.039.983,00**
- Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	-	4.325.446.848,00
- Piutang Dana Bagi Hasil SDA	-	1.974.593.135,00
Jumlah	**10.972.628.512,00**	**7.051.939.265,53**

III.2.1.1.8 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya dalam neraca *audited* Tahun Anggaran 2020 senilai Rp6.415.068.158,27 berasal dari bagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) senilai Rp6.375.139.958,27, dan piutang lainnya (Taspen) senilai Rp39.928.200,00.

Saldo piutang lainnya Per 31 Desember 2021 senilai Rp7.296.000.481,86 berasal dari bagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) senilai Rp6.518.816.888,66, dan piutang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman atas pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok senilai Rp777.183.593,20.

Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp7.296.000.481,86 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Bagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.518.816.888,66	6.375.139.958,27
- Piutang Lainnya DPUPRPRKP	777.183.593,20	39.928.200,00
Jumlah	**7.296.000.481,86**	**6.415.068.158,27**

Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) senilai Rp6.518.816.888,66 dapat dilihat dalam Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan akun untuk menyajikan saldo tagihan penjualan atas barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan pembayaran secara angsuran yang telah dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran *audited* per 31 Desember 2020 berjumlah Rp0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Rumah Dinas	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Akun ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Pegawai Negeri bukan bendahara, sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 senilai Rp6.375.139.958,27. Selama tahun 2021 telah terjadi pembayaran senilai Rp859.753.746,88, koreksi kurang setoran senilai Rp 234136702,00 dan koreksi tambah temuan senilai Rp1.919.250,00 dan penambahan temuan berdasarkan SK Pembebanan senilai Rp1.235.648.129,27 sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2020 menjadi Rp6.518.816.888,66.

Untuk tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara menyampaikan Surat Tagihan. Selain itu, beberapa pihak menyerahkan surat tanah sebagai jaminan. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

III.2.1.1.9 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang jatuh tempo bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pada 31 Desember 2021 saldo penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan senilai Rp5.897.598.449,62 merupakan penyisihan piutang yang berasal dari:

a. penyisihan piutang retribusi DLHK senilai R11.012.599,00,
b. piutang BLUD RSUP senilai Rp54.970.794,48,
c. piutang BLUD RSJD senilai Rp90.561.589,05,
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp5.741.053.467,09.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dillihat pada Lampiran VIII Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

III.2.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 senilai Rp278.726.881,72 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung Provinsi berupa sewa rumah singgah di Jakarta senilai Rp65.860.215,05, Palembang senilai Rp146,102,777,78, Indralaya senilai Rp16.805.555,56 dam Surakarta senilai Rp49.958.333,33.dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Sewa Rumah Singgah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan SPK nomor 027/01/PA-RUMAHSINGGAH/SPK/PENGHUBUNG/2021 tanggal 28 April 2021 Rp.140.000.000,- (12 bulan) / 01 (Satu) Tahun (20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022).
2. Pembayaran Belanja Sewa Rumah Singgah di Palembang pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan SPK nomor: 027/02/PA-RUMAHSINGGAH/SPK/PENGHUBUNG/2021 tanggal 8 November 2021 sebesar Rp.149.000.000,- (12 bulan, 23 Nov 2021 s/d 23 Nov 2022).
3. BELANJA SEWA ASRAMA/RUMAH ISBA DI INDRALAYA pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor: 027/02/PA-RUMAHSINGGAH/SPK/PENGHUBUNG/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.24.200.000,- (12 bulan, 10 September 2021 s/d 10 September 2022).
4. Pembayaran BELANJA SEWA ASRAMA/RUMAH ISBA DI SURAKARTA pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor: 027/02/PA-RUMAHSINGGAH/SPK/PENGHUBUNG/2021 tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.54.500.000,- (12 bulan, 1 Des 2021 s/d 1 Des 2022).

C.2.1.1.11 Persediaan

Saldo persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, bahan kimia, perbekalan kesehatan, bahan/barang habis pakai, barang yang diserahkan kepada masyarakat dan persediaan lain-lain.

Saldo persediaan audited per 31 Desember 2020 senilai Rp88.668.800.881,53. Selama tahun 2021 persediaan mengalami mutasi penambahan senilai Rp123.690.332.394,42 dan mutasi pengurangan senilai Rp131.137.130.801,39, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2021 senilai Rp81.222.002.474,56.

Mutasi penambahan berupa penambahan pencatatan senilai Rp74.597.768.994,42, alih status penggunaan senilai Rp17.055.603.600,00, Reklasifikasi senilai Rp16.770.000,00 dan hibah senilai Rp32.020.189.800,00, sedangkan mutasi pengurangan merupakan mutasi pengurangan pencatatan senilai Rp112.924.439.876,39, alih status penggunaan senilai Rp17.055.603.600,00 dan reklasifikasi senilai Rp1.157.087.325,00

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penambahan pencatatan persediaan senilai Rp74.597.768.994,42 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp909.889.000,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp556.579.948,00;
   - Inspektorat Daerah senilai Rp198.447.672,00;
   - Bappelitbang senilai Rp341.618.048,00;
   - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah senilai Rp498.821.370,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp907.293.916,07;
   - Dinas Penanaman Modal dan PPTSP senilai Rp162.279.344,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp151.012.040,00;

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp63.113.000,00;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp170.642.265,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp419.301.535,00;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp285.399.740,50;
- Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.100.597.100,00;
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.147.525.076,06;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp2.055.341.104,00;
- Dinas Tenaga Kerja senilai Rp248.078.322,00;
- Dinas Perhubungan senilai Rp139.189.775,00;
- Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp512.253.815,00;
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp186.535.446,00;
- Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp608.489.341,03;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp214.650.314,00;
- Dinas Kesehatan senilai Rp43.631.638.090,27;
- Dinas Pendidikan senilai Rp14.687.751.316,25;
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp2.679.547.948,24;
- Badan Penghubung Provinsi senilai Rp115.281.700,00;
- Kantor SatPol PP senilai Rp101.985.300,00;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.504.506.468,00;

b. Penambahan persediaan dari alih status senilai Rp17.055.603.600,00, dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp49.889.000;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp211.491.000,00;
   - Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp2.926.600,00;
   - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp16.733.343.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp57.954.000,00.

c. Penambahan pencatatan persediaan dari reklasifikasi peralatan dan mesin senilai Rp16.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Pendidikan berupa lampu tembak senilai Rp270.000,00;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa umbul-umbul senilai Rp16.500.000,00;

d. Penambahan pencatatan persediaan dari hibah senilai Rp32.020.189.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kesehatan senilai Rp12.365.797.500,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp19.654.392.300,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pengurangan pencatatan persediaan senilai Rp112.924.439.876,39 dengan rincian sebagai berikut :
   - Sekretariat Daerah senilai Rp912.697.475,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp517.383.407,00;

- Inspektorat Daerah senilai Rp197.447.616,00;
- Bappelitbang senilai Rp353.663.048,00;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah senilai Rp499.408.870,00;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp941.718.805,73;
- Dinas Penanaman Modal dan PPTSP senilai Rp126.752.284,00;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp147.289.540,00;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp85.885.500,00;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp178.611.287,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp424.274.335,00;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp351.833.895,30;
- Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.128.148.766,77;
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.320.185.398,73;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp10.556.094.896,04;
- Dinas Tenaga Kerja senilai Rp247.749.422,00;
- Dinas Perhubungan senilai Rp127.015.493,00;
- Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp494.046015,00;
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp186.274.026,00;
- Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp584.233.870,00;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp220.399.913,99;
- Dinas Kesehatan senilai Rp48.392.917.341,08;
- Dinas Pendidikan senilai Rp14.890.545.778,51;
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp2.993.394.227,36;
- Badan Penghubung Provinsi senilai Rp97.224.629,00;
- Kantor SatPol PP senilai Rp102.327.200,00;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp25.846.916.835,80;

f. Pengurangan pencatatan persediaan dari alih status penggunaan senilai Rp17.055.603.600,00 dengan rincian sebagai berikut;
   - Dinas Pangan senilai Rp211.491.000,00;
   - Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa senilai Rp57.954.000,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp49.889.000,00;
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp16.733.343.000,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.926.600,00;

g. Pengurangan pencatatan persediaan atas reklasifikasi persediaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.157.087.325,00.

Persediaan per 31 Desember 2021 senilai Rp81.222.002.474,56 terdiri dari persediaan bahan senilai Rp1.553.968.698,75, suku cadang senilai Rp19.299.000,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp4.797.817.167,59, obat-obatan senilai Rp30.147.907.011,77, persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp44.234.111.521,41, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga senilai Rp417.872.575,00, natura dan pakan senilai Rp51.026.500,04.

Persediaan diatas tidak termasuk dalam kategori obat-obatan dan vaksin yang telah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp4.035.810.558,44 dan obat-obatan serta vaksin yang belum memiliki BAST dari Kementerian Kesehatan senilai Rp11.130.449.319,10 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ASAL	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	OBAT DAN VAKSIN KADALUARSA		**563.383.578,40**	**400.054.207,00**	**1.251.250.129,30**	**1.821.122.643,74**	**1.821.122.643,74**
1	OBAT	APBD	65.528.688,00	135.054.352,00	139.088.828,00	115.123.055,07	115.123.055,07
2	PERBEKKES	APBD	7.202.260,00	9.952.250,00	67.932.924,64	1.983.470,28	1.983.470,28
3	OBAT	HIBAH	25.313.060,40	11.639.500,00	5.024.736,00	61.311.646,00	61.311.646,00
4	PERBEKKES	HIBAH	6.257.460,00	760.000,00	13.368.705,80	1.041.564,00	1.041.564,00
5	PROGRAM OBAT DAN PERBEKKES	HIBAH	459.082.110,00	242.648.105,00	1.025.834.934,86	673.344.564,00	673.344.564,00
6	VAKSIN	-	-	-	-	968.318.344,38	968.318.344,38
	OBAT DAN VAKSIN TANPA BAST		-	-	-	**11.130.449.319,10**	**9.536.426.960,10**
1	OBAT	-	-	-	-	8.959.993.600,60	8.959.993.600,60
2	VAKSIN	-	-	-	-	2.170.455.718,50	576.433.359,50
	TOTAL		**563.383.578,40**	**400.054.207,00**	**1.251.250.129,30**	**12.951.571.962,84**	**11.357.549.603,84**

Selain itu, terdapat barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp16.732.168.000,00 yang telah dicatat sebagai persediaan tetapi belum diserahkan kepada yang menerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Kegiatan	Jumlah	
1	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Kampak Dalam Kota Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	128.259.000.00
2	Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Talud Penahan Tanah Batas Desa Aik Rayak-Kelurahan Lesung Batang Atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	173.842.200.00
3	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kec. Simpang Teritip atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	113.458.632.00
4	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Paya Benua Kabupaten Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	181.621.320.00
5	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Di Kawasan Kota Lama atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	215.427.000.00
6	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Namang Rt. 05 Kec. Namang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.450.000.00
7	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Paya Benua Kabupaten Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	199.660.000.00
8	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Dusun 2 Kamp. Lama Desa Penagan Kab. Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	199.375.000.00
9	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Parit Tiga Jebus Kab. Bangka Barat atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	252.300.000.00
10	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Badau Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	456.945.000.00

NO	Nama Kegiatan	Jumlah	
11	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Tangjung Pandan Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	535.824.900.00
12	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Gg. Sempit Padang Baru Kab. Bangka Tengah atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.280.000.00
13	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Cambai Selatan Kab. Bangka Tengah atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.130.000.00
14	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Membalong Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	461.802.000.00
15	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Kec. Merawang Kab. Bangka atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	427.415.100.00
16	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Sungkap Rt. 02 & Rt. 03 Kec. Simpang Katis atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.630.000.00
17	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Rt. 09 Dusun Kayu Ara Desa Jeruk Kec. Pangkalan Baru atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.200.000.00
18	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Belinyu Kab. Bangka atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	464.964.600.00
19	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Banjir Di Kawasan Kota Lama atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	327.664.467.00
20	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Tanjungpandang Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	853.356.400.00
21	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Membalong Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	724.464.000.00
22	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Badau Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	716.612.000.00
23	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Kampak Dalam Kota Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	299.271.000.00
24	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Tambang 17 Desa Riau Kab. Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana)TA.2016	Rp	199.648.000.00
25	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Gabek 1 atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.783.000.00
26	Pekerjaan Penyediaan P/S Air Minum Desa Penutup Kab. Bangka Selatan atas Kegiatan Pengembangan Sistem Resribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	199.637.000.00
27	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Cit kab. Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.705.000.00
28	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Stasiun VI Desa Gunung Pelawan atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.677.000.00
29	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Kepala Tujuh Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.680.000.00
30	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Bukit Merapin Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.690.000.00
31	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.767.000.00
32	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Urisan Jaya Desa Padang Belitung Timur atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	198.163.000.00
33	Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun Pancur 1 Desa Padang Belitung Timur atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	198.409.000.00
34	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Kepala Tujuh Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	197.986.000.00
35	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Mapur Kab. Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.754.000.00
36	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Di Dusun SPC Tran Desa Rt. 02 Kab. Bangka Selatan atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.788.000.00
37	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Air Lingga Kel. Teladan Kab. Bangka Selatan atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	199.712.000.00
38	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Tambang I Riding Panjang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	183.895.000.00
39	Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Talud Penahan Tanah Batas Desa Aik Rayak-Kel. Lesung Batang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2016	Rp	695.368.800.00
40	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR Kec. Merawang Kab. Bangka atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	997.301.900.00

NO	Nama Kegiatan	Jumlah	
41	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Sengir Kec. Payung Kab. Bangka Selatan atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.760.000.00
42	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Kampung Melayu Kota Pangkalpinang atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana) TA.2016	Rp	199.620.000.00
43	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Badau Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	349.593.000.00
44	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Tanjungpandan Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	396.901.700.00
45	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Belinyu Kab Bangka atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	1.239.895.400.00
46	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	199.676.000.00
47	Pekerjaan Optimalisasi SPAM Di Kawasan MBR IKK Mebalong Kab. Belitung atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tahun Anggaran 2016	Rp	353.074.000.00
48	Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase Desa Paya Benua Kab. Bangka atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	423.783.080.00
49	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Banjir Di Kawasan Kota Lama atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	174.998.533.00
50	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kec. Simpang Teritip atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	264.736.808.00
51	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase parit Tiga Jebus Kab. Bangka Barat atas Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA.2016	Rp	588.700.000.00
52	Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek Brimob atas Kegiatan Pembangunan Jalan Untuk Dihibahkan Tahun	Rp	2.078.801.000.00
53	Pekerjaan Pengaspalan Jalan Klenteng Sheng Mu Miao atas Kegiatan Pembangunan Jalan Untuk Dihibahkan	Rp	976.541.000.00
54	Pekerjaan Rehabilitasi Areal Perkantoran Mapolda Babel atas Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan untuk Dihibahkan Tahun Anggaran 2017	Rp	1.189.263.000.00
55	Optimalisasi SPAM di Desa Air Mesu	Rp	964.525.000.00
56	Supervisi/Pengawasan Optimalisasi SPAM Desa Air Mesu	Rp	49.896.000.00
57	Optimalisasi SPAM IKK Sungailiat	Rp	908.244.000.00
58	Supervisi/Pengawasan Optimalisasi IKK Sungailiat	Rp	49.410.000.00
59	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka dan Bangka Barat	Rp	1.835.339.000.00
60	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Rp	1.855.000.000.00
61	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Belitung dan Belitung Timur	Rp	1.895.279.000.00
62	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang	Rp	4.779.533.000.00
63	Pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana Kabupaten Belitung Timur	Rp	4.199.942.000.00
64	Peningkatan Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah Desa Penutuk Kabupaten Bangka	Rp	195.000.000.00
TOTAL		**Rp**	**37.764.428.840.00**

II.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

II.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Dana Bergulir/KUPEM

Investasi Dana Bergulir/KUPEM merupakan pemberian pinjaman Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) melalui kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ditetapkan jatuh temponya berdasarkan akad debitur selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Dasar penilaian dana bergulir yang digunakan dalam Laporan Perkembangan realisasi penyetoran dana bergulir/KUPEM yaitu laporan pihak Bank Rakyat Indonesia

Cabang Pangkalpinang, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan. Suku bunga yang dikenakan dihitung per tahun senilai 6% (enam persen) dalam jangka waktu penyicilan selama 3 (tiga) tahun. Saldo Investasi Dana Bergulir/KUPEM *audited* per 31 Desember 2020 senilai Rp4.256.445.578,00.

Pada Tahun Anggaran 2020 nilai yang disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah senilai Rp4.256.189.745,00. Nilai tersebut berkurang karena adanya realisasi pembayaran senilai Rp1.744.167,00 sehingga nilai investasi dana bergulir/KUPEM per 31 Desember 2021 senilai Rp4.254.445.578,00.

Ada beberapa penyebab dana bergulir tidak dapat ditagih sebagai berikut:

1. Masa tagihnya sudah terlalu lama sejak tahun 2004 sehingga ada sebagian debitur beranggapan sudah tidak dilanjutkan lagi;
2. Keadaan usahanya sudah banyak yang bangkrut dan tidak jelas keberadaannya;
3. Debitur sudah jatuh miskin;
4. Sejak tahun 2007 tidak ada data lagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan baru dilanjutkan lagi tahun 2014/2015;
5. Banyak debitur sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
6. Sebagian debitur tidak mau bayar karena berbagai alasan seperti dana pinjaman tidak sesuai proposal yang diajukan, dana pinjaman digunakan oleh keluarga, debitur sudah merasa melunasi dan lain-lain.

Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dan Saldo KUPEM sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan hasil identifikasi dan verikasi data BRI dan di lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyrakat Desa, dapat dilihat pada Lampiran X Catatan atas Laporan Keuangan.

Investasi Non Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Dana Bergulir/KUPEM		
Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	4.254.445.578,00	4.256.189.745,00
Jumlah	**4.254.445.578,00**	**4.256.189.745,00**

III.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah dalam BUMD dan Lembaga Keuangan, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan Modal dalam BUMD tersebut. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari deviden.

Sumber data nilai penyertaan modal berasal dari laporan keuangan lembaga dan BUMD masing-masing yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data audited penyertaan modal pada masing-masing lembaga dan BUMD belum dapat diperoleh. Sehingga, nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021, yang disajikan merupakan nilai penyertaan modal unaudited.

Pada tahun 2021 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Investasi Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
PT BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang	40.377.000.000,00	40.377.000.000,00
PT Sumatera Shipping Lines	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Sumatera Promotion Centre	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-	-
Riau Air Lines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bank Syariah Bangka	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
PDAM Kota Pangkalpinang	8.216.750.000,00	8.216.750.000,00
PDAM Kabupaten Belitung	731.250.000,00	731.250.000,00
PT JAMKRIDA	24.750.379.746,11	24.480.345.007,40
Jumlah	**78.875.379.746,11**	**78.605.345.007,40**

Penyertaan modal pada PT BPD SUMSELBABEL adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang. Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021 senilai Rp40.377.000.000,00, terdiri dari saham Rp28.081.000.000,00, agio saham Rp12.294.774.000,00, dan sisa yang belum dijadikan saham senilai Rp1.226.000,00. Selama tahun 2021 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan penyertaan modal sehingga jumlah sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp40.377.000.000,00, dengan porsi kepemilikan saham dari 3,10 %. Deviden yang diterima selama tahun 2021 senilai Rp5.714.380.624,89. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah Metode Biaya yang mencatat investasi senilai biaya perolehan.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre berawal dari terbentuknya forum kerjasama Gubernur Sewilayah Sumatera pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memajukan kawasan regional sumatera, di mana salah satu program bersama yang akan dilakukan adalah:

- Pembangunan Gedung PT. Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan masing-masing provinsi;
- Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung ke dalam bankbone sumatera;
- Pendirian PT Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar provinsi se wilayah sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura;
- Pendirian PT Sumatera Airlines bekerjasama dengan PT Merpati Airlines untuk membuka akses antra wilayah se-sumatera tanpa melalui Jakarta.

Untuk mendukung program tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut menyertakan modal masing-masing senilai Rp100.000.000,00 pada PT. Sumatera Shipping Lines dengan tanda terima Nomor 003/XII/03/SSL tanggal 22 Desember 2003 dan PT. Sumatera Promotion Centre dengan Surat Pernyataan Penerimaan Penitipan Sementara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau pada Desember 2003. Sampai 31 Desember 2016 belum memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Sumatera Shipping Lines dan

PT. Sumatera Promotion Centre per 31 Desember 2016. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada ketiga perusahaan di atas adalah Metode Biaya.

Penyertaan pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera telah dilakukan sejak tahun 2006. BUMD ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nama PT Bangka Belitung Sejahtera dan dirubah pada tanggal 26 Maret 2007 menjadi PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pembangunan, jasa, transportasi, perbengkelan dan percetakan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan unit-unit usaha tidak berjalan baik dan lancar.

Susunan pemegang saham pada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari total keseluruhan modal yang disertakan Rp4.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN	RUPIAH
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.920	98 %	3.920.000.000,00
2.	Tuan Ir. Modestu Buntar Gunawan	40	1 %	40.000.000,00
3.	Tuan Ferdinand Lian	40	1 %	40.000.000,00
	JUMLAH	4.000	100 %	4.000.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dalam neraca *audited* per 31 Desember 2019 senilai minus (rugi) Rp1.110.292.686,00. Untuk tahun 2020 saldo penyertaan modal senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2020 (*unaudited*) di mana diketahui jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00 dengan porsi kepemilikan saham senilai 98%,

Metode penilaian investasi menggunakan Metode Ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai ivestasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil sehingga nilai saldo akhir penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun Anggaran 2020 senilai Rp0,00.

Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines senilai Rp1.000.000.000,00, hingga 31 Desember 2020 belum memberikan kontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Riau Airlines didirikan pada Maret 2002 dan memulai operasinya pada Desember 2002. Perusahaan ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat di luar Jakarta. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa provinsi dan kabupaten lain seperti Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. PT Riau Airlines didirikan untuk menghubungkan kota-kota di Propinsi Riau yang memiliki banyak bandara perintis dan menghubungkan semua kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Pada tahun 2008 perusahaan ini mengalami krisis keuangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Dengan penilaian kinerja PT Riau Airlines yang terus merugi

selama tiga tahun berturut-turut dan hutang per Mei 2011 mencapai Rp234.356.000.000,00, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Riau Airlines tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan untuk menarik saham (divertasi) senilai Rp1.000.000.000,00 atau 0,6 % dari total saham senilai Rp167.900.000.000,00 milik PT. Riau Airlines. Pada 5 Juni 2012 sidang perkara pailit digelar dengan dasar gugatan PT. Riau Airlines sudah tidak mampu membayar utang atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Muamalat dengan sisa utang senilai Rp80.000.000.000,00 di luar bunga yang totalnya mencapai Rp104.000.000.000,00. PT Riau Airlines pun mengajukan kasasi atas putusan itu, pada 12 Juli 2012 hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bank Muamalat. Pada dasarnya semua Pemerintah Daerah masih mengharapkan PT Airlines dapat dipertahankan untuk beroperasi kembali, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai saham milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Riau Air Lines per 31 Desember 2020. Metode Penilaian Investasi pada PT Riau Air Lines digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Syariah Bangka pada neraca per 31 Desember 2020 senilai Rp3.600.000.000,00. Selama tahun 2020 tidak ada penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah. Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari jumlah deviden yang diterima selama tahun 2020 senilai Rp0,00. Metode Penilaian Investasi pada Bank Syariah Bangka digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal PDAM Kota Pangkalpinang dalam neraca *audited* per 31 Desember 2015 senilai Rp8.216.750.000,00. Selama tahun 2020 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PDAM Kota Pangkalpinang, sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2020 tetap senilai Rp8.216.750.000,00, dengan porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 10,1 % dari Rp81.156.071.522,00 modal yang disetorkan. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian investasi pada PDAM Kota Pangkalpinang yaitu Metode Biaya.

Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2015 senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,79%. Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan penyertaan modal, sehingga saldo penyertaan modal tetap senilai Rp731.250,000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,54%. Metode Penilaian yang digunakan dalm penilaian Investasi pada PDAM Kabupaten Belitung yaitu Metode Biaya.

PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT. JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT. JAMKRIDA dengan

menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas. Dengan menggunakan metode penilaian ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Pada neraca *audited* 31 Desember 2020 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. JAMKRIDA senilai Rp24.480.345.007,40, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 64,29% .

Di tahun 2020 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi senilai Rp24.480.345.007,40 dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 64,29%. Selama tahun 2021 terdapat mutasi penambahan tahun 2021 senilai Rp270.034.738,71 yang merupakan selisih bagian laba (rugi) tahun berjalan sesuai persentase kepemilikan senilai Rp420.054.038,00 dengan dividen yang disetor ke kas daerah Pemerintah Provinsi. Di tahun 2021 tidak ada penyetoran dividen dari PT JAMKRIDA ke kas daerah Provinsi.Nilai Rp270.034.738,71 merupakan nilai laba ditahan yang menjadi penambah penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Jamkrida.

Daftar rincian perhitungan penyertaan modal dan Persentase Kepemilikan investasi (Penyertaan Modal) Daerah dapat dilihat pada Lampiran XI.

III.2.1.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset tetap dalam neraca *audited* per 31 Desember Tahun 2020 senilai Rp6.475.186.023.416,78. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari lebih/kurang pencatatan, alih status penggunaan, reklasifikasi, belanja modal, kapitalisasi, hibah, penghapusan, yang terdiri dari :

1. Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp3.702.145.625,60,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan aset tetap senilai Rp215.740.615.470,27;
3. Penambahan aset tetap berasal dari reklasifikasi senilai Rp28.521.892.292,00 merupakan penambahan adanya reklas aset tetap antar kelompok aset tetap;
4. Penambahan aset tetap dari hibah senilai Rp68.349.202.990,54,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah;

   Hibah senilai Rp68.349.202.990,54 tersebut terdiri atas:

   - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah senilai Rp4.790.494,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2584/PL.08.03/B.05/T/11/2021 & 032/1513/BAPPEDA/2021 tanggal 18 Nopember 2021)

Hibah tersebut berupa aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp4.790.494,00.

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp754.445.342,00 yang merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional RI (4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021 tanggal 10 September 2021, 3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021 tanggal 2 Juli 2021, PK.02.08/470/2018 tanggal 19 Desember 2018 & 4799/4.2/PLK.03.04/X.2021 tanggal 3 Nopember 2021).

  Hibah tersebut berupa aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp709.142.447,00 aset tetap lainnya senilai Rp45.302.895,00;
- Dinas Perhubungan senilai Rp4.709.793.000,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung (BA. 030/506/BPKAD & 551/66/DISHUB tanggal 15 Februari 2021),Kementerian Perhubungan (BA.06/8/BPTD.VII/2021 & 030/0003/DISHUB tanggal 13 Juli 2021), Pemerintah Desa Bakit (594/09/19.05.06.2004/2021 tanggal 1 Februari 2021). Hibah tersebut berupa aset tanah senilai Rp141.785.000,00 dan aset peralatan mesin senilai Rp3.413.991.000,00;
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.127.757.946,47 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (523/262/DKP/2021 & 523/003/I tanggal 25 Maret 2021), Pemerintah Kabupaten Belitung (030/1474/BPKAD & 030/0018/I tanggal 26 Agustus 2021), Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I tanggal 26 Agustus 2021), Kementerian Kelautan dan Perikanan (B.1018/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DKP/2020tanggal 27 Januari 2020). Hibah aset tersebut berupa aset tanah senilai Rp 91.496.356,47, aset peralatan mesin senilai Rp1.255.561.570,00, aset gedung dan bangunan senilai Rp481.552.800,00,aset jalan,irigasi dan jaringan senilai Rp299.147.220,00;
- Dinas Energi dan Sumber daya Mineral senilai Rp3.553.453.490,00 yang merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (27/BAST/BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ESDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021). Hibah aset tersebut berupa aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp3.553.453.490,00;
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman senilai Rp39.636.200.130,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021 tanggal 13September 2021). Hibah tersebut berupa aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp36.636.200.130,00;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp145.500.000,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (I.SET/BASTB/919/V/2021 tanggal 17 Mei 2021). Hibah tersebut berupa hibah aset tetap peralan dan mesin senilai Rp 145.500.000,00;
- Dinas Kesehatan senilai Rp1.863.535.678,00 terdiri dari:
  - Hibah dari Kementerian Kesehatan senilai Rp1.662.638.400,00 (KN.02.07/I/1369/2019 tanggal 23 September 2019, KN.02.03/1576/2021 tanggal 11 Mei 2021, HK.02.02/I/930/2017);

- Hibah dari BPBD untuk Dinas Kesehatan senilai Rp200.897.278,00 (BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021);

- Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai Rp273.981.750,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I tanggal 26 Agustus 2021). Hibah aset tersebut berupa aset tanah senilai Rp217.500.000,00, aset jalan, irigasi dan jaringan senilaiRp56.481.750,00;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp1.278.540.500,00 merupakan hibah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.203/MENLHK/ROUM/KAP.3/9/2021 tanggal 15 September 2021), Pemprov Kep. Bangka Belitung (188.44/537BAKUDA/2021 tanggal 24 Mei 2021), Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I). Hibah tersebut berupa aset tetap tanah senilai Rp14.672.000, aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp771.828.500,00,aset tetap gedung bangunan senilai Rp492.040.000,00;
- Dinas Pendidikan senilai Rp14.001.204.660,07 merupakan hibah dari Pemerintah Daerah, Kementerian dan BUMN dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BARANG	NILAI	DOKUMEN SUMBER		
		NOMOR DOKUMEN	TANGGAL	PEMEBERI HIBAH
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	361.139.350,00	030/1474/BPKAD & 030/0018/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
Bangunan Gedung Tertutup Permanen	417.004.000,00	030/1474/BPKAD & 030/0018/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	1.754.554.000,00	030/1310/BAKUDA	22 September 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
Alat Angkutan	268.398.900,00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
Alat Bengkel dan Alat Ukur	613.356.745,00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.361.699,00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

				Dasar dan Pendidikan menengah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15.192.500,00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alat Laboratorium CABDIN 1	14.071.200,00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komputer	7.696.500,00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alat Bantu Eksplorasi	115.239.650,00	4376/D2/KU.03.00/2021	07 September 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Alat Keselamatan Kerja	4.400.000,00	4376/D2/KU.03.00/2021	07 September 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Bangunan Gedung	1.866.117.500,00	421.5/005.a/SMKN4-PKP/I/2022	10 Januari 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Buku Perpustakaan	53.546.716,00	421.5/005.a/SMKN4-PKP/I/2022	10 Januari 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,

				Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.000.000,00	BA/028/76/DP2KBP3A /2021	01 November 2021	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka
Komputer	732.575.000,00	2143/D2/KU.03.00/20 21	09 Agustus 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Bangunan Gedung	976.498.607,00	2143/D2/KU.03.00/20 21	09 Agustus 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.202.000,00	421/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.500.000,00	421/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
Alat Laboratorium	2.412.000,00	003/BASTB/Banper/S MAN1Sp.Rimba/2021	13 September 2021	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komputer			13 September	Biro Keuangan

	21.500.000,00	003/BASTB/Banper/SMAN1Sp.Rimba/2021	2021	dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alat Besar	3.945.000,00		26 November 2021	PT PLN
Alat Angkutan	37.500.000,00		26 November 2021	PT PLN
Alat Pertanian	9.550.000,00		29 November 2021	PT PLN
Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.133.000,00	425.1/421/SMAN1SIMTER/IX/2021	27 September 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas
Alat Laboratorium	7.235.000,00	421.5/390/SMKN1KELAPA/XII	14 Desember 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas
Bangunan Gedung	590.500.000,00	900/316/SMAN1KLP/X/2021	04 Oktober 2021	Komite Sekolah
Jaringan	11.200.000,00	421.5/399/SMKN1KELAPA/XII	01 Oktober 2021	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alat Angkutan	484.999,00	0174/FP/PMPK/2021	18 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Alat Kantor dan Rumah Tangga	480.734.300,00	420/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	97.178.636,00	1635/BAST-SMA/B2G.spt/BMD/2021	24 September 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Alat Laboratorium	221.617.000,00		29 Juni 2021	Bank Sumsel Babel
Komputer	1.594.900.164,00	900/540/BASTASMKP	31 Desember 2021	Direktorat Sekolah

		K/SMKN1TP/2022		Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Bangunan Gedung	1.159.200.000,00	3282/D2/KU.03.00/2021	28 Mei 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Buku Perpustakaan	24.648.194,07	421.5/761/SMKN1SIJUK/XI/2021	30 November 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
kontruksi dalam pengerjaan	2.209.612.000,00	3282/D2/KU.03.00/2021	28 Mei 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
JUMLAH	14.001.204.660,07			

5. Kapitalisasi belanja modal senilai Rp9.309.977.188,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap;
6. Belanja modal (BOS) senilai Rp27.372.573.689,00 merupakan penambahan aset tetap dari belanja yang berasal dari dana BOS Dinas Pendidikan;
7. Belanja Modal APBD senilai Rp399.370.752.962,67, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal APBD tahun berjalan;
8. Belanja Modal BLUD senilai Rp3.728.725.299,86,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal BLUD tahun berjalan;
9. Penambahan aset tetap dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp983.111.337,00;
10. Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp1.452.371.893,20 merupakan koreksi pencatatan aset tetap yaitu koreksi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin senilai

Rp1.062.450,00, aset tetap bangunan gedung senilai Rp47.200.000,00, dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1.452.371.893,20.

11. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp215.732.103.470,27 merupakan pengalihan status penggunaan aset tetap antar OPD dan Pengelola Barang;
12. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp32.367.581.255,80;
13. Penghapusan senilai Rp5.988.113.187,00, merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan.

Nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2021 menjadi Rp6.976.724.850.465,45. Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

III.2.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah yang telah diaudit tahun anggaran 2020 senilai Rp655.916.133.677,00. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

- Mutasi penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp1.073.853.250,00 yaitu
  1. Penambahan aset tanah di DLHK senilai Rp110.152.000,00 yang terdiri dari :
     1.1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.b/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp76.632.000,00;
     1.2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.c/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp16.240.000,00;
     1.3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.b/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp17.280.000,00;
  2. Penambahan aset tanah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp585.088.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:030/1389.a/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021;
  3. Penambahan aset tanah di Dinas Perhubungan senilai Rp8.505.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:030/1389.d/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021;
  4. Penambahan aset tanah di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp370.108.250 yang terdiri dari :
     4.1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.e/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp11.847.550,00;
     4.2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.f/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp5.727.150,00;
     4.3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.g/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp2.123.550,00;
     4.4. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/1389.h/BAKUDA tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp350.410.000,00;
- Penambahan karena adanya alih status penggunaan senilai Rp53.440.475.424,00, yaitu pengalihan status penggunaan aset tanah pada:
  1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp181.588.442,00;
  2. Badan Kesbanglinmas senilai Rp26.145.135,00;

3. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp53.094.216.726,00;
4. Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp20.761.884,00;
5. Dinas Sosial dan PMD senilai Rp53.716.221,00;
6. Dinas Pendidikan senilai Rp64.047.013,00;

- Penambahan dari reklasifikasi di Dinas Pendidikan senilai Rp25.600.000,00. Reklasifikasi ini diperoleh dari belanja modal jalan irigai dan jaringan tetapi hasil pekerjaan adalah pengolahan tanah untuk praktek pertanian di SMKN Kelapa;
- Penambahan dari hibah senilai Rp2.581.146.706,47,00, yaitu hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp14.672.000,00, Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ke Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.500.000,00, Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung ke Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp10.746.956,47, Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp77.249.400,00, Hibah dari Pemerintah Desa Bakit ke Dinas Perhubungan senilai Rp 141.785.000,00, hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Dinas Sosial dan PMD senilai Rp217.5000.000,00, hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Dinas Pendidikan senilai Rp2.115.693.350,00;
- Penambahan karena adanya kapitalisasi belanja modal senilai Rp4.400.000,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap pada Dinas Pendidikan;
- Pengurangan karena adanya alih status penggunaan senilai Rp53.440.475.424,00, yaitu pengalihan status penggunaan aset tanah pada:
  1. Dinas Kehutanan senilai Rp181.588.442,00;
  2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp26.145.135,00;
  3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp53.094.216.726,00;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp20.761.884,00;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp53.716.221,00;
  6. Dinas PUPRKP senilai Rp64.047.013,00;
- Pengurangan dari reklasifikasi senilai 2.703.690.000,00 adalah reklasifikasi dari aset tetap gedung bangunan ke aset tanah di Badan Penghubung;
- Mutasi pengurangan karena penghapusan senilai Rp110.304.515,00 pada Sekretariat Daerah;

sehingga saldo tanah pada neraca per 31 Desember 2021 menjadi Rp656.787.138.118,47.

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah		
Tanah	656.787.139.118,47	655.916.133.677,00
Jumlah	**656.787.139.118,47**	**655.916.133.677,00**

Terdapat aset tetap tanah tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp837.494.800,00 yang merupakan aset tetap tanah di bawah jalan. Tanah tersebut seharusnya telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus dengan jalan di atasnya pada saat serah terima aset. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V di Palembang melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/3337.b/PUPR/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga penyusunan laporan keuangan,

belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak tersebut sehingga tanah tersebut belum diserahterimakan dan masih tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Tanah di bawah Jalan Air Saga senilai Rp517.132.800,00 merupakan tanah jalan provinsi yang menjadi jalan nasional berdasarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Tanah di bawah Jalan Pulau Pelepas senilai Rp320.362.000,00 merupakan tanah di bawah jalan nasional yang belum diserahterimakan pada saat serah terima aset jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

III.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin *audited* tahun 2020 Rp1.105.993.109.117,53. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari :

a. Penambahan pencatatan asset tetap peralatan dan mesin senilai Rp163.715.000,00 yang berasal dari:
   1) Belanja barang dan jasa senilai Rp715.000,00 yang merupakan penambahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
   2) Hibah yang merupakan penambahan di Dinas Tenaga Kerja senilai Rp87.000.000,00
   3) Pencatatan atas Utang 2021 senilai Rp76.000.000,00 di Dinas Kesehatan atas aset kursi gigi
b. Penambahan alih status penggunaan senilai Rp32.867.617.046,01 merupakan pengalihan status penggunaan barang antar OPD dan Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp440.890.000,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp1.465.836.000,00;
   - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah senilai Rp418.890.000,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp14.360.441.494,09;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp636.085.016,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.538.155.960,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp633.865.000,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp5.088.069.605,00;
   - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.178.283.096,92;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp2.671.873.374,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp256.730.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp2.255.547.500,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp13.950.000,00;
   - Kantor Satpol PP senilai Rp909.000.000;
c. Penambahan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar kelompok aset tetap senilai Rp7.962.997.688,00 merupakan penambahan peralatan mesin pada Dinas Pendidikan.

d. Penambahan aset tetap dari adanya hibah senilai Rp12.741.533.982,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah senilai Rp4.790.494,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp771.828.500,00;
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai 709.142.447,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.255.561.570,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan senilai Rp145.500.000,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp3.413.991.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp1.863.535.678,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp4.577.184.293,00;

e. Penambahan atas adanya kapitalisasi belanja senilai Rp224.841.815,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp87.351.000,00;
   - Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp19.800.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp76.280.600,00;
   - Kantor Satpol PP senilai Rp33.171.215,00;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp8.239.000,00;

f. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp18.758.191.948,00 merupakan belanja modal BOS pada Dinas Pendidikan;

g. Penambahan yang berasal dari belanja modal APBD senilai Rp43.629.331.127,20 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp1.984.986.465,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp1.025.100.000,00;
   - Inspektorat Daerah senilai Rp22.330.000,00;
   - Bappelitbangda senilai Rp381.150.000,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp551.958.000,00;
   - Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp11.000.000,00;
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp99.500.000,00;
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp620.527.500,00;
   - Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp937.367.800,00;
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp102.037.599,00;
   - Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp55.700.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.839.801.900,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp23.050.000,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp5.468.760.117,20;
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp167.600.000,00;
   - Dinas PUPRPRKP senilai Rp2.446.708.800,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp153.810.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp13.406.538.905,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp13.759.396.291,00;
   - Badan Penghubung Provinsi senilai Rp126.819.000,00;
   - Kantor Satpol PP senilai Rp17.000.000,00;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp428.188.750,00.

h. Penambahan yang berasal dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp628.358.977,00;
i. Penambahan yang berasal dari belanja modal BLUD senilai Rp1.245.743.799,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp619.626.640,00;
   b. Rumah Sakit Jiwa senilai Rp575.217.159,00.;
   c. Dinas Kesehatan senilai Rp50.900.000,00;
j. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp1.062.450,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
k. Pengurangan alih status penggunaan senilai Rp32.859.105.046,01 merupakan pengalihan status penggunaan barang antar OPD dan Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp1.179.680.000,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp440.890.000,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp847.366.401,00;
   - Dinas Pangan senilai Rp1.538.155.960,00;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.824.506.973,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.255.547.500,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp14.360.441.494,09;
   - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.597.583.000,00;
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.178.283.096,92;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp636.085.016,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp4.534.729.605,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp1.465.836.000,00;
l. Pengurangan reklasifikasi senilai Rp11.550.647.709,80 merupakan reklassifikasi peralatan dan mesin antar kelompok aset dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp8.132.616,00;
   - Bappelitbangda senilai Rp715.000;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp6.501.000,00;
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp10.213..000,00;
   - Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp3.166.750,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp21.560.998,80;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp79.792.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp20.506.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp10.290.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp317.237.529,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp11.049.983.941,00;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp22.548.875,00;
m. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp1.958.380.741,00 merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp295.000.000,00;
   - Inspektorat Daerah senilai Rp341.882.750,00;
   - Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp5.650.00,00;

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp17.722.500,00;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp314.632.760,00;
- Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp198.400.000,00;
- Dinas Pendidikan senilai Rp445.923.195,00;
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp339.169.536,00;

Sehingga saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin		
Peralatan dan Mesin	1.177.846.244.552,93	1.105.993.109.117,53
Jumlah	**1.177.846.244.552,93**	**1.105.993.109.117,53**

III.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang telah diaudit tahun 2020 senilai Rp1.364.637.459.366,93. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan, sebagai berikut:

a. Penambahan karena adanya alih status penggunaan senilai Rp122.767.521.144,30 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp 34.670.447.050,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp8.176.905.594,30;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp2.002.685.320,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp68.862.000,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp66.731.055.031,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp3.892.988.029,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp5.145.910.120,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp29.118.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp2.049.550.000,00;

b. Penambahan karena adanya reklasifikasi aset senilai Rp20.359.270.604,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Tenaga Kerja senilai Rp581.205.271,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp1.254.877.325,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp15.819.498.008,00;
   - Badan Penghubung senilai 2.703.690.000,00;

c. Penambahan dari hibah aset gedung bangunan senilai Rp5.982.912.907,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp492.040.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp481.552.800,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp5.009.320.107,00;

d. Penambahan karena adanya kapitalisasi belanja senilai Rp3.643.944.245,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp35.991.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp52.545.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp297.667.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp3.210.541.245,00;

- Badan Penghubung senilai Rp47.200.000,00;

e. Penambahan dari Belanja Modal BOS senilai Rp706.384.778,00;
f. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp48.861.864.785,530,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp19.700.000,00;
   - Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp394.700.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp865.463.456,20;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp199.104.262,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp584.966.892,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai 2.348.999.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp19.467.192.540,14;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp24.847.118.735,00;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp134.619.900,19;
g. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp695.495.035,86 dengan rincian sebagai berikut:
   - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp424.875.000,00;
   - Rumah Sakit Jiwa senilai Rp270.620.035,86.
h. Penambahan dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan senilai Rp262.217.360,00;
i. Pengurangan dari mutasi kurang (-) catat senilai Rp47.200.000,00 pada Badan Penghubung;
j. Pengurangan karena adanya alih status penggunaan senilai Rp122.767.521.144,30,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp3.143.224.800,00;
   - Dinas Pangan senilai Rp68.862.000,00;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp2.002.685.320,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp8.176.905.594,30;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp2.004.550.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai 34.744.565.050,00
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp3.892.988.029,00
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp2.002.685.320,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp66.731.055.031,00;
k. Pengurangan karena adanya reklasifikasi aset senilai Rp1.952.534.446,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB senilai senilai Rp,19.700.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp18.903.500,00;
   - Dinas Tenaga Kerja senilai Rp682.927.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp174.024.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp1.056.979.946,00;
l. Pengurangan karena penghapusan aset senilai R3.904.120.5000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.828.484.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp1.003.674.000,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp71.962.500,00;

sehingga saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 menjadi Rp1.439.245.694.136,32.

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung	1.427.960.635.076,32	1.354.158.445.766,93
Bangunan Monumen	3.963.484.150,00	4.102.508.150,00
Bangunan Menara	5.433.819.450,00	5.433.819.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.887.755.460,00	942.686.000,00
Jumlah	**1.439.245.694.136,32**	**1.364.637.459.366,93**

III.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan jaringan

Pada tahun 2020 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan *audited* senilai Rp3.197.131.609.777,32. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan, terdiri dari :

a. Penambahan dari pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp18.856.525,60 pada Dinas Pendidikan;
b. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp3.353.698.335,96 dengan rincian sebagai berikut :
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp139.848.783,96
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp47.600.000,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahrag senilai Rp490.737.552,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp2.627.912.000,00
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp47.600.000,00;
c. Penambahan dari hibah senilai Rp44.710.499.590,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp299.147.220,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp1.154.017.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp39.636.200.130,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp56.481.750,00;
   - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp3.553.453.490,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp11.200.000,00;
d. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp2.775.821.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp9.805.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.681.771.400,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp84.245.000,00
e. Penambahan dari dana BOS senilai Rp623.991.263,00 pada Dinas Pendidikan;
f. Penambahan dari belanja modal APBD tahun 2021 senilai Rp261.647.404.458,94, dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp198.500.000,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp549.433.000,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp98.788.873,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp302.561.843,42;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp259.993.835.702,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp95.920.040,52;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp408.365.000,00;

g. Penambahan yang berasal dari belanja modal BLUD senilai Rp323.661.465,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah;

h. Penambahan dari Dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp87.585.000,00 pada Dinas Pendidikan.

i. Pengurangan dari aset alih status penggunaan senilai Rp3.353.698.335,96 dengan rincian sebagai berikut :
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp47.600.000,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp139.848.783,96;
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.627.912.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp47.600.000,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp490.737.552,00;

j. Pengurangan dari aset reklasifikasi senilai Rp180.305.000,00 pada Dinas Pendidikan;

k. Pengurangan aset dari penghapusan senilai Rp10.446.429,00 pada Badan Keuangan Daerah;

sehingga saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 menjadi Rp3.507.128.678.050,86;.

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Bangunan		
Jalan dan Jembatan	3.038.161.500.771,44	2.782.332.204.055,84
Bangunan Air (Irigasi)	345.069.762.606,03	295.409.664.592,61
Installasi	75.631.688.257,59	71.577.883.283,07
Jaringan	48.265.726.415,80	47.811.857.845,80
Jumlah	**3.507.128.678.050,86**	**3.197.131.609.777,32**

III.2.1.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya *audited* per 31 Desember 2020 senilai Rp65.991.658.734,00,00. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari :

a. Penambahan karena alih status penggunaan senilai Rp175.397.340,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp97.069.440,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp49.977.900,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp28.350.000,00;

b. Penambahan dari reklasifikasi asset senilai Rp174.024.0000,00 pada Dinas Sosial dan Pemdes;

c. Penambahan dari hibah senilai Rp123.497.805,07,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp45.302.895,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp78.194.910,07.

d. Penambahan dari belanja modal dana BOS senilai Rp7.254.005.700,00 pada Dinas Pendidikan;

e. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp16.087.091.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Pendidikan senilai Rp15.882.614.100,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp204.477.500,00.

f. Penambahan dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan senilai Rp4.950.000,00 dari Dinas Pendidikan;

g. Pengurangan karena alih status penggunaan aset senilai Rp175.397.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pangan senilai Rp49.977.900,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp28.350.000,00;
- Dinas Kehutanan senilai Rp97.069.440,00;

h. Pengurangan karena reklasifikasi senilai 15.882.614.100,00 pada Dinas Pendidikan;
i. Pengurangan karena penghapusan senilai Rp4.861.002,00 pada Badan Keuangan Daerah;

sehingga saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 menjadi Rp73.747.752.737,07.

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bahan Perpustakaan	51.065.738.736,00	49.047.187.789,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	4.301.442.990,00	7.113.909.230,00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan Lain-Lain	1.920.571.254,00	1.637.375.000,00
Lain-lain	16.459.999.757,07	8.193.186.715,00
Jumlah	**73.747.752.737,07**	**65.991.658.734,00**

III.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada 31 Desember 2020 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan dalam neraca *audited* senilai Rp85.516.052.744,00. Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari :

a. Penambahan dari pencatatan senilai Rp2.445.720.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp1.818.795.000,00;
   - Dinas PUPRPRKP senilai Rp626.925.850,00.
b. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp3.135.906.180,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp49.885.000,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp89.859.000,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp231.192.500,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp2.675.110.680,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp89.859.000,00;
c. Penambahan dari hibah senilai Rp2.209.612.000,00 pada Dinas Pendidikan;
d. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp2.660.969.728,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.639.162.250,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp377.107.481,00;
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp144.560.050,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp500.139.947,00.
e. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
f. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp1.463.825.000,00 pada RSUP Provinsi;
g. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp29.145.060.991,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp23.099.642.841,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp6.045.418.150,00;

h. Pengurangan dari mutasi kurang (-) catat senilai Rp1.404.109.443,20 pada Dinas PUPRPRKP;
i. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp3.135.906.180 dengan rincian sebagai berikut :
   - Dinas Pangan senilai Rp231.192.500,00;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp89.859.000,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp49.885.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp89.859.000,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.675.110.680,00;
j. Pengurangan dari reklsifikasi senilai Rp97.790.000,00 pada Dinas Kesehatan;.

sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi Rp121.969.341.869,80. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan lihat Lampiran XIII Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Konstruksi dalam Pengerjaan	121.969.341.869,80	85.530.986.244,00
Jumlah	**121.969.341.869,80**	**85.530.986.244,00**

Terdapat kegiatan yang putus kontrak dan mengalami keterlambatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan yang putus kontrak terdiri dari:
   - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bikang Gadung Kepoh) dengan kontrak senilai Rp3.873.000.000,00;
   - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Kolam Retensi Sungai Mentok) dengan kontrak senilai Rp12.044.432.000,00.
b. Kegiatan yang mengalami keterlambatan yaitu kegiatan Penggantian Jembatan Air Delas dengan kontrak senilai Rp3.402.724.000,00.

III.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada 31 Desember 2020 saldo akumulasi penyusutan aset tetap dalam neraca *audited* adalah Rp2.321.272.472.797,37. Selama tahun 2021 terjadi penambahan akumulasi penyusutan senilai Rp357.838.048.399,39 dan pengurangan senilai Rp54.400.190.816,76, sehingga saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.624.710.330.380,00.

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap adalah adanya penambahan pencatatan senilai Rp309.368.081.968,39, penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp48.469.966.431,00. Sedangkan mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap berasal dari pengurangan pencatatan senilai Rp2.481.455.284,76,dari alih status penggunaan senilai Rp48.469.966.431,00 dan penghapusan senilai Rp3.448.769.101,00.
Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan, sebagai berikut:

a. Penambahan pencatatan senilai Rp309.361.860.001,39 rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp9.852.718.618,00;

- Sekretariat DPRD senilai Rp2.078.854.857,00;
- Inspektorat Daerah senilai Rp309.884.651,00;
- Bappelitbangda senilai Rp867.811.450,00;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp808.042.907,00;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp2.854.428.129,00;
- Dinas Penanaman Modal PTSP senilai Rp410.853.675,00;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp95.642.488,00;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp276.015.458,00;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp339.532.848,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp1.766.555.820,00;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.313.727.337,00;
- Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp662.855.587,00;
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp7.141.116.082,00;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp3.521.161.310,00;
- Dinas Tenaga Kerja senilai Rp2.326.293.745,00;
- Dinas Perhubungan senilai Rp16.554.514.486,00;
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp2.130.236.829,00;
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman senilai Rp147.889.975.684;
- Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp817.976.824,00;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.069.045.932,00;
- Dinas Kesehatan senilai Rp57.670.601.175,00;
- Dinas Pendidikan senilai Rp40.651.633.301,39;
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp3.052.409.342,00;
- Badan Penghubung Provinsi senilai Rp1.414.995.877,00;
- Kantor Satpol PP senilai Rp442.239.202,00;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.048.958.354,00.

b. Penambahan pencatatan dari alih status penggunaan senilai Rp48.469.966.431,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp7.162.340.405,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp883.591.285,00;
   - Bappelitbangda senilai Rp99.735.713,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp12.435.380.341,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp1.112.114.173,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.277.686.558,00;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp76.765.682,00;
   - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp16.177.270.365,00;
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman senilai Rp2.319.901.736,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp3.526.765.134,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp203.563.809,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp2.271.901.230,00;

- Badan Penghubung Provinsi senilai Rp13.950.00;
- Kantor Satpol PP senilai Rp909.000.000,00.

c. Pengurangan yang berasal dari mutasi kurang catat senilai Rp2.481.455.284,76 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp305.746.143,00;
   - Dinas Tenaga Kerja senilai Rp295.207.352,00;
   - Dinas Perhubungan Rp1.042.250,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp1.828.533.552,76;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp38.575.320,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp12.350.667,00.

d. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp48.469.966.431,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp1.115.497.499,00;
   - Sekretariat DPRD senilai Rp440.890.000,00;
   - Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp1.604.736.981,00;
   - Dinas Pangan senilai Rp1.277.686.558,00;
   - Dinas Pemberdayaan Masrakat dan Desa senilai Rp1.922.028.153,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.810.534.313,00;
   - Dinas Kehutanan senilai Rp12.435.380.341,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp444.341.917,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp6.960.811.026,00;
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.319.901.736,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Rp1.112.114.173,00;
   - Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp16.142.452.449,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp883.591.285,00.

e. Pengurangan yang berasal dari penghapusan senilai Rp3.448.769.101,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp295.000.000,00;
   - Inspektorat Daerah senilai Rp338.182.750,00;
   - Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp5.650.000,00;
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp17.722.500,00;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.305.816.780,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp314.632.760,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga senilai Rp198.400.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp174.388.350,00;
   - Dinas Pendidikan senilai Rp455.598.839,00;
   - Badan Keuangan Daerah senilai Rp343.377.122,00;

sehingga saldo akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi Rp2.624.710.330.380,00.

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	2.624.710.330.380,00	2.321.272.472.797,37
Jumlah	**2.624.710.330.380,00**	**2.321.272.472.797,37**

Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

- Akumulasi penyusutan alat besar senilai Rp39.265.435.206,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat angkutan senilai Rp128.057.683.418,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat bengkel dan alat ukur senilai Rp29.206.509.613,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat pertanian senilai Rp9.732.512.777,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat kantor dan rumah tangga senilai Rp183.746.971.960,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat studio dan komunikasi senilai Rp23.745.472.806,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat kedokteran senilai Rp231.823.457.671,00;
- Akumulasi penyusutan alat-alat laboratorium senilai Rp63.024.336.902,00;
- Akumulasi penyusutan alat persenjataan senilai Rp1.365.015.200,00;
- Akumulasi penyusutan komputer senilai Rp133.067.046.903,00;
- Akumulasi penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian senilai Rp10.901.580,00;
- Akumulasi penyusutan alat Bantu Eksplorasi senilai Rp4.122.451,00;
- Akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja senilai Rp2.146.718.249,00;
- Akumulasi penyusutan alat Peraga senilai Rp2.102.222,00;
- Akumulasi penyusutan peralatan proses/produksi senilai Rp287.171.237,00;
- Akumulasi penyusutan rambu-rambu senilai Rp24.599.052.528,00;
- Akumulasi penyusutan peralatan olahraga senilai Rp1.152.783.247,00;
- Akumulasi penyusutan bangunan gedung senilai Rp269.682.729.137,00;
- Akumulasi penyusutan bangunan monumen senilai Rp936.758.691,00;
- Akumulasi penyusutan bangunan menara senilai Rp1.955.026.602,00;
- Akumulasi penyusutan tugu tanda batas senilai Rp196.967.483,00;
- Akumulasi penyusutan jalan dan jembatan senilai Rp1.330.012.220.842,00;
- Akumulasi penyusutan bangunan air dan irigasi senilai Rp113.132.341.229,00;
- Akumulasi penyusutan instalasi senilai Rp19.815.835.587,00;
- Akumulasi penyusutan jaringan senilai Rp17.750.156.839,00.

Rincian akumulasi penyusutan per SKPD per akun aset tetap dapat dilihat pada Lampiran XIV Catatan atas Laporan Keuangan.

III.2.1.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya dalam Neraca Daerah terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain. Saldo dalam neraca *audited* per 31 Desember 2020 senilai Rp84.815.516.447,16, terdiri dari Aset Tak Berwujud Rp10.410.719.500,00, amortisasi aset tak berwujud senilai Rp7.063.144.345,00, Aset Lain-Lain senilai Rp176.239.230.566,32, dan akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp94.771.289.273,66.

Selama tahun 2021 pada aset tak berwujud dan aset lain-lain terjadi mutasi penambahan senilai Rp6.803.458.520,00 dan pengurangan senilai Rp8.702.072.290,73 yang terdiri dari :

a. Penambahan dari mutasi tambah catat Aset Lain-lain senilai Rp1.289.992.800,00 yang merupakan reklas dari Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan ke Aset Lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
b. Penambahan dikarenakan alih status penggunaan Aset Tak Berwujud senilai Rp48.500.000,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp1.719.914.267,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp774.011.234,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Lain-Lain senilai Rp21.513.308,00;
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp104.258.000,00;
   - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Aset Lain-Lain senilai Rp190.820.001,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP yaitu Asset Tak Berwujud senilai Rp48.500.000,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp399.500.000,00;
   - Dinas Sosial dan Pemdes senilai Aset Lain-Lain Rp229.811.724,00.
c. Penambahan Aset lain-lain dari reklas senilai Rp189.057.733,00 pada Dinas Kesehatan.
d. Penambahan dari hibah untuk Aset Tak Berwujud senilai Rp29.287.500,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp2.306.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kesehatan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp2.148.000.000,00;
   - Dinas Pendidikan yaitu Aset Tak Berwujud senilai Rp29.287.500,00;
   - Pengelola Barang senilai Rp158.000.000,00.
e. Penambahan Aset Tak Berwujud dari Kapitalisasi Belanja Non Modal senilai Rp34.200.000 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
f. Penambahan Aset tak berwujud dari belanja modal BOS senilai Rp17.786.220,00 pada Dinas Pendidikan;
g. Penambahan Aset tak berwujud dari belanja modal APBD senilai Rp574.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp397.395.000,00;
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp49.500.000,00;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp127.825.000,00
h. Penambahan Aset tak berwujud dari belanja modal BLUD senilai Rp594.000.000,00;
i. Pengurangan pencatatan Aset Tak Berwujud senilai Rp397.395.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
j. Pengurangan berupa pengalihan status penggunaan Aset Tak Berwujud senilai Rp48.500.000,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp1.719.914.267,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp8.250.000,00;
   - Dinas Pangan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp104.258.000,00;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp221.561.724,00;

- Dinas Kehutanan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp774.011.234,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Aset Tak Berwujud senilai Rp48.500.000,00 dan Aset Lain Lain senilai Rp399.500.000,00;
- Dinas Sosial dan Pemdes yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp21.513.308,00;
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp190.820.001,00;

k. Pengurangan karena adanya penghapusan senilai Rp6.536.263.023,73 dengan rincian sebagai berikut :
- Bappeltibangda yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp415.411.300,00;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp260.406.083,00;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp53.906.000,00;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA,Kependudukan Capil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp86.175.000,00;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp81.408.000,00;
- Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp44.030.001,00;
- Dinas PUPR dan PRKP yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp3.741.195.000,00;
- Dinas Pendidikan yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp558.990.639,73;
- Badan Keuangan Daerah yaitu Aset Lain-Lain senilai Rp51.145.000,00;
- Pengelola Barang senilai Rp1.243.596.000,00.

Sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp184.751.336.295,59 (Rp10.410.719.500,00 + Rp176.239.230.566,32 + Rp 1.289.992.800,00 + Rp48.500.000,00 + Rp1.719.914.267,00 + Rp189.057.733,00 + Rp29.287.500,00 + Rp2.306.000.000,00 + Rp34.200.000,00 + Rp17.786.220,00 + Rp594.000.000,00 + Rp574.720.000,00 – Rp397.395.000,00 - Rp48.500.000,00 – Rp1.719.914.267,00- Rp6.536.263.023,73).

Pada amortisasi aset tak berwujud selama tahun 2021 terjadi penambahan senilai Rp1.004.867.072,50,00 dan penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp11.653.333,00. Pada amortisasi aset tak berwujud terjadi pengurangan senilai Rp41.340.001,00 dan pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp11.653.333,00.

Penambahan pada amortisasi aset tak berwujud senilai Rp1.004.867.072,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. penambahan pencatatan senilai Rp965.460.822,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah senilai Rp86.573.855,00;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp712.500,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp8.500.000,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp244.691.632,00;
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp150.780.685,00;
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp13.440.790,00;
- Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp20.866.250,00;
- Dinas Kesehatan senilai Rp414.462.171,00;

- Dinas Pendidikan senilai Rp25.432.939,50.

b. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp39.406.250,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas PUPR dan PRKP senilai Rp48.500.000,00;
   - Badan Penghubung senilai Rp13.950.000,00.

c. Penambahan akumulasi penyusutan asset lain-lain senilai Rp11.653.333,00 pada dinas PUPR dan PRKP.

d. Pengurangan pencatatan amortisasi tak berwujud senilai Rp1.933.751,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp708.334,00;
   - Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp1.225.417,00.

e. Pengurangan amortisasi asset tidak berwujud dari alih status penggunaan senilai Rp39.406.250 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

f. Pengurangan akumulasi penyusutan asset lain-lain dari alih status penggunaan senilai Rp11.653.333,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang berasal dari pengurangan pencatatan senilai Rp163.861.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp28.861.000,00;
- Pengelola Barang senilai Rp135.000.000,00.

Sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 senilai Rp94.771.289.273,66 (Rp11.653.333,00 – Rp11.653.333,00) dan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp8.026.671.417,00 (Rp965.460.822,00 + Rp39.406.250,00 – Rp1.933.751,00 – Rp39.406.250,00)

Total saldo bersih aset tak berwujud dan aset lain-lain tahun 2021 senilai Rp81.953.375.604,93.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tak Berwujud	11.263.318.220,00	10.410.719.500,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(8.026.671.417,00)	(7.063.144.345,50)
Aset Lain-Lain	78.728.382.134,94	176.239.230.566,33
Akm penyusutan aset lain-lain	(11.653.333,00)	(94.771.289.273,66)
Jumlah	**81.953.375.604,94**	**84.815.516.447,17**

Rincian Aset Tak Berwujud pada Lampiran XV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Mutasi Aset Lainnya pada Lampiran XVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

III.2.2 KEWAJIBAN

III.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Akun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapetarum dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal daeri SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsure biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Nilai pendapatan diterima dimuka dicantumkan sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek *audited* Tahun Anggaran 2020 senilai Rp118.818.903.636,52 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp8.750.000,00, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp26.700.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah, Utang Beban senilai Rp28.712.598.822,00 merupakan utang gaji, TPP, beban listrik, air, komunikasi, dan lain-lain, dan Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp3.384.866.075,00 dan utang bagi hasil pajak Kabupaten/Kota senilai Rp86.685.988.739,52.

Selama tahun 2021 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

a. Pengurangan atas Utang PFK tahun sebelumnya senilai Rp8.580.955,00 yang pengurangan pada Dinas Pendidikan;
b. Penambahan atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pendidikan senilai Rp266.032,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah senilai Rp15.618.111,00;
c. Penambahan dari Utang Beban senilai Rp28.978.256.759,00;
d. Pengurangan atas Utang Beban tahun sebelumnya senilai Rp25.725.936.362,00;
e. Penambahan dari Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp5.831.347,00;
f. Pengurangan dari Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp21.705.120,00;
g. Penambahan dari Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota senilai Rp172.546.439.805,00;
h. Pengurangan atas Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota senilai Rp86.685.988.739,52.

Sehingga saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 menjadi Rp207.923.104.514,00 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp16.053.188,00, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp26.700.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah, Utang Beban senilai

Rp31.964.919.219,00 merupakan utang gaji, TPP, beban listrik, air, komunikasi, dan lain-lain, dan Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp175.915.432.107,00.

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.053.188,00	8.750.000,00
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	26.700.000,00	26.700.000,00
Utang Beban	31.964.919.219,00	28.712.598.822,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.368.992.302,00	3.384.866.075,00
Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	172.546.439.805,00	86.685.988.739,52
Jumlah	**207.923.104.514,00**	**118.818.903.636,52**

Adapun utang bagi hasil pajak kabupaten/kota senilai Rp172.546.439.805,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari:

1. Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota periode Triwulan IV tahun 2021 senilai Rp13.199.923.157,00 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp4.064.818.803,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp1.929.752.797,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp5.297.551.903,00, dan Pajak Air Permukaan senilai Rp74.772.544,00;
2. Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Over Target Triwulan I senilai Rp7.106.461.412,00 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp1.162.445.920,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp1.414.682.513,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp4.055.168.615,00 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp474.164.365,00;
3. Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Over Target Triwulan II senilai Rp15.698.903.114,00 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp101.176.584,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp6.260.968.313,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp9.006.484.108,00 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp330.274.109,00;
4. Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Over Target Triwulan III senilai Rp25.887.388.456,00 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp1.116.771.001,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp8.117.822.243,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp16.516.754.004,00 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp136.041.209,00;
5. Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota periode Triwulan IV senilai Rp48.417.431.530,00 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp9.714.562.567,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp12.725.525.895,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp25.602.059.592,00, dan Pajak Air Permukaan senilai Rp375.283.477,00;
6. Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota periode Triwulan IV senilai Rp12.62175.637.259,00

Nilai utang beban pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu dari Rp28.712.598.822,00 menjadi Rp32.562.844.821,00. Kenaikan ini karena adanya utang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai bulan Desember 2021, utang beban barang dan jasa yang belum dibayar pada Tahun 2020s sehingga menjadi utang beban yang akan dibayar pada Januari 2021 dan utang belanja modal

Rincian daftar utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XVII dan Daftar Utang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran XVIII.

III.2.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Akun Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan dan Obligasi serta Utang Jangka Panjang Lainnya.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp152.885.862.772,00. Nilai tersebut merupakan kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT. SMI.

Rekapitulasi nilai salur dan pencairan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pulau Belitung No.4 Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung

Telp. (0717) 439426, 439429 Fax (0717) 439427

Rekapitulasi Nilai Salur dan pencairan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI Tahun 2021 per 31 Desember 2021

No	Sektor Infrastruktur	Nama Kegiatan	Nilai Pinjaman PEN	Nilai Pengadaan	Jumlah			Keterangan*
					Pencairan dari PT.SMI ke RKUD	Pencairan ke pelaksana	sisa dana di RKUD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TRENCH I**							
	Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)							
1	Infrastruktur Rumah Sakit dan Alat Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan Radioterapi	61.800.000.000		-	-	-	2022
2		Pengadaan UPS	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	-	2021
3		Pembangunan Gedung Radioterapi	24.000.000.000	23.727.699.000	-			2022
4		Pembangunan Gedung Jenazah	2.321.760.778	2.163.270.000	2.163.270.000	1.730.616.000	432.654.000	2021
			90.321.760.778	**28.090.969.000**	**4.363.270.000**	**3.930.616.000**	**432.654.000**	
B	**TRENCH II**							
	Dinas Kelautan dan Perikanan							
1	Infrastruktur Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Sarana dan Prasarana di PPP Muara Sungai Baturusa	33.896.000.000	32.999.489.772	32.999.489.772	23.099.642.841	9.899.846.931	2021
C	**TRENCH III**		**33.896.000.000**	**32.999.489.772**	**32.999.489.772**	**23.099.642.841**	**9.899.846.931**	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Infrastruktur Jalan	Pelebaran Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jelitik - Simpang Perahu	52.534.582.761.00	50.495.103.000	50.495.103.000	50.495.103.000.00	-	2021
2	Infrastruktur Jalan	Pelebaran Jalan Air Gegas - Bedengung; Bedengung - Batu Betumpang	22.499.997.651.00	21.555.000.000	21.555.000.000	21.555.000.000.00	-	2021
3	Infrastruktur Jalan	Pelebaran Jalan Ibul - Parit Tiga	17.965.421.937	17.175.000.000	17.175.000.000	17.175.000.000.00	-	2021
4	Infrastruktur Jalan	Rehabilitasi Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan	27.999.997.651.00	26.298.000.000	26.298.000.000	26.298.000.000.00	-	2021
			121.000.000.000.00	**115.523.103.000.00**	**115.523.103.000.00**	**115.523.103.000.00**	-	
			245.217.760.778.00	**176.613.561.772.00**	**152.885.862.772.00**	**142.553.361.841.00**	**10.332.500.931.00**	

III.2.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas (audited) per 31 Desember 2020 senilai Rp4.346.665.008.128,56, sedangkan saldo Ekuitas tahun 2021 adalah senilai Rp4.690.919.277.274,45 sama dengan jumlah Ekuitas Dana.

IV. PENJELASAN PENTING LAINNYA

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas atau setara kas selama satu periode akuntansi. Perubahan saldo kas dari saldo awal kas tahun 2021 senilai Rp39.661.438.423,27 menjadi saldo akhir kas tahun 2021 senilai Rp445.246.349.170,43 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui RKUD selama Tahun Anggaran 2021 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non anggaran dan aktivitas transitoris.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK	2.401.150.132.048.25	2.097.887.715.593.81
ARUS KAS KELUAR	1.752.812.855.110.09	1.866.230.415.624.29
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	648.337.276.938.16	231.657.299.969.52
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	-	668.561.504.00
ARUS KAS KELUAR	401.243.410.622.53	399.499.469.456.47
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(401.243.410.622.53)	(398.830.907.952.47)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	152.885.862.772.00	-
ARUS KAS KELUAR	1.938.878.785.44	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	150.946.983.986.56	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK	90.355.271.271.45	85.671.934.373.66
ARUS KAS KELUAR	90.825.520.398.07	82.367.212.451.21
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(470.249.126.62)	3.304.721.922.45
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	**397.570.601.175.57**	**(163.868.886.060.50)**
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	39.661.438.423.26	203.530.324.483.76
Saldo Awal Kas di BLUD	-	-
Saldo Akhir Kas di BUD	437.232.039.598.83	39.661.438.423.26
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	49.596.164.62	67.640.740.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	4.555.941.445.00	9.212.668.840.00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	3.408.771.961.98	2.029.869.027.98
Saldo Akhir Kas	**445.246.349.170.43**	**50.971.617.031.24**

Dapat dijelaskan perbedaan antara saldo kas akhir di LAK dan Neraca Rp445.246.463.452,43 dengan SiLPA Rp443.619.025.518,81 senilai Rp1.627.437.933,62 (Rp445.246.349.170,43-Rp443.619.025.518,81) sebagai berikut :

Perbedaan Saldo Akhir Kas

LAK	NERACA	SiLPA
445.246.349.170.43	445.246.349.170.43	443.619.025.518.81
selisih LAK dengan Neraca	-	
selisih LAK denga SiLPA	1.627.323.651.62	

a. Terdapat penerimaan yang masuk ke SiLPA senilai Rp91.229.102,00 (Rp415.463.704.268,44-Rp415.372.475.166,45) yang terdiri dari penerimaan kelebihan bayar pendapatan IMTA sebesar Rp64.519.500,00 dan penerimaan yang tidak diketahui asal usulnya sebesar Rp26.700.000,00 dan kelebihan pembayaran TGR sebesar Rp9.602,00 serta selisih dibelakang koma RK bank senilai Rp0.01;
b. Adanya selisih yang berasal dari kas lainnya senilai minus Rp3.023.501.479,98,00 (Rp385.270.482,00-Rp3.408.771.961,98) yang berasal dari saldo kas IPP senilai Rp1.931.289.275,18, dan saldo kas BANPER senilai Rp735.542.340,80 adanya koreksi double entry pihak bank senilai Rp1.667.928,00 dan adanya jumlah PFK tahun senilai Rp12.781.454,00 serta terdapat SP2D yang tidak cair tahun lalu senilai Rp330.000,00 yang masuk ke SiLPA, dan dikurangi dengan penerimaan kelebihan bayar pendapatan IMTA senilai Rp64.519.500,00 dan penerimaan yang tidak diketahui asal usulnya senilai Rp26.700.000,00 dan kelebihan pembayaran TGR senilai Rp9.602,00 yang tidak masuk kas lainnya, adanya kelebihan setor penerimaan retribusi DLHD senilai Rp900,00, adanya pengembalian gaji dari SMAN I Pangkalpinang senilai Rp5.600.000,00, dan kelebihan pengembalian UP senilai Rp1.000,00, Adanya PFK dinas Pendidikan senilai Rp169.045,00, serta adanya sisa kas yang berasal dari rekening Satgas BPBD senilai Rp285.001.199,00;
c. Terdapat perbedaan di kas bendahara pengeluaran di SiLPA dengan yang di LAK senilai Rp2.159.396.429,37 (Rp2.209.106.875,99-Rp49.710.446,62) yang berasal dari sisa UP tahun 2021 dan tahun lalu senilai Rp111.287.481,37, terdiri dari sisa kas Disnaker tahun 2018 senilai Rp37.248.842,28, DLHD tahun 2019 senilai Rp99.676.289,83, Budpar tahun 2018 senilai Rp-4.085.000,00, Kesbangpol tahun 2018senilai Rp-10.365.000,18, Dinas Arsip tahun 2018 senilai Rp-4.562.000,00, BPBD tahun 2020 setoran pajak BTT covid senilai Rp-6.351.118,00, lebih setor sisa UP tahun 2020 DKP senilai Rp-271.000,00, dan selisih sisa up di neraca dan silpa dinas sosial tahun 2021 senilai Rp-3.032,00 sisa pertanggungjawaban belanja dinas Pendidikan tahun 2021 senilai Rp758.230.430,00, dan kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang direklas ke aset lain-lain senilai Rp1.289.992.800,00;
d. Adanya perbedaan antara saldo kas di bendahara BOS yang ada di LAK dengan di SiLPA senilai minus Rp854.561.985,00 (Rp3.701.379.460,00-Rp4.555.941.445,00) disebabkan adanya selisih saldo awal bos di SiLPA dan LAK tahun lalu senilai Rp209.564.764,00, adanya saldo bos dan bunga yang dikembalikan ke sekolah senilai Rp211.093.066,00, adanya sisa belanja bos kurang salur tahun 2019 senilai Rp 271.899.192,00, dan adanya pengembalian kas bos ke sekolah senilai Rp18.406.300,00, serta adanya pengembalian kas bos ke kas daerah senilai Rp27.920.131,00, serta adanya selisih mutasi penerimaan BOS di neraca dan di SiLPA senilai Rp171.518.794,00 berasal dari pengembalian dana BOS ke sekolah senilai Rp216.783.454,00, adanya penerimaan jasa giro dana BOS di sekolah senilai

Rp11.326.940,00 dan dikurangi dengan adanya penyetoran jasa giro dana BOS sekolah ke kas daerah senilai Rp56.591.600,00 .

Adapun rincian Kas Lainnya pada LAK senilai Rp3.408.771.961,98 adalah sebagai berikut:

1) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
   Kas yang dibatasi penggunaannya senilai Rp456.770.102,00 berasal dari:
   - Pengembalian barang bukti berupa kas yang disita pengadilan untuk kasus pembelian tanah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp365.541.000,00. Penitipan kas yang disita pengadilan di rekening Pengadilan Negeri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 0063-01-001686-30-0;
   - Kelebihan bayar pendapatan IMTA pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp64.519.500,00;
   - yang tidak diketahui asal usulnya yang diakui sebagai penerimaan lainnya senilai Rp26.700.000,00;
   - Kelebihan pembayaran TGR senilai Rp9.602,00;
2) Kas yang berasal dari Saldo IPP senilai Rp1.1.931.289.703.246,62 yang masuk ke LAK;
3) Kas yang berasal dari Saldo BANPER senilai Rp735.542.340,80 yang masuk ke LAK;
4) Sisa kas pada rekening Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 senilai Rp285.001.199,00;
5) Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan senilai Rp169.045,00

IV.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

IV.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2021 terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selisih antara arus kas masuk senilai Rp2.401.150.132.048,25 dan arus kas keluar senilai Rp1.752.812.855.110,09 merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp648.337.276.938,16 dengan rincian sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penenerimaaan Pajak Daerah	813.809.911.776.58	613.615.822.923.72
Penerimaan Retribusi Daerah	5.945.620.845.00	6.513.383.818.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.380.624.89	5.471.185.541.79
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.293.215.744.78	57.163.721.022.30
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	237.440.870.998.00	32.807.368.096.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	84.352.916.650.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	939.550.039.000.00	942.308.451.000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	140.752.173.670.00	238.641.030.864.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	68.342.254.663.00	
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Hibah	62.862.667.726.00	64.193.790.678.00
Dana Insentif Daerah (DID)	56.438.997.000.00	52.820.045.000.00
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	**2.401.150.132.048.25**	**2.097.887.715.593.81**
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	798.382.329.492.01	939.745.113.565.77
Pembayaran Barang	539.835.476.358.42	442.111.967.529.32
Pembayaran Bunga		-
Pembayaran Subsidi		-
Pembayaran Beban Hibah	57.021.246.767.00	83.676.822.100.00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	1.687.527.600.00	587.000.000.00
Pembayaran Tidak Terduga	5.966.183.389.00	28.567.673.950.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	314.048.588.503.66	371.541.838.479.21
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	35.871.503.000.00	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.752.812.855.110.09**	**1.866.230.415.624.29**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**648.337.276.938.16**	**231.657.299.969.52**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp648.337.276.938,16 (Rp2.401.150.132.048,25-Rp1752.812.855.110,09) bernilai positif yang berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mampu membiayai aktivitas operasionalnya, bahkan masih terdapat sisa lebih yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas investasi non keuangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA terjadi perbedaan sebagai berikut :

1. Pada sisi penerimaan; perbedaan seluruh jumlah realisasi pendapatan LRA dengan arus kas masuk dalam LAK terdapat selisih senilai Rp307.798.541.000,00, (Rp2.708.948.673.048,25-Rp2.401.150.132.048,25) disebabkan karena adanya pengurangan dari transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan DAK Non Fisik senilai Rp307.798.541.000,00, yang diterima SMA/SMK/SLB Negeri (Satdikmen Negeri) melalui Dinas Pendidikan dan yang diterima SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK Swasta (Satdikdas Negeri/Swasta dan Satdikmen Swasta) melalui Hibah BOS.
2. Pada sisi pengeluaran; perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja LRA senilai Rp285.300.762.028,00 (Rp1.682.055.262.509,43+Rp86.039.868,00-Rp285.214.722.160) terjadi karena adanya penambahan dari pengembalian (contra pos) belanja pegawai , belanja barang, senilai Rp86.039.868,00, dan adanya pengurangan dari transaksi di luar RKUD yang

berasal dari Hibah BOS SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK Swasta yang dikelola Kabupaten/Kota senilai Rp233.247.438.000,00, dan Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp51.967.284.160,00,. Rincian pengembalian bendahara pengeluaran tahun 2021 per OPD dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan 2021

3. IV.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	668.561.504.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Kas Masuk	**-**	**668.561.504.00**
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	14.933.500.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	49.364.643.220.20	76.874.648.571.20
Perolehan Gedung dan Bangunan	66.752.851.728.39	85.658.335.027.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.708.378.073.94	233.356.140.924.36
Perolehan Aset Tetap Lainnya	16.417.537.600.00	3.595.411.433.91
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**401.243.410.622.53**	**399.499.469.456.47**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(401.243.410.622.53)**	**(399.499.469.456.47)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan dan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai minus Rp401.243.410.622,53 merupakan arus kas keluar senilai Rp401.243.410.622,53 dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembangunan dan perolehan aset tetap yang digunakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kebutuhan operasional pemerintah itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam LRA terdapat perbedaan dengan arus kas keluar aktivitas investasi senilai Rp27.412.065.029,00 (Rp428.655.475.651,53-Rp401.243.410.622,53), terjadi disebabkan adanya pengurangan yang berasal dari transaski non RKUD dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp27.412.065.029,00, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp19.999.771.909,00 dan belanja modal aset tetp lainnya senilai Rp7.412.293.120,00.

IV.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	%
1) ARUS KAS MASUK			
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	152.885.862.772.00	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Masuk	**152.885.862.772.00**	**-**	
2) ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.938.878.785.44	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.938.878.785.44**	**-**	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**150.946.983.986.56**	**-**	

Arus kas dari aktifitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2021 arus kas bersih dari aktifitas pendanaan senilai Rp150.946.983.986,56, berasal dari arus kas masuk senilai Rp152.885.862.772,00 dari pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan arus kas keluar senilai Rp1.938.878.785,44 yang berasal dari biaya administrasi dan provisi pinjaman PT SMI.

IV.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris memcerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2021 senilai minus Rp470.249.126,62, berasal dari jumlah arus kas masuk senilai Rp90.355.271.271,45 dikurang dengan arus kas keluar senilai Rp90.825.520.398,07.

Pada sisi arus kas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp89.485.588.468,45 merupakan penerimaan potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank senilai Rp80.668.417.013,00 dan penerimaan potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD senilai Rp8.817.171.455,45.

Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp869.682.803,00 merupakan jumlah pengembalian belanja LS dan GU yang masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2020 (Rp)	2020 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	89.485.588.468.45	80.638.752.109.19
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	869.682.803.00	4.621.784.246.47
Sisa Pfk tahun lalu	-	-
SP2D Yang Tidak Dicairkan	-	-
Saldo Banper	-	-
Pengembalian Kas RKUN	-	404.772.100.00
Setoran Pajak Covid-19 BPBD	-	6.351.118.00
Lebih Setor SKPD	-	273.900.00
Sisa Kas Di Bendahara Penerimaan DLHD	-	900.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**90.355.271.271.45**	**85.671.934.373.66**
2) ARUS KAS KELUAR		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	89.485.298.320.45	80.638.752.109.19
Penyesuaian Pengembalian Belanja	-	953.089.616.00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.334.621.077.62	763.488.333.00
Double Entry Bank	-	1.677.928.00
Selisih Perhitungan	-	0.02
Penyetoran PFK Tahun Lalu	-	10.204.465.00
Kelebihan Pengembalian Sisa UP	1.000.00	
Pengembalian Gaji SMAN I Pangkalpinang	5.600.000.00	
Jumlah Arus Kas Keluar	**90.825.520.398.07**	**82.367.212.451.21**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(470.249.126.62)**	**3.304.721.922.45**

Pada sisi arus kas keluar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp89.485.298.320,45 merupakan penyetoran potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank senilai Rp80.668.417.013,00 dan penyetoran potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD senilai Rp8.816.881.307,45. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2021 lihat Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan 2021.

Sisa kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.334.621.077,62, merupakan sisa belanja dinas Pendidikan senilai Rp44.188.129,62, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp150.000,00 dan sisa kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan senilai Rp1.289.992.800,00 berdasarkan rekapitulasi jumlah SP2D yang diterima, belanja yang dipertanggungjawabkan dan pengembalian sisa belanja ke kas daerah selama tahun 2021.

Kelebihan pengembalian sisa UP tahun 2020 senilai RP1.000,00 berdasarkan bukti setor 57/BS05/STS/Jasa Giro/2021 dan pengembalian gaji SMA Negeri I Pangkalpinang senilang RP5.600.000,00 berdasarkan bukti setor 91/lainnya/2021 tanggal 27 Desember 2021.

IV.2.5. SALDO AKHIR KAS

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1) Kenaikan/Penurunan Kas	397.570.601.175.57	(163.868.886.060.50)
2) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	39.661.438.423.26	203.530.324.483.76
4) Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	437.232.039.598.83	39.661.438.423.26
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	49.596.164.62	67.640.740.00
6) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7) Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	4.555.941.445.00	9.212.668.840.00
8) Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	3.408.771.961.98	2.029.869.027.98
9) **Saldo Akhir Kas**	**445.246.349.170.43**	**50.971.617.031.24**

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas di atas menghasilkan kenaikan kas senilai Rp397.570.601.175,57. Hal ini berarti bahwa untuk membiayai seluruh aktivitasnya, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, maupun untuk aktivitas transitoris selama tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup menggunakan saldo awal kas di kas daerah sehingga bila ditambah saldo awal kas BUD dan BLUD senilai Rp39.661.438.423,26, saldo akhir kas BUD dan BLUD menjadi Rp437.232.039.598,84, ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran senilai Rp49.596.164,62, ditambah saldo akhir di kas bendahara BOS senilai Rp4.555.941.445,00, dan ditambah saldo akhir kas di kas lainnya senilai Rp3.408.771.961,98, maka saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi Rp445.246.349.170,43, di mana nilai saldo akhir kas di LAK tahun 2021 tersebut sama dengan saldo akhir kas di Neraca.

IV. 3. CATATAN PENTING LAINNYA

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan menggunakan Metode Langsung, di mana metode ini mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

V.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional; Pos Luar Biasa; dan Surplus/Defisit-LO**.**

V.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

V.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD-LO), Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO. Pada Laporan Operasional tahun 2021 realisasi Pendapatan-LO senilai Rp2.820.959.884.691,18. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp2.498.793.551.355,57, terjadi kenaikan senilai Rp322.166.333.335,61 atau 12,89%.

URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pajak Daerah-LO	813,809,911,776.58	613,615,822,923.72	200,194,088,852.86	32.63
Retribusi Daerah-LO	5,978,042,595.00	6,508,127,818.00	(530,085,223.00)	(8.14)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5,714,380,624.89	5,471,185,541.79	243,195,083.10	4.45
Lain-lain PAD yang Sah-LO	80,871,696,554.17	55,908,951,283.86	24,962,745,270.31	44.65
Jumlah Pendapatan Asli Daerah_-LO	**906,374,031,550.64**	**681,504,087,567.37**	**224,869,943,983.27**	**33.00**
PENDAPATAN TRANSFER-LO			-	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN-LO			-	
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	39,185,971,047.00	25,626,997,504.00	13,558,973,543.00	52.91
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	191,954,859,968.00	84,352,880,550.00	107,601,979,418.00	127.56
Dana Alokasi Umum-LO	939,550,039,000.00	942,308,451,000.00	(2,758,412,000.00)	(0.29)
Dana Alokasi Khusus-LO	516,892,969,333.00	545,345,060,864.00	(28,452,091,531.00)	(5.22)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO	**1,687,583,839,348.00**	**1,597,633,389,918.00**	**89,950,449,430.00**	**5.63**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA-LO			-	
Dana Insentif Daerah-LO	56,438,997,000.00	-	56,438,997,000.00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya-LO	**56,438,997,000.00**	**-**	**56,438,997,000.00**	
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	**1,744,022,836,348.00**	**1,597,633,389,918.00**	**146,389,446,430.00**	**9.16**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO			-	
Pendapatan Hibah-LO	170,563,016,792.54	219,654,399,254.20	(49,091,382,461.66)	(22.35)
Pendapatan Dana Darurat			-	
Pendapatan Lainnya		1,674,616.00	**(1,674,616.00)**	**(100.00)**
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	**170,563,016,792.54**	**219,656,073,870.20**	**(49,093,057,077.66)**	**(22.35)**
JUMLAH PENDAPATAN-LO	**2,820,959,884,691.18**	**2,498,793,551,355.57**	**322,166,333,335.61**	**12.89**

Adapun rincian akun Pendapatan-LO tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

V.2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tahun 2021 terealisasi senilai Rp906.374.031.550,64 dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp681.504.087.567,37 terjadi kenaikan senilai Rp224.869.943.983,27 atau 33%.

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pajak Daerah-LO	813,809,911,776.58	613,615,822,923.72	200,194,088,852.86	32.63
Retribusi Daerah-LO	5,978,042,595.00	6,508,127,818.00	(530,085,223.00)	(8.14)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	5,714,380,624.89	5,471,185,541.79	243,195,083.10	4.45
Lain-lain PAD yang sah-LO	80,871,696,554.17	55,908,951,283.86	24,962,745,270.31	44.65
Jumlah	**906,374,031,550.64**	**681,504,087,567.37**	**224,869,943,983.27**	**33.00**

V.2.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga jumlah pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan pada tahun 2021 termasuk piutang pajak akibat ditetapkannya surat ketetapan tersebut, akan tetapi tidak termasuk penerimaan piutang pendapatan pajak tahun sebelumnya.

Pajak Daerah-LO pada tahun 2021 realisasinya senilai Rp813.809.911.776,58. Dibandingkan dengan Pajak Daerah-LO pada tahun 2020 senilai Rp613.615.822.923,72, terjadi kenaikan senilai Rp200.194.088.852,86 atau 32,63%.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah pada LO tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Pendapatan Pajak				
Pajak Kendaraan Bermotor-LO	260,143,737,557.00	226,373,483,344.72	33,770,254,212.28	14.92
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	190,251,637,100.00	92,523,064,703.00	97,728,572,397.00	105.63
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	250,412,440,060.00	180,409,757,151.00	70,002,682,909.00	38.80
Pajak Air Permukaan-LO	15,819,853,246.58	13,925,472,981.00	1,894,380,265.58	13.60
Pajak Rokok-LO	97,182,243,813.00	100,384,044,744.00	(3,201,800,931.00)	(3.19)
Jumlah	**813,809,911,776.58**	**613,615,822,923.72**	**200,194,088,852.86**	**32.63**

V.2.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-LO)

PKB-LO tahun 2021 realisasinya senilai Rp260.143.737.557,00. Dibandingkan dengan PKB-LO tahun 2020 senilai Rp226.373.483.344,72 terjadi kenaikan senilai Rp33.770.254.212,28 atau 14,92%.

V.2.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB-LO)

BBnKB-LO tahun 2021 realisasinya senilai Rp190.251.637.100,00. Dibandingkan dengan BBnKB-LO tahun 2020 senilai Rp92.523.064.703,00 terjadi kenaikan senilai Rp97.728.572.397 atau 105,63%.

V.2.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB-LO)

PBBKB-LO tahun 2021 realisasinya senilai Rp250.412.440.060,00. Dibandingkan dengan PBBKB-LO tahun 2020 senilai Rp180.409.757.151,00 terjadi kenaikan senilai Rp70.002.682.909,00 atau 38,80%.

V.2.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan-LO

Pajak Air Permukaan-LO tahun 2021 realisasinya senilai Rp15.819.853.246,58,00. Dibandingkan dengan Pajak Air Permukaan-LO tahun 2020 senilai Rp13.925.472.981,00 terjadi kenaikan senilai Rp1.894.380.265,58 atau 13,60%.

V.2.1.1.1.5 Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO tahun 2021 realisasinya senilai Rp97.182.243.813,00. Dibandingkan dengan Pajak Air Permukaan-LO tahun 2020 senilai Rp100.384.044.744,00 terjadi penurunan senilai Rp3.201.800.931,00 atau 3,19%.

V.2.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh 17 OPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retribusi Daerah-LO pada Laporan Operasional termasuk didalamnya piutang retribusi akibat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada tahun 2021.

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO				
Pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO	95,150,000.00	-	95,150,000.00	
Pelayanan kesehatan - LO	0	306,998,000.00	(306,998,000.00)	(100.00)
Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	229,000,000.00	1,590,000,000.00	(1,361,000,000.00)	(85.60)
Pelayanan Pendidikan - LO	20,475,000.00	420,375,000.00	(399,900,000.00)	(95.13)
Jumlah Retribusi Jasa Umum-LO	**344,625,000.00**	**2,317,373,000.00**	**(1,972,748,000.00)**	**(85.13)**
Retribusi Jasa Usaha-LO				
Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3,773,797,550.00	2,921,419,606.00	852,377,944.00	29.18
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	15,170,000.00	13,140,000.00	2,030,000.00	15.45
Pelayanan Pelabuhan-LO	594,160,908.00	360,461,292.00	233,699,616.00	64.83
Tempat Rekreasi Dan Olahraga - LO	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	885,762,137.00	463,869,120.00	421,893,017.00	90.95
Jumlah Retribusi Jasa Usaha-LO	**5,286,890,595.00**	**3,767,890,018.00**	**1,519,000,577.00**	**40.31**
Retribusi Perizinan Tertentu-LO				
Izin Trayek - LO	30,500,000.00	73,250,000.00	(42,750,000.00)	(58.36)
Izin Usaha Perikanan - LO	152,397,000.00	128,128,700.00	24,268,300.00	18.94
Perpanjangan IMTA - LO	163,630,000.00	220,548,600.00	(56,918,600.00)	(25.81)
Tempat Pelelangan- LO	-	937,500.00	(937,500.00)	(100.00)
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**346,527,000.00**	**422,864,800.00**	**(76,337,800.00)**	**(18.05)**
Jumlah Retribusi Daerah	**5,978,042,595.00**	**6,508,127,818.00**	**(530,085,223.00)**	**(8.14)**

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp5.978.042.595,00. Dibandingkan tahun 2020 senilai Rp6.508.127.818,00 terjadi penurunan senilai Rp530.085.223,00 atau 8,14%. Retribusi jasa umum-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp344.625.000,00 sedangkan retribusi jasa umum-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp2.317.373.000,00 sehingga terjadi penurunan senilai Rp1.972.748.000,00 atau 85,13%. Retribusi jasa usaha-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp5.286.890.595,00 sedangkan retribusi jasa usaha-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp3.767.890.018,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp 1.519.000.577.000,00 atau 40,31%. Retribusi perizinan tertentu-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp346.527.000,00 sedangkan retribusi perizinan tertentu-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp422.864.800,00 sehingga terjadi penurunan senilai Rp76.337.800,00 atau 18,05%.

V.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO				
Bagian laba yang dibagikan kepada PEMDA (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan	5,714,380,624.89	5,471,185,541.79	243,195,083.10	4.45
Jumlah	**5,714,380,624.89**	**5,471,185,541.79**	**243,195,083.10**	**4.45**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD Sumsel Babel. Pada tahun 2021 jumlah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO senilai Rp5.714.380.624,89. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp5.471.185.541,79,00, terjadi kenaikan senilai Rp243.195.083,20 atau 4,45%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah BUMD berasal dari :

V.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tidak Dipisahkan-LO	-	668,561,504.00	(668,561,504.00)	(100.00)
Jasa Giro -LO	6,548,412,646.00	3,253,599,914.49	3,294,812,731.51	101.27
Pendapatan Bunga -LO	3,745,257.00	9,770,710,870.36	(9,766,965,613.36)	(99.96)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) -LO	1,293,108,198.74	1,689,805,822.38	(396,697,623.64)	(23.48)
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain-LO	3,169,442,221.05	-	3,169,442,221.05	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	332,481,152.92	23,221,249.21	309,259,903.71	1,331.80
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	8,723,278,572.46	7,038,378,223.00	1,684,900,349.46	23.94
Pendapatan dari Pengembalian -LO	2,347,171,815.00	2,512,115,591.24	(164,943,776.24)	(6.57)
Pendapatan dari BLUD-LO	58,454,056,691.00		58,454,056,691.00	
		30,952,558,109.18	(30,952,558,109.18)	(100.00)
			-	
Jumlah	**80,871,696,554.17**	**55,908,951,283.86**	**24,962,745,270.31**	**44.65**

Lain-lain PAD yang sah-LO dalam Laporan Opersional merupakan pendapatan yang diterima diluar Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Pada tahun 2021 realisasi Lain-Lain PAD yang sah-LO senilai Rp80.871.696.554,17. Dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi Lain-Lain PAD yang sah-LO senilai Rp55.908.951.283,86 terjadi kenaikan senilai Rp24.962.745.270,31 atau 44,65%.

V.2.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN-LO				
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	39,185,971,047.00	25,626,997,504.00	13,558,973,543.00	52.91
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	191,954,859,968.00	84,352,880,550.00	107,601,979,418.00	127.56
Dana Alokasi Umum-LO	939,550,039,000.00	942,308,451,000.00	(2,758,412,000.00)	(0.29)
Dana Alokasi Khusus-LO	516,892,969,333.00	545,345,060,864.00	(28,452,091,531.00)	(5.22)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	**1,687,583,839,348.00**	**1,597,633,389,918.00**	**89,950,449,430.00**	**5.63**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA-LO				
Dana Insentif Daerah-LO	56,438,997,000.00	-	56,438,997,000.00	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	**56,438,997,000.00**	-	**56,438,997,000.00**	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-LO	**1,744,022,836,348.00**	**1,597,633,389,918.00**	**146,389,446,430.00**	**9.16%**

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Transfer-LO senilai Rp1.744.022.836.348,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp1.597.633.389.918,00, terjadi kenaikan senilai Rp146.389.446.430,00, atau 9,16%.

V.2.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN-LO				
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	39,185,971,047.00	25,626,997,504.00	13,558,973,543.00	52.91
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	191,954,859,968.00	84,352,880,550.00	107,601,979,418.00	127.56
Dana Alokasi Umum-LO	939,550,039,000.00	942,308,451,000.00	(2,758,412,000.00)	(0.29)
Dana Alokasi Khusus-LO	516,892,969,333.00	545,345,060,864.00	(28,452,091,531.00)	(5.22)
Jumlah Transfer Pemerrintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	**1,687,583,839,348.00**	**1,597,633,389,918.00**	**89,950,449,430.00**	**5.63**

Dari tabel diatas, pada tahun 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO terealisasi senilai Rp1.687.583.839.348,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO terealisasi senilai Rp1.597.633.389.918,00, terjadi kenaikan senilai Rp89.950.449.430,00 atau 5,63%. Pendapatan dari Transfer Pemerintah-Dana Perimbangan-LO tersebut termasuk didalamnya terdapat Dana Alokasi Khusus non fisik untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kemudian disalurkan kembali ke masing-masing Satuan Pendidikan Dasar per Kabupaten/Kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Dan juga termasuk Dana BOS untuk SMA/SMK/SLB Negeri senilai Rp74.551.103.000,00 serta Hibah BOS SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK/SLB Swasta ke Kabupaten/Kota senilai Rp233.247.438.000,00. Dana bagi hasil pajak-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp39.185.971.047,00 sedangkan dana bagi hasil pajak-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp25.626.997.504,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp13.558.973.543,00 atau 52,91%. Dana bagi hasil sumber daya alam-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp191.954.859.968,00 sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp84.352.880.550,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp107.601.979.418,00 atau 127,56%. DAU-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp939.550.039.000,00 sedangkan DAU-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp942.308.451.000,00 sehingga terjadi penurunan senilai Rp2.758.412.000,00 atau 0,29%. DAK-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp516.892.969.333,00 sedangkan DAK-LO pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp545.345.060.864,00 sehingga terjadi penurunan senilai Rp28.452.091.531,00 atau 5,22%.

V.2.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

TGL PENCAIRAN	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)
15-Apr-2021	45/STS/DID/II/2021	Dana insentif Daerah (DID), Tahap I Tahun 2021	28.219.498.000,00
23-Nov-2021	262/STS/per/11/2021	Dana Insentif Daerah, Tahap 2 Tahun 2021	28.219.499.000,00
Jumlah Dana Insentif Daerah			**56.438.997.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau

pencapaian kinerja tertentu. DID-LO pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp56.438.997.000,00 yang diterima dalam 2 tahap sebagaimana tabel diatas.

V.2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	170.563.016.792,54	219.654.399.254,20	(49.091.382.461,66)	(22,35)
Pendapatan Lainnya	-	1.674.616,00	(1.674.616,00)	(100,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**170.563.016.792,54**	**219.656.073.870,20**	**(49.093.057.077,66)**	**(22,35)**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada tahun 2021 senilai Rp170.563.016.792,54 terdiri dari Pendapatan Hibah senilai Rp170.563.016.792,54. Dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2020 senilai Rp219.654.399.254,20, terjadi penurunan senilai Rp49.093.057.077,66 atau 22,35%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya rasionalisasi pencairan hibah jalan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun rincian pendapatan hibah-LO tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat-LO	106,811,801,091.54
Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah-LO	40,068,923,880.00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan dalam negeri-LO	22,917,216,821.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta dalam Negeri-LO	765,075,000.00
Jumlah Pendapatan Hibah	**170,563,016,792.54**

Rincian obyek pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO yang diterima per SKPD pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran XXXIII Catatan atas Laporan Keuangan, Rincian obyek pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya-LO yang diterima per SKPD pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran XXXIV Catatan atas Laporan Keuangan, Rincian obyek pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO yang diterima per SKPD pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran XXXV Catatan atas Laporan Keuangan, dan Rincian obyek pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi-LO yang diterima per SKPD pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran XXXVI Catatan atas Laporan Keuangan

V.2.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Jumlah Beban pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 senilai Rp2.470.010.566.700,77. Dibandingkan dengan beban tahun 2020 yang lalu senilai Rp 2.446.899.052.529,57, terjadi kenaikan senilai Rp23.111.514.171,20 atau 0,94%. Adapun rincian beban dalam LO adalah sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
BEBAN			-	
Beban Pegawai	799.540.308.845,01	752.809.734.032,30	46.730.574.812,71	6,21
Beban Persediaan	117.954.366.348,68	172.965.648.755,33	(55.011.282.406,65)	(31,80)
Beban Jasa	384.544.430.091,45	420.693.919.434,70	(36.149.489.343,25)	(8,59)
Beban Pemeliharaan	45.183.553.424,82	31.738.948.501,28	13.444.604.923,54	42,36
Beban Perjalanan Dinas	72.737.780.438,00	103.478.332.376,00	(30.740.551.938,00)	(29,71)
Beban Bunga			-	-
Beban Subsidi		-	-	-
Beban Hibah	290.268.684.767,00	318.197.523.911,00	(27.928.839.144,00)	(8,78)
Beban Bantuan Sosial	1.687.527.600,00	587.000.000,00	1.100.527.600,00	187,48
Beban Penyisihan Piutang	5.901.474.173,37	5.146.702.527,19	754.771.646,18	14,67
Beban Lain-Lain	6.213.152.563,44	4.256.971.268,00	1.956.181.295,44	45,95
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	117.125.273.175,24	106.759.443.306,61	10.365.829.868,63	9,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.299.280.117,69	47.964.002.649,00	(17.664.722.531,31)	(36,83)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	161.809.957.182,93	141.085.204.973,76	20.724.752.209,17	14,69
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	-		-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	964.235.404,00	893.289.132,50	70.946.271,50	7,94
Beban Bagi Hasil	399.909.039.569,14	299.663.561.179,90	100.245.478.389,24	33,45
Beban Bantuan Keuangan	35.871.503.000,00	40.658.770.482,00	(4.787.267.482,00)	(11,77)
JUMLAH BEBAN	**2.470.010.566.700,77**	**2.446.899.052.529,57**	**23.111.514.171,20**	0,94

V.2.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai selama periode tahun 2021 dalam Laporan Operasional terealisasi senilai Rp799.540.308.845,01. Dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 Rp752.809.734.082,30 terjadi kenaikan senilai Rp46.730.574.812,71 atau 6,21%. Adapun beban pegawai per objek tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN PEGAWAI				
Beban Gaji dan Tunjangan	363,763,264,617.00	413,141,685,202.00	(49,378,420,585.00)	(11.95)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	293,732,197,104.00	313,221,985,016.74	(19,489,787,912.74)	(6.22)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	91,886,410,963.09			
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,598,000,000.00	9,064,800,000.00	(7,466,800,000.00)	(82.37)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	35,762,427,952.00			
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,803,715,812.92			
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		-	-	
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah		2,672,709,823.32	(2,672,709,823.32)	(100.00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		114,133,234.24	(114,133,234.24)	(100.00)
Beban Instentif Tenaga Kesehatan		3,729,004,756.00	(3,729,004,756.00)	-
Beban Uang Makan		519,270,000.00	(519,270,000.00)	-
Beban Tunjangan Transportasi		7,904,696,000.00	(7,904,696,000.00)	-
Beban Tunjangan Reses		1,065,000,000.00	(1,065,000,000.00)	-
Beban Pegawai BOS	159,770,000.00			
Beban Pegawai BLUD	10,834,522,396.00			
Beban Pegawai Tidak Tetap		1,376,450,000.00	(1,376,450,000.00)	(100.00)
Jumlah Beban Pegawai	**799,540,308,845.01**	**752,809,734,032.30**	**46,730,574,812.71**	6.21

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara belanja pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada LO pada tahun 2021 sebagai berikut:

LRA		LO		SELISIH (Rp)
URAIAN	NILAI (Rp)	URAIAN	NILAI (Rp)	
Belanja Pegawai	**798.499.351.410,01**	**BEBAN PEGAWAI**	**799.540.308.845,01**	**(1.040.957.435,00)**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**364.227.945.131,00**	**Beban Gaji dan Tunjangan ASN**	**363.763.264.617,00**	**464.680.514,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	261.906.559.554,00	Beban Gaji Pokok ASN	261.229.784.991,00	676.774.563,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.295.700.590,00	Beban Tunjangan Keluarga ASN	25.295.188.898,00	511.692,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.452.405.650,00	Beban Tunjangan Jabatan ASN	9.452.405.650,00	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.732.372.041,00	Beban Tunjangan Fungsional ASN	16.732.372.041,00	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.937.310.550,00	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.937.125.550,00	185.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	16.015.075.579,00	Beban Tunjangan Beras ASN	16.014.785.899,00	289.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.850.664,00	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.862.689,00	(12.025,00)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.909.982,00	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.909.950,00	32,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.005.014.019,00	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.218.077.493,00	(213.063.474,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	555.050.164,00	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	555.051.403,00	(1.239,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.592.696.338,00	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.592.700.053,00	(3.715,00)
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**294.986.696.076,00**	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**293.732.197.104,00**	**1.254.498.972,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.489.191.769,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.966.651.453,00	7.522.540.316,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	86.947.515.061,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	89.126.324.681,00	(2.178.809.620,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	45.041.927.979,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	46.672.808.861,00	(1.630.880.882,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	72.157.030,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	72.157.030,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	63.435.904.237,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	65.894.255.079,00	(2.458.350.842,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**91.797.582.277,09**	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**91.886.410.963,09**	**(88.828.686,00)**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.246.542.811,09	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.246.542.811,09	-
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-
Belanja TPG PNSD	62.910.301.140,00	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.910.301.140,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.086.250.000,00	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.086.250.000,00	-
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.466.681.948,00	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.555.510.634,00	(88.828.686,00)
Belanja Honorarium	7.079.846.378,00	Beban Honorarium	7.079.846.378,00	-
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.960.000,00	Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.960.000,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**35.762.427.952,00**	**Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**	**35.762.427.952,00**	-
Belanja Uang Representasi DPRD	1.393.050.000,00	Beban Uang Representasi DPRD	1.393.050.000,00	-
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.649.000,00	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	128.649.000,00	-
Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.999.940,00	Beban Tunjangan Beras DPRD	119.999.940,00	-
Belanja Uang Paket DPRD	119.040.000,00	Beban Uang Paket DPRD	119.040.000,00	-
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.019.922.500,00	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.019.922.500,00	-
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	166.909.500,00	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	166.909.500,00	-
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.858.750,00	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.858.750,00	-
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.845.000.000,00	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.845.000.000,00	-
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.245.000.000,00	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.245.000.000,00	-
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	24.748.996,00	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD	24.748.996,00	-
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.023.947.954,00	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.023.947.954,00	-
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.647.551.312,00	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	10.647.551.312,00	-
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.750.000,00	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.750.000,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.803.715.812,92**	**Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**1.803.715.812,92**	-
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	-
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	-
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	-
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	-
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.334.750,00	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.334.750,00	-
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.574.400,00	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.574.400,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.563.180.182,92	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.563.180.182,92	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**1.598.000.000,00**	**Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**1.598.000.000,00**	-
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	348.000.000,00	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	348.000.000,00	-
Belanja Pegawai BOS	**159.770.000,00**	**Beban Pegawai BOS**	**159.770.000,00**	-
Belanja Pegawai BOS	159.770.000,00	Beban Pegawai BOS	159.770.000,00	-
Belanja Pegawai BLUD	**8.163.214.161,00**	**Beban Pegawai BLUD**	**10.834.522.396,00**	(2.671.308.235,00)
Belanja Pegawai BLUD	8.163.214.161,00	Beban Pegawai BLUD	10.834.522.396,00	(2.671.308.235,00)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp798.499.351.410,01. Apabila dibandingkan dengan beban pegawai sebesar

Rp799.540.308.845,01 maka terdapat selisih Rp1.040.957.435,00 maka selisih ini diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja gaji pokok ASN dengan beban gaji pokok ASN sebesar Rp676.774.563,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp683.205.765,00 dan adanya pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.431.202,00;

2. Selisih antara belanja tunjangan keluarga ASN dengan beban tunjangan keluarga ASN sebesar Rp676.774.563,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp511.692,00;

3. Selisih antara belanja tunjangan fungsional umum ASN dengan beban tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp185.000,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp185.000,00;

4. Selisih antara belanja tunjangan beras ASN dengan beban tunjangan beras ASN sebesar Rp289.680,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp289.680,00;

5. Selisih antara belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dengan beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp12.025,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.375,00 dan adanya pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp18.400,00;

6. Selisih antara belanja pembulatan gaji ASN dengan beban pembulatan gaji ASN sebesar Rp32,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp81,00 dan adanya pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp49,00;

7. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan ASN dengan beban iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp213.063.474,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp356.579.970,00 dan adanya pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp569,643,444;

8. Selisih antara belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dengan beban iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1,239 adalah adanya pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1,239;

9. Selisih antara belanja iuran jaminan kematian ASN dengan beban iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.3,715 adalah pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.3,715;

10. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp7.522.540.316,00 adalah adanya penambahan utang belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp29.755.144.864 dan adanya pengurangan utang belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp22,232,604,548;

11. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN

sebesar Rp2.178.809.620,00 adalah adanya penambahan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp938,518,242 dan adanya pengurangan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp3,117,327,862;

12. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp1.630.880.882,00 adalah adanya penambahan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp830,455,706 dan adanya pengurangan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp2,461,336,588;

13. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp2.458.350.842,00 adalah adanya penambahan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp1,093,589,418 dan adanya pengurangan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp3,551,940,260;

14. Selisih antara belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN dengan beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp88.828.686,00 adalah pengurangan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (BPJS) sebesar Rp88.828.686,00;

15. Selisih antara belanja pegawai BLUD dengan beban pegawai BLUD sebesar Rp2.671.308.235,00 adalah adanya pengurangan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp2.671.308.235,00;

V.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi beban barang dan jasa tahun 2021 senilai Rp620.420.130.302,95. Jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun 2020 senilai Rp728.876.849.067,31 terjadi penurunan senilai Rp108.456.718.764,36 atau 14,87%.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa :

LRA		LO		SELISIH (Rp)
URAIAN	NILAI (Rp)	URAIAN	NILAI (Rp)	
Belanja Barang dan Jasa	**591,600,928,732.42**	**Beban Barang dan Jasa**	**620,420,130,302.95**	**(28,819,201,570.53)**
		Beban Barang dan Jasa Banper	1,602,075,951.00	(1,602,075,951.00)
		Beban Barang dan Jasa IPP	8,344,237,226.00	(8,344,237,226.00)
Belanja Barang Pakai Habis	94,353,985,338.15	Beban Barang Pakai Habis	117,935,091,348.68	(23,581,106,010.53)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	19,275,000.00	Beban Barang Tak Habis Pakai	19,275,000.00	-
Belanja Jasa Kantor	231,184,818,666.30	Beban Jasa Kantor	231,081,761,220.30	103,057,446.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33,648,715,600.00	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33,648,715,600.00	-
Belanja Sewa Tanah	25,000,000.00	Beban Sewa Tanah	25,000,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,613,671,435.00	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3,613,671,435.00	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,989,018,637.00	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2,899,068,637.00	89,950,000.00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	99,000,000.00	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	99,000,000.00	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17,500,000.00	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	17,500,000.00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13,408,496,642.00	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6,033,275,153.00	7,375,221,489.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	415,546,960.00	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	415,546,960.00	-
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	183,937,000.00	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	183,937,000.00	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,686,869,333.00	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2,686,869,333.00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,191,157,680.00	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,191,157,680.00	-
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1,756,271,452.15	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1,756,271,452.15	-
Belanja Pemeliharaan Tanah	102,918,200.00	Beban Pemeliharaan Tanah	102,918,200.00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,933,103,642.00	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,805,829,494.00	127,274,148.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,669,451,608.14	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,362,472,474.14	1,306,979,134.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18,903,253,256.68	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18,893,448,256.68	9,805,000.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18,885,000.00	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18,885,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72,572,096,438.00	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72,572,096,438.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	165,684,000.00	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	165,684,000.00	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,697,446,345.00	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,697,446,345.00	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,778,799,600.00	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,778,799,600.00	-
Belanja Barang dan Jasa BOS	51,807,514,160.00	Beban Barang dan Jasa BOS	51,314,550,560.00	492,963,600.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	18,358,512,739.00	Beban Barang dan Jasa BLUD	16,988,449,939.00	1,370,062,800.00
	0	Beban Pegawai (IPP)	6,167,096,000.00	(6,167,096,000.00)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp591.600.928.732,42. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp620.420.130.302,95 maka terdapat selisih Rp28.819.201.570,53 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih pada beban barang dan jasa banper sebesar Rp1.602.075.951,00 adalah adanya beban barang dan jasa banper yang tidak dicatat pada LRA namun dicatat pada LO sebesar Rp1.602.075.951,00;
2. Selisih pada beban barang dan jasa IPP sebesar Rp8.344.237.226,00 adalah adanya beban barang dan jasa IPP yang tidak dicatat pada LRA namun dicatat pada LO sebesar Rp8.344.237.226,00;
3. Selisih pada belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis sebesar Rp23.581.106.010,53 adalah ;
   a. Adanya penambahan beban persediaan sebesar Rp55.646.852.417,59 dan pengurangan beban persediaan sebesar Rp30.831.463.357,06 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

      Mutasi penambahan sebagai berikut :

      1) Dinas pendidikan sebesar Rp714.631.597,65;
      2) Dinas kesehatan sebesar Rp21.875.474.189,83;

3) Rumah sakit jiwa sebesar Rp820.035.171,61;
4) Rumah sakit umum daerah sebesar Rp6.261.354.033,02;
5) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp2.014.000,00;
6) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan permukiman sebesar Rp1.015.625,00;
7) Dinas perumahan dan permukiman sebesar Rp1.175.000,00;
8) Satuan polisi pamong praja sebesar Rp1.827.500,00;
9) Badan penanggulangan bencana daerah sebesar Rp11.553.039.404,00;
10) Dinas sosial sebesar Rp25.205.450,02;
11) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp1.923.000,00;
12) Dinas tenaga kerja sebesar Rp1.521.330,00;
13) DP3ACSKB sebesar Rp23.001.900,00;
14) Dinas pertanian dan ketahanan pangan sebesar Rp10.017.075.681,40;
15) Dinas lingkungan hidup sebesar Rp467.251,01;
16) Dinas lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp311.657.232,46;
17) Dinas perhubungan sebesar Rp18.969.518,00;
18) Dinas komunikasi dan informatika sebesar Rp6.332.500,00;
19) Dinas koperasi dan UKM sebesar Rp50.525.166,77,00;
20) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebesar Rp331.977.680,00;
21) Dinas kepemudaan dan olahraga sebesar Rp 2.926.600,00;
22) Dinas kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp203.883.430,00;
23) Dinas kearsipan dan perpustakaan sebesar Rp100.629.787,00;
24) Dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp810.824.728,00;
25) Dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp144.019.010,00
26) Dinas kehutanan sebesar Rp22.068.251,67;
27) Dinas energi dan sumber daya mineral sebesar Rp22.041.100,00;
28) Dinas perindustrian dan perdagangan sebesar Rp184.025.154,8;
29) Sekretariat daerah sebesar Rp713.424.580,00;
30) Inspektorat daerah sebesar Rp2.709.000,00;
31) Bappelitbangda sebesar Rp17.249.400,08;
32) Badan keuangan daerah sebesar Rp1.204.512.061,27;
33) BKPSDMD daerah sebesar Rp8.880.400,00;

34) Sekretariat DPRD sebesar Rp29.514.709,00;
35) Badan penghubung provinsi sebesar Rp158.920.975,00;
36) Badan kesatuan bangsa dan politik sebesar Rp2.000.000,00;

Mutasi pengurangan sebagai berikut :

1) Dinas pendidikan sebesar Rp512.183.135,28;
2) Dinas kesehatan sebesar Rp9.776.772.404,8;
3) Rumah sakit jiwa sebesar Rp 845.615.077,2;
4) Rumah sakit umum daerah sebesar Rp11.556.582.556,65;
5) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp1.010.625,00;
6) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan permukiman sebesar Rp3.455.420,00;
7) Satuan polisi pamong praja sebesar Rp1.485.600,00;
8) Badan penanggulangan bencana daerah sebesar Rp2.643.448.036,20;
9) Dinas sosial sebesar Rp34.987.427,02;
10) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp109.337.921,05;
11) Dinas tenaga kerja sebesar Rp1.850.230,00;
12) DP3ACSKB sebesar Rp229.400,00;
13) Dinas pertanian dan ketahanan pangan sebesar Rp1.516.321.889,00;
14) Dinas lingkungan hidup sebesar Rp105.574.498,9;
15) Dinas lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp194.193.346,47;
16) Dinas pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp1.789.500,00;
17) Dinas perhubungan sebesar Rp31.143.800,00;
18) Dinas komunikasi dan informatika sebesar Rp1.359.700,00;
19) Dinas koperasi dan UKM sebesar Rp22.973.500,00;
20) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebesar Rp367.504.740,00;
21) Dinas kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.188.200,00;
22) Dinas kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp144.437.613,00;
23) Dinas kearsipan dan perpustakaan sebesar Rp92.660.765,00;
24) Dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp638.164.405,33;
25) Dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp223.411.027,00;
26) Dinas energi dan sumber daya mineral sebesar Rp16.291.500,01;
27) Dinas perindustrian dan perdagangan sebesar Rp117.591.000,00;

28) Sekretariat daerah sebesar Rp710.616.105,00;

29) Inspektorat daerah sebesar Rp3.709.056,00;

30) Bappelitbangda sebesar Rp5.204.400,00;

31) Badan keuangan daerah sebesar Rp890.665.782,15;

32) BKPSDMD daerah sebesar Rp8.292.900,00;

33) Sekretariat DPRD sebesar Rp68.711.250,00;

34) Badan penghubung provinsi sebesar Rp176.978.046,00;

35) Badan kesatuan bangsa dan politik sebesar Rp5.722.500,00;

b. Adanya pengurangan beban persediaan BLUD RSUD sebesar Rp44.823.000,00;

c. Adanya penambahan beban persediaan pada satgas covid pada BPBD sebesar Rp50.865.100,00;

d. Adanya penambahan utang beban persediaan sebesar Rp458.424.850,00 pada DPKP; dan

e. Adanya reklasifikasi beban persediaan ke kdp sebesar Rp458.424.850,01 pada disbudparpora.

4. Selisih pada belanja jasa kantor dengan beban jasa kantor sebesar Rp103.057.446,00 adalah sebagai berikut :

a. adanya penambahan utang sebesar Rp318.171.046,00 dan pengurangan utang sebesar Rp447.313.600,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Mutasi penambahan sebagai berikut :

1) Sekretariat daerah sebesar Rp249.959.250,00;

2) Badan penghubung sebesar Rp20.541.098,00;

3) Rumah sakit jiwa sebesar Rp211.500,00;

4) Dinas kearsipan dan perpustakaan sebesar Rp1.578.001,00;

5) Badan penanggulangan bencana daerah sebesar Rp8.786.703,00;

6) Dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp37.094.494,00;

Mutasi pengurangan sebagai berikut :

1) Sekretariat daerah sebesar Rp237.453.057,00;

2) Badan penghubung sebesar Rp27.650.791,00;

3) Rumah sakit jiwa sebesar Rp217.000,00;

4) Badan penanggulangan bencana daerah sebesar Rp151.091.617,00;

5) Dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp30.901.135,00;

b. adanya kapitalisasi beban jasa kantor ke aset tidak berwujud sebesar Rp34.200.000,00 pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. Adanya selisih pencatatan beban jasa kantor BLUD pada RSUD dimana pada LRA dicatat sebesar Rp2.643.805.725,00 sedangkan di LO sebesar Rp2.445.805.725;

5. Selisih pada belanja sewa gedung dan bangunan dengan beban sewa gedung dan bangunan sebesar Rp89.950.000,00 adalah adanya penambahan beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp19,166,666.67 dan Rp70,783,333.33;

6. Selisih pada belanja jasa konsultansi konstruksi dengan beban jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp7.375.221.489,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

   Mutasi penambahan :

   a. adanya jurnal penyesuaian atas KDP jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp179.332.981,00;

   b. adanya jurnal balik sebesar Rp81.802.400,00;

   c. adanya koreksi reklasifikasi atas kesalahan input belanja jasa konsultansi ke aset tetap gedung sebesar Rp1.370.075.884,00;

   Mutasi pengurangan :

   a. adanya kapitalisasi aset dari belanja jasa konstruksi sebesar Rp4.660.832.746,00;

   b. adanya jurnal penyesuaian atas jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp125.712.400,00;

   c. adanya KDP sebesar Rp1.793.547.300,00;

   d. adanya jurnal balik utang sebesar Rp17.985.000,00;

   e. adanya koreksi kapitalisasi atas belanja jasa konsultansi ke aset tetap sebesar Rp2.358.405.308,00

7. Selisih pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp127.274.148,00 adalah adanya penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp274.167,00 dan kapitalisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin ke aset tetap sebesar Rp127.548.315,00;

8. Selisih pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.306.979.134,00 adalah adanya kapitalisasi belanja non modal sebesar Rp1.318.979.134,00 (mutasi tambah) dan adanya jurnal balik kapitalisasi belanja non modal sebesar Rp12.000.000,00 (mutasi kurang);

9. Selisih pada belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dengan beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.805.000,00 adalah adanya penyesuaian kapitalisasi jaringan listrik pada dinas penanaman modal sebesar Rp9,805,000,00;

10. Selisih pada belanja barang dan jasa BOS dengan beban barang dan jasa BOS sebesar Rp492.963.600,00 adalah adanya pengurangan aset BOS sebesar Rp492,963,600;

11. Selisih pada belanja barang dan jasa BLUD dengan beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp1.370.062.800,00 adalah adanya penyesuaian utang BLUD sebesar Rp1.727.780.622,00 dan penyesuaian kapitalisasi KDP sebesar Rp357.717.822,00;

12. Selisih pada beban pegawai IPP sebesar Rp6.167.096.000,00 adalah adanya beban pegawai IPP yang tidak dicatat pada LRA namun dicatat pada LO sebesar Rp6.167.096.000,00;

V.2.2.2.1 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan pada tahun 2021 senilai Rp117.954.366.348,68. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp172.965.648.755,33 terjadi penurunan senilai Rp55.011.282.406,65 atau 31,80%.

URAIAN	2021 (Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN PERSEDIAAN				
Beban Bahan Pakai Habis	**11.085.867.021.86**	**28.322.294.588.30**	**(17.236.427.566.44)**	(60.86)
Beban Persediaan Alat Tulis kantor	3.679.781.920.00	6.331.443.533.69	(2.651.661.613.69)	(41.88)
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	134.344.700.00	580.273.375.00	(445.928.675.00)	(76.85)
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.420.771.176.14	1.763.249.652.00	(342.478.475.86)	(19.42)
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	522.008.000.00	536.964.500.00	(14.956.500.00)	(2.79)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	-	2.292.653.610.33	(2.292.653.610.33)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.082.562.259.72	1.007.045.782.06	1.075.516.477.66	106.80
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	89.719.800.00	92.792.900.00	(3.073.100.00)	(3.31)
Beban Pengadaan Pengisian Isi Tabung Gas	2.722.498.478.00	712.288.000.00	2.010.210.478.00	282.22
Beban Persediaan Bahan Dokumentasi Kegiatan	-	2.000.000.00	(2.000.000.00)	(100.00)
Beban Bahan Praktek	-	2.466.163.055.00	(2.466.163.055.00)	(100.00)
Beban Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	-	58.350.000.00	(58.350.000.00)	(100.00)
Beban Pengisian Ulang Galon	-	483.534.000.00	(483.534.000.00)	(100.00)
Beban Bahan Pertanian	-	300.835.600.00	(300.835.600.00)	(100.00)
Beban Bahan Pakai Habis Kesehatan	-	11.468.204.890.22	(11.468.204.890.22)	(100.00)
Beban Persediaan BLUD	-	-	-	#DIV/0!
Beban Dekorasi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Publikasi	-	48.930.000.00	(48.930.000.00)	(100.00)
Beban Persediaan Barang Cetakan	-	57.565.690.00	(57.565.690.00)	(100.00)
Beban Bhan Tanda Jasa	-	120.000.000.00	(120.000.000.00)	(100.00)
Beban Barang Jasa yang Merupakan Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Beban suku cadang -suku cadang alat angkutan	40.971.000.00	-	40.971.000.00	#DIV/0!
Beban suku cadang -suku cadang alat besar	154.796.600.00	-	154.796.600.00	#DIV/0!
Beban suku cadang -suku cadang alat laboratorium	157.185.438.00	-	157.185.438.00	#DIV/0!
Beban suku cadang -suku cadang alat studio dan komunikasi	58.747.700.00	-	58.747.700.00	#DIV/0!
Beban suku cadang -suku cadang lainnya	22.479.950.00	-	22.479.950.00	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Material	**38.248.968.258.01**	**28.582.887.511.41**	9.666.080.746.60	33.82
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	172.675.416.00	5.768.481.795.00	(5.595.806.379.00)	(97.01)
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	839.838.080.40	146.360.500.00	693.477.580.40	473.81
Beban Persediaan Bibit Ternak	123.072.000.00	(595.698.500.00)	718.770.500.00	(120.66)
Bahan Persediaan Bahan Obat-Obatan	14.207.955.215.74	5.126.024.776.52	9.081.930.439.22	177.17
Bahan Persediaan Bahan Obat-Obatan lainnya	(1.550.857.983.43)			
Beban Persediaan Bahan Kimia	4.860.218.901.10	1.434.231.269.43	3.425.987.631.67	238.87
Beban Persediaan Makanan Pokok	-	118.203.274.98	(118.203.274.98)	(100.00)
Beban Persediaan Perlengkapan/Peralatan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bahan Kimia	-	2.583.283.110.80	(2.583.283.110.80)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan/Peralatan Praktek dan percontohan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	-	1.604.427.700.00	(1.604.427.700.00)	(100.00)
Beban Suvenir/Cinderamata	754.290.224.00	839.681.450.00	(85.391.226.00)	(10.17)
Beban Dekorasi	-	505.761.852.00	(505.761.852.00)	(100.00)
Beban Dokumentasi	-	403.723.000.00	(403.723.000.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Arsip	-	16.337.400.00	(16.337.400.00)	(100.00)
Beban Persediaan Perlengkapan Olahraga	816.032.343.00	737.178.568.00	78.853.775.00	10.70
Beban Persediaan Bahan Sampel	-	12.688.000.00	(12.688.000.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Pakan Ternak	-	1.003.512.200.00	(1.003.512.200.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Publikasi	-	301.582.750.00	(301.582.750.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Pameran	-	21.407.000.00	(21.407.000.00)	(100.00)
Beban Bahan Persediaan Bahan Perlengkapan	-	1.245.277.875.00	(1.245.277.875.00)	(100.00)
Beban Persediaan Alat/Peralatan Dapur Gizi dan RT	-	398.945.600.00	(398.945.600.00)	(100.00)
Beban Trophy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	-	1.573.580.650.00	(1.573.580.650.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Makanan Tambahan	-	1.356.571.323.00	(1.356.571.323.00)	(100.00)
Beban Persediaan Alat-Alat Kesenian	-	12.000.000.00	(12.000.000.00)	(100.00)
Beban Persediaan Peralatan Kantor	-	44.862.500.00	(44.862.500.00)	(100.00)
Beban Perlengkapan Kantor	1.963.908.105.93	215.664.882.00	1.748.243.223.93	810.63
Beban Persediaan Peralatan Pertanian	-	30.964.500.00	(30.964.500.00)	(100.00)
Beban Persediaan Peralatan KIT	-	26.250.000.00	(26.250.000.00)	(100.00)
Beban Persediaan Bahan Terapi Pasien	-	58.652.330.00	(58.652.330.00)	(100.00)
Beban Persediaan Peralatan Kerja	-	1.472.532.020.68	(1.472.532.020.68)	(100.00)
Beban Perlengkapan Peserta	-	2.112.899.684.00	(2.112.899.684.00)	(100.00)
Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	2.671.101.583.20	-	2.671.101.583.20	#DIV/0!
Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor	2.424.524.387.00	-	2.424.524.387.00	#DIV/0!
Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas	732.526.312.00	-	732.526.312.00	#DIV/0!
Beban bahan-bahan baku	33.468.660.00	-	33.468.660.00	#DIV/0!
Beban bahan-bahan lainnya	5.576.560.514.11	-	5.576.560.514.11	#DIV/0!
Beban Pot Bunga	-	7.500.000.00	(7.500.000.00)	(100.00)
Beban Natura dan pakan natura	3.615.948.498.96	-	3.615.948.498.96	#DIV/0!
Beban Natura dan pakan pakan	930.712.500.00	-	930.712.500.00	#DIV/0!
Beban Natura dan pakan natura dan pakan lainnya	52.331.000.00	-	52.331.000.00	#DIV/0!
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	2.550.000.00	-	2.550.000.00	#DIV/0!
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian	2.250.000.00	-	2.250.000.00	#DIV/0!
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	587.500.00	-	587.500.00	#DIV/0!
Beban komponen-komponen peralatan	18.210.000.00			
Beban komponen-komponen lainya	1.065.000.00			

URAIAN	2021 (Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Makanan dan Minuman	**19,815,087,597.00**	**23,344,864,991.00**	**(3,529,777,394.00)**	(15.12)
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai		38,931,000.00	**(38,931,000.00)**	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	8,527,216,400.00	4,745,539,430.00	3,781,676,970.00	79.69
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5,520,996,781.00	7,028,366,869.00	(1,507,370,088.00)	(21.45)
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	-	9,715,703,094.00	(9,715,703,094.00)	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman Pasien	-	1,731,892,048.00	(1,731,892,048.00)	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman Harian Anggota DPRD	-	84,432,550.00	(84,432,550.00)	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan pendidikan	3,213,433,056.00	-	3,213,433,056.00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan kesehatan	763,046,500.00	-	763,046,500.00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan sosial	99,772,500.00	-	99,772,500.00	
Beban Makanan dan Minuman aktivitas lapangan	1,639,588,100.00	-	1,639,588,100.00	
Beban penambah daya tahan tubuh	51,034,260.00	-	51,034,260.00	
Beban Pakaian Kerja dan Atributnya	**1,395,690,900.00**	**485,925,000.00**	909,765,900.00	187.22
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	23,005,000.00	15,900,000.00	7,105,000.00	44.69
Beban pakaian Dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD	492,075,000.00		492,075,000.00	
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	8,175,000.00	153,000,000.00	(144,825,000.00)	(94.66)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	47,374,500.00	18,650,000.00	28,724,500.00	154.02
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	708,801,400.00		708,801,400.00	
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	36,540,000.00	36,000,000.00	540,000.00	1.50
Beban atribut kelengkapan pakaian dinas	-	61,375,000.00	(61,375,000.00)	(100.00)
Beban pakaian satuan pengamanan	-	-	-	
Beban Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	-	81,000,000.00	(81,000,000.00)	(100.00)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	120,000,000.00	(120,000,000.00)	(100.00)
Beban pakaian penyelamatan	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
Beban pakaian siaga	38,480,000.00	-	38,480,000.00	
Beban pakaian pelatihan kerja	24,300,000.00	-	24,300,000.00	
Beban pakaian kerja laboratorium	12,740,000.00	-	12,740,000.00	
Beban Pakaian Lapangan	**-**	**499,904,975.00**	(499,904,975.00)	(100.00)
Beban Pakaian kerja lapangan	-	469,904,975.00	(469,904,975.00)	(100.00)
Beban atribut kelengkapan pakaian kerja	-	30,000,000.00	(30,000,000.00)	(100.00)
Beban Pakaian Khusus	**664,240,000.00**	**987,562,600.00**	(323,322,600.00)	(32.74)
Beban Pakaian Adat Daerah	266,650,000.00	190,300,000.00	76,350,000.00	40.12
Beban Pakaian Batik Tradisional	67,020,000.00	127,430,000.00	(60,410,000.00)	(47.41)
Beban Pakaian Olahraga	244,265,000.00	404,042,600.00	(159,777,600.00)	(39.54)
Beban Pakaian Pasien	-	-	-	
Beban Pakaian Hari-hari Tertentu	-	82,050,000.00	(82,050,000.00)	(100.00)
Beban atribut kelengkapan pakaian khusus	-	42,000,000.00	(42,000,000.00)	(100.00)
Beban pakaian seragam panitia dan penjaga stand	-	135,740,000.00	(135,740,000.00)	(100.00)
Beban Pakaian Seragam Pramuka	-	6,000,000.00	(6,000,000.00)	(100.00)
Beban Pakaian Paskibraka	86,305,000.00	-	86,305,000.00	
Beban Cetak dan Penggandaan	**10,628,718,067.00**	**9,274,855,608.00**	**1,353,862,459.00**	14.60
Beban Cetak	8,277,702,586.00	7,365,639,538.00	912,063,048.00	12.38
Beban Penggandaan	-	1,783,000,070.00	(1,783,000,070.00)	(100.00)
Beban Penjilidan	-	126,216,000.00	(126,216,000.00)	(100.00)
Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,351,015,481.00	-	2,351,015,481.00	
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	**36,115,794,504.81**	**81,467,353,481.62**	**(45,351,558,976.81)**	(55.67)
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24,275,474,333.81	55,971,008,933.62	(31,695,534,599.81)	(56.63)
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	11,840,320,171.00	25,496,344,548.00	(13,656,024,377.00)	(53.56)
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	**117,954,366,348.68**	**172,965,648,755.33**	**(39,808,972,238.01)**	(23.02)

V.2.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa selama periode tahun 2021 dalam Laporan Operasional terealisasi senilai Rp384.544.430.091,45, Dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2020 senilai Rp420.693.919.434,70 terjadi penurunan senilai Rp36.149.489.343,25 atau 8,59%.

Adapun rincian Beban Jasa tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN JASA				
Beban Jasa Kantor	231,081,761,220.30	69,070,746,526.00	162,011,014,694.30	234.56%
Beban Barang dan Jasa Banper	1,602,075,951.00	-	-	0.00%
Beban Barang Pakai Habis		-	-	0.00%
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	0.00%
Beban Premi Asuransi	33,648,715,600.00	300,827,110.00	33,347,888,490.00	11085.40%
Beban Sewa Tanah	25,000,000.00	-	-	0.00%
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3,613,671,435.00	-	-	0.00%
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2,899,068,637.00	-	-	0.00%
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	99,000,000.00	-	-	0.00%
Beban sewa Aset Tetap Lainnya	17,500,000.00	-	-	0.00%
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	-	5,525,178,531.00	(5,525,178,531.00)	-100.00%
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	1,022,718,000.00	(1,022,718,000.00)	-100.00%
Beban Sewa Alat Berat	-	249,472,000.00	(249,472,000.00)	0.00%
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	5,087,542,850.00	(5,087,542,850.00)	-100.00%
Beban Makanan dan Minuman	-	-	-	0.00%
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	0.00%
Beban Pakaian Kerja	-	-	-	0.00%
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	0.00%
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	6,033,275,153.00	4,830,971,040.00	1,202,304,113.00	24.89%
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	415,546,960.00			
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	183,937,000.00	-	-	0.00%
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2,686,869,333.00	3,601,499,213.00	(914,629,880.00)	-25.40%
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	1,191,157,680.00	834,878,005.00	356,279,675.00	42.67%
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasuber/Moderator	-	7,952,673,838.00	(7,952,673,838.00)	-100.00%
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non PNS	1,756,271,452.15	-	-	0.00%
Beban Jasa Tenaga Tukang/Teknisi/Operator	-	23,054,788,800.00	(23,054,788,800.00)	-100.00%
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,778,799,600.00	-	-	0.00%
Beban Paket Meeting	-	1,935,339,000.00	(1,935,339,000.00)	-100.00%
Beban Honorarium Pengelolaan Dana Bos	-	0	-	0.00%
Honorarium PNS	-	21,181,509,225.00	(21,181,509,225.00)	-100.00%
Honorarium Non PNS	-	170,381,072,301.00	(170,381,072,301.00)	-100.00%
Beban Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13,697,446,345.00	15,320,346,000.00	(1,622,899,655.00)	-10.59%
Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	-	1,050,142,400.00	(1,050,142,400.00)	0.00%
Beban Uang Saku	-	-	-	0.00%
Beban Pegawai BOS	-	4,822,681,700.00	(4,822,681,700.00)	-100.00%
Beban Barang dan Jasa BOS	51,314,550,560.00	37,603,482,800.00	13,711,067,760.00	36.46%
Beban Barang dan Jasa BLUD	16,988,449,939.00	26,865,203,485.58	(9,876,753,546.58)	-36.76%
Beban Pemeliharaan Kesehatan Pejabat	-	56,633,916.00	(56,633,916.00)	-100.00%
Beban Pemeliharaan Tanah		-	-	0.00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		-	-	0.00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		-	-	0.00%
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-	0.00%
Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya		-	-	0.00%
Beban Jasa Pegawai Tidak Tetap	-		-	0.00%
Beban Jasa Pegawai (IPP)	6,167,096,000.00	5,234,592,500.00	932,503,500.00	17.81%
Beban Barang Jasa (IPP)	8,344,237,226.00	3,774,563,595.00	4,569,673,631.00	121.06%
Beban Lain-Lain (IPP)	-	-	-	0.00%
Beban Habis Pakai (Banper)	-	2,605,783,504.00	(2,605,783,504.00)	-100.00%
Beban Honorarium Non Pegawai (Banper)	-	20,080,000.00	(20,080,000.00)	-100.00%
Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstrakompatable	-	8,311,193,094.84	(8,311,193,094.84)	-100.00%
Jumlah Beban Jasa	**384,544,430,091.45**	**420,693,919,434.42**	**(36,149,489,342.97)**	**-8.59%**

V.2.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2021 terealisasi senilai Rp45.183.553.424,82. Dibandingkan tahun 2020 terealisasi senilai Rp31.738.948.501,28, terjadi kenaikan senilai Rp13.444.604.923,54 atau 42,36%.

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN PEMELIHARAAN				
Beban Jasa Service	-	1.957.551.325,00	-	-
Beban Penggantian Suku Cadang	-	2.072.696.966,00	-	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	4.778.753.327,00	-	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	0%
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	535.108.357,00	-	-
Beban jasa penggunaan jalan raya dan tempat parkir	-	166.183.500,00	-	-
Beban Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	-	790.070.326,00	-	-
Beban Accu	-	240.304.227,00	-	-
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	2.766.500,00		
Beban jasa administrasi masuk kendaraan bermotor	-	-	-	0%
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	102.918.200,00	-	102.918.200,00	0%
Beban Pemeliharaan Jalan	-	148.149.935,00	(148.149.935,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Berat	406.573.475,00	187.677.265,00	218.896.210,00	116,63
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.843.709.633,00	1.700.000,00	6.842.009.633,00	402.471,15
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Air Bermotor	59.698.500,00	100.500.000,00	(40.801.500,00)	
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel	-	345.990.788,00	(345.990.788,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.900.000,00	1.800.000,00	12.100.000,00	672,22
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	669.739.615,00	(669.739.615,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.973.325.233,00	584.065.450,00	1.389.259.783,00	237,86
Beban Pemeliharaan Komputer	1.557.014.087,00	820.785.245,00	736.228.842,00	89,70
Beban Pemeliharaan Meubelair	-	243.526.100,00	(243.526.100,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	-	-	0%
Beban Pemeliharaan Alat Studio	42.775.000,00	12.059.000,00	30.716.000,00	254,71
Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	-	28.822.500,00	(28.822.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Ukur	-	83.402.000,00	(83.402.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air	1.098.390.500,00	-	1.098.390.500,00	0%
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.828.281.900,00	941.991.310,00	886.290.590,00	94,09
Beban Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	105.436.900,00	625.160.947,00	(519.724.047,00)	(83,13)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.849.336.595,68	-	16.849.336.595,68	0%
Beban Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan, Taman dan	-	274.217.900,00	(274.217.900,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telpon	-	564.868.501,20	(564.868.501,20)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi Air	79.322.500,00	-	79.322.500,00	-
Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah, Gas dan Lainnya	181.501.000,00	-	181.501.000,00	-
Beban Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	-	1.160.201.260,00	(1.160.201.260,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan venues/Sarana Olahraga	-	60.950.000,00	(60.950.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Buku/Perpustakaan	2.260.000,00	42.665.000,00	(40.405.000,00)	(94,70)
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	5.625.000,00	-	5.625.000,00	0%
Beban Pemeliharaan Hewan Ternak dan Tanaman	-	180.861.250,00	(180.861.250,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Kelengkapan Rumah Tangga	-	52.940.856,00	(52.940.856,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	11.061.699.442,08	(11.061.699.442,08)	(100,00)
Beban Pemeliharaan AC		878.144.553,00	(878.144.553,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	880.690.376,00	741.333.256,00	139.357.120,00	18,80
Beban Pemeliharaan /Pengolahan Buku	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
Beban Pemeliharaan Jaringan	579.460.761,00	515.201.800,00	64.258.961,00	12,47
Beban Pemeliharaan Taman	-	206.161.700,00	(206.161.700,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat-Alat laboratorium	199.861.290,00	349.360.300,00	(149.499.010,00)	(42,79)
Beban Pemeliharaan Tempat Parkir	-	37.500.000,00	(37.500.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Halaman Kantor	-	269.038.000,00	(269.038.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.362.472.474,14	-	12.362.472.474,14	0%
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi Aset dalam Renovasi Aset Dalam renovasi	11.000.000,00	-	11.000.000,00	0%
Jumlah Beban Pemeliharaan	**45.183.553.424,82**	**31.738.948.501,28**	**13.444.604.923,54**	**42,36**

V.2.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode tahun 2021 senilai Rp72.737.780.438,00 dibandingkan tahun 2020 senilai Rp103.478.332.376,00 terjadi penurunan senilai Rp30.740.551.938,00 atau 29,71%.

URAIAN	2021 (Rp)	2020(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN PERJALANAN DINAS				
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.572.096.438,00	40.186.752.687,00	32.385.343.751,00	80,59
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.684.000,00	63.291.579.689,00	(63.125.895.689,00)	(99,74)
Jumlah	**72.737.780.438,00**	**103.478.332.376,00**	**(30.740.551.938,00)**	(29,71)

V.2.2.3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi senilai Rp290.268.684.767,00. Dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2020 senilai Rp318.197.523.911,00, terjadi penurunan senilai Rp27.928.839.144,00 atau 8,78%. Adapun rincian Beban Hibah tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	2021(Rp)	2020(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN HIBAH				
Beban Hibah Kepada Lembaga Non Departemen		17.217.159.419,00	(17.217.159.419,00)	**(100,00)**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.956.872.100,00	-	1.956.872.100,00	-
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	51.352.084.667,00	9.665.236.167,00	41.686.848.500,00	**431,31**
Beban Hibah Kepada Lembaga Pendidikan		12.952.724.400,00	(12.952.724.400,00)	**(100,00)**
Beban Hibah Kepada Masyarakat dan Ormas		41.337.703.925,00	(41.337.703.925,00)	**(100,00)**
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	-	3.712.290.000,00	**0%**
Beban Hibah Dana BOS	233.247.438.000,00	237.024.700.000,00	(3.777.262.000,00)	**(1,59)**
Jumlah Beban Hibah	**290.268.684.767,00**	**318.197.523.911,00**	**(27.928.839.144,00)**	**(8,78)**

Adapun rincian hibah dana BOS adalah sebagai berikut :

URAIAN	2021(Rp)	2020(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN HIBAH DANA BOS				
Beban Hibah Dana BOS ke SD	149.113.471.000,00	150.859.740.000,00	(1.746.269.000,00)	**(1,16)**
Beban Hibah Dana BOS ke SMP	68.071.437.000,00	67.988.930.000,00	82.507.000,00	**0,12**
Beban Hibah Dana BOS ke SMA	6.022.463.000,00	6.797.550.000,00	(775.087.000,00)	**(11,40)**
Beban Hibah Dana BOS ke SMK	9.379.267.000,00	11.009.280.000,00	(1.630.013.000,00)	**(14,81)**
Beban Hibah Dana BOS ke SLB	660.800.000,00	369.200.000,00	291.600.000,00	**78,98**
Jumlah Beban Hibah Dana BOS	**233.247.438.000,00**	**237.024.700.000,00**	**(3.777.262.000,00)**	**(1,59)**

V.2.2.4. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dalam Laporan Operasional senilai Rp1.687.527.600,00. Dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2020 senilai Rp587.000.000,00, terjadi kenaikan senilai Rp1.100.527.600,00 atau 187,48%. Adapun rincian beban bantuan sosial tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN BANTUAN SOSIAL				
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	541.769.000,00	-	541.769.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Kepada keluarga	950.577.600,00	-	950.577.600,00	-
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	195.181.000,00	587.000.000,00	(391.819.000,00)	(66,75)
Jumlah	**1.687.527.600,00**	**587.000.000,00**	**1.100.527.600,00**	187,48

V.2.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 31

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN PENYUSUTAN				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	**117.125.273.175,24**	**106.759.443.306,61**	**10.365.829.868,63**	**9,71**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		43.508.446.327,00	(43.508.446.327,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	24.172.016.208,66	788.663.174,00	23.383.353.034,66	2.964,94
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	2.571.031,00	4.435.875,00	(1.864.844,00)	(42,04)
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	22.760.964.704,09	4.092.003.550,34	18.668.961.153,75	456,23
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.511.491.542,68	10.298.377.119,66	2.213.114.423,02	21,49
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	23.524.086,33	77.460.168,00	(53.936.081,67)	(69,63)
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	1.511.027.049,00	1.780.763.886,00	(269.736.837,00)	(15,15)
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	19.708.333,00	611.111,00	19.097.222,00	3.125,00
Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	197.444.500,00	194.150.000,00	3.294.500,00	1,70
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	1.565.665.338,00	1.238.446.800,00	327.218.538,00	26,42
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	130.932.662,00	233.236.827,90	(102.304.165,90)	(43,86)
Beban Penyusutan Alat Ukur	808.659.199,99	870.737.187,00	(62.077.987,01)	(7,13)
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.002.288.090,00	826.922.714,70	175.365.375,30	21,21
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan			-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	8.277.831.261,62	7.935.367.566,60	342.463.695,02	4,32
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.731.917.470,75	5.976.208.548,96	3.755.708.921,79	62,84
Beban Penyusutan Komputer	12.904.254.108,38	17.426.374.806,80	(4.522.120.698,42)	(25,95)
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	798.040.610,08	673.083.830,37	124.956.779,71	18,56
Beban Penyusutan Alat Studio	1.900.635.736,99	1.192.898.078,94	707.737.658,05	59,33
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	218.126.535,00	417.740.296,00	(199.613.761,00)	(47,78)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	107.533.723,00	95.547.265,00	11.986.458,00	12,55
Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi	6.930.000,00	-	6.930.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.870.157.480,33	1.983.726.445,00	(113.568.964,67)	(5,73)
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	31.631.404,00	49.002.979,00	(17.371.575,00)	(35,45)
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	4.817.871.977,84	3.965.583.204,63	852.288.773,21	21,49
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.611.406.795,49	2.160.124.340,71	451.282.454,78	20,89
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	470.754.665,99	207.282.037,00	263.472.628,99	127,11
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	53.065.967,00	34.696.938,00	18.369.029,00	52,94
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	113.731.612,00	23.493.562,00	90.238.050,00	384,10
Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	20.961.750,00	20.961.750,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	388.826.403,00	402.207.627,00	(13.381.224,00)	(3,33)
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	136.252.281,00	61.075.807,00	75.176.474,00	123,09
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	72.057.918,83	-	72.057.918,83	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	4.154.174.824,16	-	4.154.174.824,16	-
Beban penyusutan Sumur	7.470.208,00	-	7.470.208,00	-
Beban Penyusutan Produksi	1.172.865,00	-	1.172.865,00	-
Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi	4.122.451,00	-	4.122.451,00	-
Beban Penyusutan Alat Pelindung	343.617.990,03	-	343.617.990,03	-
Beban Penyusutan Alat SAR	247.867.523,00	-	247.867.523,00	-
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	206.915.500,00	-	206.915.500,00	-
Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.342.222,00	-	2.342.222,00	-
Beban Penyusutan Unit Peralatan	285.638.338,00	-	285.638.338,00	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	141.621.537,00	-	141.621.537,00	-
Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.492.049.271,00	-	2.492.049.271,00	-
	-			
Beban Penyusutan Senjata Api	-	68.726.159,00	(68.726.159,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	-	94.172.899,00	(94.172.899,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	56.914.425,00	(56.914.425,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**30.299.280.117,69**	**47.964.002.649,00**	**(17.664.722.531,31)**	**(36,83)**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	3.568.035.210,00	(3.568.035.210,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.665.196.448,12	22.874.496.612,00	1.790.699.836,12	7,83
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.321.455.296,90	1.997.587.105,00	3.323.868.191,90	166,39
Beban Penyusutan Bangunan Menara	173.254.119,50	175.489.640,00	(2.235.520,50)	(1,27)
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah		10.180.011,00	(10.180.011,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	60.641.567,67	4.772.759,00	55.868.808,67	1.170,58
Beban PenyusutanBangunan Candi	78.732.685,50	1.856.300,00	76.876.385,50	
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		60.938.140,00	(60.938.140,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		16.997.420,00	(16.997.420,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu		15.938.649.452,00	(15.938.649.452,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas udara		3.315.000.000,00	-	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**161.809.957.182,93**	**141.085.204.973,76**	**20.724.752.209,17**	**14,69**
Beban Penyusutan Jalan, jaringan dan instalasi		4.095.599.647,00	(4.095.599.647,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan.	130.012.397.024,42	109.474.915.614,45	20.537.481.409,97	18,76
Beban Penyusutan Jembatan	12.483.899.296,99	12.481.116.258,00	2.783.038,99	0,02
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.531.931.095,95	2.072.803.020,00	2.459.128.075,95	118,64
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	258.102.734,00	246.016.067,00	12.086.667,00	4,91
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	184.325.861,00	183.404.781,00	921.080,00	0,50
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	9.387.422.737,67	7.599.582.751,31	1.787.839.986,36	23,53
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	154.545.286,00	66.356.193,00	88.189.093,00	132,90
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.356.794.864,67	1.534.804.023,00	(178.009.158,33)	(11,60)
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	90.572.479,00	71.082.920,00	19.489.559,00	27,42
Beban Penyusutan Bangunan Air	-	(6.265.586,00)	6.265.586,00	(100,00)
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	547.519.778,50	219.877.596,00	327.642.182,50	149,01
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	6.861.866,00	6.861.866,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	1.485.194,00	1.485.194,00	-	
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1.112.021.352,00	1.475.346.801,00	(363.325.449,00)	(24,63)
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	125.977.450,96	90.384.654,00	35.592.796,96	39,38
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	350.000,00	515.201,00	(165.201,00)	(32,07)
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	62.145.791,00	57.508.812,00	4.636.979,00	8,06
Beban Penyusutan Instalasi Lain	2.152.800,00	-	2.152.800,00	-
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	968.327.188,00	958.561.219,00	9.765.969,00	1,02
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	311.194.245,00	259.259.605,00	51.934.640,00	20,03
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	197.198.368,77	195.382.110,00	1.816.258,77	0,93
Beban Penyusutan Jaringan Gas	14.731.769,00	606.227,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**964.235.404,00**	**893.289.132,50**	**70.946.271,50**	**7,94**
Beban Amortisasi Hak cipta		22.440.165,00	(22.440.165,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya	964.235.404,00	870.848.967,50	93.386.436,50	10,72
JUMLAH	**310.198.745.879,86**	**296.701.940.061,87**	**13.425.859.546,49**	**4,53**

Desember 2021 dalam Laporan Operasional senilai Rp310.198.745.879,86. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp296.701.940.061,87 terjadi kenaikan senilai Rp13.425.859.546,49 atau 4,53%. Adapun rincian Beban penyusutan tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

V.2.2.6. Beban Penyisihan Piutang

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG				
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	14.888.322.75	69.025.00	14.819.297.75	21.469.46
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	145.532.383.53	-	145.532.383.53	-
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	141.257.395.91	(141.257.395.91)	(100.00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	5.741.053.467.09	5.005.376.106.28	735.677.360.81	14.70
Jumlah	**5.901.474.173.37**	**5.146.702.527.19**	**754.771.646.18**	**14.67**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp5.901.474.173,37. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp5.146.702.527,19 terjadi kenaikan senilai Rp754.771.646,18 atau 14,67%.

V.2.2.7. Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp435.780.542.568569,14. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp340.322.331.661,90 terjadi kenaikan senilai Rp95.458.210.907,24 atau 28,05%, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)	2020(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN TRANSFER				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	399,909,039,569.14	299,663,561,179.90	100,245,478,389.24	33.45
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	35,871,503,000.00	35,557,625,000.00	313,878,000.00	0.88
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	4,042,200,000.00	(4,042,200,000.00)	(100.00)
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	-	1,058,945,482.00	(1,058,945,482.00)	(100.00)
Jumlah	**435,780,542,569.14**	**340,322,331,661.90**	**95,458,210,907.24**	28.05

Realisasi Beban Transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2021 senilai Rp399.909.039.569,14. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp299.663.561.179,90 terjadi kenaikan senilai Rp100.245.478.389,24 atau 33,45%. Realisasi Beban Transfer bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2021 senilai Rp35.871.503.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp35.557.625.000 terjadi kenaikan senilai Rp313.878.000,00 atau 0,88%. Realisasi Beban Transfer bantaun keuangan ke desa pada tahun 2021 tidak terealisasi sedangkan tahun 2020 terealisasi senilai Rp4.042.200.000,00. Realisasi Beban Transfer bantaun keuangan kepada partai politik pada tahun 2021 tidak terealisasi sedangkan tahun 2020 terealisasi senilai Rp1.058.945.482,00

V.2.2.8. Beban Lain-Lain

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN LAIN-LAIN				
Beban penyisihan dana bergulir	4,254,445,578.00	4,256,189,745.00	(1,744,167.00)	(0.04)
Beban Lain-lain	1,958,706,985.44	781,523.00	1,957,925,462.44	250,526.92
Jumlah	**6,213,152,563.44**	**4,256,971,268.00**	1,956,181,295.44	45.95

Realisasi Beban Lain-Lain adalah sampai dengan 31 Desember 2021 dalam Laporan Operasional adalah senilai Rp6.213.152.563,44 Dibandingkan dengan tahun

2020 yang lalu senilai Rp4.256.971.268,00 terjadi kenaikan senilai Rp1.956.181.295,44 atau 45,95%. Adapun rincian realisasi beban lain-lain terdiri dari beban penyisihan dana bergulir pada tahun 2021 senilai Rp4.254.445.578,00, beban lain-lain dari pendapatan pada tahun 2021 senilai Rp1.958.706.985,44.

V.2.2.9. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	350.949.317.990.14	51.894.498.826.00	299.054.819.164.14	576.27
Jumlah	**350.949.317.990.14**	**51.894.498.826.00**	**299.054.819.164.14**	**576.27**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban selama satu periode pelaporan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 senilai surplus Rp350.949.317.990,14. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu surplus senilai Rp51.894.498.826, terjadi kenaikan senilai Rp299.054.819.164,14 atau 576,27%.

V.2.3 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	13.484.203.312.73	3.087.112.000.00	10.397.091.312.73	0.00%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	364.303.583.00	-	364.303.583.00	0.00%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	21.073.488.921.00	(21.073.488.921.00)	-100.00%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**13.848.506.895.73**	**24.160.600.921.00**	**(10.676.397.608.27)**	**-44.19%**

Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama satu periode pelaporan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah defisit senilai Rp13.848.506.895,73. Dibandingkan tahun 2020 defisit senilai Rp24.160.600.921,00 terjadi penurunan defisit senilai Rp10.676.397.608,27 atau 44,19 %.

Adapun rincian Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO	3,895,555,741.00	3,003,102,000.00	892,453,741.00	-
Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	3,904,120,500.00	84,010,000.00	3,820,110,500.00	-
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi LO	10,446,429.00	-	10,446,429.00	-
Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	4,861,002.00	-	4,861,002.00	-
Defisit Penjualan Aset Lainnya - LO	5,669,219,640.73	-	5,669,219,640.73	-
Defisit dar Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	364,303,583.00	-	364,303,583.00	-
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	-	4,401,654,300.00	(4,401,654,300.00)	(100.00)
Defisit Penghapusan Aset Tanah-LO		25,988,251.00	(25,988,251.00)	-
Defisit Penghapusan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-LO		5,350,684,850.00	(5,350,684,850.00)	-
Defisit Penghapusan Aset Tetap-Gedung dan bangunan-LO		11,295,161,520.00	(11,295,161,520.00)	(100.00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**13,848,506,895.73**	**24,160,600,921.00**	**(10,312,094,025.27)**	**(42.68)**

V.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang

bersangkutan.Beban luar biasa ini berupa belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi BTT ini untuk mendanai kegiatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Realisasi beban luar biasa selama periode tahun 2021 terealisasi senilai Rp5.182.540.454,00. Dibanding realisasi beban luar biasa tahun 2020 sebesar Rp.26.104.864.180,00 terjadi penurunan senilai Rp20.922.323.726,00 atau 80,15%.

URAIAN	2021 (Rp)	2020(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Luar Biasa	5.182.540.454.00	26.104.864.180.00	- (20.922.323.726.00)	(80.15)
Jumlah	**5.182.540.454.00**	**26.104.864.180.00**	**(20.922.323.726.00)**	(80.15)

V.2.5. SURPLUS/DEFISIT LO

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT LO	331.918.270.640.68	1.629.033.725.00	- 330.289.236.915.68	99.51
Jumlah	**331.918.270.640.68**	**1.629.033.725.00**	**330.289.236.915.68**	99.51

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 surplus/defisit LO terealisasi senilai Rp331.918.270.640,68 Dibandingkan surplus defisit LO tahun 2020 senilai Rp1.629.033.725 terjadi kenaikan senilai Rp330.289.236.915,68 atau 99,51%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VI .1. PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal tahun 2021 senilai Rp4.346.665.008.128,55. Selama tahun 2021 terjadi surplus senilai Rp331.918.270.640,68 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp12.335.998.505,22 sehingga pada akhir tahun 2021 didapat jumlah ekuitas akhir senilai Rp4.690.919.277.274,45.

URAIAN	2021	2020
Ekuitas Awal	4.346.665.008.188,55	4.312.378.114.995,86
Surplus/Defisit LO	331.918.270.640,68	1.629.033.725,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	631.409.710,89	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	- 25.000.000,00	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	11.729.588.794,33	32.657.859.467,69
Ekuitas Akhir	**4.690.919.277.334,45**	**4.346.665.008.188,55**

Lebih lanjut rincian Laporan Perubahan Ekuitas dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2021 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.346.665.008.128,55 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020;
2. Surplus-LO senilai Rp331.918.270.640,68 merupakan surplus yang terbentuk dari kegiatan operasional berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021;
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah senilai Rp12.335.998.505,22 terdiri dari:
   a. Koreksi nilai persediaan selama tahun 2021 senilai Rp631.409.710,89;
   b. Selisih Revaluasi Aset selama tahun 2021 senilai minus Rp25.000.000,00;
   c. Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp11.729.588.794.33 selama 2021 merupakan koreksi terhadap pendapatan bunga bank dana bantuan pemerintah (banper), belanja tak terduga, dan alih status penggunaan aset tetap.

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2021 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.690.919.277.274,45 didapat dari Ekuitas Awal senilai Rp4.346.665.008.128,55 ditambah surplus-LO senilai Rp311.100.857.513,74, ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp12.335.998.505,22.

Adapun Rincian Ekuitas Awal, surplus/defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang membentuk Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2021 per SKPD, dapat dilihat dalam Lampiran XXI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021.

BAB VII

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

VII.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	49.536.738.602.62	220.399.957.480.11
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	49.536.738.602.62	219.446.867.864.11
SUB TOTAL (1 - 2)	0.00	953.089.616.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	443.619.025.518.81	49.536.738.602.62
SUB TOTAL (3 + 4)	443.619.025.518.81	50.489.828.218.62
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-
LAIN-LAIN		(953.089.616.00)
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	**443.619.025.518.81**	**49.536.738.602.62**

Saldo awal di kas daerah per 1 Januari 2021 senilai Rp49.236.738.602,62. Selama tahun 2021 terjadi penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp49.236.738.602,62, Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 senilai Rp443.619.025.518,81 dan menjadi saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 senilai Rp443.619.025.518,81.

SiLPA akhir pada LPSAL Rp443.619.025.518,81 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca Rp445.246.463.452,43, yaitu senilai Rp1.627.437.933,62. Berasal dari selisih mutasi kurang senilai Rp3.926.043.977,99 dengan mutasi tambah senilai Rp2.298.606.044,37. Penjelasan perbedaan tersebut di atas sama dengan penjelasan perbedaan saldo akhir kas di LRA dengan saldo akhir kas di neraca, sebagai berikut:

Mutasi Kurang (-) senilai Rp3.926.043.977,99, terdiri dari :

1) Penerimaan retribusi imta Dinas Tenaga Kerja senilai Rp64.519.500,00, di SiLPA merupakan bagian dari Kas Daerah, sedangkan di neraca bagian dari kas lainnya;
2) Penerimaan yang tidak jelas penyetornya senilai Rp26.700.000,00, di SiLPA merupakan bagian dari Kas Daerah, di neraca merupakan bagian dari kas lainnya;
3) Penerimaan TGR senilai Rp9.602,00, di SiLPA merupakan bagian dari Kas Daerah, di neraca merupakan bagian dari kas lainnya;
4) SP2D Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018 yang tidak dicairkan fihak ketiga senilai Rp330.000.00 tercatat di SiLPA;
5) Lebih setor penerimaan retribusi DLHD senilai Rp900,00;
6) Saldo Iuran Peserta Pendidikan (IPP) senilai Rp1.931.289.275,18 pada SMA/SMK/SLB Negeri Dinas Pendidikan tidak dicatat di SiLPA, tetapi dicatat di neraca;
7) Saldo Bantuan Pemerintah (BANPER) senilai Rp735.542.340,80 pada SMA/SMK/SLB Negeri Dinas Pendidikan tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di neraca;

8) Selisih senilai Rp171.518.794,00 di Neraca dan di SiLPA berasal dari pengembalian kas BOS ke sekolah senilai Rp216.783.454,00 ditambah penerimaan jasa giro senilai Rp11.326.940,00, dikurang penyetoran jasa giro ke kas daerah senilai Rp56.591.600,00;

9) Sisa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dinas Pendidikan senilai Rp169.045,00 tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di neraca;

10) Saldo kas di rekening bendahara Satuan Gugus Tugas (SATGAS) BPBD yang berasal dari sumbangan masyarakat khusus untuk penanganan pandemi covid 19 senilai Rp285.001.199,00 tidak dicatat di SiLPA, tetapi dicatat di neraca;

11) Selisih saldo awal bos di silpa dan neraca tahun 2018 pada kas Bendahara BOS sebesar Rp209.564.764,00 terjadi akibat adanya selisih penerimaan bunga bank dengan biaya administrasi bank pada rekening BOS sekolah sebesar Rp116.032.434,00 dan PFK yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp93.532.330

12) Saldo kas dana BOS dan bunga bank yang dikembalikan ke sekolah tahun 2021 senilai Rp211.093.066,00;

13) Sisa belanja BOS kurang salur tahun 2019 yang direalisasikan pada tahun 2020 senilai Rp271.899.192,00;

14) Saldo kas dana BOS yang dikembalikan ke sekolah tahun 2020 senilai Rp18.406.300,00; dan

15) Selisih perhitungan saldo kas daerah yang tercatat di kas daerah senilai Rp0,01.

Mutasi Tambah (+) senilai Rp2.298.606.044,37, terdiri dari :

1. Penerimaan retribusi imta Dinas Tenaga Kerja senilai Rp64.519.500,00, di Neraca merupakan bagian dari Kas Lainnya, di silpa bagian dari kas daerah;

2. Penerimaan yang tidak jelas penyetornya senilai Rp26.700.000,00, di Neraca merupakan bagian dari Kas Lainnya, di silpa bagian dari kas daerah;

3. Penerimaan TGR senilai Rp9.602,00, di Neraca merupakan bagian dari Kas Lainnya, di silpa merupakan bagian dari kas daerah;

4. pfk tahun 2017 dan 2018 setwan senilai Rp10.910.454,00 dan dispora senilai Rp1.871.000,00;

5. Double entry oleh fihak bank atas SP2D SMA I Simpang Teritip senilai Rp1.677.928,00;

6. Sisa up tahun 2021 dan tahun lalu masih tercatat di silpa senilai Rp111.287.481,37, terdiri dari sisa kas Disnaker tahun 2018 senilai Rp37.248.842,28, DLHD tahun 2019 senilai Rp99.676.289,83, Budpar tahun 2018 senilai Rp-4.085.000,00, Kesbangpol tahun 2018senilai Rp-10.365.000,18, Dinas Arsip tahun 2018 senilai Rp-4.562.000,00, BPBD tahun 2020 setoran pajak BTT covid senilai Rp-6.351.118,00, lebih setor sisa UP tahun 2020 DKP senilai Rp-271.000,00, dan selisih sisa up di neraca dan silpa dinas sosial tahun 2021 senilai Rp-3.032,00;

7. Pengembalian Gaji SMAN 1 Pangkalpinang bukti setor 91/lainnya/2021 tanggal 27 desember 2021 senilai Rp5.600.000,00;
8. Pengembalian Kelebihan Dana UP Tahun 2020 bukti setor 57/BS05/STS/JASA GIRO/2021 senilai Rp1.000,00
9. Mutasi tambah senilai Rp758.230.430,00 berasal dari selisih saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan di silpa senilai Rp807.676.462,62 dengan di neraca senilai Rp49.446.032,62; dan
10. Pengembalian lebih salur dana BOS tahun 2019 ke kas daerah SMA Negeri 1 Tanjung Pandan senilai Rp27.920.131,00;
11. Kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang direklas ke aset lain-lain senilai Rp1.289.992.800,00.

BAB VIII

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

1. Hasil pemeriksaan kas yang dilakukan Inspektorat Daerah tanggal 10 Januari s.d. 18 Januari 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, berdasarkan LHP atas Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh fakta sebagai berikut:
   Terdapat Kekurangan Kas Sebesar Rp1.289.992.800,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

   Jumlah Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.025.521.323,02 terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung	Rp	22.077.414.754,00
Belanja Langsung	Rp	64.948.106.569,02
Total anggaran	Rp	87.025.521.323,02

   Realisasi penerimaan SP2D dan pengeluaran dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

-	Penerimaan SP2D		Rp	82.370.232.013,08
-	Pengeluaran	Rp 65.200.309.771,08		
-	GU/TUP Nihil	Rp 14.457.600.526,00		
		Rp 79.657.910.297,08		
		Rp 2.712.321.716,00		
-	Pengembalian ke Kas Daerah		Rp	1.422.328.916,00
-	Selisih saldo kas		Rp	1.289.992.800,00

   Hal ini disebabkan sebagai berikut :
   -Adanya unsur kesengajaan Bendahara Pengeluaran menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.
   -Kurangnya pengendalian internal atas pengelolaan kas.

   Akibatnya terdapat selisih antara pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan pertanggungjawabannya dan terjadi kekurangan kas sebesar Rp1.289.992.800,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah.

   Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 *unaudited* Jumlah selisih kas tersebut di akun Kas Bendahara Pengeluaran. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 *audited* berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/398/INPTD/2022 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Sdr. Iwan Virgiawan atas perkara penggelapan uang kas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp1.289.992.800,00 tersebut direklas dari akun Kas Bendahara Pengeluaran ke akun Aset Lainnya sub rincian Aset Lain-Lain.

BAB IX

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan bersama-sama dengan elemen laporan keuangan daerah lainnya sebagai salah satu kelengkapan dari Laporan Keuangan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021. Pengungkapan dalam CaLK ditujukan agar laporan yang disajikan dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan namun juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam membaca laporan keuangan pengguna laporan terhindar dari kesalahpahaman/*bias*.

CaLK berisi penjelasan, daftar terinci, dan analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian penjelasan berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran dan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan penerapan *good governance* dan *New Public Management*.

Pangkalpinang, Mei 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

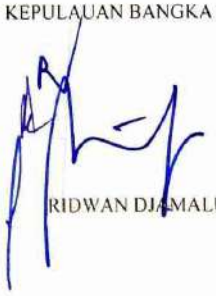

RIDWAN DJAMALUDDIN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN 1
Catatan Atas Laporan Keuangan 2021

NO	JENIS RETRIBUSI	DINAS	TARGET	REALISASI BULAN												JUMLAH	SISA
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
B	**RETRIBUSI DAERAH**		**20,214,191,546.00**	**277,727,650.00**	**312,927,950.00**	**324,920,397.00**	**497,218,750.00**	**217,076,700.00**	**454,634,500.00**	**635,124,575.00**	**331,955,257.00**	**417,708,350.00**	**662,503,830.00**	**572,816,100.00**	**1,241,006,786.00**	**5,945,620,845.00**	**14,281,740,701.00**
I	**Retribusi Jasa Umum**		**2,997,402,000.00**	**114,000,000.00**	**72,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8,000,000.00**	**5,000,000.00**	**8,000,000.00**	**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**18,100,000.00**	**2,650,000.00**	**77,375,000.00**	**31,500,000.00**	**344,625,000.00**	**2,652,777,000.00**
1	**Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamat Jiwa**		**300,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**16,100,000.00**	**2,650,000.00**	**49,900,000.00**	**26,500,000.00**	**95,150,000.00**	**204,850,000.00**
a		Disnaker	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,100,000.00	2,650,000.00	49,900,000.00	26,500,000.00	95,150,000.00	204,850,000.00
2	**Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta**		**1,691,522,000.00**	**114,000,000.00**	**72,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8,000,000.00**	**5,000,000.00**	**8,000,000.00**	**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	-	**7,000,000.00**	**5,000,000.00**	**229,000,000.00**	**1,462,522,000.00**
a		Distamben	1,691,522,000.00	114,000,000.00	72,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-	7,000,000.00	5,000,000.00	229,000,000.00	1,462,522,000.00
3	**Retribusi Pelayanan Kependidikan**		**1,005,880,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,475,000.00**	-	**20,475,000.00**	**985,405,000.00**
a		BKPSDM	1,005,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,475,000.00	-	20,475,000.00	985,405,000.00
II	**Retribusi Jasa Usaha**		**16,683,779,400.00**	**126,253,800.00**	**225,576,400.00**	**270,653,747.00**	**438,054,550.00**	**198,571,050.00**	**408,593,500.00**	**595,729,725.00**	**306,000,657.00**	**371,997,050.00**	**643,291,630.00**	**490,604,000.00**	**1,179,142,736.00**	**5,254,468,845.00**	**11,442,480,555.00**
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**		**10,040,988,000.00**	**106,622,800.00**	**160,259,400.00**	**122,786,950.00**	**365,253,350.00**	**163,106,050.00**	**310,815,100.00**	**370,302,400.00**	**149,455,850.00**	**324,247,600.00**	**470,771,900.00**	**414,811,250.00**	**782,493,150.00**	**3,740,925,800.00**	**6,300,332,200.00**
a		BKPSDM	664,575,000.00	-	-	-	-	-	3,450,000.00	4,100,000.00	-	6,250,000.00	-	5,250,000.00	2,500,000.00	21,550,000.00	643,025,000.00
b		DPU	500,000,000.00	16,871,000.00	67,716,000.00	6,135,000.00	152,720,000.00	15,000,000.00	106,229,000.00	84,318,000.00	11,667,000.00	60,701,000.00	81,806,000.00	38,419,000.00	43,740,000.00	685,322,000.00	(185,322,000.00)
c		Setda	55,200,000.00	30,180,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	2,400,000.00	-	3,210,000.00	37,950,000.00	17,250,000.00
d		Disperindag	154,275,000.00	32,125,000.00	23,771,250.00	12,712,500.00	29,520,000.00	14,450,000.00	29,995,000.00	24,805,000.00	20,300,000.00	46,248,750.00	23,998,750.00	32,220,000.00	35,578,750.00	325,725,000.00	(171,450,000.00)
e		DLHD	5,300,000,000.00	20,571,300.00	62,450,650.00	96,012,950.00	140,928,850.00	123,327,550.00	123,699,600.00	209,247,900.00	87,632,350.00	121,276,350.00	353,770,650.00	258,095,750.00	502,050,400.00	2,099,064,300.00	3,200,935,700.00
f		Disnakertrans	30,000,000.00	-	-	500,000.00	14,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,250,000.00	14,750,000.00
h		Bakuda	140,000,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00	525,000.00	525,000.00	40,525,000.00	525,000.00	40,525,000.00	60,525,000.00	145,775,000.00	(5,775,000.00)
g		Dinas Pendidikan	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			217,500.00	217,500.00	199,782,500.00
		Dinas Kesehatan	600,000,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	840,000.00	1,440,000.00	598,560,000.00
		Dinas ESDM	3,600,000.00	-	600,000.00	300,000.00	-	-	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00	-
		Diskominfo	50,000,000.00	-	-	-	-	560,000.00	2,680,000.00	7,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	12,000,000.00	30,240,000.00	19,760,000.00
j		DKP	2,160,000,000.00	564,000.00	360,000.00	255,000.00	21,303,000.00	755,000.00	25,300,000.00	20,450,000.00	20,450,000.00	41,310,000.00	460,000.00	8,640,000.00	84,670,000.00	224,517,000.00	1,935,483,000.00
		Dispora	2,700,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	2,430,000.00
		Disbudpar		-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	270,000.00	
		Bappeda	8,478,000.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	706,500.00	8,478,000.00	-
		Dinas Sosial	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,160,000.00	-
		Dinas Pertanian dan Pangan		4,900,000.00	3,950,000.00	5,100,000.00	4,350,000.00	7,527,000.00	5,150,000.00	5,700,000.00	5,895,000.00	6,750,000.00	6,125,000.00	12,800,000.00	8,750,000.00	76,997,000.00	(76,997,000.00)
k		Dinas Koperasi	170,000,000.00	-	-	-	-		12,000,000.00	12,700,000.00	-	-	500,000.00	9,675,000.00	27,225,000.00	62,100,000.00	107,900,000.00
2	**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**		**559,500,000.00**	**760,000.00**	**680,000.00**	**1,270,000.00**	**910,000.00**	**590,000.00**	**1,060,000.00**	**680,000.00**	**630,000.00**	**700,000.00**	**1,510,000.00**	**670,000.00**	**5,710,000.00**	**15,170,000.00**	**557,230,000.00**
a		Setda	75,000,000.00	760,000.00	680,000.00	1,270,000.00	910,000.00	590,000.00	1,060,000.00	680,000.00	630,000.00	400,000.00	510,000.00	670,000.00	2,710,000.00	10,870,000.00	64,130,000.00
		BKPSDM	484,500,000.00	-	-	-	-	-		-	-	300,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00	4,300,000.00	493,100,000.00
3	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**		**85,000,000.00**	-	-	-	**1,000,000.00**	-	-	**14,000,000.00**	**2,000,000.00**	-	-	-	**1,000,000.00**	**18,000,000.00**	**67,000,000.00**
a		Dispora	85,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	14,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	18,000,000.00	67,000,000.00
4	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**		**2,546,700,000.00**	**8,080,000.00**	-	**105,732,297.00**	**24,258,200.00**	-	-	**163,723,017.00**	**115,136,307.00**	**13,211,950.00**	**138,577,230.00**	**36,291,250.00**	**280,751,886.00**	**885,762,137.00**	**1,660,937,863.00**
a		Dinas Kelautan dan Perikanan	300,000,000.00	-	-	105,732,297.00	6,407,200.00	-	-	107,248,017.00	46,606,307.00	10,000,000.00	15,622,000.00	9,400,000.00	264,233,666.00	565,249,487.00	(265,249,487.00)
b		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2,126,700,000.00	8,080,000.00	-	-	17,851,000.00	-	-	56,475,000.00	68,530,000.00	-	94,300,000.00	12,000,000.00	-	257,236,000.00	1,869,464,000.00
c		Disperindag	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,211,950.00	28,655,230.00	14,891,250.00	16,518,220.00	63,276,650.00	56,723,350.00
5	**Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**		**3,451,591,400.00**	**10,791,000.00**	**64,637,000.00**	**40,864,500.00**	**46,633,000.00**	**34,875,000.00**	**96,718,400.00**	**47,024,308.00**	**38,778,500.00**	**33,837,500.00**	**32,432,500.00**	**38,831,500.00**	**109,187,700.00**	**594,610,908.00**	**2,856,980,492.00**
a		Dinas Kelautan dan Perikanan	3,451,591,400.00	10,791,000.00	64,637,000.00	40,864,500.00	46,633,000.00	34,875,000.00	96,718,400.00	47,024,308.00	38,778,500.00	33,837,500.00	32,432,500.00	38,831,500.00	109,187,700.00	594,610,908.00	2,856,980,492.00
III	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**533,010,146.00**	**37,473,850.00**	**15,351,550.00**	**50,266,650.00**	**51,164,200.00**	**13,505,650.00**	**38,041,000.00**	**36,394,850.00**	**24,954,600.00**	**27,611,300.00**	**16,562,200.00**	**4,837,100.00**	**30,364,050.00**	**346,527,000.00**	**186,483,146.00**
a	Retribusi Izin Trayek		98,500,000.00	-	-	15,500,000.00	5,500,000.00	-	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	**33,500,000.00**	65,000,000.00
		BP2TPM	98,500,000.00	-	-	15,500,000.00	5,500,000.00	-	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	33,500,000.00	65,000,000.00
b	**Retribusi Izin Usaha Perikanan**		**34,510,146.00**	**3,285,850.00**	**15,351,550.00**	**17,144,650.00**	**10,414,200.00**	**13,505,650.00**	**8,285,000.00**	**18,880,850.00**	**7,560,600.00**	**3,205,300.00**	**16,562,200.00**	**4,837,100.00**	**30,364,050.00**	**149,397,000.00**	**(114,886,854.00)**
		BP2TPM	34,510,146.00	3,285,850.00	15,351,550.00	17,144,650.00	10,414,200.00	13,505,650.00	8,285,000.00	18,880,850.00	7,560,600.00	3,205,300.00	16,562,200.00	4,837,100.00	30,364,050.00	149,397,000.00	(114,886,854.00)
c	**Retribusi Perpanjangan IMTA**		**400,000,000.00**	**34,188,000.00**	-	**17,622,000.00**	**35,250,000.00**	-	**17,256,000.00**	**17,514,000.00**	**17,394,000.00**	**24,406,000.00**	-	-	-	**163,630,000.00**	**236,370,000.00**
		Disnakertrans	400,000,000.00	34,188,000.00	-	17,622,000.00	35,250,000.00	-	17,256,000.00	17,514,000.00	17,394,000.00	24,406,000.00	-	-	-	163,630,000.00	236,370,000.00

LAMPIRAN II
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rp)

No	URAIAN	DAK FISIK REGULER							DAK FISIK PENUGASAN							JUMLAH
		BIDANG PENDIDIKAN				BIDANG KESEHATAN DAN KB		BIDANG JALAN	BIDANG KESEHATAN DAN KB	BIDANG PERTANIAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	BIDANG PARIWISTA	BIDANG JALAN	BIDANG IRIGASI	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		PENDIDIKAN SMA	PENDIDIKAN SMK	PENDIDIKAN SLB	PERPUSTAKAAN DAERAH	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	JALAN	PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	PERTANIAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PARIWISATA	JALAN	IRIGASI	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
PAGU ANGGARAN SESUAI DENGAN PERPRES 113 TAHUN 2020		**49,535,550,000.00**		**2,672,830,000.00**	**518,500,000.00**	**1,651,668,000.00**	**26,607,403,000.00**	**9,028,052,000.00**	**991,550,000.00**	**3,000,000,000.00**	**9,160,000,000.00**	**400,000,000.00**	**32,940,051,000.00**	**15,888,165,000.00**	**1,267,804,000.00**	**153,661,573,000.00**
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	2,257,013,000.00	-	-	2,290,000,000.00	-	8,235,012,750.00	3,972,041,250.00	-	16,754,067,000.00
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	668,207,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668,207,500.00
8	Agustus	6,778,620,500.00	5,605,267,000.00	-	129,625,000.00	411,250,000.00	4,125,000,000.00	4,017,759,750.00	558,733,150.00	750,000,000.00	-	-	-	6,886,368,000.00	443,314,688.00	29,705,938,088.00
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,292,415,588.00	-	-	14,292,415,588.00
10	Oktober	10,475,014,950.00	9,531,535,378.00	1,106,846,333.00	229,034,250.00	717,624,125.00	7,262,027,686.00	2,653,582,249.00	-	-	3,684,074,785.00	-	-	-	-	35,659,739,756.00
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,233,495,192.00	4,444,630,750.00	-	13,678,125,942.00
12	Desember	6,024,175,550.00	6,044,387,352.00	684,604,685.00	150,305,750.00	465,846,152.00	14,411,782,837.00	-	-	-	2,212,577,470.00	-	-	-	-	29,993,679,796.00
JUMLAH PENERIMAAN DARI RKUN		23,277,811,000.00	9,531,535,378.00	2,459,658,518.00	508,965,000.00	1,594,720,277.00	25,798,810,523.00	8,928,354,999.00	558,733,150.00	750,000,000.00	8,186,652,255.00	-	31,760,923,530.00	15,303,040,000.00	443,314,688.00	90,742,710,898.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAP BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN III
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	NILAI (Rp)
1	Kota Pangkalpinang	3/17/2021	957/0336/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,902,020,688.00
		4/6/2021	957/0493/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	10,570,084,013.75
		6/16/2021	957/1312/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 dan Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	3,995,545,179.00
		7/21/2021	957/1570/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,657,958,816.89
		7/21/2021	957/1571/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	70,298,487.49
		7/21/2021	957/1572/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	4,064,818,803.30
		7/21/2021	957/1577/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	4,945,592,704.19
		8/16/2021	957/1794/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	2,229,401,100.00
		9/16/2021	957/2191/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	3,820,587,809.95
		9/16/2021	957/2196/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,657,958,816.89
		9/16/2021	957/2197/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	5,089,516,151.69
		10/6/2021	957/2519/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	74,658,961.96
		11/25/2021	957/3238/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	2,184,095,038.00
		12/20/2021	957/4034/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	864,259,336.76
		12/20/2021	957/4035/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	75,219,705.12
		12/20/2021	957/4036/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	4,064,818,803.30
		12/20/2021	957/4037/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,657,958,816.89
		12/20/2021	957/4038/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	5,250,205,499.75
		12/27/2021	957/4162/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	11,117,594,336.14
		12/27/2021	957/4163/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	53,588,565.99
						65,346,181,635.06
2	Kabupaten Bangka	2/16/2021	957/0212/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	2,557,182,289.00
		3/17/2021	957/0339/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	9,216,044,202.50
		5/11/2021	957/1035/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	5,364,071,193.00
		7/14/2021	957/1534/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	229,055,253.84
		7/14/2021	957/1535/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	4,945,592,704.19
		7/14/2021	957/1536/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,210,739,577.64
		7/14/2021	957/1537/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	3,109,246,384.11
		8/16/2021	957/1795/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	2,990,783,573.00
		8/31/2021	957/2054/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	3,062,659,226.23
		8/31/2021	957/2055/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,210,739,577.64
		8/31/2021	957/2056/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	5,089,516,151.69
		8/31/2021	957/2058/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	263,644,113.21
		11/12/2021	957/3099/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	2,930,004,638.00
		12/13/2021	957/3783/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	374,917,809.26
		12/13/2021	957/3784/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	120,710,168.44
		12/13/2021	957/3786/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	5,250,205,499.75
		12/13/2021	957/3787/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	3,109,246,384.11
		12/13/2021	957/3788/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,210,739,577.64
		12/13/2021	957/3789/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,439,447,403.95
		12/13/2021	957/3782/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	263,558,283.87
						53,948,104,011.07
3	Kabupaten Bangka Teng	2/19/2021	957/0214/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,718,534,615.00
		4/20/2021	957/0606/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	7,106,890,208.79
		6/29/2021	957/1374/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 dan Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	3,618,155,604.00
		7/23/2021	957/1587/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	2,069,560,455.36
		7/23/2021	957/1588/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	112,156,476.74
		7/23/2021	957/1589/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	4,076,899,565.59
		7/23/2021	957/1590/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	856,980,691.39
		8/24/2021	957/1934/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	2,021,128,938.00
		9/8/2021	957/2125/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	164,741,524.46
		9/8/2021	957/2126/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	856,980,691.39
		9/8/2021	957/2127/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	4,846,176,336.37
		9/8/2021	957/2173/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	2,025,687,951.73
		11/22/2021	957/3190/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	1,980,055,399.00
		12/15/2021	957/3870/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	311,270,665.49
		12/15/2021	957/3870/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	297,938,391.99
		12/15/2021	957/3872/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	164,655,695.12
		12/15/2021	957/3873/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	684,929,549.45
		12/15/2021	957/3874/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	856,980,691.39
		12/15/2021	957/3874/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	2,069,560,455.36
		12/16/2021	957/3913/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	413,564,092.46
		12/16/2021	957/3922/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	5,250,205,499.75

						41,503,053,498.83
4	Kabupaten Bangka Bara	2/16/2021	957/0211/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,796,905,260.00
		3/17/2021	957/0339/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	6,161,806,914.46
		5/18/2021	957/1045/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	1,277,801,264.00
		5/18/2021	957/1046/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	2,498,200,250.00
		7/16/2021	957/1556/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	105,742,567.49
		7/16/2021	957/1557/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,863,271,738.11
		7/16/2021	957/1558/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	3,508,338,344.32
		7/16/2021	957/1559/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	723,986,074.39
		8/9/2021	957/1767/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	2,107,264,780.00
		8/31/2021	957/2057/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	110,477,104.46
		8/31/2021	957/2059/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	723,986,074.39
		9/3/2021	957/2084/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	4,196,932,313.39
		9/3/2021	957/2085/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,746,389,873.23
		11/12/2021	957/3100/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	2,064,440,781.00
		12/16/2021	957/3912/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	354,817,855.61
		12/16/2021	957/3914/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	723,986,074.39
		12/16/2021	957/3915/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	109,168,007.62
		12/16/2021	957/3912/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	61,669,581.24
		12/16/2021	957/3920/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	684,929,549.45
		12/16/2021	957/3923/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	5,218,057,516.54
		12/16/2021	957/3924/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,863,271,738.11
						37,901,443,662.20
5	Kabupaten Bangka Selat	3/17/2021	957/0337/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,684,227,252.00
		3/17/2021	957/0338/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	5,726,913,267.09
		6/2/2021	957/1265/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 dan Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	3,539,818,285.00
		7/13/2021	957/1515/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	721,568,764.39
		7/13/2021	957/1516/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,707,513,189.36
		7/14/2021	957/1519/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	3,340,446,643.07
		7/16/2021	957/1555/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	83,135,367.49
		8/16/2021	957/1796/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	1,975,629,050.00
		9/8/2021	957/2129/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	3,917,504,831.56
		9/8/2021	957/2133/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	87,869,904.46
		9/9/2021	957/2133/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	721,568,764.39
		9/8/2021	957/2128/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/50/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,681,357,130.98
		11/15/2021	957/3107/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	1,935,480,163.00
		12/16/2021	957/3917/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	684,929,549.45
		12/16/2021	957/3918/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	86,958,890.79
		12/16/2021	957/3917/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	59,706,911.79
		12/16/2021	957/3921/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	721,568,764.39
		12/16/2021	957/3925/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,707,513,189.36
		12/16/2021	957/3926/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	4,825,305,585.57
						35,209,015,504.14
6	Kabupaten Belitung	3/10/2021	957/0290/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,637,292,345.00
		4/13/2021	957/0563/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	1,054,061,526.86
		4/13/2021	957/0564/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	2,452,316,218.75
		4/14/2021	957/0573/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	4,377,792,770.36
		4/14/2021	957/0574/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan APT Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	471,568,903.04
		6/2/2021	957/1264/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	2,277,543,912.00
		6/2/2021	957/1266/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	1,164,298,572.00
		8/16/2021	957/1789/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	438,948,981.24
		8/16/2021	957/1790/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	4,373,484,770.80
		8/16/2021	957/1791/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,028,233,134.64
		8/16/2021	957/1792/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	2,650,399,471.11
		8/16/2021	957/1793/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	1,921,138,255.00
		9/16/2021	957/2192/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	4,995,168,501.93
		9/16/2021	957/2193/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,028,233,134.64
		9/16/2021	957/2195/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	2,543,976,078.73
		9/16/2021	957/2200/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	443,683,518.21
		11/25/2021	957/3239/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	1,882,096,734.00
		12/13/2021	957/3785/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PBBKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	684,929,549.45
		12/13/2021	957/3812/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	372,701,161.08
		12/13/2021	957/3813/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	443,597,688.87
		12/13/2021	957/3785/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	960,771,483.26
		12/13/2021	957/3815/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	5,250,205,499.75
		12/13/2021	957/3816/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	2,650,399,471.11
		12/13/2021	957/3817/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/67/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	1,028,233,134.64
						46,131,074,816.47

7	Kabupaten Belitung Tim	2/26/2021	957/0226/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/145/BAKUDA/2020 tgl 28-12-2020	1,332,133,041.00
		4/6/2021	957/0492/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBNKB, APT dan PBBKB Triwulan IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/109/BAKUDA/2021 tgl 01-03-2021	5,883,397,050.66
		6/2/2021	957/1263/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/35/BAKUDA/2021 tgl 05-05-2021	2,800,441,723.00
		7/21/2021	957/1573/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	704,446,178.14
		7/21/2021	957/1574/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	1,776,201,149.61
		7/21/2021	957/1575/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	2,901,148,169.54
		7/21/2021	957/1575/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan I TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/37/BAKUDA/2021 tgl 28-06-2021	536,297,648.74
		8/9/2021	957/1766/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/45/BAKUDA/2021 tgl 28-07-2021	1,563,152,744.00
		9/16/2021	957/2194/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	3,314,902,390.07
		9/16/2021	957/2198/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	1,750,045,091.23
		9/16/2021	957/2199/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	541,032,185.71
		9/16/2021	957/2201/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan II TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/49/BAKUDA/2021 tgl 25-08-2021	704,446,178.14
		11/22/2021	957/3189/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	1,531,386,233.00
		12/20/2021	957/4039/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	1,776,201,149.61
		12/20/2021	957/4052/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak APT Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	540,946,356.37
		12/20/2021	957/4053/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target Pajak APT Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	261,429,044.29
		12/20/2021	957/4054/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target PKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	547,783,618.20
		12/20/2021	957/4056/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Over Target BBNKB Triwulan I-IV TA. 2020	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/65/BAKUDA/2021 tgl 29-11-2021	684,929,549.45
		12/20/2021	957/4057/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan BBNKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	704,446,178.14
		12/20/2021	957/4060/BT/2021	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan PBBKB Triwulan III TA. 2021	SK Kepala Badan Keuangan Daerah No. 188.4/60/BAKUDA/2021 tgl 04-11-2021	4,154,949,696.99
						34,009,715,375.89
JUMLAH						314,048,588,503.66

Rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
(hasil rekonsiliasi antaraSKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan)

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran : Per 31 Desember 2021
Status : Setelah Restrukturisasi OPD Perda Nomor 9 Tahun 2020

No.	Nama SKPD	UP	GU	TU	LS	JUMLAH SP2D	Realisasi Belanja Berdasarkan SPJ Fungsionalnya			Jumlah SPJ Fungsional	Pengembalian Belanja (Contra Pos) sesuai STS	*Koreksi cp/lebih setor/SP2D Penambahan Belanja/ Pengeluaran Pembiayaan*	Sisa UP/TU	Setoran Sisa UP/TU Sebelum 31 Des 2021 sesuai STS		Selisih/Setoran Sisa UP/TU Setelah 31 Desember 2021
							SPJ-LS Gaji	SPJ-LS Barang dan Jasa	SPJ UP/GU/TU					UP	TU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
1	Dinas Pendidikan	26,522,543,000.00	90,868,250,583.00	-	368,413,132,397.00	485,803,925,980.00	106,720,132,000.00	261,848,654,668.00	102,867,925,244.00	471,236,711,912.00	852.00	-	14,567,213,216.00	14,523,025,086.38	-	44,188,129.62
2	Dinas Kesehatan	16,485,566,000.00	38,234,837,738.00	6,647,457,242.00	165,774,855,057.96	227,142,716,037.96	28,590,261,980.00	137,192,060,263.96	57,527,302,576.00	223,309,624,819.96	6,032,330.00	13,499,516.00	3,840,558,404.00	1,403,616,174.00	1,146,949,430.00	1,289,992,800.00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	4,272,500,000.00	7,032,153,616.00	-	258,884,787,808.52	270,189,441,424.52	4,576,890,820.00	254,307,896,988.52	9,814,051,942.00	268,698,839,750.52	270,409.00	-	1,490,331,265.00	1,490,331,265.00	-	-
3.a	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	3,868,019,000.00	3,182,846,255.00	-	54,146,744,591.00	61,197,609,846.00	3,630,585,520.00	50,518,159,071.00	6,438,680,584.00	60,585,425,175.00	887,253.00	-	611,297,418.00	611,297,418.00	-	-
3.b	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	1,535,989,000.00	-	-	2,632,813,611.00	4,168,802,611.00	1,071,479,440.00	1,561,334,171.00	402,770,098.00	3,035,583,709.00	-	-	1,133,218,902.00	1,133,218,902.00	-	-
4	Bappelitbangda	1,249,767,000.00	2,671,725,145.00	-	11,462,808,212.00	15,384,300,357.00	3,449,694,820.00	8,013,113,392.00	3,697,515,181.00	15,160,323,393.00	6,191,000.00	-	217,785,964.00	217,785,964.00	-	-
5	Dinas Perhubungan	1,384,901,000.00	4,042,041,444.00	341,291,409.00	15,722,892,290.20	21,491,126,143.20	3,006,821,764.00	12,716,070,526.20	5,347,602,946.00	21,070,495,236.20	-	-	420,630,907.00	420,630,907.00	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	752,772,000.00	6,565,819,386.00	-	16,478,948,118.00	23,797,539,504.00	5,422,515,040.00	11,055,887,144.00	7,007,763,136.00	23,486,165,320.00	4,007,634.00	-	307,366,550.00	307,366,550.00	-	-
6.a	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	409,275,000.00	1,111,305,810.00	-	3,468,437,334.00	4,989,018,144.00	1,341,259,220.00	2,127,178,114.00	1,511,229,124.00	4,979,666,458.00	-	-	9,351,686.00	9,351,686.00	-	-
6.b	Dinas Kehutanan	362,220,000.00	1,461,745,716.00	-	11,701,885,957.00	13,525,851,673.00	4,206,867,200.00	7,493,018,757.00	1,682,964,716.00	13,384,850,673.00	-	-	141,001,000.00	141,001,000.00	-	-
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	722,118,000.00	1,954,664,223.00	180,539,500.00	7,180,786,931.00	10,038,108,654.00	2,266,513,008.00	4,914,273,923.00	2,475,821,039.00	9,656,607,970.00	-	-	381,500,684.00	372,067,180.00	9,433,504.00	-
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	699,380,000.00	4,710,314,849.00	2,138,367,191.00	11,747,525,190.00	19,295,587,230.00	3,164,591,040.00	8,582,114,150.00	6,520,612,538.00	18,267,317,728.00	5,325,000.00	(820,000.00)	1,022,124,502.00	316,597,744.00	705,376,758.00	150,000.00
8.a	Dinas Sosial	535,274,000.00	1,517,315,736.00	-	5,908,030,368.00	7,960,620,104.00	2,086,625,920.00	3,821,404,448.00	2,011,705,263.00	7,919,735,631.00	-	-	40,884,473.00	40,884,473.00	-	-
8.b	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	274,344,000.00	569,382,896.00	-	3,089,002,345.00	3,932,729,241.00	1,125,837,100.00	1,963,165,245.00	788,907,116.00	3,877,909,461.00	-	-	54,819,780.00	54,819,780.00	-	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,262,764,000.00	4,951,098,228.68	2,748,460,054.00	7,167,873,571.19	16,130,195,853.87	2,155,939,840.00	5,011,933,731.19	7,259,604,974.68	14,427,478,545.87	-	-	1,702,717,308.00	673,103,139.00	1,029,614,169.00	-
10	Dinas Tenaga Kerja	832,184,000.00	3,892,456,804.00	-	13,908,834,704.00	18,633,475,508.00	4,661,273,851.00	9,247,560,853.00	4,355,327,089.00	18,264,161,793.00	2,292,200.00	-	367,021,515.00	367,021,515.00	-	-
11	Dinas Koperasi, Kecil dan Menengah	1,334,598,000.00	5,306,354,100.00	-	10,031,071,944.00	16,672,024,044.00	2,575,416,687.00	7,455,655,257.00	6,176,651,900.00	16,207,723,844.00	-	-	464,300,200.00	464,300,200.00	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	462,777,000.00	2,134,955,467.00	-	7,180,031,453.00	9,777,763,920.00	2,453,781,980.00	4,724,446,833.00	2,394,832,078.00	9,573,060,891.00	1,802,640.00	-	202,900,389.00	202,900,389.00	-	-
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	869,660,000.00	6,761,470,159.00	-	18,827,973,551.05	26,459,103,710.05	2,342,182,840.00	16,485,790,711.05	7,243,153,168.00	26,071,126,719.05	135,561.00	-	387,841,430.00	387,841,430.00	-	-
13.a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	511,412,000.00	404,763,901.00	-	4,480,318,093.00	5,396,493,994.00	1,577,939,500.00	2,902,378,593.00	886,655,922.00	5,346,974,015.00	-	-	49,519,979.00	49,519,979.00	-	-
14.b	Dinas Pemuda dan Olahraga	1,305,370,000.00	1,248,271,265.00	-	3,118,385,838.00	5,672,027,103.00	1,049,770,620.00	2,066,065,218.00	1,418,352,365.00	4,534,188,203.00	2,550,000.00	-	1,135,288,900.00	1,135,288,900.00	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	587,494,000.00	2,412,003,658.00	31,900,000.00	9,434,747,679.00	12,466,145,337.00	1,808,861,080.00	7,625,166,619.00	2,844,625,140.00	12,278,652,839.00	3,717,980.00	-	183,774,518.00	183,774,518.00	-	-
15	Satuan Polisi pamong Praja	1,226,360,000.00	5,667,562,000.00	476,150,000.00	11,755,567,260.00	19,125,639,260.00	3,485,563,500.00	8,270,003,760.00	7,100,721,160.00	18,856,288,420.00	-	-	269,350,840.00	269,350,840.00	-	-
16	Sekretariat Daerah	10,133,206,000.00	30,462,498,264.00	448,200,000.00	72,778,065,157.00	113,821,969,421.00	13,754,793,740.00	59,023,271,417.00	38,421,970,405.00	111,200,035,562.00	7,360,600.00	50,000.00	2,614,623,259.00	2,488,751,259.00	125,872,000.00	-
17	Sekretariat DPRD	16,269,759,000.00	41,227,505,241.00	-	47,569,721,095.00	105,066,985,336.00	3,530,412,100.00	44,038,708,995.00	49,917,516,472.00	97,486,637,567.00	2,320,000.00	-	7,578,027,769.00	7,578,027,769.00	-	-
18	Badan Keuangan Daerah	2,828,851,000.00	13,753,304,160.14	6,774,591,750.00	402,371,753,884.26	425,728,500,794.40	11,727,619,170.00	387,914,448,393.82	19,305,920,401.14	418,947,987,964.96	799,718,771.00	(1,938,878,785.44)	4,041,915,273.00	1,956,151,912.00	2,085,763,361.00	0.00
19	Inspektorat Daerah	547,315,000.00	4,121,503,551.00	-	14,283,241,974.00	18,952,060,525.00	4,452,014,852.00	9,831,226,874.00	4,491,652,905.00	18,774,894,631.00	248.00	-	177,165,646.00	177,165,646.00	-	-
20	Badan Penghubung	916,393,000.00	3,810,508,771.00	-	4,290,445,840.00	9,017,347,611.00	1,251,906,100.00	3,038,539,740.00	4,068,578,016.00	8,360,023,856.00	2,080,000.00	-	655,243,755.00	655,243,755.00	-	-
21	BKPSDM	1,163,867,000.00	5,568,767,080.00	116,000,000.00	15,424,138,720.00	22,272,772,800.00	4,912,155,525.00	10,510,223,335.00	6,429,975,179.00	21,852,354,039.00	9,169,300.00	7,409,440.00	418,658,901.00	418,658,901.00	-	-
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,957,679,000.00	12,480,941,508.00	-	10,143,955,374.00	24,582,575,882.00	2,400,201,080.00	7,742,058,714.00	13,566,901,345.00	23,709,161,119.00	1,698,153.00	-	871,716,610.00	871,716,610.00	-	-
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	428,548,000.00	1,863,208,312.00	-	10,158,911,673.00	12,450,667,985.00	3,288,380,500.00	6,870,531,173.00	2,201,294,279.00	12,360,205,952.00	-	-	90,462,033.00	90,462,033.00	-	-
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,616,052,270.00	8,796,946,592.00	429,200,000.00	30,887,430,461.00	41,729,629,323.00	8,039,094,080.00	22,842,281,631.00	10,277,721,056.00	41,159,096,767.00	6,356,172.00	-	564,176,384.00	564,176,384.00	-	-
24.a	Dinas Pertanian	1,536,976,000.00	-	-	1,356,188,241.00	2,893,164,241.00	430,243,900.00	925,944,341.00	-	1,356,188,241.00	-	-	1,536,976,000.00	1,536,976,000.00	-	-
24.b	Dinas Pangan	-	-	-	491,116,842.00	491,116,842.00	155,704,500.00	335,412,342.00	-	491,116,842.00	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	440,099,000.00	2,351,846,050.00	-	16,394,231,727.00	19,186,176,777.00	5,842,089,537.00	10,545,484,490.00	2,733,986,403.00	19,121,560,430.00	7,766,700.00	-	56,849,647.00	56,849,647.00	-	-
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,851,518,000.00	6,743,043,485.00	-	45,769,565,450.20	55,364,126,935.20	4,462,366,740.00	41,307,198,710.20	7,329,212,024.00	53,098,777,474.20	-	-	2,265,349,461.00	2,265,349,461.00	-	-
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,073,818,000.00	3,075,976,243.00	-	12,889,868,796.00	17,039,663,039.00	4,553,272,980.00	8,336,595,816.00	3,863,422,305.00	16,753,291,101.00	-	-	286,371,938.00	286,371,938.00	-	-
						-										
	Total Belanja Daerah Non RKUD (SP2D)	**109,231,368,270.00**	**330,957,388,236.82**	**20,332,157,146.00**	**1,707,326,089,538.38**	**2,167,847,003,191.20**	**261,573,059,554.00**	**1,442,963,258,408.94**	**410,363,926,089.82**	**2,114,900,244,052.76**	**869,682,803.00**	**(1,918,739,829.44)**	**50,158,336,506.00**	**43,720,996,354.38**	**5,103,009,222.00**	**1,334,330,929.62**
35	*BLUD RSUP*	-	-	-	-	-	-	26,206,743,044.00	-	26,206,743,044.00	-					
36	*BLUD RSJ*	-	-	-	-	-	-	*9,757,615,760.86*	-	9,757,615,760.86	-					
37	*BLUD LABKES*	-	-	-	-	-	-	2,321,379,824.00	-	2,321,379,824.00	-					
38	*SP2B BOS SATDIKMEN NEGERI*	-	-	-	-	-	-	*79,379,349,189.00*	-	79,379,349,189.00	-					
39	*SP2B HIBAH SATDIKDAS NEGERI*	-	-	-	-	-	-	*195,427,454,000.00*	-	195,427,454,000.00	-					
40	*SP2B HIBAH SATDIKDAS SWASTA*	-	-	-	-	-	-	*21,757,454,000.00*	-	21,757,454,000.00	-					
41	*SP2B HIBAH SATDIKMEN SWASTA*	-	-	-	-	-	-	*15,401,730,000.00*	-	15,401,730,000.00	-					
42	*SP2B HIBAH SATDIKSUS SWASTA*	-	-	-	-	-	-	*660,800,000.00*	-	660,800,000.00	-					
	Total Belanja Daerah Non RKUD (SP2B)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***350,912,525,817.86***	**-**	***350,912,525,817.86***	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	Total Belanja Daerah	***109,231,368,270.00***	***330,957,388,236.82***	***20,332,157,146.00***	***1,707,326,089,538.38***	***2,167,847,003,191.20***	***261,573,059,554.00***	***1,793,875,784,226.80***	***410,363,926,089.82***	***2,465,812,769,870.62***	***869,682,803.00***	***(1,918,739,829.44)***	***50,158,336,506.00***	***43,720,996,354.38***	***5,103,009,222.00***	***1,334,330,929.62***

LRA SKPD	SELISIH SPJ - LRA	PENJELASAN
17	18	19
783,863,499,101.00	(312,626,787,189.00)	
261,595,363,448.82	(38,285,738,628.86)	
268,698,839,750.52	(0.00)	
60,585,425,175.00	-	
3,035,583,709.00	-	
15,160,323,393.00	-	
21,070,495,236.20	-	
23,486,165,320.00	-	
4,979,666,458.00	-	
13,384,850,673.00	-	
9,656,607,970.00	-	
18,267,317,728.00	-	
7,919,735,631.00	-	
3,877,909,461.00	-	
14,427,478,545.87	(0.00)	
18,264,161,793.00	-	
16,207,723,844.00	-	
9,573,060,891.00	-	
26,071,126,719.05	-	
5,346,974,015.00	-	
4,534,188,203.00	-	
12,278,652,839.00	-	
18,856,288,420.00	-	
111,200,035,562.00	-	
97,487,237,567.00	(600,000.00)	sp2d kurang input
418,947,987,964.96	-	
18,774,894,879.00	(248.00)	sp2d kurang input
8,360,023,856.00	-	
21,852,354,039.00	-	
23,709,161,119.00	-	
12,360,205,952.00	-	
41,159,096,767.00	-	
1,356,188,241.00	-	
491,116,842.00	-	
19,121,560,430.00	-	
53,098,777,474.20	-	
16,753,291,101.00	-	
2,465,813,370,118.62	**(350,913,126,065.86)**	*total belanja Non RKUD*
-	-	
2,465,813,370,118.62	***(350,913,126,065.86)***	

LAMPIRAN V

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGEMBALIAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2021

(dalam Rp)

TANGGAL	NO. BUKTI	JENIS SPM	URAIAN	NILAI (Rp)
1/7/2021	01/CP INSEKTORT/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR GAJI BULAN JANUARI 2021 INSPEKTORAT	248.00
1/11/2021	01/CP/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN KELEBIHAN SP2D TUNJANGAN TRANPORTASI DPRD JANUARI 2021	600,000.00
1/15/2021	02/CP/BKPSDM/2021	Langsung (LS)	pengembalian gaji An. ASTUTI BKPSDM	3,633,700.00
2/3/2021	01/CP/BKPSDM/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN GAJI FEBRUARI AN. DIMAS BAYU SETIAWAN	2,858,700.00
4/6/2021	01/CP RSUD/2021	Langsung (LS)	CP TUNJANGAN ISTRI BULAN APRIL 2021 RSUD an. ADHAM	327,220.00
	02/CP RSUD/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN GAJI BULAN APRIL 2021 RSUD an. ADHAM	2,997,200.00
4/29/2021	03/CP RSUD/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN TTP BULAN MARET 2021 RSUD	2,548,072.00
5/10/2021	03/CP/BKPSDM/2021	Langsung (LS)	pengembalian gaji Mei 2021 an. Alvia Nauli Patesco	2,676,900.00
5/28/2021	01/CP/RSJ/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN BELANJA TUNJANGAN ANAK DAN TUNJANGAN BERAS AN. SULDIN SATRIAPRIYALDI	159,838.00
5/31/2021	001/PENGEMBALIAN/DISKEPORA/2021	Langsung (LS)	Pengembalian Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan A.n SUHARTO, SE.MM	2,550,000.00
6/3/2021	01/cp/disnaker/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	pengembalian BBM pertalite bulan April keg pemeliharaan barang milik	2,292,200.00
6/9/2021	01/CP/ESDM/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN GAJI BULAN JUNI DAN GAJI 13 AN. AJI DENY PUTRA CAHYADI	6,657,700.00
6/10/2021	02/CP/B.UMUM/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP atas belanja SPPD an. Erzaldi Rosman	256,000.00
	03/CP/B.UMUM/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP Perjalanan dinas an. Erzaldi rosman	6,715,000.00
6/15/2021	01/CP/PUPR/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA KERTAS COVER KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	777,253.00
6/18/2021	010/CP/BASEL/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP By Perjadin Keg Setempoh, Samling dan Pendataan	3,300,000.00
6/23/2021	01/CP/B.UMUM/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KELEBIHAN BAYAR TIKET	389,600.00
	02/CP/PUPR/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa	110,000.00
6/30/2021	02/CP/BAKUDA/ 2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP Pejadis	3,247,000.00
7/6/2021	01/cp/esdm/cabdinbelitung/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Koreksi belanja perjalanan dinas dalam daerah an. Harli Agusta	327,000.00
8/4/2021	01/cp/BP2TSP/2021	Langsung (LS)	pengembalian tunjangan keluarga	1,802,640.00
8/27/2021	07/CP/DinsosPMD/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP Gaji an. Nurhana	355,000.00
9/6/2021	01.a/cp/pertanian pangan/2021	Langsung (LS)	pengembalian TPP bulan April dan Mei an. Ujang	1,816,426.00
	01.b/cp/pertanian pangan/2021	Langsung (LS)	Pengembalian TPP berdasarkan prestasi kerja bulan April dan Mei an. ujang	1,816,426.00
	01.c/cp/pertanian pangan/2021	Langsung (LS)	Pengembalian TPP berdasarkan kondisi kerja an. ujang bulan April	908,212.00
	01.d/cp/pertanian pangan/2021	Langsung (LS)	Pengembalian TPP berdasarkan tempat bertugas an. ujang bulan	1,513,686.00
9/22/2021	01/cp/bapeda/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	KOREKSI PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1,395,000.00
10/12/2021	01/CP/PENGHUBUNG/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA UANG PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	2,080,000.00
10/28/2021	03/CP/GAJI/2021	Langsung (LS)	CP Gaji an. Amsir	3,729,900.00
		Langsung (LS)	CP Gaji bulan Juni 2021 an. Amsir	3,434,700.00
11/9/2021	02/cp/esdm/cabdinbelitung/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA ALAT BAHAN KANTOR BENDA POS SURAT MENYURAT	782,000.00
11/11/2021	03/cp/bapeda/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	4,000,000.00
	04/cp/bapeda/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA PEMELIHARAAN/REHABILITASI	696,000.00
11/12/2021	02/CP/BAPPEDA/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA	100,000.00
11/15/2021	01/cp/kesbangpol/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	pengembalian belanja makan minum rapat	2,500,000.00
	02/cp/kesbangpol/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	cp belanja surat kabar majalah	48,000.00

TANGGAL	NO. BUKTI	JENIS SPM	URAIAN	NILAI (Rp)
1/7/2021	01/CP INSEKTORT/2021	Langsung (LS)	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR GAJI BULAN JANUARI 2021 INSPEKTORAT	248.00
11/16/2021	01/CP/UPT-BELTIM/BAKUDA/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA ALAT LISTRIK	799,895.00
	02/CP/UPT-BELTIM/BAKUDA/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR	1,564,341.00
11/29/2021	01/cp/dinsospemdes/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	pengembalian belanja pemberian makanan tambahan bagi peserta posyandu	3,240,000.00
12/1/2021	06/CP/DinsosPMD/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP By Perjadin Keg Pemberdayaan Potensi Sumber Kessos	35,000.00
12/6/2021	4/cp/pertanian pangan /2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	CP	301,422.00
12/7/2021	01/CP/DISKOMINFO/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Pengembalian kelebihan belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan komputer	2,553.00
12/10/2021	03/cp/kesbangpol/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	cp	450,000.00
	04/cp/kesbangpol/2021	Langsung (LS)	cp atas TPP	719,980.00
12/14/2021	02/CP/SETWAN/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	620,000.00
12/16/2021	01.a/CP/PU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Pengembalian Belanja ATK Pek. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Buleng Keg. Peningkatan Jaringan	6,203.00
	01.b/CP/PU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	pengembalian atas belanja ATK pada tanggal 16 desember 2021	33,107.00
	01.c/CP/PU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Cp atas belanja cover pd tanggal 16 desember 2021	2,800.00
	01.d/CP/PU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	cp atas belanja ATK pd tgl 16 desember 2021	228,299.00
	03/CP/SETWAN/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA PUBLIKASI BELANJA PERJADIN BIASA	550,000.00
	04/CP/SETWAN/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	PENGEMBALIAN BELANJA PERJADIN BIASA KEG. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	550,000.00
12/23/2021	01/cp/dishut dan LH/2021	Langsung (LS)	pengembalian TPP	231,994.00
	02/cp/dishut dan LH/2021	Langsung (LS)	cp belanja tunjangan suami	313,940.00
12/24/2021	02/CP/DISKOMINFO/2021	Langsung (LS)	Pengembalian gaji nanang jan-des 2021	1,695,600.00
	03/cp/dishut dan LH/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	cp pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan dinas LHK	3,010,700.00
12/28/2021	01/cp/disbparbudkepora/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	pengembalian belanja atk keg. lembaga adat melayu tahun 2021	135,561.00
12/29/2021	04/cp/dishut dan LH/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	cp pengembalian pajak kendaraan KPHP sigambir	451,000.00
12/31/2021	01/cp/smalb/2021	Nihil	cp belanja atk	852.00
	02/cp/dinsospemdes/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	kelebihan belanja BBM	1,650,000.00
	03/cp/dinsospemdes/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Kelebihan antigen an widia rahmadona ke jakarta	15,000.00
	04/CP/BTT/2021	Langsung (LS)	pengembalian BTT dari Dinas Sosial Pemdes	783,642,935.00
	04/cp/dinsospemdes/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Pengembalian belanja kelebihan antigen an. M. Akib dan Tiya wita ke jakarta	30,000.00
			TOTAL	**869,682,803.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN VI
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

TANGGAL	URAIAN	NOMOR	Nilai Per 31 Des 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Nilai Per 31 Des 2021
PIUTANG RETRIBUSI			**2,766,000.00**	**35,187,750.00**	**2,766,000.00**	**35,187,750.00**
PIUTANG DLHD			**2,316,000.00**	**-**	**2,316,000.00**	**-**
2020	PT. BAKTI PUTRA BABEL		131,000.00	-	131,000.00	-
2020	PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA		2,185,000.00	-	2,185,000.00	-
PIUTANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			**450,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**
31 Desember 2020	admin		450,000.00	-	450,000.00	-
PIUTANG DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			**-**	**35,187,750.00**	**-**	**35,187,750.00**
Tuesday, September 7, 2021	PT. BAHARI BIO MAKMUR		-	7,138,750.00	-	7,138,750.00
Wednesday, September 15, 2021	PT. ARGANI BOGA SEJAHTERA		-	6,973,750.00	-	6,973,750.00
Thursday, September 23, 2021	CV. BETUNG BINTANG SEMESTA		-	6,973,750.00	-	6,973,750.00
Thursday, November 25, 2021	PT. ARGO BAHARI NUSANTARA		-	4,199,650.00	-	4,199,650.00
Friday, December 3, 2021	PT. ARGANI BOGA SEJAHTERA		-	2,851,100.00	-	2,851,100.00
Monday, December 6, 2021	CV. BETUNG BINTANG SEMESTA		-	4,199,650.00	-	4,199,650.00
Monday, December 6, 2021	PT. BAHARI BIO MAKMUR		-	2,851,100.00	-	2,851,100.00
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			**749,133,282.00**	**10,835,463,555.00**	**647,156,075.00**	**10,937,440,762.00**
PIUTANG RSUP	**PIUTANG PENDAPATAN BLUD**		**12,149,657.00**	**10,751,165,746.00**	**-**	**10,763,315,403.00**
	PASIEN UMUM TAHUN 2017					
November 2017	Asmana		12,149,657.00	-	-	12,149,657.00
	KLAIM PELKES TAHUN 2021					
Agustus 2019- juni 2021	Tanggungan pasien gubernur th 2019-2021		-	450,211,124.00	-	450,211,124.00
April 2019 - Desember 2020	Tanggungan pasien anggota dewan Kab. Bangka barat th 2019-2020		-	123,248,307.00	-	123,248,307.00
Desember 2021	Klaim BPJS Kesehatan bupel Juni 2021 (Pending)		-	141,667,300.00	-	141,667,300.00
Desember 2021	Klaim instalasi farmasi BPJS Kesehatan bupel Oktober 2021 (Pending)		-	5,789,405.00	-	5,789,405.00
Desember 2021	Klaim instalasi farmasi BPJS Kesehatan bupel November 2021		-	11,333,710.00	-	11,333,710.00
September 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel Januari-mei 2021		-	2,510,655,000.00	-	2,510,655,000.00
September 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel Januari 2021 Rajal		-	332,900.00	-	332,900.00
September 2021	Klaim pelkes RS SILOAM a/n Adrin renan aqila		-	442,000.00	-	442,000.00
October 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel mei-juli 2021 (Bayi baru lahir)		-	30,800,000.00	-	30,800,000.00
December 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel September-november 2021		-	3,422,073,000.00	-	3,422,073,000.00
November 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel juli 2021		-	1,453,250,000.00	-	1,453,250,000.00
December 2021	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel agustus 2022		-	2,601,363,000.00	-	2,601,363,000.00
PIUTANG RSJD	**PIUTANG PENDAPATAN BLUD**		**736,983,625.00**	**84,297,809.00**	**647,156,075.00**	**174,125,359.00**
2015	Asrul		1,231,500.00	-	-	1,231,500.00
2015	Irwanto		693,200.00	-	-	693,200.00
2015	Suhardi		3,744,400.00	-	-	3,744,400.00
2015	Adi Putra		10,218,100.00	-	-	10,218,100.00
2015	Arafat Labang		825,600.00	-	-	825,600.00
2015	Mr.X/Alpian		5,539,600.00	-	-	5,539,600.00
2015	Raka Ariyatna		68,800.00	-	-	68,800.00
Januari 2016	Raimor Alan		242,000.00	-	242,000.00	-
Januari 2016	Sukendri		810,000.00	-	-	810,000.00
Januari 2016	Iwan Agustinus		13,202,000.00	-	-	13,202,000.00
Januari 2016	Dedi Irwansyah		4,082,400.00	-	-	4,082,400.00
September 2016	Dani Santika		1,085,000.00	-	-	1,085,000.00
November 2016	Hardianto		698,200.00	-	-	698,200.00
Juni 2017	Sujianto		9,013,400.00	-	-	9,013,400.00
Juni 2017	Jolli		2,323,400.00	-	-	2,323,400.00
September 2017	Alimudin		2,774,100.00	-	-	2,774,100.00
Agustus 2017	Efandri		135,000.00	-	-	135,000.00
Januari 2018	Syamsiah		719,300.00	-	-	719,300.00
Maret 2018	Muhayar		5,311,000.00	-	-	5,311,000.00
April 2018	Pinta Wijaya		261,000.00	-	-	261,000.00
April 2018	Rosyatinah		324,000.00	-	324,000.00	-
April 2018	Abdul Aziz		2,029,700.00	-	-	2,029,700.00
Juli 2018	Mr X (Yeyen)		8,917,150.00	-	-	8,917,150.00
September 2018	Sun Siong		1,502,000.00	-	-	1,502,000.00
Desember 2018	Teguh Aprianto		590,700.00	-	-	590,700.00
Oktober 2018	Nurlela		2,059,000.00	-	-	2,059,000.00
November 2018	Yusri		304,000.00	-	-	304,000.00
Januari 2019	Muharram		237,000.00	-	237,000.00	-
Oktober 2019	Alian		10,240,000.00	-	-	10,240,000.00
Juli 2019	Pembayaran Bagi Pasien Wajib lapor Rawat Jalan Bulan Juli 2019		280,000.00	-	280,000.00	-
10-Sep-19	Pembayaran rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan Agustus 2019		34,922,200.00	-	34,922,200.00	-
10-Sep-19	Pembayaran Bagi Pasien Wajib lapor Rawat Jalan Bulan Agustus 2019		250,000.00	-	250,000.00	-
PASIEN UMUM TAHUN 2020						-
2019	Erpandri		1,649,000.00	-	200,000.00	1,449,000.00
PASIEN BPJS TAGIHAN TAHUN 2020				-		-
21 Desember 2020	BPJS Kesehatan bupel September 2020 No. 956/01369.d/RSJD/2020 Tanggal 21 Desember 2020		338,614,300.00	-	338,614,300.00	-
18 Desember 2020	BPJS Kesehatan bupel Agustus 2020/Rawat Jalan Tingkat Lanjutan No. 956/01363.a/RSJD/2020 Tanggal 18 Desember 2020		185,500.00	-	185,500.00	-
22 Desember 2020	Biaya Klaim Obat Kronis Luar Paket IFRS/Apotek Instalasi Farmasi bupel November 2020 956/01370.a/RSJD/2020 tanggal 22 Desember 2020		64,120,275.00	-	64,120,275.00	-
PASIEN IPWL TAGIHAN TAHUN 2020			-	-		-
September 2019	Pembayaran Bagi Pasien Wajib Lapor Rawat Jalan bulan September 2019		1,369,000.00	-	1,369,000.00	-
Oktober 2019	Pembayaran Bagi Pasien Wajib Lapor Rawat Jalan bulan Oktober 2019		195,000.00	-	195,000.00	-
November 2019	Pembayaran Bagi Pasien Wajib Lapor Rawat Jalan bulan November 2019		380,000.00	-	380,000.00	-
September 2019	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan September 2019		34,401,400.00	-	34,401,400.00	-

Oktober 2019	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan Oktober 2019		26,295,500.00	-	26,295,500.00	-
November 2019	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan November 2019		41,926,200.00	-	41,926,200.00	-
Desember 2019	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan Desember 2019		45,605,000.00	-	45,605,000.00	-
Januari 2020	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela terhitung tanggal 01 s/d 19 Januari 2020		24,728,200.00	-	24,728,200.00	-
27 Oktober 2020	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan September 2020 dengan pengantar No. 445/01192/RSJD/2020 Tanggal 27 Oktober 2020		10,967,900.00	-	10,967,900.00	-
03 Desember 2020	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan Oktober dengan Surat Pengantar no. 445/01279/RSJD/2020 Tanggal 03 Desember 2020		8,662,000.00	-	8,662,000.00	-
03 Desember 2020	Pembayaran Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Pasien Sukarela bulan November dengan Surat Pengantar no. 445/01279/RSJD/2020 Tanggal 03 Desember 2020		5,277,000.00	-	5,277,000.00	-
PASIEN JAMINAN DINAS KESEHATAN (JAMKES BABEL) TAHUN 2020				-		-
Desember 2020	Klaim Rawat Inap an Zaldi (jamkes Babel) No. 956/01371/RSJD/2020 Tanggal 23 Desember 2020		3,986,800.00	-	3,986,800.00	-
23 Desember 2020	Klaim Rawat Inap an Prika (jamkes Babel) No. 956/01373/RSJD/2020 Tanggal 23 Desember 2020		3,986,800.00	-	3,986,800.00	-
	PASIEN UMUM TAHUN 2021					
Desember 2021	Eko Siswandi			8,584,800.00		8,584,800.00
30 oktober 2021	Biaya pembayaran Hasil persetujuan izin praktek mahasiswa Akademi Keperawatan Pangkalpinang No.890/1083/RSJD/2021 Tanggal 30 Oktober 2021			3,290,000.00		3,290,000.00
	Biaya Klaim Obat Kronis Luar Paket IFRS/Apotek Instalasi Farmasi bupel Agustus 2021 No.956/1246/RSJD/2021 tanggal 28 Desember 2021			68,436,209.00		68,436,209.00
	Klaim Rawat Inap an Triono (jamkes Babel) No.956/1259/RSJD/2021 Tanggal 31 Desemberr 2021			3,986,800.00		3,986,800.00
PIUTANG PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			**6,300,039,983.00**	**-**	**6,300,039,983.00**	**-**
	Pajak Bumi dan Bangunan		**4,325,446,848.00**	**-**	**4,325,446,848.00**	**-**
	a. Bagian Daerah					
	- Perkebunan		1,388,215,278.00	-	1,388,215,278.00	-
	- Kehutanan		28,207,002.00	-	28,207,002.00	-
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi		311,514,889.00	-	311,514,889.00	-
	- Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		2,416,177,276.00	-	2,416,177,276.00	-
	- Sektor Lainnya		41,535,823.00	-	41,535,823.00	-
				-	-	
	b. Biaya Pemungutan			-	-	
	- Perkebunan		61,698,421.00	-	61,698,421.00	-
	- Kehutanan		1,175,275.00	-	1,175,275.00	-
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi		8,653,075.00	-	8,653,075.00	-
	- Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		67,115,947.00	-	67,115,947.00	-
	- Sektor Lainnya		1,153,862.00	-	1,153,862.00	-
				-		
	SDA Kehutanan		**17,589,131.00**	**-**	**17,589,131.00**	**-**
	a. IIUPH		-	-		
	b. PSDH		17,589,131.00	-	17,589,131.00	-
				-		
	SDA Mineral dan Batubara		**1,957,004,004.00**	**-**	**1,957,004,004.00**	**-**
	a. Landrent		1,957,004,004.00	-	1,957,004,004.00	-
	b. Royalty		-	-	-	-
				-		
JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN			**17,596,987,482.53**	**615,115,875.00**	**11,160,164,092.00**	**10,972,628,512.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR SALDO TUNTUTAN PERBENDAHARAAN-TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)
PER 31 DESEMBER 2021

PEMBEBANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URAIAN TEMUAN	NOMOR DAN TANGGAL LHP	NILAI TEMUAN (Rp.)	NAMA PENANGGUNG JAWAB	TOTAL PENGEMBALIAN (s.d. 31 Des.2021) (Rp.)	ANGSURAN PENGEMBALIAN (Rp.)		SISA/SALDO TGR (Rp.)
A	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**		**372,038,048.83**		**207,289,931.00**			**164,748,117.83**
TAHUN 2018								
1	Terdapat pengeluaran anggaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 105.101.828,00 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700/043-P4D/LHP/INPTD/2018 tgl 25 Juni 2018	105,101,828.00	Risa Nirwana Sari NIP.198509122008042003	6,030,000.00	1,500,000.00	31-Dec-18	99,071,828
						2,000,000.00	11-Jan-19	
						1,530,000.00	23-Oct-19	
						1,000,000.00	11-Dec-19	
TAHUN 2020								
1	Pemeriksaan dilakukan terhadap indikasi ketekoran kas akhir Tahun 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700/010/RIKSUS/INPTD tgl 20 Januari 2020	99,676,289.83	Mirza Riandiny, A.Md. NIP.197902222009032004	34,000,000.00	15,000,000.00	4-Feb-20	65,676,289.83
						5,000,000.00	10-Feb-20	
						10,000,000.00	20-Feb-20	
						4,000,000.00	11-Mar-20	
TAHUN 2021								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700/112/INPTD/2021 tgl 15 Juni 2021	167,259,931.00	a.n. Azatilaila NIP.....	167,259,931.00	58,000,000.00	25-Jun-21	-
						40,000,000.00	28-Jun-21	
						42,000,000.00	4-Aug-21	
						10,000,000.00	10-Aug-21	
						17,259,931.00	13-Aug-21	
B	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI**							
C	**JUMLAH PEMBEBANAN TAHUN 2021 (A + B)**		**372,038,048.83**	**-**	**207,289,931.00**	**-**	**-**	**164,748,117.83**
D	**TOTAL PEMBEBANAN SEBELUMNYA**		**2,204,095,707.16**		**1,986,199,109.16**	**1,986,199,109.16**	**-**	**217,896,598.00**
	1. TEMUAN BPK (2005)		1,506,477,090	-	1,506,477,090.43	1,506,477,090.43		-
	2. TEMUAN INPTD (2003-2016)		697,618,617	-	479,722,018.73	479,722,018.73		217,896,598.00
	3. TEMUAN ITJEN KEMENDAGRI (2008)		-	-	-	-		-
E	**TOTAL PEMBEBANAN s.d. TAHUN 2021 (C + D)**		**2,576,133,755.99**		**2,193,489,040.16**	**1,986,199,109.16**	**-**	**382,644,715.83**
	Saldo Penerimaan s.d. Desember 2021 atas pembebanan Tahun sebelumnya (Pembebanan Tahun 2016 ke bawah)				**26,206,000.00**			**356,438,715.83**

PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI PEGAWAI NON BENDAHARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URAIAN TEMUAN	NOMOR dan	NILAI TEMUAN (Rp.)	NAMA PENANGGUNG JAWAB	TTL PENGEMBALIAN (s.d. 31 Des.2018)	ANGSURAN PENGEMBALIAN (s.d. 31 DESEMBER 2018)		SISA/ SALDO TGR
A	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG s.d. 31 DESEMBER 2018**		**751,584,176.50**		**#REF!**			**#REF!**
I	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**700/011-P4D/ LHP/ INPTD/2018 (Tgl. 05 April 2018)**	**28,735,780.00**		**28,735,780.00**			**-**
1	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 7.535.000,00	TEMUAN NO.6	7,535,000.00		7,535,000.00	340,000.00	14-May-18	-
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						380,000.00	11-May-18	
						340,000.00	11-May-18	
						340,000.00	11-May-18	
						340,000.00	11-May-18	
						340,000.00	11-May-18	
						425,000.00	11-May-18	
						425,000.00	11-May-18	
						425,000.00	11-May-18	
2	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah nara sumber sebesar Rp 800.000,00	TEMUAN NO.7	800,000.00		800,000.00	400,000.00	14-May-18	-
						400,000.00	21-May-18	
3	Terdapat kelebihan belanja dokumentasi kegiatan sebesar Rp225.000,00	TEMUAN NO.8	225,000.00		225,000.00	105,000.00	21-May-18	-
						120,000.00	21-May-18	
4	Terdapat pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 8.427.500,00	TEMUAN NO.9	8,427,500.00		8,427,500.00	665,000.00	14-May-18	-
						500,000.00	3-Jul-18	
						350,000.00	3-Jul-18	
						1,900,000.00	3-Jul-18	
						475,000.00	3-Jul-18	
						332,500.00	3-Jul-18	
						475,000.00	3-Jul-18	
						350,000.00	3-Jul-18	
						552,500.00	3-Jul-18	
						1,377,500.00	3-Jul-18	
						1,450,000.00	3-Jul-18	
5	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah untuk uang taksi Rp 3.924.000,00	TEMUAN NO.10	3,924,000.00		3,924,000.00	800,000.00	21-May-18	-
						820,000.00	21-May-18	
						800,000.00	21-May-18	
						320,000.00	21-May-18	
						820,000.00	22-May-18	
						236,000.00	28-May-18	
						128,000.00	3-Jul-18	
6	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 6.854.280,00	TEMUAN NO.11	6,854,280.00		6,854,280.00	390,000.00	21-May-18	-
						340,000.00	21-May-18	
						340,000.00	21-May-18	
						1,700,000.00	28-May-18	
						4,084,280.00	28-May-18	
7	Terdapat belanja perjalanan dinas Dalam daerah tidak sesuai Pagu Anggaran	TEMUAN NO.12	970,000.00		970,000.00	200,000.00	21-May-18	-
						580,000.00	21-May-18	

	dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) sebesar Rp970.000,00					150,000.00 40,000.00	21-May-18 21-May-18	
II	**DABA KEU. PEMPROV. KEP. BANGKA BELITUNG PADA PEMKAB. BANGKA TENGAH T.A. 2017**	**700/019-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 April 2018)**	**4,786,500.00**		**4,786,500.00**			**-**
8	Terdapat pengadaan alat peraga Inklusi tidak csesuai dengan kondisi fisik di lapangan sebesar Rp 4.786.500,00	TEMUAN NO.1	4,786,500.00		4,786,500.00	4,786,500.00	8-May-18	-
III	**HIBAH DAN BANSOS KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN 2017 DI WIL. KAB. BANGKA TENGAH**	**700/013-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 06 April 2018)**	**400,000.00**		**400,000.00**			**-**
9	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pembangunan Asrama Santri pada Yayasan Husnul Muhibbin Kemuja Sebesar Rp400.000,00.	TEMUAN NO.10	400,000.00		400,000.00	400,000.00	12-Jul-18	-
IV	**HIBAH DAN BANSOS PEMPROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG T.A. 2017 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG**	**700/016-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 09 April 2018)**	**1,300,000.00**		**1,300,000.00**			**-**
10	Terdapat Kelebihan Belanja Makan Minum Kegiatan Pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Prov.Kepulauan Bangka Belitung Sebesar Rp1.300.000,00.	TEMUAN NO.7	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	6-Jul-18	-
V	**DABA KEU. PEMPROV. KEP. BANGKA BELITUNG PADA PEMKAB. BELITUNG TIMUR T.A. 2017**	**700/041-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Mei 2018)**	**450,000.00**	**-**	**-**	**-**		**450,000.00**
11	Terdapat belanja evaluasi kegiatan & pelaporan tidak dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp450.000,00		450,000.00		-	-		450,000.00
VI	**DANA BOS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA T.A. 2017**	**700/029-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Mei 2018)**	**98,516,366.00**	**-**	**98,516,366.00**			**-**
12	Terdapat kelebihan pembayaran pada belanja pendaftaran sebesar Rp1.835.000,00	TEMUAN NO. 4	1,835,000.00		1,835,000.00	1,835,000.00	9/24/2018	-
13	Terdapat kelebihan pembayaran spanduk sebesar Rp400.000,00	TEMUAN NO. 2	400,000.00		400,000.00	400,000.00	7-Aug-18	-
14	Terdapat kelebihan pembayaran pada belanja pakaian olahraga sebesar Rp6.750.000,00	TEMUAN NO. 1	6,750,000.00		6,750,000.00	6,750,000.00	7-Aug-18	-
15	Terdapat pengeluaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp12.226.200,00	TEMUAN NO. 2	12,226,200.00		16,876,200.00	16,876,200.00	6-Sep-18	-
16	Terdapat belanja yang tidak diketahui kebenarannya sebesar Rp4.650.000,00	TEMUAN NO. 3	4,650,000.00					
17	Terdapat pengeluaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.410.000,00	TEMUAN NO. 10	10,410,000.00		10,410,000.00	10,410,000.00	10-Sep-18	-
18	Terdapat pengeluaran dana bos tahun anggaran 2017 tidak efektif sebesar Rp1.650.000,00	TEMUAN NO. 5	1,650,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00	10-Sep-18	-

19	Terdapat pembayaran honorarium pelatih /pembimbing tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.299.000,00	TEMUAN NO. 1	8,299,000.00		8,299,000.00	8,299,000.00	10-Sep-18	-
20	Terdapat kesalahan penjumlahan pada kuitansi pertanggungjawaban sebesar Rp244.480,00	TEMUAN NO. 2	244,480.00		6,419,926.00	6,419,926.00	6-Aug-18	-
21	Terdapat kelebihan pembayaran pada belanja pendaftaran sebesar Rp450.000,00	TEMUAN NO. 3	450,000.00					
22	Terdapat kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp5.725.446,00	TEMUAN NO. 4	5,725,446.00					
23	Terdapat kesalahan penjumlahan pada kuitansi pertanggungjawaban sebesar Rp3.750.000,00	TEMUAN NO. 1	3,750,000.00		8,150,000.00	8,150,000.00	6-Aug-18	-
24	Terdapat kelebihan pembayaranpada belanja transport pembina/pelatih kegiatan ekstrakulikuler sebesar p4.400.000,00	TEMUAN NO. 2	4,400,000.00					
25	Terdapat pengeluaran belanja yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp31.884.240,00	TEMUAN NO. 1	31,884,240.00		35,371,240.00	35,371,240.00	12-Sep-18	-
26	Terdapat pengeluaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.487.000,00	TEMUAN NO. 2	3,487,000.00					
27	Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp495.000,00	TEMUAN NO. 2	495,000.00		2,355,000.00	2,355,000.00	12-Sep-18	-
28	Terdapat pembayaran perjalanan dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.860.000,00	TEMUAN NO. 4	1,860,000.00					
VII	**DABA BOS DAN DANA PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN KBM PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG PADA KAB. BELITUNG TIMUR T.A. 2017**	**700/031-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Mei 2018)**	**6,427,000.00**	**-**	**6,427,000.00**			**-**
29	Terdapat kelebihan pembayaran uang penginapan sebesar Rp200.000,00	TEMUAN NO. 2	200,000.00		200,000.00	200,000.00	8/2/2018	-
30	Terdapat belanja pemeliharaan mebeulir tidak dilaksanakan sebesar Rp5.000.000,00	TEMUAN NO. 1	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	8/2/2018	-
31	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.227.000,00	TEMUAN NO. 2	1,227,000.00		1,227,000.00	1,227,000.00	8/2/2018	-
VIII	**DANA BOS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH T.A. 2017**	**700/028-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 07 Mei 2018)**	**3,660,000.00**		**3,660,000.00**			**-**
32	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana kegiatan sebesar Rp3.660.000,00	TEMUAN NO.3	3,660,000.00		3,660,000.00	2,160,000.00	2-Aug-18	-
						360,000.00	1-Aug-18	
						480,000.00	1-Aug-18	
						180,000.00	6-Aug-18	
						480,000.00	7-Aug-18	
IX	**DABA UNTUK PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN KBM dan DANA BOS TINGKAT SAT. PENDIDIKAN WIL. KOTA PANGKALPINANG T.A. 2017**	**700/027-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 Mei 2018)**	**39,727,800.00**		**39,727,800.00**			**-**

33	Terdapat belanja yang tidak sesuai peruntukkannya sebesar Rp300.000,00	TEMUAN NO. 2	300,000.00		300,000.00	300,000.00	30-Aug-18	-
34	Terdapat belanjaTrasport panitia BOS tahun 2016 dan 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp16.540.000,00	TEMUAN NO. 3	16,540,000.00		16,540,000.00	16,540,000.00	10-Aug-18	-
35	Terdapat kekurangan pengadaan volume cetak sebesar Rp5.720.000,00	TEMUAN NO. 4	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00	2-Aug-18	-
36	Terdapat pembayaran honorarium guru tidak tetap tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.800.000,00		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	11/21/2018	-
37	Terdapat belanja trasportasi alat sound system penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp300.000,00		300,000.00		300,000.00	300,000.00	7-Aug-18	-
38	Terdapat belanja alat jaringan listrik tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.948.000,00		3,948,000.00		3,948,000.00	3,948,000.00	27-Aug-18	-
39	pembayaran belanja jasa tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber/Moderator tidak sesuai ketentuan		5,640,000.00		5,640,000.00	5,640,000.00	1-Aug-18	-
40	Terdapat beberapa buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru yang diterima hasil pengadaan dalam kondisi rusak		179,800.00		179,800.00	179,800.00	1-Aug-18	-
41	Terdapat kelebihan bayar pada pekerjaan pemeliharaan uang UKS sebesar Rp4.800.000,00		4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	1-Aug-18	-
42	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp500.000,00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	3-Aug-18	-
X	**DABA BOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMK/SLB DI WIL. KAB. BANGKA BARAT T.A. 2017**	**700/032-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 24 Mei 2018)**	**40,769,000.00**		**40,769,000.00**			**-**
43	Terdapat kelebihan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp760.000,00	TEMUAN 2	760,000.00		760,000.00	760,000.00	30-Aug-18	-
44	Terdapat belanja akomodasi kegiatan yang tidak diperbolehkan sebesar Rp1.700.000,00	TEMUAN 3	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	30-Aug-18	-
45	Terdapat kemahalan harga pada beberapa belanja sebesar Rp3.430.000,00	TEMUAN 1	3,430,000.00		3,430,000.00	3,430,000.00	24-Aug-18	-
46	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium guru tidak tetap(GTT) sebesar Rp1.200.000,00	TEMUAN 2	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	24-Aug-18	-
47	Terdapat kegiatan tahun anggaran 2016 dibayarkan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp1.008.000,00	TEMUAN 1	1,008,000.00		1,008,000.00	1,008,000.00	13-Sep-18	-
48	Terdapat kelebihan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp20.136.000,00	TEMUAN 1	20,136,000.00		20,136,000.00	20,136,000.00	13-Sep-18	-
49	Terdapat kelebihan bayar belanja perlengkapan peserta sebesar Rp1.975.000,00	TEMUAN 1	1,975,000.00		1,975,000.00	1,975,000.00	28-Aug-18	-
50	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium guru tidak tetap (GTT) sebesar Rp3.840.000,00	TEMUAN 3	3,840,000.00		3,840,000.00	3,840,000.00	28-Aug-18	-
51	Terdapat Pembayaran atas beberapa belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.720.000,00	TEMUAN 4	6,720,000.00		6,720,000.00	6,720,000.00	28-Aug-18	-

XI	**DINAS KEHUTANAN**	**700/034-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 28 Mei 2018)**	**19,787,700.00**		**19,787,700.00**			**-**
52	Terdapat belanja suku cadang kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.300.000,00	TEMUAN 1	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	16-Aug-18	-
53	Terdapat belanja kegiatan melebihi pagu anggaran dan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp4.165.000,00	TEMUAN 3	4,165,000.00		4,165,000.00	4,165,000.00	22-Nov-18	-
54	Terdapat kelibihan pembayaran gaji pokok 2 (dua) orang pegawai negeri sipil sebesar Rp2.035.200,00	TEMUAN 7	2,035,200.00		2,035,200.00	1,017,600.00	13-Aug-18	-
						1,017,600.00	13-Aug-18	
55	Terdapat pembayaran tunjangan jabatan struktural tidak sesuai ketentuan sebesar	TEMUAN 9	2,060,000.00		2,060,000.00	540,000.00	31-May-18	-
						540,000.00	30-Jun-18	
						980,000.00	30-Jul-18	
56	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar	TEMUAN 13	10,227,500.00		10,227,500.00	2,280,000.00	31-May-18	-
						212,500.00	6-Jun-18	
						485,000.00	6-Jun-18	
						1,140,000.00	6-Jun-18	
						2,595,000.00	10-Jul-18	
						380,000.00	25-Jul-18	
						855,000.00	25-Jul-18	
						570,000.00	26-Jul-18	
						855,000.00	26-Jul-18	
						855,000.00	26-Jul-18	
XII	**DANA BOS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN WIL. KAB. BANGKA SELATAN T.A. 2017**	**700/033-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Juni 2018)**	**16,600,500.00**		**16,600,500.00**			**-**
57	Terdapat kemahalan harga penggandaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM sebesar Rp1.232.500,00	TEMUAN No. 1	1,232,500.00		6,850,500.00	6,850,500.00	30-Aug-18	-
58	Terdapat Kelebihan pembayaran bahan obat-obatan (P3K) sebesar Rp5.618.000,00	TEMUAN No. 2	5,618,000.00					
59	Terdapat pembayaran honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.800.000,00	TEMUAN No. 1	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	30-Aug-18	-
60	Terdapat pembayaran Transport pemeliharaan website sekolah tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp1.250.000,00	TEMUAN No. 1	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	28-Aug-18	-
61	Terdapat pembayaran belanja seragam sepak bola tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.600.000,00	TEMUAN No. 4	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	24-Aug-18	-
62	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan Dinas sebesar Rp600.000,00	TEMUAN No. 1	600,000.00		600,000.00	600,000.00	7-Aug-18	-
63	Terdapat kelebihan pembayaran sewa mobil sebesar Rp1.500.000,00	TEMUAN No. 1	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	7-Aug-18	-
XIII	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**700/035-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Juni 2018)**	**6,741,500.00**		**6,741,500.00**			**-**
64	Terdapat Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.075.000,00	TEMUAN No. 3	3,075,000.00		6,741,500.00	6,741,500.00	6-Sep-18	-
65	Terdapat perbedaan harga Pembayaran belanja surat kabar/majalah sebesar Rp600.000,00	TEMUAN No. 4	600,000.00					
66	Terdapat kelebihan Pembayaran honorarium sebesar Rp3.066.500,00	TEMUAN No. 5	3,066,500.00					

XIV	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**700/036-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Juni 2018)**	**27,487,429.00**		**25,135,429.00**			**2,352,000.00**
67	Terdapat anak PNS yang usianya diatas 25 tahun masih masuk tunjangan anak dalam gaji sebesar Rp4.030.504,00	TEMUAN No. 1	4,030,504.00		4,030,504.00	4,919,604.00	12/23/2020	-
68	Terdapat belanja makan minum tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp740.000,00	TEMUAN No. 3	740,000.00		740,000.00	740,000.00	19-Sep-19	-
69	Terdapat belanja sewa ruang rapat/pertemuan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.000.000,00	TEMUAN No. 4	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	19-Sep-19	-
70	Terdapat belanja dokumentasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp150.000,00	TEMUAN No. 5	150,000.00		150,000.00	150,000.00	17-Sep-19	-
71	Terdapat kemahalan harga atas beberapa belanja kegiatan sebesar Rp2.590.775,00	TEMUAN No. 6	2,590,775.00		1,391,375.00	462,280.00	12-Sep-18	-
						276,365.00	12-Sep-18	
						276,365.00	12-Sep-18	
						276,365.00	12-Sep-18	
						100,000.00	12-Sep-18	
					1,199,400.00	59,000.00	17-Sep-19	
						90,000.00	17-Sep-19	
						80,000.00	18-Sep-19	
						570,000.00	19-Sep-19	
						400,000.00	18-Sep-19	
						400.00	7-Oct-19	
72	Terdapat kelebihan belanja perlengkapan peserta kegiatan sebesar Rp225.000,00	TEMUAN No. 7	225,000.00		225,000.00	225,000.00	17-Sep-19	-
73	Terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan sebesar Rp18.751.150,00	TEMUAN No. 8	18,751,150.00		3,000,000.00	1,000,000.00	14-Dec-18	2,352,000.00
						500,000.00	19-Mar-20	
						300,000.00	17-Dec-18	
						1,200,000.00	7-Sep-18	
					13,399,150.00	293,000.00	19-Sep-19	
						175,000.00	17-Sep-19	
						825,000.00	17-Sep-19	
						2,550,000.00	17-Sep-19	
						500,000.00	19-Sep-19	
						200,000.00	28-Feb-19	
						840,000.00	21-Jan-20	
						382,000.00	21-Jan-20	
						513,000.00	8-Apr-20	
						4,821,150.00	23-Jun-20	
						1,500,000.00	30-Dec-20	
						300,000.00	17-Dec-18	
						500,000.00	14-Apr-21	
XV	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**700/045-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 25 Juni 2018)**	**5,065,000.00**		**5,065,000.00**			**-**
74	Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.950.000,00	TEMUAN No. 1	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00	29-Aug-18	-
75	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber Workshop dn seminar Rp2.095.000,00	TEMUAN No. 2	2,095,000.00		2,095,000.00	2,095,000.00	29-Aug-18	-
76	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pengurus barang dan pembantu pengurus barang sebesar Rp1.020.000,00	TEMUAN No. 3	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00	29-Aug-18	-
XVI	**DINAS PANGAN**	**700/047-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 25 Juni 2018)**	**10,180,500.00**	**-**	**10,180,500.00**			**-**
77	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp2.100.000,00	TEMUAN No. 6	2,100,000.00		2,100,000.00	900,000.00	25-Sep-18	-
						75,000.00	25-Sep-18	
						300,000.00	25-Sep-18	

						825,000.00	25-Sep-18	
78	Terdapat kelebihan sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp4.000.000,00	TEMUAN No. 7	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	25-Sep-18	-
79	Terdapat kelebihan honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp1.520.000,00	TEMUAN No. 8	1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00	25-Sep-18	-
80	Terdapat kelebihan honorarium narasumber daerah sebesar Rp522.500,00	TEMUAN No. 9	522,500.00		522,500.00	522,500.00	25-Sep-18	-
81	Terdapat kelebihan pembayaran biaya trasportasi belanaj perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp400.000,00	TEMUAN No. 10	400,000.00		400,000.00	400,000.00	25-Sep-18	-
82	Terdapat kelebihan pembayaran belanja bahan bacaan sebesar Rp945.000,00	TEMUAN No. 11	945,000.00		1,638,000.00	1,638,000.00	25-Sep-18	-
83	Terdapat kelebihan pembayaran belanja bahan bacaan sebesar Rp693.000,00	TEMUAN No. 12	693,000.00					
XVII	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**700/042-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 29 Juni 2018)**	**16,638,000.00**		**16,638,000.00**			**-**
84	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas /operasional tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.840.000,00	TEMUAN No. 4	4,840,000.00		4,840,000.00	1,600,000.00	29-Aug-18	-
						2,340,000.00	29-Aug-18	
						900,000.00	29-Aug-18	
85	Belanja kegiatan launching PORPROV tahun 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp3.300.000,00	TEMUAN No. 5	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00	9-Jan-19	-
86	Terdapat kelebihan belanja barang beberapa kegiatan tahun anggaran 2017 Rp8.498.000,00	TEMUAN No. 6	8,498,000.00		8,498,000.00	1,288,000.00	29-Aug-18	-
						4,760,000.00	29-Aug-18	
						700,000.00	12-Dec-18	
						1,750,000.00	9-Jul-18	
XVIII	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**700/044-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 29 Juni 2018)**	**12,404,800.00**		**3,184,800.00**			**9,220,000.00**
87	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.000.000,00	TEMUAN No. 5	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	17-Sep-18	-
88	Terdapat belanja kegiatan Bimtek pemberdayaan satuan linmas dalam menunjang terwujudnya Trantib Swakarsa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.280.000,00	TEMUAN No. 6	5,280,000.00		-	-		5,280,000.00
89	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana pada beberapa kegiatan sebesar Rp5.784.800,00	TEMUAN No. 7	5,784,800.00		1,258,000.00	370,000.00	15-Oct-18	3,600,000.00
						296,000.00	4-Dec-18	
						592,000.00	4-Dec-18	
					926,800.00	600,000.00	28-Nov-19	
						326,800.00	7-Nov-19	
90	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp340.000,00	TEMUAN No. 8	340,000.00		-	-		340,000.00
XIX	**DINAS TENAGA KERJA**	**700/043-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 02 Juli 2018)**	**9,700,000.00**	**-**	**9,100,000.00**			**600,000.00**
91	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp7.700.000,00	TEMUAN No. 4	7,700,000.00		6,020,000.00	2,280,000.00	18-Oct-18	600,000.00
						2,800,000.00	14-Nov-18	
						940,000.00	3-Dec-18	
					1,080,000.00	570,000.00	21-Feb-19	
						510,000.00	22-Feb-19	
92	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar	TEMUAN No. 6	2,000,000.00		2,000,000.00	400,000.00	19-Oct-18	-
						400,000.00	19-Oct-18	

	Rp2.000.000,00					400,000.00	23-Oct-18	
						400,000.00	30-Oct-18	
						400,000.00	30-Oct-18	
XX	**DINAS PERHUBUNGAN**	**700/046-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Juli 2018)**	**46,609,119.00**		**41,194,119.00**			**5,415,000.00**
93	Terdapat Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.135.500,00	TEMUAN No. 1	13,135,500.00		7,720,500.00	1,140,000.00	2-Oct-18	5,415,000.00
						1,850,000.00	2-Oct-18	
						2,042,500.00	2-Oct-18	
						1,548,000.00	2-Oct-18	
						1,140,000.00	2-Oct-18	
94	Terdapat kelebihan Pembayaran belanja perlengkapan peserta sebesar Rp350.000,00	TEMUAN No. 2	350,000.00		350,000.00	350,000.00	2-Oct-18	-
95	Terdapat Pembayaran honorarium moderator tidak sesuai ketentuan sebesar Rp595.000,00	TEMUAN No. 3	595,000.00		595,000.00	297,500.00	2-Oct-18	-
						297,500.00	5-Oct-18	
96	Terdapat Pembayaran honorarium instruktur uji keterampilan mengemudi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.300.000,00	TEMUAN No. 4	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	2-Oct-18	-
97	Terdapat Pembayaran biaya penginapan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp816.000,00	TEMUAN No. 5	816,000.00		816,000.00	816,000.00	2-Oct-18	-
98	Terdapat Pembayaran biaya taxi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp180.589,00	TEMUAN No. 6	180,589.00		180,589.00	180,589.00	2-Oct-18	-
99	Terdapat kelebihan Pembayaran honorarium pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp24.705.000,00	TEMUAN No. 8	24,705,000.00		24,705,000.00	17,475,000.00	2-Oct-18	-
						5,690,000.00	11-Oct-18	
						380,000.00	31-Dec-18	
						400,000.00	/ /2018	
						760,000.00	12/18/2020	
100	Terdapat Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.025.000,00	TEMUAN No. 9	4,025,000.00		4,025,000.00	3,035,000.00	2-Oct-18	-
						570,000.00	21-Dec-18	
						420,000.00	31-Dec-18	
101	Terdapat Pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp502.030,00	TEMUAN No. 10	502,030.00		502,030.00	502,030.00	2-Oct-18	-
XXI	**BADAN PENGHUBUNG**	**700/052-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 23 Juli 2018)**	**71,845,000.00**	**-**	**37,945,000.00**			**33,900,000.00**
102	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp47.500.000,00	TEMUAN No. 1	47,500,000.00		13,600,000.00	800,000.00	17-Oct-18	33,900,000.00
						3,700,000.00	5-Nov-18	
						9,100,000.00	10-Dec-18	
103	Terdapat Pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak sah sebesar Rp6.363.000,00	TEMUAN No. 2	6,363,000.00		6,363,000.00	175,000.00	15-Oct-18	-
						6,188,000.00	22-Nov-18	
104	Terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah tidak di dukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp564.000,00	TEMUAN No. 3	564,000.00		564,000.00	564,000.00		-
105	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp200.000,00	TEMUAN No. 4	200,000.00		200,000.00	200,000.00	2-Oct-18	-
106	Terdapat perjalanan dinas kediklatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.150.000,00	TEMUAN No. 5	13,150,000.00		13,150,000.00	100,000.00	2-Oct-18	-
						1,360,000.00	2-Oct-18	
						200,000.00	2-Oct-18	
						1,360,000.00	2-Oct-18	
						500,000.00	8-Oct-18	
						250,000.00	19-Oct-18	
						1,360,000.00	19-Oct-18	
						710,000.00	7-Nov-18	
						1,260,000.00	9-Nov-18	
						510,000.00	29-Nov-18	
						1,360,000.00	4-Dec-18	

						1,360,000.00	14-Dec-18	
						1,360,000.00	14-Dec-18	
						860,000.00	17-Dec-18	
						600,000.00	19-Dec-18	
107	Terdapat belanja kegiatan yang tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp4.068.000,00	TEMUAN No. 8	4,068,000.00		4,068,000.00	4,068,000.00	7-Nov-18	-
XXII	**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI**	**700/054-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 23 Juli 2018)**	**8,050,060.00**		**8,050,060.00**			**-**
108	Terdapat kelebihan pembayaran tunj. Keluarga yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp8.050.060,00	TEMUAN No. 1	8,050,060.00		8,050,060.00	1,320,990.00	2-Aug-18	-
						1,729,070.00	1-Aug-18	
						5,000,000.00	28-Nov-18	
XXIII	**BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI**	**700/055-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 25 Juli 2018)**	**105,000.00**		**105,000.00**			**-**
109	Terdapat Pembayaran biaya penginapan melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp105.000,00	TEMUAN No. 3	105,000.00		105,000.00	105,000.00	21-Sep-18	-
XXIV	**BIRO KESRA SETDA PROVINSI**	**700/061-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 30 Juli 2018)**	**11,775,568.50**	**-**	**11,775,568.50**			**-**
110	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pengadaan pakaian seragam panitia dan panitera kegiatan sebesar Rp1.921.932,00	TEMUAN No. 1	1,921,932.50		1,921,932.50	1,921,932.50	28-Sep-18	-
111	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp3.409.091,00	TEMUAN No. 2	3,409,091.00		3,409,091.00	3,409,091.00	28-Sep-18	-
112	Terdapat satuan harga belanja pengadaan perlengkapan melebihi standar satuan harga belanja pegawai dan jasa Rp2.727.272,00	TEMUAN No. 3	2,727,272.00		2,727,272.00	2,727,272.00	28-Sep-18	
113	Terdapat kelebihan jumlah pengadaan barang pembelian tas kafilah sebesar Rp1.227.273,00	TEMUAN No. 4	1,227,273.00		1,227,273.00	1,227,273.00	27-Sep-18	
114	Terdapat kelebihan pembayaran belanja sewa tenda sebesar Rp1.500.000,00	TEMUAN No. 5	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1-Oct-18	
115	Terdapat kelebihan pembayaran belanja biaya	TEMUAN No. 6	990,000.00		990,000.00	630,000.00	26-Sep-18	
						360,000.00	26-Sep-18	
XXV	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**	**700/053-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 01 Agustus 2018)**	**10,505,000.00**		**10,505,000.00**			**-**
116	Terdapat kelebihan pembayaran biaya sewa kursi dan sewa kendaraan sebesar Rp1.500.000,00	TEMUAN No. 2	1,500,000.00		1,500,000.00	1,200,000.00	11-Oct-18	-
						300,000.00	11-Oct-18	
117	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp9.005.000,00	TEMUAN No. 3	9,005,000.00		9,005,000.00	2,230,000.00	11-Oct-18	-
						2,109,000.00	11-Oct-18	
						1,995,000.00	11-Oct-18	
						855,000.00	11-Oct-18	
						1,816,000.00	11-Oct-18	
XXVI	**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI**	**700/056-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 02 Agustus 2018)**	**82,442,760.00**	**-**	**82,442,760.00**			**-**
118	Terdapat kelebihan pembayaran belanja bahan bacaan koran babel news,Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos sebesar Rp4.921.500,00	TEMUAN No. 1	4,921,500.00		4,921,500.00	324,000.00	24-Jul-18	-
						4,597,500.00	25-Jul-18	
119	Terdapat kelebihan pembayaran belanja	TEMUAN No. 2	25,890,000.00		14,755,000.00	14,755,000.00	16-Oct-18	-

	cetak sebesar Rp25.890.000,00				6,135,000.00	6,135,000.00	5-Dec-19	
					5,000,000.00	5,000,000.00	2-Apr-20	
120	Terdapat belanja plakat yang pertanggungjawaban terlalu tinggi sebesar Rp11.250.000,00	TEMUAN No. 3	11,250,000.00		11,250,000.00	3,750,000.00	7-Nov-18	-
						3,750,000.00	9-Nov-18	
						3,750,000.00	28-Nov-18	
121	Terdapat belanja paket meeting dan belanja cetak dipertanggungjawabkan terlalu tinggi dari harga sebenarnya sebesar Rp12.395.000,00	TEMUAN No. 4	12,395,000.00		12,395,000.00	4,000,000.00	18-Oct-18	-
						8,395,000.00	9-Nov-18	
122	Terdapat pertanggungjawaban belanja paket meeting melebihi standar harga/biaya sebesar Rp3.000.000,00	TEMUAN No. 6	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	16-Nov-18	-
123	Terdapat kemahalan harga belanja tas souvenir (paper bag) sebesar Rp20.250.000,00	TEMUAN No. 7	20,250,000.00		20,250,000.00	15,250,000.00	16-Oct-18	-
						5,000,000.00	7-Nov-18	
124	Terdapat kemahalan harga belanja cetak sebesar Rp4.300.000,00	TEMUAN No. 8	4,300,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00	16-Oct-18	-
125	Terdapat kelebihan pembayaran biaya taxi sebesar Rp436.260,00	TEMUAN No. 9	436,260.00		436,260.00	256,260.00	24-Jul-18	-
						180,000.00	25-Jul-18	
XXVII	**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI**	**700/058-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 02 Agustus 2018)**	**3,956,262.00**		**3,956,262.00**			**-**
126	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan anak yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp1.256.262,00	TEMUAN No. 1	1,256,262.00		1,256,262.00	1,256,262.00	19-Oct-18	-
127	Terdapat belanja makanan dan minuman tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.700.000,00	TEMUAN No. 2	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	3-Oct-18	-
XXVIII	**BIRO UMUM SETDA PROVINSI**	**700/062-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Agustus 2018)**	**1,510,000.00**		**1,510,000.00**			**-**
128	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman tamu tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.510.000,00	TEMUAN No. 2	1,510,000.00		1,510,000.00	1,510,000.00	16-Oct-18	-
XXIX	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**700/080-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 September 2018)**	**1,901,000.00**	**-**	**1,901,000.00**			**-**
129	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah, Honorarium pelaksana kegiatan dan uang makan pegawai negeri sebesar Rp1.901.000,00	TEMUAN No. 1	1,901,000.00		1,901,000.00	639,000.00	15-Nov-18	-
						862,000.00	15-Nov-18	
						400,000.00	15-Nov-18	
XXX	**DANA HIBAH BANSOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG DI WIL.KAB. BANGKA BARAT TA 2017**	**700/081-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 September 2018)**	**2,110,000.00**		**2,110,000.00**			**-**
130	Terdapat ketidakpatutan dalam pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp1.000.000,00	TEMUAN No. 4	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	18-Jul-19	-
131	Terdapat pengeluaran anggaran kas tidak tepat sasaran dan kurang efisien Rp.1.110.000,00	TEMUAN No. 5	1,110,000.00		1,110,000.00	540,000.00	2-Jul-19	-
						30,000.00	9-Jul-19	
						540,000.00	18-Jul-19	
XXXI	**DANA HIBAH BANSOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG DI WIL.KAB. BANGKA BARAT TA 2017**	**700/082-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 September 2018)**	**531,250.00**	**-**	**531,250.00**			**-**

132	Terdapat penggunaan bantuan pendidikan Inklusi jenjang SMP/MTS untuk pembayaran honorarium kepanitiaan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp531.250,00	TEMUAN No. 1	531,250.00		531,250.00	531,250.00	12-Nov-19	-
XXXII	**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI**	**700/086-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**28,851,050.00**	**-**	**28,851,050.00**			**-**
133	Terdapat kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp28.851.050,00	TEMUAN No. 7	28,852,050.00 (1,000.00) (Lebih Catat)		28,851,050.00	18,851,050.00 10,000,000.00	27-Nov-19 9-May-19	
XXXIII	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**700/089-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**8,553,762.00**		**8,553,762.00**			**-**
134	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp6.297.500,00	TEMUAN No. 1	6,297,500.00		6,297,500.00	4,742,500.00 665,000.00 170,000.00 340,000.00 380,000.00	21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18	-
135	Terdapat pembayaran perjalanan dinas dalam daerah tidak memenuhi kriteria yang di persyaratkan sebesar Rp1.000.000,00	TEMUAN No. 3	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	21-Dec-18	-
136	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan anak yang melebuhi batas usia sebesar Rp1.256.262,00	TEMUAN No. 4	1,256,262.00		1,256,262.00	1,256,262.00	21-Dec-18	-
XXXIV	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**700/090-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**34,815,750.00**	**-**	**34,815,750.00**			**-**
137	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Staf Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.716.000,00	TEMUAN No. 1	10,716,000.00		10,716,000.00	1,406,000.00 1,710,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00	11-Dec-18 28-Dec-18 28-Dec-18 28-Dec-18 28-Dec-18	-
138	Terdapat pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan melebihi standar satuan harga belanja pegawai dan jasa sebesar Rp7.084.750,00	TEMUAN No. 2	7,084,750.00		7,084,750.00	1,350,000.00 2,900,000.00 303,000.00 400,000.00 696,750.00 1,435,000.00	11-Dec-18 11-Dec-18 11-Dec-18 11-Dec-18 11-Dec-18 11-Dec-18	-
139	Terdapat kelebihan belanja perjalanan dinas sebesa Rp17.015.000,00	TEMUAN No. 4	17,015,000.00		17,015,000.00	17,015,000.00	11-Dec-18	-
XXXV	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**700/091-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**14,710,000.00**	**-**	**14,710,000.00**			**-**
140	Terdapat pembayaran belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp14.710.000,00	TEMUAN No. 6	14,710,000.00		14,710,000.00	14,710,000.00	11-Dec-18	-
XXXVI	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**700/093-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**5,865,509.00**		**#REF!**			**#REF!**
141	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.204.600,00	TEMUAN No. 4	1,204,600.00		#REF!	1,000,900.00 204,000.00	12-Feb-19 13-Feb-19	#REF!
142	Terdapat kelebihan belanja makan dan minuman rapat sebesar Rp700.000,00	TEMUAN No. 5	700,000.00		700,000.00	700,000.00	24-Jan-19	-
143	Terdapat kelebihan pembayaran belanja publikasi (baleho) sebesar Rp2.065.000,00	TEMUAN No. 6	2,065,000.00		2,065,000.00	2,065,000.00	13-Feb-19	-
144	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp805.000,00	TEMUAN No. 8	805,000.00		805,000.00	805,000.00	24-Jan-19	-

145	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pakaian seragam panitia sebesar Rp1.090.909,00	TEMUAN No. 9	1,090,909.00		1,090,909.00	1,090,909.00	12-Oct-18	-
XXXVII	**DINAS SOSIAL**	**700/087-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 08 Oktober 2018)**	**2,587,000.00**	**-**	**2,587,000.00**			**-**
146	Terdapat biaya perjalanan dinas tidak di dukung dengan bukti-bukti yang relevan dan kompoten sebesar Rp572.000,00	TEMUAN No. 2	572,000.00		572,000.00	572,000.00	1-Feb-19	-
147	Terdapat kelebihan pembayaran honoraium sebesar Rp2.015.000,00	TEMUAN No. 3	2,015,000.00		2,015,000.00	2,015,000.00	1-Feb-19	-
XXXVIII	**BAKUDA BID. PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN**	**700/108-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 09 Oktober 2018)**	**4,154,000.00**		**4,154,000.00**			**-**
148	Terdapat pembayaran belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.154.000,00	TEMUAN No. 3	4,154,000.00		4,154,000.00	1,000,000.00	4-Jan-19	-
						1,140,000.00	4-Jan-19	
						1,330,000.00	8-Jan-19	
						684,000.00	8-Jan-19	
XXXIX	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**700/085-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 12 Oktober 2018)**	**5,140,500.00**		**5,140,500.00**			**-**
149	Terdapat kelebihan pembayaran kas yang melebihi standart satuan harga sebesar Rp5.140.500,00	TEMUAN No. 5	675,000.00		675,000.00	675,000.00	7-Feb-19	-
			1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	7-Feb-19	-
			1,683,500.00		1,683,500.00	1,683,500.00	7-Feb-19	-
			360,000.00		360,000.00	360,000.00	7-Feb-19	-
			1,172,000.00		1,172,000.00	1,172,000.00	4-Mar-19	-
XL	**DINAS PENDIDIKAN (BIDANG SMA DAN SMK)**	**700/100-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 November 2018)**	**6,390,000.00**		**6,390,000.00**			**-**
150	Terdapat kelebihan pembayaran sewa kamar kegiatan peningkatan kualitas ksesiswaaan SMA sebesar Rp6.000.000,00	TEMUAN No. 2	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	31-Jan-19	-
151	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Moderator sebesar Rp390.000,00	TEMUAN No. 4	390,000.00		390,000.00	390,000.00	31-Jan-19	-
XLI	**BAKUDA BID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN SERTA BIDANG ASET DAERAH**	**700/102-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 November 2018)**	**9,074,676.00**	**-**	**8,299,676.00**			**775,000.00**
152	Terdapat kelebihan pembayaran honoraium staf pelaksana kegiatan sebesar Rp6.627.200,00	TEMUAN No. 1	6,627,200.00		6,627,200.00	1,687,200.00	17-Dec-18	-
						912,000.00	26-Dec-18	
						608,000.00	27-Nov-18	
						1,140,000.00	30-Dec-20	
						1,596,000.00	29-Dec-20	
						684,000.00	1/29/2021	
153	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp912.476,00	TEMUAN No. 2	912,476.00		912,476.00			-
						80,000.00	12/28/2020	
						40,000.00	12/28/2020	
						100,000.00	12/28/2020	
						692,476.00	3/25/2021	
154	Terdapat pembayaran honorarium Moderator melebihi standar satuan harga belanja pegawai dan jasa sebesar Rp760.000,00	TEMUAN No. 3	760,000.00		760,000.00	760,000.00	27-Nov-18	-
155	Terdapat kelebihan pembayaran belnja dokumntasi kegiatan sebesar Rp775.000,00	TEMUAN No. 4	775,000.00	Sutra Wijaya	-	-		775,000.00
XLII	**BAKUDA BIDANG SEKRETARIAT**	**700/103-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 November 2018)**	**478,000.00**		**478,000.00**			**-**
156	Terdapat kelebihan pembayaranpemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp478.000,00	TEMUAN No. 2	478,000.00		478,000.00	478,000.00	1/21/2021	-

XLIII	**BAKUDA BID. ANGGARAN SERTA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI**	**700/107-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 November 2018)**	**1,898,250.00**	**-**	**1,898,250.00**			**-**
157	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp800.000,00	TEMUAN No. 1	800,000.00		800,000.00	200,000.00	29-Jan-19	-
						200,000.00	29-Jan-19	
						200,000.00	29-Jan-19	
						200,000.00	29-Jan-19	
158	Terdapat pembayaran uang saku peserta tidak di pungut PPh pasal 21 sebesar Rp1.098.250,00	TEMUAN No. 2	1,098,250.00		1,098,250.00	697,000.00	29-Jan-19	-
						401,250.00	29-Jan-19	
XLIV	**DINAS PENDIDIKAN BID. SEKRETARIAT, BID. PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS, BID. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**700/099-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 06 November 2018)**	**3,854,265.00**	**-**	**3,854,265.00**			**-**
159	Terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.094.265,00	TEMUAN No. 1	1,094,265.00		1,094,265.00	1,094,265.00	6-Feb-19	-
160	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Moderator sebesar Rp360.000,00	TEMUAN No. 2	360,000.00		360,000.00	360,000.00	8-Feb-19	-
161	Terdapat belanja sewa kamar staf pengelola yang tidak seharusnya dikeluarkan Rp2.400.000,00	TEMUAN No. 2	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	7-Dec-18	-
XLV	**DINAS PERTANIAN**	**700/092-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 15 November 2018)**	**9,750,000.00**		**9,750,000.00**			**-**
162	Terdapat kelebihan pembayaran Transportasi sebesar Rp9.500.000,00	TEMUAN No. 1	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00	25-Apr-19	-
163	Terdapat kelebihan pembayaran belanja dokumentasi kegiatan sebesar Rp250.000,00	TEMUAN No. 7	250,000.00		250,000.00	250,000.00	11/30/2020	-
XLVI	**DINAS PUPR BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**	**700/114-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 30 November 2018)**	**9,423,000.00**	**-**	**9,423,000.00**			**-**
164	Terdapat kelebihan pembayaran biaya Mobilitas Sewa Kendaraan sebesar Rp8.873.000,00	TEMUAN No. 1	8,873,000.00		8,873,000.00	8,873,000.00	10-Jan-19	-
165	Terdapat pembayaran uang harian peserta Focus group Discusion (FGD) yang tidak dapat ipertanggungjawabkan sebesar Rp360.000,00	TEMUAN No. 2	360,000.00		360,000.00	360,000.00	9-Jan-19	-
166	Terdapat pembayaran honorarium Moderator tidak sesuai ketentuan sebesar Rp190.000,00	TEMUAN No. 4	190,000.00		190,000.00	190,000.00	10-Jan-19	-
XLVII	**RSUD Dr (HC) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/109-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 07 Desember 2018)**	**4,550,000.00**		**4,550,000.00**			**-**
167	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.450.000,00	TEMUAN No. 4	450,000.00	Yurzali, S.H.	450,000.00	450,000.00	20-Mar-19	-
168	Terdapat kelebihan pembayaran dan inefisiensi belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor (pemeliharaan alat-alat elektronik) sebesar Rp.4.100.000,00	TEMUAN No. 5	4,100,000.00	Taufik, S.H.	4,100,000.00	4,100,000.00	21-Mar-19	-
XLVIII	**DINAS KESEHATAN**	**700/116-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 12 Desember 2018)**	**1,440,000.00**	**-**	**1,440,000.00**			**-**
169	Terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Kegiatan dan Narasumber sebesar Rp1.440.000,00	TEMUAN No. 1	1,440,000.00		1,440,000.00	540,000.00	12-Apr-19	-
						595,000.00	12-Apr-19	
						135,000.00	12-Apr-19	
						170,000.00	12-Apr-19	

XLIX	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**700/118-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 24 Desember 2018)**	**9,329,520.00**		**9,329,520.00**			**-**
170	Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga yang menjadi Tanggungan dalam daftar gaji sebesar sebesar Rp2.009.520,00	TEMUAN No. 2	2,009,520.00		2,009,520.00	2,009,520.00	27-Dec-18	-
171	Terdapat Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.665.000,00	TEMUAN No. 3	3,665,000.00		1,729,000.00	1,729,000.00	27-Jul-18	-
					1,936,000.00	228,000.00	25-Feb-19	
						1,088,000.00	16-May-19	
						240,000.00	25-Jun-19	
						380,000.00	26-Jun-19	
172	Terdapat Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator Melebihi Standart Satuan Harga Belanja Pegawai dan Jasa sebesar Rp3.145.000,00	TEMUAN No. 4	3,145,000.00		170,000.00	170,000.00	21-Dec-18	-
			510,000.00 (Kurang Catat)		3,485,000.00	340,000.00	21-Feb-19	
						170,000.00	21-Feb-19	
						170,000.00	4-Jan-19	
						765,000.00	4-Jan-19	
						170,000.00	14-Mar-19	
						765,000.00	16-May-19	
						170,000.00	21-Dec-18	
						170,000.00	21-Dec-18	
						765,000.00	12-Oct-20	
B	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN 2019**		**574,584,676.75**		**#REF!**			**#REF!**
L	**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/013-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 Februari 2019)**	**6,399,000.00**		**5,704,000.00**			**695,000.00**
173	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah atas beberapa kegiatan sebesar Rp6,399,000,00		6,399,000.00	Istari jayani	5,704,000.00	375,000.00	15-Mar-19	695,000.00
						700,000.00	27-Jun-19	
						2,424,000.00	8-Dec-20	
						800,000.00	10-Dec-20	
						505,000.00	12/2/2020	
						200,000.00	1/24/2020	
						700,000.00	1/24/2020	
LI	**BANTUAN DABA HIBAH DAN BANSOS PADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**	**700/019-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 22 Maret 2019)**	**7,500,000.00**		**-**			**7,500,000.00**
174	Terdapat penyaluran dana bantuan sosial bidang kesehatan ke-1 (satu) orang tidak sepenuhnya diterima		7,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
LII	**DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**	**700/038-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**8,588,395.00**		**400,000.00**			**8,188,395.00**
175	Perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp400,000,00		400,000.00		400,000.00	400,000.00	3-Jul-19	-
176	Pembayaran belanja cetak sebesar Rp1,500,000,00		1,500,000.00			-	-	1,500,000.00
177	Pembayaran belanja pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp4,700,000,00		4,700,000.00			-	-	4,700,000.00
178	Honorarium Tim Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp300,000,00		300,000.00			-	-	300,000.00
179	Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1,688,395,00		1,688,395.00			-	-	1,688,395.00

LIII	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/035-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**21,398,500.00**		**21,060,500.00**			**338,000.00**
180	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pembantu pengurus barang pengguna		3,726,000.00		3,388,000.00	2,400,000.00	5-Sep-19	338,000.00
						988,000.00	10-Sep-19	-
181	Terdapat kelebihan bayar biaya langganan internet mobile modem sebesar Rp6,750,000,00		7,150,000.00		7,150,000.00	2,750,000.00	5-Sep-19	-
						4,400,000.00	10-Sep-19	
182	Terdapat pembayaran honorarium dari uang transport tang tidak harus dibayarkan sebesar Rp8,362,500,00		8,362,500.00		8,362,500.00	1,200,000.00	10-Sep-19	-
						1,854,546.00	5-Sep-19	
						927,272.00	5-Sep-19	
						1,431,819.00	5-Sep-19	
						1,136,363.00	5-Sep-19	
						1,812,500.00	5-Sep-19	
183	Terdapat double pembayaran honorarium guru tidak tetap sebesar Rp2,160,000,00		2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00	5-Sep-19	-
LIV	**DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2018 DIKABUPATEN BELITUNG TIMUR**	**700/035-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**2,580,000.00**		**2,580,000.00**			**-**
184	Terdapat pembayaran honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS APBN tidak sesuai petunjuk teknis sebesar Rp2,580,000,00		2,580,000.00		2,580,000.00	2,580,000.00	5-Sep-19	-
LVIII	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/046-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**2,910,000.00**		**2,910,000.00**			**-**
185	belanja makan minum melebihi standar biaya yang telah ditetapkan sebesar R2,670,000		2,670,000.00		2,670,000.00	210,000.00	2-Sep-19	-
						2,460,000.00	2-Sep-19	
186	Terdapat kekurangan pembayaran honor GT a.n. Hj.Maryati,MM sebesar Rp240,000,00		240,000.00		240,000.00	240,000.00	28-Aug-19	-
LIX	**BANTUAN KEUANGAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/028-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**4,268,000.00**		**4,268,000.00**			**-**
187	Terdapat penggunaan bantuan pendidikan inklusi jenjang SD tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4,268,000,00		4,268,000.00		4,268,000.00	4,268,000.00	23-Jul-19	-
LX	**BANTUAN DANA HIBAH DAN BANSOS KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA**	**700/021-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**9,683,000.00**		**5,863,000.00**			**3,820,000.00**
188	Terdapat belanja dana hibah pendidikan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp7,260,000,00		7,080,000.00		3,660,000.00	1,080,000.00	9-Sep-19	3,420,000.00
						1,500,000.00	28-Aug-19	
						1,080,000.00	28-Aug-19	
189	Terdapat pengeluaran belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp603,000,00		603,000.00		203,000.00	203,000.00	23-Aug-19	400,000.00
190	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepala sekolah sebesar Rp2,000,000,00		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	23-Aug-19	-

LXI	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN MEI 2018 S.D APRIL 2019**	**700/054-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**4,530,000.00**		**4,530,000.00**			**-**
191	Terdapat belanja cetak iklan yang tidak diperkenankansebesar Rp1,350,000		1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	12/18/2020	-
192	Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1,500,000,00		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	9-Aug-19	-
193	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp1,680,000,00		1,680,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	31-May-19	-
LXII	**DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019**	**700/049-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**4,452,502.00**		**4,452,502.00**			**-**
194	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras dalam daftar gaji sebesar Rp732,502,00		732,502.00		732,502.00	732,502.00	27-May-19	-
195	Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bdan dalam daerah pada beberapa kegiatan sebesar Rp3,540,000,00		3,540,000.00		3,540,000.00	2,300,000.00	27-May-19	-
						400,000.00	27-May-19	
						840,000.00	27-May-19	
196	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium staf pelaksana kegiatan sebesar Rp180,000,00		180,000.00		180,000.00	180,000.00	27-May-19	-
LXIII	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/058-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**1,280,000.00**		**#REF!**			**#REF!**
197	Terdapat retribusi pemakaian kekayaan daerah yang melebihi batas waktu pembayaran belum diterima sebesar Rp1,280000,00		1,280,000.00		#REF!	640,000.00	29-May-19	#REF!
						12,800.00	29-May-19	
						640,000.00	29-May-19	
						25,600.00	29-May-19	
LXIV	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/059-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**722,240.00**		**722,240.00**			**-**
198	Terdapat pembayaran tunjangan anak dalam daftar gaji PNS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp722,240,00		722,240.00		722,240.00	722,240.00	10-Jun-19	-
LXV	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/052-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**21,191,200.00**		**21,191,200.00**			**-**
199	Terdapat kelebihan pembayaran belanja obat-obatan dan suplemen sebesar Rp8,153,850,00		8,153,850.00		8,153,850.00	350,000.00	1-Aug-19	-
						523,650.00	1-Aug-19	
						910,000.00	8-Aug-19	
						2,665,800.00	8-Aug-19	
						226,600.00	8-Aug-19	
						1,825,000.00	12-Aug-19	
						1,652,800.00	12-Aug-19	
200	Terdapat pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melebihi batas maksimal sebesar Rp9,881,100,00		9,881,100.00		9,881,100.00	1,307,200.00	1-Aug-19	-
						3,921,600.00	1-Aug-19	
						1,124,800.00	1-Aug-19	
						760,000.00	8-Aug-19	
						760,000.00	12-Aug-19	
						1,520,000.00	19-Sep-19	
						487,500.00		

201	Terdapat pembayaran honorarium tim kegiatan tidak dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp281,250,00		281,250.00		281,250.00	281,250.00	12-Aug-19	-
202	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp1,475,000,00		1,475,000.00		1,475,000.00	1,475,000.00	12-Aug-19	-
203	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pakaian olahraga sebesar Rp1,400,000,00		1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	12-Aug-19	-
LXVI	**BANTUAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**	**700/040-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**19,490,000.00**		**19,490,000.00**			**-**
204	pembayaran honorarium pembantu pengurus barang pengguna tidak sesuai ketentuan sebesar Rp800,000,00		800,000.00		800,000.00	800,000.00	14-Aug-19	-
205	Terdapat pembayaran belanja ganda sebesar Rp16,690,000,00		16,690,000.00		16,690,000.00	16,690,000.00	19-Aug-19	-
206	Terdapat kelebihan pembayaran baju kerah panitia sebesar Rp2.000.000,00		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	19-Aug-19	-
LXVII	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2018**	**700/043-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**7,762,500.00**		**7,762,500.00**			**-**
207	Terdapat kelebihan pembayaran belanja kegiatansebesar Rp7.762.500,00		2,175,000.00	SMKN 1 Kelapa	2,175,000.00	1,350,000.00	19-Aug-19	-
						825,000.00	19-Aug-19	
			1,200,000.00	SMKN 1 Tempilang	1,200,000.00	1,200,000.00	23-Aug-19	
			3,250,000.00	SMKN 1 Simpang Teritip	3,250,000.00	3,250,000.00	26/082019	
			1,137,500.00	KPA SMKN 1 Kelapa	1,137,500.00	1,137,500.00	19-Aug-19	
LXVIII	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2018 s.d. AKHIR PEMERIKSAAN**	**700/048-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**9,560,000.00**		**9,560,000.00**			**-**
208	Terdapat pembayaran tunjangan jabatan struktural tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.780.000,00		3,780,000.00		3,780,000.00	3,780,000.00	3-Sep-19	-
209	Terdapat pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.780.000,00		5,780,000.00		5,780,000.00	5,780,000.00	15-Aug-19	-
LXIX	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/044-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 22 April 2019)**	**19,190,000.00**		**19,190,000.00**			**-**
210	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pembantu pengurus barang sebesar Rp1.040.000,00 pada SMAN 1 Mentok		1,040,000.00		1,040,000.00	1,040,000.00	26-Aug-19	-
211	Terdapat Pembuatan spanduk dan belanja material tidak sesuai ketentuan sebesar Rp616.000,00 (SMAN 1 Parit Tiga)		616,000.00		616,000.00	336,000.00	20-Aug-19	-
						280,000.00	20-Aug-19	
212	Terdapat kelebihan pembayaran upah pada beberapa kegiatan sebesar Rp654.000,00 (SMKN 1 Parit Tiga)		654,000.00		654,000.00	654,000.00	20-Aug-19	-

213	Terdapat belanja yg tdk sesuai dgn peruntukannya sebesar Rp4.800.000,00 (SMAN 1 Jebus)		4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	2-Sep-19	-
214	Terdapat kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp220.000,00 (SMAN 1 Jebus)		220,000.00		220,000.00	220,000.00	2-Sep-19	-
215	Terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.900.000,00 (SMAN 1 Jebus)		3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00	2-Sep-19	-
216	Terdapat pembayaran transportasi peserta tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.800.000,00 (SMAN 1 Jebus)		2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00	3-Sep-19	-
217	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pembantu pengurus barang sebesar Rp1.600.000,00 (SMKN 1 Mentok)		1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	21-Aug-19	-
218	Terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.800.000,00 (SMKN 1 Mentok)		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	21-Aug-19	-
219	Terdapat pembelian materai yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp250.000,00 (SMKN 1 Mentok)		250,000.00		250,000.00	250,000.00	21-Aug-19	-
220	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pembantu pengurus barang sebesar Rp800.000,00 (SMKN 1 Parit Tiga)		800,000.00		800,000.00	800,000.00	20-Aug-19	-
221	Terdapat kelebihan pembelian kaos panitia sebesar Rp550.000,00 (SLBN 1 Mentok)		550,000.00		550,000.00	550,000.00	20-Aug-19	-
222	Terdapat Pembuatan spanduk tidak sesuai ketentuan sebesar Rp160.000,00 (SLBN 1 Mentok)		160,000.00		160,000.00	160,000.00	20-Aug-19	-
LXX	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/041-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 April 2019)**	**47,190,000.00**		**47,190,000.00**			**-**
223	Terdapat belanja barang/jasa tidaksesuai ketentuan sebesar Rp17.900.000,00		17,900,000.00		17,900,000.00	13,900,000.00	3-Sep-19	-
						3,000,000.00	16-Aug-19	
						1,000,000.00	16-Aug-19	
224	Terdapat kelebihan pembayaran belanja honor pengawas ujian sebesar Rp3.990.000,00		3,990,000.00		3,990,000.00	3,990,000.00	15-Aug-19	-
225	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium gurutidak tetap sebesar Rp6.240.000,00		6,240,000.00		6,240,000.00	6,240,000.00	16-Aug-19	-
226	Terdapat kemahalan harga belanja sewa mobil kegiatan sebesar Rp4.320.000,00		4,320,000.00		4,320,000.00	4,020,000.00	26-Aug-19	-
						300,000.00	26-Aug-19	
227	Terdapat pembayaran transportasi kegiatan belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.340.000,00		3,340,000.00		3,340,000.00	2,740,000.00	16-Aug-19	-
						600,000.00	16-Aug-19	
228	Terdapat pembayaran honor kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.400.000,00		11,400,000.00		11,400,000.00	11,400,000.00	20-Aug-19	-

LXXI	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/036-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**3,648,840.00**		**3,648,840.00**			**-**
229	Terdapat kelebihan pembayaran biaya pemeliharaan lantai halaman sekolah SLB N Tanjung Pandan sebesar Rp2,688,840.00		2,688,840.00		2,688,840.00	2,688,840.00	6-Sep-19	-
230	Terdapat pembayaran honorarium GTT kurang bayar sebesar Rp960.000,00		960,000.00		960,000.00	960,000.00	4-Sep-19	-
LXXII	**BANTUAN KEUANGAN DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI KEPULAUANAN BANGKA BELITUNG TA,2018**	**700/029-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**564,000.00**		**564,000.00**			**-**
231	Terdapat pembayaran intensif ustad/ustadzah TPA tidak tepat sasaran Rp564,000,00		564,000.00		564,000.00	564,000.00	14-Nov-19	-
LXXIII	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/050-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**4,572,000.00**		**#REF!**			**#REF!**
232	Terdapat kelebihan belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp2.300.000,00 tidak sesuai ketentuan		2,300,000.00		#REF!	2,540,000.00	17-Jun-19	#REF!
233	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2.272.000,00 tidak sesuai ketentuan		2,272,000.00		2,272,000.00	432,000.00	13-Jun-19	-
						1,840,000.00	13-Jun-19	
LXXIV	**DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/051-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**4,860,000.00**		**4,860,000.00**			**-**
234	Terdapat pengeluaran anggaran kas TA.2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.610.000.00		2,610,000.00		2,610,000.00	2,610,000.00	30-Oct-19	-
235	Terdapat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp2.250.000,00		2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00	20-Nov-19	-
LXXV	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ta.2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/057-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**35,974,600.00**		**30,047,700.00**			**5,926,900.00**
236	Terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16.700.000,00		16,700,000.00		16,700,000.00	1,350,000.00	8-Aug-19	-
						1,655,000.00	8-Aug-19	
						1,175,000.00	8-Aug-19	
						1,655,000.00	19-Sep-19	
						440,000.00	19-Sep-19	
						400,000.00	19-Sep-19	
						500,000.00	19-Sep-19	
						1,175,000.00	19-Sep-19	
						250,000.00	7-Oct-19	
						250,000.00	2-Dec-19	
						520,000.00	13-Dec-19	
						1,275,000.00	17-Dec-19	
						1,175,000.00	18-Dec-19	
						1,020,000.00	18-Dec-19	

						200,000.00	26-Dec-19	
						1,020,000.00	27-Dec-19	
						1,020,000.00	27-Dec-19	
						1,220,000.00	27-Dec-19	
						400,000.00	11-Nov-20	
237	Terdapat kelebihan pembayaran belanja instalasi listrik, ATK, penggandaan dan alat kebersihan sebesar Rp14.945.900		14,945,900.00	A.Fauzan	9,019,000.00	3,985,000.00	19-Jun-19	5,926,900.00
						3,034,000.00	19-Jun-19	
						2,000,000.00	12/30/2020	-
238	Terdapat pembayaran tunjangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.328.700,00		4,328,700.00	Subandrio	4,328,700.00	2,793,600.00	20-Dec-19	-
						646,000.00	8-Apr-20	-
						889,100.00		
LXXVI	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP, BANGKA BELITUNG TA.2018**	**700/042-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 April 2019)**	**6,658,000.00**		**6,658,000.00**			**-**
239	Terdapat kelebihan jumlah pemberian makanan dan minuman siswa yang menginap di asrama sebesar Rp2.808.000,00		2,808,000.00		2,808,000.00	2,808,000.00	13-Aug-20	-
240	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator/pengawas sebesar Rp1.100.000,00		1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	13-Aug-20	-
241	Terdapat pembayaran perjalanan dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.750.000,00		2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00	13-Aug-20	-
LXXVII	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP, BANGKA BELITUNG TA.2018**	**700/039-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 April 2019)**	**18,814,800.00**		**18,814,800.00**			**-**
242	Terdapat pembayaran belanja transportasi honorarium, uang lelah tidak sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Dana Operasional Sekolah sebesar Rp15.190.000,00		15,190,000.00		15,190,000.00	6,000,000.00	12-Aug-20	-
						8,500,000.00	13-Aug-20	
						690,000.00	11-Aug-20	
243	Terdapat kelebihan pembayaran belanja transportasi sewa kendaraan, pengadaan buku dan pot bunga sebesar Rp3.168.800,00		3,168,800.00		3,168,800.00	2,400,000.00	12-Aug-20	-
						200,000.00	11-Aug-20	
						368,800.00	13-Aug-20	
						200,000.00	19-Aug-20	
244	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pembantu pengurus barang pengguna sebesar Rp456.000,00		456,000.00		456,000.00	456,000.00	14-Aug-20	-
LXXVIII	**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2018 s.d. PEMERIKSAAN**	**700/055-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**11,813,896.00**		**11,813,896.00**			**-**
245	Terdapat kelebihan biaya penginapan sebesar Rp38.000,00		38,000.00		38,000.00	38,000.00	12-Jun-19	-
246	Terdapat kelebihan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp2.566.900,00		2,566,900.00		2,566,900.00	322,000.00	12-Jun-19	-
						270,000.00	12-Jun-19	
						322,000.00	12-Jun-19	
						322,000.00	12-Jun-19	
						151,000.00	12-Jun-19	
						384,800.00	12-Jun-19	
						795,100.00	13-Jun-19	

247	Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp1.470.000,00		1,470,000.00		1,470,000.00	1,470,000.00	12-Jun-19	-
248	Terdapat pengeluaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak terealisasi dalam SPJ Fungsional sebesar Rp524.000,00		524,996.00		524,996.00	524,996.00	13-Jun-19	-
249	Terdapat kelebihan pembayaran belanja kegiatan sebesar Rp2.800.000,00		2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00	25-Sep-19	-
250	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan anak dalam daftar gaji tahun 2018 sebesar Rp777.000,00		777,000.00		777,000.00	777,000.00	25-Sep-19	-
251	Terdapat belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.637.000,00		3,637,000.00		3,637,000.00	3,637,000.00	12-Jun-19	-
LXXIX	**BIRO KESRA SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2018 DAN 2019**	**700/090-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**257,000.00**		**257,000.00**		**-**	**-**
252	Terdapat pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp257.000,00		257,000.00		257,000.00	257,000.00	13-Aug-19	-
LXXX	**BANTUAN DANA HIBAH DAN BANSOS KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS TA.2018 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG**	**700/030-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 15 April 2019)**	**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		**-**	**-**
253	Terdapat Kelebihan pembayaran belanja karpet sajadah sebesar Rp200.000,00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	2-Oct-19	-
254	Terdapat kelebihan pembayaran penginapan sebesar Rp4.800.000,00		4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	24-Sep-19	-
LXXXI	**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA. JANUARI-JUNI 2019**	**700/088-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**5,429,500.00**		**5,429,500.00**		**-**	**-**
255	Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.427.500,00		1,427,500.00		1,427,500.00	1,427,500.00	7-Nov-19	-
256	Terdapat kelebihan bayar biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp365.000,00		365,000.00		365,000.00	365,000.00	7-Nov-19	-
257	Terdapat belanja Surat tanda nomor kendaraan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.637.000,00		3,637,000.00		3,637,000.00	3,637,000.00	12-Jun-19	-
LXXXII	**BIRO PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA. 2018-2019**	**700/091-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**631,910.00**		**631,910.00**		**-**	**-**
258	Terdapat pembayaran tunjangan anak dalam daftar gaji PNS tidak sesuai dengan ketentuan atau kelebihan pembayaran tunjangan anak yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp631.910,00		631,910.00	Burhan, SH	631,910.00	631,910.00	13-Aug-19	-
LXXXIII	**BIRO LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/083-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**723,000.00**		**723,000.00**		**-**	**-**
259	Terdapat kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp723.000,00		723,000.00		723,000.00	550,000.00	1-Aug-19	-
						90,000.00	3-Dec-19	

						83,000.00	28-Nov-19	
LXXXIV	**BIRO ORGANISASI SETDA PROV.KEP. BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/085-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**6,518,000.00**		**6,518,000.00**		**-**	**-**
260	Terdapat kelebihan belanja perlengkapan peserta sebesar Rp250.000,00 dan belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp6.268.000,00 tidak sesuai ketentuan.		6,518,000.00		6,518,000.00	250,000.00	20-Aug-19	-
						100,000.00	20-Aug-19	
						240,000.00	20-Aug-19	
						1,696,000.00	20-Aug-19	
						80,000.00	20-Aug-19	
						192,000.00	20-Aug-19	
						192,000.00	20-Aug-19	
						120,000.00	20-Aug-19	
						240,000.00	20-Aug-19	
						760,000.00	20-Aug-19	
						912,000.00	20-Aug-19	
						960,000.00	20-Aug-19	
						152,000.00	20-Aug-19	
						304,000.00	20-Aug-19	
						320,000.00	20-Aug-19	
LXXXV	**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAB PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. AGUSTUS 2019**	**700/115-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 04 Oktober 2019)**	**1,240,270.00**		**1,240,270.00**		**-**	**-**
261	Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.240.270,00		1,240,270.00	H. Husaini, S.KM	1,240,270.00	1,240,270.00	9-Jan-20	-
LXXXVI	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.KEP.BABEL TA. NOVEMBER 2018 S.D. NOVEMBER 2019**	**700/116-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 14 Oktober 2019)**	**1,200,000.00**		**1,200,000.00**		**-**	**-**
262	Terdapat pembayaran uang saku tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.200.000,00		1,200,000.00	Padli, S.IP	1,200,000.00	1,200,000.00	28-Oct-19	-
LXXXVII	**SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/122-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Oktober 2019)**	**2,375,000.00**		**2,375,000.00**		**-**	**-**
263	Terdapat pembayaran uang saku peserta melebihi standar sebesar Rp2.375.000,00		2,375,000.00		2,375,000.00	2,375,000.00	3-Feb-20	-
LXXXVIII	**BIRO UMUM SETDA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/087-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 09 Agustus 2019)**	**14,882,800.00**		**14,882,800.00**		**-**	**-**
264	Terdapat pengadaan belanja suku cadang genset yang tidak sesuai kebutuhan pertahun sebesar Rp6.982.800,00		6,982,800.00		6,982,800.00	6,982,800.00	20-Jan-20	-
265	Terdapat kelebihan pembayaran belanja kegiatan sebesar Rp1.500.00,00		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	28-Jan-20	-
266	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Ban sebesar Rp6.400.000,00		6,400,000.00		6,400,000.00	6,400,000.00	21-Jan-20	-
LXXXIX	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/113-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 07 Oktober 2019)**	**16,788,012.00**		**16,788,012.00**			**-**
267	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan keluarga yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp2.041.500,00		2,041,512.00		2,041,512.00	2,041,000.00	11-Feb-20	-
						512.00	5-Jun-20	

268	Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa beberapa kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp14.746.500,00		14,746,500.00		14,746,500.00	1,600,000.00	26-Dec-19	-
						1,020,000.00	20-Dec-19	
						2,835,000.00	11-Feb-20	
						1,650,000.00	10-Feb-20	
						7,641,500.00	10-Feb-20	
XC	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV.KEP.BABEL TA.2019**	**700/144-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 November 2019)**	**255,000.00**		**255,000.00**			**-**
269	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp255.000,00		255,000.00		255,000.00	255,000.00	8-Jan-20	-
XCI	**SEKRETARIAT DPRD PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/111-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 11 Oktober 2019)**	**55,689,670.00**		**55,689,670.00**			**-**
270	Terdapat perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentan sebesar Rp55.689.670,00		55,689,670.00		55,689,670.00	35,662,450.00	13-Nov-19	-
						18,087,220.00	13-Nov-19	
						440,000.00	13-Nov-19	
						1,500,000.00	1/13/2020	
XCII	**BIDANG SMK DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. PEMERIKSAAN**	**700/134-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 15 November 2019)**	**25,854,000.00**		**-**	**-**		**25,854,000.00**
271	Terdapat pembayaran uang saku peserta melebihi standar sebesar Rp2.400.000,00		2,400,000.00		-			2,400,000.00
272	Terdapat biaya transport perjalanan dinas tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.080.000,00		1,080,000.00		-			1,080,000.00
273	Pada kegiatan pengembangan kurikulum SMK tiak dilengkapi dengan bukti transport sebesar Rp22.347.000		22,374,000.00		-			22,374,000.00
XCIII	**SMK NEGERI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018**	**700/136-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 18 November 2019)**	**2,472,000.00**		**2,472,000.00**			**-**
274	Terdapat kelebihan bayar honorarium pembantu pengurus barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.472.000,00		2,472,000.00		2,472,000.00	800,000.00	13-Aug-20	-
						912,000.00	14-Aug-20	
						760,000.00	13-Aug-20	
XCIV	**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV.KEP.BABEL TA.2018 DAN 2019**	**700/084-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 05 Agustus 2019)**	**2,800,000.00**		**2,800,000.00**			**-**
275	Terdapat pembayaran biaya penginapan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.800.000,00		2,800,000.00		2,800,000.00	1,400,000.00	29-Jul-19	-
						1,400,000.00	15-Jun-20	
XCV	**BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TA,2019**	**700/118-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Oktober 2019)**	**2,470,000.00**		**2,470,000.00**			**-**
276	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2.470.000,00		2,470,000.00		2,470,000.00	2,090,000.00	16-Jan-20	-
						380,000.00	16-Jan-20	
XCVI	**DINAS KESEHATAN PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/150-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 02 Desember 2019)**	**17,713,000.00**		**17,713,000.00**			**-**
277	Terdapat pembayaran gaji pokok, tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.633.000,00		15,633,000.00		15,633,000.00	658,000.00	30-Jan-20	

						658,000.00	30-Jan-20	
						4,800,000.00	30-Jan-20	
						658,000.00	30-Jan-20	
						500,000.00	27-Jan-20	
						665,000.00	2-Mar-20	
						1,160,000.00	3-Mar-20	
						1,214,100.00	23-Oct-20	
						500,000.00	15-Jun-20	
						500,000.00	23-Jul-20	
						500,000.00	26-Aug-20	
						500,000.00	3-Oct-20	
						500,000.00	20-Oct-20	
						500,000.00	13-May-20	
						1,000,000.00	16-Mar-20	
						820,000.00	11/23/2020	
						500,000.00	12/29/2020	
278	Terdapat pembayaran biaya perjalnan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.080.000,00		2,080,000.00		2,080,000.00	2,080,000.00	27-Jan-20	-
XCVII	**BIDANG SMA PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2019**	**700/133-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 15 November 2019)**	**9,147,702.00**		**-**			**9,147,702.00**
279	Terdapat selisih nilai pertanggungjawaban kegiatan pengembangan kurikulum SMA TA.2019 sebesar Rp5.599.702,00		5,599,702.00		-			5,599,702.00
280	Terdapat kelebihan pembayaran sewa kamar hotel/penginapan sebesar Rp2.550.000,00		2,550,000.00		-			2,550,000.00
281	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp998.000,00		998,000.00		-			998,000.00
XCVIII	**BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA TA.2018 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG**	**700/092-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 12 Agustus 2019)**	**7,759,000.00**		**#REF!**			**#REF!**
282	Terdapat belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.500.000,00		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,050.00	9/29/2020	-
283	Terdapat kelebihan pembayaran belanja dan jasa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.509.000,00		5,059,000.00		#REF!	5,095,000.00	29-Jan-20	#REF!
284	Terdapat pembayaran perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.200.000,00		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	29-Jan-20	-
XCIX	**SMAN WILAYAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018**	**700/137-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 04 November 2019)**	**7,065,482.00**		**4,160,000.00**			**2,905,482.00**
285	Terdapat honorarium pembantu pengurus barang pengguna tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.160.000,00		4,160,000.00		4,160,000.00	800,000.00	1/29/2021	-
						800,000.00	2/1/2021	
						1,040,000.00	2/1/2021	
						1,520,000.00	1/29/2021	
286	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada belanja pemeliharaan gedung/kantor di beberapa sekolahTA.2018 sebesar Rp2.905.482,00		2,905,482.00		-			2,905,482.00

C	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/138-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl.12 November 2019)**	**6,890,000.00**		**6,890,000.00**			**-**
287	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp6.890.000,00		6,890,000.00	1. Hayat, SH PPTK Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya Lapangan Rp1.600.000,00 2. Hayat, SH PPTK Pengutan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan Rp4.200.000,00 3. Sisa Sudah dibayarkan pada saat Pemeriksaan Rp. 1.090.000,00 (Wardiah, S.H.,M.H)	6,890,000.00	1,600,000.00	19-Feb-20	-
						4,200,000.00	19-Feb-20	
						750,000.00	25-Nov-20	
						340,000.00	25-Nov-20	
CI	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/164-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 23 Desember 2019)**	**4,344,080.00**		**4,344,080.00**			**-**
288	Terdapat Pembayaran Tunjangan suami tidak sesuai ketentuan sebesar Rp298.080,00		298,080.00		298,080.00	298,080.00	9-Mar-20	-
289	Terdapat Kelebihan Pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.346.000,00		3,346,000.00		3,346,000.00	752,000.00	9-Mar-20	-
						119,000.00	9-Mar-20	
						1,200,000.00	6-Jul-20	
						1,275,000.00	6-Jul-20	
290	Terdapat Kelebihan Pembayaran belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp700.000,00		700,000.00		700,000.00	200,000.00	9-Mar-20	-
						100,000.00	9-Mar-20	
						400,000.00	9-Mar-20	
CII	**DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/149-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 12 Desember 2019)**	**12,462,295.00**		**12,462,295.00**			**-**
291	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp1.155.000,00		1,155,000.00		1,155,000.00	1,155,000.00	3-Mar-20	-
292	Terdapat Kemahalan Harga Pengadaan Belanja Modal sebesar Rp9.052.295,00		9,052,295.00		9,052,295.00	9,052,295.00	3-Mar-20	-
293	Terdapat Pembayaran Honorarium yang tidak sesuai sebesar Rp1.690.000,00		1,690,000.00		1,690,000.00	1,690,000.00	3-Mar-20	-
294	Terdapat Kelebihan Pembayaran uang Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp160.000,00		160,000.00		160,000.00	160,000.00	3-Mar-20	-
295	Terdapat Pembayaran uang saku peserta yang tidak sesuai sebesar Rp285.000,00		285,000.00		285,000.00	285,000.00	3-Mar-20	-
296	Terdapat Pembelian Perlengkapan Peserta Kegiatan yang tidak wajar sebesar Rp120.000,00		120,000.00		120,000.00	120,000.00	3-Mar-20	-

CIII	**BIDANG SEKRETARIAT, PENDIDIKAN KHUSUS (PK), GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA NOVEMBER 2019 S.D. PEMERIKSAAN**	**700/131-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 18 November 2019)**	**10,984,948.00**		**10,984,948.00**			**-**
297	Terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp10.984.948,00		10,984,948.00		10,984,948.00	1,300,000.00	26-Feb-20	-
						1,945,000.00	26-Feb-20	
						677,300.00	13-Dec-19	
						1,540,000.00	26-Feb-20	-
						615,148.00	25-Feb-20	
						2,500,000.00	5-Dec-19	
						240,000.00	6-Dec-19	
						892,500.00	6-Dec-19	
						1,275,000.00	20-Feb-20	
CIV	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/132-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 14 Oktober 2019)**	**7,226,863.00**		**7,226,863.00**			**-**
298	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp458.700,00		458,700.00		458,700.00	458,700.00	18-Apr-20	-
299	Terdapat Kelebihan Kegiatan Pembayaran Makan Minum Pasien sebesar Rp1.268.163,00		1,268,163.00		1,268,163.00	500,000.00	13-May-20	-
						250,000.00	9/11/2020	
						518,163.00	10/3/2020	
300	Terdapat Pembayaran Belanja Biaya Transportasi Lokal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.500.000,00		5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	29-Apr-20	-
CV	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/184-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 20 Januari 2020)**	**4,462,286.15**		**#REF!**			**#REF!**
301	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA sebesar Rp4.462.286,15		4,462,286.15	Kepala Sekolah SMAN 2 dan SMAN 4 Pangkalpinang.	#REF!	4,462,286.15	22-Apr-20	#REF!
						2,231,465.47	22-Apr-20	
CVI	**BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIDANG ASET DAN BIDANG AKUNTANSI PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/162-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 20 Desember 2019)**	**135,000.00**		**135,000.00**			**-**
302	Terdapat Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan		135,000.00	Sutra Wijaya, S.E.,M.M	135,000.00	135,000.00	15-Jan-20	-
CVII	**DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/135-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 3 Desember 2019)**	**56,131,040.00**		**56,131,040.00**			**-**
303	Terdapat Bukti Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.579.950,00		3,579,950.00		3,579,950.00	1,677,500.00	12/5/2019	-
						1,902,450.00	12/5/2019	
304	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp52.551.090,00		52,551,090.00		52,551,090.00	195,000.00	11/27/2020	

						1,290,000.00	11/27/2020	
						5,544,000.00	12/1/2020	
						3,262,000.00	12/1/2020	
						4,750,000.00	11/27/2020	
						4,750,000.00	11/27/2020	
						91,000.00	11/27/2020	
						3,515,000.00	11/27/2020	
						1,710,000.00	11/30/2020	
						2,280,000.00	11/30/2020	
						2,280,000.00	11/30/2020	
						950,000.00	11/30/2020	
						2,850,000.00	11/30/2020	
						4,560,000.00	11/30/2020	
						2,850,000.00	11/30/2020	
						3,268,000.00	11/30/2020	
						1,042,000.00	11/30/2020	
						570,000.00	11/27/2020	
						1,140,000.00	11/27/2020	
						570,000.00	11/27/2020	
						570,000.00	11/27/2020	
						800,000.00	11/27/2020	
						400,000.00	11/30/2020	
						200,000.00	11/30/2020	
						170,000.00	11/30/2020	
						3,500,000.00	11/26/2020	
CVIII	**DAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/183-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 31 Desember 2019)**	**75,345.60**		**75,345.60**			**-**
305	Terdapat Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan		75,345.60	PPK dan PPTK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	75,345.60	75,345.60	8-Apr-20	-
C	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN 2020**		**453,610,637.08**		**#REF!**			**#REF!**
CIX	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.KEP.BABEL TA 2019**	**700/012-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 12 Januari 2020)**	**11,450,000.00**		**11,450,000.00**			**-**
306	Terdapat Kelebihan Pembayaran seragam batik cual sebesar Rp625.000,00		625,000.00		625,000.00	625,000.00	12-Feb-20	-
307	Terdapat Kelebihan Pembayaran honorarium sebesar Rp2.570.000,00		2,570,000.00		2,570,000.00	2,570,000.00	3-Jun-20	-
308	Terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp910.000,00		910,000.00		910,000.00	910,000.00	3-Jun-20	-
309	Terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp7.345.000,00		7,345,000.00		7,345,000.00	5,440,000.00	3-Jun-20	-
						1,905,000.00	3-Jun-20	
CX	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/056-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 Mei 2020)**	**450,000.00**	**-**	**450,000.00**			**-**
310	Terdapat Kelebihan Belanja Makan dan Minum sebesar Rp450.000,00		450,000.00		450,000.00	450,000.00	8-Jul-20	-

CXI	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/055-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 Mei 2020)**	**145,012,070.00**	**-**	**145,012,070.00**			**-**
311	Terdapat Kelebihan Pembayaran Uang Transportasi (Tiket Pesawat) pada beberapa Kegiatan sebesar Rp143.921.070,00		143,921,070.00	-	143,921,070.00	10,349,490.00	21-Apr-20	-
						6,055,400.00	21-Apr-20	
						3,292,200.00	21-Apr-20	
						44,624,300.00	21-Apr-20	-
						11,955,400.00	21-Apr-20	
						8,395,700.00	21-Apr-20	
						32,736,780.00	21-Apr-20	
						3,884,000.00	21-Apr-20	
						2,185,800.00	21-Apr-20	
						2,954,780.00	21-Apr-20	
						9,620,800.00	21-Apr-20	
						7,866,420.00	20-Apr-20	
312	Terdapat Bukti Pertanggungjawaban Biaya Transportasi (Tiket Pesawat) yang dibebankan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan perjalanan sebesar Rp1.091.000,00		1,091,000.00	-	1,091,000.00	1,091,000.00	21-Apr-20	-
CXII	**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP DINAS TENAGA KERJA PROV.KEP.BABEL ATAS INDIKASI DUGAAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN NORMA KERJA DAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KE PERUSAHAAN BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019 OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN,CALON PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANALISIS TENAGA KERJA YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN**	**700/07/IRBAN III -INPTD9 (Tgl. 21 Februari 2020)**	**97,920,000.00**		**97,920,000.00**			**-**
313	Memerintahkan secara tertulis Pengawas Ketenagakerjaan, Calon Pengawas Ketenagakerjaan dan Analisis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengembalikan atas kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah dengan total pengembalian sebesar Rp97.920.000,00		97,920,000.00	-	97,920,000.00	4,240,000.00	20-May-20	-
						4,200,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						3,760,000.00	20-May-20	
						3,760,000.00	20-May-20	
						2,000,000.00	20-May-20	
						2,200,000.00	20-May-20	
						2,200,000.00	20-May-20	
						2,000,000.00	20-May-20	
						2,200,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						4,200,000.00	20-May-20	
						3,000,000.00	20-May-20	
						1,800,000.00	20-May-20	
						2,560,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						4,200,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						5,400,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						4,200,000.00	20-May-20	
						440,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	

						3,600,000.00	20-May-20	
						4,240,000.00	20-May-20	
						2,000,000.00	20-May-20	
						1,800,000.00	20-May-20	
CXIII	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/052/INPTD/2020 (Tgl. 6 April 2020)**	**7,642,000.00**		**7,642,000.00**			**-**
314	Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp750.000,00		750,000.00		750,000.00	750,000.00	14-Apr-20	-
315	Terdapat Barang Milik Daerah Hasil Sisa Bongkaran Bangunan Belum Dilelang/Dimanfaatkan sebesar Rp6.892.000,00		6,892,000.00		6,892,000.00	6,892,000.00	14-Apr-20	-
CXIV	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/053/INPTD/2020 (Tgl. 2 Juni 2020)**	**2,090,000.00**		**2,090,000.00**			**-**
316	Terdapat kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp2.090.000,00		2,090,000.00		2,090,000.00	2,090,000.00	23-Jun-20	-
CXV	**DINAS KEHUTANAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/054/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 Mei 2020)**	**2,130,000.00**		**2,130,000.00**			**-**
317	Terdapat pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp2.130.000,00		2,130,000.00		2,130,000.00	2,130,000.00	9-Jul-20	-
CXVI	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/062/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 8 April 2020)**	**1,645,000.00**		**1,645,000.00**			**-**
318	Terdapat pembayaran honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS APBN tidak sesuai petunjuk teknis sebesar Rp2,580,000,00		1,645,000.00		1,645,000.00	1,645,000.00	14-Jul-20	-
CXVII	**DINAS PANGAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/052.a/INPTD/2020 (Tgl. 6 April 2020)**	**4,451,213.00**		**4,451,213.00**			**-**
319	Terdapat Pembayaran Biaya Penginapan dan Biaya Konsumsi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.230.000,00		1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00	10-Jul-20	-
320	Terdapat Kelebihan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 sebesar Rp2.625.310,00		2,625,310.00		2,625,310.00	2,625,310.00	10-Jul-20	-
321	Terdapat Kemahalan Harga Belanja Hadiah Lomba Kegiatan sebesar Rp595.903,00		595,903.00		595,903.00	595,903.00	10-Jul-20	-
CXVIII	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/024.a/INPTD/2020 (Tgl. 16 April 2020)**	**6,097,066.00**		**#REF!**			**#REF!**
322	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Kegiatan sebesar Rp2.101.500,00		2,101,500.00		2,101,500.00	250,000.00	15-Jul-20	-
						100,000.00	15-Jul-20	
						250,000.00	15-Jul-20	
						250,000.00	15-Jul-20	
						150,000.00	15-Jul-20	
						112,000.00	15-Jul-20	
						87,000.00	15-Jul-20	

						120,000.00	15-Jul-20	
						20,000.00	15-Jul-20	
						58,000.00	15-Jul-20	
						50,000.00	15-Jul-20	
						58,000.00	15-Jul-20	
						160,000.00	15-Jul-20	
						50,000.00	15-Jul-20	
						50,000.00	15-Jul-20	
						50,000.00	15-Jul-20	
						115,000.00	15-Jul-20	
						79,350.00	15-Jul-20	
						92,150.00	15-Jul-20	
323	Terdapat Kelebihan Pembayaran uang saku peserta sebesar Rp783.750,00		783,750.00		783,750.00	427,500.00	29-Apr-20	-
						308,750.00	29-Apr-20	
						47,500.00	29-Apr-20	
324	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 sebesar Rp2.301.816,00		2,301,816.00		#REF!	2,301,615.00	20-Jul-20	#REF!
						300.00	21-Jul-20	
325	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp910.000,00		910,000.00		910,000.00	260,000.00	29-Apr-20	-
						650,000.00	15-Jul-20	
CXIX	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/057.a/INPTD/2020 (Tgl. 30 April 2020)**	**380,000.00**		**380,000.00**			**-**
326	Terdapat Kelebihan Pembayaran uang Kediklatan sebesar Rp200.000,00		200,000.00		200,000.00	100,000.00	1-Sep-20	-
						100,000.00	4-Jun-20	
327	Terdapat Kelebihan Pembayaran uang Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp180.000,00		180,000.00		180,000.00	180,000.00	4-Jun-20	-
CXX	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN jUNI 2019 S.D. FEBRUARI 2020**	**700/068/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 30 Juni 2020)**	**2,617,500.00**		**2,617,500.00**			**-**
328	Terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp870.000,00		870,000.00		870,000.00	400,000.00	16-Oct-20	-
						470,000.00	17-Nov-20	
329	Terdapat Perbedaan Nilai Pembelian antara Nota Pembelian dengan Order dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) serta Berita Acara Pembayaran sebesar Rp357.500,00		357,500.00		357,500.00	357,500.00	7-Oct-20	-
330	Terdapat Belanja Pengisian Tabung Gas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp525.000,00		525,000.00		525,000.00	525,000.00	7-Oct-20	-
331	Terdapat kelebihan perbaikan jasa service perlengkapan dan peralatan kantor sebesar Rp865.000,00		865,000.00		865,000.00	865,000.00	7-Oct-20	-
CXXI	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/076/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 20 Juli 2020)**	**12,703,500.00**		**12,578,500.00**			**125,000.00**
332	Terdapat kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp1.876.250,00		1,876,250.00		1,876,250.00	1,520,000.00	28-Sep-20	-
						356,250.00	17-Jul-20	
333	Terdapat kelebihan Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp600.000,00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	12/18/2020	-
334	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp10.227.250,00		10,227,250.00		10,102,250.00	700,000.00	29-Sep-20	125,000.00

						2,644,700.00	11/2/2020	
						6,757,550.00	11/2/2020	
CXXII	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/077/INPTD/2020 (Tgl. 20 Juli 2020)**	**9,575,450.00**		**#REF!**			**#REF!**
335	Terdapat Pegawai yang Masih menerima Tunjangan Anak tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.918.650,00		3,918,650.00		#REF!	965,856.00	20-Jul-20	#REF!
						160,976.00	20-Jul-20	
						653,202.00	17-Jul-20	
						362,890.00	17-Jul-20	
						631,204.00	16-Jul-20	
						270,516.00	16-Jul-20	
						611,926.00	17-Jul-20	
						262,254.00	17-Jul-20	
336	Terdapat Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pejabat Fungsional		5,656,800.00		5,656,800.00	3,299,800.00	17-Jul-20	-
						2,357,000.00	17-Jul-20	
CXXIII	**BIRO KESRA SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/118/INPTD/2020 (Tgl. 28 Agustus 2020)**	**600,000.00**		**600,000.00**			**-**
337	Terdapat Kelebihan Pembayaran Cetak Sertifikat sebesar Rp600.000,00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	10-Dec-20	-
CXXIV	**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN JULI 2019 SAMPAI DENGAN JUNI 2020**	**700/082/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Agustus 2020)**	**403,750.00**		**403,750.00**			**-**
338	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp403.750,00		403,750.00		403,750.00	403,750.00	19-Aug-20	-
CXXV	**BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/082/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Agustus 2020)**	**8,069,538.00**		**8,069,538.00**			**-**
339	Terdapat Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp8.069.538,00		8,069,538.00		8,069,538.00	390,000.00	13-Oct-20	-
						119,307.00	13-Oct-20	
						560,231.00	13-Oct-20	
						150,000.00	13-Oct-20	
						830,000.00	11/17/2020	
						1,250,000.00	11/17/2020	
						990,000.00	11/17/2020	
						390,000.00	11/2/2020	
						960,000.00	11/2/2020	
						390,000.00	11/2/2020	
						780,000.00	11/4/2020	
						1,260,000.00	11/4/2020	
CXXVI	**BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/123/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 1 September 2020)**	**9,619,418.50**		**9,619,418.50**			**-**
340	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.823.655,00		5,823,655.00		5,823,655.00	5,823,655.00	30-Aug-20	-
341	Terdapat Kelebihan Bayar Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp3.600.000,00		3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	15-Oct-20	-

342	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda) di lingkungan Sekretariat Daerah Prov.Kep.Babel Tahun 2020 sebesar Rp195.763,50		195,763.50		195,763.50	195,763.50	15-Oct-20	-
CXXVII	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN MEI 2020**	**700/077.b/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 20 Juli 2020)**	**6,411,425.00**		**6,411,425.00**			**-**
343	Terdapat Kemahalan Harga sebesar Rp5.000.000,00		4,900,000.00	Zaiyuni, S.AP NIP 196810141989032017	4,900,000.00	2,500,000.00 500,000.00 1,900,000.00	11/13/2020 4/8/2020 12/7/2020	-
344	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.511.425,00		1,511,425.00		1,511,425.00	1,511,425.00	27-Jul-20	-
CXXVIII	**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROV.KEP.BABEL PERIODE PEMERIKSAAN AGUSTUS 2019 s.d. JULI 2020**	**700/124-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 1 September 2020)**	**3,261,875.00**		**3,261,875.00**			**-**
345	Terdapat Belanja Cetak Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp750.000,00		750,000.00		750,000.00	750,000.00	26-Aug-19	-
346	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2.511.875,00.		2,511,875.00		2,511,875.00	736,875.00 760,000.00 760,000.00 255,000.00	14-Sep-20 11-Sep-20 11-Sep-20 11-Sep-20	-
CXXIX	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/071/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 19 Juli 2020)**	**21,434,800.00**		**21,424,800.00**			**10,000.00**
347	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Jabatan sebesar Rp5.810.000,00		5,810,000.00		5,800,000.00	3,660,000.00 2,140,000.00	30-Jul-20 28-Jul-20	10,000.00
348	Terdapat Kelebihan bayar belanja sewa kamar hotel sebesar Rp600.000,00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	28-Jul-20	-
349	Terdapat Kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp750.000,00		750,000.00		750,000.00	750,000.00	3-Aug-20	-
350	Terdapat Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.274.800,00		2,274,800.00		2,274,800.00	2,274,800.00	12/29/2020	-
351	Terdapat pertanggungjawaban yang tidak sah untuk akomodasi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.000.000,00		12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	17-Dec-20	-
CXXX	**DINAS SOSIAL PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 01 NOVEMBER 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/169/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 12 November 2020)**	**908,112.00**		**908,112.00**			**-**
352	Terdapat kelebihan pembayaran pembelian BBM untuk mesin rumput sebesar Rp908.112,00		908,112.00		908,112.00	908,112.00	29-Dec-20	-
CXXXI	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD PADA DINAS KESEHATAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019- 14 OKTOBER 2020**	**700/155/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 23 Oktober 2020)**	**2,700,000.00**		**2,700,000.00**			**-**

353	Terdapat belanja jasa pemasangan spanduk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.700.000,00		2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	12/23/2020	-
CXXXII	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/150-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 14 Oktober 2020)**	**7,832,000.00**		**7,832,000.00**			**-**
354	Terdapat kelebihan bayar pada beberapa kegiatan sebesar Rp7.512.000,00		7,512,000.00	Ahmad Fauzan Syahzian, S.Si.	1,220,000.00	1,220,000.00	29-Jan-21	(320,000.00)
					2,000,000.00	2,000,000.00	15-Apr-21	
					2,000,000.00	2,000,000.00	30-Mar-21	
				Aswind, S.Sos	2,000,000.00	2,000,000.00	24-Mar-21	
					612,000.00	612,000.00	17-May-21	
355	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp320.000,00		320,000.00	Rolly Dwi Candra, S.Sos		320,000.00		-
CXXXIII	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN DESEMBER 2019 S.D. AGUSTUS 2020**	**700/148/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 14 Oktober 2020)**	**2,800,000.00**		**2,800,000.00**			**-**
356	Terdapat kelebihan pembayaran belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.800.000,00		2,800,000.00		2,800,000.00	2,000,000.00	10/13/2020	-
						800,000.00	10/13/2020	
CXXXIV	**BIRO ORGANISASI SETDA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 1 AGUSTUS 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/83/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Agustus 2020)**	**1,973,880.00**		**1,973,880.00**			**-**
357	Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Anak uang menjadi tanggungan dalam daftar gaji ASN sebesar Rp1.973.880,00		1,973,880.00		1,973,880.00	986,940.00	2/4/2021	-
						986,940.00	12/22/2020	
CXXXIV	**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/84/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Agustus 2020)**	**500,000.00**		**500,000.00**			**-**
358	Terdapat kelebihan pembayaran Biaya Penjilidan Buku sebesar Rp500.000,00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	12/22/2020	-
CXXXV	**SEKRETARIAT, BIDANG PEMBINAAN SMK DAN BIDANG GTK PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/163/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 November 2020)**	**3,928,225.00**		**3,928,225.00**			**-**
359	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja pada 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp3.928.225,00		3,928,225.00		3,928,225.00	400,000.00	1/28/2021	-
						1,350,000.00	12/28/2020	
						322,500.00	12/28/2020	
						1,350,000.00	12/28/2020	
						255,725.00	12/28/2020	
						250,000.00	12/28/2020	

CXXXVI	**BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMA DAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/164/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 November 2020)**	**28,757,548.00**		**16,142,048.00**			**12,615,500.00**
360	Terdapat kelebihan Pengeluaran Belanja yang dipertanggungjawabkan secara fungsional sebesar Rp28.757.548,00		28,757,548.00		16,142,048.00	16,142,048.00	1/28/2021	12,615,500.00
CXXXVII	**BIDANG YANKES DAN P2P DINAS KESEHATAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/149/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 14 Oktober 2020)**	**400,000.00**		**400,000.00**		**-**	**-**
361	Terdapat kelebihan Pembayaran Sewa Kamar sebesar Rp400.000,00		400,000.00		400,000.00	400,000.00	12/23/2020	-
CXXXVIII	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN BULAN DESEMBER 2019 S.D. BULAN SEPTEMBER 2020**	**700/142/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 30 September 2020)**	**18,072,863.58**		**18,072,863.58**		**-**	**-**
362	Terdapat Volume Pekerjaan dibawah Toleransi sebesar Rp18.072.864,00		18,072,863.58		3,226,674.37	3,226,674.37	3/22/2021	-
					2,843,263.21	2,843,263.21	3/15/2021	
					2,283,664.16	2,283,664.16	3/22/2021	
					930,163.58	930,163.58	3/5/2021	
					5,757,216.42	5,757,216.42	3/5/2021	
					3,031,881.84	3,031,881.84	3/22/2021	
CXXXIX	**DINAS PERTANIAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/191/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Desember 2020)**	**23,093,825.00**		**23,093,825.00**		**-**	**-**
363	Terdapat kelebihan pembayaran belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp6.215.000,00		6,215,000.00		6,215,000.00	600,000.00	3/12/2021	-
						5,615,000.00	3/12/2021	
364	Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan sebesar Rp16.878.825,00		16,878,825.00		16,878,825.00	16,878,825.00	3/12/2021	-
CXL	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/154/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 23 Oktober 2020)**	**3,912,500.00**		**3,912,500.00**		**-**	**-**
365	Terdapat kelebihan pembayaran belanja cetak Sertifikat peserta Workshop Penanganan Stunting Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp2.345.000,00		2,345,000.00		2,345,000.00	2,345,000.00	1/12/2021	-
366	Terdapat pembayaran honorarium panitia pelaksanan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Penyususnan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.567.500,00		1,567,500.00		1,567,500.00	1,068,750.00	1/11/2021	-
						498,750.00	1/15/2021	

CXLI	**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN OKTOBER 2019 S.D. OKTOBER 2020**	**700/175/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 19 November 2020)**	**40,000.00**		**40,000.00**		**-**	**-**
367	Terdapat Kelebihan Bayar Transport Tiket Pesawat sebesar Rp40.000,00		40,000.00		40,000.00	88,000.00	11/25/2020	
CXLII	**BIDANG PAJAK, BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN, BIDANG ANGGARAN, BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN SERTA BIDANG ASET BADAN KEUANGAN DAERAH PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/176/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 7 Desember 2020)**	**790,000.00**		**790,000.00**		**-**	**-**
368	Terdapat Kelebihan pengeluaran belanja kegiatan sebesar Rp790.000,00		790,000.00		790,000.00	790,000.00	11/16/2021	-
CXLIII	**INSPEKTORAT DAERAH PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/193/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 22 Desember 2020)**	**3,937,078.00**		**3,937,078.00**		**-**	**-**
369	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan keluarga sebesar Rp3.937.078,00		3,937,078.00		3,937,078.00	500,000.00	11/24/2021	
						2,000,000.00	12/7/2021	
						1,450,000.00	12/15/2021	
D	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN 2021**		**266,774,447.00**		**64,297,317.00**			**202,477,130.00**
CXLIV	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/124/INPTD/2021 (Tgl. 21 Juni 2021)**	**11,986,260.00**		**11,986,260.00**			**-**
370	Terdapat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Melebihi Batas Waktu Pembayaran Belum Diterima sebesar Rp11.836.000,00		11,836,000.00		11,836,000.00			-
						572,000.00	6/22/2021	
						22,880.00	6/22/2021	
						1,782,000.00	7/12/2021	
						71,280.00	7/12/2021	
						572,000.00	6/22/2021	
						11,440.00	6/22/2021	
						1,782,000.00	7/12/2021	
						71,280.00	7/12/2021	
						7,128,000.00	7/13/2021	
						285,120.00	7/13/2021	
371	Terdapat Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Belum dipungut sebesar Rp150.260,00		150,260.00		150,260.00			-
						131,100.00	8/27/2021	
						19,160.00	6/6/2021	

CXLV	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021**	**700/132/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 30 Juni 2021)**	**5,302,640.00**		**5,302,640.00**			**-**
372	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga sebesar Rp1.802.640,00		1,802,640.00	Riza	1,802,640.00	1,802,640.00	8/4/2021	-
373	Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan sebesar Rp3.500.000,00		3,500,000.00	Muhammad Trinanda, S.Si	3,500,000.00	3,500,000.00	8/4/2021	-
CXLVI	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP ADMINISTRASI BENDAHARAN PENGELUARAN DANA BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAG Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/128/LHPT/INPTD/2021 (Tgl. 23 Feb 2021)**	**20,906,268.00**					**20,906,268.00**
374	pajak yang terhutang senilai Rp20.906.268,00 ke Kas Negara		20,906,268.00					20,906,268.00
CXLVII	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/146/LHPT/INPTD/2021 (Tgl. 29 Juli 2021)**	**11,284,751.00**		**1,740,000.00**			**9,544,751.00**
375	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp741.000,00		741,000.00	Hadi Wibowo, S.SIT	740,000.00	740,000.00	9/16/2021	1,000.00
376	Terdapat Belanja Makan dan MInum Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.000.000,00		1,000,000.00	Megawati Soeroso, ST,M.Si	1,000,000.00	1,000,000.00	9/16/2021	-
377	Terdapat Pemyaran Penerangan Jalan dikenakan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.543.751,00		9,543,751.00	Hadi Wibowo, S.SIT	-			9,543,751.00
CXLVIII	**MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/145/INPTD/2021 (Tgl. 29 Juli 2021)**	**936,000.00**		**936,000.00**			**-**
378	Terdapat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Belum Disetor Ke Kas Daerah sebesar Rp900.000,00		900,000.00	Yosie Indrieaty, S.E. NIP 198005032007012007	900,000.00	932,000.00	6/23/2021	
379	Terdapat Denda Keterlambatan Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah Belum dipungut sebesar Rp36.000,00		36,000.00	Yosie Indrieaty, S.E. NIP 198005032007012007	36,000.00	32,000.00 4,000.00	11/28/2021	-
CXLIX	**DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/152/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 29 Juli 2021)**	**4,299,995.00**		**3,661,995.00**			**638,000.00**
380	Terdapat Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Melebihi Standar sebesar Rp2.025.000,00		2,025,000.00		2,025,000.00	2,025,000.00	7/8/2021	-
381	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Cetak sebesar Rp1.036.800,00		1,036,800.00		1,036,800.00	1,036,800.00	7/8/2021	-

382	Terdapat Pajak Yang belum di setor sebesar Rp600.195,00		600,195.00		600,195.00	600,195.00	7/9/2021	-
383	Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanaan Dinas sebesar Rp638.000,00		638,000.00	Yudiansyah, S.E	-			638,000.00
CL	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN SEPTEMBER 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/172/INPTD/2021 (Tgl. 31 Agustus 2021)**	**540,000.00**		**540,000.00**			**-**
384	Terdapat Belanja Makan dan minum Tidak dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp540.000,00		540,000.00	Riza Aryani,S.Sos,M.Si NIP.197501302002122006	540,000.00	540,000.00	10/4/2021	-
CLI	**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/173/INPTD/2021 (Tgl. 02 Agustus 2021)**	**67,291,400.00**		**22,183,400.00**			**45,108,000.00**
385	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Makanan dan Minumans sebesar Rp5.480.000,00		5,480,000.00	Ferdiyan Hermawan Loebis, S.E NIP 197701092002121004	5,480,000.00	5,480,000.00	22/11/2021	-
386	Terdapat Belanja Perlengkapan Peserta Tidak Sesuai Peruntukan sebesar Rp2.500.000,00		2,500,000.00	Ferdiyan Hermawan Loebis, S.E NIP 197701092002121004	2,500,000.00	2,500,000.00	22/11/2021	-
387	Terdapat Pembayaran Belanja Trasportasi Peserta Tidak Sesuai Standar Harga Satuan sebesar Rp6.000.000,00		6,000,000.00	Ferdiyan Hermawan Loebis, S.E NIP 197701092002121004	6,000,000.00	6,000,000.00	22/11/2021	-
388	Terdapat Pembayaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.203.400,00		8,203,400.00	Ferdiyan Hermawan Loebis, S.E NIP 197701092002121004	8,203,400.00	8,203,400.00	22/11/2021	-
389	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Paket Rapat dan Pertemuan sebesar Rp32.108.000,00		32,108,000.00					32,108,000.00
			6,398,000.00	Agus Hadi, SE., M.Si NIP 197808242002121006				
			25,710,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
390	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp4.000.000,00		4,000,000.00					4,000,000.00
			350,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
			350,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
			3,300,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
391	Terdapat Belanja Perlengkapan Peserta Tidak Sesuai Peruntukan sebesar Rp3.700.000,00		3,700,000.00					3,700,000.00
			1,500,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
			2,200,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				

392	Terdapat pembayaran Belanja Transportasi Darat Peserta Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.300.000,00		5,300,000.00					5,300,000.00
			2,650,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
			2,650,000.00	Anton S,Sos, M.Hum NIP 197012022002121003				
CLII	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. 2021**	**700/177/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 21 Juni 2021)**	**3,660,750.00**		**3,660,750.00**			**-**
393	Terdapat Kelebihan pembayaran pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp3.660.750,00		3,660,750.00	Alfian, S.E.,M.M	3,660,750.00	3,660,750.00	21/12/2021	-
CLIII	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/194/INPTD/2021 (Tgl. 31 Agustus 2021)**	**6,100,000.00**	**Bendahara Penerimaan a.n. Lusia Asnia, A.Md NIP.198208282015022001**	**6,100,000.00**			**-**
394	Terdapat kurang setor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp6.100.000,00		6,100,000.00	PT.Makro Jaya Lestari	2,440,000.00	2,440,000.00	10/29/2021	-
				PT.Jaya Alam Sentosa	2,440,000.00	2,440,000.00	10/28/2021	-
				CV.Sumber Alam Lestari	610,000.00	610,000.00	10/28/2021	-
				CV.Panen Baru	610,000.00	610,000.00	10/29/2021	-
CLIV	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021**	**700/230/INPTD/2021 (Tgl. 18 Oktober 2021)**	**660,000.00**		**660,000.00**	**660,000.00**		**-**
395	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pemasangan Wallpaper sebesar Rp660.000,00		660,000.00	Sopiana, S.E	660,000.00	660,000.00	01/12/2021	-
CLV	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. PEMERIKSAAN**	**700/234/INPTD/2021 (Tgl. 29 September 2021)**	**32,211,156.00**		**4,350,531.00**			**27,860,625.00**
396	Terdapat Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Tidak dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp750.000,00		750,000.00	Nugroho, S.IP NIP 199106102012061001				750,000.00
397	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium sebesar Rp2.716.250,00		1,311,000.00	Evi Anggela, A.Md. NIP 198501082010012016				1,311,000.00
			771,500.00	Nugroho, S.IP NIP 199106102012061001	1,405,250.00	1,405,250.00	08/12/2021	-
			308,750.00	Sahdan, M.M. NIP 198007192002121003				
			325,000.00	Yudistira, A.Md. NIP 198312222011012003				

398	Terdapat Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.150.000,00		1,150,000.00	Rolly Dwi Chandra, S.Sos NIP 196804192002121004	750,000.00	750,000.00	08/12/2021	400,000.00
399	Terdapat Pengeluaran Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tidak Dapat Memperlihatkan Bukti Fisik Barang sebesar Rp21.280.000,00		21,280,000.00	Rolly Dwi Chandra, S.Sos NIP 196804192002121004				21,280,000.00
400	Terdapat Pertanggungjawaban Pemeliharaan atau Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Tidak Sesuai dengan bidang Usaha dan Pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp4.119.625,00		4,119,625.00	Aswind, S.Sos 196804192002121004				4,119,625.00
401	Terdapat Kekurangan Volume atas beberapa Item Pekerjaan Fisik sebesar Rp2.195.281,00		2,195,281.00	PT. Pelita Sari	1,197,468.00	1,197,468.00	08/12/2021	-
				CV. Cikara Bumi Anjaya	997,813.00	997,813.00	08/12/2021	
CLVI	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. 2021**	**700/241/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 28 Oktober 2021)**	**2,100,000.00**		**2,100,000.00**			**-**
402	Terdapat Belanja Pada Kegiatan Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp2.100.000,00		2,100,000.00	Riswardi, S.Pd, M.Pd	2,100,000.00	2,100,000.00	10/12/2021	-
CLVII	**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENAGIHAN PEMBAYARAN OLEH GOOYEAR SENTRA SERVICE BAN BERUPA PERGANTIAN OLI,REPAIR DAN PENGECATAN 3 UNIT RODA EMPAT AKIBAT PENETIBAN DI SIJUK KABUPATEN BELITUNG**	**700/249/INPTD/2021 (Tgl. 29 September 2021)**	**67,880,000.00**					**67,880,000.00**
403	Polisi Pamong Praja Prov.Kep.Babel Melakukan koordinasi dengan Bakuda Prov.Kep.Babel untuk segera melakukan pembayaran kepada goodyear Sentra Service Cahaya Ban sebesar Rp67.880.000,00		67,880,000.00					67,880,000.00
CLVIII	**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/265/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 09 Desember 2021)**	**1,075,741.00**		**1,075,741.00**			**-**
404	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya TA. 2021 sebesar Rp 1.075.741,00		1,075,741.00		1,075,741.00	1,075,741.00	03/11/2021	-
CLIX	**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/268/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 22 November 2021)**	**1,281,250.00**					**1,281,250.00**
405	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.281.250,00		1,281,250.00					1,281,250.00

				Tri Muharman, S.H				1,031,250.00
				Harpin, S.H				250,000.00
CLX	**SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2020 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/313/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**5,890,000.00**					**5,890,000.00**
406	Terdapat Pembelian Barang dengan menggunakan Dana Hibah pada Yayasan Tri Bakti Darus Syafa'ah Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.500.000,00		5,500,000.00	Ahmad Shobirin				5,500,000.00
407	Terdapat Kelebihan Pembayaran Uang Transport sebesar Rp300.000,00		300,000.00	Ali Akbar, S.Kom				300,000.00
408	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Pembina Ekstrakulikuler sebesar Rp90.000,00		90,000.00	Effendi, M.Pd				90,000.00
CLXI	**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. OKTOBER 2021**	**700/314/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 28 Desember 2021)**	**5,857,500.00**					**5,857,500.00**
409	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Kegiatan Administrasi Perkantoran sebesar Rp2.091.000,00		2,091,000.00	Vina Agustin, S.E				2,091,000.00
410	Terdapat Kekurangan Volume atas Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Tahun 2021 sebesar Rp3.766.500,00		3,766,500.00	Direktur PT. Mandiri Tata Graha				3,766,500.00
CLXII	**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021**	**700/318/INPTD/2021 (Tgl. 31 Desember 2021)**	**429,256.00**					**429,256.00**
411	Terdapat Pembayaran Tunjangan Anak yang menjadi Tanggungan Dalam Daftar gaji Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp429.256.,00		429,256.00	Deri Arista				429,256.00
CLXIII	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN JUNI 2020 S.D. OKTOBER 2021**	**700/319/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**1,850,000.00**					**1,850,000.00**
412	Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.850.000,00		1,850,000.00	Muhammad Erisco, S.IP				1,850,000.00
CLXIV	**LEMBAGA KEMASYARAKATAN PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020.**	**700/320/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**5,987,300.00**					**5,987,300.00**
413	Terdapat kesalahan perhitungan pembayaran upah pekerjaan sebesar Rp600.000,00		600,000.00	Khusnul Anam.Lc				600,000.00
414	Terdapat kesalahan perhitungan pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan sebesar Rp5.387.300,00		5,387,300.00	Saripin, S.Th				5,387,300.00

CLXV	**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN .**	**700/321/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**1,081,080.00**					**1,081,080.00**
415	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak yang menjadi Tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp1.081.080,00		1,081,080.00	Dina Atikah				1,081,080.00
CLXVI	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN .**	**700/326/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 30 November 2021)**	**410,000.00**					**410,000.00**
416	Terdapat Pertanggungjawaban Ganda Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp410.000,00		410,000.00					410,000.00
CLXVII	**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/327/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 30 November 2021)**	**7,753,100.00**					**7,753,100.00**
417	Terdapat Belanja yang belum di dukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp1.380.000,00		1,380,000.00	Ardiansyah				1,380,000.00
418	Terdapat Kelebihan Bayar Belanja Pakaian Hari-hari tertentu sebesar Rp690.000,00		690,000.00	Hendrik Timora Sakti				690,000.00
419	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp5.683.100,00		5,683,100.00	Deden Supriyadi				5,683,100.00
E	**LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI 2018**	**77.C/LHP/XVIII.PPG/05/2018 (Tgl. 24 Mei 2018)**	**186,706,500.00**		**186,706,500.00**			**-**
1	Kelebihan pembayaran honorarium Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah pada (10) Sepuluh OPD senilai Rp.186.706.500		25,020,000.00	BPBD	25,020,000.00	25,020,000.00	11 Mei 2018	-
			24,907,500.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24,907,500.00	24,907,500.00	11 Mei 2018	-
			24,797,500.00	Dinas Kehutanan	24,797,500.00	24,787,500.00	11 Mei 2018	-
						10,000.00	20 Juli 2018	
			22,142,500.00	Dinas KUKM	22,142,500.00	22,142,500.00	15 Mei 2018	-
			20,081,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20,081,500.00	19,931,500.00	11 Mei 2018	-
						150,000.00	04 Juli 2018	-
			19,342,500.00	Disperindag	19,342,500.00	19,342,500.00	11 Mei 2018	-
			17,857,500.00	Dinas ESDM	17,857,500.00	3,810,000.00	11 Mei 2018	-
						3,897,500.00	11 Mei 2018	
						3,890,000.00	11 Mei 2018	
						3,130,000.00	11 Mei 2018	
						3,130,000.00	11 Mei 2018	
			12,895,000.00	DPMPTSP	12,895,000.00	12,895,000.00	11 Mei 2018	-
			11,737,500.00	RSJD	11,737,500.00	11,737,500.00	14 Mei 2018	-
			7,925,000.00	DLH	7,925,000.00	7,925,000.00	11 Mei 2018	-
F	**LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI 2019**	**87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 (Tgl. 20 Juni 2019)**	**1,600,000.00**		**1,600,000.00**			**-**

2	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2018 Belum Memadai		**1,600,000.00**	DKPust	**1,600,000.00**	1,600,000.00	18-Jun-19	-
G	**LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI 2020**	**86.B/LHP/XVIII.PPG/05/ 2019 Tgl. 18 Mei 2020**	**97,241,478.00**		**41,876,178.00**			**55,365,300.00**
3	Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada 22 Orang Tidak Sesuai Ketentuan		**60,691,400.00**		**5,326,100.00**	2,512,100.00 2,814,000.00	2-Jul-20 24-Jun-20	55,365,300.00
4	Perjalanan Dinas pada Tiga OPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah Senilai Rp36.550.078,00		**36,550,078.00**		**36,550,078.00**	28,525,000.00 2,867,900.00 4,253,000.00 904,178.00	4-Jun-20 5-Jun-20 16-Jun-20 2-Jun-20	-
H	**JUMLAH PEMBEBANAN TAHUN 2018 S.D 2021 (A + B + C + D + E + F + G)**		**2,332,101,915.33**	**-**	**#REF!**	**-**	**-**	**#REF!**
I	**TOTAL PEMBEBANAN s.d. TAHUN SEBELUMNYA**		**13,545,931,403.47**		**10,483,862,575.23**			**3,062,068,828.24**
	1. TEMUAN BPK (2001-2016)		11,068,770,223.96	-	8,874,782,049.52			2,193,988,174.44
	2. TEMUAN INPTD (2003-2017)		2,466,515,679.51	-	1,598,435,025.71			868,080,653.80
	3. TEMUAN ITJEN KEMENDAGRI (2008)		10,645,500.00	-	10,645,500.00			-
J	**TOTAL/AKUMULASI PEMBEBANAN s.d. TAHUN 2021 (H + I)**		**15,878,033,318.80**		**#REF!**	**-**		**#REF!**
	Saldo Penerimaan s.d. Desember 2021 atas pembebanan Tahun 2001 S.D 2017 (Pembebanan Tahun 2017 ke bawah) dan Total Saldo TGR				**630,553,268.80**			**#REF!**

PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI PIHAK LAIN/SWASTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URAIAN TEMUAN	NOMOR dan	NILAI TEMUAN (Rp.)	NAMA PENANGGUNG JAWAB	TTL PENGEMBALIAN (Rp.)	ANGSURAN PENGEMBALIAN (Rp.)		SISA/ SALDO TGR
A.	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 YANG BELUM DIBEBANKAN DI SK SEBELUMNYA**		**18,559,500.00**		**559,500.00**			**18,000,000.00**
I	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PUPR**	**700/132/LHP/INPT/2017 (Tgl. 02 Januari 2018)**	**18,559,500.00**		**559,500.00**			**18,000,000.00**
1	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Konsultansi Non Personil sebesar Rp.559.500,00		559,500.00		559,500.00	559,500.00	8/5/2020	-

2	Terdapat Pembayaran Biaya Tenaga Ahli Pekerjaan dan Biaya Tenaga Pendukung Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp.18.000.000,00.		18,000,000.00		-	-		18,000,000.00
B.	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG s.d. 31 DESEMBER 2018**		**546,659,560.71**		**495,920,678.33**			**50,738,882.38**
I	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**700/010-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 April 2018)**	**11,043,595.00**		**11,043,595.00**			**-**
3	Terdapat Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.043.595,00	TEMUAN NO.5	11,043,595.00		11,043,595.00	5,565,602.00	6/29/2018	-
						3,059,119.00	/06/2018	
						2,418,874.00	/06/2018	
II	**DABA KEU. PEMPROV. KEP. BANGKA BELITUNG PADA PEMKAB. BELITUNG TIMUR T.A. 2017**	**700/041-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Mei 2018)**	**3,625,691.73**	**-**	**3,625,691.73**			**-**
4	Terdapat belanja material pekerjaan pembuatan sumur bor tidak dapat dipertanggungjawabkan		3,625,691.73		3,625,691.73	3,625,691.73	8/2/2018	-
III	**DABA BOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMK/SLB DI WIL. KAB. BELITUNG T.A. 2017**	**700/030-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Mei 2018)**	**112,775,513.00**		**112,775,513.00**			**-**
5	Terdapat kekurangan volume pada beberapa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp8.382.863,00	TEMUAN NO. 1	8,382,863.00		8,382,863.00	2,337,405.00	7/27/2018	-
						3,930,458.00	7/27/2018	
						2,115,000.00	7/27/2018	
6	Terdapat kelebihan pembayaran pada bebrapa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp44.892.650,00	TEMUAN NO. 2	44,892,650.00		44,892,650.00	6,474,650.00	7/27/2018	
						4,968,000.00	7/27/2018	
						1,515,700.00	7/27/2018	
						6,650,000.00	7/27/2018	
						18,805,000.00	7/27/2018	
						10,779,300.00	7/27/2018	
7	Terdapat kelebihan pembayaran pada bebrapa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp7.300.000,00	TEMUAN NO. 3	7,300,000.00		7,300,000.00	4,300,000.00	7/27/2018	-
						3,000,000.00	7/27/2018	
8	Terdapat pembayaran ganda belanja bahan pemeliharaan taman sebesar Rp750.000,00		750,000.00		750,000.00	750,000.00	8/3/2018	-
9	Terdapat kekurangan volume pada beberapa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp44.700.000,00		44,700,000.00		44,700,000.00	10,000,000.00	7/27/2018	-
						16,200,000.00	7/27/2018	
						18,500,000.00	7/27/2018	
10	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan taman sebesar Rp1.500.000,00		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	7/27/2018	-
11	Terdapat belanja pemeliharaan gedung kantor yang jumlahnya tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,00		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	7/27/2018	-
12	Terdapat kekurangan volume pada beberapa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp1.800.000,00		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	7/27/2018	-
13	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan taman sebesar Rp100.000,00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	7/27/2018	-
14	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan taman sebesar Rp350.000,00		350,000.00		350,000.00	350,000.00	7/27/2018	-

IV	**DABA BOS DAN DANA PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN KBM PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG PADA KAB. BELITUNG TIMUR T.A. 2017**	**700/031-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Mei 2018)**	**1,800,000.00**		**1,800,000.00**			**-**
15	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp1.800.000,00	TEMUAN NO. 1	1,800,000.00		1,800,000.00	2,000,000.00	8/2/2018	
V	**DABA BOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMK/SLB DI WIL. KAB. BANGKA BARAT T.A. 2017**	**700/032-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 24 Mei 2018)**	**123,630,947.00**		**123,630,947.00**			**-**
16	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp1.226.500,00	TEMUAN 1	1,226,500.00		1,226,500.00	1,226,500.00	8/30/2018	-
17	Terdapat kemahalan harga dan kekurangan volume pekerjaan sebesar	TEMUAN 1	9,441,500.00		9,441,500.00	9,441,500.00	8/30/2018	-
18	Terdapat kemahalan harga dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada kegiatan pemeliharaan gedung dan taman sebesar Rp12.128.570,00	TEMUAN 1	12,128,570.00		12,128,570.00	9,265,455.00 2,863,115.00	8/31/2018 8/31/2018	-
19	Terdapat kekurangan volume pada belanja paket oerawatan/perbaikan WC siswa sebesar Rp600.000,00	TEMUAN 1	600,000.00		600,000.00	600,000.00	8/24/2018	-
20	Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada kegiatan pemeliharaan sebesar Rp4.200.000,00	TEMUAN 1	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	8/27/2018	-
21	Terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada belanja bahan baku bangunan sebesar Rp7.586.255,00	TEMUAN 2	7,586,255.00		7,586,255.00	7,586,255.00	8/27/2018	-
22	Terdapat kemahalan harga belanja meja kursi siswa sebesar Rp14.000.000,00	TEMUAN 2	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	8/27/2018	-
23	Terdapat kekurangan volume belanja bahan baku kurikulum kelas IX sebesar Rp276.000,00	TEMUAN 2	276,000.00		276,000.00	276,000.00	8/27/2018	-
24	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan meubelair sebesar Rp10.450.365,00	TEMUAN 1	10,450,365.00		10,450,365.00	10,450,365.00	8/23/2018	-
25	Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan u[ah yang tidak di bayar sebesar Rp3.755.000,00	TEMUAN 1	3,755,000.00		3,755,000.00	3,755,000.00	8/23/2018	-
26	Terdapat kekurangan volume pada belanja keramik sebesar Rp929.500,00	TEMUAN 1	929,500.00		929,500.00	929,500.00	8/23/2018	-
27	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada bebrapa kegiatan pemeliharaan taman sebesar Rp7.706.365,00	TEMUAN 2	7,706,365.00		7,706,365.00	7,706,365.00	9/13/2018	-
28	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada bebrapa kegiatan pemeliharaan gedung sebesar Rp8.330.892,00	TEMUAN 3	8,330,892.00		8,330,892.00	8,330,892.00	9/13/2018	-
29	Terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan sebesar Rp25.000.000,00	TEMUAN 2	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	28-Aug-18	-
30	Terdapat kekurangan volume belanja penyediaan bahan pemeliharaan konstruksi bangunan sebesar Rp18.000.000,00	TEMUAN 2	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	28-Aug-18	-

VI	**DINAS KEHUTANAN**	**700/034-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 28 Mei 2018)**	**35,268,055.00**		**35,268,055.00**			**-**
31	Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp35.268.055,00	TEMUAN 4	35,268,055.00		35,268,055.00	20,000,000.00 15,268,055.00	8/16/2018 11/22/2018	-
VII	**DANA BOS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN WIL. KAB. BANGKA SELATAN T.A. 2017**	**700/033-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 04 Juni 2018)**	**62,926,000.00**		**62,926,000.00**			**-**
32	Terdapat Belanja Barang Jasa pada Kegiatan peningkatan fungsi pelayanan KBM tidak sesuai ketentuan sebesar	TEMUAN No. 1	18,508,000.00		18,508,000.00	18,508,000.00	8/28/2018	-
33	Terdapat pembayaran Belanja seragam Kegiatan sekolah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.750.000,00	TEMUAN No. 1	9,750,000.00		9,750,000.00	4,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 500,000.00	8/24/2018 8/24/2018 8/24/2018 8/24/2018 8/24/2018 8/24/2018	-
34	Terdapat kelebihan pembayaran pembelian alat paratikum olahraga sebesar Rp4.000.000,00	TEMUAN No. 1	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	8/24/2018	-
35	Terdapat kelebihan pembayaran pembelian Kostum tari sebesar	TEMUAN No. 2	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	8/24/2018	-
36	Terdapat kekurangan volume pembelian barang /jasa sebesar Rp750.000,00	TEMUAN No. 1	750,000.00		750,000.00	750,000.00	8/7/2018	-
37	Terdapat kemahalan harga pembayaran meja kursi sebesar Rp12.000.000,00	TEMUAN No. 2	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	8/7/2018	-
38	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Veneu / Sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp4.000.000,00	TEMUAN No. 1	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	8/20/2018	-
39	Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan gedung sekolah sebesar Rp8.918.000,00	TEMUAN No. 2	8,918,000.00		8,918,000.00	8,918,000.00	8/20/2018	-
VIII	**DINAS PANGAN**	**700/047-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 25 Juni 2018)**	**15,000,800.00**	**-**	**15,000,800.00**			**-**
40	Terdapat kemahalan harga pekerjaan kandang pada kegiatan peralatan ternak sebesar Rp8.685.800,00	TEMUAN No. 13	8,685,800.00		8,685,800.00	5,700,000.00 2,985,800.00	11/22/2018 11/27/2018	-
41	Terdapat kemahalan harga ayam pada pengadaan peralatan ternak sebesar Rp2.175.000,00	TEMUAN No. 14	2,175,000.00		2,175,000.00	860,000.00 1,315,000.00	11/12/2018 11/22/2018	-
42	Terdapat pengadaan mesin tetas tidak dapat dimanfaatkan sebesar	TEMUAN No. 15	4,140,000.00		4,140,000.00	4,140,000.00	11/12/2018	-
IX	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**700/042-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 29 Juni 2018)**	**23,385,000.00**	**-**	**19,335,000.00**			**4,050,000.00**
43	Terdapat kelebihan Pembayaran pengadaan barang/jasa sebesar Rp3.964.000,00	TEMUAN No. 1	3,964,000.00		3,964,000.00	1,700,000.00 600,000.00 232,000.00 600,000.00 832,000.00	7/27/2018 7/27/2018 8/29/2018 8/29/2018 11/29/2018	-
44	Terdapat hutang perhitungan fihak ketiga (PFK) beberapa kegiatan belum disetor ke kas daerah	TEMUAN No. 3	5,921,000.00		1,871,000.00	335,000.00 748,500.00 787,500.00	5/12/2020 5/12/2020 5/12/2020	4,050,000.00
45	Terdapat kelebihan belanja barang/jasa sebesar Rp13.500.000,00	TEMUAN No. 7	13,500,000.00		13,500,000.00	12,000,000.00 1,500,000.00	8/29/2018 8/29/2018	-
X	**BIRO UMUM SETDA PROVINSI**	**700/062-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Agustus 2018)**	**52,171,700.00**		**15,994,400.00**			**36,177,300.00**
46	Terdapat kekurangan volume pekerjaan interior gedung kantor sebesar Rp36.177.300,00	TEMUAN No. 3	36,177,300.00		-	-		36,177,300.00

47	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (pembuatan kanopi kantor) sebesar Rp15.994.400,00	TEMUAN No. 4	15,994,400.00		15,994,400.00	15,994,400.00	10/11/2018	-
XI	**DANA HIBAH BANSOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG DI WIL.KAB. BANGKA BARAT TA 2017**	**700/081-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 September 2018)**	**7,825,000.00**		**7,825,000.00**			**-**
48	Terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat di yakin kebenaranya pada SMK muhammadiyah Muntok sebesar Rp4.030.000,00	TEMUAN No. 2	4,030,000.00		4,030,000.00	600,000.00	7/8/2019	-
						200,000.00	7/8/2019	
						2,520,000.00	7/8/2019	
						250,000.00	7/8/2019	
						460,000.00	7/19/2019	
49	Terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat di yakin kebenaranya pada Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Rp200.000,00	TEMUAN No. 2	200,000.00		200,000.00	200,000.00	7/8/2019	-
50	Terdapat volume pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMK Muhammadiyah Muntok sebesar Rp1.155.000,00	TEMUAN No. 3	1,155,000.00		1,155,000.00	800,000.00	7/8/2019	-
						80,000.00	7/8/2019	
						275,000.00	7/8/2019	
51	Terdapat volume pengadaan sarana dan prasarana sekolah Madrasah Aliyah Ikhlas Beramal sebesar Rp1.250.000,00	TEMUAN No. 3	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	7/9/2019	-
52	Terdapat kelebihan pembayaran pengadaan peralatan Marching Band sebesar Rp1.190.000,00	TEMUAN No. 6	1,190,000.00		1,190,000.00	1,190,000.00	7/18/2019	-
XII	**DANA HIBAH BANSOS PEMPROV KEP. BANGKA BELITUNG DI WIL.KAB. BANGKA BARAT TA 2017**	**700/082-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 14 September 2018)**	**3,250,000.00**	**-**	**3,250,000.00**			**-**
53	Terdapat bukti pertanggungjawaban keuangan pihak CV. Muara Konsultan yang tidak dapat diterima kebenarannya sebesar Rp3.250.000,00	TEMUAN No. 2	3,250,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00	12/26/2018	-
XIII	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**700/093-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 Oktober 2018)**	**5,052,675.00**		**5,052,675.00**			**-**
54	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan ged. kantor (Wisma Ranggam) sebesarRp3.682.635,00	TEMUAN No. 10	3,682,635.00		3,682,635.00	2,000,000.00	2/19/2019	-
						1,682,635.00	3/11/2019	
55	Terdapat kemahalan harga perlengkapan pakaian dinas harian sebesar Rp1.370.040,00	TEMUAN No. 11	1,370,040.00		1,370,040.00	1,370,040.00	1/31/2019	-
XIV	**DINAS PENDIDIKAN (BIDANG SMA DAN SMK)**	**700/100-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 05 November 2018)**	**13,228,313.43**		**7,500,000.00**			**5,728,313.43**
56	Terdapat sewa sound sintem kegiatan peningkatan kualitas kesiswaan SMA yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp7.500.000,00	TEMUAN No. 3	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	1/31/2019	-
57	Terdapat kekurangan volume pekerjaan Rehab SMK Negeri I Sungailiat sebesar Rp5.728.313.43	TEMUAN No. 5	5,728,313.43		-	-		5,728,313.43
XV	**DINAS PERTANIAN**	**700/092-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 15 November 2018)**	**12,800,000.00**		**12,800,000.00**			**-**
58	Terdapat kelebihan pembayaran Pekerjaan Pemasangan Pengeboran Air Manual sebesar Rp2.000.000,00	TEMUAN No. 2	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	5/7/2019	-
59	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan Tanaman sebesar Rp5.000.000,00	TEMUAN No. 3	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	4/30/2019	-

60	Terdapat kelebihan pembayaran belaja desinfektan Melebihi Ketentuan sebesar Rp5.800.000,00	TEMUAN No. 4	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	4/30/2019	-
XVI	**DINAS PUPR BIDANG BINA MARGA**	**700/111-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 03 Desember 2018)**	**7,276,300.00**	**-**	**7,276,300.00**			**-**
61	Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.276.300,00 pada kegiatan peningkatan jalan Parit Tiga- Tanjung RU dan hasil pekerjaan yang belum optimal	TEMUAN No. 3	7,276,300.00		7,276,300.00	7,276,300.00	1/24/2019	-
XVII	**RSJ DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/110-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 07 Desember 2018)**	**38,917,112.00**	**-**	**38,917,112.00**			**-**
62	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala T.A. 2017 dan T.A. 2018 sebesar Rp.16.989.983,00	TEMUAN No. 5	16,989,983.00		16,989,983.00			-
	a. kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor T.A.		9,240,000.00	CV. Ataya	9,240,000.00	9,240,000.00	8/15/2019	
	b. kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Ruang Rawat Rumah Sakit T.A. 2017		2,156,583.00	CV. Krensa Utama	2,156,583.00	2,156,583.00	3/18/2019	
	c. kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit T.A. 2018		5,593,400.00	CV. Trijaya Mandiri	5,593,400.00	5,593,400.00	3/22/2019	
63	Terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan pengadaan barang/ jasa T.A. 2017 dan kegiatan pemeliharaan T.A. 2018	TEMUAN No. 7	21,927,129.00		21,927,129.00			
	a. kelebihan pembayaran atas kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor RSJD T.A. 2018		19,260,000.00	PT. Madhava Maju Makmur	3,000,000.00	3,000,000.00	8/19/2019	
					4,000,000.00	4,000,000.00	9/20/2019	
					4,000,000.00	4,000,000.00	10/17/2019	
					4,000,000.00	4,000,000.00	11/20/2019	
					4,260,000.00	4,260,000.00	12/20/2019	
	b. kelebihan pembayaran atas kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor RSJD T.A. 2018		2,667,129.00	CV. Trijaya Mandiri	2,667,300.00	2,667,300.00	3/21/2019	
XVIII	**DINAS PUPR BIDANG SUMBER DAYA AIR**	**700/112-P4D/LHP/INPTD/2018 (Tgl. 07 Desember 2018)**	**16,682,858.55**	**-**	**11,899,589.60**			**4,783,268.95**
64	Terdapat Beberapa Pekerjaan Konstruksi Belum Optimal dan Kekurangan Volume Pekerjaan Pasangan Batu Belah Pembangunan Talud Air Nangka I Kota Pangkalpinang Tahun 2018 yang Dilaksanakan Oleh CV.Rova Berjaya Rp1.090.351,60	TEMUAN No. 1	1,090,351.60		1,090,351.60	1,090,351.60	3/13/2019	-
65	Terdapat Kekurangan Volume Pada Beberapa Pekerjaan Normalisasi /Saluran /Pengerukan Banjir Tahun 2017 yang Dilaksanakan Oleh CV.Darvin Jaya dan CV. Tri Putra Karya sebesar Rp2.258.631,00	TEMUAN No. 2	2,258,631.00		-	-		2,258,631.00
66	Terdapat Kekurangan Volume Pada Beberapa Pekerjaan Normalisasi/ Saluran/ Pengerukan Banjir Tahun 2017 yang Dilaksanakan Oleh CV.Darvin Jaya dan CV. Tri Putra Karya sebesar Rp2.524.637,00	TEMUAN No. 2	2,524,637.00		-	-		2,524,637.00

67	Terdapat Beberapa Pekerjaan Belum Optimal dan Kekurangan Volume Pekerjaan Normalisasi Saluran Banjir Dusun Satu Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Yang Dilaksanakan Oleh CV.Lintas Persada Rp3.402.330,00	TEMUAN No. 7	3,402,330.00		3,402,330.00	3,402,330.00	3/12/2019	-
68	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Normalisasi/Saluran/Pengerukan Banjir Dusun Sigambir Desa Duren Kabupaten Bangka Tahun 2018 yang Dilaksanakan Oleh CV.Upaya sebesar Rp7.406.908,00	TEMUAN No. 8	7,406,908.95		7,406,908.00	7,406,908.00	2/13/2019	0.95
C	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2019**		**457,761,544.23**		**413,191,081.84**			**44,570,462.39**
XIX	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/004.1-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Februari 2019)**	**2,841,234.95**		**2,841,234.95**			**-**
69	pembangunan ruang ATCS dilaksanakan tidak tepat waktu.		2,841,234.95		2,841,234.95	2,841,234.95	1/9/2019	
XX	**DINAS ENERGI DA SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/004.2-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Februari 2019)**	**54,738,950.00**		**54,738,950.00**			**-**
70	Terdapat satu buah lampu PJU yang tidak berfungsi (padam) pada pengerjaan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya		54,738,950.00		54,738,950.00	54,738,950.00	12/28/2019	-
XXI	**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/013-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 Februari 2019)**	**260,000.00**		**260,000.00**			**-**
71	Terdapat nilai kontrak pengadaan barang dan jasa melebihi harga perkiraan sendiri		260,000.00		260,000.00	260,000.00	3/15/2019	-
XXII	**DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**		**13,955,300.00**		**13,955,300.00**			**-**
72	Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pada beberapa penerima hibah bidang keagamaan tahun anggaran 2018 di wlayah Kabupaten Basel		13,955,300.00		13,955,300.00	8,490,000.00 2,050,000.00 3,415,300.00	5/31/2019 6/10/2019 5/24/2019	-
XXIII	**DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG**	**700/016-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**1,625,000.00**		**1,625,000.00**			**-**
73	Terdapat kemahalan harga satuan pada belanja pasang atap kanopi tangga		1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	6/28/2019	-
XXIV	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/035-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**15,833,000.00**		**13,833,000.00**			**2,000,000.00**

74	Terdapat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa		7,998,000.00		5,998,000.00	1,400,000.00	9/10/2019	2,000,000.00
						300,000.00	9/10/2019	
						300,000.00	9/10/2019	
						420,000.00	9/10/2019	
						2,000,000.00	9/10/2019	
						700,000.00	9/10/2019	
						430,000.00	9/5/2019	
						448,000.00	9/5/2019	
75	Terdapat bukti pertg.jawaban atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada SMKN 1 Badau Kabupaten Belitung		7,835,000.00		7,835,000.00	695,000.00	9/10/2019	-
						3,140,000.00	9/10/2019	
						4,000,000.00	9/10/2019	
XXV	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/046-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**22,910,840.00**		**22,310,840.00**			**600,000.00**
76	Kekurangan volume fisik barang sebesarRp2,526,000,00		2,526,000.00		1,926,000.00	1,430,000.00	8/30/2019	600,000.00
						496,000.00	8/30/2019	
77	Kekurangan volume pengadaan papan tulis sebesar Rp2,000,000,00		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	9/2/2019	-
78	Terdapat kelebihan pembayaran pemasangan besi hollow 4/4 cm sebesar		18,384,840.00		18,384,840.00	18,384,840.00	7/24/2019	-
XXVI	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN MEI 2018 S.D. APRIL 2019**	**700/054-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**164,310,664.89**		**149,060,264.89**			**15,250,400.00**
79	Terdapat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi sebesar Rp146,395,310,00		146,395,310.00		131,144,910.00	7,491,910.00	7/22/2019	15,250,400.00
						123,653,000.00	12/30/2019	
80	Terdapat kekurangan volume pekerjaan belanja modal Tahun Anggaran 2018sebesar Rp17,915,354,89		17,915,354.89		17,915,354.89	16,740,158.31	8/28/2019	-
						1,175,196.58	9/2/2019	
XXVII	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/053-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**1,613,670.00**		**1,613,670.00**			**-**
81	Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,613,670,00		1,613,670.00		1,613,670.00	1,613,670.00	8/19/2019	-
XXVIII	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/052-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 24 Mei 2019)**	**5,221,400.00**		**5,221,400.00**			**-**
82	Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5,221,400		5,221,400.00		5,221,400.00	2,732,200.00	8/8/2019	-
						2,489,200.00	9/13/2019	
XXIX	**BANTUAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**	**700/040-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**2,100,000.00**		**2,100,000.00**			**-**
83	Klebihan pembayaran bahan baku bangunan sebesar Rp2,100,000,00		2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	8/19/2019	
XXX	**DANA BOS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/045-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**4,789,000.00**		**4,789,000.00**			**-**
84	Terdapat kekurangan volume pengadaan buku untuk perpustakaan pada SMKN 1		2,200,000.00	SMKN Sungailiat sebesar Rp2.200.000,00	2,200,000.00	2,200,000.00	9/19/2019	-
			2,589,000.00	SLBN Sungailiat sebesar Rp2.589.000,00	2,589,000.00	2,589,000.00	9/24/2019	-

XXXI	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/041-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 26 April 2019)**	**1,537,500.00**		**1,537,500.00**			**-**
85	Terdapat kemahalan harga belanja barang/jasa sebesar Rp1.537.500,00		1,537,500.00		1,537,500.00	1,537,500.00	9/3/2019	-
XXXII	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/036-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**8,325,000.00**		**-**			**8,325,000.00**
86	Terdapat kelebihan pembayaran belanja gordyn sebesar Rp8.325.000,00		8,325,000.00		-			8,325,000.00
XXXIII	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR PROV.KEP.BABEL TA.2019**	**700/119-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Oktober 2019)**	**858,000.00**		**858,000.00**		**-**	**-**
87	Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pasangan talud bangunan plat deuker dan gorong-gorong sebesar Rp858.000,00 CV.Aditya Pranata		858,000.00		858,000.00	858,000.00	10/25/2019	-
XXXIV	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/093-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 12 Agustus 2019)**	**7,194,106.63**		**2,294,000.00**		**-**	**4,900,106.63**
88	Terdapat pelaksanaan pekerjaan bangunan konstruksi bangunan gudang tidak optimal dan kekurangan volume sebesar Rp4.900.106,63		4,900,106.63		-			4,900,106.63
89	Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp2.294.000,00		2,294,000.00		2,294,000.00	1,200,000.00	12/23/2019	-
						840,000.00	12/23/2019	
						254,000.00	9/4/2019	
XXXV	**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAB PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. AGUSTUS 2019**	**700/115-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 04 Oktober 2019)**	**25,681,446.20**		**25,681,446.20**		**-**	**-**
90	Terdapat kekurangan volume pekerjaan belanja modal ta.2018 sebesar Rp25.681.446,20		25,681,446.20		25,681,446.20	950,357.69	1/21/2020	
						1,224,066.00	1/9/2020	
						1,388,118.45	10/25/2019	
						16,137,274.50	1/20/2020	
						5,981,631.00	1/9/2020	
XXXVI	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.KEP.BABEL TA. NOVEMBER 2018 S.D. NOVEMBER 2019**	**700/116-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 14 Oktober 2019)**	**28,602,590.94**		**28,602,590.94**		**-**	**-**
91	Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp6.125.813,44		6,125,813.44		6,125,813.44	6,125,813.00	10/25/2019	43.56
						44.00	7/13/2020	
92	Terdapat pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor data center tidak sesuai kontrak sebesar Rp22.476.777,50		22,476,777.50		22,476,777.50	22,476,777.50	12/27/2019	-

XXXVII	**SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/122-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Oktober 2019)**	**1,374,758.53**		**1,374,758.53**		**-**	**-**
93	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.374.758,53		1,374,758.53		1,374,758.53	1,374,758.53	12/30/2019	-
XXXVIII	**BIRO UMUM SETDA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/087-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 09 Agustus 2019)**	**48,522,859.70**		**45,762,059.70**		**-**	**2,760,800.00**
94	Terdapat keterlambatan pembayaran retribusi jasa usaha dan denda sebesar Rp3.410.800,00		3,410,800.00		650,000.00	550,000.00	12/27/2019	2,760,800.00
						36,000.00	9/11/2019	
						24,000.00	9/11/2019	
						40,000.00	9/12/2019	
95	Terdapat volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp32.017.059,70		32,017,059.70		32,017,059.70	16,370,581.00	1/17/2020	
						1,072,500.00	1/20/2020	
						1,097,020.61	1/17/2020	
						1,756,764.72	1/17/2020	
						1,221,912.65	1/17/2020	
						8,572,659.48	1/17/2020	
						1,925,621.28	1/17/2020	
96	Terdapat kelebihan pembayaran belanja jasa service dan belanja suku cadang sebesar Rp13.095.000,00		13,095,000.00		13,095,000.00	13,095,000.00	1/20/2020	-
XXXIX	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TA.2019 BIDANG BINA MARGA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TA.2019**	**700/121-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 21 Oktober 2019)**	**36,177,752.77**		**27,387,597.01**			**8,790,155.76**
97	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp36.177.752,00		36,177,752.77		27,387,597.01	18,441,872.58	1/21/2020	8,790,155.76
						3,752,978.82	1/14/2020	
						149,745.61	1/6/2020	
						5,043,000.00	2/11/2020	
XL	**SEKRETARIAT DPRD PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/111-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 11 Oktober 2019)**	**1,805,469.62**		**1,805,469.62**			**-**
98	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perawatan gedung sebesar Rp1.805.469,62		1,805,469.62		1,805,469.62	157,729.02	6/18/2021	-
						1,647,740.60	6/18/2021	
XLI	**SMAN WILAYAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018**	**700/137-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 04 November 2019)**	**1,944,000.00**		**-**			**1,944,000.00**
99	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengecatan lapangan basket sebesar Rp1.944.000,00		1,944,000.00		-			1,944,000.00
XLII	**DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/017-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**3,048,000.00**	**-**	**3,048,000.00**			**-**
100	Terdapat pelaksanaan penggunaan bantuan hibah bidang keagaam tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		3,048,000.00		3,048,000.00	3,048,000.00	15/05/2019	-

XLIII	**DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERRINTAH PRVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/018-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**1,424,000.00**	**-**	**1,424,000.00**			**-**
101	Terdapat kelebihan pembayaran belanja baju tari kreasi		1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	14/05/2019	
102	Terdapat ketidaksesuaian perhitungan surat pertanggungjawaban belanja bahan material		424,000.00	-	424,000.00	424,000.00	12/06/2019	-
XLIV	**BANTUAN DABA HIBAH DAN BANSOS PADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**	**700/019-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 22 Maret 2019)**	**540,000.00**		**540,000.00**			**-**
103	Terdapat kelebihan pembayaran belanja materai		540,000.00	-	540,000.00	540,000.00	01/04/2019	-
XLV	**DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG**	**700/016-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 25 Maret 2019)**	**527,000.00**		**527,000.00**			**-**
104	Terdapat penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya		527,000.00		527,000.00	527,000.00	19/06/2019	-
D	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2020**		**612,027,291.05**		**572,434,171.05**			**39,593,120.00**
XLVI	**BIDANG PAJAK, BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/005/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 6 Januari 2020)**	**526,750.00**		**526,750.00**			**-**
105	Terdapat kelebihan pembayarn upah pekerjaan pemasangan kabel instalasi gedung kantor sebesar Rp526.750,00		526,750.00		526,750.00	526,750.00	2/12/2020	
LVII	**DAK ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/014/INPTD (Tgl. 23 Januari 2020)**	**30,600,000.00**		**30,600,000.00**			**-**
106	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pengadaan Alat- Alat labolatorium Pertanian (GC-ECD) sebesar Rp30.600.000,00		30,600,000.00		30,600,000.00	30,600,000.00	9/18/2020	-
XLVIII	**DAK ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/016-P4D/INPTD/2020 (Tgl. 27 Januari 2020)**	**8,606,301.03**		**8,606,301.03**			**-**
107	Terdapat Kelebihan Bayar Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik sebesar Rp8.606.301,03		8,606,301.03		8,606,301.03	1,199,650.26	9/29/2020	-
						1,640,982.40	9/28/2020	
						2,965,668.37	10/6/2020	
						2,800,000.00	4/9/2020	
XLIX	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/055-P4D/INPTD/2020 (Tgl. 4 Mei 2020)**	**3,845,000.00**		**3,845,000.00**			**-**

108	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.845.000,00		3,845,000.00		3,845,000.00	3,845,000.00	4/21/2020	-
LI	**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP PENERIMA DANA HIBAH DPW FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH KABUPATEN BANGKA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/002-LHPT/INPTD/2020 (Tgl. 12 Februari 2020)**	**343,621,056.00**		**343,621,056.00**			-
109	Terdapat saldo sebesar Rp343.621.056,00 yang berasal dari dana transfer PemProv Kep. Babel		343,621,056.00		343,621,056.00	267,893,600.00	4/3/2020	-
						75,727,456.00	4/3/2020	
LII	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/053/INPTD/2020 (Tgl. 20 Januari 2020)**	**150,000.00**		**150,000.00**			-
110	Terdapat kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas Tenaga Sopir sebesar Rp150.000,00		150,000.00		150,000.00	150,000.00	6/23/2020	-
LIII	**DINAS KEHUTANAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/054/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 4 Mei 2020)**	**10,375,000.00**		**10,375,000.00**			-
111	Terdapat kelebihan pembayaran pemasangan besi hollow 4/4 cm sebesar		10,375,000.00		10,375,000.00	10,375,000.00	6/26/2020	-
LIV	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN**	**700/076/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 20 Juli 2020)**	**2,401,120.00**		**-**			2,401,120.00
112	Terdapat Perbedaan harga Satuan dan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.401.120,00		2,401,120.00		-	-		2,401,120.00
LV	**DANA HIBAH APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/130/INPTD/2020 (Tgl. 14 September 2020)**	**5,135,200.00**		**4,105,200.00**			1,030,000.00
113	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik atas Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp1.030.000,00		1,030,000.00		-	-		1,030,000.00
114	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik pada beberapa penerima Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi Masyarakat wialayah Kabupaten Bangka sebesar Rp4.105.200,00		4,105,200.00		4,105,200.00	3,600,000.00	10/13/2020	-
						505,200.00	10/14/2020	
LVI	**DANA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/131/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 14 September 2020)**	**7,550,000.00**		**7,550,000.00**			-
115	Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5,221,400		7,550,000.00		7,550,000.00	7,550,000.00	10/14/2020	-

LVII	**PENERIMA BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019**	**700/136/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 21 September 2020)**	**1,885,000.00**		**1,885,000.00**			-
116	Terdapat Ketidaksesuaian antara dokumen Pertanggungjawaban Pemasangan Instalasi Titik Lampu dengan jumlah Fisik Yang terpasang sebesar Rp1.885.000,00		1,885,000.00		1,885,000.00	1,885,000.00	10/23/2020	-
LVIII	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGAP DARURAT COVID- 19 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**700/061.a-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 12 Juni 2020)**	**115,537,650.00**		**115,537,650.00**			-
117	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaan jasa konstruksi pada laboratorium kesehatan daerah provinsi kepulauan bangka belitung medical wall dan ceiling equipment sebesar Rp115.537.650,00		115,537,650.00		115,537,650.00	115,537,650.00	7/8/2020	
LIX	**PERSEDIAAN BARANG PENANGANAN COVID -19 BIDANG KESEHATAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/168-P4D/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 12 November 2020)**	**2,506,800.00**		**2,506,800.00**			-
118	Terdapat persediaan barang pakai habis yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.506.800,00		2,506,800.00		2,506,800.00	2,506,800.00	3/1/2021	-
LX	**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018**	**700/036-P4D/LHP/INPTD/2019 (Tgl. 19 April 2019)**	**8,325,000.00**		**-**			8,325,000.00
119	Terdapat kelebihan pembayaran belanja gordyn sebesar Rp8.325.000,00		8,325,000.00		-			8,325,000.00
LXI	**BADAN KEUANGAN DAERAH PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/174/INPTD/2020 (Tgl. 16 November 2020)**	**1,187,304.53**		**1,187,304.53**		-	-
120	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Halaman Kantor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp750.000,00		750,000.00		750,000.00	750,000.00	12/24/2021	-
121	Terdapat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp437.304,53		437,304.53		437,304.53	36,320.59	12/24/2021	-
						400,983.94	12/24/2021	
LXII	**SMA/SMKN NEGERI WILAYAH KANUPATEN BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/194/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 23 Desember 2020)**	**4,265,000.00**		**-**		-	4,265,000.00

122	PPK agar menyurati Direktur CV. Sepanjang Masa Bersama (Saudara Suhendri, SE) agar melakukan pemeliharaan jalan dengan membuang timbunan tanah pada drainase jalan depan asrama haji dan membuat sodetan (saluran) pada STA 00+250 agar ait tidak menggenang dan menyetor atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan dalam komlek (Asrama Haji) sebesar Rp4.264.980,00 atau dibulatkan Rp4.265.000,00 ke Kas Daerah Prov.Kep.Babel dan Copy Bukti Setorannya disampaikan ke Inspektorat Daerah		4,265,000.00		-			4,265,000.00
LXIII	**DINAS PERTANIAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/191/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 18 Desember 2020)**	**62,776,609.49**		**39,204,609.49**		-	23,572,000.00
123	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp13.927.609,49		13,927,609.49	Jamaludin, S.E NIP 197001162007011003	13,927,609.49	3,083,000.00	2/16/2021	
						5,393,722.74	2/16/2021	
						1,635,000.00	3/12/2021	
						1,580,000.00	1/7/2021	
						1,068,097.75	4/13/2021	
						1,167,798.00	4/20/2021	
124	Terdapat Kekurangan Volume dan bukti pembayaran yang tidak sah pada belanja jasa konsultansi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp48.849.000,00		48,849,000.00	Jamaludin, S.E NIP 197001162007011003	25,277,000.00	2,450,000.00	2/22/2021	23,572,000.00
						5,440,000.00	1/15/2021	
						3,187,000.00	1/11/2021	
						1,662,000.00	3/17/2021	
						8,331,000.00	11/18/2021	
						4,207,000.00	11/18/2021	
LXIV	**SMA/SMKN NEGERI WILAYAH KANUPATEN BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/194/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 23 Desember 2020)**	**513,500.00**		**513,500.00**		-	-
125	Terdapat Belanja Fotokopi dan Belanja Kertas Fotokopi F4 dan A4 melebihi Standar Harga Satuan sebesar Rp513.500,00		513,500.00		513,500.00	513,500.00	2/26/2021	-
LXV	**SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/187/LHP/INPTD/2020 (Tgl. 15 Desember 2020)**	**2,220,000.00**		**2,220,000.00**		-	-
126	Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp150.000,00		150,000.00		150,000.00	50,000.00	2/2/2021	-
						100,000.00	1/26/2021	
127	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pakaian Seragam Panitia PPDB sebesar Rp2.070.000,00		2,070,000.00		2,070,000.00	2,070,000.00	2/2/2021	-
E	**TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN 2021**		**414,825,751.27**	**-**	**112,289,084.66**	**-**	**-**	**302,536,666.61**

LXVI	**LAPORAN HASIL PROBITY AUDIT TERHADAP PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BELUM DI BAYARKAN KARENA PEKERJAAN MELEWATI TAHUN ANGGARAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/119/INPT/2021 (Tgl. 30 Juni 2021)**	**33,476,472.00**		**33,476,472.00**			**-**
128	Pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama 12 hari berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 05.PHO/JUT-BNGK/APBD/PERTANIAN-II tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-01-2021), dengan denda keterlambatan sebesar Rp33.476.472,00 {(1/1000 x Rp2.789.706.000,00) x 12 hari}		33,476,472.00	PT. KAMI KAWA MANDIRI	33,476,472.00	33,476,472.00	30/09/2021	-
LXVII	**LAPORAN HASIL PROBITY AUDIT TERHADAP PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BELUM DI BAYARKAN KARENA PEKERJAAN MELEWATI TAHUN ANGGARAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**	**700/120/INPT/2021 (Tgl. 30 Juni 2021)**	**32,301,765.00**		**32,301,765.00**			**-**
129	Pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama 45 hari berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 06.PHO/JUT-KLPA/APBD/PERTANIAN-II Tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-01-2021), dengan denda keterlambatan sebesar Rp32.301.765,00 {(1/1000 x Rp717.817.000,00) x 45hari		32,301,765.00	CV. PELITA SARI	32,301,765.00	32,302,000.00	12/10/2021	
LXVIII	**TERTENTU BANTUAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2020 DARI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA YAYASAN NURUL IMAN BUKIT KUALA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA**	**700/123/INPT/2021 (Tgl. 15 Juli 2021)**	**118,885,000.00**		**10,000,000.00**			**108,885,000.00**
130	penggunaan Dana Hibah Belanja Bahan Material yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp40.390.400,00**		40,390,400.00		10,000,000.00	10,000,000.00	8/16/2021	30,390,400.00
131	penggunaan Dana Hibah pembelian Bahan Material yang tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar **Rp70.444.600,00**		70,444,600.00					70,444,600.00
132	Kelebihan Pembayaran Upah Tenaga Pekerja dari nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar **Rp8.050.000,00**		8,050,000.00					8,050,000.00
LXIX	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN MEI 2020 S.D. MEI 2021**	**700/127/INPT/2021 (Tgl. 23 Juli 2021)**	**3,020,000.00**		**1,570,000.00**			**1,450,000.00**

133	Terdapat kelebihan Pembayaran Perbaikan Jasa Service Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp770.000,00		770,000.00			770,000.00	8/12/2021	-
134	Terdapat Kekurangan Penyetoran PPh pasal 21 dari pembayaran Yang diserahkan kepada Masyarakat/ pihak ketiga atas Pemenang Lomba Desa/Kelurahan, OPD, dan LKD Kabupaten/Kota sebesar Rp2.250.000,00		2,250,000.00			800,000.00	9/24/2021	1,450,000.00
LXX	**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/146/LHPT/INPTD/2021 (Tgl. 29 Juli 2021)**	**9,941,088.00**		**2,289,828.00**			**7,651,260.00**
135	Terdapat Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pengadaan Partisi Ruang Kerja Tahun 2020 sebesar Rp7.651.260,00		7,651,260.00	CV. Nazco	-			7,651,260.00
136	Terdapat Kelebihan Pemyaran Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp2.289.828,00		2,289,828.00	CV. Putra Bangka Berjaya	2,289,828.00	2,289,828.00	10/22/2021	-
LXXI	**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/173/INPTD/2021 (Tgl. 02 Agustus 2021)**	**2,169,747.86**					**2,169,747.86**
137	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas kekeurangan Volume pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.169.747,86		2,169,747.86	Maulana Apriyanto CV Berkah Ngeramenk				2,169,747.86
LXXII	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG BINA MARGA DAN BIDANG JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN BULAN OKTOBER 2020 S.D. JULI 2021 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN**	**700/176/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 20 Agustus 2021)**	**1,191,325.23**		**-**			**1,191,325.23**
138	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air (mekanik) 23,79 m3 dengan senilai Rp1.191.325,23		1,191,325.23					1,191,325.23
LXXIII	**DANA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021**	**700/229/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 18 Oktober 2021)**	**20,900,019.66**		**20,000,019.66**			**900,000.00**
139	Denda Keterlambatan sebesar Rp20.000.019,66 Belum Dibayar		20,000,019.66		20,000,019.66	20,000,019.66	28/12/2021	-

140	Laporan Hasil Akhir dan Back Up Data Kegiatan Pembangunan Masjid Asrama Haji Transit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tidak dibuat sehingga Terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp900.000,00		900,000.00					900,000.00
LXXIV	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021**	**700/236/INPTD/2021 (Tgl. 29 September 2021)**	**4,696,000.00**		**4,696,000.00**			**-**
141	Terdapat Belanja Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp696.000,00		696,000.00		696,000.00	696,000.00	11/11/2021	-
142	Terdapat Kemahalan Harga Pekerjaan Pasangan Kawat Serangga Rangka Alumunium pada Kegiatan Pemeliharaan/ Pemanfaatan Loteng Kantor sebesar Rp4.000.000,00		4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	11/11/2021	-
LXXV	**BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS DI KABUPATEN BELITUNG**	**700/255/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 17 November 2021)**	**9,168,233.52**		**7,955,000.00**			**1,213,233.52**
143	Terdapat Kesalahan Perhitungan Upah Pekerja pada Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantrean Baitul Qur'an sebesar Rp2.850.000,00		2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	27/12/2021	-
144	Terdapat Kekurangan Volume pada Kegiatan Pembangunan Masjid Baitul Hijrah Gunung Payung sebesar Rp5.105.000,00		5,105,000.00		5,105,000.00	5,105,000.00	27/12/2021	-
145	Terdapat Kekurangan Volume pada Kegiatan Pekerjaan Perawatan Gedung Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.213.233,52		1,213,233.52					1,213,233.52
LXXVI	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN LINGKAR TIMUR; REBO-TANJUNG PESONA-JELITIK-SIMPANG PERAHU PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PUPRPRKP) PROV.KEP.BABEL KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA PINJAMAN PT.SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**	**700/257/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 21 November 2021)**	**19,662,300.00**		**-**			**19,662,300.00**
146	Terdapat Kelebihan Bayar Pekerjaan Laston Lapis Aus (ACWC) dari STA 0+378 s.d. STA6+500 sebesar Rp14.976.100,00		14,976,100.00					14,976,100.00
147	Terdapat Kelebihan Bayar Pekerjaan Lapis Antara (ACBC) dari STA 0+685 s.d. STA6+500 sebesar Rp4.686.200,00		4,686,200.00					4,686,200.00
LXXVII	**PENERIMA BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKAT DAN BANTUAN SOSIAL WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/229/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**3,266,000.00**		**-**			**3,266,000.00**

148	Terdapat Saldo Dana Penggunaan Dana Hibah di Rekening Bank Lembaga Daarul Jannah Air Baru Air Gegas sebesar Rp200.000,00		200,000.00					200,000.00
149	Terdapat Pembelian Bahan Material Tidak Sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.760.000,00		2,760,000.00					2,760,000.00
150	Terdapat Kekurangan Volume Belanja Bahan Material sebesar Rp181.000,00		181,000.00					181,000.00
151	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja sebesar Rp125.000,00		125,000.00					125,000.00
LXXVIII	**BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/284/INPTD/2021 (Tgl. 22 November 2021)**	**126,554,300.00**		**-**			**126,554,300.00**
152	Terdapat Penggunaan Dana Hibah Bidang Pendidikan yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) sebesar Rp4.902.550,00		4,902,550.00					4,902,550.00
153	Terdapat sisa Anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp116.808.000,00		116,808,000.00					116,808,000.00
154	Terdapat kelebihan pembayaran upah pekerjaan pengecatan dinding tampak luar kelas sebesar Rp2.373.750,00		2,373,750.00					2,373,750.00
155	Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemasangan saluran keliling bangunan sebesar Rp2.470.000,00		2,470,000.00					2,470,000.00
LXXIX	**BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS DAN BANTUAN SOSIAL YANG TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA**	**700/267/INPTD/2021 (Tgl. 22 November 2021)**	**20,414,000.00**		**-**			**20,414,000.00**
156	Terdapat ketidaksesuaian perhitungan surat pertanggungjawaban belanja sebesar Rp254.000,00		254,000.00					254,000.00
157	Terdapat sisa penggunaan Dana Hibah pada Yayasan Al Falah Bangka Indonesia sebesar Rp20.160.000,00		20,160,000.00					20,160,000.00
LXXX	**KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/311/LHP/INPTD/2021 (Tgl. 23 Desember 2021)**	**4,000,000.00**		**-**			**4,000,000.00**
158	Terdapat Kekurangan Volume Pasangan Daun Pintu sebanyak 8 (delapan) buah		4,000,000.00	H. Ahmad Romli, Lc				4,000,000.00
LXXXI	**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**	**700/310/INPTD/2021 (Tgl. 29 November 2021)**	**5,179,500.00**					**5,179,500.00**
159	Hibah Pembangunan Nasjid sebesar Rp2.455.000,00		2,455,000.00	Ketua Yayasan Nurul Ikhsan Simpang Tempilang				2,455,000.00
160	Bahan Naterial tidak terpasang sebesar Rp2.724.500,00		2,724,500.00	Ketua Lembaga Mesjid Nurul Iman Desa Terentang				2,724,500.00

F	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI 2018	77.C/LHP/XVIII.PPG/05/2018 (Tgl. 24 Mei 2018)	2,396,596,557.00		#REF!			#REF!
1	Kelebihan Pembayaran Biaya Personil dan Biaya Non Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Perhubungan Senilai Rp118.780.000,00	Penyusunan rencana induk lalu lintas angkutan jalan	93,430,000.00	DISHUB	93,430,000.00	93,430,000.00	11 Mei 2018	-
		Survei fasilitas keselamatan jalan	25,350,000.00		25,350,000.00	25,350,000.00	11 Mei 2018	-
2	Kelebihan Pembayaran Biaya Personil dan Non Personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Senilai Rp45.244.700,00		45,244,700.00	PT Daya Cipta Dianrancana Unang Sunarya	5,000,000.00	5,000,000.00	26-Jul-18	40,244,700.00
3	Kelebihan Pembayaran Biaya Non Personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pelabuhan dan Industri Sadai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp92.799.100,00		92,799,100.00	PT Munusa Kreasi Nusantara	15,000,000.00	5,000,000.00	26-Jul-18	77,799,100.00
						10,000,000.00	3-Jan-20	
4	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Senilai Rp30.168.000,00		30,168,000.00		30,168,000.00	2,168,000.00	11-May-17	-
						28,000,000.00	11-May-17	
5	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp72.527.000,00	Pembangunan jalan komplek Brimob Bangka Belitung	72,527,000.00		72,527,000.00	66,015,000.00	6-Jul-17	-
		Pengaspalan jalan Klenteng Sheng Mu Miao				6,512,000.00	16-Jul-17	
6	Kekurangan Volume atas 21 Paket		7,016,000.00	PT. BHSC	#REF!	10,000.00	5-May-18	#REF!
						7,013,048.73	14-May-18	
			48,124,000.00	PT. KMN	48,124,000.00	48,124,000.00	14-May-18	-
			8,548,000.00	PT. BPK	8,548,000.00	8,548,000.00	14-May-18	-
			12,185,000.00	PT. KB	12,185,000.00	12,185,000.00	15-May-18	-
			37,257,000.00	PT. LIM	37,257,000.00	37,257,000.00	6-Jul-18	-
			122,682,000.00	PT. KMN	122,682,000.00	122,682,000.00	6-Jul-18	-
			29,854,000.00	PT. BPK	29,854,000.00	29,854,000.00	6-Jul-18	-
			68,881,000.00	PT. BCK	68,881,000.00	68,881,000.00	6-Jul-18	-
			24,029,000.00	PT. SMA	24,029,000.00	24,029,000.00	10-Jul-18	-
			22,151,000.00	PT. ABP	22,151,000.00	22,151,000.00	10-Jul-18	-
			73,175,000.00	PT. LIM	73,175,000.00	73,175,000.00	11-Jul-18	-
			25,072,000.00	PT. BCK	25,072,000.00	25,072,000.00	11-Jul-18	-
			40,223,000.00	PT. KMN	40,223,000.00	40,223,000.00	11-Jul-18	-
			20,996,000.00	PT. KMN	20,996,000.00	20,996,000.00	11-Jul-18	-
			76,238,000.00	PT. KMN	76,238,000.00	76,238,000.00	11-Jul-18	-
			27,030,000.00	PT. KMN	27,030,000.00	27,030,000.00	11-Jul-18	-
			23,360,000.00	PT. AKI	23,360,000.00	23,360,000.00	16-Jul-18	-
			54,433,000.00	PT. BRP	54,433,000.00	54,433,000.00	17-Jul-18	-
			17,343,000.00	PT. BCA	17,343,000.00	17,343,000.00	17-Jul-18	-
			42,026,000.00	PT. BAB	42,026,000.00	42,026,000.00	23-May-18	-
			20,087,000.00	PT. BCP	20,087,000.00	20,087,000.00	24-May-18	-
7	Kekurangan Volume atas 8 Paket Pembangunan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp434.276.000,00		23,203,000.00	PT. KMN	23,203,000.00	23,203,000.00	1-Jul-18	-
			72,510,000.00	PT. KMN	72,510,000.00	72,510,000.00	9-Jul-18	-
			22,063,000.00	PT. KMN	22,063,000.00	22,063,000.00	11-Jul-18	-
			137,165,000.00	PT. BCK	137,165,000.00	137,165,000.00	11-Jul-18	-
			29,157,000.00	PT. KMN	29,157,000.00	29,157,000.00	11-Jul-18	-
			31,972,000.00	PT. KMN	31,972,000.00	31,972,000.00	11-Jul-18	-
			38,162,000.00	PT. KMN	38,162,000.00	38,162,000.00	11-Jul-18	-
			80,044,000.00	PT. KMN	80,044,000.00	80,044,000.00	17-Jul-18	-
8	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan		44,007,000.00	PT Sumber Alam Sejahtera	30,000,000.00	5,000,000.00	30-Jul-18	14,007,000.00
						10,000,000.00	1-Aug-18	

	Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp44.007.000,00					15,000,000.00	27-Aug-19	
9	Kesalahan Penganggaran dan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Dermaga Polair Kawasan Air Anyir pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Senilai Rp2.429.000,00		2,429,000.00	DINAS PERKIM	2,429,000.00	2,429,000.00	11-May-18	-
10	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (DAK) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Senilai Rp73.455.000,00		73,455,000.00	RSJD	73,455,000.00	73,455,000.00	11-May-18	-
11	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemantapan Daerah landasan Pacu bandara H.A.S. Hanandjoeddin Timbunan Tanah Pilihan (Lanjutan) Dinas Perhubungan Senilai Rp105.504.000,00		105,504,000.00	DISHUB	105,504,000.00	105,504,000.00	23-Jul-18	-
12	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (Lanjutan) pada Dinas Perhubungan Senilai Rp387.988.000,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dipungut Senilai Rp598.295.424,00		19,757,000.00	*Harga satuan pekerjaan lama yang tidak sesuai ketentuan*	19,757,000.00	19,757,000.00	23-Jul-18	-
			368,231,000.00	*Kurang volume pembangunan gedung VIP bandar udara depati amir*	368,231,000.00	368,231,000.00	23-Jul-18	-
13	Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung VIP Bandar Udara Depati Amir (Lanjutan) pada Dinas Perhubungan senilai Rp114.610.000,00		114,610,000.00	CV. Candra Pratama	27,104,000.00	5,000,000.00	20-Jul-18	87,506,000.00
						20,000,000.00	22-Feb-19	
						1,000,000.00	13-May-19	
						500,000.00	3-Jun-20	
						604,000.00	19-Oct-20	
14	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas Nama Sdr. S pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senilai Rp49.414.757		49,414,757.00	s	-	-		49,414,757.00
15	Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) atas Penggunaan		24,684,000.00	SEKRETARIAT DPRD	24,684,000.00	1,343,000.00	23 Juli 2018	-
						1,343,000.00	25 Juli 2018	
						308,000.00	26 Juli 2018	
						6,160,000.00	07 Agustus 2018	
						1,343,000.00	25 Juli 2018	
						1,651,000.00	20 Desember 2018	
						3,134,000.00	20 Desember 2018	
						3,134,000.00	20 Desember 2018	
						3,134,000.00	20 Desember 2018	
						3,134,000.00	2 Januari 2019	
G	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI 2019**	**87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 (Tgl. 20 Juni 2019)**	**834,077,000.00**		**834,077,000.00**			**-**
16	Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan serta Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kurang Volume Senilai Rp323.902.000,00		**323,902,000.00**		**323,902,000.00**			-
			44,662,000.00	PT. BPK		44,662,000.00	28-Jun-19	
			9,222,000.00	PT. BHSC		9,222,000.00	27-Jun-19	
			44,934,000.00	PT. HA		44,934,000.00	27-Jun-19	
			78,411,000.00	PT. Peduli Bangsa		78,411,000.00	13-Aug-19	
			6,867,000.00	PT. PB		6,867,000.00	13-Aug-19	
			24,753,000.00	PT. BiPK		24,753,000.00	27-Jun-19	
			115,053,000.00	PT. ABP		115,053,000.00	25-Jul-19	
17	Paket Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Kurang Volume Senilai Rp341.190.000,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp136.960.000,00		**478,150,000.00**		**478,150,000.00**			-
			341,190,000.00	PT. PG		68,000,000.00	19-Jul-19	
						68,000,000.00	6-Sep-19	
						68,000,000.00	4-Oct-19	
						68,000,000.00	8-Nov-19	
						69,190,000.00	6-Dec-19	

			136,960,000.00	PT. PG		136,960,000.00	5-Jul-19	
18	Dua Paket Pekerjaan Bangunan Gedung pada Dua Organisasi Perangkat Daerah Kurang Volume senilai Rp32.025.000,00		**32,025,000.00**		**32,025,000.00**			-
			16,205,000.00	PT. Panen Jaya Sepasang		16,205,000.00	22-Jul-19	
			15,820,000.00	CV. Pelita Sari		15,820,000.00	5-Jul-19	
H	**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI 2020**		**611,154,160.00**		**611,154,160.00**			**-**
	LHP Belanja Infrastruktur TA 2019	**No.86.B/LHP/XVIII.PPG/05/ 2019 tgl 18 Mei 2020**	**450,051,000.00**		**450,051,000.00**			**-**
19	Kekurangan Volume atas 17 Paket		**322,862,000.00**		**322,862,000.00**			-
			40,208,000.00	PT Lembawai Indah Makmur		40,208,000.00	28-Feb-20	
			2,027,000.00	PT Bahana Pratama Konstruksi		2,027,000.00	10-Feb-20	
			69,864,000.00	PT Sinar Matahari Abadi		69,864,000.00	3-Feb-20	
			20,385,000.00	PT Bahana Pratama Konstruksi		20,385,000.00	5-Feb-20	
			7,361,000.00	PT Fajarindah Satyanugraha		7,361,000.00	7-Feb-20	
			7,276,000.00	PT Artha Karya Internusa		7,276,000.00	3-Feb-20	
			5,565,000.00	PT Anugrah Bakti Persada		5,565,000.00	3-Feb-20	
			46,506,000.00	PT Barito Rajawali Permai		46,506,000.00	28-Feb-20	
			17,457,000.00	PT Karya Mulia Nugraha		17,457,000.00	10-Feb-20	
			7,826,000.00	PT Fajarindah Satyanugraha		7,826,000.00	5-Feb-20	
			15,222,000.00	PT Babelland		15,222,000.00	26-Feb-20	
			15,398,000.00	PT Besea Construction		15,398,000.00	5-Feb-20	
			2,660,000.00	PT Artha Karya Internusa		2,660,000.00	29-Jan-20	
			4,831,000.00	CV Sepanjang Masa Bersama		4,831,000.00	5-Feb-20	
			3,400,000.00	PT Anugrah Bakti Persada		3,400,000.00	5-Feb-20	
			4,817,000.00	PT Sinar Matahari Abadi		4,817,000.00	5-Feb-20	
			52,059,000.00	PT Bina Mulya Lampung		52,059,000.00	3-Mar-20	
20	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Junction – Membalong Program Hibah Nasional Jalan Daerah (PHNJD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp61.973.000,00		**61,973,000.00**		**61,973,000.00**			-
			41,071,000.00	PT Sinar Matahari Abadi		41,071,000.00	4-Feb-20	
			11,722,000.00	PT Karya Mulia Nugraha		11,722,000.00	5-Feb-20	
			9,180,000.00	PT Billiton Hero Sukses Cemerlang		9,180,000.00	11-Feb-20	
21	Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Konstruksi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp6.393.000,00		**6,393,000.00**		**6,393,000.00**			-
			1,106,000.00	CV Kami Kawa		1,106,000.00		
			3,422,000.00	CV Lintas Persada		3,422,000.00	22-Jul-19	
			1,865,000.00	CV Ilham Lestari		1,865,000.00	5-Jul-19	
22	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Senilai		6,272,000.00	CV Pelita Sari	6,272,000.00	6,272,000.00	3-Feb-20	-
23	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp52.551.000,00		**52,551,000.00**		**52,551,000.00**			-
			5,000,000.00	PT Puri Dimensi		5,000,000.00	3-Feb-20	
			1,050,000.00	CV Imaya Consulting Engineers		1,050,000.00	12-Feb-20	
			44,500,000.00	CV Maya Persada		44,500,000.00	3-Feb-20	
			2,001,000.00	PT Wahana Prakarsa Utama		2,001,000.00	25-Feb-20	
I	**BPK (LHP atas Kepatuhan LKPD TA 2019)**	**No.86.B/LHP/XVIII.PPG/05/ 2019 tgl 18 Mei 2020**	**161,103,160.00**		**161,103,160.00**			**-**
24	Terdapat kelebihan pemberian bantuan hibah yang digunakan tidak senyatanya senilai Rp28.192.160,00.		28,192,160.00	KNPI	28,192,160.00	28,192,160.00	16-Jun-20	-
25	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Empat Paket Pekerjaan pada Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senilai Rp67.695.000,00		**67,695,000.00**		**67,695,000.00**			-
			43,051,000.00	CV Kurau Timur		43,051,000.00	19-Jun-20	
			4,060,000.00	CV Pelita Sari		4,060,000.00	11-Jun-20	
			933,000.00	CV Tri Fadilah		933,000.00	10-Jun-20	
			19,651,000.00	CV Pelita Sari		19,651,000.00	11-Jun-20	
26	Kekurangan Volume atas Tiga Paket		**6,393,000.00**		**6,393,000.00**			-

	Pekerjaan Konstruksi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp6.393.000,00		1,106,000.00	CV Kami Kawa		1,106,000.00		
			3,422,000.00	CV Lintas Persada		3,422,000.00	22-Jul-19	
			1,865,000.00	CV Ilham Lestari		1,865,000.00	5-Jul-19	
27	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Senilai Rp6.272.000,00		6,272,000.00	CV Pelita Sari	6,272,000.00	6,272,000.00	3-Feb-20	-
28	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp52.551.000,00		**52,551,000.00**		**52,551,000.00**			-
			5,000,000.00	PT Puri Dimensi		5,000,000.00	3-Feb-20	
			1,050,000.00	CV Imaya Consulting Engineers		1,050,000.00	12-Feb-20	
			44,500,000.00	CV Maya Persada		44,500,000.00	3-Feb-20	
			2,001,000.00	PT Wahana Prakarsa Utama		2,001,000.00	25-Feb-20	
J	**LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI 2021**	**86.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021**	**386,788,000.00**		**386,788,000.00**			**-**
29	Kekurangan Volume atas Pembangunan Gedung C Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno Senilai Rp79.383.000,00		79,383,000.00	PT. BACP-PT USM, KSO	79,383,000.00	79,383,000.00	5-May-21	
30	Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp307.405.000,00							
31	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Liat - Puding Besar oleh CV Lakhenzi Prima senilai Rp15.662.000,00		15,662,000.00	CV Lakhenzi Prima	15,662,000.00	15,662,000.00	15-Jun-21	-
32	CV SKA senilai Rp50.444.000,00		50,444,000.00	CV Setia Karya Abadi	50,444,000.00	29,048,000.00	15-Jun-21	-
						21,396,000.00		
33	CV Bumi Elang Persada senilai Rp24.864.000,00		24,864,000.00	CV Bumi Elang Persada senilai Rp24.864.000,00	24,864,000.00	21,843,000.00	28-Jun-21	-
						3,021,000.00		
34	CV Damar Sakti senilai Rp41.821.000,00		41,821,000.00	CV Damar Sakti	41,821,000.00	20,836,000.00	28-Jun-21	-
						2,720,000.00		
						3,695,000.00		
						14,570,000.00		
35	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis; Sp. Katis - Sungaiselan oleh CV Lian Jaya senilai Rp9.037.000,00		9,037,000.00	CV Lian Jaya	9,037,000.00	9,037,000.00	15-Jun-21	-
36	Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung oleh PT Bahana Pratama Konstruksi senilai Rp2.061.000,00		2,061,000.00	PT Bahana Pratama Konstruks	2,061,000.00	2,061,000.00	23-Jun-21	-
37	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Air Bara (DAK) oleh CV Citra Jaya Mandiri senilai Rp9.871.000,00		9,871,000.00	CV Citra Jaya Mandiri	9,871,000.00	9,871,000.00	23-Jun-21	-
38	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Dua - Dam III - Sangku; Sangku - Simpang Tempilang oleh CV Yusa Haricon senilai Rp7.963.000,00		7,963,000.00	CV Yusa Haricon	7,963,000.00	7,963,000.00	24-Jun-21	-
39	Pekerjaan Peningkatan Jalan Parittiga - Tanjung Ru oleh CV Pagevi Bersaudara senilai Rp17.318.000,00		17,318,000.00	CV Pagevi Bersaudara	17,318,000.00	17,318,000.00	23-Jun-21	-

40	PT Karya Mulia Nugraha senilai Rp36.289.000,00 atas pekerjaan: 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Gedong - Payung (DAK) senilai Rp24.195.000,00;		24,195,000.00	PT Karya Mulia Nugraha	24,195,000.00	24,195,000.00	24-Jun-21	-
41	Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 3) senilai Rp12.094.000,00.		12,094,000.00	PT Karya Mulia Nugraha	12,094,000.00	12,096,000.00	6-May-21	2,000.00
42	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Air Bara oleh CV Mavindo Citra Abadi senilai Rp662.000,00		662,000.00	CV Mavindo Citra Abadi	662,000.00	662,000.00	23-Jun-21	-
43	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Bedengung (DAK) oleh CV Indah Karya Nugraha senilai Rp14.586.000,00		14,586,000.00	CV Indah Karya Nugraha	14,586,000.00	14,586,000.00	23-Jun-21	-
44	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin oleh CV Arya Wisesa senilai Rp3.052.000,00		3,052,000.00	CV Arya Wisesa	3,052,000.00	3,052,000.00	14-Jun-21	-
45	Pekerjaan Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin (Paket 2) oleh CV Tridana Salimar senilai Rp39.054.000,00		39,054,000.00	CV Tridana Salimar	39,054,000.00	39,054,000.00	24-Jun-21	-
46	Pekerjaan Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 2) oleh PT Biliton Hero Sukses Cemerlang senilai Rp11.972.000,00		11,972,000.00	PT Biliton Hero Sukses Cemerl	11,972,000.00	11,975,000.00	14-Jun-21	3,000.00
47	Pekerjaan Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) oleh PT Sinar Matahari Abadi senilai Rp2.026.000,00		2,026,000.00	PT Sinar Matahari Abadi	2,026,000.00	2,026,000.00	14-Jun-21	-
48	Pekerjaan Peningkatan Jalan Perawas - Buding; Buding - Manggar oleh CV Cahaya Indah Karya senilai Rp2.859.000,00		2,859,000.00	CV Cahaya Indah Karya	2,859,000.00	2,859,000.00	15-Jun-21	-
49	Pekerjaan Pelebaran Jalan Simpang Empat (Sijuk) – Buding oleh PT Anugrah Rezeki Prima senilai Rp17.864.000,00		17,864,000.00	PT Anugrah Rezeki Prima	17,864,000.00	17,864,000.00	14-Jun-21	-
K	**JUMLAH PEMBEBANAN TAHUN 2018 S.D 2021 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)**		**6,052,764,524.26**		**#REF!**			**#REF!**

L	**TOTAL PEMBEBANAN s.d. TAHUN SEBELUMNYA**		**9,067,046,501.44**		**7,105,038,254.23**			**1,962,012,247.21**
	1. TEMUAN BPK (2001-2016)		7,101,019,646.68	-	6,090,266,242.75			1,010,753,403.93
	2. TEMUAN INPTD (2003-2017)		1,966,026,854.76	-	1,014,772,011.48			951,254,843.28
M	**TOTAL/AKUMULASI PEMBEBANAN s.d. TAHUN 2021 (K + L)**		**15,119,811,025.70**		**#REF!**			**#REF!**
	Saldo Penerimaan s.d. Desember 2021 atas pembebanan Tahun sebelumnya (Pembebanan Tahun 2017 ke bawah) dan Total Saldo TGR				**187,518,742.66**			**#REF!**

ı 2021

(dalam Rp)

KETERANGAN
BELUM LUNAS
BELUM LUNAS
SELESAI
-
-

KETERANGAN
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS

BELUM SELESAI
kelebihan setor Rp.889.100,00
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS

BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI

LUNAS
SELESAI
Kelebihan catat jumlah temuan sebesar Rp.1.000,00
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
Kelebihan Setor Rp.300,00
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM
SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
Kurang catat nilai temuan sebesar Rp.510.000,00
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM

BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
Kelebihan Setor Rp.38.400,00
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
Kelebihan setor Rp.240.000,00
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS

BELUM
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
kelebihan setor Rp.100,00

LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
SELESAI
Kelebihan setor Rp.50,00
Kelebihan setor Rp.36.000,00
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM

SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
Kelebihan setor Rp.2.231.465,47
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
kelebihan setor Rp.555,910,00

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS

LUNAS
Kelebihan setor
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM

SELESAI
Kelebihan setor Rp.174,00
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI

LUNAS
SELESAI
LUNAS
kelebihan setor sebesar Rp. 320.000,00
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS

BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
-
-
SELESAI
LUNAS
LUNAS

SELESAI	
Kelebihan setor Rp. 48.000,00	
SELESAI	
LUNAS	
SELESAI	
Kelebihan setor Rp.12.922,00	
SELESAI	
kelebihan setor Rp.462,000,00	
LUNAS	

SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
BELUM
SELESAI
kelebihan setor Rp.32.000,00
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
BELUM
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM
BELUM
BELUM

BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
LUNAS

BELUM
BELUM
BELUM
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM

BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM

BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI

PINDAHAN DARI PIHAK KETIGA
SELESAI
BELUM
LUNAS

KETERANGAN
BELUM SELESAI
LUNAS

BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
Kelebihan setor Rp.4.300.000,00
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
kelebihan setor Rp.200.000,00
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM

LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
Kelebihan setor Rp.171,00
BELUM SELESAI
LUNAS
BELUM
BELUM

LUNAS
BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI

BELUM
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS

SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
SELESAI
Kelebihan setor Rp.1,44
SELESAI
Kelebihan setor Rp.43,56
LUNAS

SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
Kelebihan setor Rp0,04
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
Pindahan dari PNS Non Bendahara

SELESAI
Pindahan dari PNS Non Bendahara
Pindahan dari PNS Non Bendahara
SELESAI
Pindahan dari PNS Non Bendahara
SELESAI
Pindahan dari PNS Non Bendahara
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI

LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
SELESAI
LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI

BELUM
BELUM SELESAI
kelebihan setor Rp.9,00
BELUM
SELESAI
LUNAS
SELESAI
LUNAS LUNAS

SELESAI
LUNAS
SELESAI
Kelebihan setor Rp. 235,00
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI

LUNAS
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
LUNAS
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM SELESAI
LUNAS

BELUM
SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI

BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM SELESAI
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM

BELUM SELESAI
LUNAS
LUNAS
BELUM
BELUM
LUNAS
LUNAS
Kelebihan setor Rp7.048,73
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
Pindaham dari PNS Non Bendahara
Pindaham dari PNS Non Bendahara
SELESAI
LUNAS
LUNAS

LUNAS
SELESAI
LUNAS

LUNAS
LUNAS
SELESAI
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS

LUNAS
kelebihan setor Rp. 2.000,00
LUNAS
LUNAS
LUNAS
LUNAS
kelebihan setor Rp. 3.000,00
LUNAS
LUNAS
LUNAS

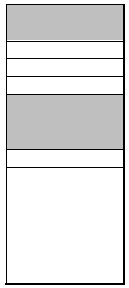

LAMPIRAN VIII
Catatan atas Laporan Keuangan
2021

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH ATAS PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021

(dalam Rp)

NO.	NAMA PELANGGAN	TGL SKRD	KUALITAS PIUTANG					PENYISIHAN PIUTANG				
			KUALITAS LANCAR	KUALITAS KURANG LANCAR	KUALITAS DIRAGUKAN	KUALITAS MACET	JUMLAH	KUALITAS LANCAR	KUALITAS KURANG LANCAR	KUALITAS DIRAGUKAN	KUALITAS MACET	JUMLAH
			0 - 1 BULAN	1 - 3 BULAN	3 - 12 BULAN	LBH DARI 12 BULAN		0.50 %	10%	50%	100%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PIUTANG RETRIBUSI DLHK												
1	PT. BAHARI BIO MAKMUR	44,446.00			7,138,750	-	7,138,750	-	-	3,569,375	-	3,569,375
2	PT. ARGANI BOGA SEJAHTERA	44,454.00	-	-	6,973,750	-	6,973,750.00	-	-	3,486,875	-	3,486,875
3	CV. BETUNG BINTANG SEMESTA	44,462.00	-	-	6,973,750	-	6,973,750.00	-	-	3,486,875	-	3,486,875
4	PT. ARGO BAHARI NUSANTARA	44,525.00	-	4,199,650	-	-	4,199,650.00	-	419,965.00	-	-	419,965
5	PT. ARGANI BOGA SEJAHTERA	44,533.00	2,851,100	-	-	-	2,851,100	14,255.50	-	-	-	14,256
6	CV. BETUNG BINTANG SEMESTA	44,536.00	4,199,650	-	-	-	4,199,650.00	20,998.25	-	-	-	20,998
7	PT. BAHARI BIO MAKMUR	44,536.00	2,851,100	-	-	-	2,851,100.00	14,255.50	-	-	-	14,256
	JUMLAH		**Rp 9,901,850**	**Rp 4,199,650**	**Rp 21,086,250**	**Rp -**	**Rp 35,187,750**	**Rp 49,509**	**Rp 419,965**	**Rp 10,543,125**	**Rp -**	**11,012,599**
PIUTANG BLUD RSUP												
	PASIEN UMUM TAHUN 2017											
1	Asmana	43,040.00	-	12,149,657.53	-	-	12,149,657.53	-	1,214,965.75	0	0	1,214,965.75
							-					-
	KLAIM PELKES TAHUN 2021						-					-
1	Tanggungan pasien gubernur th 2019-2021	Agustus 2019-juni 2021	450,211,124.00	-	-	-	450,211,124.00	2,251,055.62	-	-	-	2,251,055.62
2	Tanggungan pasien anggota dewan Kab. Bangka barat th 2019-2020	April 2019 - Desember 2020	123,248,307.00	-	-	-	123,248,307.00	616,241.54	-	-	-	616,241.54
3	Klaim BPJS Kesehatan bupel Juni 2021 (Pending)	Desember 2021	141,667,300.00	-	-	-	141,667,300.00	708,336.50	-	-	-	708,336.50
4	Klaim instalasi farmasi BPJS Kesehatan bupel Oktober 2021 (Pending)	Desember 2021	5,789,405.00	-	-	-	5,789,405.00	28,947.03	-	-	-	28,947.03
5	Klaim instalasi farmasi BPJS Kesehatan bupel November 2021	Desember 2021	11,333,710.00	-	-	-	11,333,710.00	56,668.55	-	-	-	56,668.55
6	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel Januari-mei 2021	44,440.00	2,510,655,000.00	-	-	-	2,510,655,000.00	12,553,275.00	-	-	-	12,553,275.00
7	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel Januari 2021 Rajal	44,440.00	332,900.00	-	-	-	332,900.00	1,664.50	-	-	-	1,664.50
8	Klaim pelkes RS SILOAM a/n Adrin renan aqila	44,440.00	442,000.00	-	-	-	442,000.00	2,210.00	-	-	-	2,210.00
9	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel mei-juli 2021 (Bayi baru lahir)	44,470.00	30,800,000.00	-	-	-	30,800,000.00	154,000.00	-	-	-	154,000.00
10	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel September-november 2021	44,531.00	3,422,073,000.00	-	-	-	3,422,073,000.00	17,110,365.00	-	-	-	17,110,365.00
11	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel juli 2021	44,501.00	1,453,250,000.00	-	-	-	1,453,250,000.00	7,266,250.00	-	-	-	7,266,250.00
12	Klaim BPJS Kesehatan Covid-19 bupel agustus 2022	44,531.00	2,601,363,000.00	-	-	-	2,601,363,000.00	13,006,815.00	-	-	-	13,006,815.00
	JUMLAH		**10,751,165,746.00**	**12,149,657.53**	**-**	**-**	**10,763,315,403.53**	**53,755,828.73**	**1,214,965.75**	**-**	**-**	**54,970,794.48**
PIUTANG BLUD RSJD												
	PASIEN UMUM TAHUN 2015											
1	Asrul	7/7/1905				1,231,500.00	1,231,500.00				1,231,500.00	1,231,500.00
2	Irwanto	7/7/1905				693,200.00	693,200.00				693,200.00	693,200.00
3	Suhardi	7/7/1905				3,744,400.00	3,744,400.00				3,744,400.00	3,744,400.00
4	Adi Putra (Andrian)	7/7/1905				10,218,100.00	10,218,100.00				10,218,100.00	10,218,100.00
5	Arafat Labang	7/7/1905				825,600.00	825,600.00				825,600.00	825,600.00
6	Mr. X / Alpian	7/7/1905				5,539,600.00	5,539,600.00				5,539,600.00	5,539,600.00
7	Raka Ariyatna	7/7/1905				68,800.00	68,800.00				68,800.00	68,800.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2016						-					-
1	Sukendri	Januari 2016				810,000.00	810,000.00				810,000.00	810,000.00
2	Iwan Agustinus	Januari 2016				13,202,000.00	13,202,000.00				13,202,000.00	13,202,000.00
3	Dedi Irwansyah	Januari 2016				4,082,400.00	4,082,400.00				4,082,400.00	4,082,400.00
4	Dani Santika	September 2016				1,085,000.00	1,085,000.00				1,085,000.00	1,085,000.00
5	Hardianto	November 2016				698,200.00	698,200.00				698,200.00	698,200.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2017						-					-
1	Sujianto	Juni 2017				9,013,400.00	9,013,400.00				9,013,400.00	9,013,400.00
2	Jolli	Juni 2017				2,323,400.00	2,323,400.00				2,323,400.00	2,323,400.00
3	Alimudin	September 2017				2,774,100.00	2,774,100.00				2,774,100.00	2,774,100.00
4	Efandri	Agustus 2017				135,000.00	135,000.00				135,000.00	135,000.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2018						-					-

1	Syamsiah	Januari 2018				719,300.00	719,300.00				719,300.00	719,300.00
2	Muhayar	Maret 2018				5,311,000.00	5,311,000.00				5,311,000.00	5,311,000.00
3	Pinta Wijaya	April 2018				261,000.00	261,000.00				261,000.00	261,000.00
4	Abdul Aziz	April 2018				2,029,700.00	2,029,700.00				2,029,700.00	2,029,700.00
5	Mr X (Yeyen)	Juli 2018				8,917,150.00	8,917,150.00				8,917,150.00	8,917,150.00
6	Sun Siong	September 2018				1,502,000.00	1,502,000.00				1,502,000.00	1,502,000.00
7	Teguh Aprianto	Desember 2018				590,700.00	590,700.00				590,700.00	590,700.00
8	Nurlela	Oktober 2018				2,059,000.00	2,059,000.00				2,059,000.00	2,059,000.00
9	Yusri	November 2018				304,000.00	304,000.00				304,000.00	304,000.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2019						-					-
1	Alian	Tagihan ke Lima tanggal 31 Desember 2021				10,240,000.00	10,240,000.00				10,240,000.00	10,240,000.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2020						-					-
1	Epandri	Tagihan ke tiga tanggal 31 Desember 2021				1,449,000.00	1,449,000.00				1,449,000.00	1,449,000.00
	PASIEN UMUM TAHUN 2021						-					-
1	Biaya pembayaran Hasil persetujuan izin praktek mahasiswa Akademi Keperawatan Pangkalpinang No.890/1083/RSJD/2021 Tanggal 30 Oktober 2021	Tagihan ke satu tanggal 30 Oktober 2021		3,290,000.00			3,290,000.00		329,000.00			329,000.00
2	Eko Siswandi	Tagihan ke satu tanggal 31 Desember 2021	8,584,800.00				8,584,800.00	42,924.00				42,924.00
	PASIEN JAMINAN BPJS TAGIHAN TAHUN 2021											-
1	Biaya Klaim Obat Kronis Luar Paket IFRS/Apotek Instalasi Farmasi bupel Agustus 2021 No.956/1246/RSJD/2021 tanggal 28 Desember 2021	Tagihan ke satu tanggal 28 Desember 2021	68,436,209.00				68,436,209.00	342,181.05				342,181.05
	PASIEN JAMINAN DINAS KESEHATAN (JAMKES BABEL) TAHUN 2021											-
1	Klaim Rawat Inap an Triono (jamkes Babel) No.956/1259/RSJD/2021 Tanggal 31 Desemberr 2021	Tagihan ke satu tanggal 31 Desemberr 2021	3,986,800.00				3,986,800.00	19,934.00				19,934.00
	JUMLAH		**81,007,809.00**	**3,290,000.00**	-	**89,827,550.00**	**174,125,359.00**	**405,039.05**	**329,000.00**	-	**89,827,550.00**	**90,561,589.05**

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH ATAS BAGIAN LANCAR PENJUALAN ANGSURAN DAN PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	URAIAN	KUALITAS PIUTANG					PENYISIHAN PIUTANG				
		KUALITAS LANCAR		KUALITAS DIRAGUKAN	KUALITAS MACET	JUMLAH	0.50%	10%	50%	100%	JUMLAH
	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI	**505,013,796.61**	**250,879,568.83**	**99,071,828.00**	**5,663,851,695.22**	**6,518,816,888.66**	**2,577,900.98**	**25,087,956.88**	**49,535,914.00**	**5,663,851,695.22**	**5,741,053,467.09**
	TAHUN 2001	-	-	-	**384,023,500.00**	**384,023,500.00**	-	-	-	**384,023,500.00**	**384,023,500.00**
1	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	318,150,000.00	318,150,000.00	-	-	-	318,150,000.00	318,150,000.00
2	BIRO UMUM SETDA	-	-	-	65,873,500.00	65,873,500.00	-	-	-	65,873,500.00	65,873,500.00
	TAHUN 2003	-	-	-	**1,106,606,525.00**	**1,106,606,525.00**	-	-	-	**1,106,606,525.00**	**1,106,606,525.00**
1	Pertanggungjawaban biaya operasional dan tunjangan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta realisasi pengeluaran pada Unit Kerja Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah tidak didukung bukti yang cukup sebesar Rp4,251,075,700.00	-	-	-	506,575,000.00	506,575,000.00	-	-	-	506,575,000.00	506,575,000.00
2	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	565,971,669.00	565,971,669.00	-	-	-	565,971,669.00	565,971,669.00
3	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	-	-	-	8,305,000.00	8,305,000.00	-	-	-	8,305,000.00	8,305,000.00
4	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)	-	-	-	15,629,856.00	15,629,856.00	-	-	-	15,629,856.00	15,629,856.00
5	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	-	-	-	10,125,000.00	10,125,000.00	-	-	-	10,125,000.00	10,125,000.00
	TAHUN 2004	-	-	-	**717,549,482.93**	**717,549,482.93**	-	-	-	**717,549,482.93**	**717,549,482.93**
1	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	586,366,543.00	586,366,543.00	-	-	-	586,366,543.00	586,366,543.00
2	Terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan seluruhnya sebesar Rp900,501,331.48	-	-	-	64,692,939.93	64,692,939.93	-	-	-	64,692,939.93	64,692,939.93
3	Penyelesaian kegiatan belanja modal tahun 2004 terlambat dari batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.363,786,305.00	-	-	-	34,550,000.00	34,550,000.00	-	-	-	34,550,000.00	34,550,000.00
4	Kemahalan harga atas beberapa pengadaan barang pemerintah senilai Rp.110,885,000.00.	-	-	-	31,940,000.00	31,940,000.00	-	-	-	31,940,000.00	31,940,000.00

	TAHUN 2005	-	-	-	**92,471,885.16**	**92,471,885.16**	-	-	-	**92,471,885.16**	**92,471,885.16**
1	DPPKAD	-	-	-	23,204,312.44	23,204,312.44	-	-	-	23,204,312.44	23,204,312.44
2	RAB dibuat tidak secara riil dan wajar senilai Rp2	-	-	-	12,869,584.80	12,869,584.80	-	-	-	12,869,584.80	12,869,584.80
3	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	-	-	-	55,173,317.60	55,173,317.60	-	-	-	55,173,317.60	55,173,317.60
4	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)	-	-	-	1,224,670.32	1,224,670.32	-	-	-	1,224,670.32	1,224,670.32
	TAHUN 2006	-	-	-	**47,116,155.86**	**47,116,155.86**	-	-	-	**47,116,155.86**	**47,116,155.86**
1	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	38,842,259.00	38,842,259.00	-	-	-	38,842,259.00	38,842,259.00
2	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)	-	-	-	5,188,234.65	5,188,234.65	-	-	-	5,188,234.65	5,188,234.65
3	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	3,085,662.21	3,085,662.21	-	-	-	3,085,662.21	3,085,662.21
	TAHUN 2007	-	-	-	**109,680,650.00**	**109,680,650.00**	-	-	-	**109,680,650.00**	**109,680,650.00**
1	Angsuran Penjualan Rumah Dinas, Barang Inventaris dibawah Target Angsuran Sebesar Rp29,804,450.00 dan Angsuran Kendaraan Dinas yang Telah Jatuh Tempo Belum Diselesaikan Sebesar Rp112,020,650.00	-	-	-	109,680,650.00	109,680,650.00	-	-	-	109,680,650.00	109,680,650.00
	TAHUN 2008	-	-	-	**775,579,121.75**	**775,579,121.75**	-	-	-	**775,579,121.75**	**775,579,121.75**
1	SEKRETARIAT DPRD :	-	-	-	84,040,000.00	84,040,000.00	-	-	-	84,040,000.00	84,040,000.00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	691,539,121.75	691,539,121.75	-	-	-	691,539,121.75	691,539,121.75
	TAHUN 2010	-	-	-	**90,684,000.00**	**90,684,000.00**	-	-	-	**90,684,000.00**	**90,684,000.00**
1	*DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI :*	-	-	-	*22,000,000.00*	22,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	22,000,000.00
2	*DINAS PEKERJAAN UMUM :*	-	-	-	*64,734,000.00*	64,734,000.00	-	-	-	64,734,000.00	64,734,000.00
3	*DINAS PEKERJAAN UMUM :*	-	-	-	*1,350,000.00*	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	1,350,000.00
4	*SEKRETARIAT DPRD :*	-	-	-	*2,600,000.00*	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	2,600,000.00
	TAHUN 2013	-	-	-	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	-	-	-	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
1	*DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI :*	-	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
	TAHUN 2014	-	-	-	**556,846,964.00**	**556,846,964.00**	-	-	-	**556,846,964.00**	**556,846,964.00**
1	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	-	-	-	93,500,000.00	93,500,000.00	-	-	-	93,500,000.00	93,500,000.00
2	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH :	-	-	-	57,082,000.00	57,082,000.00	-	-	-	57,082,000.00	57,082,000.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM :	-	-	-	406,264,964.00	406,264,964.00	-	-	-	406,264,964.00	406,264,964.00
	TAHUN 2015	-	-	-	**297,862,501.00**	**297,862,501.00**	-	-	-	**297,862,501.00**	**297,862,501.00**
1	BPPTPM (KASUS)	-	-	-	217,896,598.00	217,896,598.00	-	-	-	217,896,598.00	217,896,598.00
2	*DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI :*	-	-	-	*14,638,000.00*	14,638,000.00	-	-	-	14,638,000.00	14,638,000.00
3	*KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA :*	-	-	-	*42,641,500.00*	42,641,500.00	-	-	-	42,641,500.00	42,641,500.00
4	*DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :*	-	-	-	*1,500,003.00*	1,500,003.00	-	-	-	1,500,003.00	1,500,003.00
5	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (Kasus) :	-	-	-	*500,000.00*	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00
6	*SEKRETARIAT DPRD :*	-	-	-	*3,048,400.00*	3,048,400.00	-	-	-	3,048,400.00	3,048,400.00
7	Kelebihan pembayaran Senilai Rp296.454.000,00 atas Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Lima SKPD	-	-	-	17,638,000.00	17,638,000.00	-	-	-	17,638,000.00	17,638,000.00
	TAHUN 2016	-	-	-	**189,759,691.49**	**189,759,691.49**	-	-	-	**189,759,691.49**	**189,759,691.49**
1	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RSU PROVINSI	-	-	-	38,850,000.00	38,850,000.00	-	-	-	38,850,000.00	38,850,000.00
3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	25,459,972.49	25,459,972.49	-	-	-	25,459,972.49	25,459,972.49
5	*SEKRETARIAT KORPRI*	-	-	-	*8,501,519.00*	8,501,519.00	-	-	-	8,501,519.00	8,501,519.00
6	*DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (KASUS)*	-	-	-	*63,868,200.00*	63,868,200.00	-	-	-	63,868,200.00	63,868,200.00
7	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*	-	-	-	*27,230,000.00*	27,230,000.00	-	-	-	27,230,000.00	27,230,000.00
8	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*	-	-	-	4,850,000.00	4,850,000.00	-	-	-	4,850,000.00	4,850,000.00
									-		
	TAHUN 2017	-	-	-	**1,292,171,218.03**	**1,292,171,218.03**	**52,832.00**	-	-	**1,292,171,218.03**	**1,292,224,050.03**
1	Kekurangan Volume Pekerjaan beberapa kegiata	-	-	-	3,087,500.33	3,087,500.33	15,437.50	-	-	3,087,500.33	3,102,937.83
2	Kegiatan Perluasan dan Mutu Pendidikan SMP/MTS/SMPLB- Terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan ruang kepala sekolah dan ruang guru SMPN 2 Pangkalpinang	-	-	-	3,324,000.00	3,324,000.00	16,620.00	-	-	3,324,000.00	3,340,620.00
3	Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Item Pekerjaan Plat Meja Beton T=10 cm dan Pekerjaan Kubikal KM/WC Sebesar Rp4.154.900,00	-	-	-	4,154,900.00	4,154,900.00	20,774.50	-	-	4,154,900.00	4,175,674.50
4	Dinas PUPR (BIDANG BINA MARGA)	-	-	-	13,513,842.66	13,513,842.66	-	-	-	13,513,842.66	13,513,842.66

5	Dinas PUPR (BIDANG SUMBER DAYA AIR)	-	-	-	7,054,770.60	7,054,770.60	-	-	-	7,054,770.60	7,054,770.60
6	DAK DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	-	-	-	14,475,735.67	14,475,735.67	-	-	-	14,475,735.67	14,475,735.67
7	Kelebihan Pembayaran Senilai Rp187.154.000,00 atas Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Dinas PUPR	-	-	-	239,212,000.00	239,212,000.00	-	-	-	239,212,000.00	239,212,000.00
8	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PUPR	-	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00	4,050,000.00
12	BIRO UMUM SETDA PROVINSI	-	-	-	36,177,300.00	36,177,300.00	-	-	-	36,177,300.00	36,177,300.00
13	DINAS PENDIDIKAN (BIDANG SMA DAN SMK)	-	-	-	5,728,313.43	5,728,313.43	-	-	-	5,728,313.43	5,728,313.43
14	DINAS PUPR BIDANG SUMBER DAYA AIR	-	-	-	4,783,268.95	4,783,268.95	-	-	-	4,783,268.95	4,783,268.95
15	SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
16	SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BANGKA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018	-	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	600,000.00
17	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN MEI 2018 S.D. APRIL 2019	-	-	-	15,250,400.00	15,250,400.00	-	-	-	15,250,400.00	15,250,400.00
18	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018	-	-	-	8,325,000.00	8,325,000.00	-	-	-	8,325,000.00	8,325,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN	-	-	-	4,900,106.63	4,900,106.63	-	-	-	4,900,106.63	4,900,106.63
20	BIRO UMUM SETDA PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. SAAT PEMERIKSAAN	-	-	-	2,760,800.00	2,760,800.00	-	-	-	2,760,800.00	2,760,800.00
21	KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TA.2019 BIDANG BINA MARGA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG PROV.KEP.BABEL TA.2019	-	-	-	8,790,155.76	8,790,155.76	-	-	-	8,790,155.76	8,790,155.76
23	SMAN WILAYAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018	-	-	-	1,944,000.00	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	1,944,000.00
24	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN	-	-	-	2,401,120.00	2,401,120.00	-	-	-	2,401,120.00	2,401,120.00
25	DANA HIBAH APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00
29	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018	-	-	-	8,325,000.00	8,325,000.00	-	-	-	8,325,000.00	8,325,000.00
31	SMA/SMKN NEGERI WILAYAH KANUPATEN BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020	-	-	-	4,265,000.00	4,265,000.00	-	-	-	4,265,000.00	4,265,000.00
32	DINAS PERTANIAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN	-	-	-	23,572,000.00	23,572,000.00	-	-	-	23,572,000.00	23,572,000.00
35	Kelebihan Pembayaran Biaya Personil dan Non Personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Senilai Rp45.244.700,00	-	-	-	40,244,700.00	40,244,700.00	-	-	-	40,244,700.00	40,244,700.00
36	Kelebihan Pembayaran Biaya Non Personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pelabuhan dan Industri Sadai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp92.799.100,00	-	-	-	77,799,100.00	77,799,100.00	-	-	-	77,799,100.00	77,799,100.00
37	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp44.007.000,00	-	-	-	14,007,000.00	14,007,000.00	-	-	-	14,007,000.00	14,007,000.00
38	Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung VIP Bandar Udara Depati Amir (Lanjutan) pada Dinas Perhubungan senilai Rp114.610.000,00	-	-	-	87,506,000.00	87,506,000.00	-	-	-	87,506,000.00	87,506,000.00
39	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas Nama Sdr. S pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senilai Rp49.414.757	-	-	-	49,414,757.00	49,414,757.00	-	-	-	49,414,757.00	49,414,757.00
40	DINAS KEHUTANAN	-			2,239,091.00	2,239,091.00	-	-	-	2,239,091.00	2,239,091.00
41	BADAN PENGHUBUNG	-			338,052,500.00	338,052,500.00	-	-	-	338,052,500.00	338,052,500.00
42	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN	-			6,027,000.00	6,027,000.00	-	-	-	6,027,000.00	6,027,000.00
43	SEKRETARIAT DPRD	-			7,287,000.00	7,287,000.00	-	-	-	7,287,000.00	7,287,000.00
44	DISNAKERTRANS	-			1,960,000.00	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	1,960,000.00
45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-			11,414,574.00	11,414,574.00	-	-	-	11,414,574.00	11,414,574.00
46	DANA HIBAH & BANSOS KAB. BANGKA PADA BIRO KESRA SETDA PROV. BABEL	-			4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
47	DABA KEUANGAN PROVINSI BID. PENDIDIKAN PADA KOTA PANGKALPINANG	-			3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	-	3,080,000.00	3,080,000.00

48	DABA KAB. BANGKA BARAT	-		18,750.00	18,750.00	-	-	-	18,750.00	18,750.00
49	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	-		90,800,000.00	90,800,000.00	-	-	-	90,800,000.00	90,800,000.00
50	PAMJAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK/KB	-		30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
51	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	-		943,200.00	943,200.00	-	-	-	943,200.00	943,200.00
52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-		10,803,000.00	10,803,000.00	-	-	-	10,803,000.00	10,803,000.00
53	Dinas PUPR (SEKRETARIAT)	-		6,324,832.00	6,324,832.00	-	-	-	6,324,832.00	6,324,832.00
54	BKPSDM	-		7,950,000.00	7,950,000.00	-	-	-	7,950,000.00	7,950,000.00
55	BAKUDA (SEKRETARIAT)	-		932,000.00	932,000.00	-	-	-	932,000.00	932,000.00
56	BAKUDA (BIDANG ASET)	-		2,212,500.00	2,212,500.00	-	-	-	2,212,500.00	2,212,500.00
57	DAK DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	-		60,930,000.00	60,930,000.00	-	-	-	60,930,000.00	60,930,000.00
		-	-		-	-	-	-	-	-
	TAHUN 2019	**-**	**-**	**99,071,828.00**	**-**	**99,071,828.00**	**-**	**-**	**49,535,914.00**	**-**	**49,535,914.00**
1	Terdapat pengeluaran anggaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 105.101.828,00 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	99,071,828.00	-	99,071,828.00	-	-	49,535,914.00	-	49,535,914.00
		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	TAHUN 2020	**-**	**250,879,568.83**	**-**	**-**	**250,879,568.83**	**-**	**25,087,956.88**	**-**	**-**	**25,087,956.88**
1	Pemeriksaan dilakukan terhadap indikasi ketekoran kas akhir Tahun 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	65,676,289.83	-	-	65,676,289.83	-	6,567,628.98	-	-	6,567,628.98
2	DABA KEU. PEMPROV. KEP. BANGKA BELITUNG PADA PEMKAB. BELITUNG TIMUR T.A. 2017	-	450,000.00	-	-	450,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,352,000.00	-	-	2,352,000.00	-	235,200.00	-	-	235,200.00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	9,220,000.00	-	-	9,220,000.00	-	922,000.00	-	-	922,000.00
5	DINAS TENAGA KERJA	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	5,415,000.00	-	-	5,415,000.00	-	541,500.00	-	-	541,500.00
7	BADAN PENGHUBUNG	-	33,900,000.00	-	-	33,900,000.00	-	3,390,000.00	-	-	3,390,000.00
8	BAKUDA BID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN SERTA BIDANG ASET DAERAH	-	775,000.00	-	-	775,000.00	-	77,500.00	-	-	77,500.00
9	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	695,000.00	-	-	695,000.00	-	69,500.00	-	-	69,500.00
10	BANTUAN DABA HIBAH DAN BANSOS PADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	-	750,000.00	-	-	750,000.00
11	DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR	-	8,188,395.00	-	-	8,188,395.00	-	818,839.50	-	-	818,839.50
12	SMA/SMK/SLB NEGERI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018	-	338,000.00	-	-	338,000.00	-	33,800.00	-	-	33,800.00
13	BANTUAN DANA HIBAH DAN BANSOS KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS TAHUN ANGGARAN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA	-	3,820,000.00	-	-	3,820,000.00	-	382,000.00	-	-	382,000.00
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ta.2018 s.d. SAAT PEMERIKSAAN	-	5,926,900.00	-	-	5,926,900.00	-	592,690.00	-	-	592,690.00
15	BIDANG SMK DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018 S.D. PEMERIKSAAN	-	25,854,000.00	-	-	25,854,000.00	-	2,585,400.00	-	-	2,585,400.00
16	BIDANG SMA PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2019	-	9,147,702.00	-	-	9,147,702.00	-	914,770.20	-	-	914,770.20
17	SMAN WILAYAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TA.2018	-	2,905,482.00	-	-	2,905,482.00	-	290,548.20	-	-	290,548.20
18	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 SAMPAI DENGAN SAAT PEMERIKSAAN	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	12,500.00	-	-	12,500.00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
20	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMA DAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN PROV.KEP.BABEL TAHUN ANGGARAN 2020	-	12,615,500.00	-	-	12,615,500.00	-	1,261,550.00	-	-	1,261,550.00
21	Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada 22 Orang Tidak Sesuai Ketentuan	-	55,365,300.00	-	-	55,365,300.00	-	5,536,530.00	-	-	5,536,530.00
		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	TAHUN 2021	**505,013,796.61**	**-**	**-**	**-**	**505,013,796.61**	**2,525,068.98**	**-**	**-**	**-**	**2,525,068.98**
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pajak yang terhutang senilai Rp20.906.268,00 ke Kas Negara	20,906,268.00	-	-	-	20,906,268.00	104,531.34	-	-	-	104,531.34
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp741.000,00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	5.00	-	-	-	5.00
	Terdapat Pemyaran Penerangan Jalan dikenakan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.543.751,00	9,543,751.00	-	-	-	9,543,751.00	47,718.76	-	-	-	47,718.76
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanaan Dinas sebesar Rp638.000,00	638,000.00	-	-	-	638,000.00	3,190.00	-	-	-	3,190.00

		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Paket Rapat dan Pertemuan sebesar Rp32.108.000,00	32,108,000.00	-	-	-	32,108,000.00	160,540.00	-	-	-	160,540.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp4.000.000,00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00
	Terdapat Belanja Perlengkapan Peserta Tidak Sesuai Peruntukan sebesar Rp3.700.000,00	3,700,000.00	-	-	-	3,700,000.00	18,500.00	-	-	-	18,500.00
	Terdapat pembayaran Belanja Transportasi Darat Peserta Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.300.000,00	5,300,000.00	-	-	-	5,300,000.00	26,500.00	-	-	-	26,500.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Tidak dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp750.000,00	750,000.00	-	-	-	750,000.00	3,750.00	-	-	-	3,750.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium sebesar Rp2.716.250,00	1,311,000.00	-	-	-	1,311,000.00	6,555.00	-	-	-	6,555.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.150.000,00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	Terdapat Pengeluaran Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tidak Dapat Memperlihatkan Bukti Fisik Barang sebesar Rp21.280.000,00	21,280,000.00	-	-	-	21,280,000.00	106,400.00	-	-	-	106,400.00
	Terdapat Pertanggungjawaban Pemeliharaan atau Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Tidak Sesuai dengan bidang Usaha dan Pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp4.119.625,00	4,119,625.00	-	-	-	4,119,625.00	20,598.13	-	-	-	20,598.13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Polisi Pamong Praja Prov.Kep.Babel Melakukan koordinasi dengan Bakuda Prov.Kep.Babel untuk segera melakukan pembayaran kepada goodyear Sentra Service Cahaya Ban sebesar Rp67.880.000,00	67,880,000.00	-	-	-	67,880,000.00	339,400.00	-	-	-	339,400.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.281.250,00	1,281,250.00	-	-	-	1,281,250.00	6,406.25	-	-	-	6,406.25
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BANTUAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA.2020 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Pembelian Barang dengan menggunakan Dana Hibah pada Yayasan Tri Bakti Darus Syafa'ah Tidak Dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.500.000,00	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	27,500.00	-	-	-	27,500.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Uang Transport sebesar Rp300.000,00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Pembina Ekstrakulikuler sebesar Rp90.000,00	90,000.00	-	-	-	90,000.00	450.00	-	-	-	450.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. OKTOBER 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Kegiatan Administrasi Perkantoran sebesar Rp2.091.000,00	2,091,000.00	-	-	-	2,091,000.00	10,455.00	-	-	-	10,455.00
	Terdapat Kekurangan Volume atas Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Tahun 2021 sebesar Rp3.766.500,00	3,766,500.00	-	-	-	3,766,500.00	18,832.50	-	-	-	18,832.50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Pembayaran Tunjangan Anak yang menjadi Tanggungan Dalam Daftar gaji Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp429.256.,00	429,256.00	-	-	-	429,256.00	2,146.28	-	-	-	2,146.28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN JUNI 2020 S.D. OKTOBER 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.850.000,00	1,850,000.00	-	-	-	1,850,000.00	9,250.00	-	-	-	9,250.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LEMBAGA KEMASYARAKATAN PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat kesalahan perhitungan pembayaran upah pekerjaan sebesar Rp600.000,00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00

	Terdapat kesalahan perhitungan pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan sebesar Rp5.387.300,00	5,387,300.00	-	-	-	5,387,300.00	26,936.50	-	-	-	26,936.50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN .		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak yang menjadi Tanggungan dalam daftar gaji sebesar Rp1.081.080,00	1,081,080.00	-	-	-	1,081,080.00	5,405.40	-	-	-	5,405.40
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN NOVEMBER 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN .		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Pertanggungjawaban Ganda Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp410.000,00	410,000.00	-	-	-	410,000.00	2,050.00	-	-	-	2,050.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. SAAT PEMERIKSAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Belanja yang belum di dukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp1.380.000,00	1,380,000.00	-	-	-	1,380,000.00	6,900.00	-	-	-	6,900.00
	Terdapat Kelebihan Bayar Belanja Pakaian Hari-hari tertentu sebesar Rp690.000,00	690,000.00	-	-	-	690,000.00	3,450.00	-	-	-	3,450.00
	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp5.683.100,00	5,683,100.00	-	-	-	5,683,100.00	28,415.50	-	-	-	28,415.50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BANTUAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2020 DARI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA YAYASAN NURUL IMAN BUKIT KUALA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	penggunaan Dana Hibah Belanja Bahan Material yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp40.390.400,00	30,390,400.00	-	-	-	30,390,400.00	151,952.00	-	-	-	151,952.00
	penggunaan Dana Hibah pembelian Bahan Material yang tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp70.444.600,00	70,444,600.00	-	-	-	70,444,600.00	352,223.00	-	-	-	352,223.00
	Kelebihan Pembayaran Upah Tenaga Pekerja dari nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.050.000,00	8,050,000.00	-	-	-	8,050,000.00	40,250.00	-	-	-	40,250.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN MEI 2020 S.D. MEI 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kekurangan Penyetoran PPh pasal 21 dari pembayaran Yang diserahkan kepada Masyarakat/ pihak ketiga atas Pemenang Lomba Desa/Kelurahan, OPD, dan LKD Kabupaten/Kota sebesar Rp2.250.000,00	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	7,250.00	-	-	-	7,250.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pengadaan Partisi Ruang Kerja Tahun 2020 sebesar Rp7.651.260,00	7,651,260.00	-	-	-	7,651,260.00	38,256.30	-	-	-	38,256.30
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SAAT PEMERIKSAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas kekeurangan Volume pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.169.747,86	2,169,747.86	-	-	-	2,169,747.86	10,848.74	-	-	-	10,848.74
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG BINA MARGA DAN BIDANG JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air (mekanik) 23,79 m3 dengan senilai Rp1.191.325,23	1,191,325.23	-	-	-	1,191,325.23	5,956.63	-	-	-	5,956.63
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DANA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laporan Hasil Akhir dan Back Up Data Kegiatan Pembangunan Masjid Asrama Haji Transit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tidak dibuat sehingga Terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp900.000,00	900,000.00	-	-	-	900,000.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS DI KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kekurangan Volume pada Kegiatan Pekerjaan Perawatan Gedung Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.213.233,52	1,213,233.52	-	-	-	1,213,233.52	6,066.17	-	-	-	6,066.17
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEKERJAAN PELEBARAN JALAN LINGKAR TIMUR; REBO-TANJUNG PESONA-JELITIK-SIMPANG PERAHU PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PUPRPRKP) PROV.KEP.BABEL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Bayar Pekerjaan Laston Lapis Aus (ACWC) dari STA 0+378 s.d. STA6+500 sebesar Rp14.976.100,00	14,976,100.00	-	-	-	14,976,100.00	74,880.50	-	-	-	74,880.50
	Terdapat Kelebihan Bayar Pekerjaan Lapis Antara (ACBC) dari STA 0+685 s.d. STA6+500 sebesar Rp4.686.200,00	4,686,200.00	-	-	-	4,686,200.00	23,431.00	-	-	-	23,431.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENERIMA BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKAT DAN BANTUAN SOSIAL WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Saldo Dana Penggunaan Dana Hibah di Rekening Bank Lembaga Daarul Jannah Air Baru Air Gegas sebesar Rp200.000,00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
	Terdapat Pembelian Bahan Material Tidak Sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.760.000,00	2,760,000.00	-	-	-	2,760,000.00	13,800.00	-	-	-	13,800.00
	Terdapat Kekurangan Volume Belanja Bahan Material sebesar Rp181.000,00	181,000.00	-	-	-	181,000.00	905.00	-	-	-	905.00
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja sebesar Rp125.000,00	125,000.00	-	-	-	125,000.00	625.00	-	-	-	625.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Penggunaan Dana Hibah Bidang Pendidikan yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) sebesar Rp4.902.550,00	4,902,550.00	-	-	-	4,902,550.00	24,512.75	-	-	-	24,512.75
	Terdapat sisa Anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp116.808.000,00	116,808,000.00	-	-	-	116,808,000.00	584,040.00	-	-	-	584,040.00
	Terdapat kelebihan pembayaran upah pekerjaan pengecatan dinding tampak luar kelas sebesar Rp2.373.750,00	2,373,750.00	-	-	-	2,373,750.00	11,868.75	-	-	-	11,868.75
	Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemasangan saluran keliling bangunan sebesar Rp2.470.000,00	2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00	12,350.00	-	-	-	12,350.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS DAN BANTUAN SOSIAL YANG TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat ketidaksesuaian perhitungan surat pertanggungjawaban belanja sebesar Rp254.000,00	254,000.00	-	-	-	254,000.00	1,270.00	-	-	-	1,270.00
	Terdapat sisa penggunaan Dana Hibah pada Yayasan Al Falah Bangka Indonesia sebesar Rp20.160.000,00	20,160,000.00	-	-	-	20,160,000.00	100,800.00	-	-	-	100,800.00
							-	-	-	-	-
	KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kekurangan Volume Pasangan Daun Pintu sebanyak 8 (delapan) buah	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00
							-	-	-	-	-
	DANA HIBAH APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdapat Kelebihan Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Nasjid sebesar Rp2.455.000,00	2,455,000.00	-	-	-	2,455,000.00	12,275.00	-	-	-	12,275.00
	Terdapat Penggunaan Dana Hibah Belanja Bahan Naterial tidak terpasang sebesar Rp2.724.500,00	2,724,500.00	-	-	-	2,724,500.00	13,622.50	-	-	-	13,622.50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR RINCIAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN IX
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

No	Nama OPD	BAHAN	SUKU CADANG	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	NATURA DAN PAKAN	PERSEDIAAN DALAM PROSES	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	105,315,113.00	3,989,000.00	2,451,840,604.05	70,730,264.46	408,145,293.98	-	11,675,000.00	-	**3,051,695,275.49**
2	Dinas Kesehatan	269,437,111.80	-	419,915,852.00	29,738,341,477.31	193,454,528.23	-	-	-	**30,621,148,969.34**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang danPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	3,455,420.00	-	37,764,428,840.00	-	-	-	**37,767,884,260.00**
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	4,964,500.00	-	-	-	-	-	**4,964,500.00**
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	27,885,600.00	-	-	-	-	-	**27,885,600.00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	5,668,232,859.20	-	-	-	**5,668,232,859.20**
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,244,000.01	-	99,565,721.00	5,605,200.00	-	-	0.04	-	**107,414,921.05**
8	Dinas Tenaga Kerja	-	-	1,488,900.00	95,000.00	-	-	-	-	**1,583,900.00**
9	Dinas P3CSKB	-	-	53,773,000.00	-	-	-	-	-	**53,773,000.00**
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	745,120,244.00	-	-	324,596,070.00	-	417,355,575.00	29,250,000.00	-	**1,516,321,889.00**
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31,258,358.73	-	45,203,141.32	300,000.00	-	-	-	-	**76,761,500.05**
12	Dinas Perhubungan	3,589,775.00	-	17,742,500.00	-	-	-	-	-	**21,332,275.00**
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	7,458,000.00	-	-	-	-	-	**7,458,000.00**
14	Dinas Koperasi, UKM	909,500.00	-	7,555,100.00	-	-	-	-	-	**8,464,600.00**
15	DP2TPM	-	-	207,308,960.00	1,125,000.00	-	-	-	-	**208,433,960.00**
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan Olahraga	60,687,055.00	-	114,440,775.00	-	49,890,000.00	-	-	-	**225,017,830.00**
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	62,771,753.00	-	-	-	-	-	**62,771,753.00**
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	255,592,515.30	15,310,000.00	25,953,476.00	7,100,000.00	675,000.00	-	9,940,000.00	-	**314,570,991.30**
19	Dinas ESDM	-	-	9,341,900.01	-	-	-	-	-	**9,341,900.01**
20	Disperindag	-	-	42,315,500.00	-	-	-	-	-	**42,315,500.00**
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	-	-	1,137,000.00	-	-	-	-	-	**1,137,000.00**
22	Badan Keuangan Daerah	3,955.91	-	776,855,378.21	14,000.00	-	-	-	-	**776,873,334.12**
23	BKPSDM	-	-	1,739,000.00	-	-	517,000.00	-	-	**2,256,000.00**
24	Inspektorat Daerah	-	-	2,607,556.00	-	940,000.00	-	161,500.00	-	**3,709,056.00**
25	Sekretariat Daerah	58,907,570.00	-	281,254,085.00	-	12,495,000.00	-	-	-	**352,656,655.00**
26	Sekretariat DPRD	20,903,500.00	-	89,502,846.00	-	-	-	-	-	**110,406,346.00**
27	Badan Penghubung	-	-	41,740,600.00	-	135,850,000.00	-	-	-	**177,590,600.00**
28	PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
JUMLAH		**1,553,968,698.75**	**19,299,000.00**	**4,797,817,167.59**	**30,147,907,011.77**	**44,234,111,521.41**	**417,872,575.00**	**51,026,500.04**	**-**	**81,222,002,474.56**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI KUPEM
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN X
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	WILAYAH LAYANAN	JUMLAH DEBITUR	PINJAMAN POKOK	BUNGA	TOTAL PINJAMAN (POKOK+BUNGA)	SISA PINJAMAN			SETORAN	SETORAN	SETORAN	JUMLAH SETORAN
						SISA POKOK	SISA BUNGA	TOTAL SISA PINJAMAN (SISA POKOK + SISA BUNGA)				
						...S.D DES 2021	...S.D DES 2021	...S.D DES 2021	SD 2019	2020	2021	...S.D DES 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*	*7*	*8*	*9=(7+8)*	*10*			*11*
1	BRI CABANG TANJUNG PANDAN	375	1,452,000,000	265,500,000	1,717,500,000	1,129,877,407	90,765,978	1,220,643,385	494,160,862	0	1,744,167	495,905,029
	A. KABUPATEN BELITUNG											
	B. BELITUNG TIMUR											
2	BRI CABANG SUNGAILIAT	391	1,912,000,000	344,160,000	2,256,160,000	1,270,952,051	228,799,708	1,499,751,759	766,806,123	7,593,305		774,399,428
	A. KABUPATEN BANGKA											
	B. KABUPATEN BANGKA BARAT											
3	BRI CABANG PANGKALPINANG	433	2,145,500,000	386,212,216	2,531,712,216	1,853,616,120	265,080,619	2,118,696,739	423,076,643	2,458,000		425,534,643
	A. KOTA PANGKALPINANG											
	B. KABUPATEN BANGKA SELATAN											
	C. KABUPATEN BANGKA TENGAH											
	JUMLAH	**1,199**	**5,509,500,000**	**995,872,216**	**6,505,372,216**	**4,254,445,578**	**584,646,305**	**4,839,091,883**	**1,684,043,628**	**10,051,305**	**1,744,167**	**1,695,839,100**

Catatan

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR PERSENTASE KEPEMILIKAN INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rp)

NO.	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	TAHUN AWAL PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL PADA AWAL PERNYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PERSENTASE KEPEMILIKAN PEMROV. KEP.BABEL	JUMLAH SAHAM (LEMBAR)	
1	3	4	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BPD Sumsel dan Babel Cabang Pangkalpinang	Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung										
		Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2003	1,000,000,000.00	40,377,000,000.00	-	40,377,000,000.00		40,377,000,000.00	3.10%		
2	PT. Sumatera Shipping Lines		2003	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	10.01%	-	
3	PT. Sumatera Promotion Centre		2003	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	6.67%	-	
4	PT. Bangka Belitung Sejahtera	Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Bangka Belitung Sejahtera										
		Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah										
		Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	2006	4,000,000,000.00	-	-	-	-	-	98.00%	-	EQUITY
5	Riau Air Lines	Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines	2006	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	0.60%	1,000	
6	Bank Syariah Bangka	Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung										
		Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung										
		Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	2006	600,000,000.00	3,600,000,000.00	-	3,600,000,000.00		3,600,000,000.00	7.60%	359,999	
7	PDAM Kota Pangkalpinang	Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang	2007	8,216,750,000.00	8,216,750,000.00	-	8,216,750,000.00	-	8,216,750,000.00	10.10%	-	
8	PDAM Kabupaten Belitung	Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung	2007	731,250,000.00	731,250,000.00	-	731,250,000.00	-	731,250,000.00	1.79%	-	
9	PT JAMKRIDA BABEL	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	2011	20,000,000,000.00	24,480,345,007.40	-	24,480,345,007.40	270,034,738.71	24,750,379,746.11	64.29%	22,500	EQUITY
JUMLAH					78,605,345,007.40	-	78,605,345,007.40	270,034,738.71	78,875,379,746.11			

LAMPIRAN XII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR MUTASI ASET TETAP TAHUN 2021

(dalam Rp)

NO	BIDANG BARANG	SALDO PER 31 DES. 2020	MUTASI KURANG				MUTASI TAMBAH		
			(-) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi	Penghapusan	(+) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.1	**Tanah**	**655,916,133,677.00**	**-**	**53,440,475,424.00**	**2,703,690,000.00**	**110,304,515.00**	**1,073,853,250.00**	**53,440,475,424.00**	**25,600,000.00**
B.2	**Peralatan & Mesin**	**1,105,993,109,117.53**	**1,062,450.00**	**32,859,105,046.01**	**11,550,647,709.80**	**1,958,380,741.00**	**163,715,000.00**	**32,867,617,046.01**	**7,962,997,688.00**
B.2.01	Alat Besar	53,532,187,740.66	-	628,568,000.00	10,366,000.00	9,642,000.00	-	628,568,000.00	-
B.2.02	Alat Angkutan	158,983,409,840.27	-	15,050,667,205.77	8,607,499.00	295,000,000.00	-	15,050,667,205.77	2,974,050.00
B.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	39,279,772,057.93	-	1,194,544,557.32	100,175,420.00	9,369,000.00	-	1,195,344,557.32	10,750,000.00
B.2.04	Alat Pertanian	11,186,175,713.53	-	316,034,400.00	14,375,000.00	-	-	316,034,400.00	228,230,930.00
B.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	211,208,500,685.85	1,062,450.00	8,085,825,312.92	3,917,217,364.00	629,527,747.00	87,715,000.00	8,087,725,312.92	2,220,690,033.00
B.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	28,223,545,202.94	-	1,160,722,089.00	114,840,136.00	198,608,500.00	-	1,160,722,089.00	253,616,315.00
B.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	303,285,093,966.28	-	3,500,000.00	42,782,296.00	-	76,000,000.00	3,500,000.00	-
B.2.08	Alat Laboratorium	106,113,566,333.06	-	302,324,700.00	6,963,151,858.80	48,217,144.00	-	302,324,700.00	-
B.2.09	Alat Persenjataan	1,782,251,008.00	-	500,506,600.00	13,550,800.00	-	-	505,978,600.00	-
B.2.10	Komputer	158,364,698,469.97	-	4,800,208,681.00	319,682,088.00	763,476,350.00	-	4,800,548,681.00	5,239,869,220.00
B.2.11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	69,144,585.00	-	-	-	-	-	-	-
B.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	1,143,500.00	-	-	-	-
B.2.15	Alat Keselamatan Kerja	2,464,791,486.00	-	19,050,000.00	-	4,540,000.00	-	19,050,000.00	-
B.2.16	Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.17	Peralatan Proses/Produksi	12,003,500.00	-	-	800,000.00	-	-	-	6,867,140.00
B.2.18	Rambu - Rambu	29,450,037,009.04	-	86,100,000.00	9,989,000.00	-	-	86,100,000.00	-
B.2.19	Peralatan Olah Raga	2,037,931,519.00	-	711,053,500.00	33,966,748.00	-	-	711,053,500.00	-
B.3	**Gedung dan Bangunan**	**1,364,637,459,366.93**	**47,200,000.00**	**122,767,521,144.30**	**1,952,534,446.00**	**3,904,120,500.00**	**-**	**122,767,521,144.30**	**20,359,270,604.00**
B.3.01	Bangunan Gedung	1,354,158,445,766.93	47,200,000.00	122,618,035,144.30	1,749,640,446.00	3,904,120,500.00	-	122,618,035,144.30	20,042,048,904.00
B.3.02	Monumen	4,102,508,150.00	-	56,671,000.00	193,794,000.00	-	-	56,671,000.00	-
B.3.03	Bangunan Menara	5,433,819,450.00	-	-	-	-	-	-	-
B.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	942,686,000.00	-	92,815,000.00	9,100,000.00	-	-	92,815,000.00	317,221,700.00
B.4	**Jalan, Irigasi & Jaringan**	**3,197,131,609,777.32**	**-**	**3,353,698,335.96**	**180,305,000.00**	**10,446,429.00**	**18,856,525.60**	**3,353,698,335.96**	**-**
B.4.01	Jalan dan Jembatan	2,782,332,204,055.84	-	241,850,288.67	154,705,000.00	-	17,556,525.60	241,850,288.67	-
B.4.02	Bangunan Air/Irigasi	295,409,664,592.61	-	2,739,987,552.00	25,600,000.00	-	-	2,739,987,552.00	-
B.4.03	Instalasi	71,577,883,283.07	-	154,622,495.29	-	10,446,429.00	-	154,622,495.29	-
B.4.04	Jaringan	47,811,857,845.80	-	217,238,000.00	-	-	1,300,000.00	217,238,000.00	-
B.5	**Asset Tetap Lainnya**	**65,991,658,734.00**	**-**	**175,397,340.00**	**15,882,614,100.00**	**4,861,002.00**	**-**	**175,397,340.00**	**174,024,000.00**
B.5.01	Bahan Perpustakaan	49,047,187,789.00	-	170,312,340.00	-	-	-	170,312,340.00	-
B.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7,113,909,230.00	-	5,085,000.00	-	-	-	5,085,000.00	-
B.5.03	Hewan	1,637,375,000.00	-	-	-	-	-	-	-
B.5.04	Biota Perairan	-	-	-	-	-	-	-	-
B.5.05	Tanaman	329,946,456.00	-	-	-	4,861,002.00	-	-	-
B.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-
B.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	7,863,240,259.00	-	-	15,882,614,100.00	-	-	-	174,024,000.00
B.6	**Konstruksi dlm pengerjaan**	**85,516,052,744.00**	**1,404,109,443.20**	**3,135,906,180.00**	**330,929,947.00**	**-**	**2,445,720,850.00**	**3,135,906,180.00**	**-**
TOTAL ASET TETAP 2021		**6,475,186,023,416.78**	**1,452,371,893.20**	**215,732,103,470.27**	**32,600,721,202.80**	**5,988,113,187.00**	**3,702,145,625.60**	**215,740,615,470.27**	**28,521,892,292.00**

MUTASI BARANG MILIK DAERAH							
MUTASI TAMBAH							SALDO PER 31 DES. 2021
Hibah	Kapiltalisasi Belanja Non Modal	Belanja Modal (BOS)	Belanja Modal IPP	Belanja Modal BLUD	Belanja Modal APBD	Belanja Tak Terduga	
11	12	13	14	15	16	17	18
2,581,146,706.47	**4,400,000.00**	-	-	-	-	-	**656,787,139,118.47**
12,741,533,982.00	**224,841,815.00**	**18,758,191,948.00**	**628,358,977.00**	**1,245,743,799.00**	**43,629,331,127.20**	-	**1,177,846,244,552.93**
277,260,000.00	-	79,501,730.00	-	46,330,000.00	1,129,422,000.00	-	55,044,693,470.66
3,096,133,746.00	33,171,215.00	45,232,500.00	1,140,000.00	-	3,640,078,300.00	-	165,498,532,152.27
802,257,845.00	3,190,100.00	454,695,465.00	1,800,000.00	24,300,000.00	89,985,500.00	-	40,558,006,547.93
22,217,650.00	-	47,614,000.00	44,270,000.00	-	135,912,500.00	-	11,650,045,793.53
4,589,717,049.00	175,050,000.00	11,594,631,697.00	476,908,977.00	931,458,799.00	5,880,165,475.00	-	232,618,930,154.85
199,093,030.00	110,000.00	956,336,419.00	44,775,000.00	580,000.00	1,060,352,741.00	-	30,424,960,071.94
200,897,278.00	3,025,000.00	55,734,250.00	-	92,888,500.00	10,774,258,325.00	-	314,445,115,023.28
545,845,270.00	3,687,500.00	751,754,175.00	2,800,000.00	-	15,102,297,300.00	-	115,508,581,575.26
-	-	48,604,800.00	-	-	6,754,000.00	-	1,829,531,008.00
2,604,630,664.00	3,608,000.00	4,403,655,234.00	50,440,000.00	150,186,500.00	2,823,790,979.00	-	172,558,060,628.97
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	-	-	69,144,585.00
115,239,650.00	-	6,000,000.00	-	-	643,500.00	-	120,739,650.00
4,400,000.00	-	100,404,850.00	-	-	13,496,000.00	-	2,578,552,336.00
-	-	18,920,000.00	-	-	-	-	18,920,000.00
283,841,800.00	-	800,000.00	-	-	-	-	302,712,440.00
-	-	32,901,000.00	-	-	2,972,174,507.20	-	32,445,123,516.24
-	3,000,000.00	161,405,828.00	6,225,000.00	-	-	-	2,174,595,599.00
5,982,912,907.00	**3,643,944,245.00**	**706,384,778.00**	**262,217,360.00**	**695,495,035.86**	**48,861,864,785.53**	-	**1,439,245,694,136.32**
5,860,160,107.00	3,593,159,245.00	625,384,178.00	219,738,000.00	695,495,035.86	48,467,164,785.53	-	1,427,960,635,076.32
-	50,785,000.00	3,985,000.00	-	-	-	-	3,963,484,150.00
-	-	-	-	-	-	-	5,433,819,450.00
122,752,800.00	-	77,015,600.00	42,479,360.00	-	394,700,000.00	-	1,887,755,460.00
44,710,499,590.00	**2,775,821,400.00**	**623,991,263.00**	**87,585,000.00**	**323,661,465.00**	**261,647,404,458.94**	-	**3,507,128,678,050.86**
11,037,962,110.00	2,671,893,400.00	327,174,663.00	25,355,000.00	198,108,465.00	241,705,951,552.00	-	3,038,161,500,771.44
29,788,007,020.00	63,278,000.00	37,982,000.00	60,709,000.00	-	19,735,721,993.42	-	345,069,762,606.03
3,613,749,490.00	-	128,719,000.00	1,521,000.00	125,553,000.00	194,708,913.52	-	75,631,688,257.59
270,780,970.00	40,650,000.00	130,115,600.00	-	-	11,022,000.00	-	48,265,726,415.80
123,497,805.07	-	**7,254,005,700.00**	**4,950,000.00**	-	**16,087,091,600.00**	-	**73,747,752,737.07**
123,497,805.07	-	7,239,005,700.00	4,950,000.00	-	-	-	56,414,641,294.07
-	-	15,000,000.00	-	-	204,477,500.00	-	7,333,386,730.00
-	-	-	-	-	-	-	1,637,375,000.00
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	-	-	325,085,454.00
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	15,882,614,100.00	-	8,037,264,259.00
2,209,612,000.00	**2,660,969,728.00**	**30,000,000.00**	-	**1,463,825,000.00**	**29,145,060,991.00**	-	**121,736,201,922.80**
68,349,202,990.54	**9,309,977,188.00**	**27,372,573,689.00**	**983,111,337.00**	**3,728,725,299.86**	**399,370,752,962.67**	-	**6,976,491,710,518.45**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XIII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	SKPD	KETERANGAN	SALDO AWAL 31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KAPITALISASI	REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR 31/12/2021
1	**DINAS PENDIDIKAN**		**364,282,000.00**	**2,506,612,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,870,894,000.00**
	1	Jasa Konsultan Perencana Pemb.Fasilitas Penunjang PLA	44,627,000.00	-	-	-	-	44,627,000.00
	2	SMK Negeri 1 KOBA (Bangka Tengah)	292,655,000.00	-	-	-	-	292,655,000.00
	3	SMKN 1 Mendo Barat	27,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	57,000,000.00
	4	SMKN 1 Kelapa Kampit	-	2,209,612,000.00	-	-	-	2,209,612,000.00
	5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Asrama SMA N 1 Kep Pongok	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
	6	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan USB SMA N 2 Sungai Liat	-	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
	7	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan USB SMKN 2 Pangkalpinang	-	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
	8	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Sekolah SMKN 1 Kelapa	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
	9	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
	10	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktek siswa SMKN 1 Manggar	-	32,000,000.00	-	-	-	32,000,000.00
2	**DINAS KESEHATAN**		**49,198,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,198,000.00**
	1	DED Perluasan Gedung Kantor	49,198,000.00	-	-	-	-	49,198,000.00
3	**RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI**		**40,949,664,450.00**	**1,463,825,000.00**	**-**	**-**	**-**	**42,413,489,450.00**
	1	DED RUMAH JOMPO	197,120,000.00	-	-	-	-	197,120,000.00
	2	DED DAPUR RS	196,845,000.00	-	-	-	-	196,845,000.00
	3	DED RUMAH LAUNDRY	171,160,000.00	-	-	-	-	171,160,000.00
	4	DED RUMAH DUKA & FORENSIK	148,566,000.00	-	-	-	-	148,566,000.00
	5	PEMBANGUNAN GEDUNG B	30,120,932,450.00	-	-	-	-	30,120,932,450.00
	6	BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM	10,115,041,000.00	-	-	-	-	10,115,041,000.00
	7	Konsultan Perencanaan Bangunan Kesehatan BLUD /RADIOTERAPI	-	972,950,000.00	-	-	-	972,950,000.00
	8	Konsultan Perencanaan Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung BLUD	-	296,175,000.00	-	-	-	296,175,000.00
	9	Konsultan Perencanaan Bangunan Kesehatan BLUD (Rumah Dinas Wakil Direktur , Bangunan Rumah, Pagar, Jalan)Rincian Barang	-	194,700,000.00	-	-	-	194,700,000.00
4	**RUMAH SAKIT JIWA**		**240,593,000.00**	**-**	**(97,790,000.00)**	**-**	**-**	**142,803,000.00**
	1	DED REHAB GEDUNG KANTOR	49,200,000.00	-	-	-	-	49,200,000.00
	2	DED GEDUNG IGD	44,400,000.00	-	-	-	-	44,400,000.00
	3	KONSULTAN PERENCANAAN REHAB GEDUNG POLIKLINIK DAN GEDUNG KANTOR	49,203,000.00	-	-	-	-	49,203,000.00
	4	DED GEDUNG RAWAT JALAN	97,790,000.00	-	(97,790,000.00)			-
5	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**		**21,881,048,500.00**	**-**	**(21,881,048,500.00)**	**-**	**-**	**-**
	4	Penyusunan DED Jaringan Irigasi Air KLUBI, JANGKAR ASAM, SD. Pasak	272,378,000.00	-	(272,378,000.00)	-	-	-
	5	DED Sungai Air Raya	149,092,000.00	-	(149,092,000.00)	-	-	-
	7	DED Mesjid Raya	566,266,000.00	-	(566,266,000.00)	-	-	-
	13	DED Gedung Tender	59,400,000.00	-	(59,400,000.00)	-	-	-
	15	Penyusunan DED Gedung PMI	48,500,000.00	-	(48,500,000.00)	-	-	-
	17	DED Studi Kelayakan Jalan	163,831,800.00	-	(163,831,800.00)	-	-	-
	20	DED/Landscape Bangunan Gedung	416,515,000.00	-	(416,515,000.00)	-	-	-
	22	Penyunan DED Kolong Disamping Polda Dalam komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	296,618,000.00	-	(296,618,000.00)	-	-	-
	23	DED dan Amdal Jembatan Teluk Belinyu	6,505,514,000.00	-	(6,505,514,000.00)	-	-	-

NO	SKPD	KETERANGAN	SALDO AWAL 31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KAPITALISASI	REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR 31/12/2021
	24	DED Pembangunan Kantor Terpadu	1,109,625,000.00	-	(1,109,625,000.00)	-	-	-
	26	DED gedung palang merah	173,900,000.00	-	(173,900,000.00)	-	-	-
	27	DED gedung ULP	99,000,000.00	-	(99,000,000.00)	-	-	-
	28	DED Gedung Workshop	183,300,000.00	-	(183,300,000.00)	-	-	-
	29	DED Jalan Semabung Sampur	194,797,350.00	-	(194,797,350.00)	-	-	-
	30	DED Pelebaran Jalan Semabung	454,527,150.00	-	(454,527,150.00)	-	-	-
	31	DED Perencanaan Pembangunan Jalan	232,276,000.00	-	(232,276,000.00)	-	-	-
	32	DED Jembatan Koba-Lubuk Besar	693,187,000.00	-	(693,187,000.00)	-	-	-
	33	DED Jembatan Penagan Tj. Tedung	592,487,000.00	-	(592,487,000.00)	-	-	-
	34	DED Pembangunan Jembatan Kerabut	365,365,000.00	-	(365,365,000.00)	-	-	-
	36	Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Kab. Bangka Barat (KDP)	44,000,000.00	-	(44,000,000.00)	-	-	-
	37	DED Rumah Ibadah Masjid Air Merbau Tanjungpandan	69,500,000.00	-	(69,500,000.00)	-	-	-
	41	DED Masjid Raya Belitung	130,780,000.00	-	(130,780,000.00)	-	-	-
	42	Konsultan Perencanaan FS Jembatan	334,895,000.00	-	(334,895,000.00)	-	-	-
	44	Konsultan Perencanaan DED D.I.R Mendu	522,500,000.00	-	(522,500,000.00)	-	-	-
	45	Konsultan Perencanaan DED D.I.R Bangka Kota	558,826,000.00	-	(558,826,000.00)	-	-	-
	46	Konsultan Perencanaan SID Banjir Su	678,300,000.00	-	(678,300,000.00)	-	-	-
	47	Konsultan Perencanaan SID Banjir Ke	485,991,000.00	-	(485,991,000.00)	-	-	-
	48	Konsultan Perencanaan Pek. SID Banjir Abrasi Pantai Tikus Kec. Sungailiat	679,200,000.00	-	(679,200,000.00)	-	-	-
	49	Konsultan Perencanaan Pek. DED Kolam Retensi Sungai Kampung Ulu Kec. Mentok	341,700,000.00	-	(341,700,000.00)	-	-	-
	50	Konsultan Perencanaan Pek.DED Kolam Retensi Sungai Parit Tiga Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat	339,400,000.00	-	(339,400,000.00)	-	-	-
	51	Pek. SID Banjir Desa Baru Kab. Belitung Timur	481,600,000.00	-	(481,600,000.00)	-	-	-
	52	Pek. Konsultan Perencanaan Pek. SID Banjir Abrasi Air Anyir Kec. Merawang	676,370,000.00	-	(676,370,000.00)	-	-	-
	53	DED Pembangunan Talud Pantai Tanjung Gunung (Konsultan Perencanaan)	637,000,000.00	-	(637,000,000.00)	-	-	-
	54	DED Pembangunan Talud Pantai Tapak Hantu (Konsultan Perencanaan)	767,214,000.00	-	(767,214,000.00)	-	-	-
	56	JL.BADAU-DENDANG	1,259,934,100.00	-	(1,259,934,100.00)	-	-	-
	57	JL.DENDANG-GANTUNG	1,297,259,100.00	-	(1,297,259,100.00)	-	-	-
6	**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN**		**-**	**27,149,283,056.80**	**-**	**-**	**-**	**27,149,283,056.80**
	1	Penyusunan DED Jaringan Irigasi Air KLUBI, JANGKAR ASAM, SD. Pasak	-	272,378,000.00	-	-	-	272,378,000.00
	2	DED Sungai Air Raya	-	149,092,000.00	-	-	-	149,092,000.00
	3	DED Mesjid Raya	-	566,266,000.00	-	-	-	566,266,000.00
	4	DED Gedung Tender	-	59,400,000.00	-	-	-	59,400,000.00
	5	Penyusunan DED Gedung PMI	-	48,500,000.00	-	-	-	48,500,000.00
	6	DED Studi Kelayakan Jalan	-	163,831,800.00	-	-	-	163,831,800.00
	7	DED/Landscape Bangunan Gedung	-	416,515,000.00	-	-	-	416,515,000.00
	8	Penyusunan DED Kolong Disamping Polda Dalam komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	296,618,000.00	-	-	-	296,618,000.00
	9	DED dan Amdal Jembatan Teluk Belinyu	-	6,505,514,000.00	-	-	-	6,505,514,000.00
	10	DED Pembangunan Kantor Terpadu	-	1,109,625,000.00	-	-	-	1,109,625,000.00
	11	DED gedung palang merah	-	173,900,000.00	-	-	-	173,900,000.00
	12	DED gedung ULP	-	99,000,000.00	-	-	-	99,000,000.00
	13	DED Gedung Workshop	-	183,300,000.00	-	-	-	183,300,000.00
	14	DED Jalan Semabung Sampur	-	194,797,350.00	-	-	-	194,797,350.00
	15	DED Pelebaran Jalan Semabung	-	454,527,150.00	-	-	-	454,527,150.00
	16	DED Perencanaan Pembangunan Jalan	-	232,276,000.00	-	-	-	232,276,000.00
	17	DED Jembatan Koba-Lubuk Besar	-	693,187,000.00	-	-	-	693,187,000.00
	18	DED Jembatan Penagan Tj. Tedung	-	592,487,000.00	-	-	-	592,487,000.00
	19	DED Pembangunan Jembatan Kerabut	-	365,365,000.00	-	-	-	365,365,000.00
	20	Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Kab. Bangka Barat (KDP)	-	44,000,000.00	-	-	-	44,000,000.00

NO	SKPD	KETERANGAN	SALDO AWAL 31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KAPITALISASI	REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR 31/12/2021
	21	DED Rumah Ibadah Masjid Air Merbau Tanjungpandan	-	69,500,000.00	-	-	-	69,500,000.00
	22	DED Masjid Raya Belitung	-	130,780,000.00	-	-	-	130,780,000.00
	23	Konsultan Perencanaan FS Jembatan	-	334,895,000.00	-	-	-	334,895,000.00
	24	Konsultan Perencanaan DED D.I.R Mendu	-	522,500,000.00	-	-	-	522,500,000.00
	25	Konsultan Perencanaan DED D.I.R Bangka Kota	-	558,826,000.00	-	-	-	558,826,000.00
	26	Konsultan Perencanaan SID Banjir Su	-	678,300,000.00	-	-	-	678,300,000.00
	27	Konsultan Perencanaan SID Banjir Ke	-	485,991,000.00	-	-	-	485,991,000.00
	28	Konsultan Perencanaan Pek. SID Banjir Abrasi Pantai Tikus Kec. Sungailiat	-	679,200,000.00	-	-	-	679,200,000.00
	29	Konsultan Perencanaan Pek. DED Kolam Retensi Sungai Kampung Ulu Kec. Mentok	-	341,700,000.00	-	-	-	341,700,000.00
	30	Konsultan Perencanaan Pek.DED Kolam Retensi Sungai Parit Tiga Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat	-	339,400,000.00	-	-	-	339,400,000.00
	31	Pek. SID Banjir Desa Baru Kab. Belitung Timur	-	481,600,000.00	-	-	-	481,600,000.00
	32	Pek. Konsultan Perencanaan Pek. SID	-	676,370,000.00	-	-	-	676,370,000.00
	33	DED Pembangunan Talud Pantai Tanjung Gunung (Konsultan	-	637,000,000.00	-	-	-	637,000,000.00
	34	DED Pembangunan Talud Pantai Tapak Hantu (Konsultan Perencanaan)	-	767,214,000.00	-	-	-	767,214,000.00
	35	JL.BADAU-DENDANG	-	1,259,934,100.00	-	-	-	1,259,934,100.00
	36	JL.DENDANG-GANTUNG	-	1,297,259,100.00	-	-	-	1,297,259,100.00
	37	Pembangunan Kolam Retensi Sungai I	-	5,268,234,556.80				
7	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**		**381,139,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**381,139,000.00**
	1	DED GEDUNG KANTOR	381,139,000.00	-	-	-	-	381,139,000.00
8	**DINAS TENAGA KERJA**		**694,840,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**694,840,000.00**
	1	DED GEDUNG KTR	122,881,000.00	-	-	-	-	122,881,000.00
	2	PEMBANGUNAN LAND CLEARING SELURUH LAHAN BLKI	296,681,300.00	-	-	-	-	296,681,300.00
	3	DED GEDUNG KANTOR	100,277,700.00	-	-	-	-	100,277,700.00
	4	DED LANDSCAPE BLKI	175,000,000.00	-	-	-	-	175,000,000.00
9	**DINAS PANGAN**		**231,192,500.00**	**-**	**(231,192,500.00)**	**-**	**-**	**-**
	1	DED GEDUNG KANTOR	231,192,500.00	-	(231,192,500.00)	-		-
10	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN**		**-**	**540,411,500.00**	**-**	**-**	**-**	**540,411,500.00**
	1	DED GEDUNG KANTOR		231,192,500.00				
	2	GEDUNG BALAI DIKLAT PERTANIAN		309,219,000.00				
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**		**99,300,000.00**	**-**	**(99,300,000.00)**	**-**	**-**	**-**
	1	JASA KONSULTAN PERENCANAAN REHAB GEDUNG KANTOR (DED)	99,300,000.00	-	(99,300,000.00)	-	-	-
12	**KEHUTANAN**		**-**	**149,185,000.00**	**-**	**-**	**-**	**149,185,000.00**
	1	JASA KONSULTAN PERENCANAAN REHAB GEDUNG KANTOR (DED)		99,300,000.00				99,300,000.00
	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		49,885,000.00				49,885,000.00
13	**DINAS PERHUBUNGAN**		**-**	**377,107,481.00**	**-**	**-**	**-**	**377,107,481.00**
	1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (DED Dermaga Mantung)		89,658,940.50				89,658,940.50
	2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (DED Dermaga Bakit)		89,674,040.50				89,674,040.50
	3	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan Penyusunan UKL dan UPL Termintal		98,890,000.00				98,890,000.00
	4	Konsultansi Lingkungan Penyusunan UKL dan UPL Termintal Penyebrangan Bakit		98,884,500.00				98,884,500.00
14	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**89,859,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,859,000.00**
	1	DED Pembangunan Gedung Kantor	89,859,000.00	-	-	-	-	89,859,000.00
15	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**49,800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,800,000.00**
	1	DED Pengembangan Gedung Kantor	49,800,000.00	-	-	-	-	49,800,000.00
16	**DINAS KOPERASI DAN UKM**		**699,154,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**699,154,500.00**
	1	DED GEDUNG PROMOSI	610,109,500.00	-	-	-	-	610,109,500.00

NO	SKPD	KETERANGAN	SALDO AWAL 31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KAPITALISASI	REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR 31/12/2021
	2	Review DED Gedung Pemasaran Produk KUMKM	89,045,000.00	-	-	-	-	89,045,000.00
	3	Konstruksi Pagar	-	-	-	-	-	-
17	**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,**		**-**	**4,493,905,680.00**	**-**	**-**	**-**	**4,493,905,680.00**
	1	Jasa Konsultansi DED Gedung Sentra Kewirausahaan Pemuda		46,530,000.00				46,530,000.00
	2	Jasa Konsultansi DED Landscape Sentra Kewirausahaan Pemuda		29,290,000.00				29,290,000.00
	3	Jasa Konsultansi DED Landscape GOR		39,700,000.00				39,700,000.00
	4	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Stadion & Market		2,380,103,000.00				2,380,103,000.00
	5	Jasa Konsultansi Landscape Gedung PPLP		29,100,000.00				29,100,000.00
	6	DED Drainase GOR		19,600,000.00				19,600,000.00
	7	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen		34,855,400.00				34,855,400.00
	8	DED LINTASAN ATLETIK		95,932,280.00				95,932,280.00
	9	Gedung Olah Raga Desa Irat		1,818,795,000.00				1,818,795,000.00
								-
18	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**2,675,110,680.00**	**-**	**(2,675,110,680.00)**	**-**	**-**	**-**
	1	Jasa Konsultansi DED Gedung Sentra Kewirausahaan Pemuda	46,530,000.00	-	(46,530,000.00)	-	-	-
	2	Jasa Konsultansi DED Landscape Sentra Kewirausahaan Pemuda	29,290,000.00	-	(29,290,000.00)	-	-	-
	3	Jasa Konsultansi DED Landscape GOR	39,700,000.00	-	(39,700,000.00)	-	-	-
	4	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Stadion & Market	2,380,103,000.00	-	(2,380,103,000.00)	-	-	-
	5	Jasa Konsultansi Landscape Gedung PPLP	29,100,000.00	-	(29,100,000.00)	-	-	-
	6	DED Drainase GOR	19,600,000.00	-	(19,600,000.00)	-	-	-
	7	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	34,855,400.00	-	(34,855,400.00)	-	-	-
	8	DED LINTASAN ATLETIK	95,932,280.00	-	(95,932,280.00)	-	-	-
19	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		**2,067,668,500.00**	**144,560,050.00**	**-**	**-**	**-**	**2,212,228,550.00**
	1	DED GEDUNG KANTOR	1,788,505,000.00	-	-	-	-	1,788,505,000.00
	2	DED GEDUNG BPAD	279,163,500.00	-	-	-	-	279,163,500.00
	3	belanja jasa konsultansi perencanaan arisitektur-Jasa Desain arsitektural		99,410,000.00				99,410,000.00
	4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan		45,150,050.00				45,150,050.00
20	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**12,380,543,249.00**	**24,738,805,091.00**	**-**	**-**	**-**	**37,119,348,340.00**
	1	DED HATCHERY BBIP TANJUNG RUSA	29,601,000.00	-	-	-	-	29,601,000.00
	2	DED TAMBAT LABUH TANJUNG BINGA	40,642,800.00	-	-	-	-	40,642,800.00
	4	Perencanaan DED TPI Kurau 2014	376,957,000.00	-	-	-	-	376,957,000.00
	5	TPI Kurau 2015	2,100,362,400.00	-	-	-	-	2,100,362,400.00
	6	TPI Kurau Tahap II 2016	6,114,250,500.00	-	-	-	-	6,114,250,500.00
	7	Penyusunan DED Breakwater Kurau 2016	717,893,600.00	-	-	-	-	717,893,600.00
	8	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar permanen	70,033,700.00	-	-	-	-	70,033,700.00
	9	Dermaga	98,714,000.00	-	-	-	-	98,714,000.00
	10	Dermaga	96,404,000.00	-	-	-	-	96,404,000.00
	11	Dermaga	98,593,000.00	-	-	-	-	98,593,000.00
	12	Dermaga	99,297,000.00	-	-	-	-	99,297,000.00
	13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	2,537,794,249.00	-	-	-	-	2,537,794,249.00
	14	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana di PPI Muara Sungai Baturusa, Fisik (23.099.642.841), Konsultan Perencanaan (852.486.250), Konsultan Pengawas (689.920.000), UKL (96.756.000)	-	24,738,805,091.00	-			24,738,805,091.00
21	**DINAS PERTANIAN**		**309,219,000.00**	**-**	**(309,219,000.00)**	**-**	**-**	**-**
	1	GEDUNG BALAI DIKLAT PERTANIAN	309,219,000.00		(309,219,000.00)	-	-	-
22	**DINAS KEHUTANAN**		**49,885,000.00**	**-**	**(49,885,000.00)**	**-**	**-**	**-**
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,885,000.00	-	(49,885,000.00)	-	-	-

NO	SKPD	KETERANGAN	SALDO AWAL 31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KAPITALISASI	REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR 31/12/2021
23	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**		**988,129,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**988,129,500.00**
	1	DED Gedung Kantor (Badan Diklat)	342,732,500.00	-	-	-	-	342,732,500.00
	2	DED Gedung BKD	295,982,000.00	-	-	-	-	295,982,000.00
	3	Revisi DED Bangunan Gedung BKPSDM	349,415,000.00	-				349,415,000.00
24	**INSPEKTORAT DAERAH**		**275,509,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275,509,500.00**
	1	DED Gedung Arsip dan Perpustakaan	179,459,500.00	-	-	-	-	179,459,500.00
	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96,050,000.00	-	-	-	-	96,050,000.00
25	**SEKRETARIAT DAERAH**		**157,995,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157,995,000.00**
	1	Konsultan Perencanaan Rehab. Bangunan Gedung Serba Guna	68,840,000.00	-	-	-	-	68,840,000.00
	2	Konsultan Perencanaan Rehab. Bangunan Gedung Kantor	89,155,000.00	-				89,155,000.00
26	**SEKRETARIAT DPRD**		**881,921,365.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**881,921,365.00**
	1	DED GEDUNG KANTOR	717,938,865.00	-	-	-	-	717,938,865.00
	2	DED LANDSCAPE PERTAMANAN	96,580,000.00	-	-	-	-	96,580,000.00
	3	DED INTERIOR	67,402,500.00	-	-	-	-	67,402,500.00
TOTAL			**85,516,052,744.00**	**61,563,694,858.80**	**(25,343,545,680.00)**	**-**	**-**	**121,736,201,922.80**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XIV
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	URAIAN	TOTAL	DINAS PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar	39,265,435,206.00	1,214,132,851.00	7,616,803,300.00	10,958,747,836.00	214,286.00
2	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan	128,057,683,418.00	9,564,665,160.00	8,568,053,122.00	5,603,937,951.00	3,868,859,525.00
3	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	29,206,509,613.00	9,850,260,507.00	931,266,219.00	1,593,123,852.00	6,625,000.00
4	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Pertanian	9,732,512,777.00	3,040,307,470.00	295,645,789.00	49,500,000.00	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	183,746,971,960.00	41,528,657,168.00	37,415,655,888.00	3,777,944,792.00	881,038,839.00
6	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi	23,745,472,806.00	8,614,182,235.00	2,662,983,570.00	149,062,242.00	238,967,493.00
7	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kedokteran	231,823,457,671.00	588,392,509.00	228,218,711,066.00	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Laboratorium	63,024,336,902.00	24,253,596,646.00	18,512,755,982.00	2,131,698,728.00	1,701,562.00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	1,356,015,200.00	187,683,122.00	133,437,062.00	2,260,000.00	50,812,500.00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	133,067,046,903.00	69,060,775,270.00	4,908,419,022.00	2,782,333,115.00	619,600,802.00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	10,901,580.00	10,901,580.00	-	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	4,122,451.00	4,122,451.00	-	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	2,146,718,249.00	1,136,288,147.00	97,957,500.00	45,050,767.00	102,500,000.00
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	2,102,222.00	2,102,222.00	-	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	287,171,237.00	3,329,437.00	-	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	24,599,052,528.00	3,232,000.00	-	2,620,666,305.00	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	1,152,783,247.00	443,615,760.00	3,575,001.00	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin SMA/SMK/SLB	-	-	-	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	269,682,729,137.00	109,894,292,825.00	26,618,997,305.00	18,920,230,953.00	932,587,731.00
22	Akumulasi Penyusutan Monumen	936,758,691.00	30,947,248.00	-	38,802,102.00	-
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	1,955,026,602.00	58,731,488.00	-	638,605,904.00	-
24	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	196,967,483.00	1,135,971.00	-	104,780,115.00	-
25	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,330,012,220,842.00	527,916,522.00	30,465,947,523.00	1,231,823,724,845.00	-
26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air dan Irigasi	113,132,341,229.00	1,408,450,505.00	666,209,759.00	86,901,255,076.00	-
27	Akumulasi Penyusutan Instalasi	19,815,835,587.00	920,608,651.00	3,125,978,993.00	573,201,297.00	-
28	Akumulasi Penyusutan Jaringan	17,750,156,839.00	837,138,490.00	1,234,870,238.00	10,370,244,734.00	-
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		**2,624,710,330,380.00**	**283,185,466,235.00**	**371,477,267,339.00**	**1,379,085,170,614.00**	**6,702,907,738.00**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS TENAGA KERJA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	DINAS PERHUBUNGAN
519,323,435.00	157,613,974.00	5,214,287.00	-	3,656,501,825.00	582,444,482.00	417,459,822.00
11,720,429,953.00	2,319,445,457.00	2,081,639,851.00	1,004,054,808.00	4,604,292,026.00	6,780,343,791.00	2,937,896,764.00
233,070,151.00	21,713,417.00	6,973,146,172.00	-	692,021,045.00	1,140,716,440.00	439,138,158.00
2,362,500.00	22,665,136.00	6,250,000.00	-	1,888,462,514.00	217,932,918.00	-
1,461,552,056.00	2,459,560,377.00	2,657,337,214.00	590,683,592.00	3,933,438,993.00	4,750,007,836.00	5,331,605,100.00
2,650,070,283.00	193,676,000.00	223,032,575.00	25,945,000.00	453,678,366.00	916,063,153.00	359,987,157.00
6,041,750.00	35,512,500.00	431,558,914.00	-	177,529,035.00	227,334.00	2,194,995,323.00
1,351,327,117.00	79,435,833.00	3,012,547,738.00	-	2,575,507,543.00	2,838,773,161.00	27,624,583.00
50,151,000.00	-	-	-	-	425,653,663.00	16,736,340.00
434,436,920.00	1,071,485,984.00	1,773,001,661.00	505,940,478.00	2,132,369,351.00	2,765,216,488.00	628,754,096.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
623,131,666.00	-	-	-	-	19,050,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	17,000,000.00	-	-	-	-	21,748,834,723.00
-	4,300,000.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
775,229,094.00	2,860,966,372.00	6,980,669,448.00	979,384,742.00	4,453,632,474.00	2,471,281,163.00	3,721,950,187.00
-	66,424,174.00	13,975,000.00	-	10,434,220.00	15,867,880.00	-
-	-	-	8,177,083.00	-	-	830,376,960.00
-	-	-	-	-	29,700,800.00	-
358,900,584.00	-	1,191,822,067.00	-	2,766,573,504.00	3,491,626.00	56,291,514,520.00
1,037,549,641.00	115,689,305.00	43,451,000.00	-	349,370,942.00	2,684,333.00	1,331,255,487.00
41,632,967.00	20,124,951.00	39,062,708.00	-	230,068,546.00	3,026,460.00	69,927,580.00
26,350,748.00	19,136,288.00	170,135,057.00	-	13,103,211.00	50,897,476.00	11,255,938.00
21,291,559,865.00	**9,464,749,768.00**	**25,602,843,692.00**	**3,114,185,703.00**	**27,936,983,595.00**	**23,013,379,004.00**	**96,359,312,738.00**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
332,071,750.00	-	191,886,000.00	34,313,333.00	4,204,157,663.00	79,733,597.00	6,938,000.00
929,536,029.00	710,615,714.00	754,073,214.00	1,208,367,629.00	11,977,759,856.00	1,730,139,383.00	1,724,296,855.00
6,986,850.00	-	2,200,000.00	12,000,000.00	4,766,513,242.00	-	944,515,754.00
-	2,743,472.00	-	14,072,916.00	4,089,965,906.00	-	-
2,486,447,274.00	2,333,760,218.00	978,584,009.00	1,078,407,034.00	4,953,082,943.00	3,563,073,284.00	1,909,428,448.00
1,597,276,179.00	119,827,526.00	103,133,983.00	86,178,838.00	590,541,670.00	387,112,904.00	216,624,441.00
-	-	-	-	23,542,000.00	875,000.00	-
-	-	-	33,987,498.00	3,362,963,161.00	19,348,333.00	367,049,995.00
-	-	-	-	157,175,005.00	-	138,125,001.00
9,082,315,452.00	634,940,412.00	698,177,153.00	935,225,243.00	2,181,586,123.00	1,367,450,680.00	2,360,601,847.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	19,940,668.00	-	-	23,052,233.00	216,667.00	4,900,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283,841,800.00	-	-
-	-	-	-	-	86,100,000.00	-
-	-	1,266,667.00	-	-	530,815,819.00	-
-	-	-	-	-	-	-
590,133,601.00	1,865,102,853.00	940,028,245.00	72,826,979.00	12,643,078,925.00	14,622,529,174.00	963,600,882.00
-	-	-	-	-	-	-
269,941,667.00	-	-	-	-	-	-
-	2,631,333.00	-	-	58,719,264.00	-	-
-	4,962,500.00	-	-	6,031,343,883.00	23,091,467.00	-
22,333,333.00	85,932,292.00	-	-	20,995,414,842.00	20,381,045.00	-
4,045,834.00	40,799,254.00	19,518,051.00	3,071,086.00	447,808,695.00	30,972,123.00	11,691,167,343.00
-	4,650,743.00	15,296,093.00	7,182,774.00	572,897,366.00	34,531,239.00	26,004,455.00
15,321,087,969.00	**5,825,906,985.00**	**3,704,163,415.00**	**3,485,633,330.00**	**77,363,444,577.00**	**22,496,370,715.00**	**20,353,253,021.00**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SEKRETARIAT DPRD
189,726,249.00	5,594,861,302.00	280,585,535.00	746,247,170.00	343,274,550.00	1,646,519,142.00	475,254,810.00
979,557,714.00	32,604,805,361.00	635,663,214.00	4,509,377,069.00	582,154,045.00	5,203,878,774.00	1,029,180,272.00
1,177,556,343.00	75,467,208.00	12,086,667.00	194,335,238.00	16,600,000.00	20,167,350.00	97,000,000.00
70,604,156.00	32,000,000.00	-	-	-	-	-
1,459,858,294.00	27,563,727,327.00	942,198,916.00	9,487,409,022.00	2,385,016,936.00	10,712,203,747.00	6,610,906,190.00
236,181,498.00	1,613,746,924.00	91,296,120.00	547,469,984.00	342,023,260.00	528,318,208.00	519,154,585.00
3,731,823.00	107,646,667.00	-	-	-	9,528,750.00	25,165,000.00
4,315,528,707.00	68,031,166.00	-	62,584,216.00	-	-	-
-	-	-	193,981,507.00	-	-	-
931,828,745.00	5,761,944,280.00	1,375,912,990.00	1,839,858,010.00	1,574,644,480.00	12,677,694,266.00	4,034,944,663.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,430,000.00	31,046,000.00	-	31,154,601.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	98,940,000.00	24,279,500.00	-
-	81,475,000.00	-	-	-	-	87,735,000.00
-	-	-	-	-	-	-
981,588,559.00	32,744,312,078.00	968,631,390.00	8,906,138,869.00	1,940,048,201.00	7,887,315,473.00	4,981,194,483.00
-	-	-	11,803,000.00	-	-	-
-	149,193,500.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	485,077,119.00	-	-	12,054,350.00	25,800,332.00	-
-	11,155,619.00	-	110,821,666.00	-	-	30,386,384.00
44,835,550.00	1,997,566,621.00	-	8,527,888.00	4,256,249.00	327,761,083.00	164,841,365.00
-	582,533,264.00	-	-	3,386,582,031.00	-	374,521,144.00
10,390,997,638.00	**109,473,543,436.00**	**4,318,804,832.00**	**26,649,599,639.00**	**10,685,594,102.00**	**39,094,621,226.00**	**18,430,283,896.00**

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11,410,007.00	-
3,961,568,596.00	463,091,285.00
-	-
-	-
1,843,664,154.00	651,722,309.00
206,397,279.00	72,541,333.00
-	-
9,874,933.00	-
-	-
442,555,561.00	485,033,811.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
429,439,983.00	537,537,148.00
748,505,067.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
7,032,292.00	-
-	12,825,550.00
7,660,447,872.00	**2,222,751,436.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XV
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PENDIDIKAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	477,555,000.00	47,073,720.00	-	402,877,210.00	121,751,510.00
3	KAJIAN		-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD DINAS PENDIDIKAN	**477,555,000.00**	**47,073,720.00**	**-**	**402,877,210.00**	**121,751,510.00**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KESEHATAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE		-	-	-	-
2	SOFTWARE	1,701,501,000.00	721,825,000.00	-	821,557,266.00	1,601,768,734.00
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD DINAS KESEHATAN	**1,701,501,000.00**	**721,825,000.00**	**-**	**821,557,266.00**	**1,601,768,734.00**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE		-	-	-	-
3	KAJIAN	97,100,000.00	-	97,100,000.00		-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**97,100,000.00**	**-**	**97,100,000.00**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	48,500,000.00	-	48,500,000.00	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**48,500,000.00**	**-**	**48,500,000.00**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE		-	-	-	-
2	SOFTWARE		48,500,000.00	-	12,531,667.00	35,968,333.00
3	KAJIAN	-	146,600,000.00	-	97,100,000.00	49,500,000.00
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					

TOTAL ASET TAK BERWUJUD	-	195,100,000.00	-	109,631,667.00	85,468,333.00

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	1,140,000.00	-	-	1,140,000.00	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		1,140,000.00	-	-	1,140,000.00	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS TENAGA KERJA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE					
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	-	-	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE					
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-

	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PERHUBUNGAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	1,210,000,000.00			1,210,000,000.00	
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**1,210,000,000.00**	**-**	**-**	**1,210,000,000.00**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	15,258,000	-	-	-	15,258,000.00
2	SOFTWARE	731,724,899	409,594,101.00	111,595,000.00	782,122,991.00	247,601,009.00
3	KAJIAN		-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**746,982,899**	**409,594,101.00**	**111,595,000.00**	**782,122,991.00**	**262,859,009.00**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-

TOTAL ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	34,200,000.00	-	712,500.00	33,487,500.00
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	34,200,000.00	-	712,500.00	33,487,500.00

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	-	-	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	34,000,000.00	-	-	9,208,333.00	24,791,667.00
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		34,000,000.00	-	-	9,208,333.00	24,791,667.00

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	3,329,683,000.00	-	-	3,329,683,000.00	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	1,507,806,850.00			464,907,112.00	1,042,899,738.00
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		4,837,489,850.00	-	-	3,794,590,112.00	1,042,899,738.00

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	207,723,900.00	-	207,723,900.00	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					

TOTAL ASET TAK BERWUJUD		207,723,900.00	-	207,723,900.00	-	-
NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	207,723,900.00	-	195,403,176.00	12,320,724.00
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	207,723,900.00	-	195,403,176.00	12,320,724.00

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	-	-	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		-	-	-	-	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	SEKRETARIAT DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	INSPEKTORAT DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	39,270,000.00	-	-	39,270,000.00	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		39,270,000.00	-	-	39,270,000.00	-

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN KEUANGAN DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA					
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	414,204,469.00	229,253,281.00	-	592,158,162.00	51,299,588.00
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA		-	-	-	-
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**414,204,469.00**	**229,253,281.00**	**-**	**592,158,162.00**	**51,299,588.00**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	SEKRETARIAT DPRD				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE					
3	KAJIAN	-	-	-	-	-
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI				
		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
	TOTAL ASET TAK BERWUJUD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	NAMA ASET TAK BERWUJUD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AMORTISASI	SALDO AKHIR 2021
1	LISENSI DAN FRANCHISE	-	-	-	-	-
2	SOFTWARE	-	-	-	-	-
3	KAJIAN					
4	ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XVI
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN									PENGURANGAN				
			+/- CATAT	Alih Status Penggunaan	REKLAS	HIBAH	KAPITALISASI BELANJA	BELANJA MODAL (BOS)	BELANJA MODAL (BLUD)	BELANJA MODAL APBD	JUMLAH	+/- CATAT	Alih Status Penggunaan	REKLAS	PENGHAPUSAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=4+5+6+7+8+9+10+11	12	13	14	15	16=12+13+14+15
DINAS PENDIDIKAN																
1.	Aset Lain-lain	5,560,845,835.49	-	-	-	-	-	-	-	-	(558,990,639.73)	-	-	-	558,990,639.73	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5,560,845,835.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(558,990,639.73)**	**-**	**-**	**-**	**558,990,639.73**	**-**
DINAS KESEHATAN																
1.	Aset Lain-lain	5,446,338,521.00	##########	-	189,057,733.00	2,148,000,000.00	-	-	-	-	3,627,050,533.00	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5,446,338,521.00**	##########	**-**	**189,057,733.00**	**2,148,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,627,050,533.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1.	Aset Lain-lain	134,424,911,584.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,424,911,584.01	-	-	134,424,911,584.01
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	94,759,635,940.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,759,635,940.66	-	-	94,759,635,940.66
	Jumlah	**39,665,275,643.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,665,275,643.35**	**-**	**-**	**39,665,275,643.35**
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.	Aset Lain-lain	399,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,500,000.00	-	-	399,500,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	11,653,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,653,333.00	-	-	11,653,333.00
	Jumlah	**387,846,667.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**387,846,667.00**	**-**	**-**	**387,846,667.00**
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN																
1.	Aset Lain-lain	-	-	134,824,411,584.01	-	-	-	-	-	-	134,824,411,584.01	-	-	-	3,741,195,000.00	3,741,195,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	94,771,289,273.66	-	-	-	-	-	-	94,771,289,273.66	-	11,653,333.00	-	-	11,653,333.00
	Jumlah	**-**	**-**	**40,053,122,310.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,053,122,310.35**	**-**	**(11,653,333.00)**	**-**	**3,741,195,000.00**	**3,729,541,667.00**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
1.	Aset Lain-lain	523,537,167.00	-	21,513,308.00	-	-	-	-	-	-	21,513,308.00	-	8,250,000.00	-	53,906,000.00	62,156,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**523,537,167.00**	**-**	**21,513,308.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,513,308.00**	**-**	**8,250,000.00**	**-**	**53,906,000.00**	**62,156,000.00**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																

1.	Aset Lain-lain	142,944,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**142,944,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.	Aset Lain-lain	49,576,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	2,654,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**46,922,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS SOSIAL

1.	Aset Lain-lain	44,810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,810,000.00	-	-	44,810,000.00	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**44,810,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,810,000.00**	**-**	**-**	**44,810,000.00**	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.	Aset Lain-lain	221,561,724.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,561,724.00	-	-	221,561,724.00	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**221,561,724.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**221,561,724.00**	**-**	**-**	**221,561,724.00**	

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.	Aset Lain-lain	-	-	274,621,724.00	-	-	-	-	-	-	274,621,724.00	-	21,513,308.00	-	-	21,513,308.00	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**-**	**-**	**274,621,724.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274,621,724.00**	**-**	**21,513,308.00**	**-**	**-**	**21,513,308.00**	

DINAS TENAGA KERJA

1.	Aset Lain-lain	407,132,869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**407,132,869.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

1.	Aset Lain-lain	96,925,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,175,000.00	86,175,000.00	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**96,925,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,175,000.00**	**86,175,000.00**	

DINAS PANGAN

1.	Aset Lain-lain	104,258,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,258,000.00	-	-	104,258,000.00	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**104,258,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104,258,000.00**	**-**	**-**	**104,258,000.00**	

DINAS PERTANIAN

1.	Aset Lain-lain	401,452,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,452,750.00	-	-	401,452,750.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**401,452,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**401,452,750.00**	**-**	**-**	**401,452,750.00**

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1.	Aset Lain-lain	-	-	505,710,750.00	-	-	-	-	-	-	505,710,750.00	-	-	-	81,408,000.00	81,408,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**505,710,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**505,710,750.00**	**-**	**-**	**-**	**81,408,000.00**	**81,408,000.00**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.	Aset Lain-lain	315,255,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,255,002.00	-	-	315,255,002.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**315,255,002.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315,255,002.00**	**-**	**-**	**315,255,002.00**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1.	Aset Lain-lain	-	-	1,089,266,236.00	-	-	-	-	-	-	1,089,266,236.00	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**1,089,266,236.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,089,266,236.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS PERHUBUNGAN

1.	Aset Lain-lain	1,561,656,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1,561,656,640.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.	Aset Lain-lain	345,311,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**345,311,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.	Aset Lain-lain	199,044,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**199,044,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.	Aset Lain-lain	283,062,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,406,083.00	260,406,083.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**283,062,333.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260,406,083.00**	**260,406,083.00**

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.	Aset Lain-lain	190,820,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,820,001.00	-	-	190,820,001.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**190,820,001.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190,820,001.00**	**-**	**-**	**190,820,001.00**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.	Aset Lain-lain	242,543,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,543,800.00	-	-	242,543,800.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**242,543,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**242,543,800.00**	**-**	**-**	**242,543,800.00**

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

1.	Aset Lain-lain	-	-	433,363,801.00	-	-	-	-	-	-	433,363,801.00	-	-	-	44,030,001.00	44,030,001.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**433,363,801.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**433,363,801.00**	**-**	**-**	**-**	**44,030,001.00**	**44,030,001.00**

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1.	Aset Lain-lain	306,182,079.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**306,182,079.66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.	Aset Lain-lain	12,263,607,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**12,263,607,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS KEHUTANAN

1.	Aset Lain-lain	774,011,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,011,234.00	-	-	774,011,234.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**774,011,234.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774,011,234.00**	**-**	**-**	**774,011,234.00**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.	Aset Lain-lain	369,236,149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**369,236,149.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.	Aset Lain-lain	297,553,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**297,553,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.	Aset Lain-lain	1,056,821,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,411,300.00	415,411,300.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1,056,821,340.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**415,411,300.00**	**415,411,300.00**

BADAN KEUANGAN DAERAH

1.	Aset Lain-lain	1,274,341,697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,145,000.00	51,145,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1,274,341,697.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,145,000.00**	**51,145,000.00**

PPKD

1.	Aset Lain-lain	6,114,982,350.00	-	-	-	158,000,000.00	-	-	-	-	158,000,000.00	-	-	-	1,243,596,000.00	1,243,596,000.00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	3,083,732,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**3,031,249,650.00**	**-**	**-**	**-**	**158,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,243,596,000.00**	**1,243,596,000.00**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

1.	Aset Lain-lain	1,347,404,994.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1,347,404,994.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

INSPEKTORAT DAERAH

1.	Aset Lain-lain	217,015,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**217,015,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SEKRETARIAT DAERAH

1.	Aset Lain-lain	1,720,987,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1,720,987,060.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SEKRETARIAT DPRD

1.	Aset Lain-lain	2,248,320,126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2,248,320,126.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

1.	Aset Lain-lain	439,344,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**439,344,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SALDO AKHIR
13=3+11-16
5,001,855,195.76
-
5,001,855,195.76
9,073,389,054.00
-
9,073,389,054.00
-
-
-
-
-
-
131,083,216,584.01
94,759,635,940.66
36,323,580,643.35
482,894,475.00
-
482,894,475.00

142,944,000.00
-
142,944,000.00

49,576,500.00
2,654,000.00
46,922,500.00

-
-
-

-
-
-

253,108,416.00
-
253,108,416.00

407,132,869.00
-
407,132,869.00

10,750,000.00
-
10,750,000.00

-
-
-

-
-
-

424,302,750.00
-
424,302,750.00

-
-
-

1,089,266,236.00
-
1,089,266,236.00

1,561,656,640.00
-
1,561,656,640.00

345,311,200.00
-
345,311,200.00

199,044,000.00
-
199,044,000.00

22,656,250.00
-
22,656,250.00

-
-
-

-
-
-

389,333,800.00
-
389,333,800.00

306,182,079.66
-
306,182,079.66

12,263,607,100.00
-
12,263,607,100.00

-
-
-

369,236,149.00
-
369,236,149.00

297,553,000.00
-
297,553,000.00

641,410,040.00
-
641,410,040.00

1,223,196,697.00
-
1,223,196,697.00

5,029,386,350.00
3,083,732,700.00
1,945,653,650.00

1,347,404,994.00
-
1,347,404,994.00

217,015,000.00
-
217,015,000.00

1,720,987,060.00
-
1,720,987,060.00

2,248,320,126.00
-
2,248,320,126.00

439,344,500.00
-
439,344,500.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN 2021

LAMPIRAN XVII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
A.	**UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)**	**8,750,000.00**	**15,884,143.00**	**(8,580,955.00)**	**16,053,188.00**
1	DINAS PENDIDIKAN	8,750,000.00	266,032.00	(8,580,955.00)	435,077.00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	15,618,111.00	-	15,618,111.00
B.	**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**	**26,700,000.00**	**-**	**-**	**26,700,000.00**
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	26,700,000.00	-	-	26,700,000.00
C.	**UTANG BEBAN PEGAWAI**	**25,412,582,424.00**	**26,401,230,228.00**	**(25,412,582,424.00)**	**26,401,230,228.00**
1	DINAS PENDIDIKAN	6,740,702,269.00	6,482,068,776.00	(6,740,702,269.00)	6,482,068,776.00
2	DINAS KESEHATAN	3,798,791,743.00	4,610,692,515.00	(3,798,791,743.00)	4,610,692,515.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	721,506,254.00	-	(721,506,254.00)	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	-	861,227,947.00	-	861,227,947.00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	248,156,077.00	-	(248,156,077.00)	-
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	227,576,855.00	232,520,250.00	(227,576,855.00)	232,520,250.00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	450,000,000.00	470,268,673.00	(450,000,000.00)	470,268,673.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	242,023,452.00	250,455,512.00	(242,023,452.00)	250,455,512.00
9	DINAS SOSIAL	478,149,804.00	-	(478,149,804.00)	-
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	768,072,616.00	-	768,072,616.00
11	DINAS TENAGA KERJA	610,238,773.00	603,617,181.00	(610,238,773.00)	603,617,181.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	286,172,793.00	286,294,009.00	(286,172,793.00)	286,294,009.00
13	DINAS PANGAN	276,913,872.00	-	(276,913,872.00)	-
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	1,067,514,325.00	-	1,067,514,325.00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	310,140,452.00	-	(310,140,452.00)	-
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	1,245,890,756.00	-	1,245,890,756.00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	290,884,908.00	-	(290,884,908.00)	-
18	DINAS PERHUBUNGAN	370,520,317.00	502,391,630.00	(370,520,317.00)	502,391,630.00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	281,544,459.00	294,981,178.00	(281,544,459.00)	294,981,178.00
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	305,169,994.00	323,958,673.00	(305,169,994.00)	323,958,673.00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	275,729,456.00	306,050,736.00	(275,729,456.00)	306,050,736.00
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	276,712,358.00	-	(276,712,358.00)	-
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	379,719,148.00	-	(379,719,148.00)	-
24	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	-	503,880,887.00	-	503,880,887.00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	373,534,104.00	439,419,719.00	(373,534,104.00)	439,419,719.00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	532,438,013.00	560,055,099.00	(532,438,013.00)	560,055,099.00
27	DINAS PERTANIAN	731,789,987.00	-	(731,789,987.00)	-
28	DINAS KEHUTANAN	949,329,690.00	-	(949,329,690.00)	-
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	676,783,357.00	667,473,692.00	(676,783,357.00)	667,473,692.00
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	511,890,867.00	542,578,089.00	(511,890,867.00)	542,578,089.00
31	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,342,891,124.00	1,308,621,732.00	(1,342,891,124.00)	1,308,621,732.00
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	684,424,279.00	714,356,277.00	(684,424,279.00)	714,356,277.00
33	INSPEKTORAT DAERAH	666,564,800.00	660,884,066.00	(666,564,800.00)	660,884,066.00
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	462,243,645.00	-	462,243,645.00
35	SEKRETARIAT DAERAH	1,869,332,837.00	1,736,565,832.00	(1,869,332,837.00)	1,736,565,832.00
36	SEKRETARIAT DPRD	383,176,382.00	376,527,223.00	(383,176,382.00)	376,527,223.00
37	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	119,774,000.00	122,619,190.00	(119,774,000.00)	122,619,190.00
D.	**UTANG BEBAN BARANG DAN JASA**	**3,300,016,398.00**	**2,002,531,891.00**	**(313,353,938.00)**	**4,989,194,351.00**
1	DINAS PENDIDIKAN	-	29,000,000.00	-	29,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	2,986,766,960.00	1,090,744,200.00	(104,500.00)	4,077,406,660.00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,076,595.00	8,312,858.00	(4,076,595.00)	8,312,858.00
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	458,424,850.00	-	458,424,850.00
5	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	-	120,045,000.00	-	120,045,000.00
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,578,001.00	-	(1,578,001.00)	-
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	37,094,494.00	30,901,135.00	(37,094,494.00)	30,901,135.00
8	SEKRETARIAT DAERAH	249,959,250.00	237,453,057.00	(249,959,250.00)	237,453,057.00
9	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	20,541,098.00	27,650,791.00	(20,541,098.00)	27,650,791.00
E.	**UTANG BELANJA MODAL**	**-**	**574,494,640.00**	**-**	**574,494,640.00**
	DINAS KESEHATAN	-	574,494,640.00	-	574,494,640.00
F.	**UTANG TRANSFER**	**86,685,988,739.52**	**172,546,439,805.00**	**(86,685,988,739.52)**	**172,546,439,805.00**
	BADAN KEUANGAN DAERAH	86,685,988,739.52	172,546,439,805.00	(86,685,988,739.52)	172,546,439,805.00
G.	**UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**	**3,363,160,955.00**	**5,831,347.00**	**-**	**3,368,992,302.00**
1	DINAS PENDIDIKAN	135,727.00	5,831,347.00	-	5,967,074.00
2	DINAS KESEHATAN	3,298,166,126.00	-	-	3,298,166,126.00
3	DINAS TENAGA KERJA	64,519,500.00	-	-	64,519,500.00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	339,602.00	-	-	339,602.00
H.	**UTANG PENGADAAN ASET TETAP**	**21,705,120.00**	**-**	**(21,705,120.00)**	**-**
1	DINAS PENDIDIKAN	21,705,120.00	-	(21,705,120.00)	-
	TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**118,818,903,636.52**	**201,546,412,054.00**	**(112,442,211,176.52)**	**207,923,104,514.00**

LAMPIRAN XVIII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR UTANG BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN / KOTA
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam Rp)

NO	URAIAN	BAGI HASIL PAJAK TRIWULAN IV	OVER TARGET 2021					TOTAL
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (2+3+4+5+6+7)
1	**PANGKALPINANG**							
	PKB	4,064,818,803	296,343,077	4,336,139	171,094,465	2,305,245,282	2,777,018,963	6,841,837,766
	BBN-KB	1,929,752,797	297,417,586	962,767,540	1,001,259,151	1,968,671,549	4,230,115,826	6,159,868,622
	PBBKB	5,297,551,903	2,667,233,236	5,498,581,000	8,222,743,038	6,823,949,902	23,212,507,176	28,510,059,079
	Pajak APT	74,772,544	20,321,330	14,154,605	6,385,035	16,083,578	56,944,547	131,717,091
	Pajak Rokok (PR)	1,833,027,110	-	-	-	-	-	1,833,027,110
	Jumlah	**13,199,923,157**	**3,281,315,229**	**6,479,839,285**	**9,401,481,688**	**11,113,950,311**	**30,276,586,511**	**43,476,509,668**
2	**BANGKA**							
	PKB	3,109,246,384	274,116,152	4,336,139	125,045,844	1,611,991,487	2,015,489,623	5,124,736,007
	BBN-KB	1,409,935,633	306,760,407	1,093,811,746	1,682,969,661	2,184,342,794	5,267,884,607	6,677,820,240
	PBBKB	5,297,551,903	518,970,675	1,577,942,227	3,629,023,681	7,262,485,640	12,988,422,223	18,285,974,126
	Pajak APT	263,270,513	20,321,330	15,593,859	20,545,234	43,099,644	99,560,066	362,830,579
	Pajak Rokok (PR)	2,459,040,399	-	-	-	-	-	2,459,040,399
	Jumlah	**12,539,044,832**	**1,120,168,564**	**2,691,683,971**	**5,457,584,420**	**11,101,919,565**	**20,371,356,519**	**32,910,401,351**
3	**BELITUNG**							
	PKB	2,650,399,471	144,058,469	4,336,139	197,261,536	1,360,815,653	1,706,471,798	4,356,871,269
	BBN-KB	1,197,915,633	148,536,621	635,284,789	670,991,190	1,298,257,695	2,753,070,294	3,950,985,927
	PBBKB	5,297,551,903	173,792,941	385,992,176	940,836,811	3,361,282,314	4,861,904,241	10,159,456,144
	Pajak APT	443,309,918	232,367,064	133,586,683	63,326,970	183,924,071	613,204,789	1,056,514,706
	Pajak Rokok (PR)	1,579,571,529	-	-	-	-	-	1,579,571,529
	Jumlah	**11,168,748,453**	**698,755,095**	**1,159,199,787**	**1,872,416,507**	**6,204,279,734**	**9,934,651,123**	**21,103,399,576**
4	**BANGKA TENGAH**							
	PKB	2,069,560,455	143,475,945	4,336,139	110,713,119	1,196,110,506	1,454,635,710	3,524,196,165
	BBN-KB	997,714,002	109,334,519	902,087,904	1,271,691,092	1,783,737,942	4,066,851,457	5,064,565,459
	PBBKB	5,297,551,903	173,792,941	385,992,176	1,600,567,817	3,468,819,098	5,629,172,032	10,926,723,934
	Pajak APT	158,382,959	20,321,330	32,191,951	7,271,023	16,083,578	75,867,881	234,250,840
	Pajak Rokok (PR)	1,661,784,475	-	-	-	-	-	1,661,784,475
	Jumlah	**10,184,993,794**	**446,924,735**	**1,324,608,170**	**2,990,243,052**	**6,464,751,124**	**11,226,527,080**	**21,411,520,874**
5	**BANGKA BARAT**							
	PKB	1,863,271,738	100,517,951	4,336,139	193,938,066	1,183,569,836	1,482,361,993	3,345,633,731
	BBN-KB	842,634,992	239,275,652	874,914,240	1,361,512,124	2,092,306,036	4,568,008,052	5,410,643,044
	PBBKB	5,297,551,903	173,792,941	385,992,176	707,860,886	1,927,222,582	3,194,868,584	8,492,420,487
	Pajak APT	109,499,141	42,752,594	16,467,580	5,830,338	16,083,578	81,134,088	190,633,230
	Pajak Rokok (PR)	1,732,605,886	-	-	-	-	-	1,732,605,886
	Jumlah	**9,845,563,660**	**556,339,138**	**1,281,710,135**	**2,269,141,413**	**5,219,182,031**	**9,326,372,717**	**19,171,936,378**
6	**BANGKA SELATAN**							
	PKB	1,707,513,189	86,271,774	15,084,397	152,945,347	1,079,943,593	1,334,245,111	3,041,758,300
	BBN-KB	840,310,329	148,449,224	936,740,277	1,249,812,809	1,998,041,199	4,333,043,509	5,173,353,838
	PBBKB	5,297,551,903	173,792,941	385,992,176	707,860,886	1,661,068,931	2,928,714,934	8,226,266,837
	Pajak APT	87,496,304	21,916,378	15,586,717	5,830,338	20,720,035	64,053,467	151,549,771
	Pajak Rokok (PR)	1,624,374,191	-	-	-	-	-	1,624,374,191
	Jumlah	**9,557,245,916**	**430,430,317**	**1,353,403,567**	**2,116,449,379**	**4,759,773,758**	**8,660,057,021**	**18,217,302,937**
7	**BELITUNG TIMUR**							
	PKB	1,776,201,150	117,662,551	64,411,490	165,772,624	976,886,209	1,324,732,874	3,100,934,024
	BBN-KB	820,069,290	164,908,504	855,361,817	879,586,216	1,400,168,679	3,300,025,217	4,120,094,507
	PBBKB	4,518,572,788	173,792,941	385,992,176	707,860,886	1,097,231,125	2,364,877,128	6,883,449,916
	Pajak APT	540,658,585	116,164,340	102,692,715	26,852,271	79,288,994	324,998,321	865,656,906
	Pajak Rokok (PR)	1,285,233,669	-	-	-	-	-	1,285,233,669
	Jumlah	**8,940,735,481**	**572,528,336**	**1,408,458,199**	**1,780,071,998**	**3,553,575,008**	**7,314,633,540**	**16,255,369,021**
	TOTAL							
	PKB	17,241,011,191	1,162,445,920	101,176,584	1,116,771,001	9,714,562,567	12,094,956,071	29,335,967,262
	BBN-KB	8,038,332,675	1,414,682,513	6,260,968,313	8,117,822,243	12,725,525,895	28,518,998,963	36,557,331,638
	PBBKB	36,303,884,205	4,055,168,615	9,006,484,108	16,516,754,004	25,602,059,592	55,180,466,318	91,484,350,523
	Pajak APT	1,677,389,963	474,164,365	330,274,109	136,041,209	375,283,477	1,315,763,160	2,993,153,123
	Pajak Rokok (PR)	12,175,637,259	-	-	-	-	-	12,175,637,259
	GRAND TOTAL	**75,436,255,293**	**7,106,461,412**	**15,698,903,114**	**25,887,388,456**	**48,417,431,530**	**97,110,184,512**	**172,546,439,805**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2021

LAMPIRAN XIX
Catatan atas Laporan Keuangan
2021

(dalam Rp)

NO.	SKPD	PEMBERI HIBAH	JUMLAH
1	**DINAS PENDIDIKAN**		
		PEMERINTAH PUSAT (BANPER)	13,137,641,910.07
		HIBAH KELOMPOK MASY/PERORANGAN DALAM NEGERI	18,679,143,521.00
		BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	598,000,000.00
		LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	9,075,000.00
	TOTAL		**32,423,860,431.07**
2	**DINAS KESEHATAN**		
		PEMERINTAH PUSAT	6,030,805,183.00
		PEMERINTAH LAINNYA	29,118,000.00
	TOTAL		**6,059,923,183.00**
3	**DINAS PUPR**		
		PEMERINTAH LAINNYA	39,636,200,130.00
	TOTAL		**39,636,200,130.00**
4	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
		PEMERINTAH PUSAT	2,128,537,946.47
	TOTAL		**2,128,537,946.47**
5	**BPBD**		
		HIBAH KELOMPOK MASYARAKAT	4,238,073,300.00
	TOTAL		**4,238,073,300.00**
6	**DINAS ESDM**		
		PEMERINTAH PUSAT	3,553,453,490.00
	TOTAL		**3,553,453,490.00**
7	**DINAS SOSIAL DAN PEMDES**		
		PEMERINTAH LAINNYA	278,781,750.00
	TOTAL		**278,781,750.00**
8	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		
		PEMERINTAH PUSAT	754,445,342.00
	TOTAL		**754,445,342.00**
9	**BADAN KEUANGAN DAERAH**		
		PEMERINTAH PUSAT	62,862,667,726.00
		BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	158,000,000.00
	TOTAL		**63,020,667,726.00**
10	**BAPELITBANGDA**		
		PEMERINTAH PUSAT	4,790,494.00
	TOTAL		**4,790,494.00**
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**		
		PEMERINTAH PUSAT	1,263,868,500.00
		PEMERINTAH LAINNYA	124,824,000.00
	TOTAL		**1,388,692,500.00**
12	**DINAS PERHUBUNGAN**		
		PEMERINTAH PUSAT	4,709,793,000.00
	TOTAL		**4,709,793,000.00**
	TOTAL= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12		**158,197,219,292.54**

LAMPIRAN XX
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

DAFTAR HIBAH BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rp)

NO.	OPD	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG		DOKUMEN SUMBER		
			UNIT	RP	NOMOR	TANGGAL	PEMBERI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian	Projector/infocus	1	4,790,494.00	2584/PL.08.03/B.05/T/11/2021 032/1513/BAPPEDA/2021	18 November 2021	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
		JUMLAH		**4,790,494.00**			
2	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Mobil Hilux	1	382,078,947.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		koleksi buku perpustakaan	250	28,157,895.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		televisi	1	5,000,000.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		UPS	1	2,900,000.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		GENSET	1	8,800,000.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Multimedia Speaker	1	1,315,000.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		1 DLS + 4 tablet samsung	1	75,020,000.00	4212/4.2/PLK.03.03/IX.2021	10 September 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		1001 Dongeng Dunia	2	119,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		101 Resep Sop & Soto Nusantara	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		11.11 I wish for you, by the way	2	149,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		40 wasiat nabi tentang kesehatan	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		7 Kunci Sukses Meraih Pekerjaan	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		8 intisari resep kaya ala orang cina	2	131,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		8 Kunci sukses bisnis toko orang cina	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		8 kunci sukses kecerdasan finansial	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		9 Tahap mempersiapkan pidato & MC	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		99 tanaman herbal untuk pengobatan	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		agar anak tumbuh sehat dan cerdas	2	99,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		agrobisnis budi daya singkong	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		aku mau ayah	2	181,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		anak cerdas, menyiapkan sang buah hati menjadi sang juara	2	99,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		aneka resep soto & sop nusantara	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		apotek hidup	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		asmara bukan ramayana	2	155,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		At-Tibyan, Adab Membaca & Menghafal Al-Quran	2	141,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Banse Firlus	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

		Batu Manikam	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Bayi yang bisa bicara	2	177,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Behind the spotlight	2	131,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Belajar Berlalu Lintas komik	2	103,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Belajar dan Pembelajaran	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Berobatlah dengan doa dan istighfar	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Berobatlah dengan puasa dan sedekah	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Berobatlah dengan shalat dan Al-Quran	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		beternak sapi pedaging	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budi Daya avocado unggu secara komersial	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Apotik Hidup : sehat dan Menguntungkan	2	111,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya jeruk siam	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Kelengkeng	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Kol Bunga	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya lele, Panen dalam 50 Hari	2	115,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Rambutan	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Seledri	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Semangka	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Budidaya Tomat	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Buku Pidato dan MC Biasa	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Buku Pintar Asuhan Keperawaan Bayi dan Balita	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Buku Pintar Asuhan Keperawaan Kesehatan Jiwa	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Buku Pintar Keperawatan Epilepsi	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Buku Pintar Thaharah	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Cara Budi Daya Lebah Madu yang berhasil	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Cara Cerdas Hafal Al-Quran	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Cara Mudah belajar piano tanpa les & Tanpa Guru	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cara mudah membangung koperasi	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cara mudah membuat pupuk organik	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cara praktis membaca Al-Quran	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cerita rakyat dari benua afrika	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

		cerita rakyat dari benua amerika	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cerita rakyat dari benua asia	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cerita rakyat dari benua australia	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		cerita rakyat dari benua Eropa	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		come to you	2	131,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		complete english	2	141,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		concise Grammar for toefl preparations	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Deradikalisasi penjara kisah inspiratif dan penuh motivasi	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Dijaga allah swt	2	177,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Diponegoro	2	95,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Doa, zikir dan ruqyah dari Al-Quran dan As-Sunnah	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Dongeng binaang : 25 cerita inspiratif dari seluruh dunia	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Dongeng Pertualangan di kancil	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Dua Tangisan pada satu malam	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		English jokes (Cara menyenangkan belajar bahasa inggris)	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Estetika indang piaman	2	155,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Etika di ruang publik (Pendekatan politik dan manajemen)	2	415,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Fabel Pembentuk karakter dongeng terpopuler sepanjang masa	2	121,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Fabel Pembentuk karakter kisah seru dinosaurus	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Fikih khitbah dan nikah	2	95,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Gurkha Pejuang dari atap dunia	2	95,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Hand Book P3K Dan Pencegahan Covid 19	2	123,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Ilmu FatakArah Kiblat Setiap Saat	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Indonesian Dreams Comic	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Interaksionisme Simbolik	2	137,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Interpretasi Permainan Trompet Wynton Marsalis	2	153,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Isyarat Cinta Yang Keras Kepala	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Jago Bermain Gitar Tanpa Lesdan Tanpa Guru	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Jalaludin Rumi (Sang maestro Cinta Ilahi)	2	95,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Jalan Sunyi Ngesti Pandowo	2	137,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Juz AMMA & Terjemah serta indeks tematik, bacaan latin& ilmu tajv	2	73,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

		Kamus AkbarIndonesia-Arab Super Lengkap	2	125,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Kanker	2	97,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Ketika TariAdat ditantang Revitalisasi	2	137,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Kode Bahasa dan sastra	2	153,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		komik fikih anak : najis dan membersihkannya	2	77,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kondakting	2	173,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		konsep kebutuhan dasar manusia	2	197,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kronik peralihan nusantara Hc	2	227,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kunci sukses budidaya sengon	2	111,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kunci sukses budidaya tanaman hias, menyulap hoby menjadi uang	2	113,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kupu-kupu bersayap gelap	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		limitless presence	2	147,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Loveliest Misfortune	2	159,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		media dan kekuasaan	2	153,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		melejitkan kecerdasan anak melalui dongeng	2	103,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		membaca pikiran	2	99,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		membelah lautan	2	177,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		menguasai 16 english tense	2	95,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		menjadi dokter bagi anak anda	2	141,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		menyulap sampah menjadi berkah	2	111,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		metode menggambar konstruksi lantai dan dinding bangunan	2	93,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		nafas terakhir, renungan menyambut sakaratul maut	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		nikmatnya mambaca Al-Quran	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Panduan lengkap ebi edisi revisi	2	103,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		pendidikan seksualitas untuk anak	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		penembak misterius	2	147,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		penemu ilmu falak	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		perahu raksasa nabi nuh	2	177,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		rahasia tampil modis sehat dan cantik	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		rahasia tanaman cepat berbuah & tetap berbauah di luar musim	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		retakan kisah	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

		sarapan pagi yang penuh dusta	2	117,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		sebuah kitab yang tak suci	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		sehari mahir berbahasa jepang	2	83,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		sehari mahir berbahasa jerman	2	87,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		semiotika untuk teater ari wayang purwa dan film	2	155,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri aku ingat sunnah nabiku , caraku berpakaian	2	67,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri aku ingat sunnah nabiku, caraku makan	2	67,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri aku ingat sunnah nabiku, cara memotong kuku	2	67,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri aku ingat sunnah nabiku, caraku minum	2	67,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri aku ingat sunnah nabiku, suka baca basmallah	2	67,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Aceh	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Bali	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Bengkulu	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Jawa Barat	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Jawa Tengah	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Jawa Timur	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : Papua	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : sumatera barat	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		seri cerita cerita nusantara : sumatera utara	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		shalat for therapy	2	109,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa arab	2	85,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa inggirs	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa jepang	2	99,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa jerman	2	89,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa korea	2	99,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		simple fun and easy percakapan bahasa mandirin	2	89,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		studi ilmu falak	2	103,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		tafsir al fatihah, an nas dan al falaq	2	83,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		tafsir ayat ayat wanita	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Ta'lim Muta'alim, Pentingnya ada sebelum ilmu	2	91,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		tari pendidikan	2	157,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

		teknologi informasi & komunikasi prospek dan tantangan dunia pen	2	79,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		the kingdom of this world	2	101,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		tidak terbakar api	2	177,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		try not to cry challenge	2	155,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		tutorial ibadah haji dan umrah for kidz	2	79,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		when the bad boy meets the fangirl	2	155,300.00	3320/4.2/PLK.03.07/VII.2021	02 Juli 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Server e Arsip	1	65,184,000.00	PK.02.08/470/2018	19 Desember 2018	Arsip Nasional Republik Indonesia
		scanner	1	5,888,500.00	PK.02.08/470/2018	19 Desember 2018	Arsip Nasional Republik Indonesia
		PC Unit	1	11,821,000.00	PK.02.08/470/2018	19 Desember 2018	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Router	1	80,500.00	PK.02.08/470/2018	19 Desember 2018	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Rak Buku	2	7,750,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		TELEVISI	1	7,968,400.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Mebeulair lainnya (wall drop, printing sticker, lampu LED)	1	13,863,940.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		meja komputer	3	11,625,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Meja Resepsionis + printing sticker	1	3,100,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Mebeulair lainnya (storage/cabinet)	1	6,463,500.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Mebeulair lainnya (facia name Pojok Baca Digital)	1	1,860,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		kursi komputer	3	9,300,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		sofa	1	6,200,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		karpet	1	5,442,360.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		UPS	1	3,005,200.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		PC UNIT	2	31,871,400.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		PC UNIT	1	18,474,600.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		SERVER DLS	1	14,940,200.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Modem	1	1,302,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		TABLET + CASING TABLET	2	7,968,400.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		holder tablet	1	775,000.00	4799/4.2/PLK.03.04/X.2021	03 November 2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		JUMLAH		**755,300,842.00**			
3	Dinas Perhubungan	Bangunan Dermaga	1	1,154,017,000.00	030/506/BPKAD 551/66/DISHUB	15 Februari 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
		CCTV- Camera Control Television System	1	3,413,991,000.00	BA.06/8/BPTD.VII/2021 030/0003/DISHUB	13 Juli 2021	Kementerian Perhubungan
		Tanah Bangunan Terminal Laut	1	141,785,000.00	594/09/19.05.06.2004/2021	01 Februari 2021	Pemerintah Desa Bakit
		JUMLAH		**4,709,793,000.00**			
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPI Mentok	1	3,500,000.00	523/262/DKP/2021 523/003/I	25 Maret 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
		Pos Pengawas Belitung	1	10,746,956.47	030/1474/BPKAD 030/0018/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung

		PPI Gantung	1	70,669,500.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Pulau Nangka Desa Buku Limau	1	5,250,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Pulau Long Desa Selingsing	1	614,900.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Pulau Sekunyit Desa Batu Penyu	1	715,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Mesin Penghancur Es	3	49,650,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Filling Cabinet/Metal	1	1,472,500.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Filling Cabinet/Metal	1	1,945,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Sumur Artesis	1	22,400,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Jaringan Listrik PPI Gantung	1	175,004,220.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Kipas Angin	1	780,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	4,350,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2	8,700,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Compresor Lainnya	1	198,870,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Water Pump	1	24,795,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Overhead Crane	1	61,291,300.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Brine Tank Ewooden	1	24,934,800.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Contrller Flow	1	102,675,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Bak Pengendapan	1	4,917,650.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		System Power Suply	1	200,658,450.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Sieve	1	1,150,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Sieve	1	1,049,500.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Immersion Refrigenarating	1	73,394,400.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Refrigerator/Freezeer	6	56,785,740.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Refrigerator/Freezeer	6	74,519,280.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Preasur Control system	1	24,139,400.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Electromotor	1	19,125,450.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Control Panel	2	50,346,300.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Cooling Pond	1	93,744,400.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Cooling Power	1	69,042,500.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Hydrosepator	1	25,763,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Agitated TankbCrystalizer	1	47,654,400.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan

		Jet Pump	1	17,452,500.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Pompa Sand Piper (Transport And Storage Equipment For Liquid)	1	30,185,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Gedung Pertokoan	1	358,800,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Tugu Tanda Batas	1	122,752,800.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Saluran Drainase	1	5,006,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Bak Penyimpan/Tower Air Baku	1	8,346,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Sumur Gali/SGL	1	14,796,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	1	45,500,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Jaringan Pipa Baja	1	28,095,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Gedung Tempat Kerja/Rumah Diesel	1	9,900,000.00	/PDS.0/HK.155/I/2020 & 523/145/DK	27 Januari 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		JUMLAH		**2,151,487,946.47**			
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop Labkesda	1	433,361,500.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop Bappeda	1	433,361,500.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop ESDM	1	433,361,500.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop Bakuda	1	420,183,915.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop KUMKM	1	366,637,015.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop PUPR	1	366,637,015.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop LH Kota	1	366,637,015.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop Setda	1	366,637,015.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		Instalasi PLTS Kapsitas Sedang/Rooftop Dinkes	1	366,637,015.00	BN.07/KPB/2021 & 028/603/BAST/ES	29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		JUMLAH		**3,553,453,490.00**			
6	Pejabat Pengelola Keuangan Daer	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	158,000,000.00		10 Agustus 2020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Prov. Babel
		JUMLAH		**158,000,000.00**			
7	Dinas Pekerjaan Umum Penataan	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain (D.I Bikang)	1	8,142,481,400.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain (D.I Bikang)	1	14,166,032,270.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi (D.I Bikan	1	256,446,350.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) D.Ii Rawa Kepoh	1	5,837,278,000.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut) Desa Kep	1	196,000,000.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		Jalan Khusus Inspeksi (D.I.R Gadung)	1	11,037,962,110.00	012/02/BAST/DPUPRHUB/2021 & 001/BAST-BMD/2021	13 September 2021	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
		JUMLAH		**39,636,200,130.00**			
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	kawasaki KLX150G VIN	2	59,400,000.00	I.SET/BASTB/919/V/2021	17 Mei 2021	Kementerian Pertanian
		Yamaha Mio S VIN	3	49,500,000.00	I.SET/BASTB/919/V/2021	17 Mei 2021	Kementerian Pertanian
		Yamaha Jupiter Z CW F1 VIN	2	36,600,000.00	I.SET/BASTB/919/V/2021	17 Mei 2021	Kementerian Pertanian
		JUMLAH		**145,500,000.00**			

9	Dinas Kesehatan	Sepeda Motor	28	350,196,000.00	KN.02.07/I/1369/2019	23 September 2019	Kementerian Kesehatan
		Bangunan Puskesmas Pembantu Kab.Bangka	12	2,148,000,000.00	KN.02.07/3/2948/2020	03 November 2020	Kementerian Kesehatan
		Kendaraan khusus Promkes	1	359,473,400.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Focusing Screen LCD Proyektor	1	1,845,800.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		LCD Proyektor/Infocus	1	38,726,600.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		DVD Player	1	1,326,600.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Loudspeker	1	18,731,900.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Compect Disc Player	1	8,848,400.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Audio Mixing Consule	1	6,979,500.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Alat Studio Lainnya	1	5,046,800.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Microphone/ wireless mic	1	10,453,300.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Microphone/ wireless mic	1	12,498,200.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		LapTop	1	12,978,900.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Rak Brosur	2	1,441,000.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Meja Lipat Plastik	1	686,400.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Kursi Lipat	1	264,000.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Kursi Lipat	1	264,000.00	KN.02.07/5/7256/2020	21 Desember 2020	Kementerian Kesehatan
		Sepeda Motor	19	237,633,000.00	HK.02.02/I/930/2017	29 Desember 2017	Kementerian Kesehatan
		Mini Bus (penumpang dibawah 14 orang)	1	199,400,000.00	HK.02.02/I/930/2017	29 Desember 2017	Kementerian Kesehatan
		Mini Bus (penumpang dibawah 14 orang)	1	199,000,000.00	HK.02.02/I/930/2017	29 Desember 2017	Kementerian Kesehatan
		Mini Bus (penumpang dibawah 14 orang)	1	199,500,000.00	HK.02.02/I/930/2017	29 Desember 2017	Kementerian Kesehatan
		ventilator	1	25,405,636.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		ventilator	1	25,405,636.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		ventilator	1	25,405,636.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Alat Kedokteran umum lainnya	2	45,000,000.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Alat Kedokteran umum lainnya	10	51,020,710.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Alat Kedokteran umum lainnya	2	15,067,932.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Alat Kedokteran umum lainnya	2	8,767,932.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Alat Kedokteran umum lainnya	6	4,823,796.00	BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021	23 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
		JUMLAH		**4,014,191,078.00**			
10	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tanah Kantor Bangunan Pemerintah	1	217,500,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas	1	23,810,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Jaringan Distribusi Tegangan di Atas 20 KVA	1	19,734,050.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Jaringan Distribusi Tegangan di Bawah 1 KVA	1	12,937,700.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		Lemari Pakaian	6	4,800,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		JUMLAH		**278,781,750.00**			
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	mini bus	1	308,000,000.00	BA.203/MENLHK/ROUM/KAP.3/9/2021	15 September 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		mini bus (berpenumang dibawah 14 orang	1	363,968,500.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		sepeda motor	2	45,000,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		meja kerja kayu	1	2,050,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		meja kerja kayu	8	12,000,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		kursi	2	5,200,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		kursi	8	15,200,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		layar film/proyektor	1	14,400,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		handy talky	2	3,500,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		printer	1	1,255,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		printer	1	1,255,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung

		bangunan gedung permanen	1	492,040,000.00	188.44/537BAKUDA/2021	24 Mei 2021	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		TANAH UNTUK BANGUNAN LAIN LAIN	1	14,672,000.00	032/06/BA/I/2021 & 030/0014/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		JUMLAH		**1,278,540,500.00**			
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PERSEDIAN COVID TAHUNAN	1	19,654,392,300.00	001/SPSB/BUD/II/2022	10 Januari 2022	Pemprov Kep. Bangka Belitung
		JUMLAH		**19,654,392,300.00**			
13	Dinas Pendidikan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	361,139,350.00	030/1474/BPKAD & 030/0018/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
		Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	417,004,000.00	030/1474/BPKAD & 030/0018/I	26 Agustus 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	1	1,754,554,000.00	030/1310/BAKUDA	22 September 2021	Pemerintah Kabupaten Belitung
		Alat Angkutan CABDIN 1		268,398,900.00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
		Alat Bengkel dan Alat Ukur CABDIN 1		613,356,745.00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
		Alat Kantor dan Rumah Tangga CABDIN 1		106,361,699.00	PO-2021-11-17-0112647	17 November 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar CABDIN 1		15,192,500.00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Laboratorium CABDIN 1		14,071,200.00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Komputer CABDIN 1		7,696,500.00	200588/1/A2.1/KU/2020	08 Desember 2020	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Bantu Eksplorasi CABDIN 1		115,239,650.00	4376/D2/KU.03.00/2021	07 September 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Alat Keselamatan Kerja CABDIN 1		4,400,000.00	4376/D2/KU.03.00/2021	07 September 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Bangunan Gedung CABDIN 1		1,866,117,500.00	421.5/005.a/SMKN4-PKP/I/2022	10 Januari 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Buku Perpustakaan CABDIN 1		53,546,716.00	421.5/005.a/SMKN4-PKP/I/2022	10 Januari 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Alat Kantor dan Rumah Tangga CABDIN 2		100,000,000.00	BA/028/76/DP2KBP3A/2021	01 November 2021	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka

		Komputer CABDIN 2		732,575,000.00	2143/D2/KU.03.00/2021	09 Agustus 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Bangunan Gedung CABDIN 2		976,498,607.00	2143/D2/KU.03.00/2021	09 Agustus 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Alat Kantor dan Rumah Tangga CABDIN 3		37,202,000.00	421/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar CABDIN 3		5,500,000.00	421/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah
		Alat Laboratorium CABDIN 3		2,412,000.00	/BASTB/Banper/SMAN1Sp.Rimba/2	13 September 2021	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Komputer CABDIN 3		21,500,000.00	/BASTB/Banper/SMAN1Sp.Rimba/2	13 September 2021	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Besar CABDIN 4		3,945,000.00		26 November 2021	PT PLN
		Alat Angkutan CANDIN 4		37,500,000.00		26 November 2021	PT PLN
		Alat Pertanian CABDIN 4		9,550,000.00		29 November 2021	PT PLN
		Alat Kantor dan Rumah Tangga CABDIN 4		80,133,000.00	425.1/421/SMAN1SIMTER/IX/2021	27 September 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas
		Alat Laboratorium CABDIN 4		7,235,000.00	421.5/390/SMKN1KELAPA/XII	14 Desember 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas
		Bangunan Gedung CABDIN 4		590,500,000.00	900/316/SMAN1KLP/X/2021	04 Oktober 2021	Komite Sekolah
		Jaringan CABDIN 4		11,200,000.00	421.5/399/SMKN1KELAPA/XII	01 Oktober 2021	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Angkutan CANDIN 5		484,999.00	0174/FP/PMPK/2021	18 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		Alat Kantor dan Rumah Tangga CABDIN 5		480,734,300.00	420/C6-SP/KU/2021	25 Mei 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar CABDIN 5		97,178,636.00	1635/BAST-SMA/B2G.spt/BMD/2021	24 September 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		Alat Laboratorium CABDIN 5		221,617,000.00		29 Juni 2021	Bank Sumsel Babel
		Komputer CABDIN 5		1,594,900,164.00	0/540/BASTASMKPK/SMKN1TP/20	31 Desember 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Bangunan Gedung CABDIN 5		1,159,200,000.00	3282/D2/KU.03.00/2021	28 Mei 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

		Buku Perpustakaan CABDIN 5		24,648,194.07	421.5/761/SMKN1SIJUK/XI/2021	30 November 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		aset lainnya CABDIN 5		29,287,500.00	4377/D2/KU.03.00/2021	07 September 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		kontruksi dalam pengerjaan		2,209,612,000.00	3282/D2/KU.03.00/2021	28 Mei 2021	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		JUMLAH		**14,030,492,160.07**			

LAMPIRAN XXI
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAMPAK KUMULATIF
TAHUN 2021

URAIAN	DINAS PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS SOSIAL
EKUITAS AWAL	**685,934,749,967.32**	**409,747,928,665.68**	**0.00**	**2,115,618,899,216.15**	**23,282,170,613.92**	**2,943,119,058.00**	**3,371,792,194.00**	**35,205,869,569.03**	**0.00**	**10,392,626,523.02**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(722,868,670,009.63)**	**(214,598,477,185.64)**	**(89,075,215,959.68)**	**(81,483,024,351.67)**	**(3,102,697,171.17)**	**(12,414,599,111.00)**	**(19,268,966,980.00)**	**(20,774,764,134.48)**	**(18,646,034,616.62)**	**(7,668,177,786.67)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**305,929,019,779.42**	**243,986,232.38**	**2,090,622,159,818.99**	**(2,094,462,858,039.48)**	**(23,215,057,151.75)**	**(724,724,811.00)**	-	**(22,548,875.00)**	**13,231,575,047.67**	**(10,643,284,367.35)**
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah										
Koreksi Nilai Persediaan	(75,999.89)			726,216,637.33					(94,730,927.02)	
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang										
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah										
Selisih Revaluasi Aset Tetap		(25,000,000.00)								
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya										
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya										
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas										
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan										
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang										
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang										
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain										
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud										
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir		-								
Koreksi Ekuitas Lainnya	305,929,095,779.31	268,986,232.38	2,090,622,159,818.99	(2,095,189,074,676.81)	(23,215,057,151.75)	(724,724,811.00)		(22,548,875.00)	13,326,305,974.69	(10,643,284,367.35)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	471,280,007,541.62	224,598,177,619.96	268,271,959,750.52	60,326,983,175.00	3,035,583,709.00	12,278,652,839.00	18,856,288,420.00	14,427,478,545.87	18,266,207,728.00	7,918,835,631.00
EKUITAS AKHIR	**740,275,107,278.73**	**419,991,615,332.38**	**2,269,818,903,609.83**	**-**	**-**	**2,082,447,975.00**	**2,959,113,634.00**	**28,836,035,105.42**	**12,851,748,159.05**	**-**

DINAS TENAGA KERJA	DP3CSKB	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DINAS PANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
32,931,660,907.00	**3,077,911,862.00**	**0.00**	**649,336,930.00**	**0.00**	**5,634,246,895.71**	**2,085,749,091.00**	**85,320,463,666.36**	**9,993,277,955.00**	**15,434,621,483.77**	**7,007,304,153.00**	**0.00**
(20,314,475,046.00)	**(9,959,914,644.00)**	**(54,546,604,542.40)**	**(214,202,970.00)**	**(23,439,046,074.99)**	**(4,254,243,524.36)**	**(3,974,944,107.67)**	**(26,505,290,390.00)**	**(24,372,589,873.00)**	**(16,186,119,776.77)**	**(10,001,925,369.00)**	**(25,794,255,913.46)**
285,485,623.00	**17,722,500.00**	**55,680,441,040.40**	**(926,250,802.00)**	**16,758,640,001.39**	**(5,909,978,879.35)**	**(1,988,714,444.33)**	**486,854,568.00**	**(400,561,750.00)**	-	-	**116,353,960,773.83**
		10,017,075,681.40	(211,491,000.00)		0.11						
285,485,623.00	17,722,500.00	45,663,365,359.00	(714,759,802.00)	16,758,640,001.39	(5,909,978,879.46)	(1,988,714,444.33)	486,854,568.00	(400,561,750.00)			116,353,960,773.83
17,990,131,793.00	9,656,607,970.00	40,826,640,767.00	491,116,842.00	21,840,340,970.00	4,529,975,508.00	3,877,909,461.00	21,070,495,236.20	23,678,921,119.00	16,145,623,844.00	9,390,163,891.00	26,053,856,719.05
30,892,803,277.00	**2,792,327,688.00**	**41,960,477,265.00**	-	**15,159,934,896.40**	-	-	**80,372,523,080.56**	**8,899,047,451.00**	**15,394,125,551.00**	**6,395,542,675.00**	**116,613,561,579.42**

Dalam Rp

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN	DINAS KEHUTANAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
111,300,431,391.00	**6,231,790,158.00**	**4,346,944,785.76**	**117,594,406,833.44**	**53,564,044,491.04**	**10,444,928,957.35**	**41,700,424,580.55**	**9,172,977,681.12**	**11,092,555,256.31**	**76,531,888,979.58**	**17,817,409,220.00**	**2,611,872,958.00**
(4,936,429,773.00)	**(5,228,887,011.42)**	**(11,260,982,544.00)**	**(31,428,504,602.20)**	**(627,089,774.00)**	**(12,974,968,257.17)**	**(17,400,992,806.99)**	**(17,637,109,565.80)**	**(16,036,272,105.08)**	**2,127,454,590,024.55**	**(22,731,165,298.00)**	**(19,397,651,490.00)**
(110,896,919,821.00)	**(6,357,987,561.58)**	**(10,567,116.00)**	**3,075,151,594.20**	**(54,293,142,958.04)**	**(10,854,811,373.18)**	**-**	**585,088,000.00**	**(96,257,013.00)**	**(298,247,853,940.00)**	**(1.00)**	**338,182,750.00**
				(9,805,584,681.04)							
(110,896,919,821.00)	(6,357,987,561.58)	(10,567,116.00)	3,075,151,594.20	(44,487,558,277.00)	(10,854,811,373.18)	-	585,088,000.00	(96,257,013.00)	(298,247,853,940.00)	(1.00)	338,182,750.00
4,532,918,203.00	5,355,084,415.00	12,360,205,952.00	51,714,400,079.20	1,356,188,241.00	13,384,850,673.00	18,888,960,430.00	16,364,289,451.00	15,151,845,393.00	(1,926,209,948,098.85)	21,806,029,039.00	18,774,894,879.00
-	-	**5,435,601,077.76**	**140,955,453,904.64**	-	-	**43,188,392,203.56**	**8,485,245,566.32**	**10,111,871,531.23**	**(20,471,323,034.72)**	**16,892,272,960.00**	**2,327,299,097.00**

SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DPRD	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	TOTAL
384,366,596,913.00	**31,289,197,852.72**	**19,967,809,319.72**	**4,346,665,008,128.55**
(118,570,736,849.00)	**(98,495,146,724.00)**	**(9,346,143,045.00)**	**331,918,270,640.68**
27,766,427,013.00	**582,244,715.00**	**(569,422,048.00)**	**12,335,998,505.22**
			-
			631,409,710.89
			-
			-
			-
			(25,000,000.00)
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
27,766,427,013.00	582,244,715.00	(569,422,048.00)	**11,729,588,794.33**
111,151,165,562.00	97,487,237,567.00	8,360,023,856.00	-
404,713,452,639.00	**30,863,533,410.72**	**18,412,268,082.72**	**4,690,919,277,274.45**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI DANA BANTUAN PEMERINTAH (BANPER)
WILAYAH 7 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XXII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	SEKOLAH	KOTA/KABUPATEN	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH DIKOREKSI	PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (SALDO AWAL+PENERIMAAN)	REALISASI BELANJA PEGAWAI (Rp)	REALISASI BELANJA BARANG/JASA	REALISASI BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)	TOTAL SALDO (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
1	SMK N 2 PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	337.60	-	337.60	3,600,210,000.00	3,600,210,338	-	200,000,000.00	2,800,965,644.00	3,000,965,644.00	599,244,693.60
2	SMA N 4 PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	-		-	9,000,000.00	9,000,000	-	550,000.00	8,450,000.00	9,000,000.00	-
3	SMA N 3 PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
4	SLB N PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	404,599.00	-	404,599.00	60,000,000.00	60,404,599.00	-	55,400,000.00	4,600,000.00	60,000,000.00	404,599.00
5	SMK N 4 PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	-	-	-	450,000,000.00	450,000,000.00	-	235,100,950.00	214,899,050.00	450,000,000.00	-
6	SMK N 5 PANGKALPINANG	PANGKALPINANG	1,370.00	-	1,370.00	15,000,000.00	15,001,370.00	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	1,370.00
7	SMKN 1 BAKAM	BANGKA	-	-	-	2,015,000,000.00	2,015,000,000.00	-	207,109,000.00	1,799,998,607.00	2,007,107,607.00	7,892,393.00
8	SLB N KOBA	BANGKA TENGAH	6,280.00	-	6,280.00	50,000,000.00	50,006,280.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	6,280.00
9	SMAN 1 SIMPANG TERITIP	BANGKA BARAT	-	-	-	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	95,000,000.00	-
10	SMK N 1 KELAPA	BANGKA BARAT	25,000,000.00	25,000,000.00	-	180,000,000.00	180,000,000.00	-	132,937,000.00	47,063,000.00	180,000,000.00	-
11	SLB N TOBOALI	BANGKA SELATAN	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	3,386,000.00	36,614,000.00	40,000,000.00	-
12	SMK N 1 TOBOALI	BANGKA SELATAN	12,629,741.00	12,629,741.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
13	SMAN 1 SIMPANG RIMBA	BANGKA SELATAN	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-
14	SLB N TANJUNGPANDAN	BELITUNG	-	-	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	60,018,000.00	29,982,000.00	90,000,000.00	-
15	SMKN 1 TANJUNGPANDAN	BELITUNG	-	-	-	2,327,129,000.00	2,327,129,000.00	-	207,129,000.00	2,120,000,000.00	2,327,129,000.00	-
16	SMKN 1 SIJUK	BELITUNG	-	-	-	165,000,000.00	165,000,000.00	-	20,646,001.00	144,353,999.00	165,000,000.00	-
17	SMKN 1 KELAPA KAMPIT	BELITUNG TIMUR	5,040,000.00	5,040,000.00	-	3,741,938,000.00	3,741,938,000.00	-	300,000,000.00	3,395,228,600.00	3,695,228,600.00	46,709,400.00
18	SLBN MANGGAR	BELITUNG TIMUR	412,401	-	412,401.00	10,000,000	10,412,401	-	4,800,000.00	5,200,000.00	10,000,000.00	412,401.00
			43,494,728.60	**42,669,741.00**	**824,987.60**	**12,988,277,000.00**	**12,989,101,987.60**	**0**	**1,597,275,951.00**	**10,732,354,900.00**	**12,334,430,851.00**	**654,671,137**

REKAPITULASI DANA IPP
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XXIII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO.	NAMA KABUPATEN/SEKOLAH	penerimaan murni ipp	saldo awal (murni ipp)	Jasa giro 2020	saldo awal audited (murni+jasa giro 2020)	Koreksi Saldo Awal	Total Saldo Awal	saldo s.d des	pendapatan (saldo awal audited + penerimaan murni ipp)	belanja pegawai	belanja barjas	belanja modal	total realisasi belanja	saldo akhir
I	**PANGKALPINANG**													
1	SMAN 1 PANGKALPINANG	Rp 560,738,012.00	Rp 126,350,339.00	Rp 107,406.00	Rp 126,457,745.00		Rp 126,457,745.00	Rp 141,250,257.00	Rp 687,195,757.00	Rp 210,600,000.00	Rp 335,345,500.00	Rp -	Rp 545,945,500.00	Rp 141,250,257.00
2	SMAN 2 PANGKALPINANG	Rp 314,615,000.00	Rp 9,827,049.00	Rp 123,181.00	Rp 9,950,230.00		Rp 9,950,230.00	Rp 34,140,181.00	Rp 324,565,230.00	Rp 84,005,049.00	Rp 206,420,000.00	Rp -	Rp 290,425,049.00	Rp 34,140,181.00
3	SMAN 3 PANGKALPINANG	Rp 478,344,803.00	Rp 3,811,622.00	Rp 398,272.00	Rp 4,209,894.00		Rp 4,209,894.00	Rp 94,282,829.00	Rp 482,554,697.00	Rp 163,607,500.00	Rp 160,236,291.00	Rp 64,428,077.00	Rp 388,271,868.00	Rp 94,282,829.00
4	SMAN 4 PANGKALPINANG	Rp 407,915,000.00	Rp 20,877,320.00	Rp -	Rp 20,877,320.00		Rp 20,877,320.00	Rp 78,305,485.00	Rp 428,792,320.00	Rp 174,250,000.00	Rp 176,236,835.00	Rp -	Rp 350,486,835.00	Rp 78,305,485.00
5	SMKN 1 PANGKALPINANG	Rp 393,515,751.00	Rp 584,976.00	Rp 3,251.00	Rp 588,227.00		Rp 588,227.00	Rp 108,868,978.00	Rp 394,103,978.00	Rp 193,900,000.00	Rp 71,335,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 285,235,000.00	Rp 108,868,978.00
6	SMKN 2 PANGKALPINANG	Rp 608,859,088.00	Rp 20,418,656.00	Rp -	Rp 20,418,656.00		Rp 20,418,656.00	Rp 22,751,037.00	Rp 629,277,744.00	Rp 449,100,000.00	Rp 157,426,707.00	Rp -	Rp 606,526,707.00	Rp 22,751,037.00
7	SMKN 3 PANGKALPINANG	Rp 326,616,000.00	Rp 98,940.00	Rp 2,257.00	Rp 101,197.00		Rp 101,197.00	Rp 1,398,397.00	Rp 326,717,197.00	Rp 167,250,000.00	Rp 158,068,800.00	Rp -	Rp 325,318,800.00	Rp 1,398,397.00
8	SMKN 4 PANGKALPINANG	Rp 298,865,000.00	Rp 19,633,800.00	Rp -	Rp 19,633,800.00		Rp 19,633,800.00	Rp 3,185,700.00	Rp 318,498,800.00	Rp 173,475,000.00	Rp 141,838,100.00	Rp -	Rp 315,313,100.00	Rp 3,185,700.00
9	SMKN 5 PANGKALPINANG	Rp 198,667,798.00	Rp 2,907,611.00	Rp 94,207.00	Rp 3,001,818.00		Rp 3,001,818.00	Rp 26,571,616.00	Rp 201,669,616.00	Rp 73,800,000.00	Rp 101,298,000.00	Rp -	Rp 175,098,000.00	Rp 26,571,616.00
	JUMLAH I	***Rp 3,588,136,452.00***	***Rp 204,510,313.00***	***Rp 728,574.00***	***Rp 205,238,887.00***	***Rp -***	***Rp 205,238,887.00***	***Rp 510,754,480.00***	***Rp 3,793,375,339.00***	***Rp 1,812,402,500.00***	***Rp 1,385,790,282.00***	***Rp 84,428,077.00***	***Rp 3,282,620,859.00***	***Rp 510,754,480.00***
II	**BANGKA BARAT**						Rp -							
1	SMAN 1 JEBUS	Rp 385,920,000.00	Rp 13,668,950.00	Rp 87,636.00	Rp 13,756,586.00		Rp 13,756,586.00	Rp 10,272,786.00	Rp 399,676,586.00	Rp 98,500,000.00	Rp 280,983,800.00	Rp 9,920,000.00	Rp 389,403,800.00	Rp 10,272,786.00
2	SMAN 1 KELAPA	Rp 348,000,000.00	Rp 206,593.00	Rp 1,248.00	Rp 207,841.00		Rp 207,841.00	Rp 211,341.00	Rp 348,207,841.00	Rp 160,500,000.00	Rp 108,296,500.00	Rp 79,200,000.00	Rp 347,996,500.00	Rp 211,341.00
3	SMAN 1 MUNTOK	Rp 274,480,200.00	Rp 7,320,425.00	Rp -	Rp 7,320,425.00		Rp 7,320,425.00	Rp 4,715,825.00	Rp 281,800,625.00	Rp 83,000,000.00	Rp 159,084,800.00	Rp 35,000,000.00	Rp 277,084,800.00	Rp 4,715,825.00
4	SMAN 1 PARIT TIGA	Rp 195,460,000.00	Rp 9,340,000.00	Rp -	Rp 9,340,000.00		Rp 9,340,000.00	Rp 14,407,000.00	Rp 204,800,000.00	Rp 92,800,000.00	Rp 72,060,000.00	Rp 25,533,000.00	Rp 190,393,000.00	Rp 14,407,000.00
5	SMAN 1 TEMPILANG	Rp 149,455,000.00	Rp 369,895.00	Rp 11,114.00	Rp 381,009.00		Rp 381,009.00	Rp 1,466,009.00	Rp 149,836,009.00	Rp 90,900,000.00	Rp 54,170,000.00	Rp 3,300,000.00	Rp 148,370,000.00	Rp 1,466,009.00
6	SMAN 1 SP.TERITIP	Rp 263,873,000.00	Rp 23,594,400.00	Rp 44,599.00	Rp 23,638,999.00		Rp 23,638,999.00	Rp 8,515,999.00	Rp 287,511,999.00	Rp 157,675,000.00	Rp 121,321,000.00	Rp -	Rp 278,996,000.00	Rp 8,515,999.00
7	SMKN 1 KELAPA	Rp 211,000,000.00	Rp 42,304,000.00	Rp -	Rp 42,304,000.00	21,787,840.00	Rp 20,516,160.00	Rp 4,016,160.00	Rp 231,516,160.00	Rp 144,050,000.00	Rp 83,450,000.00	Rp -	Rp 227,500,000.00	Rp 4,016,160.00
8	SMKN 1 Tempilang	Rp 182,838,500.00	Rp 15,082,016.00	Rp 166,413.00	Rp 15,248,429.00		Rp 15,248,429.00	Rp 9,940,729.00	Rp 198,086,929.00	Rp 96,800,000.00	Rp 91,346,200.00	Rp -	Rp 188,146,200.00	Rp 9,940,729.00
9	SMKN 1 MUNTOK	Rp 390,845,001.00	Rp 44,752,555.00	Rp 55,365.00	Rp 44,807,920.00		Rp 44,807,920.00	Rp 105,083,921.00	Rp 435,652,921.00	Rp 202,265,000.00	Rp 128,304,000.00	Rp -	Rp 330,569,000.00	Rp 105,083,921.00
10	SMKN 1 PARIT TIGA	Rp 424,750,000.00	Rp 6,497,202.00	Rp 112,943.00	Rp 6,610,145.00		Rp 6,610,145.00	Rp 256,455.00	Rp 431,360,145.00	Rp 131,350,000.00	Rp 202,150,190.00	Rp 97,603,500.00	Rp 431,103,690.00	Rp 256,455.00
11	SMK N 1 SP.Teritip	Rp 114,680,000.00	Rp 326,000.00	Rp -	Rp 326,000.00		Rp 326,000.00	Rp 252,087.00	Rp 115,006,000.00	Rp 21,750,000.00	Rp 93,003,913.00	Rp -	Rp 114,753,913.00	Rp 252,087.00
	JUMLAH II	***Rp 2,941,301,701.00***	***Rp 163,462,036.00***	***Rp 479,318.00***	***Rp 163,941,354.00***	***Rp 21,787,840.00***	***Rp 142,153,514.00***	***Rp 159,138,312.00***	***Rp 3,083,455,215.00***	***Rp 1,279,590,000.00***	***Rp 1,394,170,403.00***	***Rp 250,556,500.00***	***Rp 2,924,316,903.00***	***Rp 159,138,312.00***
III	**BANGKA**													
1	SMK N 1 MENDO BARAT	Rp 76,973,500.00	Rp 2,204,000.00	Rp 59.00	Rp 2,204,059.00		Rp 2,204,059.00	Rp 59.00	Rp 79,177,559.00	Rp 43,200,000.00	Rp 35,977,500.00	Rp -	Rp 79,177,500.00	Rp 59.00
2	SMA 1 BAKAM	Rp 127,255,000.00	Rp 363,222.00	Rp -	Rp 363,222.00		Rp 363,222.00	Rp 21,545,922.00	Rp 127,618,222.00	Rp 3,240,000.00	Rp 94,832,300.00	Rp 8,000,000.00	Rp 106,072,300.00	Rp 21,545,922.00
3	SMA 1 BELINYU	Rp 222,500,000.00	Rp 4,228,850.00	Rp 534,636.00	Rp 4,763,486.00		Rp 4,763,486.00	Rp 77,176,850.00	Rp 227,263,486.00	Rp 78,300,000.00	Rp 63,011,636.00	Rp 8,775,000.00	Rp 150,086,636.00	Rp 77,176,850.00
4	SMA 1 MENDO BARAT	Rp 309,665,000.00	Rp 486,500.00	Rp -	Rp 486,500.00		Rp 486,500.00	Rp 1,267,400.00	Rp 310,151,500.00	Rp 150,670,000.00	Rp 158,214,100.00	Rp -	Rp 308,884,100.00	Rp 1,267,400.00
5	SMA 1 MERAWANG	Rp 269,190,000.00	Rp 5,045,010.00	Rp 9,456.00	Rp 5,054,466.00		Rp 5,054,466.00	Rp 34,163,466.00	Rp 274,244,466.00	Rp 70,000,000.00	Rp 133,922,500.00	Rp 36,158,500.00	Rp 240,081,000.00	Rp 34,163,466.00
6	SMA 1 PEMALI	Rp 405,610,000.00	Rp 15,966,125.00	Rp 10,379.00	Rp 15,976,504.00		Rp 15,976,504.00	Rp 133,772,104.00	Rp 421,586,504.00	Rp 75,893,000.00	Rp 194,671,400.00	Rp 17,250,000.00	Rp 287,814,400.00	Rp 133,772,104.00
7	SMA 1 PUDING BESAR	Rp 156,880,000.00	Rp 12,465,350.00	Rp 11,385.00	Rp 12,476,735.00		Rp 12,476,735.00	Rp 11,385.00	Rp 169,356,735.00	Rp 96,550,000.00	Rp 72,795,350.00	Rp -	Rp 169,345,350.00	Rp 11,385.00
8	SMA 1 S.LIAT	Rp 441,100,000.00	Rp 59,806,000.00	Rp -	Rp 59,806,000.00		Rp 59,806,000.00	Rp 190,551,000.00	Rp 500,906,000.00	Rp -	Rp 310,355,000.00	Rp -	Rp 310,355,000.00	Rp 190,551,000.00
9	SMA 2 MENDOBARAT	Rp 124,710,000.00	Rp 6,549,000.00	Rp -	Rp 6,549,000.00		Rp 6,549,000.00	Rp 8,980,000.00	Rp 131,259,000.00	Rp 49,925,000.00	Rp 69,439,000.00	Rp 2,915,000.00	Rp 122,279,000.00	Rp 8,980,000.00
10	SMA 2 PUDING BESAR	Rp 145,945,000.00	Rp 205,300.00	Rp 6,916.00	Rp 212,216.00		Rp 212,216.00	Rp 3,145,466.00	Rp 146,157,216.00	Rp 6,000,000.00	Rp 137,011,750.00	Rp -	Rp 143,011,750.00	Rp 3,145,466.00
11	SMA N 1 RIAU SILIP	Rp 159,020,000.00	Rp 88,500.00	Rp -	Rp 88,500.00		Rp 88,500.00	Rp 72,108,500.00	Rp 159,108,500.00	Rp 87,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 87,000,000.00	Rp 72,108,500.00
12	SMK 1 BAKAM	Rp 137,050,000.00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp 27,609,000.00	Rp 137,050,000.00	Rp 84,900,000.00	Rp 24,541,000.00	Rp -	Rp 109,441,000.00	Rp 27,609,000.00
13	SMK 1 Belinyu	Rp 82,112,000.00	Rp 2,821,000.00	Rp 31,352.00	Rp 2,852,352.00		Rp 2,852,352.00	Rp 22,478,352.00	Rp 84,964,352.00	Rp 46,500,000.00	Rp 15,986,000.00	Rp -	Rp 62,486,000.00	Rp 22,478,352.00
14	SMK 1 S.LIAT	Rp 501,090,000.00	Rp 11,302,553.00	Rp 95,401.00	Rp 11,397,954.00		Rp 11,397,954.00	Rp 49,340,632.00	Rp 512,487,954.00	Rp 50,500,000.00	Rp 323,024,322.00	Rp 89,623,000.00	Rp 463,147,322.00	Rp 49,340,632.00
15	SMK 2 SUNGAILIAT	Rp 262,300,000.00	Rp 8,419,155.00	Rp -	Rp 8,419,155.00		Rp 8,419,155.00	Rp 36,018,155.00	Rp 270,719,155.00	Rp 160,800,000.00	Rp 71,129,000.00	Rp 2,772,000.00	Rp 234,701,000.00	Rp 36,018,155.00
	JUMLAH III	***Rp 3,421,400,500.00***	***Rp 129,950,565.00***	***Rp 699,584.00***	***Rp 130,650,149.00***	***Rp -***	***Rp 130,650,149.00***	***Rp 678,168,291.00***	***Rp 3,552,050,649.00***	***Rp 1,003,478,000.00***	***Rp 1,704,910,858.00***	***Rp 165,493,500.00***	***Rp 2,873,882,358.00***	***Rp 678,168,291.00***
IV	**BANGKA TENGAH**													
1	SMKN 1 SP.KATIS	Rp 90,825,000.00	Rp 551,000.00	Rp 349,125.00	Rp 900,125.00		Rp 900,125.00	Rp 24,105,125.00	Rp 91,725,125.00	Rp 52,500,000.00	Rp 15,120,000.00	Rp -	Rp 67,620,000.00	Rp 24,105,125.00
2	SMKN 1 SUNGAISELAN	Rp 63,630,000.00	Rp 153,700.00	Rp -	Rp 153,700.00		Rp 153,700.00	Rp 5,437,200.00	Rp 63,783,700.00	Rp -	Rp 40,303,500.00	Rp 18,043,000.00	Rp 58,346,500.00	Rp 5,437,200.00
3	SMKN 2 KOBA	Rp -	Rp 1,313,065.00	Rp 6,276.00	Rp 1,319,341.00		Rp 1,319,341.00	Rp 1,319,341.00	Rp 1,319,341.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,319,341.00
4	SMKN 1 PK.BARU	Rp -	Rp 26,499.00	Rp 26,308.00	Rp 52,807.00		Rp 52,807.00	Rp 52,807.00	Rp 52,807.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52,807.00
5	SMKN 1 KOBA	Rp 99,615,000.00	Rp 145,955.00	Rp -	Rp 145,955.00		Rp 145,955.00	Rp 1,597,305.00	Rp 99,760,955.00	Rp 46,177,500.00	Rp 51,986,150.00	Rp -	Rp 98,163,650.00	Rp 1,597,305.00
6	SMAN 2 SUNGAISELAN	Rp 156,610,000.00	Rp 2,833,600.00	Rp 10,641.00	Rp 2,844,241.00		Rp 2,844,241.00	Rp 19,721,241.00	Rp 159,454,241.00	Rp 68,100,000.00	Rp 71,633,000.00	Rp -	Rp 139,733,000.00	Rp 19,721,241.00
7	SMAN 1 LUBUK BESAR	Rp 205,262,868.00	Rp 2,180,317.00	Rp 74,241.00	Rp 2,254,558.00		Rp 2,254,558.00	Rp 42,489,726.00	Rp 207,517,426.00	Rp 58,200,000.00	Rp 90,627,700.00	Rp 16,200,000.00	Rp 165,027,700.00	Rp 42,489,726.00
8	SMAN 1 NAMANG	Rp 187,030,000.00	Rp 522,976.00	Rp -	Rp 522,976.00		Rp 522,976.00	Rp 53,298,976.00	Rp 187,552,976.00	Rp 42,900,000.00	Rp 91,354,000.00	Rp -	Rp 134,254,000.00	Rp 53,298,976.00
9	SMAN 1 SUNGAISELAN	Rp 180,000,000.00	Rp 256,000.00	Rp 24,498.00	Rp 280,498.00		Rp 280,498.00	Rp 62,480,498.00	Rp 180,280,498.00	Rp 52,500,000.00	Rp 65,300,000.00	Rp -	Rp 117,800,000.00	Rp 62,480,498.00
10	SMAN 1 KOBA	Rp 240,574,500.00	Rp 489,013.00	Rp 30,660.00	Rp 519,673.00		Rp 519,673.00	Rp 399,873.00	Rp 241,094,173.00	Rp 132,300,000.00	Rp 108,394,300.00	Rp -	Rp 240,694,300.00	Rp 399,873.00
11	SMAN 1 PKL.BARU	Rp 177,915,000.00	Rp 2,577,700.00	Rp 86,087.00	Rp 2,663,787.00		Rp 2,663,787.00	Rp 2,717,137.00	Rp 180,578,787.00	Rp 42,400,000.00	Rp 125,094,750.00	Rp 10,366,900.00	Rp 177,861,650.00	Rp 2,717,137.00
	JUMLAH IV	***Rp 1,401,462,368.00***	***Rp 11,049,825.00***	***Rp 607,836.00***	***Rp 11,657,661.00***	***Rp -***	***Rp 11,657,661.00***	***Rp 213,619,229.00***	***Rp 1,413,120,029.00***	***Rp 495,077,500.00***	***Rp 659,813,400.00***	***Rp 44,609,900.00***	***Rp 1,199,500,800.00***	***Rp 213,619,229.00***
V	**BANGKA SELATAN**													
1	SMK NEGERI SIMPANG RIMBA	Rp -	Rp 69,468.00	Rp -	Rp 69,468.00		Rp 69,468.00	Rp 69,468.00	Rp 69,468.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 69,468.00
2	SMK NEGERI 1 TUKAK SADAI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	SMK NEGERI 1 TOBOALI	Rp -	Rp 134,395.00	Rp 3,852.00	Rp 138,247.00		Rp 138,247.00	Rp 138,247.00	Rp 138,247.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 138,247.00
4	SMK NEGERI 1 PULAU BESAR	Rp 36,055,000.00	Rp 475,900.00	Rp -	Rp 475,900.00		Rp 475,900.00	Rp 373,900.00	Rp 36,530,900.00	Rp 11,800,000.00	Rp 24,357,000.00	Rp -	Rp 36,157,000.00	Rp 373,900.00
5	SMK NEGERI 1 PAYUNG	Rp 143,325,000.00	Rp 960,000.00	Rp 20,544.00	Rp 980,544.00		Rp 980,544.00	Rp 45,455,544.00	Rp 144,305,544.00	Rp 44,400,000.00	Rp 49,950,000.00	Rp 4,500,000.00	Rp 98,850,000.00	Rp 45,455,544.00
6	SMK NEGERI 1 AIR GEGAS	Rp 202,490,000.00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp 13,925,000.00	Rp 202,490,000.00	Rp 50,450,000.00	Rp 108,845,000.00	Rp 29,270,000.00	Rp 188,565,000.00	Rp 13,925,000.00
7	SMA NEGERI 2 TOBOALI	Rp -	Rp 10,000.00		Rp 10,000.00		Rp 10,000.00	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,000.00
8	SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	Rp 207,150,000.00	Rp 20,000.00		Rp 20,000.00		Rp 20,000.00	Rp -	Rp 207,170,000.00	Rp 69,900,000.00	Rp 92,520,000.00	Rp 44,750,000.00	Rp 207,170,000.00	Rp -
9	SMA NEGERI 1 PAYUNG	Rp -	Rp 149,000.00		Rp 149,000.00		Rp 149,000.00	Rp 149,000.00	Rp 149,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 149,000.00
10	SMA NEGERI 1 LEPAR PONGOK	Rp -	Rp 387,000.00	Rp -	Rp 387,000.00		Rp 387,000.00	Rp 387,000.00	Rp 387,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 387,000.00
11	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN PONG	Rp 61,267,000.00	Rp 315,000.00		Rp 315,000.00		Rp 315,000.00	Rp 682,000.00	Rp 61,582,000.00	Rp 32,800,000.00	Rp 28,100,000.00	Rp -	Rp 60,900,000.00	Rp 682,000.00
12	SMA NEGERI 1 AIRGEGAS	Rp 61,450,000.00	Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	Rp 61,450,000.00	Rp 19,425,000.00	Rp 42,025,000.00	Rp -	Rp 61,450,000.00	Rp -
13	SMAN 1 PULAU BESAR	Rp 25,700,000.00	Rp 18,000.00		Rp 18,000.00		Rp 18,000.00	Rp 368,000.00	Rp 25,718,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 22,950,000.00	Rp -	Rp 25,350,000.00	Rp 368,000.00
14	SMA NEGERI 3 TOBOALI	Rp 17,400,000.00	Rp -		Rp -		Rp -	Rp 57,000.00	Rp 17,400,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 14,443,000.00	Rp 900,000.00	Rp 17,343,000.00	Rp 57,000.00
	JUMLAH V	***Rp 754,837,000.00***	***Rp 2,538,763.00***	***Rp 24,396.00***	***Rp 2,563,159.00***	***Rp -***	***Rp 2,563,159.00***	***Rp 61,615,159.00***	***Rp 757,400,159.00***	***Rp 233,175,000.00***	***Rp 383,190,000.00***	***Rp 79,420,000.00***	***Rp 695,785,000.00***	***Rp 61,615,159.00***
VI	**BELITUNG**													
1	SMAN 2 TANJUNGPANDAN	Rp 371,005,770.00	Rp 9,693,603.00	Rp 90,578.00	Rp 9,784,181.00		Rp 9,784,181.00	Rp 219,951.00	Rp 380,789,951.00	Rp 40,940,000.00	Rp 336,130,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp 380,570,000.00	Rp 219,951.00
2	SMAN 1 TANJUNGPANDAN	Rp 400,940,000.00	Rp 83,019,558.00	Rp 190,827.00	Rp 83,210,385.00		Rp 83,210,385.00	Rp 5,458,923.00	Rp 484,150,385.00	Rp 127,950,000.00	Rp 207,341,462.00	Rp 143,400,000.00	Rp 478,691,462.00	Rp 5,458,923.00
3	SMAN 1 MEMBALONG	Rp 170,750,000.00	Rp 59,304,882.00	Rp 123,827.00	Rp 59,428,709.00		Rp 59,428,709.00	Rp 545,309.00	Rp 230,178,709.00	Rp -	Rp 222,633,400.00	Rp 7,000,000.00	Rp 229,633,400.00	Rp 545,309.00
4	SMAN 1 SIJUK	Rp 154,797,000.00	Rp 17,309,044.00	Rp -	Rp 17,309,044.00		Rp 17,309,044.00	Rp 1,532,044.00	Rp 172,106,044.00	Rp 136,000,000.00	Rp 34,574,000.00	Rp -	Rp 170,574,000.00	Rp 1,532,044.00
5	SMKN 1 TJ. PANDAN	Rp 495,960,000.00	Rp 7,477,901.00	Rp 320,720.00	Rp 7,798,621.00		Rp 7,798,621.00	Rp 23,430,371.00	Rp 503,758,621.00	Rp 193,900,000.00	Rp 279,578,250.00	Rp 6,850,000.00	Rp 480,328,250.00	Rp 23,430,371.00
6	SMKN 1 SELAT NASIK	Rp 69,280,000.00	Rp 113,590.00	Rp 18,638.00	Rp 132,228.00		Rp 132,228.00	Rp 12,712,228.00	Rp 69,412,228.00	Rp 25,400,000.00	Rp 31,300,000.00	Rp -	Rp 56,700,000.00	Rp 12,712,228.00
7	SLBN TJ. PANDAN	Rp 20,000,000.00	Rp 3,544.00	Rp 4,968.00	Rp 8,512.00		Rp 8,512.00	Rp 408,512.00	Rp 20,008,512.00	Rp 5,600,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -	Rp 19,600,000.00	Rp 408,512.00
8	SMKN 3 TANJUNGPANDAN	Rp 240,500,000.00	Rp 54,403,346.00	Rp 183,828.00	Rp 54,587,174.00		Rp 54,587,174.00	Rp 47,852,976.00	Rp 295,087,174.00	Rp 84,092,000.00	Rp 128,442,198.00	Rp 34,700,000.00	Rp 247,234,198.00	Rp 47,852,976.00
9	SMKN 2 TANJUNGPANDAN	Rp 476,810,000.00	Rp 51,014,057.00	Rp -	Rp 51,014,057.00		Rp 51,014,057.00	Rp 32,769,257.00	Rp 527,824,057.00	Rp 257,220,000.00	Rp 237,834,800.00	Rp -	Rp 495,054,800.00	Rp 32,769,257.00
10	SMKN 1 SIJUK	Rp 107,400,000.00	Rp 1,050,900.00	Rp 2,425.00	Rp 1,053,325.00		Rp 1,053,325.00	Rp 1,964,825.00	Rp 108,453,325.00	Rp 31,910,000.00	Rp 56,628,500.00	Rp 17,950,000.00	Rp 106,488,500.00	Rp 1,964,825.00
11	SMKN 1 BADAU	Rp 210,740,000.00	Rp 1,270,500.00	Rp -	Rp 1,270,500.00		Rp 1,270,500.00	Rp 63,874,500.00	Rp 212,010,500.00	Rp 49,596,000.00	Rp 98,540,000.00	Rp -	Rp 148,136,000.00	Rp 63,874,500.00
	JUMLAH VI	***Rp 2,718,182,770.00***	***Rp 284,660,925.00***	***Rp 935,811.00***	***Rp 285,596,736.00***	***Rp -***	***Rp 285,596,736.00***	***Rp 190,768,896.00***	***Rp 3,003,779,506.00***	***Rp 952,608,000.00***	***Rp 1,647,002,610.00***	***Rp 213,400,000.00***	***Rp 2,813,010,610.00***	***Rp 190,768,896.00***
VII	**BELITUNG TIMUR**													
1	SMA NEGERI 1 GANTUNG	Rp 255,077,480.00	Rp 2,487,361.00	Rp 156.48	Rp 2,487,517.48		Rp 2,487,517.48	Rp 420,374.48	Rp 257,564,997.48	Rp 137,875,000.00	Rp 110,569,623.00	Rp 8,700,000.00	Rp 257,144,623.00	Rp 420,374.48
2	SMA NEGERI 1 Klp. KAMPIT	Rp 194,350,000.00	Rp 2,414,004.00	Rp 9,901.00	Rp 2,423,905.00		Rp 2,423,905.00	Rp 15,820,795.00	Rp 196,773,905.00	Rp -	Rp 131,524,750.00	Rp 49,428,360.00	Rp 180,953,110.00	Rp 15,820,795.00
3	SMKN 1 SIMP.RENGGIANG	Rp 68,545,000.00	Rp 12,577,851.00	Rp 12,222.00	Rp 12,590,073.00		Rp 12,590,073.00	Rp 1,065,073.00	Rp 81,135,073.00	Rp 11,725,000.00	Rp 64,095,000.00	Rp 4,250,000.00	Rp 80,070,000.00	Rp 1,065,073.00
4	SMA NEGERI 1 DAMAR	Rp 175,200,000.00	Rp 250,100.00	Rp 123,272.00	Rp 373,372.00		Rp 373,372.00	Rp 54,828,372.00	Rp 175,573,372.00	Rp 19,700,000.00	Rp 85,045,000.00	Rp 16,000,000.00	Rp 120,745,000.00	Rp 54,828,372.00
5	SMA NEGERI 1 MANGGAR	Rp 357,600,000.00	Rp 313,774.00	Rp 91,287.00	Rp 405,061.00		Rp 405,061.00	Rp 1,169,561.00	Rp 358,005,061.00	Rp 39,800,000.00	Rp 311,810,500.00	Rp 5,225,000.00	Rp 356,835,500.00	Rp 1,169,561.00
6	SMA NEGERI 1 SIMP. PESAK	Rp 192,850,000.00	Rp 2,333,499.00	Rp 11,399.00	Rp 2,344,898.00		Rp 2,344,898.00	Rp 25,297,398.00	Rp 195,194,898.00	Rp 39,265,000.00	Rp 114,832,500.00	Rp 15,800,000.00	Rp 169,897,500.00	Rp 25,297,398.00
7	SMK NEGERI 1 DENDANG	Rp 57,586,900.00	Rp 11,000,000.00	Rp 37,646.00	Rp 11,037,646.00		Rp 11,037,646.00	Rp 9,234,546.00	Rp 68,624,546.00	Rp 10,200,000.00	Rp 49,190,000.00	Rp -	Rp 59,390,000.00	Rp 9,234,546.00
8	SMK NEGERI 1 Klp. KAMPIT	Rp 172,295,000.00	Rp 11,132,125.00	Rp 153.70	Rp 11,132,278.70		Rp 11,132,278.70	Rp 6,295,478.70	Rp 183,427,278.70	Rp 66,200,000.00	Rp 110,931,800.00	Rp -	Rp 177,131,800.00	Rp 6,295,478.70
9	SMK NEGERI 1 MANGGAR	Rp 264,625,000.00	Rp 98,262,433.00	Rp 205,877.00	Rp 98,468,310.00		Rp 98,468,310.00	Rp 3,093,310.00	Rp 363,093,310.00	Rp 66,000,000.00	Rp 248,200,000.00	Rp 45,800,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 3,093,310.00
	JUMLAH VII	***Rp 1,738,129,380.00***	***Rp 140,771,147.00***	***Rp 491,914.18***	***Rp 141,263,061.18***	***Rp -***	***Rp 141,263,061.18***	***Rp 117,224,908.18***	***Rp 1,879,392,441.18***	***Rp 390,765,000.00***	***Rp 1,226,199,173.00***	***Rp 145,203,360.00***	***Rp 1,762,167,533.00***	***Rp 117,224,908.18***
79	**JUMLAH KESELURUHAN (I S.D VII)**	**Rp 16,563,450,171.00**	**Rp 936,943,574.00**	**Rp 3,967,433.18**	**Rp 940,911,007.18**	**Rp 21,787,840.00**	**Rp 919,123,167.18**	**Rp 1,931,289,275.18**	**Rp 17,482,573,338.18**	**Rp 6,167,096,000.00**	**Rp 8,401,076,726.00**	**Rp 983,111,337.00**	**Rp 15,551,284,063.00**	**Rp 1,931,289,275.18**

1,927,321,842.00
3,967,433.18

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN TRANSFER (SP2T) DANA BOS APBN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rp)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JENIS BOS	TAHAPAN	TANGGAL SPB HIBAH	NOMOR SPB HIBAH (BUD)	NOMOR BUKTI (DISDIK)	JUMLAH (Rp)
1	SDN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	001.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	001/SDN 11/DISDIK/2021	34,141,437,000
2	SDS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	001.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	002/SDS 11/DISDIK/2021	2,749,167,000
3	SMPN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	002.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	003/SMPN 11/DISDIK/2021	14,327,301,000
4	SMPS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	002.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	004/SMPS 11/DISDIK/2021	1,996,971,000
5	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	003/SPB HIBAH/BUD/I/2021	005/SMAS 11/DISDIK/2021	1,823,748,000
6	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	004/SPB HIBAH/BUD/I/2021	006/SMKS 11/DISDIK/2021	2,348,298,000
7	SLBS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	20 MEI 2021	005/SPB HIBAH/BUD/I/2021	007/SLBS 11/DISDIK/2021	193,200,000
8	SDN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	006.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	008/SDN 12/DISDIK/2021	6,770,211,000
9	SDS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	006.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	009/SDS 12/DISDIK/2021	1,051,446,000
10	SMPN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	007.a/SPB HIBAH/BUD/I/2021	010/SMPN 12/DISDIK/2021	3,143,853,000
11	SMPS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	007.b/SPB HIBAH/BUD/I/2021	011/SMPS 12/DISDIK/2021	693,417,000
12	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	008/SPB HIBAH/BUD/I/2021	012/SMAS 12/DISDIK/2021	22,050,000
13	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	20 MEI 2021	009/SPB HIBAH/BUD/I/2021	013/MKS 12/DISDIK/2021	523,200,000
14	SDN	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	010/SPB HIBAH/BUD/I/2021	014/SDN 21/DISDIK/2021	51,037,112,000
15	SDS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	011/SPB HIBAH/BUD/I/2021	015/SDS 21/DISDIK/2021	4,343,380,000
16	SMPN	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	012/SPB HIBAH/BUD/I/2021	016/SMPN 21/DISDIK/2021	22,135,712,000
17	SMPS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	013/SPB HIBAH/BUD/I/2021	017/SMPS 21/DISDIK/2021	3,226,004,000
18	SMAS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	014/SPB HIBAH/BUD/I/2021	018/SMAS 21/DISDIK/2021	1,905,992,000
19	SMKS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	015/SPB HIBAH/BUD/I/2021	019/SMKS 21/DISDIK/2021	3,297,104,000
20	SLBS	REGULER	TAHAP 2	10 JUNI 2021	016/SPB HIBAH/BUD/I/2021	020/SLBS 21/DISDIK/2021	257,600,000
21	SDN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	017/SPB HIBAH/BUD/I/2021	021/SDN 22/DISDIK/2021	3,554,952,000
22	SDS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	018/SPB HIBAH/BUD/I/2021	022/SDS 22/DISDIK/2021	709,704,000
23	SMPN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	019/SPB HIBAH/BUD/I/2021	023/SMPN 22/DISDIK/2021	1,164,440,000
24	SMPS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	020/SPB HIBAH/BUD/I/2021	024/SMPS 22/DISDIK/2021	362,940,000
25	SMAS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	021/SPB HIBAH/BUD/I/2021	025/SMAS 22/DISDIK/2021	559,872,000
26	SMKS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	022/SPB HIBAH/BUD/I/2021	026/SDMKS 22/DISDIK/2021	539,240,000
27	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	023/SPB HIBAH/BUD/II/2021	027/SDN 31/DISDIK/2021	37,137,909,000
28	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	024/SPB HIBAH/BUD/II/2021	028/SDS 31/DISDIK/2021	3,035,424,000
29	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	025/SPB HIBAH/BUD/II/2021	029/SMPN 31/DISDIK/2021	16,673,304,000
30	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	026/SPB HIBAH/BUD/II/2021	030/SMPS 31/DISDIK/2021	2,587,164,000
31	SMAS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	027/SPB HIBAH/BUD/II/2021	031/SMAS 31/DISDIK/2021	1,710,801,000
32	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	028/SPB HIBAH/BUD/II/2021	032/SMKS 31/DISDIK/2021	2,088,492,000
33	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	029/SPB HIBAH/BUD/II/2021	033/SLBS 31/DISDIK/2021	85,050,000
34	SDN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	030/SPB HIBAH/BUD/II/2021	034/SDN KINERJA/DISDIK/2021	650,000,000
35	SDS	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	031/SPB HIBAH/BUD/II/2021	035/SDS KINERJA/DISDIK/2021	200,000,000
36	SMPN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	032/SPB HIBAH/BUD/II/2021	036/SMPN KINERJA/DISDIK/2021	480,000,000
37	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	033/SPB HIBAH/BUD/II/2022	037/SDN 32/DISDIK/2021	2,456,388,000
38	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	034/SPB HIBAH/BUD/II/2021	038/SDS 32/DISDIK/2021	359,340,000
39	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	035/SPB HIBAH/BUD/II/2021	039/SMPN 32/DISDIK/2021	509,556,000
40	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	036/SPB HIBAH/BUD/II/2021	040/SMPS 32/DISDIK/2021	84,177,000
41	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	037/SPB HIBAH/BUD/II/2021	041/SMKS 32/DISDIK/2021	419,733,000
42	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	038/SPB HIBAH/BUD/II/2021	042/SLBS 32/DISDIK/2021	124,950,000
43	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	039/SPB HIBAH/BUD/II/2021	043/SDN 33/DISDIK/2021	622,701,000
44	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	040/SPB HIBAH/BUD/II/2021	044/SDS 33/DISDIK/2021	294,300,000
45	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	041/SPB HIBAH/BUD/II/2021	045/SMPN 33/DISDIK/2021	622,578,000
46	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	042/SPB HIBAH/BUD/II/2021	046/SMPS 33/DISDIK/2021	64,020,000
47	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	043/SPB HIBAH/BUD/II/2021	047/SMKS 33/DISDIK/2021	163,200,000
TOTAL							**233,247,438,000**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN TRANSFER (SP2T) DANA BOS APBN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JENIS BOS	TAHAPAN	TANGGAL SP2T	NOMOR SP2T	JUMLAH (Rp)
1	SD	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	01/SP2T/I/BAKUDA	36,890,604,000
2	SMP	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	02/SP2T/I/BAKUDA	16,324,272,000
3	SMAN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	03/SP2T/I/BAKUDA	8,566,938,000
4	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	04/SP2T/I/BAKUDA	1,823,748,000
5	SMKN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	05/SP2T/I/BAKUDA	7,756,800,000
6	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	06/SP2T/I/BAKUDA	2,348,298,000
7	SLBN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	07/SP2T/I/BAKUDA	922,329,000
8	SLBS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 1	18 MEI 2021	08/SP2T/I/BAKUDA	193,200,000
9	SD	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	09/SP2T/I/BAKUDA	7,821,657,000
10	SMP	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	10/SP2T/I/BAKUDA	3,837,270,000
11	SMAN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	11/SP2T/I/BAKUDA	2,733,072,000
12	SMAS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	12/SP2T/I/BAKUDA	22,050,000
13	SMKN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	13/SP2T/I/BAKUDA	2,104,581,000
14	SMKS	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	14/SP2T/I/BAKUDA	523,200,000
15	SLBN	REGULER	TAHAP 1 GELOMBANG 2	18 MEI 2021	15/SP2T/I/BAKUDA	90,972,000
16	SDN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	16/SP2T/I/BAKUDA	51,037,112,000
17	SDS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	17/SP2T/I/BAKUDA	4,343,380,000
18	SMPN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	18/SP2T/I/BAKUDA	22,135,712,000
19	SMPS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	19/SP2T/I/BAKUDA	3,226,004,000
20	SMAN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	20/SP2T/I/BAKUDA	14,118,476,000
21	SMAS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	21/SP2T/I/BAKUDA	1,905,992,000
22	SMKN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	22/SP2T/I/BAKUDA	10,946,448,000
23	SMKS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	23/SP2T/I/BAKUDA	3,297,104,000
24	SLBN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	24/SP2T/I/BAKUDA	1,230,572,000
25	SLBS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 1	16 JUNI 2021	25/SP2T/I/BAKUDA	257,600,000
26	SDN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	26.a/SP2T/I/BAKUDA	3,554,952,000
27	SDS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	26.b/SP2T/I/BAKUDA	709,704,000
28	SMPN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	27/SP2T/I/BAKUDA	1,164,440,000
29	SMPS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	28/SP2T/I/BAKUDA	362,940,000
30	SMAN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	29/SP2T/I/BAKUDA	956,004,000
31	SMAS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	30/SP2T/I/BAKUDA	559,872,000
32	SMKN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	31/SP2T/I/BAKUDA	2,213,580,000
33	SMKS	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	32/SP2T/I/BAKUDA	539,240,000
34	SLBN	REGULER	TAHAP 2 GELOMBANG 2	28 JUNI 2021	33/SP2T/I/BAKUDA	121,296,000
35	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	34/SP2T/BUD/II/BAKUDA	37,137,909,000
36	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	35/SP2T/BUD/II/BAKUDA	3,035,424,000
37	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	36/SP2T/BUD/II/BAKUDA	16,673,304,000
38	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	37/SP2T/BUD/II/BAKUDA	2,587,164,000
39	SMAN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	38/SP2T/BUD/II/BAKUDA	11,530,443,000
40	SMAS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	39/SP2T/BUD/II/BAKUDA	1,710,801,000
41	SMKN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	40/SP2T/BUD/II/BAKUDA	8,313,585,000
42	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	41/SP2T/BUD/II/BAKUDA	2,088,492,000
43	SLBN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	42/SP2T/BUD/II/BAKUDA	845,730,000
44	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 1	8 NOVEMBER 2021	43/SP2T/BUD/II/BAKUDA	85,050,000
45	SDN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	44/SP2T/BUD/II/BAKUDA	650,000,000
46	SDS	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	45/SP2T/BUD/II/BAKUDA	200,000,000
47	SMPN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	46/SP2T/BUD/II/BAKUDA	480,000,000
48	SMAN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	47/SP2T/BUD/II/BAKUDA	250,000,000
49	SMKN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	48/SP2T/BUD/II/BAKUDA	60,000,000
50	SLBN	KINERJA	TAHAP 3 GELOMBANG 1	12 NOVEMBER 2021	49/SP2T/BUD/II/BAKUDA	60,000,000

51	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	50/SP2T/BUD/II/BAKUDA	2,456,388,000
52	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	51/SP2T/BUD/II/BAKUDA	359,340,000
53	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	52/SP2T/BUD/II/BAKUDA	509,556,000
54	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	53/SP2T/BUD/II/BAKUDA	84,177,000
55	SMKN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	54/SP2T/BUD/II/BAKUDA	1,318,314,000
56	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	55/SP2T/BUD/II/BAKUDA	419,733,000
57	SLBN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	56/SP2T/BUD/II/BAKUDA	104,841,000
58	SLBS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 2	27 DESEMBER 2021	57/SP2T/BUD/II/BAKUDA	124,950,000
59	SDN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	58/SP2T/BUD/II/BAKUDA	622,701,000
60	SDS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	59/SP2T/BUD/II/BAKUDA	294,300,000
61	SMPN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	60/SP2T/BUD/II/BAKUDA	622,578,000
62	SMPS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	61/SP2T/BUD/II/BAKUDA	64,020,000
63	SMAN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	62/SP2T/BUD/II/BAKUDA	29,898,000
64	SMKN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	63/SP2T/BUD/II/BAKUDA	181,920,000
65	SMKS	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	64/SP2T/BUD/II/BAKUDA	163,200,000
66	SLBN	REGULER	TAHAP 3 GELOMBANG 3	28 DESEMBER 2021	65/SP2T/BUD/II/BAKUDA	95,304,000
TOTAL						**307,798,541,000**

LAMPIRAN XXV
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI SALDO KAS APBN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rp)

SKPD		IWP			PPh Ps. 21		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH
1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	9,840,550,812.00	9,840,550,812.00	-	10,918,992,521.00	10,918,999,521.00	- 7,000.00
1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	2,738,295,405.00	2,738,295,405.00	-	3,286,310,959.00	3,286,310,959.00	-
1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	341,963,432.00	341,963,432.00	-	259,691,733.00	259,691,733.00	-
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	448,148,790.00	448,148,790.00	-	433,467,016.00	433,467,016.00	-
1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	102,738,180.00	102,738,180.00	-	97,986,989.00	97,986,989.00	-
1 . 05 . 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	176,392,696.00	176,392,696.00	-	279,103,562.00	279,103,562.00	-
1 . 05 . 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	353,186,958.00	353,186,958.00	-	332,791,437.00	332,791,437.00	-
1 . 06 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	210,864,362.00	210,864,362.00	-	237,789,578.00	237,789,578.00	-
1 . 06 . 02	DINAS SOSIAL	207,387,519.00	207,387,519.00	-	202,682,131.00	202,682,131.00	-
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	312,958,104.00	312,958,104.00	-	418,841,235.00	418,841,235.00	-
2 . 01 . 01	DINAS TENAGA KERJA	463,634,803.00	463,634,803.00	-	516,362,141.00	516,362,141.00	-
2 . 02 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	221,560,021.00	221,560,021.00	-	325,113,475.00	325,113,475.00	-
2 . 04 . 01	DINAS PANGAN	17,740,932.00	17,740,932.00	-	22,662,964.00	22,662,964.00	-
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	777,954,276.00	777,954,276.00	-	835,777,395.00	835,777,395.00	-
2 . 05 . 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	128,154,792.00	128,154,792.00	-	117,157,721.00	117,157,721.00	-
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	532,249,930.00	532,249,930.00	-	536,554,150.00	536,554,150.00	-
2 . 08 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	109,114,891.00	109,114,891.00	-	139,927,723.00	139,927,723.00	-
2 . 09 . 01	DINAS PERHUBUNGAN	286,113,814.00	286,113,814.00	-	259,722,584.00	259,722,584.00	-
2 . 10 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	235,345,389.00	235,345,389.00	-	264,093,404.00	264,093,404.00	-
2 . 11 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	252,589,553.00	252,589,553.00	-	383,739,432.00	383,739,432.00	-
2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	240,127,260.00	240,127,260.00	-	294,673,474.00	294,673,474.00	-
2 . 13 . 01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100,816,594.00	100,816,594.00	-	123,360,260.00	123,360,260.00	-
2 . 16 . 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	154,754,529.00	154,754,529.00	-	189,144,555.00	189,144,555.00	-
2 . 17 . 01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	320,342,129.00	320,342,129.00	-	426,536,553.00	426,536,553.00	-
3 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	443,208,426.00	443,208,426.00	-	475,783,056.00	475,783,056.00	-
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	223,961,164.00	223,961,164.00	-	331,312,948.00	331,312,948.00	-

3 . 03 . 01	DINAS PERTANIAN	50,077,988.00	50,077,988.00	-	49,952,632.00	49,952,632.00	-
3 . 04 . 01	DINAS KEHUTANAN	417,361,245.00	417,361,245.00	-	375,256,731.00	375,256,731.00	-
3 . 05 . 01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	572,871,211.00	572,871,211.00	-	559,337,315.00	559,337,315.00	-
3 . 06 . 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	443,866,203.00	443,866,203.00	-	431,339,506.00	431,339,506.00	-
4 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	342,979,236.00	342,979,236.00	-	553,006,340.00	553,006,340.00	-
4 . 02 . 01	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,060,327,011.00	1,060,327,011.00	-	1,793,523,455.00	1,793,523,455.00	-
4 . 03 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	489,643,315.00	489,643,315.00	-	808,217,758.00	808,217,758.00	-
4 . 05 . 01	INSPEKTORAT DAERAH	447,519,669.00	447,519,669.00	-	763,861,308.00	763,861,308.00	-
4 . 06 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	1,350,720,047.00	1,350,720,047.00	-	1,954,734,688.00	1,954,734,688.00	-
4 . 06 . 02	SEKRETARIAT DPRD	340,589,843.00	340,589,843.00	-	5,204,147,833.00	5,204,147,833.00	-
4 . 06 . 03	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	120,669,769.00	120,669,769.00	-	85,243,869.00	85,243,869.00	-
	TOTAL	**24,876,780,298.00**	**24,876,780,298.00**	**-**	**34,288,200,431.00**	**34,288,207,431.00**	**- 7,000.00**

PPh Ps. 22			PPh Ps. 23			PPh Ps. 4			
PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN
67,918,803.00	67,921,081.00	- 2,278.00	63,423,438.00	63,146,438.00	277,000.00	494,625.00	494,625.00	-	614,733,296.00
108,149,333.00	108,149,333.00	-	61,684,043.00	61,684,043.00	-	1,757,164.00	1,757,164.00	-	952,076,401.45
11,016,231.00	11,016,231.00	-	2,334,446.00	2,334,446.00	-	1,368,527.00	1,368,527.00	-	87,533,052.00
16,507,249.00	16,507,249.00	-	4,679,540.00	4,679,540.00	-	12,234,495.00	12,234,495.00	-	159,250,395.00
107,117.00	107,117.00	-	146,018.00	146,018.00	-		-	-	1,270,047.00
3,107,377.00	3,107,377.00	-	4,331,553.00	4,331,553.00	-		-	-	35,661,843.00
1,850,986.00	1,850,986.00	-	5,286,691.00	5,286,691.00	-		-	-	30,543,623.00
16,592,676.00	16,592,676.00	-	3,295,202.00	3,295,202.00	-	12,936,290.00	12,936,290.00	-	151,390,099.00
2,034,507.00	2,034,507.00	-	483,664.00	483,664.00	-	290,909.00	290,909.00	-	17,299,256.00
14,729,744.00	14,729,744.00	-	11,696,932.00	11,696,932.00	-		-	-	101,688,900.00
3,232,815.00	3,232,815.00	-	2,113,549.00	2,113,549.00	-		-	-	25,816,285.00
4,485,591.00	4,485,591.00	-	5,502,729.00	5,502,729.00	-		-	-	29,807,655.00
		-			-		-	-	
18,278,589.00	18,278,589.00	-	10,236,691.00	10,236,691.00	-	14,421,444.00	14,421,444.00	-	151,270,279.00
2,457,882.00	2,457,882.00	-	1,563,363.00	1,563,363.00	-		-	-	30,618,244.00
18,947,660.00	18,947,660.00	-	8,083,279.00	8,083,279.00	-	330,000.00	330,000.00	-	153,358,582.00
218,181.00	218,181.00	-	282,137.00	282,137.00	-		-	-	4,448,761.00
4,125,100.00	4,125,100.00	-	15,577,719.00	15,057,174.00	520,545.00	4,794,007.00	5,314,552.00	- 520,545.00	115,548,015.00
7,179,853.00	7,179,853.00	-	163,320,694.00	163,320,694.00	-		-	-	852,782,731.00
5,681,431.00	5,681,431.00	-	10,107,952.00	10,107,952.00	-	1,827,273.00	1,827,273.00	-	47,876,592.00
2,537,597.00	2,537,597.00	-	1,922,423.00	1,922,423.00	-		-	-	23,224,328.00
1,202,876.00	1,202,876.00	-	163,264.00	163,264.00	-	75,625.00	75,625.00	-	8,620,088.00
505,842.00	505,842.00	-	1,492,556.00	1,492,556.00	-	5,545,853.00	5,545,853.00	-	5,203,306.00
4,208,503.00	4,208,503.00	-	1,428,179.00	1,428,179.00	-	2,214,710.00	2,214,710.00	-	31,982,797.00
13,104,305.00	13,104,305.00	-	3,263,835.00	3,263,835.00	-	7,806,611.00	7,806,611.00	-	74,496,916.00
11,211,293.00	11,211,293.00	-	13,440,484.00	13,440,484.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	125,648,247.00

		-			-		-	-	
1,890,350.00	1,916,740.00	- 26,390.00	398,145.00	371,755.00	26,390.00		-	-	15,825,538.00
2,096,244.00	2,096,244.00	-	1,641,789.00	1,641,789.00	-	6,652,182.00	6,652,182.00	-	26,397,652.00
5,091,902.00	5,091,902.00	-	2,939,616.00	2,939,616.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	53,874,403.00
5,049,999.00	5,049,999.00	-	7,460,310.00	7,460,310.00	-	153,749.00	153,749.00	-	48,314,972.00
25,423,786.00	25,423,786.00	-	19,886,432.00	19,886,432.00	-	9,788,388.00	9,788,388.00	-	267,608,067.00
6,936,304.00	6,936,304.00	-	8,044,522.00	8,044,522.00	-		-	-	55,757,561.00
2,989,429.00	2,989,429.00	-	2,349,238.00	2,349,238.00	-		-	-	35,742,883.00
66,095,903.00	66,095,903.00	-	77,419,644.00	77,419,644.00	-	35,335,311.00	35,335,311.00	-	831,418,024.00
44,754,619.00	44,754,619.00	-	149,959,124.00	149,959,124.00	-	25,462,853.00	25,462,853.00	-	611,724,674.00
1,774,108.00	1,774,108.00	-	1,420,424.00	1,420,424.00	-		-	-	24,820,509.00
501,494,185.00	**501,522,853.00**	**- 28,668.00**	**667,379,625.00**	**666,555,690.00**	**823,935.00**	**147,690,016.00**	**148,210,561.00**	**- 520,545.00**	**5,803,634,021.45**

PPN		PFK - Lainnya			SEWA RUMAH			BPJS Kesehatan	
PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN
614,710,870.00	22,426.00			-		-	-	7,309,987,363.00	7,309,987,363.00
952,076,401.45	-			-		-	-	2,582,493,860.00	2,582,493,860.00
87,533,052.00	-			-		-	-	277,024,080.00	277,024,080.00
159,250,395.00	-			-		-	-	414,331,022.00	414,331,022.00
1,270,047.00	-			-		-	-	83,335,627.00	83,335,627.00
35,661,843.00	-			-		-	-	162,700,280.00	162,700,280.00
30,543,623.00	-			-		-	-	351,245,300.00	351,245,300.00
151,390,099.00	-			-		-	-	138,175,907.00	138,175,907.00
17,299,256.00	-			-		-	-	196,095,514.00	196,095,514.00
101,688,900.00	-			-		-	-	303,327,944.00	303,327,944.00
25,816,285.00	-			-		-	-	450,213,926.00	450,213,926.00
29,807,655.00	-			-		-	-	208,471,716.00	208,471,716.00
	-			-		-	-	16,840,980.00	16,840,980.00
151,270,279.00	-			-		-	-	743,382,592.00	743,382,592.00
30,618,244.00	-			-		-	-	110,214,180.00	110,214,180.00
153,358,582.00	-	1.00	1.00	-		-	-	504,102,931.00	504,102,931.00
4,448,761.00	-			-		-	-	88,694,627.00	88,694,627.00
115,548,015.00	-			-		-	-	226,508,161.00	226,508,161.00
852,782,731.00	-			-		-	-	224,667,907.00	224,667,907.00
47,876,592.00	-			-		-	-	233,090,460.00	233,090,460.00
23,224,328.00	-			-		-	-	224,502,629.00	224,502,629.00
8,620,088.00	-			-		-	-	90,385,890.00	90,385,890.00
5,203,306.00	-	10,775,522.00	10,775,522.00	-		-	-	134,197,458.00	134,197,458.00
31,982,797.00	-			-		-	-	242,847,247.00	242,847,247.00
74,496,916.00	-			-		-	-	418,525,812.00	418,525,812.00
125,648,247.00	-			-		-	-	204,584,000.00	204,584,000.00

	-			-		-	-	48,282,628.00	48,282,628.00
15,825,538.00	-			-		-	-	393,238,074.00	393,238,074.00
26,397,652.00	-			-		-	-	314,122,647.00	314,122,647.00
53,874,403.00	-			-		-	-	455,417,999.00	455,417,999.00
48,314,972.00	-			-		-	-	336,697,315.00	336,697,315.00
267,608,067.00	-			-		-	-	1,012,316,384.00	1,012,316,384.00
55,757,561.00	-			-		-	-	479,114,549.00	479,114,549.00
35,742,883.00	-			-		-	-	434,304,808.00	434,304,808.00
831,418,024.00	-			-		-	-	1,227,683,442.00	1,227,683,442.00
611,724,674.00	-			-		-	-	303,919,767.00	303,919,767.00
24,820,509.00	-			-	2,200,000.00	2,200,000.00	-	107,152,728.00	107,152,728.00
5,803,611,595.45	**22,426.00**	**10,775,523.00**	**10,775,523.00**	**-**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**-**	**21,052,197,754.00**	**21,052,197,754.00**

	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA			IURAN JAMINAN KEMATIAN PNS			
SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	PENERIMAAN
-	219,336,344.00	219,336,344.00	-	658,014,269.00	658,014,269.00	-	29,693,451,471.00
-	52,658,082.00	52,658,082.00	-	166,156,256.00	166,156,256.00	-	9,949,581,503.45
-	7,457,096.00	7,457,096.00	-	22,371,427.00	22,371,427.00	-	1,010,760,024.00
-	9,388,953.00	9,388,953.00	-	28,167,068.00	28,167,068.00	-	1,526,174,528.00
-	2,214,395.00	2,214,395.00	-	6,643,157.00	6,643,157.00	-	294,441,530.00
-	3,706,056.00	3,706,056.00	-	11,118,344.00	11,118,344.00	-	676,121,711.00
-	7,102,968.00	7,102,968.00	-	21,309,125.00	21,309,125.00	-	1,103,317,088.00
-	4,445,302.00	4,445,302.00	-	13,336,080.00	13,336,080.00	-	788,825,496.00
-	4,292,201.00	4,292,201.00	-	12,876,726.00	12,876,726.00	-	643,442,427.00
-	6,453,217.00	6,453,217.00	-	19,359,828.00	19,359,828.00	-	1,189,055,904.00
-	9,583,504.00	9,583,504.00	-	28,750,927.00	28,750,927.00	-	1,499,707,950.00
-	4,667,180.00	4,667,180.00	-	14,001,671.00	14,001,671.00	-	813,610,038.00
-	374,783.00	374,783.00	-	1,124,351.00	1,124,351.00	-	58,744,010.00
-	16,347,164.00	16,347,164.00	-	49,042,029.00	49,042,029.00	-	2,616,710,459.00
-	2,759,136.00	2,759,136.00	-	8,277,518.00	8,277,518.00	-	401,202,836.00
-	11,048,614.00	11,048,614.00	-	33,146,215.00	33,146,215.00	-	1,797,821,362.00
-	2,305,236.00	2,305,236.00	-	6,915,763.00	6,915,763.00	-	351,907,319.00
-	6,164,559.00	6,164,559.00	-	18,494,070.00	18,494,070.00	-	937,048,029.00
-	4,900,264.00	4,900,264.00	-	14,704,004.00	14,704,004.00	-	1,766,994,246.00
-	5,312,720.00	5,312,720.00	-	15,938,383.00	15,938,383.00	-	956,163,796.00
-	5,006,041.00	5,006,041.00	-	15,018,280.00	15,018,280.00	-	807,012,032.00
-	2,129,347.00	2,129,347.00	-	6,388,029.00	6,388,029.00	-	333,141,973.00
-	3,249,648.00	3,249,648.00	-	9,749,000.00	9,749,000.00	-	514,618,269.00
-	6,731,009.00	6,731,009.00	-	20,192,976.00	20,192,976.00	-	1,056,484,103.00
-	9,200,444.00	9,200,444.00	-	27,601,350.00	27,601,350.00	-	1,472,990,755.00
-	4,729,657.00	4,729,657.00	-	14,189,038.00	14,189,038.00	-	932,076,831.00

-	1,032,579.00	1,032,579.00	-	3,097,765.00	3,097,765.00	-	152,443,592.00
-	8,656,565.00	8,656,565.00	-	25,969,994.00	25,969,994.00	-	1,238,596,642.00
-	11,983,943.00	11,983,943.00	-	35,952,764.00	35,952,764.00	-	1,531,055,747.00
-	13,788,520.00	13,788,520.00	-	41,365,747.00	41,365,747.00	-	1,448,883,896.00
-	7,081,023.00	7,081,023.00	-	21,243,326.00	21,243,326.00	-	1,321,986,270.00
-	22,024,151.00	22,024,151.00	-	66,072,768.00	66,072,768.00	-	4,276,970,442.00
-	10,148,048.00	10,148,048.00	-	23,034,751.00	23,034,751.00	-	1,880,896,808.00
-	9,138,661.00	9,138,661.00	-	27,416,282.00	27,416,282.00	-	1,723,322,278.00
-	28,432,403.00	28,432,403.00	-	85,297,876.00	85,297,876.00	-	5,657,137,338.00
-	7,209,969.00	7,209,969.00	-	21,629,914.00	21,629,914.00	-	6,709,398,596.00
-	2,552,426.00	2,552,426.00	-	7,657,336.00	7,657,336.00	-	353,491,169.00
						-	
-	**533,612,208.00**	**533,612,208.00**	**-**	**1,601,624,407.00**	**1,601,624,407.00**	**-**	**89,485,588,468.45**

TOTAL	
PENGELUARAN	SELISIH
29,693,161,323.00	290,148.00
9,949,581,503.45	-
1,010,760,024.00	-
1,526,174,528.00	-
294,441,530.00	-
676,121,711.00	-
1,103,317,088.00	-
788,825,496.00	-
643,442,427.00	-
1,189,055,904.00	-
1,499,707,950.00	-
813,610,038.00	-
58,744,010.00	-
2,616,710,459.00	-
401,202,836.00	-
1,797,821,362.00	-
351,907,319.00	-
937,048,029.00	-
1,766,994,246.00	-
956,163,796.00	-
807,012,032.00	-
333,141,973.00	-
514,618,269.00	-
1,056,484,103.00	-
1,472,990,755.00	-
932,076,831.00	-

152,443,592.00	-
1,238,596,642.00	-
1,531,055,747.00	-
1,448,883,896.00	-
1,321,986,270.00	-
4,276,970,442.00	-
1,880,896,808.00	-
1,723,322,278.00	-
5,657,137,338.00	-
6,709,398,596.00	-
353,491,169.00	-
89,485,298,320.45	**290,148.00**

LAMPIRAN XXVI
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

REKAPITULASI BELANJA BOS APBN TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(dalam Rp)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENGEMBALIAN KE KAS SEKOLAH	BOS TAHAP 1	BOS TAHAP 2	BOS TAHAP 3	BOS REGULER 2021	BOS KINERJA 2021	TOTAL PENERIMAAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL DAN PERALATAN MESIN	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO	Jasa Giro/Bunga/Saldo Awal Tab.	TOTAL KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Pangkalpinang	468,612,822	7,325,000	438,300,000	585,000,000	465,300,000	1,488,600,000	-	1,964,537,822		950,547,262	706,182,500	136,759,600	842,942,100	1,793,489,362	171,048,460	605,737	171,654,197
2	SMA Negeri 2 Pangkalpinang	257,334,000	900,000	396,450,000	529,200,000	406,800,000	1,332,450,000	-	1,590,684,000		823,358,900	541,157,100	63,580,000	604,737,100	1,428,096,000	162,588,000	-	162,588,000
3	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	41,173,138	300,000	410,400,000	548,400,000	430,650,000	1,389,450,000	-	1,430,923,138		1,062,173,138	200,000,000	149,972,080	349,972,080	1,412,145,218	18,777,920	-	18,777,920
4	SMA Negeri 4 Pangkalpinang	-	2,100,000	291,150,000	388,200,000	311,850,000	991,200,000	-	993,300,000		626,605,000	219,550,000	124,345,000	343,895,000	970,500,000	22,800,000	-	22,800,000
5	SMK Negeri 1 Pangkalpinang	716,635,909	2,480,000	409,920,000	546,560,000	424,320,000	1,380,800,000	60,000,000	2,159,915,909		730,622,433	624,120,000	280,000,000	904,120,000	1,634,742,433	525,173,476	-	525,173,476
6	SMK Negeri 2 Pangkalpinang	645,090,851	153,773,784	757,440,000	1,009,920,000	742,080,000	2,509,440,000	-	3,308,304,635		2,458,611,283	418,672,730	82,181,350	500,854,080	2,959,465,363	348,839,272	637,174	349,476,446
7	SMK Negeri 3 Pangkalpinang	160,828,805	4,650,000	400,320,000	535,040,000	404,160,000	1,339,520,000		1,504,998,805		943,428,805	430,000,000	93,354,000	523,354,000	1,466,782,805	38,216,000		38,216,000
8	SMK Negeri 4 Pangkalpinang	3,248,024	10,650,000	367,200,000	489,600,000	363,840,000	1,220,640,000		1,234,538,024		933,887,870	200,000,000	90,000,000	290,000,000	1,223,887,870	10,650,154		10,650,154
9	SMK Negeri 5 Pangkalpinang	156,461,343	-	197,760,000	263,680,000	199,200,000	660,640,000		817,101,343		514,386,290	119,159,000	70,376,000	189,535,000	703,921,290	113,180,053	-	113,180,053
10	SMA Negeri 1 Bakam	161,572	-	115,650,000	154,200,000	106,650,000	376,500,000	-	376,661,572		309,804,550	27,000,000	30,000,000	57,000,000	366,804,550	9,857,022	-	9,857,022
11	SMA Negeri 1 Mendobarat	4,882,556	-	230,400,000	307,800,000	229,050,000	767,250,000	-	772,132,556		602,132,556	80,000,000	90,000,000	170,000,000	772,132,556	-	-	-
12	SMA Negeri 2 Mendobarat	33,674,136	1,102,750	132,300,000	176,400,000	138,150,000	446,850,000	-	481,626,886		251,658,836	150,999,950	70,390,600	221,390,550	473,049,386	8,577,500	325,876	8,903,376
13	SMA Negeri 1 Puding Besar	31,556,994		176,400,000	235,200,000	180,900,000	592,500,000		624,056,994		380,993,780	183,056,994	52,006,220	235,063,214	616,056,994	8,000,000	133,140	8,133,140
14	SMA Negeri 2 Puding Besar	19,256,661		76,950,000	102,600,000	86,400,000	265,950,000		285,206,661		165,756,661	70,000,000	40,000,000	110,000,000	275,756,661	9,450,000	-	9,450,000
15	SMA Negeri 1 Belinyu	65,619,656	50,000	241,200,000	321,600,000	252,900,000	815,700,000	60,000,000	941,369,656		490,331,049	239,435,900	97,336,500	336,772,400	827,103,449	114,266,207	-	114,266,207
16	SMA Negeri 1 Merawang	34,802,656	-	214,650,000	286,200,000	219,600,000	720,450,000	-	755,252,656		637,810,050	54,000,000	56,417,500	110,417,500	748,227,550	7,025,106	-	7,025,106
17	SMA Negeri 1 Pemali	411,526,342	-	397,800,000	530,400,000	398,700,000	1,326,900,000	-	1,738,426,342		1,217,171,734	93,993,000	79,693,020	173,686,020	1,390,857,754	347,568,588		347,568,588
18	SMA Negeri 1 Riau Silip	31,323,666		217,800,000	290,400,000	201,150,000	709,350,000	-	740,673,666		362,669,836	195,148,000	109,740,000	304,888,000	667,557,836	73,115,830	-	73,115,830
19	SMA Negeri 1 Sungailiat	118,580,317	-	432,900,000	577,800,000	448,650,000	1,459,350,000	-	1,577,930,317		1,063,008,540	400,000,000	33,889,000	433,889,000	1,496,897,540	81,032,777		81,032,777
20	SMA Negeri 1 Bakam	203,713,669		176,160,000	234,880,000	181,920,000	592,960,000		796,673,669		366,348,000	378,062,991	15,000,000	393,062,991	759,410,991	37,262,678	-	37,262,678
21	SMK Negeri 1 Belinyu	291,152,256	810,800	217,440,000	289,920,000	208,320,000	715,680,000		1,007,643,056		401,847,195	384,568,230	36,030,000	420,598,230	822,445,425	185,197,631	-	185,197,631
22	SMK Negeri 1 Mendo Barat	20,530,591	-	142,080,000	191,360,000	125,280,000	458,720,000		479,250,591		287,482,000	126,768,000	65,000,000	191,768,000	479,250,000	591		591
23	SMK Negeri 1 Sungailiat	430,849,261	-	507,840,000	677,760,000	492,000,000	1,677,600,000		2,108,449,261		997,312,705	799,203,130	143,690,500	942,893,630	1,940,206,335	168,242,926	-	168,242,926
24	SMK Negeri 2 Sungailiat	29,777,845	-	355,680,000	475,520,000	384,000,000	1,215,200,000		1,244,977,845		753,576,793	414,979,000	50,000,000	464,979,000	1,218,555,793	26,422,052	901,126	27,323,178
25	SMK Negeri 1 Jebus	22,578,581	-	338,055,000	450,740,000	338,055,000	1,126,850,000		1,149,428,581		793,128,581	237,545,000	118,400,000	355,945,000	1,149,073,581	355,000	789,334	1,144,334
26	SMA Negeri 1 Kelapa	18,000,000	1,590,000	311,085,000	414,780,000	310,620,000	1,036,485,000		1,056,075,000		771,485,000	115,467,000	167,533,000	283,000,000	1,054,485,000	1,590,000		1,590,000
27	SMA Negeri 1 Muntok	218,229,174	4,300,000	353,400,000	471,200,000	351,075,000	1,175,675,000		1,398,204,174		805,014,474	469,670,001	117,827,000	587,497,001	1,392,511,475	5,692,699		5,692,699
28	SMA Negeri 1 Parit Tiga	452,139,447		240,870,000	321,160,000	227,850,000	789,880,000		1,242,019,447		405,398,950	178,579,300	47,500,000	226,079,300	631,478,250	610,541,197		610,541,197
29	SMA Negeri 1 Simpang Teritip	297,814,816		288,765,000	385,020,000	279,465,000	953,250,000		1,251,064,816	159,770,000	593,065,912	176,381,342	130,172,600	306,553,942	1,059,389,854	191,674,962	283,713	191,958,675
30	SMA Negeri 1 Tempilang	19,210,863		192,045,000	256,060,000	199,020,000	647,125,000	130,000,000	796,335,863		479,400,000	249,960,863	60,000,000	309,960,863	789,360,863	6,975,000	-	6,975,000
31	SMK Negeri 1 Simpang Teritip	36,000,000	5,766,500	91,080,000	121,440,000	87,120,000	299,640,000		341,406,500		116,607,200	209,409,800	9,623,000	219,032,800	335,640,000	5,766,500	-	5,766,500
32	SMK Negeri 1 Kelapa	241,748,554	-	262,365,000	350,460,000	234,630,000	847,455,000		1,089,203,554		749,163,575	241,255,000	84,500,000	325,755,000	1,074,918,575	14,284,979		14,284,979
33	SMK Negeri 1 Muntok	103,762,287	2,040,000	302,955,000	404,580,000	275,715,000	983,250,000		1,089,052,287		726,613,789	228,641,000	84,676,500	313,317,500	1,039,931,289	49,120,998		49,120,998
34	SMK Negeri 1 Parittiga	39,626,498	-	405,405,000	540,540,000	392,535,000	1,338,480,000		1,378,106,498		770,312,648	468,708,870	138,994,300	607,703,170	1,378,015,818	90,680		90,680
35	SMK Negeri 1 Tempilang	24,999,953	1,250,000	178,695,000	238,260,000	181,665,000	598,620,000		624,869,953		250,595,500	327,106,000	30,000,000	357,106,000	607,701,500	17,168,453		17,168,453
36	SMK Negeri 1 Koba	71,300,129	-	320,850,000	427,800,000	322,200,000	1,070,850,000	-	1,142,150,129		862,140,155	192,622,875	33,600,000	226,222,875	1,088,363,030	53,787,099	-	53,787,099
37	SMA Negeri 1 Lubukbesar	205,999,991	-	264,600,000	353,400,000	271,800,000	889,800,000	-	1,095,799,991		593,070,000	375,010,000	121,405,700	496,415,700	1,089,485,700	6,314,291	-	6,314,291
38	SMA Negeri 1 Namang	131,630,206	-	228,600,000	304,800,000	244,350,000	777,750,000	-	909,380,206		675,165,206	117,250,000	91,965,000	209,215,000	884,380,206	25,000,000	-	25,000,000
39	SMA Negeri 1 Pangkalanbaru	101,610,544	-	253,350,000	337,800,000	264,150,000	855,300,000	-	956,910,544		566,110,100	299,250,000	80,000,000	379,250,000	945,360,100	11,550,444	-	11,550,444
40	SMA Negeri 1 Sungaiselan	30,024,383	-	175,500,000	234,000,000	167,850,000	577,350,000	-	607,374,383		339,859,900	217,620,100	49,581,000	267,201,100	607,061,000	313,383	-	313,383
41	SMA Negeri 2 Sungaiselan	51,682,973	-	288,450,000	384,600,000	274,500,000	947,550,000	-	999,232,973		752,302,730	181,500,000	65,400,000	246,900,000	999,202,730	30,243	-	30,243
42	SMK Negeri 1 Koba	45,340,605	-	265,440,000	354,560,000	261,120,000	881,120,000		926,460,605		602,334,645	274,122,000	49,956,000	324,078,000	926,412,645	47,960		47,960
43	SMK Negeri 2 Koba	271,234,436	-	382,560,000	510,080,000	372,960,000	1,265,600,000		1,536,834,436		414,255,825	638,835,500	440,445,000	1,079,280,500	1,493,536,325	43,298,111	-	43,298,111
44	SMK Negeri 1 Pangkalanbaru	549,144,705	-	478,080,000	638,080,000	480,480,000	1,596,640,000		2,145,784,705		743,279,920	971,863,600	428,575,500	1,400,439,100	2,143,719,020	2,065,685		2,065,685
45	SMK Negeri 1 Simpangkatis	40,679,610	-	460,800,000	614,400,000	474,240,000	1,549,440,000		1,590,119,610		1,204,000,000	190,425,000	143,069,500	333,494,500	1,537,494,500	52,625,110		52,625,110
46	SMK Negeri 1 Sungaiselan	61,759,932	-	125,280,000	167,040,000	105,600,000	397,920,000		459,679,932		366,039,720	27,900,000	65,000,000	92,900,000	458,939,720	740,212		740,212
47	SMA Negeri 1 Air Gegas	15,300,000	-	313,929,000	418,572,000	318,006,000	1,050,507,000		1,065,807,000		707,330,000	194,400,000	160,000,000	354,400,000	1,061,730,000	4,077,000		4,077,000
48	SMA Negeri 1 Kep. Pongok	3,607,313	-	88,335,000	117,780,000	88,788,000	294,903,000	-	298,510,313		182,757,313	67,396,500	43,203,500	110,600,000	293,357,313	5,153,000	-	5,153,000
49	SMA Negeri 1 Lepar Pongok	10,800,558	-	146,322,000	195,696,000	146,319,000	488,337,000		499,137,558		336,275,558	114,162,000	48,700,000	162,862,000	499,137,558	-	8,016	8,016
50	SMA Negeri 1 Payung	24,993,820	-	286,296,000	381,728,000	296,262,000	964,286,000		989,279,820		772,223,820	123,090,000	84,000,000	207,090,000	979,313,820	9,966,000	-	9,966,000
51	SMA Negeri 1 Pulau Besar	71,292,000	1,400,000	80,181,000	106,908,000	98,754,000	285,843,000		358,535,000		220,533,600	38,070,000	19,958,400	58,028,400	278,562,000	79,973,000	-	79,973,000
52	SMA Negeri 1 Simpang Rimba	1,350,587	-	180,747,000	240,996,000	195,243,000	616,986,000		618,336,587		399,440,500	151,850,000	52,550,000	204,400,000	603,840,500	14,496,087	-	14,496,087
53	SMA Negeri 1 Toboali	64,338,498		432,618,000	577,424,000	432,162,000	1,442,204,000		1,506,542,498		1,092,204,000	294,338,498	120,000,000	414,338,498	1,506,542,498	-		-
54	SMA Negeri 2 Toboali	9,000,000		245,082,000	328,576,000	251,415,000	825,073,000		834,073,000		697,715,000	75,350,000	57,375,000	132,725,000	830,440,000	3,633,000		3,633,000
55	SMA Negeri 3 Toboali					29,898,000	29,898,000	-	29,898,000		-	-	-	-	-	29,898,000		29,898,000
56	SMK Negeri 1 Airgegas	24,057,214	-	200,928,000	267,904,000	196,098,000	664,930,000		688,987,214		509,877,214	139,110,000	40,000,000	179,110,000	688,987,214	-	-	-
57	SMK Negeri 1 Payung	14,319,189	13,860,000	195,615,000	260,820,000	192,234,000	648,669,000		676,848,189		466,369,189	100,000,000	100,000,000	200,000,000	666,369,189	10,479,000		10,731,120
58	SMK Negeri 1 Simpangrimba	-	2,182,500	81,144,000	108,192,000	100,947,000	290,283,000		292,465,500		174,430,000	96,050,000	-	96,050,000	270,480,000	21,985,500		21,985,500
59	SMK Negeri 1 Toboali	33,107,250	-	351,141,000	468,188,000	354,039,000	1,173,368,000		1,206,475,250		849,577,250	234,000,000	120,000,000	354,000,000	1,203,577,250	2,898,000		2,898,000
60	SMK Negeri 1 Tukak Sadai	2,908,298	-	156,978,000	209,944,000	159,873,000	526,795,000		529,703,298		392,768,000	109,501,000	24,982,450	134,483,450	527,251,450	2,451,848		2,451,848
61	SMK Negeri 1 Pulau Besar	28,726,000	-	63,273,000	84,364,000	51,681,000	199,318,000		228,044,000		176,684,500	40,725,000	-	40,725,000	217,409,500	10,634,500	14,154	10,648,654
62	SMA Negeri 1 Membalong	13,950,000		260,676,000	347,568,000	247,572,000	855,816,000		869,766,000		599,766,000	163,891,000	106,109,000	270,000,000	869,766,000	-		-
63	SMA Negeri 1 Sijuk	45,087,717		222,300,000	296,400,000	219,492,000	738,192,000		783,279,717		610,165,912	94,990,005	78,123,800	173,113,805	783,279,717	-		-
64	SMA Negeri 1 Tanjung Pandan	36,070,625		361,782,000	482,976,000	378,144,000	1,222,902,000		1,258,972,625		977,440,000	116,070,625	150,000,000	266,070,625	1,243,510,625	15,462,000		15,462,000
65	SMK Negeri 2 Tanjung Pandan	5,400,896		329,940,000	439,920,000	335,556,000	1,105,416,000		1,110,816,896		605,200,000	288,525,444	210,000,000	498,525,444	1,103,725,444	7,091,452		7,091,452
66	SMK Negeri 1 Badau	-		227,088,000	302,784,000	226,590,000	756,462,000		756,462,000		590,462,000	96,000,000	70,000,000	166,000,000	756,462,000	-	444,919	444,919
67	SMK Negeri 1 Selat Nasik	64,868,878		79,182,000	105,576,000	83,166,000	267,924,000		332,792,878		258,849,000	48,850,000	21,003,000	69,853,000	328,702,000	4,090,878	10,585	4,101,463
68	SMK Negeri 1 Tanjungpandan	37,440,000		466,644,000	622,832,000	471,108,000	1,560,584,000		1,598,024,000		1,188,950,000	281,850,000	123,720,000	405,570,000	1,594,520,000	3,504,000		3,504,000
69	SMK Negeri 2 Tanjungpandan	172,162,141		421,326,000	562,408,000	402,384,000	1,386,118,000		1,558,280,141		1,158,280,141	350,000,000	50,000,000	400,000,000	1,558,280,141	-		-
70	SMK Negeri 3 Tanjungpandan	328,634,405		246,528,000	329,344,000	294,318,000	870,190,000		1,198,824,405		653,462,000	102,215,000	374,524,000	476,739,000	1,130,201,000	68,623,405	5,027,050	73,650,455
71	SMK Negeri 1 Sijuk	48,960,000		129,480,000	172,640,000	179,778,000	481,898,000		530,858,000		307,360,000	103,200,000	70,000,000	173,200,000	480,560,000	50,298,000		50,298,000
72	SMA Negeri 1 Damar	226,574,454		181,806,000	242,408,000	189,813,000	614,027,000		840,601,454		420,681,100	122,680,000	90,000,000	212,680,000	633,361,100	207,240,354	2,462,307	209,702,661
73	SMA Negeri 1 Gantung	9,914,757		324,048,000	432,064,000	341,475,000	1,097,587,000		1,107,501,757		949,538,967	75,314,000	60,000,000	135,314,000	1,084,852,967	22,648,790		22,648,790
74	SMA Negeri 1 KelapaKampit	17,016,092		214,776,000	286,368,000	238,797,000	739,941,000		756,957,092		527,163,005	126,778,500	74,912,000	201,690,500	728,853,505	28,103,587	1,220,081	29,323,668
75	SMA Negeri 1 Manggar	65,775,000		351,837,000	469,116,000	384,807,000	1,205,760,000	60,000,000	1,331,535,000		828,565,000	285,000,000	185,000,000	470,000,000	1,298,565,000	32,970,000	1,957,839	34,927,839
76	SMA Negeri 1 Simpangpesak	7,915,000		219,015,000	292,020,000	208,653,000	719,688,000		727,603,000		527,603,000	155,000,000	45,000,000	200,000,000	727,603,000	-		-
77	SMK Negeri 1 Dendang	198,426,831		88,677,000	118,236,000	86,673,000	293,586,000		492,012,831		197,935,000	269,077,831	25,000,000	294,077,831	492,012,831	-	1,733,312	1,733,312
78	SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	178,011,305		199,899,000	266,532,000	178,857,000	645,288,000		823,299,305		334,037,281	311,120,000	79,895,500	391,015,500	725,052,781	98,246,524		98,246,524
79	SMK Negeri 1 Manggar	37,020,030		389,820,000	521,040,000	371,241,000	1,282,101,000		1,319,121,030		818,181,000	300,000,000	200,000,000	500,000,000	1,318,181,000	940,030		940,030
80	SMK Negeri 1 Simpang Renggiang	2,540,000		79,158,000	105,544,000	73,647,000	258,349,000		260,889,000		150,600,000	35,000,000	58,560,000	93,560,000	244,160,000	16,729,000	12,656	16,741,656
81	SMAN O.R MUHAMMAD NOER	25,471,092	-	32,400,000	43,200,000	31,500,000	107,100,000	-	132,571,092		88,224,362	24,346,730	20,000,000	44,346,730	132,571,092	-	-	-
82	SLB Negeri Pangkalpinang	24,778,850	-	270,900,000	361,200,000	275,100,000	907,200,000	-	931,978,850		577,778,850	340,000,000	10,000,000	350,000,000	927,778,850	4,200,000	-	4,200,000
83	SLB Negeri Sungailiat	18,418,351	-	165,300,000	221,200,000	166,950,000	553,450,000	60,000,000	631,868,351		318,800,000	277,000,000	35,000,000	312,000,000	630,800,000	1,068,351		1,068,351
84	SLB Negeri Muntok	16,362,744	-	90,972,000	121,296,000	95,304,000	307,572,000		323,934,744		115,324,000	49,256,000	10,000,000	59,256,000	174,580,000	149,354,744	6,192	149,360,936
85	SLB Negeri Toboali	3,105,328	-	103,782,000	138,376,000	104,841,000	346,999,000		350,104,328		296,300,000	52,700,000	-	52,700,000	349,000,000	1,104,328		1,104,328
86	SLB Negeri Koba	49,245,387	-	93,717,000	124,956,000	107,406,000	326,079,000	-	375,324,387		210,622,900	111,875,000	15,000,000	126,875,000	337,497,900	37,826,487	-	37,826,487
87	SLB Negeri Tanjung Pandan	2,442,077		163,800,000	218,400,000	171,444,000	553,644,000		556,086,077		264,442,077	250,000,000	34,000,000	284,000,000	548,442,077	7,644,000		7,644,000
88	SLB Negeri Manggar	127,537		124,830,000	166,440,000	124,830,000	416,100,000		416,227,537		342,727,537	73,500,000	-	73,500,000	416,227,537	-		-
	JUMLAH	**9,150,830,981**	**216,531,334**	**22,174,692,000**	**29,586,376,000**	**22,420,035,000**	**74,181,103,000**	**370,000,000**	**83,918,465,315**	**159,770,000**	**51,807,514,172**	**19,999,771,909**	**7,412,293,120**	**27,412,065,029**	**79,379,349,201**	**4,539,116,114**	**16,573,211**	**4,555,941,445**

LAMPIRAN XXVII
Catatan atas Lapo

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA/SEJENIS DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM BENTUK UANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO. SP2B	URAIAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA			
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
1	001/SP2B/BUD/2022	Sumbangan dari Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019	470,189,693.00	3,745,257.00	-	188,933,751.00	-	188,933,751.00

(dalam Rp)

SALDO AKHIR
285,001,199.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA/SEJENIS DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM BENTUK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XXVIII
Catatan atas Laporan Keuangan
2021

(dalam Rp)

NO	NO. SPSB	URAIAN	SALDO AWAL			PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO AKHIR		
			PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS	ASET TETAP	TOTAL SALDO AWAL	PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS	ASET TETAP	TOTAL PENERIMAAN	PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS	ASET TETAP	TOTAL PENGELUARAN	PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS	ASET TETAP	TOTAL SALDO AKHIR
1	001/SPSB/BUD/II/2022	Sumbangan dari Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019	9,285,050,150.00	-	9,285,050,150.00	19,654,392,300.00	-	19,654,392,300.00	24,701,369,150.00	-	24,701,369,150.00	4,238,073,300.00	-	4,238,073,300.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XXIX
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
I. BIDANG KESEHATAN					
A. PENANGANAN COVID-19					
1. BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DID					
	DINAS KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
15.14	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	5,219,927,136	2,307,517,125	44.21	
15.13	Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	626,209,007	49,985,000	7.98	
15.08	Subkegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	50,000,000	-	-	
15.11	Sub kegiatan pengadaan sarana difasilitas layanan kesehatan	300,000,000	-	-	
15.10	Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	80,000,000	-	-	
15.15	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan	49,000,000	30,500,650	62.25	
15.22	Sub Kegiatan Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	177,891,158	30,516,600	17.15	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
17.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14,866,042	14,866,042	100.00	
	SUB TOTAL DINAS KESEHATAN	**6,517,893,343**	**2,433,385,417**	**37.33**	
	RSUP				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Layanan, sarana,prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
15.16	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	10,567,500,000	-	-	
15.16	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	2,984,005,355	2,983,826,368	99.99	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
17.03	Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	49,500,000	48,900,000	98.79	
	SUB TOTAL RSUP	**13,601,005,355**	**3,032,726,368**	**22.30**	
	SUB TOTAL BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DID	**20,118,898,698**	**5,466,111,785**	**27.17**	
2. BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DAU/DBH					**-**
3. BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)					
1	RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 (Labkesda Dinkes)	3,000,000,000	2,437,017,290	81.23	
2	RKB operasional wisma karantina (Dinkes)	2,000,000,000	1,978,923,899	98.95	
3	RKB operasional petugas pengawal vaksin covid-19 (Dinkes)	146,205,000	141,752,200	96.95	
4	RKB deteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 di balai labkes dinkes kebutuhan juni 2021 (Dinkes)	182,806,000	131,135,000	71.73	
5	BTT untuk penyaluran bansos pangan bagi keluarga pasien isolasi terpadu dampak covid-19 (Dinsos)	902,355,000	118,712,065	13.16	
7	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1162/II tgl 22-09-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 tahun 2021 tgl 30-06-2021	139,500,000	139,500,000	100.00	
8	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov. Kep. Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1364/II tgl 08-10-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	155,000,000	155,000,000	100.00	
9	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1660/II tgl 25-11-2021 dan Pergub Kep.Babel No.34 tahun 2021 tgl 30-06-2021	80,500,000	80,500,000	100.00	
10	Belanja Tidak terduga lainnya	13,697,258,601	-	-	
	SUB TOTAL BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	**20,303,624,601**	**5,182,540,454**	**25.53**	
	SUB TOTAL PENANGANAN COVID-19	**40,422,523,299**	**10,648,652,239**	**26.34**	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
B. DUKUNGAN VAKSINASI					
	DINAS KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi				
16.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,260,704,827	1,260,704,827	100.00	
	SUB TOTAL DUKUNGAN VAKSINASI	**1,260,704,827**	**1,260,704,827**	**100.00**	
C. DUKUNGAN PADA KELURAHAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19					
	-				
	-				
	SUB TOTAL DUKUNGAN PADA KELURAHAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	**-**	**-**	**-**	
				-	
D. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19					
	Dokter spesialis	941,000,000	772,071,450	82.05	
	Dokter umum & dokter gigi	500,000,000	461,428,577	92.29	
	Bidan dan perawat	2,610,499,866	2,577,321,436	98.73	
	Tenaga kesehatan lainnya	1,251,000,000	1,327,857,144	106.14	
	SUB TOTAL INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19	**5,302,499,866**	**5,138,678,607**	**96.91**	
E. BELANJA KESEHATAN LAINNYA DAN KEGIATAN PRIORITAS					
1. Belanja bidang kesehatan yang bersumber dari DAU					
	DINAS KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
16.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	107,386,231	107,386,231	100.00	
16.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	44,056,938	-	-	
16.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	130,057,138	-	-	
16.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	148,081,571	-	-	
16.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	131,753,129	44,684,130	33.92	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
16.19	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	225,091,662	225,091,662	100.00	
16.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	54,000,036	30,358,000	56.22	
16.20	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	27,646,875	17,716,000	64.08	
16.23	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat (SPGDT)	1,818,520,881	1,502,703,225	82.63	
16.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	37,078,405	-	-	
16.24	Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	95,598,915	-	-	
16.26	Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	318,140,000	21,420,516	6.73	
16.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	728,036,718	365,376,717	50.19	
16.27	Sub Kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36,975,598	30,618,000	82.81	
16.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	346,816,256	346,816,256	100.00	
16.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	205,220,000	-	-	
16.18	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	114,234,417	-	-	
16.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26,924,281,716	26,924,281,716	100.00	
16.19	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1,877,000,000	1,877,000,000	100.00	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
18.03	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251,378,787	251,378,787	100.00	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
15.06	Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	45,568,664	-	-	
15.04	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	232,612,763	232,612,763	100.00	
15.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50,000,000	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
17.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	85,521,000	85,521,000	100.00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
20.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,090,961,059	994,742,800	91.18	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				
21.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK)	79,499,848	-	-	
21.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur ksehatan (PAK) berbasis elektronik	60,000,000	33,915,500	56.53	
	Keg Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				
22.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional	109,999,961	-	-	
22.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin UKOT	24,499,815	20,460,439	83.51	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
23.01	Sub Kegiatan Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	90,668,312	-	-	
	Keg Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya masayarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				
25.01	Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi UKBM	187,146,752	-	-	
	TOTAL DINAS KESEHATAN	**35,677,833,447**	**33,112,083,742**	**92.81**	
	RSUP				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
15.10	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	425,220,845	425,220,845	100.00	
15.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	3,244,709,300	3,244,709,300	100.00	
15.12	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48,614,500	48,614,500	100.00	
15.13	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	158,996,000	33,829,750	21.28	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
15.16	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	3,990,182,335	3,990,182,335	100.00	
15.17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	694,988,000	667,848,760	96.10	
15.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	300,900,000	274,066,535	91.08	
15.19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	453,582,380	453,582,380	100.00	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		-		
18.03	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	470,262,967	143,781,002	30.57	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
19.01	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14,342,980,010	14,342,980,010	100.00	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
20.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29,264,944	27,752,710	94.83	
	Total RSUP	**24,159,701,281**	**23,652,568,127**	**97.90**	
	RSJD				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
15.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	138,294,000	136,406,000	98.63	
15.13	Sub Kegiatan Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100,000,000	98,895,377	98.90	
15.14	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	144,858,000	143,544,720	99.09	
15.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	80,000,000	78,925,000	98.66	
15.17	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	84,367,500	82,698,000	98.02	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah				
16.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	131,945,000	123,639,021	93.70	
16.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142,105,000	35,750,000	25.16	
16.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	209,298,020	36,870,000	17.62	
16.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	149,730,448	59,359,100	39.64	
	Kegiatan Penerbitan Izin rumah sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat daerah Provinsi				
18.03	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	329,703,000	31,475,000	9.55	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP				
19.01	Sub Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7,597,700,000	6,840,371,464	90.03	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
20.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan: Pelatihan BT&CLS	510,141,994	290,946,278	57.03	
20.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia: Audit Keperawatan	19,994,901	10,530,000	52.66	
	Total RSJD	**9,638,137,863**	**7,969,409,960**	**82.69**	
	SUB TOTAL BELANJA KESEHATAN LAINNYA DAN KEGIATAN PRIORITAS	**69,475,672,591**	**64,734,061,829**	**93.18**	
	SUB TOTAL BELANJA BIDANG KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DAU	**76,038,877,284**	**71,133,445,263**	**93.55**	
	TOTAL DAU	**939,550,039,000**			
		8.09			
	SUB TOTAL BIDANG KESEHATAN	**116,461,400,583**	**81,782,097,502**	**70.22**	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
II. PENANGANAN DAMPAK/DUKUNGAN EKONOMI					
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang bersumber dari DID					
	DINAS PENDIDIKAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
9.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,838,427,000	4,838,427,000	100.00	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
7.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,000,000,000	433,935,884	21.70	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
15.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	4,250,000,000	3,133,116,000	73.72	
15.26	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	945,000,000	937,436,000	99.20	
15.51	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1,250,000,000	985,413,233	78.83	
15.49	Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000	346,475,300	69.30	
15.53	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2,510,334,883	2,510,334,883	100.00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
16.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1,200,000,000	1,162,623,200	96.89	
16.43	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	750,000,000	556,378,500	74.18	
16.41	Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000	500,000,000	100.00	
16.46	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Khusus				
17.39	Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	953,858,800	953,858,800	100.00	
17.48	Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	130,147,807	130,147,807	100.00	
17.23	Sub kegiatan rehabilitasi asrama sekolah	375,237,134	375,237,134	100.00	
16.10	Sub kegiatan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah	730,000,000	730,000,000	100.00	
	Sub Total Dinas Pendidikan	**23,933,005,624**	**20,593,383,741**	**86.05**	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
23.01	Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia serta Desain dan Teknologi				
	Belanja barang/jasa untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1,000,000,000	957,838,200	95.78	
	Sub Total DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**1,000,000,000**	**957,838,200**	-	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN				
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan				
18.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	200,000,000	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				
32.05	Subkeg Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000	35,000,000	33.33	
	Sub Total DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	**305,000,000**	**35,000,000**	11.48	
	DINAS KEHUTANAN				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
3.04.01.27.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	48,628,000	48,628,000	100.00	
09.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Belantu Mendanau	50,324,000	50,232,000	99.82	
05.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Bubus Panca	88,153,800	87,790,250	99.59	
10.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Gunung Duren	29,664,000	2,400,000	8.09	
04.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	29,664,000	29,664,000	100.00	
07.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Muntai Palas	26,388,155	26,343,000	99.83	
08.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Sigambir Kotawaring	35,070,064	-	-	
06.27.02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Sungai Sembulan	29,664,000	27,085,000	91.31	
	Sub Total DINAS KEHUTANAN	**337,556,019**	**272,142,250**	**80.62**	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
15.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	103,000,000	62,000,000	60.19	
	Sub Total DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	**103,000,000**	**62,000,000**	60.19	
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman				
3.03.02.16.04	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	6,029,520,000	2,901,602,550	48.12	
3.03.02.16.02	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit horticultura	721,500,659	711,093,200	98.56	
3.03.02.16.03	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit tanaman pangan	120,800,000	-	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRA SARANA PERTANIAN				
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian				
3.03.01.22.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1,250,000,000	1,250,000,000	100.00	
3.03.01.22.04	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	960,500,000	344,131,000	35.83	
	Sub Total Dinas Pertanian	**9,082,320,659**	**5,206,826,750**	57.33	
	Total Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi yang bersumber dari DID	**34,760,882,302**	**27,127,190,941**	**78.04**	
III. BANTUAN SOSIAL SAFETY NET/JARING PENGAMAN SOSIAL					
	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang bersumber dari DID				
	DINAS SOSIAL				
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				
24.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	90,216,000	90,216,000	100.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Keg Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi				
16.02	Sub keg Peningkatan Kemampuan Potensi Ketenagakerjaan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	282,000,000	211,500,000	75.00	

No./Kodrek Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
		31 Desember 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				
24.03	Sub Kegiatan Faslitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	200,000,000	195,181,000	97.59	
	Sub Total Dinas Sosial	**572,216,000**	**496,897,000**	**86.84**	
	DINAS PENDIDIKAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus				
16.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik SMK	987,000,000	987,000,000	100.00	
	Sub Total DINAS PENDIDIKAN	**987,000,000**	**987,000,000**	**100.00**	
	Total Bidang Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari DID	**1,559,216,000**	**1,483,897,000**	**95.17**	
TOTAL SEMUA BIDANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN/PENANGANAN COVID-19		**152,781,498,885**	**110,393,185,443**	**72.26**	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR KAS BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXX
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

NO	NAMA OPD	SISA KAS
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**49,446,032.62**
1.1	- DINAS PENDIDIKAN	3,674.62
1.2	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	-
1.3	- SMK Negeri 2 Pangkalpinang	270,000.00
1.4	- SMK Negeri 3 Pangkalpinang	-
1.5	- SMK Negeri 4 Pangkalpinang	0.00
1.6	- SMK Negeri 5 Pangkalpinang	-
1.7	- SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	150,403.00
1.8	- SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	13.00
1.9	- SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	-
1.10	- SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	25.00
1.11	- SLB Negeri Pangkalpinang	49.00
1.12	- SMK Negeri 1 Sungailiat	-
1.13	- SMK Negeri 2 Sungailiat	36,240.00
1.14	- SMK Negeri 1 Mendo Barat	-
1.15	- SMK Negeri 1 Belinyu	-
1.16	- SMK Negeri 1 Bakam	3,800.00
1.17	- SMA Negeri 1 Bakam	-
1.18	- SMA Negeri 1 Belinyu	-
1.19	- SMA Negeri 1 Mendobarat	0.00
1.20	- SMA Negeri 2 Mendobarat	0.00
1.21	- SMA Negeri 1 Merawang	-
1.22	- SMA Negeri 1 Pemali	-
1.23	- SMA Negeri 1 Puding Besar	-

1.24	SMA Negeri 1 Riau Silip -	10,000.00
1.25	SMA Negeri 1 Sungailiat -	-
1.26	SMA Negeri 2 Puding Besar -	-
1.27	SLB Negeri Sungailiat -	-
1.28	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV -	0.00
1.29	SMK Negeri 1 Mentok -	-
1.30	SMK Negeri 1 Kelapa -	50,340.00
1.31	SMK Negeri 1 Parittiga -	-
1.32	SMK Negeri 1 Tempilang -	-
1.33	SMK Negeri 1 Simpang Teritip -	-
1.34	SMA Negeri 1 Jebus -	67,192.00
1.35	SMA Negeri 1 Kelapa -	-
1.36	SMA Negeri 1 Muntok -	39,731,623.00
1.37	SMA Negeri 1 Parit Tiga -	-
1.38	SMA Negeri 1 Simpang Teritip -	-
1.39	SMA Negeri 1 Tempilang -	-
1.40	SLB Negeri Muntok -	-
1.41	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II -	-
1.42	SMK Negeri 1 Koba -	-
1.43	SMK Negeri 2 Koba -	921,678.00
1.44	SMK Negeri 1 Simpangkatis -	-
1.45	SMK Negeri 1 Pangkalanbaru -	312,000.00
1.46	SMK Negeri 1 Sungaiselan -	-
1.47	SMA Negeri 1 Koba -	-
1.48	SMA Negeri 1 Lubukbesar -	1,374,413.00
1.49	SMA Negeri 1 Namang -	5,120.00
1.50	SMA Negeri 1 Pangkalanbaru -	328,909.00
1.51	SMA Negeri 1 Sungaiselan -	-

1.52	-	SMA Negeri 2 Sungaiselan	-
1.53	-	SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	0.00
1.54	-	SLB N Koba	137,931.00
1.55	-	SMK Negeri 1 Toboali	-
1.56	-	SMK Negeri 1 Payung	438,823.00
1.57	-	SMK Negeri 1 Pulau Besar	0.00
1.58	-	SMK Negeri 1 Tukak Sadai	30,000.00
1.59	-	SMK Negeri 1 Simpangrimba	-
1.60	-	SMK Negeri 1 Airgegas	685.00
1.61	-	SMA Negeri 1 Air Gegas	171.00
1.62	-	SMA Negeri 1 Lepar Pongok	20,000.00
1.63	-	SMA Negeri 1 Kep. Pongok	42,322.00
1.64	-	SMA Negeri 1 Payung	228,602.00
1.65	-	SMA Negeri 1 Pulau Besar	481,404.00
1.66	-	SMA Negeri 1 Simpang Rimba	-
1.67	-	SMA Negeri 1 Toboali	-
1.68	-	SMA Negeri 2 Toboali	600.00
1.69	-	SLB N Toboali	-
1.70	-	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	52,190.00
1.71	-	SMK Negeri 1 Tanjungpandan	-
1.72	-	SMK Negeri 2 Tanjungpandan	-
1.73	-	SMK Negeri 3 Tanjungpandan	-
1.74	-	SMK Negeri 1 Badau	-
1.75	-	SMK Negeri 1 Selat Nasik	-
1.76	-	SMA Negeri 1 Membalong	-
1.77	-	SMA Negeri 1 Sijuk	2,634,019.00
1.78	-	SMA Negeri 1 Tanjung Pandan	-
1.79	-	SMA Negeri 2 Tanjung Pandan	-

1.80	SLB Negeri Tanjung Pandan -	-
1.81	SMK Negeri 1 Manggar -	0.00
1.82	SMK Negeri 1 Kelapa Kampit -	10,949.00
1.83	SMK Negeri 1 Dendang -	133,329.00
1.84	SMK Negeri 1 Simpang Renggiang -	168,739.00
1.85	SMA Negeri 1 Damar -	1,509,394.00
1.86	SMA Negeri 1 Gantung -	45,767.00
1.87	SMA Negeri 1 KelapaKampit -	63,120.00
1.88	SMA Negeri 1 Manggar -	10,000.00
1.89	SMA Negeri 1 Simpangpesak -	10,000.00
1.90	SLB Negeri Manggar -	8,236.00
1.91	SMK N 1 Sijuk -	42,874.00
1.92	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V -	111,398.00
1.93	SMA Negeri 3 Toboali -	-
2	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**153,032.00**
3	**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI**	**(2,900.00)**
JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		**49,596,164.62**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAIN-LAIN PENERIMAAN PADA LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXXI
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	NILAI REALISASI
20-Jan-2021	001/LAIN/2021	PENERIMAA LAINNYA DARI DINKES	360,000.00
04-Feb-2021	42/BS05/STS/SL/2021	Pengembalian Sisa APDB 2019 SMK Bakti Pangkalpinang	2,900,000.00
30-Apr-2021	104/BS05/STS/SL/2021	00000542/360003	690,000.00
03-May-2021	105/BS05/STS/SL/2021	000684047/627452	1,700,000.00
04-May-2021	106/BS05/STS/SL/2021	000718341/627452	497,000.00
	107/BS05/STS/SL/2021	SET KLBHN BNYK PEMRHN SMA	475,000.00
11-May-2021	24/LAINNYA/2021	DENDA RETRIBUSI KANTIN	14,400.00
17-May-2021	25/LAINNYA/2021	PENGEMBALIAN BELANJA SEWA KENDARAAN BPBD	612,000.00
20-May-2021	26/LAINNYA/2021	DENDA RETRIBUSI	9,600.00
21-May-2021	27/LAINNYA/2021	DEND RETRIBUSI	2,090.00
	28/LAINNYA/2021	PENERIMAAN LAINNYA	1,280,000.00
25-May-2021	29/LAINNYA/2021	000065379/627452	3,586,686.00
26-May-2021	30/LAINNYA/2021	000027718/2	1,836,700.00
04-Jun-2021	01/LAINNYA/VI/021	PENERIMAAN LAINNYA	51,746.00
	101/lainnya/6/2021	Penerimn Lainnya	21,200.00
10-Jun-2021	1010/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	100,000.00
	1011/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	100,000.00
	99/lainnya/6/2021	Penerimaan dari PT. Solusindo	64,800,000.00
11-Jun-2021	1017/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,375,000.00
	1018/Lainnya/2021	Penerimaan lainnya	100,000.00
	1019/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	100,000.00
21-Jun-2021	1029/Lainnya/2021	Pengembalian Kekurangan Belanja Konsultan	5,000,000.00
23-Jun-2021	1040/lainnya/2021	Penerimaan Denda Sewa Kantin Dinas ESDM	32,000.00
	1041/Lainnya/2021	Penerimaan Denda Sewa Ret. DKP	9,000.00
	1042/Lainnya/2021	Penerimaan Denda Ret. DKP	409,500.00
	1047/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	351,755.00
25-Jun-2021	887/Lainnya/2021	Denda Retribusi DLHK	9,580.00
30-Jun-2021	666/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,275,000.00
	667/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,325,278.00
	668/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	45,000.00
01-Jul-2021	670/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,375,000.00
	671/Lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,275,000.00
02-Jul-2021	672/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,275,000.00
	673/Lainnya/2021	Pengembalian Honor Dinas Kearsipan TA. 2020	200,000.00
	674/lainnya/2021	Pengembalian Kegiatan Dinas Kearsipan TA. 2020	1,450,000.00
	676/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	2,275,000.00
05-Jul-2021	677/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	3,870,000.00
06-Jul-2021	681/lainnya/2021	Denda Sewa Kantin Dinas ESDM	4,000.00
	684/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	900,000.00
	686/lainnya/2021	Denda Retribusi DLHK	19,160.00
	688/lainnya/2021	Pengembalian dana Hibah pembangunan Masjid Ashad Babel	32,786,557.00
	689/lainnya/2021	Pengembalian gaji an. Rizka Primaliza	3,460,000.00
08-Jul-2021	692/lainnya/2021	Denda Retribusi DLHK	72,200.00
	701/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,707,739.23
	706/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,200,000.00
12-Jul-2021	710/lainnya/2021	Denda retribusi DLHK	35,640.00
13-Jul-2021	711/lainnya/2021	penerimaan lainnya	14,880,000.00
15-Jul-2021	720/lainnya/2021	Denda Retribusi DLHK	38,535.00
	721/lainnya/2021	denda ret. dlhk	38,535.00
	722/lainnya/2021	denda retribusi DLHK	38,535.00
	723/lainnya/2021	Denda Retribusi DLHK	38,535.00
22-Jul-2021	727/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,190,511.00
23-Jul-2021	728/lainnya/2021	Pengembalian honor bendahara an. MAN 1 Sungailiat	2,400,000.00
25-Jul-2021	730/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	352,000.00
29-Jul-2021	731/lainnya/2021	Penerimaan an. Wisata karya anak negeri	3,920,000.00
03-Aug-2021	732/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	17,830,500.00
06-Aug-2021	733/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	532,500.00
12-Aug-2021	747/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	318,560.00
16-Aug-2021	750/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	7,409,000.00
18-Aug-2021	751/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	585,000.00
19-Aug-2021	753/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	18,160.00
	754/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	18,160.00
	755/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	18,160.00
26-Aug-2021	756/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,066,400.00
	759/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,060,485.00
31-Aug-2021	760/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,000,000.00
02-Sep-2021	761/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	9,036,000.00
	762/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	2,100,000.00
	763/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	9,580.00
	764/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	12,200.00
07-Sep-2021	770/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,000,000.00
09-Sep-2021	752/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	50,018,050.00
10-Sep-2021	775/lainnya/2021	Penerimaan Sewa Gedung Kantor PT. Jamkrida	12,115,000.00
14-Sep-2021	767/lainnya/2021	Pengembalian belanja ATK DPU	1,500.00
14-Sep-2021	776/lainnya/2021	Pengembalian Belanja ATK DPU	1,500.00
	777/lainnya/2021	Pengembalian Belanja ATK DPU	1,500.00
	778/lainnya/2021	pengembalian Belanja ATK DPU	1,500.00
	779/lainnya/2021	Pengembalian belanja ATK DPU	1,500.00
15-Sep-2021	791/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	3,170,200.00

21-Sep-2021	800/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	3,790,000.00
23-Sep-2021	803/lainnya/2021	Denda Sewa Ret. Bakuda	800,000.00
29-Sep-2021	807/lainnya/2021	penerimaan lainnya	1,167,745.00
	808/lainnya/2021	penerimaan lainnya	534,500.00
05-Oct-2021	814/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	5,502,100.00
07-Oct-2021	816/Lainnya/2021	Pengembalian gaji	4,322,900.00
08-Oct-2021	822/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	71,280.00
	823/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	206,940.00
11-Oct-2021	810/lainnya/2021	Pengembalian Dana Hibah	66,950,000.00
	811/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	5,260,000.00
12-Oct-2021	825/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,116,000.00
	826/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	115,605.00
15-Oct-2021	827/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	56.00
	828/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	19,160.00
18-Oct-2021	829/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	100,000.00
	830/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	128,500.00
21-Oct-2021	835/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	181,860.00
	836/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	73,640,000.00
22-Oct-2021	848/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,000.00
	850/lainnya/2021	Penerimaan an. CV. Galaxi Bima Sakti	2,401,120.00
25-Oct-2021	852/lainnya/2021	Penerimaan Pengembalian dana hibah	116,808,000.00
28-Oct-2021	900/lainnya/2021	Pengembalian gaji bulan September dan Oktober 2021	7,604,800.00
29-Oct-2021	905/lainnya/2021	penerimaan an. CV. Nazco	1,000,000.00
	907/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	114,044.00
	908/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	57,022.00
29-Oct-2021	911/lainnya/2021	pengembalian TPP bulan september	2,227,000.00
01-Nov-2021	1001/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	21,780.00
	101/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	19,810,624.00
02-Nov-2021	1004/lainnya/2021	penerimaan lainnya	199,000.00
03-Nov-2021	1014/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	12,200.00
	1015/lainnya/2021	Pengembalian belanja	50,000.00
	1016/lainnya/2021	Pengembalian belanja	4,211,863.86
	1037/lainnya/2021	pengembalian belanja	5,913,635.00
	1038/lainnya/2021	pengembalian belanja	9,620,125.00
04-Nov-2021	1051/lainnya/2021	pengembalian dana bansos an. Silvia Fronika	2,000,000.00
	1052/lainnya/2021	Denda sewa kantin Setda	496,800.00
	1053/lainnya/2021	denda ret. DLHK	57,022.00
06-Nov-2021	1055/lainnya/2021	penerimaan lainnya	815,081.00
09-Nov-2021	1000/lainnya/2021	pengembalian belanja hibah	1,350,000.00
11-Nov-2021	1100/lainnya/2021	Pengembalian belanja dana hibah an. Yayasan Al Falah Bangka	20,160,000.00
12-Nov-2021	1101/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	159,605.00
15-Nov-2021	1102/lainnya/2021	penerimaan lainnya	13,712.00
16-Nov-2021	1060/lainnya/2021	Lebih Setor samsat Pangkalpinang	1,371,000.00
	1036/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	141,015.00
	1048/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	50,000.00
	1057/lainnya/2021	penerimaan an. Herlina	1,145,500.00
20-Nov-2021	446/lainnya/2021	penerimaan lainnya	600,000.00
22-Nov-2021	417/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	3,984,000.00
	418/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	2,169,747.86
	444/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	253,519.00
24-Nov-2021	416/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,062,450.00
25-Nov-2021	435/lainnya/2021	Denda Ret. DKP	129,600.00
26-Nov-2021	436/lainnya/2021	Pengembalian Gaji an. Tiur Simamora	1,145,402.00
30-Nov-2021	333/lainnya/2021	Pengembalian gaji an. Yeni Dwi Anggraini	3,138,600.00
	437/lainnya/2021	Pengembalian kelebihan Belanja ATK	4,000.00
02-Dec-2021	200/lainnya/2021	Pengembalian Gaji Bulan Desember 2021 an. Yeti Meity	4,378,100.00
02-Dec-2021	300/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	110,964.00
03-Dec-2021	110/lainnya/2021	Pengembalian Biaya Rapid test an. Siska Jayanti	900,000.00
07-Dec-2021	106/lainnya/	Lebih bayar an. CV. Anugerah Putra	1,000,000.00
	106/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	8,900.00
08-Dec-2021	97/lainnya/2021	denda keterlambatan sewa bus setda	180,000.00
	98/lainnya/2021	Denda Keterlambatan Sewa Bus Setda	180,000.00
	51/lainnya/2021	Penerimaan pengembalian beasiswa	180,000.00
	52/lainnya/2021	Pengembalian tunjangan an. Widiya Lestari	610,000.00
	53/lainnya/2021	Penerimaan pengembalian uang santunan veteran ideologi	2,375,000.00
14-Dec-2021	103/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	787,200.00
16-Dec-2021	100/lainnya/2021	Pengembalian dari SMK Yapensu Sungailiat	82,315,500.00
18-Dec-2021	49/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	2,800,000.00
21-Dec-2021	55/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	52,600,000.00
	56/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,600,000.00
	58/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	58,342.00
	59/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	128,994.00
22-Dec-2021	61/lainnya/2021	Setoran an. CV. Bangun Jaya	6,580,196.10
	62/lainnya/2021	Setoran an. CV. Bangun Jaya	6,028,601.00
	63/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	500,000.00
24-Dec-2021	71/lainnya/2021	Pengembalian Uang Beasiswa an. Eliza Safitri	671,000.00
	75/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,425,000.00
	76/lainnya/2021	Penerimaan pengembalian dari SMK Yaperbel 2	80,428,000.00
	77/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	2,181,415.00
27-Dec-2021	157/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	288,000.00
	82/lainnya/2021	Pengembalian Dana Hibah an. SMA Setia Budi Sungailiat	800,000.00
	85/lainnya/2021	Pengembalian Biaya Perjadin Keg PISA GTKS SMA	43,314,203.00
	87/lainnya/2021	pengembalian uang Harian Keg PISA GTKS SMA	13,050,000.00
	88/lainnya/2021	Pengembalian Honor keg PISA GTKS SMA	52,050,000.00
	89/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,012,388.00
	90/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	142,775.00
27-Dec-2021	91/lainnya/2021	Pengembalian Gaji GTT SMAN 1 Pangkalpinang	5,600,000.00
28-Dec-2021	120/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	18,414,000.00
	123/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	34,450.00

	125/lainnya/2021	Sewa Pakai Alat Grader	5,400,000.00
	126/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,825,000.00
	92/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	30,585,750.00
	93/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	1,835,520.00
	94/lainnya/2021	Penerimaan an. Dewi Sumiati	400,000.00
	95/lainnya/2021	Penerimaan an. Siskha Jayanti Biaya Test Rapid	1,200,000.00
29-Dec-2021	127/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	28,342,400.00
	128/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,007,000.00
	129/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	186,313.00
	130/lainnya/2021	penerimaan lainnya	500,000.00
	131/lainnya/2021	penerimaan lainnya	2,250,000.00
	132/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	4,000,000.00
	133/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	28,740.00
	134/lainnya/2021	Denda ret. DLHK	130,680.00
	135/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	24,400.00
	136/lainnya/2021	Denda Ret. DLHK	9,580.00
	137/lainnya/2021	Denda Ret. Lainnya	110,964.00
	138/lainnya/2021	Pengembalian By Perjadin	9,001,000.00
	139/lainnya/2021	Pengembalian By Perjadin	7,400,000.00
	140/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,200,000.00
	141/lainnya/2021	Pengembalian Beasiswa	2,106,000.00
	143/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	872,686.00
30-Dec-2021	08/salahtf/2021	Jurnal RTGS Ke Pemkot PKP	
	144/lainnya/2021	Pengembalian gaji an. Sutrisno	2,800,000.00
	145/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	500,000.00
	146/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	365,000.00
	147/lainnya/2021	Pengembalian Kwarda Pramuka	15,972,858.00
	148/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. SMA Setia Budi Sungailiat	200,000.00
	149/laiinya/2021	Pengembalian dari SMAN 2 Sungai Selan	2,272,691.00
	150/lainnya/2021	Pengembalian	840,000.00
	151/lainnya/2021	Pengembalian an. Dewan Pendidikan Babel	8,135,570.00
30-Dec-2021	152/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. UBB	68,652,998.00
	153/lainnya/2021	Peerimaan Lainnya	7,096,600.00
31-Dec-2021	154/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. PMI Babel	626,419,936.00
	155/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	3,287,800.00
	156/lainnya/2021	Pengembalian Honorarium Disnaker	8,700,000.00
	160/lainnya/2021	Pengembalian Biro Umum Setda	400,000.00
	161/lainnya/2021	Penerimaan Biro Umum Setda	2,630,000.00
	162/lainnya/2021	Penerimaan Lainnya	2,550,000.00
	164/lainnya/2021	Pengembalian Biro Umum Setda	21,367,263.00
	165/lainnya/2021	Pengembalian Dana Hibah an. KPID Babel	1,000,996.00
	166/lainnya/2021	Penerimaan an. Paruyanti	3,963.00
	167/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	150,000.00
	168/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	814,000.00
	169/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	206,893.00
	325/lainnya/2021	Pengembalian Biro Umum Setda	25,596,612.00
	342/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. MUI Babel	10,648,500.00
	343/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	426,500.00
	344/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	3,932,000.00
	345/lainnya/2021	Pengembalian dari SMKN 4 PKP	809,500.00
	346/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	1,410,870.00
	347/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. KNPI Babel	346,100.00
	348/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	100.00
	349/lainnya/2021	Pengembalian dana hibah an. Basnaz Babel	91,273,325.00
	350/lainnya/2021	Penerimaan lainnya	906,700.00
	352/lainnya/2021	Pengembalian Dinas Sosial dan PMD	403,500.00
TOTAL			**2,044,671,187.05**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BANTUAN SOSIAL *BY NAME BY ADDRESS*
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXXII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

TANGGAL	NO. SP2D	URAIAN	JUMLAH
24/09/2021	957/2347/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. DEWANTARA (orang tua dari Mulla Ali Qori Pelajar SMAN2 Sungai Selan) beralamat di Desa Simpang Katis Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 30/6/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	2,575,000.00
24/09/2021	957/2353/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. MUHAMMAD IQBAL Mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang beralamat di Desa Perlang Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 17 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/2021	7,000,000.00
24/09/2021	957/2354/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. ERWIN (orang tua dari Dimas Prasetya Pelajar SMPN 4 Sp. Katis) yang beralamat di Desa Terak Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 31 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	4,000,000.00
24/09/2021	957/2355/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. HARYADI (orang tua Laurensius Patrick Mahasiswa Univ.pendidikan Ganesha Bali) beralamat di Desa Mangkol Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 31/7/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	10,000,000.00
27/09/2021	957/2361/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. AKMAL NUR FUAD Mahasiswa UBB yang beralamat di Dusun Marga Mulya Kab. Belitung Timur Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 30 Juli 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	5,000,000.00
04/10/2021	957/2441/BO-BP/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SUDIRIANSYAH Mahasiswa Universitas Terbuka Bangka Belitung yang beralamat di Dusun Tanjung Kab. Bangka Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 26 Juli 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/2021	7,000,000.00
04/10/2021	957/2442/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. RAIHAN RAMADHAN Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang yang beralamat di Desa Celuak Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 25 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/2021	10,000,000.00
04/10/2021	957/2443/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. RIKA NOPITASARI Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Babel beralamat di Jln.Merdeka Desa Celuak Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 30/7/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
01/10/2021	957/2444/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. TRIYANI Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang beralamat di Desa Kretak Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 02 Juni 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/2021	7,000,000.00
04/10/2021	957/2445/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SELLA NOVITA SARI Mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang beralamat di Desa Cambai Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 31 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/2021	7,000,000.00
01/10/2021	957/2446/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. RATNA ANJANI Mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung yang beralamat di Desa Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 27 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
01/10/2021	957/2447/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. ELISA SAFITRI Mahasiswa IAIN SAS BABEL yang beralamat di Desa Sungai Selan Atas Kab. Bangka Tengah Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 27 Mei 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
01/10/2021	957/2456/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. DAEYANTI Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Babel beralamat di Simpang Kerakas Ds Lampur Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 19/5/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
04/10/2021	957/2457/BO-H/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri.Agus Irawati (Orang Tua dari Dela Safitri,Mahasiswi UT Pkp) Desa Lampur Kab.Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 21/05/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
04/10/2021	957/2461/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. SOPIAH ROHMAH Mahasiswi Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beralamat di Desa Zed Kab. Bangka Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 26/7/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	10,000,000.00
05/10/2021	957/2472/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kpd Sdr.BACHTIAR (org tua dr Muhammad Al Farizi, Ponpes Nurul Falah Air Mesu) beralamat di Sinar Baru Sungailiat Kab.Bangka Berdsrkn Surat Permohonan Pencairan tgl 27/8/2021&SK Gub Kep.Bangka Belitung No.188.44/230/II tgl 23/3/21	4,650,000.00
05/10/2021	957/2473/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. SILVIA FRONIKA Mahasiswi Universitas Terbuka Babel beralamat di Jln. Sisingamangaraja Air Ruai Kab. Bangka Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 24/8/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
05/10/2021	957/2474//BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. KASIDAH (orang tua dari Rima Melati Mahasiswa Politeknik Kesehatan Pkp) yang beralamat di Desa Kerantai Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 30 Juni 2021 dan SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/03/21	7,000,000.00

05/10/2021	957/2475/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri.RIKA LESTIN Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Beralamat di Desa Kretak Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 09/09/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
11/10/2021	957/2476/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri.NURUL LUTHFI AULIA Mahasiswi Univ Pendidikan Indonesia beralamat di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 28/5/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	10,000,000.00
07/10/2021	957/2525/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. Ria Oktari Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Babel beralamat di Desa Kretak Kec. Sungaiselan Kab. Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 18/5/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
18/10/2021	957/2616/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SANUSI (orang tua dr Ahmanabil Ponpes Daarul Abror) beralamat di Desa Pinang Sebatang Kab.Bateng Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 01/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	5,000,000.00
25/10/2021	957/2678/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. Sumita (Mahasiswi Universitas PGRI Palembang) beralamat di Teluk Limau Parittiga Kab. Bangka Barat Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 20/9/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	10,000,000.00
25/10/2021	957/2679/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. Hasmar Pulungan (orang tua dr Al Malik Pulungan SMAN 1 Pemali) beralamat di Jln.Asoka Perumnas Pemali Kab.Bangka Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 31/5/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	2,390,000.00
29/10/2021	957/2872/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. Rini Saraswati (Orangtua dari Thesya Reza Aprilia,Mahasiswi STIKES Permata Nusantara Sungailiat) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 21/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
29/10/2021	957/2873/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SYAIFUL (Orangtua dari Nila Ainun Fitria,pelajar Madrasah Tsanawiyah Yayasan Sabiilul Muhtadin Jada Bahrin) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 21/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	3,550,000.00
29/10/2021	957/2874/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. DIA RIAWATI (Pelajar SMKN 1 Payung) beralamat kecamatan Airgegas Kab.Bangka Selatan Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 01/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	2,000,000.00
29/10/2021	957/2875/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. ANNISA PRITAMA (Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 18/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	4,500,000.00
29/10/2021	957/2876/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SOPIAN (Orangtua dari Sintia Melita,Mahasiswi Univ.Muhammadiyah Bangka Belitung) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 18/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
29/10/2021	957/2877/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. Rizki Pilayati (Mahasiswi Stikes Citra Delima Pangkalpinang) beralamat di Desa Simpang Yul Kab. Bangka Barat Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 07/6/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
02/11/2021	957/2984/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdri. NORA CANTIKA (Mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 19/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tgl 23/3/2021	7,000,000.00
09/11/2021	957/3058/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. TRIYANDI (Orangtua dari Muhammad Fakhri Kanz Ramdhani,Pelajar YPAC Pangkalpinang) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 28/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tanggal 23 Maret 2021	6,420,000.00
22/11/2021	957/3157/BO-BS/2021	Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Sdr. SALMA NABILA (Pelajar SMKN 1 Payung) beralamat Desa Air Bara Kecamatan Airgegas Kab.Bangka Selatan Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan tgl 01/10/2021 & SK Gub No.188.44/230/II/2021 tanggal 23 Maret 2021	2,000,000.00
03 JUNI 2021	957/0122.a/BO-GUNIHIL/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Bulan Januari s.d Maret	70,500,000.00
29 JULI 2021	957/1605/BO-BS/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Bulan April s.d Juni	70,500,000.00
3 SEPTEMBER 202	957/2087/BO-GU/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu	32,844,000.00
13 OKTOBER 2021	957/2589/BO-BS/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Bulan Juli s.d September SK Gubernur No. 188.44/467/DINSOS/2021 Tanggal 26 April 2021	70,500,000.00
14 DESEMBER 2021	957/3847/BO-BS/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Bulan Oktober s.d Desember berdasarkan SK Gubernur No. 188.44/467/DINSOS/2021 Tanggal 26 April 2021	70,500,000.00
29 DESEMBER 2021	957/4247/BO-BS/2021	Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu uang saku TAGANA berdasarkan SK Kepala Dinas No. 188.4/68.b/DINSOSPMD/2021	15,840,000.00
3 SEPTEMBER 202	957/2087/BO-GU/2021	Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga	24,796,800.00
8 NOVEMBER 202	957/3171/BO-BS/2021	Belanja Bantuan premi Auransi Jaminan sosial Ketanagakerjaan (JKK&JKM) bulan November s.d desember pekerja Informal berdasarkan SK Gubernur No. 188.4/934/DINSOSPMD/2021 tanggal 25 oktober 2021 dan MOU No. 025/TKKSD/DINSOSPMD/2021 tgl 16 September 2021	909,249,600.00
06 DESEMBER 2021	957/3426/BO-GU/2021	Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga	16,531,200.00

14 DESEMBER 2021	957/3846/BO-BS/2021	Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat berdasarkan SPK No. 001/SPK/KUBE/DINSOSPMD/2021 Tgl 06 Desember 2021	195,181,000.00
TOTAL			**1,687,527,600.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DITERIMA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXXIII
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

URAIAN	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN (BANPER)	**13,137,641,910.07**
SMK Negeri 2 Pangkalpinang	3,635,676,716.00
SMK Negeri 4 Pangkalpinang	450,000,000.00
SMK Negeri 5 Pangkalpinang	15,000,000.00
SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	50,000,000.00
SLB Negeri Pangkalpinang	60,000,000.00
SMK Negeri 1 Bakam	2,015,000,000.00
SMK Negeri 1 Kelapa	180,000,000.00
SMA Negeri 1 Simpang Teritip	95,000,000.00
SLB N Koba	50,000,000.00
SMK Negeri 1 Toboali	60,000,000.00
SMA Negeri 1 Simpang Rimba	30,000,000.00
SLB N Toboali	40,000,000.00
SMK Negeri 1 Tanjungpandan	2,354,186,811.07
SMA Negeri 2 Tanjung Pandan	88,375,000.00
SLB Negeri Tanjung Pandan	90,000,000.00
SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	3,749,403,383.00
SLB Negeri Manggar	10,000,000.00
SMK N 1 Sijuk	165,000,000.00
DINAS KESEHATAN	**17,214,624,730.00**
PEndapatan Hibah Obat dari Dirjen Oblik	1,248,200.00
Pendapatan Hibah Obat dari Dirjen Oblik	16,221,000.00
Pendapatan Hibah OBat BAST No Fo.03.02/4/2021	865,149,230.00
Pendapatan Hibah Obat dari Dirjen Oblk	455,000.00
PEndapatan Hibah dari Pusat Obat	11,700,000.00
PEndapatan Hibah dari Dirjen Oblik	3,960,000.00
Pendapatan Hbah BAST No.0045	117,000,000.00
Pendapatan Hbah BAST No.0158 dari Dirjen Oblik	19,800,000.00

KOREKSI BPK ATAS PERSEDIAAN HIBAH RAPID ANTIGEN DARI KEMENKES - PAJE 4	12,365,797,500.00
Pendapatan Hibah Bangunan Puskesmas (Aset Lain-lain) dari Kemenkes RI dijen Bina gizi dan kesehatan Ibu dan Anak	2,148,000,000.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas alat Angkutan (Sepeda Motor) TA 2021	350,196,000.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas alat Angkutan (Kendaraan khusus Promkes) TA 2021	359,473,400.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas Alat Kantor dan Rumah Tangga (Focusing Screen LCD Proyektor, LCD Proyektor/Infocus,DVD Player,Loudspeker) TA 2021	60,630,900.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (Compect Disc Player,Audio Mixing Consule,Alat Studio Lainnya, Microphone/ wireless mic) TA 2021	43,826,200.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas Komputer TA 2021	12,978,900.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas Alat rumah tangga lainnya TA 2021	2,655,400.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas alat Angkutan (Mini Bus (penumpang dibawah 14 orang)) TA 2021	597,900,000.00
Pendapatan Hibah Dari Dirjen Kesmas alat Angkutan (Sepeda Motor) TA 2021	237,633,000.00
UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	**1,181,977,953.00**
Penambahan Aset Tetap Hibah Alat Kedokteran dan Kesehatan 2021	76,216,908.00
Jurnal Penyesuaian SO Hibah Obat, Perbekes, Reagen 2021	981,080,675.00
Jurnal Penyesuaian Hibah Alat Kedokteran dan Kesehatan Semester 2 T.A 2021	124,680,370.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	**1,263,868,500.00**
Hibah Kementerian	45,000,000.00
Hibah kementerian	671,968,500.00
Hibah kementerian	34,450,000.00
Hibah Kementerian	17,900,000.00
Hibah kementerian	2,510,000.00
Hibah Kementerian	492,040,000.00
DINAS PERHUBUNGAN	**4,709,793,000.00**
Hibah	1,154,017,000.00
Hibah	3,555,776,000.00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**754,445,342.00**
Pendapatan Hibah ALAT ANGKUTAN semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	382,078,947.00
Pendapatan Hibah ALAT PERTANIAN semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7,750,000.00

Pendapatan Hibah ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72,138,200.00
Pendapatan Hibah ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14,705,200.00
Pendapatan Hibah KOMPUTER semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	232,470,100.00
Pendapatan Hibah ASET TETAP LAINNYA semester II tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	45,302,895.00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	**2,128,537,946.47**
Hibah Compresor lainnya dari Kementerian	198,870,000.00
Hibah Water Pump dari kementerian 2021	24,795,000.00
Hibah Overhead Crane dari kementerian tahun 2021	61,291,300.00
Hbah Bak pengendapan dari kementerian tahun 2021	4,917,650.00
Hibah Sieve dari kementerian tahun 2021	2,199,500.00
Hibah Perkakas dari kementerian tahun 2021	24,934,800.00
Hibah Controller Flow tahun 2021	102,675,000.00
Hibah Immersion Refrigerating Coil dari kementerian tahun 2021	73,394,400.00
Hibah Power suply lainnya dari kementrian tahun 2021	200,658,450.00
Hibah Refrigator/Freezer dari kementerian tahun 2021	131,305,020.00
Hibah Pressure Control System dari kementerian tahun 2021	24,139,400.00
Hibah Control Panel dari kementerian tahun 2021	50,346,300.00
Hibah cooling Power dari kementerian tahun 2021	69,042,500.00
Hibah electrOMOTor dari kementerian tahun 2021	19,125,450.00
Hibah Hydroseparotor dari kementerian tahun 2021	25,763,000.00
Hibah Agitated Tank Crystalizer dari kementeeian tahun 2021	47,654,400.00
Hibah Jet Pump dari kementerian tahun 2021	17,452,500.00
Hibah Pompa Sand Piper dari kementerian tahun 2021	30,185,000.00
Hibah Cooling Pond dari kementerian tahun 2021	93,744,400.00
Hibah gedung pertokoan koperasi pasar dari kementerian tahun 2021	358,800,000.00
Hibah tugu/ tanda batas administrasi kepemilikan dari kementerian tahun 2021	122,752,800.00
Hibah saluran drainase dari kementerian tahun 2021	5,006,000.00
Hibah bak penyimpanan atau tower air baku dari kementerian tahun 2021	8,346,000.00
Hibah Sumur Gali dari kementrian tahun 2021	14,796,000.00
Hibah pusat pengatur listrik kapasitas besar dari kementerian tahun 2021	45,500,000.00
Hibah Jaringan pipa baja dari kementerian tahun 2021	28,095,000.00
Hibah tanah bangunan pos pengawas dari kabupaten Belitung tahun 2021	10,746,956.47

Hibah tanah PPI Muntok dari Pemkab Bangka Barat tahun	3,500,000.00
Hibah tanah PPI Gantung dari Dinas Perikanan Kab Beltim tahun 2021	70,669,500.00
hibah dari Dinas Perikanan Beltim Pos Pengawas Pulau Nangka berupa tanah tahun 2021	5,250,000.00
Hibah tanah di Pulau Long Beltim tahun 2021	614,900.00
Hibah tanah Pulau Sekunyit Beltim tahun 2021	715,000.00
Hibah sumur bor dari Dinas Perkanan Beltim tahun 2021	22,400,000.00
Hibah jaringan listrik PPI Gantung dari dinas perikanan beltim tahun 2021	175,004,220.00
Hibah Kipasangin dari kantor PPI Manggar dinas perikanan beltim tahun 2021	780,000.00
Hibah Filling Besi/Metal 5 laci dari Dinas Perikanan Beltim tahun 2021	1,472,500.00
Hibah Filling Besi/ Metal 4 laci dari kab beltim tahun 2021	1,945,000.00
Hibah Mesin Penghancur es di PPI Manggar dan PPI Gantung Beltim thaun 2021	49,650,000.00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**3,553,453,490.00**
Jurnal Hibah Instalasi Rooftop 2021	3,553,453,490.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	**4,790,494.00**
Penambahan Aset dari Hibah	4,790,494.00
BADAN KEUANGAN DAERAH	**62,862,667,726.00**
Belanja Hibah PHJD, Tahap ke-1 TA 2021	11,228,820,000.00
Hibah PHJD Tahap ke 2	20,998,109,377.00
Penerimaan Dana Hibah	30,635,738,349.00
TOTAL	**106,811,801,091.54**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG DITERIMA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXXIV
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

(dalam Rp)

URAIAN	JUMLAH
DINAS KESEHATAN	**29,118,000.00**
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Hibah Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain semester 1 2021	29,118,000.00
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	**39,636,200,130.00**
Jurnal Hibah dari Bangka Selatan	39,636,200,130.00
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	**278,781,750.00**
Jurnal penyesuaian Hibah Tanah Kantor Bangunan Pemerintah dari Kabupaten Belitung Timur	217,500,000.00
Jurnal penyesuaian Hibah Hibah Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kec. Dari Kab. Belitung Timur	23,810,000.00
Jurnal penyesuaian Hibah Hibah Jaringan Distribusi Tegangan di Atas 20 KVA Dari Kab. Belitung Timur	19,734,050.00
Jurnal penyesuaian Hibah Hibah Jaringan Distribusi Tegangan di Bawah 1 KVA Dari Kab. Belitung Timur	12,937,700.00
Jurnal penyesuaian Hibah Hibah Lemari Pakaian Dari Kebupaten Belitung Timur (extracomtable)	4,800,000.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	**124,824,000.00**
Hibah	
TOTAL	**40,068,923,880.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAMPIRAN XXXV
Catatan atas Laporan Keuangan 2021

PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN DALAM NEGERI YANG DITERIMA PER SKPD

PER 31 DESEMBER 2021

(dalam Rp)

URAIAN	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN (IPP)	**18,679,143,521.00**
SMK Negeri 1 Pangkalpinang	393,515,751.00
SMK Negeri 2 Pangkalpinang	608,859,088.00
SMK Negeri 3 Pangkalpinang	326,616,000.00
SMK Negeri 4 Pangkalpinang	298,865,000.00
SMK Negeri 5 Pangkalpinang	198,667,798.00
SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	560,738,012.00
SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	314,615,000.00
SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	478,344,803.00
SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	407,915,000.00
SMK Negeri 1 Sungailiat	501,090,000.00
SMK Negeri 2 Sungailiat	262,300,000.00
SMK Negeri 1 Mendo Barat	76,973,500.00
SMK Negeri 1 Belinyu	82,112,000.00
SMK Negeri 1 Bakam	137,050,000.00
SMA Negeri 1 Bakam	127,255,000.00
SMA Negeri 1 Belinyu	222,500,000.00
SMA Negeri 1 Mendobarat	309,665,000.00
SMA Negeri 2 Mendobarat	124,710,000.00
SMA Negeri 1 Merawang	269,190,000.00
SMA Negeri 1 Pemali	405,610,000.00
SMA Negeri 1 Puding Besar	156,880,000.00
SMA Negeri 1 Riau Silip	159,020,000.00
SMA Negeri 1 Sungailiat	441,100,000.00
SMA Negeri 2 Puding Besar	145,945,000.00
SMK Negeri 1 Mentok	390,845,001.00
SMK Negeri 1 Kelapa	211,000,000.00
SMK Negeri 1 Parittiga	424,750,000.00
SMK Negeri 1 Tempilang	182,838,500.00
SMK Negeri 1 Simpang Teritip	114,680,000.00
SMA Negeri 1 Jebus	385,920,000.00
SMA Negeri 1 Kelapa	348,000,000.00
SMA Negeri 1 Muntok	274,480,200.00
SMA Negeri 1 Parit Tiga	195,460,000.00
SMA Negeri 1 Simpang Teritip	263,873,000.00
SMA Negeri 1 Tempilang	149,455,000.00
SMK Negeri 1 Koba	99,615,000.00

SMK Negeri 1 Simpangkatis	90,825,000.00
SMK Negeri 1 Sungaiselan	63,630,000.00
SMA Negeri 1 Koba	240,574,500.00
SMA Negeri 1 Lubukbesar	205,262,868.00
SMA Negeri 1 Namang	187,030,000.00
SMA Negeri 1 Pangkalanbaru	177,915,000.00
SMA Negeri 1 Sungaiselan	180,000,000.00
SMA Negeri 2 Sungaiselan	156,610,000.00
SMK Negeri 1 Payung	143,325,000.00
SMK Negeri 1 Pulau Besar	36,055,000.00
SMK Negeri 1 Airgegas	202,490,000.00
SMA Negeri 1 Air Gegas	61,450,000.00
SMA Negeri 1 Kep. Pongok	61,267,000.00
SMA Negeri 1 Pulau Besar	25,700,000.00
SMA Negeri 1 Simpang Rimba	207,150,000.00
SMK Negeri 1 Tanjungpandan	495,960,000.00
SMK Negeri 2 Tanjungpandan	837,949,350.00
SMK Negeri 3 Tanjungpandan	240,500,000.00
SMK Negeri 1 Badau	210,740,000.00
SMK Negeri 1 Selat Nasik	69,280,000.00
SMA Negeri 1 Membalong	170,750,000.00
SMA Negeri 1 Sijuk	154,797,000.00
SMA Negeri 1 Tanjung Pandan	400,940,000.00
SMA Negeri 2 Tanjung Pandan	371,005,770.00
SLB Negeri Tanjung Pandan	20,000,000.00
SMK Negeri 1 Manggar	264,625,000.00
SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	172,295,000.00
SMK Negeri 1 Dendang	57,586,900.00
SMK Negeri 1 Simpang Renggiang	68,545,000.00
SMA Negeri 1 Damar	175,200,000.00
SMA Negeri 1 Gantung	255,077,480.00
SMA Negeri 1 KelapaKampit	194,350,000.00
SMA Negeri 1 Manggar	357,600,000.00
SMA Negeri 1 Simpangpesak	192,850,000.00
SMK N 1 Sijuk	1,861,954,000.00
SMA Negeri 3 Toboali	17,400,000.00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**4,238,073,300.00**
Jurnal persediaan satgas covid	4,238,073,300.00
TOTAL	**22,917,216,821.00**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI YANG DITERIMA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXXVI
Catatan atas Laporan
Keuangan 2021

(dalam Rp)

URAIAN	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN	**607,075,000.00**
SMK Negeri 1 Kelapa	175,000,000.00
SMA Negeri 1 Kelapa	423,000,000.00
SMA Negeri 1 Belinyu	9,075,000.00
BADAN KEUANGAN DAERAH	**158,000,000.00**
hibah aset lainnya	158,000,000.00
TOTAL	**765,075,000.00**